ANTHONY REID

MENUJU SEJARAH SUMATRA

Antara Indonesia dan Dunia

MENUJU SEJARAH SUMATRA
Antara Indonesia dan Dunia

ANTHONY REID

MENUJU SEJARAH SUMATRA
Antara Indonesia dan Dunia

Jakarta, 2011

Menuju sejarah Sumatra : antara Indonesia dan dunia / Anthony Reid; penerjemah Masri Maris.—Jakarta : Yayasan Pustaka Obor Indonesia; KITLV-Jakarta, 2011

xiv + 433 hlm.: 16 x 24 cm

ISBN 978-979-461-775-5

Judul:
Menuju sejarah Sumatra: antara Indonesia dan dunia
© 2005 Koninklijk Instituut voor Taal-, Land- en Volkenkunde

Judul asli:
An Indonesian frontier: Acehnese and other histories of Sumatra

Hak Cipta dilindungi oleh Undang-Undang
All rights reserved

Diterbitkan pertama kali oleh KITLV & NUS Publishing

Penerjemah: Masri Maris
Desain sampul: Iksaka Banu

Edisi pertama: Januari 2011
YOI: 668.28.31.2010

Yayasan Pustaka Obor Indonesia
Jl. Plaju No. 10
Jakarta 10230
Telepon: 021-31926978, 3920114
Faksimile: 021-31924488
E-mail: yayasan_obor@cbn.net.id
www.obor.or.id

KITLV-Jakarta
Jl. Prapanca Raya 95 A
Jakarta 12150
Telepon: 021-7399501
Faksimile: 021-7399502
E-mail: jkt@kitlv.nl
www.kitlv.nl

Daftar Isi

Peta, Ilustrasi, dan Tabel

Peta

Ilustrasi

Tabel

Ucapan Terima Kasih

Terima kasih saya ucapkan kepada para penerbit berikut ini yang telah mengizinkan saya menerbitkan kembali bab-bab tersebut di bawah ini.

1. "A Portrait of Sumatra", dalam buku petunjuk *Indonesia West: Sumatra, Java, Bali, Lombok,* n.p., Robertson McCarta/Nelles Verlag, 1990, hlm. 61-73. [sebagian besar direvisi]
2. "The Identity of 'Sumatra' in History", dalam *Cultures and Societies of North Sumatra,* ed. Rainer Carle (Berlin: Dietrich Reimer Verlag, 1988).
3. "Inside Out: The Colonial Displacement of Sumatra's Population", dalam *Paper Landscapes,* ed. Peter Boomgaard, Freek Columbijn dan David Henley (Leiden: KITLV Press, 1997), hlm. 61-89.
4. "Sixteenth Century Turkish Influence in Western Indonesia", *JSEAH* 10, 3 (1969): 395-414. [revisi]
5. "Trade and the Problem of Royal Power in Aceh: Three Stages", dalam *Pre-colonial State Systems in Southeast Asia,* ed. Anthony Reid dan Lance Castles (Kuala Lumpur: MBRAS, 1975). [revisi]
6. "Elephants and Water in the Feasting of Seventeenth Century Aceh", *JMBRAS* 62, 2 (1989): 25-44.
7. (bersama Takeshi Ito) "From Harbour Autocracies to Feudal Diffusion in 17th-century Indonesia: The case of Aceh", dalam *Feudalism: Comparative Studies,* ed. Edmund Leach, S.N. Mukherjee and John Ward (Sydney: Sydney Association for Studies in Society and Culture, 1985), hlm. 197-213; dengan izin Dr Ito. [revisi]
8. "The French in Sumatra and the Malay World, 1760-1890", Bijdragen tot de Taal-, Land-, en Volkenkunde [KTTLV, Leiden] 129, ii/iii (1973): 195-238 [revisi]
9. "Early Chinese Migration into North Sumatra", dalam *Studies in the Social History of China and South-East Asia: Essays in memory of Victor Purcell,* ed. Jerome Ch'en and Nicholas Tarling (Cambridge: Cambridge University Press, 1970) hlm. 289-320.

10. "Nineteenth Century Pan-Islam in Indonesia and Malaysia", *JAS* 26, 2 (1967): 267-83. (banyak direvisi)
11. "Merchant Imperialist: W.H. Read and the Dutch Consulate in the Straits Settlements", dalam *Empires, Imperialism and Southeast Asia: Essays in Honour of Nicholas Tarling*, ed. Brook Barrington (Clayton Vic.: Monash Asia Institute, 1997): 49-61. [revisi]
12. "The Japanese Occupation and Rival Indonesia Elites: Northern Sumatra in 1942", *JAS* 35, 1 (Nov. 1975): 49-61. [revisi]
13. "The Birth of the Indonesian Republic in Sumatra", *Indonesia* 12 (Oct. 1971): 21-45. [revisi]
14. "Social revolution—national revolution", *Prisma: The Indonesian Indicator* 23 (Jakarta, Dec. 1981): 64-72. [revisi]
15. "Conflicting Histories: Aceh and Indonesia". Berbagai versi tulisan ini diterbitkan dalam bentuk elektronik dalam Working Papers Series of the Asia Research Institute (Juni 2003, www.ari.nus.edu.sg/wps); dan dalam bentuk buku berjudul *Asian Ethnicities* (akan terbit).

Singkatan

ANU	*Australian National University*
API	Angkatan Pemuda Indonesia
ARA	*Algemene Rijksarchief* (Arsip Nasional Belanda)
BEFEO	*Bulletin de l'Ecole Française d'Extrême-Orient,* Paris
BKI	*Bijdragen tot de Taal-, Land-, en Volkenkunde,* diterbitkan oleh KITLV
BPI	Barisan Pemuda Indonesia
C.O.	*Colonial Office* [dokumen disimpan di *Public Record Office,* London]
COHA	*Cessation of Hostilities Agreement*
D.P.V.	*Deli Planters Vereeniging*
ENI	*Encyclopedie van Nederlandsch Indië*
F.O.	*Foreign Office* [dokumen di simpan di *Public Record Office,* London]
GAM	Gerakan Aceh Merdeka
GERINDO	Gerakan Rakyat Indonesia
I.C.	*Indisch Collectie, Rijksinstituut voor Oorlogsdocumentatie* [National (kemudian *Netherlands*) *Institute for War Documentation*], Amsterdam
IPO	*InlandschePers-Overzicht* atau *Overzicht van de Inlandsche en Maleisch-Chineesche Pers*
ISEAS	*Institute of Southeast Asian Studies,* Singapura
JAS	*Journal of Asian Studies*
JMBRAS	*Journal of the Malaysian Branch, Royal Asiatic Society*
JRAS	*Journal of the Royal Asiatic Society*
JSB	*Jong Sumatranen Bond*
JSEA	*Journal of Southeast Asian History,* Singapura (dilanjutkan sebagai JSEAS)
JSBRAS	*Journal of the Straits Branch, Royal Asiatic Society*
JSEAS	*Journal of Southeast Asian Studies,* Singapura
K.A.	*Koloniaal Archief* (bagian Arsip Kolonial, ARA)
KITLV	*Koninklijk Instituut voor Taal-, Land-, en Volkenkunde,* Leiden
KNI	Komite Nasional Indonesia
Mailr.	*Mailrapporten* (Laporan resmi dari Batavia ke Hague)

M.A.E.	(arsip) *Ministère des Affaires Etrangeres,* Paris
MBRAS	*Malaysian Branch, Royal Asiatic Society*
MHSI	*Monumentum Historicum Societatis Iesu*
NHM	*Nederlands Handel Maatschappij*
Mr.	*Meester in de Rechten* (titel Belanda untuk lulusan fakultas hukum)
MvO	*Memorie van Overgave* (timbang terima jabatan)
NICA	*Netherlands Indies* Civil Administration
N.I.P.	*Nationale Indische Partij*
OUP	*Oxford University Press*
Pesindo	Pemuda Sosialis Indonesia
PPKI	Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia
PNI	Partai Nasional Indonesia
PRI	Pemuda Republik Indonesia
PRO	*Public Record Office,* London
PUSA	Persatuan Ulama Seluruh Aceh
PARTINDO	Partai Indonesia
PKI	Partai Komunis Indonesia
PNI	Partai Nasionalis Indonesia
SETIA	Sarikat Tani Indonesia
S.M.E.	[arsip] *Société des Missions Etrangeres de Paris*
SSFR	*Straits Settlements Factory Records*
SSGG	*Straits Settlements Government Gazette*
SSLCP	*Straits Settlements Legislative Council Proceedings*
SSLCR	*Straits Settlements Labour Commission Report* (Singapura, 1890)
T.	Teuku (gelar *ulèëbalang* Aceh)
T. A. G.	*Tijdschrift van het Aardrijkskundig Genootschap*
TBG	*Tijdschrift voor Indische Taal-, Land-, en Volkenkunde,* diterbitkan oleh *Bataviaasch Genootschap,* Batavia
TKR	Tentara Keamanan Rakyat
TOEM	*Tarihi Osmani Encümeni Mecmuasi* (Istanbul)
VBG	*Verhandelingen van het Bataviaasch Genootschap* (BG *Proceedings)*
VKI	*Verhandelingen van het Koninklik Instituut* (KITLV *Proceedings)*
VOC	*Verenigde Oost-Indische Compagnie*
WO	*War Office* (dokumen di PRO, London)

Prakata

SUMATRA adalah sebuah pulau yang sangat luas dan belum banyak diteliti, dan masih menanti sejarawannya. Peranan penting pulau itu dalam sejarah Samudra India dan Asia Tenggara tidak ada hubungannya dengan karya-karya serius berjumlah sangat kecil mengenai sejarahnya. Khususnya, jarang sekali ada upaya untuk memaparkan sejarah itu dalam suatu kesatuan yang utuh. Sulitnya jalan untuk menerobos masuk ke pedalaman pulau itu, dan luar biasa banyaknya kelompok suku-politik yang membentuk penduduknya yang berjumlah 43 juta orang (tahun 2000), mematahkan semangat hampir semua orang untuk mencoba melakukan penelitian ini. William Marsden menggunakan standar yang sangat tinggi ketika menulis bukunya *History of Sumatra* pada 1783, dan boleh dikatakan tidak ada seorang pun pernah mencoba mengulangi apa yang dilakukan Marsden. Meski ada sejumlah kecil tulisan-tulisan moderen buah tangan orang Belanda, Inggris dan Indonesia, yang mencoba melakukan tinjauan etnografia atas pulau itu, sejarawan-sejarawan terbaik yang menoleh ke pulau itu umumnya memusatkan perhatian ke bagian-bagian wilayah tertentu atau suku bangsa tertentu.

Buku ini bukan sejarah yang runut dan berimbang yang patut dimiliki oleh pulau itu, tetapi kumpulan hasil penelitian yang pernah saya lakukan mengenai berbagai aspek dari sejarah pulau itu selama empat puluh tahun hingga sekarang. Semua bab, kecuali bab terakhir, sudah pernah diterbitkan sebelumnya. Aceh paling banyak diliput, dengan empat bab sepenuhnya membahas tentang Aceh, dan empat bab lagi yang banyak sekali menyangkut Aceh. Alasannya mengapa demikian ialah menonjolnya peranan politik Aceh pada awal periode moderen, dan posisinya yang menentukan bagi hidup mati proyek Indonesia hari ini, namun penduduk Aceh hanya sepersepuluh dari penduduk Sumatra, dan boleh dikatakan paling tidak "mewakili yang lain". Sumatra Selatan secara keseluruhan sedikit sekali dibahas. Empat bab (1-3 dan 13) mencoba melihat pulau itu sebagai suatu kesatuan, tetapi ini hanyalah tahap kecil pertama dari tugas penelitian yang sangat menantang itu.

Selama 40 tahun saya berkecimpung dalam sejarah Sumatra, pulau itu telah banyak berubah seperti halnya saya, yang juga sudah banyak berubah. Pada tahun 1960-an pulau itu masih menduduki tempat yang rapuh dalam Republik Indonesia, infrastruktur pengangkutannya morat marit, dan banyak bagian-bagiannya yang

sangat tidak suka pada apa yang telah dilakukan pemerintah Indonesia atas alamnya yang kaya raya itu. Di bawah pemerintahan Suharto pulau itu secara keseluruhan cukup makmur. Penduduknya makin banyak, dan dapat dijangkau dari dan terikat pada Jakarta oleh jaringan jalur-jalur angkutan bis, penerbangan setiap hari, lembaga-lembaga birokrasi dan sekolah-sekolah. Kecuali Aceh, kedudukan Sumatra di dalam sebuah negara kesatuan republik tampaknya sudah lebih kokoh dibandingkan dengan sebelumnya.

Kekecualian ini tidak diketahui umum sejak 1967 ketika saya sering berkunjung ke Sumatra. Meski Hasan Tiro mengumumkan kemerdekaan Aceh dari Indonesia pada 1976, dan sebuah gerakan gerilya yang efektif pada 1989-91 baru dapat ditangkal melalui teror kekerasan oleh pemerintah, kunjungan-kunjungan saya yang agak jarang pada waktu itu (1981, 1988, 1995) sama sekali tidak memaksa saya sedikitpun untuk meninjau kembali asumsi-asumsi saya. Selama periode saya melakukan penelitian atas Aceh saya pikir saya sependapat dengan pandangan teman-teman dan kontak-kontak saya orang Aceh bahwa Aceh bagian dari Indonesia, meski bagian yang resah dan banyak didera masalah. Keadaan ini berubah dengan cepat pada 1998-9, ketika tumbangnya Suharto memungkinkan pers yang bebas memberitakan kekejaman-kekejaman pihak militer, dan referendum Timor Timur membuka kemungkinan-kemungkinan yang sangat sedikit terbetik dalam pikiran orang Aceh sebelumnya. Kunjungan-kunjungan singkat pada 2000 dan 2003 memaksa saya mempertimbangkan kembali asumsi-asumsi saya mengenai masa depan Aceh. Saya telah menambahkan sebuah bab akhir untuk mencoba menjelaskan mengapa banyak orang Aceh tidak lagi merasa diri mereka orang Indonesia, dan yang menempatkan peristiwa-peristiwa 1945 dalam perspektif yang agak berbeda.

Saya sudah menelaah kembali semua tulisan yang membentuk buku ini, tetapi berbeda dengan perkiraan saya, sedikit sekali revisi yang harus saya lakukan. Sejumlah penelitian sejarah yang menonjol muncul pada tahun 1990-an, setelah sebagian besar dari tulisan-tulisan ini telah selesai ditulis. Tulisan-tulisan Barbara Andaya tentang Palembang dan Jambi, Mary Somers tentang Bangka, Joel Kahn dan Jane Drakard tentang Minangkabau, Daniel Perret tentang wilayah timur laut; Rita Kipp tentang Batak-Karo, John Bowen tentang Gayo, Jorge Alves dan Lee Kam Hing tentang Aceh dan Timothy Barnard tentang Siak, patut disebutkan di sini.[1] Etnografi mengenai Sumatra sudah semakin kaya, terutama tentang Minangkabau, Batak, Pasemah dan Kerinci. Buku-buku saya sendiri mengenai Revolusi Sosial 1945-6 (1979) dan Asia Tenggara pada periode awal moderen (1988-93) terbit setelah sejumlah tulisan-tulisan di sini. Meski pada tulisan-tulisan yang lebih baru ini telah saya tambahkan rujukan-rujukan, dan semua bab saya sunting untuk memastikan kesatuan yang utuh, namun

tidaklah tepat rasanya untuk mengubah sepenuhnya perspektif bab-bab dalam buku ini, kecuali bab pertama dan bab sepuluh.

Terima kasih saya ucapkan kepada Connie Teo, atas bantuannya yang sangat besar pada tahap-tahap akhir penyusunan buku ini, dan kepada Tan Ying Ying, yang membimbing saya mengarungi berbagai masalah yang ditemui dalam menuangkan naskah ini ke dalam bentuk digital. Helen tidak ada duanya, tidak saja karena langsung terjun bekerja keras mengawal penyusunan buku ini, tetapi lebih dari itu juga karena telah menuntun saya hingga saya tetap berjalan di atas rel selama 40 tahun.

1

Pendahuluan: Sumatra sebagai Perbatasan

Sumatra adalah sebuah perbatasan. Bagi peradaban-peradaban lama yang berada di sekeliling Samudra India, pulau itu selalu merupakan sebuah pulau kaya raya penuh rahasia di timur – Suvarna-dvipa, tanah emas pengawal gerbang menuju semua harta Asia Tenggara. Bagi Indonesia pulau itu adalah tanah peluang, dengan sumber alam yang berlimpah dan potensi ekonomi yang besar. Bagi pengunjung dari negeri asing, pulau itu menawarkan keindahan alam, budaya beraneka ragam, hutan rimba hunian gajah, tapir, harimau, dan badak, kemudahan yang terus bertambah dan hal-hal baru yang menakjubkan. Karena hampir tidak pernah sepanjang sejarah mereka berada di bawah bimbingan kerajaan-kerajaan yang kuat, orang Sumatra tidak segan mengakui bahwa mereka kurang berbudaya dibandingkan dengan orang Jawa kelas atas, tetapi dengan cepat mereka akan menambahkan bahwa mereka lebih egaliter, lebih berjiwa wirausaha, dan mandiri.

Pulau keenam terbesar di dunia, lebih dari dua kali lebih besar daripada Inggris atau Honshu, Sumatra baru-baru ini saja, sejak 10.000 tahun yang lalu, terpisah dari daratan Asia (dan Jawa dan Borneo). Di bagian barat pulau itu didominasi oleh barisan pegunungan, Bukit Barisan, yang terbentuk akibat perbenturan lempeng India yang bergerak ke utara dengan daratan Asia sejak 60 juta tahun yang lalu. Gesekan-gesekan antara lempeng-lempeng ini terus menimbulkan goncangan-goncangan geologis di sepanjang pegunungan itu, termasuk gempa bumi dan letusan gunung berapi. Tujuh puluh lima ribu tahun yang lalu, danau Toba terbentuk di reruntuhan sebuah letusan dahsyat yang memuntahkan lapisan debu yang sangat tebal dan masih dapat dilihat hingga kini ke seluruh Sumatra dan Semenanjung, sampai ke Sri Lanka. Di ujung satu lagi pulau itu, pada 1883, Krakatau meletus, letusan terbesar di dunia modern, yang merenggut nyawa 36.000 orang.

Wilayah Sumatra yang luas dan bentuk tanahnya yang beragam mengguratkan wajah yang sangat khas bagi pulau itu, yakni wajah buas dan terbuka, yang sangat berbeda dengan wajah Jawa dan Bali, yang sudah sejak zaman dahulu menjinakkan hutan belantara masing-masing, membangun jalur perhubungan antar-desa yang efisien, dan mempersatukan wilayah-wilayah berpenduduk padat ke dalam kesatuan-kesatuan bahasa-politik yang lebih besar. Sebaliknya, Sumatra baru berkenalan dengan persatuan politik setelah ditaklukkan oleh Belanda, pada awal abad ini. Ini akan dibahas dalam bab berikutnya.

Meski lokasinya yang strategis, sungai-sungainya yang besar dan ekspornya yang bernilai tinggi sebenarnya dapat menjadi landasan bagi kelahiran dan perkembangan kerajaan-kerajaan yang kuat, namun tanah rawanya di timur dan barisan pegunungannya di barat memberi perlindungan kepada gugus-gugus penduduk pedalaman yang mengembangkan peradaban masing-masing tanpa dipengaruhi oleh dunia luar. Meski memberi Indonesia bahasa nasional, agamanya (Islam) dan sastra modernnya, Sumatra karena itu tetap mempertahankan sejumlah bahasa yang asing satu dari yang lain dan beragam agama dan tata budaya miliknya sendiri.

Sriwijaya

Sumatra mungkin Taprobana, nama yang diberikan Ptolemius untuk pulau itu; yang pasti pulau itu bagian yang penting (meski tidak terlalu jelas) dari "tanah emas" (Suwarnabumi) dalam kisah-kisah kepahlawanan India dan "Jawah" para kelana Islam. Seperti halnya dengan penduduk pulau itu, sebagian besar pelaut asing tidak menyadari bahwa pulau dengan banyak raja ini, yang dipisahkan dari Jawa dan Malaya oleh sebuah selat yang sangat sempit, memiliki kesatuan tersendiri. Namun, pelaut asing di zaman lampau tahu mengenai raja-raja yang menguasai ekspor emas dan selat-selat yang vital—selat Sunda dan selat Malaka. Tulisan-tulisan asal Cina berbicara tentang kerajaan-kerajaan di selatan Sumatra yang tidak terlalu jelas bentuknya; kerajaan-kerajaan itu mengalami kemunduran dengan munculnya Sriwijaya pada abad ke-7 Sesudah Masehi.

Sejumlah prasasti Sriwijaya yang ditemukan beberapa kilometer dari kota Palembang sekarang memberikan petunjuk paling awal mengenai penggunaan bahasa Melayu pada periode 683-6 Sesudah Masehi. Prasasti itu bercerita tentang seorang raja Buddha yang bertanggung jawab atas kehidupan rohani dan jasmani rakyatnya dan mewajibkan mereka mengucapkan sumpah

setia kepadanya. Ibukota Sriwijaya merupakan pusat agama Buddha yang penting. Meski terus menguasai selat Malaka sampai abad ke-11, Sriwijaya tidak meninggalkan candi-candi besar seperti candi Borobudur di Jawa. Candi-candi dari batu yang pasti pernah didirikannya sudah hancur di Palembang, tetapi beberapa bertahan lebih lama di wilayah yang tampaknya merupakan ibukota Sriwijaya setelah 1080 di Muara Jambi, di sebuah sungai besar berikutnya di utara, dan hingga di hulu sungai Kampar di Muara Takus. Selain itu, kekuasaan pusat tidak terasa dalam kalangan penduduk pedalaman yang hidup terpencar-pencar, karena lebih dipusatkan untuk memperkokoh kekuasaan atas pelabuhan-pelabuhan internasional di Sumatra timur dan Semenanjung Malaya, dan di banyak pelabuhan ini banyak ditemukan prasasti dan patung Buddha terkubur. Ibukotanya di Palembang dijarah dalam sebuah serangan dari India selatan pada 1025, dan selama abad berikutnya pusat-pusat perdagangan merdeka bermunculan di Jawa, Sumatra utara, dan Malaya.

Ahli waris utama kejayaan Sriwijaya adalah Minangkabau, daerah berpenduduk padat penghasil beras dan emas di pegunungan bagian tengah. Setelah penaklukan pelabuhan-pelabuhan utama di pantai timur pada abad ke-13 oleh Jawa, seorang pangeran yang mengaku keturunan Majapahit dan Sriwijaya mendirikan kerajaannya sendiri dekat hulu Sungai Indragiri dan Sungai Batang Hari, dan menguasai emas Minangkabau. Raja Buddha (Tantrik) ini, Adityawarman (1356-75), banyak meninggalkan patung dan prasasti yang melukiskan dia sebagai penguasa sebagian besar Sumatra tengah (Gambar 1).

Islam

Pantai utara dan barat Sumatra sudah lama merupakan wilayah politik bertekanan rendah. Sungai-sungainya tidak dapat dilayari, pelabuhan-pelabuhannya rawan serangan angin muson barat laut, penduduknya konon tidak bernegara, buas, dan pemakan daging manusia. Daya tarik utama daerah barat laut ini ialah lokasinya bagi para pedagang Samudra India, dan kapur barus yang dipanen dari hutan di bukit-bukit di atas Barus dan Sibolga.

Di sepanjang pesisir yang panjang antara Barus dan kota Medan sekarang terdapat banyak pelabuhan sungai kecil lainnya. Di salah satu pelabuhan sungai ini Marco Polo menunggu musim angin muson pada 1292, sebagai bagian dari ekspedisi yang membawa seorang putri dari Maharaja Cina ke Persia. Ia mengisahkan bahwa ekspedisinya mendarat di situ dan "karena takut pada penduduk yang menjijikkan dan kasar ini, yang membunuh orang untuk

Gambar 1 Patung Bhairawa, kemungkinan mencerminkan wajah Raja Adityawarman dari abad ke-14, ditemukan di wilayah Minangkabau dekat hulu Batang Hari.

dimakan, kami menggali parit besar di sekeliling perkemahan kami dan di dalam benteng ini kami tinggal selama lima bulan". Meski tidak suka dengan penduduk tempat itu, Polo dan anak buahnya tinggal dan berdagang dengan mereka cukup banyak sehingga dapat memberi Eropa kisahnya yang pertama mengenai sagu, arak, badak, dan kanibalisme itu sendiri. Ini terjadi di pelabuhan Samudra (Sansekerta, berarti "laut"), atau Sumatra (dekat kota Lhokseumawe sekarang), yang selama dua abad kemudian memainkan peranan yang cukup penting sehingga namanya menjadi nama untuk seluruh pulau itu, paling tidak bagi orang Arab dan orang Eropa yang datang dari barat. Pada masa Polo, pelabuhan itu masih berupa sebuah kerajaan kecil penganut animisme. Namun dia melaporkan bahwa kerajaan yang bertetangga dengan pelabuhan itu, Perlak (dekat kota Langsa sekarang), sudah menganut agama Islam, "sebagai akibat hubungan dengan para pedagang Sarasen yang selalu singgah ke sini dengan kapal-kapal mereka".

Samudra sendiri menganut Islam pada 1297, seperti terlihat dari batu-batu nisan paling awal di pemakaman purba di Geudong. Ketika Samudra dikunjungi oleh penulis-penjelajah terbesar Arab Ibnu Battuta pada 1323, kerajaan itu sudah berbentuk sebuah kesultanan yang tertata rapi, dengan hubungan internasional di sekitar Samudra India dan dengan Cina. Di bawah nama Islam yang lebih disukainya, Pasai, kesultanan itu menerbitkan uang logam dari emas, mengirimkan kapal ke pelabuhan-pelabuhan utama Asia, dan mengembangkan sistem tulis-menulis Melayu menggunakan aksara Arab. Bagi kesultanan-kesultanan berikutnya, Pasai merupakan pusat pengajaran Islam terbesar di Asia Tenggara. Pasai adalah penghasil sutra, dan pada abad ke-15 banyak bertanam lada untuk pasar di Cina.

Meski memainkan peranan utama dalam perdagangan dan keagamaan, Samudra-Pasai tidak pernah mempersatukan Sumatra utara dari sisi politik. Ketika orang Portugis tiba (1509), masih terdapat kerajaan-pelabuhan Islam yang terpisah-pisah satu sama lain (dari barat ke timur) di Barus, Daya, Lamri, Pidië, Pasai, dan Aru. Setelah menaklukkan Malaka pada 1511, dan menghalau pedagang Islam dari situ, Portugis berusaha menanamkan pengaruh di Pasai dan Pidie dengan mendukung salah satu pihak dalam perselisihan perebutan mahkota yang banyak terjadi di situ. Akibatnya, ini mendorong semua unsur anti-Portugis, termasuk masyarakat pedagang kaya Islam, untuk bersatu di bawah panji-panji Aceh, sebuah kesultanan baru yang terbentuk pada sekitar 1500 di atas bekas-bekas Lamri kuno di ujung barat laut Sumatra. Antara 1519 dan 1524 Sultan Ali Mughayat Syah dari Aceh berhasil mengusir orang Portugis

keluar dari Sumatra utara dan mulailah apa yang kemudian menjadi abad pertarungan sengit melawan orang asing Kristen ini.

Ketika orang Portugis datang pelabuhan penting di Sumatra semuanya berada dalam tangan penguasa Islam, dan Islam sudah mulai mengembangkan sayap ke pusat penduduk yang penting, yakni Minangkabau. Sebagian besar dari hasil yang dicapai ini dapat dikatakan dimungkinkan oleh kekayaan dan kedudukan sosial pedagang Islam dan kebutuhan orang yang semakin terlibat dalam perniagaan akan keyakinan yang dapat dibawa ke mana-mana dan berlaku bagi semua umat manusia. Gempuran orang Portugis atas perniagaan Islam, dan perang yang dilancarkan Aceh melawan orang Portugis, memasukkan sebuah unsur baru, yakni perang sabil. Pada periode 1540 dan 1630, Aceh melancarkan sejumlah serangan atas penduduk pedalaman yang dinamainya Batak, dengan tujuan utama menanamkan agama Islam. Di Sumatra utara terbentuk garis yang tegas antara mereka yang menerima kekuasaan Aceh, Islam, dan huruf Arab, dan mereka yang memilih mengundurkan diri ke pegunungan, menerima nama yang diberikan pada mereka—Batak, tetap makan daging babi, tetap menggunakan huruf India purba yang telah mereka gunakan selama ini, dan tetap menganut kepercayaan memuja leluhur. Orang Gayo di sekitar danau Tawar (di Aceh sekarang) termasuk kelompok yang pertama, dan orang Toba dan orang Karo termasuk kelompok yang kedua. Sebaliknya, di Sumatra selatan dan tengah, Islam tersebar secara sangat berangsur-angsur, dari pusat-pusat penduduk di pantai ke pedalaman, tanpa tentangan yang besar.

Kesultanan Aceh

Pada awalnya orang Portugis berhasil mengacau pengapalan lada India oleh pedagang Islam ke Mesir dan ke Barat. Aceh berhasil memperluas secara besar-besaran kebun lada di Sumatra dengan cepat, dan menemukan pengapalan langsung lada ke pelabuhan-pelabuhan Islam di Laut Merah dengan menghindari wilayah-wilayah di bawah kekuasaan Portugis di pantai barat India. Pada tahun 1550-an Aceh memasok sekitar separuh dari kebutuhan Eropa akan lada melalui jalur ini.

Karena Turki waktu itu penguasa Mesir, ini membuka peluang bagi Sultan Aceh untuk berhubungan dengan petinggi-petinggi Ottoman, seperti dibahas dalam Bab 4. Pada tahun 1560-an Sultan Ala'ad-din al-Kahar ("sang penakluk") mengirimkan utusannya bersama hadiah berupa lada kepada Suleiman Yang Agung untuk memohon bantuan melawan orang kafir yang terkutuk yang telah

merebut Malaka dan menteror pedagang Islam dan jemaah haji di Samudra India.

Penguasa Ottoman/Turki menjawab dengan mengirimkan ahli pembuat senjata dan prajurit artileri, yang banyak menyumbang kepada perang suci Aceh atas orang Batak dan orang Portugis. Kenang-kenangan mengenai bantuan dari Kalifah Islam ini terus dihidupkan oleh sebuah meriam besar buatan Turki yang menjaga istana, oleh sehelai bendera merah Turki, dan oleh cerita-cerita turun temurun. Pertarungan ekonomi dengan orang Portugis dalam perdagangan lada mendorong sejumlah serangan dari armada Aceh antara 1537 dan 1629.

Bagi orang Belanda (pada 1598), orang Inggris (pada 1600) dan orang Perancis (pada 1602), Aceh merupakan salah satu dari sasaran-sasaran pertama mereka di Asia karena ladanya yang berlimpah ruah dan kebenciannya sendiri kepada musuhnya orang Portugis. Orang-orang dari Eropa utara ini disambut dengan tangan terbuka, disilakan menunggang gajah untuk sambutan resmi di istana, dan dihormati dengan hadiah berupa sarung dan keris. Bagi mereka, orang Aceh ternyata merupakan lawan berunding yang sulit, tetapi mereka tetap berdatangan ke pelabuhan yang sangat sibuk itu. Mereka memperkokoh ingatan turun temurun rakyat Aceh bahwa puncak kekuasaan dan kekayaan kesultanan tercapai di bawah Sultan Iskandar Muda (1607-36).

Pada periode yang populer ini Aceh merupakan salah satu dari kekuatan-kekuatan penting Asia, dengan kekuasaan terbentang jauh hingga Tiku dan Pariaman (dekat kota Padang sekarang) di Sumatra barat, Asahan di Sumatra timur, Pahang, Johor, dan Kedah di Semenanjung. Ribuan tawanan dibawa ke Aceh dari ekspedisi-ekspedisi armadanya yang berhasil merebut kemenangan di laut untuk menambah penduduk kota itu, menjadi awak kapal perang, dan mengerjakan pekerjaan berat di bangunan-bangunan milik sultan. Namun, karena perang dan kerapuhan bangunan dari kayu hampir tidak ada jejak yang tinggal mengenai keagungan Aceh di masa lampau.

Tahun-tahun terakhir Iskandar Muda ternoda oleh kekalahan pada 1629 di depan Malaka dan kecurigaannya yang tidak terkendali atas bawahannya sehingga banyak orang terdekatnya yang dibunuhnya, termasuk putranya. Menantunya menggantikannya sebagai Iskandar Thani, tetapi meninggal pada 1641. Karena sangat ingin menghindari cara-cara otoriter ekstrim itu, pemuka-pemuka istana kemudian mengangkat empat perempuan berturut-turut untuk duduk di singgasana. Masa peralihan yang penting ini diuraikan dalam Bab 7. Para pedagang asing merasa puas karena keadaan lebih mudah diperhitungkan,

Gambar 2 Lukisan Belanda mengenai kota Palembang di tepi sungai Musi sesaat sebelum mereka menghancurkannya pada 1659.
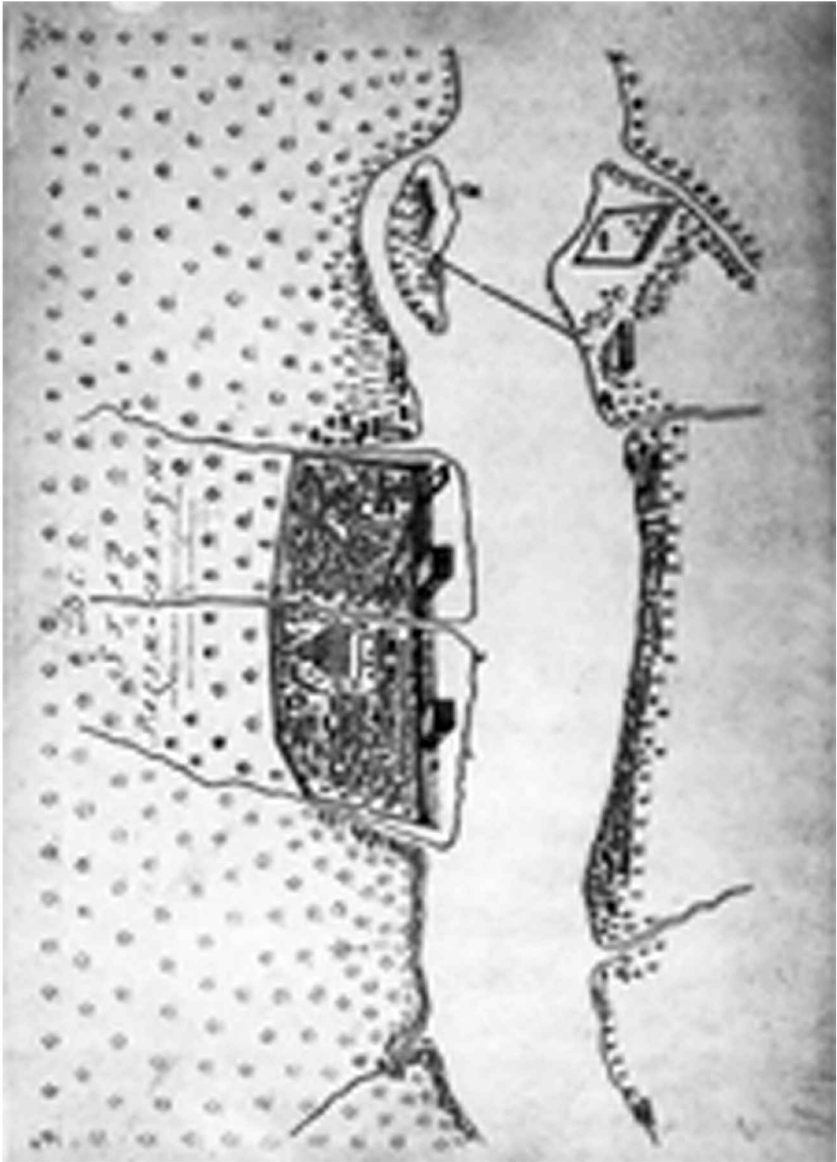
Sumber: Algemene Rijkarchief.

dan para pemimpin Aceh dapat menuntut otonomi yang lebih besar. Tetapi Aceh sudah tidak mampu lagi membendung upaya gigih Belanda untuk bongkar wilayah-wilayah penghasil lada di Aceh dan di Semenanjung. Aceh tetap merupakan pelabuhan besar di Asia Tenggara, dan satu-satunya daerah penting Indonesia yang tetap memiliki kebebasan penuh untuk bertindak vis-à-vis Belanda. Tetapi barang ekspor utamanya terdiri dari barang tidak dapat diperbarui yang dahulu dimonopoli oleh rajanya: emas dan gajah.

Kemunduran Kesultanan Pelabuhan

Sementara Aceh menguasai pantai Sumatra utara, kesultanan-kesultanan bermunculan di sungai-sungai di selatan karena sebab-sebab yang sama. Lahan lada meluas hampir ke semua wilayah di Sumatra yang cocok untuk lada ketika pertumbuhan melonjak tajam karena dorongan permintaan yang luar biasa dari Eropa pada abad ke-16 dan abad ke-17. Sebagian besar lada ini ditanam oleh orang Minangkabau di dataran tinggi Sumatra tengah. Ketika upaya-upaya Aceh untuk memonopoli perdagangan lada di pantai barat mereka rasa sudah tidak tertanggungkan, mereka mencari tempat berdagang yang lain di sungai Musi dan sungai Batang Hari. Di Palembang dan Jambi orang Inggris dan orang Belanda bersaing dengan sengit untuk mendapatkan lada ini, dan orang Belanda berhasil unggul dari orang Inggris pada pertengahan abad itu.

Dominasi kota-kota pelabuhan ini di pedalaman Sumatra yang sangat luas dan beragam itu menurun tajam pada 1700. Permintaan Eropa akan lada terus menurun setelah 1650, dan perusahaan-perusahaan Belanda dan Inggris semakin keras bersaing untuk mendapatkan lada dengan waktu penyerahan terjamin dan dengan harga pasti yang rendah. Perusahaan-perusahaan itu akhirnya mengandalkan pemasok-pemasok yang berhasil mereka kendalikan melalui monopoli. Pemerintahan oleh kaum perempuan di Aceh dihapuskan pada 1699 dengan alasan tidak sesuai dengan ajaran Islam, tetapi ini menyuburkan periode konflik dinasti yang mempertegas otonomi kepala-kepala suku setempat (ulèëbalang).

Selama periode menjelang akhir abad ke-17 dan abad ke-18, kekuasaan raja bahkan lebih tidak terasa lagi oleh mayoritas penduduk Sumatra, yang hidup di pedalaman dalam masyarakat berbasis hubungan darah dan di pesisir berbasis pemimpin-pemimpin dagang yang dapat membuka lahan untuk tujuan dagang atau untuk ditanami. Keadaan seperti itu memudahkan orang-

orang luar berjiwa usahawan untuk turut berperan. Orang Bugis dari Sulawesi Selatan, orang Arab dari Hadhramaut, dan petualang-petualang Minangkabau dari Sumatra sendiri banyak mendirikan dinasti-dinasti baru pada abad ke-18.

Pemain-pemain terbesar dalam liga orang asing ini adalah perusahaan-perusahaan Inggris dan Belanda, tetapi bagi perusahaan-perusahaan itu lada sudah menjadi barang dagang yang tidak penting pada abad ke-18, dan karena itu Sumatra menjadi semacam wilayah terlantar. Belanda mendirikan kantor pusat permanen sendiri untuk Sumatra di Padang pada 1663, sebagai akibat dari Perjanjian Painan yang menyetujui melindungi daerah-daerah penanam lada setempat terhadap Aceh dengan imbalan lada yang dihasilkan. Inggris mendirikan kantor pusat mereka di Fort Marlborough, Bengkulu, pada 1685. Masing-masing kantor pusat menjadi pusat jaringan perdagangan yang saling bersaing di sepanjang pantai barat, tetapi keduanya tetap merupakan koloni yang kecil dan rapuh.

Kebangkitan Kembali Perdagangan dan Islam

Sebuah tahap baru ekspansi perdagangan membawa dampak kepada Sumatra dari tahun 1780-an, ketika pedagang perorangan mematahkan monopoli yang semakin redup perusahaan-perusahaan Belanda dan Inggris. Pedagang perorangan Inggris dan Tamil datang dari India, pedagang perorangan Inggris dan Cina datang dari pelabuhan baru milik Inggris di Penang (1786), pedagang lada dan pedagang budak Prancis dari Mauritius dan kemudian dari Reunion (untuk ini lihat Bab 8), dan pedagang Amerika datang dari pusat-pusat pelayaran di New England. Perhatian pedagang Amerika terpusat pada pantai barat antara Sibolga dan Meulaboh, tempat para kepala kerajaan sungai Aceh mendirikan pusat penghasil lada terbesar di dunia pada dekade-dekade awal abad ke-19. Di wilayah Minangkabau cassia (pengganti kayu manis), gambir (untuk menyamak kulit), dan, sejak 1790, kopi adalah tanaman baru yang menarik bagi pedagang Amerika dan pedagang lainnya. Pada abad ke-18, timah di Bangka mulai ditambang, pada awalnya oleh orang Cina.

Sejak pudarnya sultan-sultan Islam yang kuat, pembawa panji-panji Islam terdepan adalah persaudaraan Sufi yang dikenal di Indonesia sebagai tarekat. Di bawah bimbingan persaudaraan ini anak-anak muda desa tinggal dan belajar bersama-sama di surau. Sekolah tarekat semacam itu sangat populer terutama dalam kalangan remaja laki-laki Minangkabau, yang tidak banyak mendapat tempat dalam rumah tangga atau pertanian menurut sistem warisan garis ibu.

Sekolah tarekat ini menjadi basis bagi gerakan yang sangat kuat untuk reformasi Islam.

Perkembangan baru dunia perdagangan itu menambah banyak masalah sosial dalam masyarakat, yang ditentang gerakan ini, tetapi juga menambah banyak orang Sumatra yang mampu naik haji ke Mekkah. Pada 1803, tiga dari jemaah haji tersebut kembali pulang setelah menyaksikan di Mekkah kemenangan kaum fundamentalis Wahabi dan mulai mencoba mengadakan perubahan di Minangkabau ke arah perubahan seperti di tanah Arab. Masyarakat dengan cepat terpecah dua, ketika pendukung perubahan (dikenal sebagai Padri) mencoba melarang kegiatan-kegiatan perintang waktu tradisional yang sangat disukai penduduk setempat, seperti adu ayam dan makan sirih, dan mengisap tembakau dan candu, dan bersamaan dengan itu memaksa penduduk bersembahyang dan mengenakan pakaian gaya Arab. Pada 1815 gerakan itu menyerang sisa-sisa kerajaan lama Minangkabau yang berpusat di Pagaruyung, menewaskan beberapa putra mahkota dan membakar istana.

Bab 10 menguraikan peranan penting arus reformasi yang muncul dari pusat Islam ini dalam mengobarkan semangat orang Sumatra dan lain-lain menentang upaya Belanda untuk masuk ke daerah mereka.

Ditaklukkan Belanda

Meski sudah memiliki perjanjian pada abad ke-17 dengan hampir semua kerajaan pantai di Sumatra (kecuali Aceh), Belanda harus selalu harus mulai dari awal lagi ketika Inggris kembali ke wilayah miliknya pada masa sebelum perang setelah Perang Napoleon berakhir pada 1816. Belanda tidak berdaya mencegah dominasi pelabuhan-pelabuhan Inggris –Penang dan Singapura– atas perdagangan Sumatra, yang berlanjut hingga ke abad ke-20. Gerakan-gerakan pasukan Belanda lambat, dan biasanya didorong oleh keinginan mencegah masuk orang dari negeri-negeri Eropa yang lain. Hampir di mana pun di Sumatra, tidak ada orang Sumatra yang mau menerima perluasan kekuasaan Belanda tanpa perlawanan.

Landasan perbatasan Malaysia-Indonesia yang sekarang adalah Perjanjian Inggris-Belanda 1824, yang menetapkan Inggris menarik diri dari semua klaim dan daerah miliknya di Sumatra, sedangkan Belanda dari Semenanjung Malaya. Malaka karena itu menjadi milik Inggris, Bengkulu milik Belanda, dan Kesultanan Riau-Johor dibagi menjadi Johor protektorat Inggris dan Riau protektorat Belanda. Palembang dipandang sangat penting bagi Belanda karena

Gambar 3 Iklan pariwisata Belanda untuk Sumatra tahun 1930-an
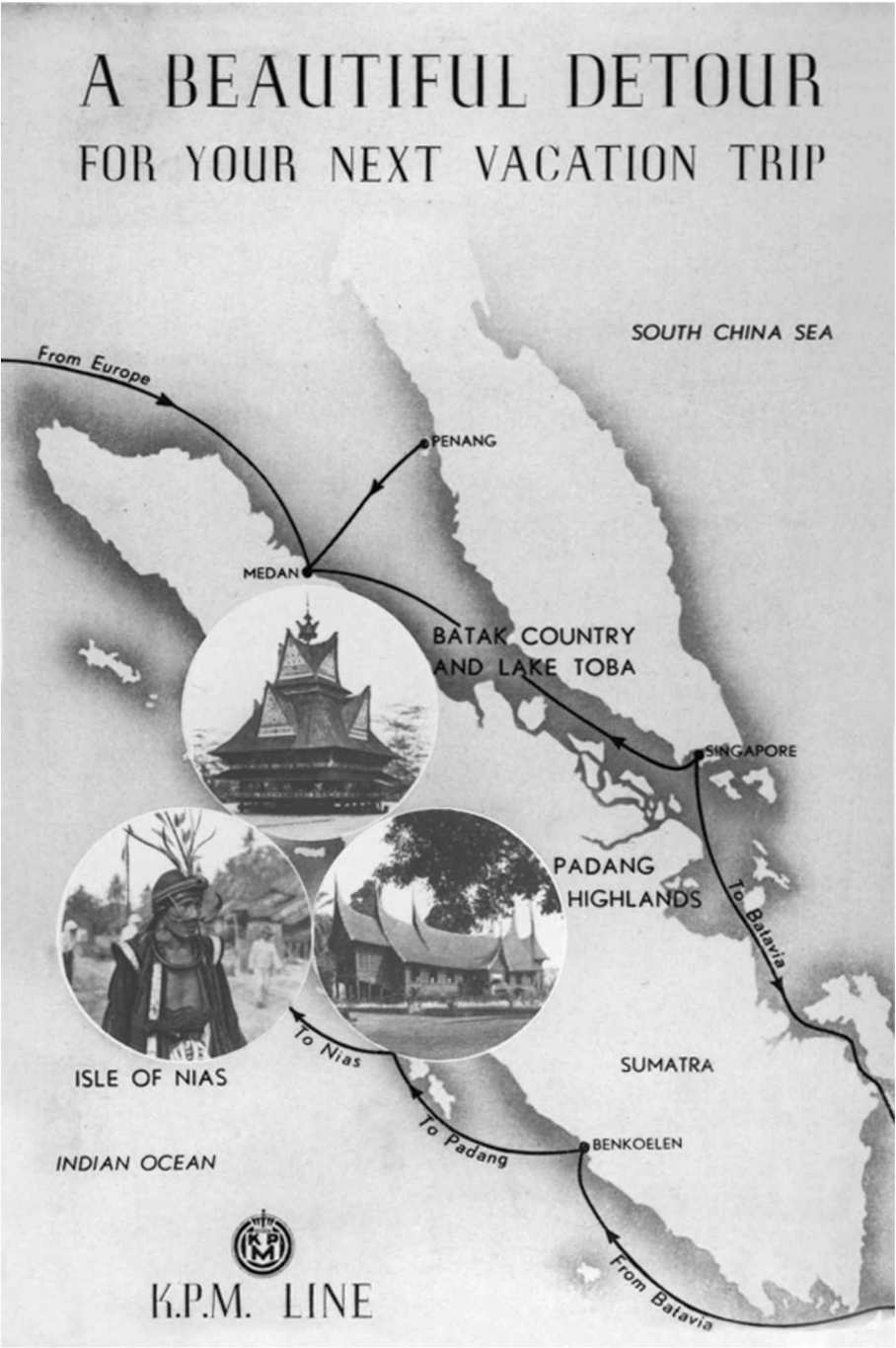
klaimnya atas timah Bangka dan jaraknya yang dekat dengan Singapura, tetapi perlu dua ekspedisi militer, banyak korban tewas dan upaya-upaya berulang kali untuk mendapatkan seorang sultan yang mudah dikemudikan sebelum Belanda akhirnya menghapuskan kesultanan itu dan memerintah langsung Palembang sejak 1825. Pemberontakan sering terjadi sepanjang abad ke-19 di sini dan di Jambi, tempat Belanda menempatkan sebuah benteng militer pada 1834.

Tetapi di Padang Belanda mewarisi masalah kaum Padri dari Inggris. Meski kedudukannya lemah, Belanda mendukung kelompok-kelompok penentang kaum Padri dalam serangkaian operasi yang berlarut-larut dari 1820 hingga 1841 yang dikenal kemudian dengan nama Perang Padri. Ini membuat wilayah Sumatra berpenduduk paling padat itu juga menjadi benteng utama Belanda. Biaya untuk benteng itu ditutup dari hasil serah paksa kopi pada harga tertentu. Orang Minangkabau yang gesit juga memanfaatkan jalur perhubungan dan pasar yang sudah lebih baik dengan menanam kopi sendiri, dan juga tembakau, gula, kayu manis, dan gambir, yang menumbuhkan kelas menengah berorientasi dagang dan makmur di berbagai wilayah Minangkabau. Mereka ini juga menyambut dengan hangat pendidikan gaya modern, dan membiayai sendiri sekolah-sekolah sekuler mereka sejak tahun 1840-an. Pada 1872 anak-anak Minangkabau yang bersekolah di sekolah-sekolah semacam itu mencapai hampir 1200 orang –beberapa kali lebih banyak daripada di Jawa, yang membatasi pendidikan hanya bagi kaum bangsawan. Generasi pertama yang pandai baca-tulis bahasa Melayu (menggunakan huruf Romawi) meluncurkan Minangkabau ke dalam perannya sebagai pemasok Sumatra dengan kerani, guru sekolah, wartawan, dan aktivis politik.

Di pantai timur Sumatra Belanda maju berlahan-lahan, yang ditentang oleh para pedagang Singapura dan raja-raja setempat. Wilayah Belanda yang paling berharga ternyata kerajaan-kerajaan Melayu yang tidak penting, yakni Langkat, Deli, Serdang dan Asahan pada 1865. Jacob Nienhuys mulai bertanam tembakau di Deli menggunakan pekerja yang dibawa dari Penang, dan dalam satu dekade ini diakui sebagai daun tembakau terbaik untuk cerutu. Keberatan-keberatan dari pihak Inggris dapat diatasi dengan cepat oleh peluang yang terbuka untuk memasok "distrik perkebunan" baru yang menjamur dari Straits Settlements. Dua puluh ribu pekerja Cina didatangkan setiap tahun untuk membuka hutan dan merawat tembakau, seperti diuraikan dalam Bab 9. Baru pada tahun 1890-an mereka digantikan oleh orang Jawa yang berupah lebih rendah dan lebih penurut –ada 260.000 kuli kontrak di situ pada tahun 1920-an. Setelah kebun tembakau, muncuk kebun karet, teh dan kelapa sawit. Kota-

kota modern dan makmur berkembang di Medan, Binjei, Pematang Siantar dan Tanjung Balai, dan raja-raja Melayu yang dianggap pemilik tanah-tanah perkebunan itu menjadi kaya raya tidak ada taranya karena mendapat royalti dari tanah-tanah itu.

Aceh sejauh ini merupakan tantangan terbesar bagi militer dan diplomasi Belanda. Penuh harga diri dan merdeka, Aceh memiliki harta dan hubungan dengan orang asing melalui perdagangan lada dan pinang, citra sebagai "serambi Mekkah", dan kecurigaan yang dalam atas sepak terjang Belanda di Sumatra timur dan barat. Menghargai hubungan Inggris dengan Aceh, termasuk sebuah perjanjian saling menghargai pada 1819, Belanda berjanji dalam sebuah nota lampiran perjanjian1824 untuk menghargai kemerdekaan kesultanan itu. Nota ini dibatalkan oleh Perjanjian Inggris-Belanda yang lain pada 1871.

Serangan Belanda dipercepat oleh upaya-upaya gigih Aceh untuk membentuk persekutuan pertahanan dengan Turki, Perancis, dan Amerika Serikat, seperti dibahas dalam Bab 11. Pasukan berkekuatan 3.000 orang menyerang Banda Aceh pada April 1873, tetapi mundur setelah komandan dan 80 prajuritnya tewas. Namun ini ternyata baru bab pertama dari sebuah perang yang berlangsung hingga 1903 dan menguras semua sumberdaya militer, uang, dan moral Belanda, dan meninggalkan warisan kebencian yang sangat pahit kepada Belanda di Aceh. Pada tahun 1880-an tampuk pimpinan perlawanan diteruskan kepada kaum ulama, yang mengumandangkan perang suci sampai titik darah penghabisan. Pemakaman Belanda di Banda Aceh tetap merupakan tugu peringatan bagi lebih dari 10.000 orang yang tewas di pihak Belanda. Bagi orang Aceh, yang kehilangan paling tidak lima kali lipat dari jumlah itu, tugu peringatan itu adalah pahlawan perang yang terus memberi inspirasi kepada mereka, dan beberapa dari mereka sekarang diakui dengan resmi sebagai pahlawan nasional Indonesia. Ketika Jepang semakin dekat pada 1942 provinsi itu memberontak dan mengusir sisa-sisa kehadiran Belanda di situ, seperti diuraikan dalam Bab 12.

Sebagian besar pujian bagi keberhasilan Belanda menanamkan kekuasaan di Aceh jatuh kepada Kolonel J.B. van Heutsz, Gubernur Militer Aceh, dari 1898 hingga 1904. Kebijakannya memburu tanpa henti dan menancapkan kekuasaan Belanda dengan tegas, diterima oleh sebuah pemerintah yang mengangkatnya menjadi Gubernur Jenderal (1904-9). Dalam kedudukan itu ia mengirimkan pasukan Belanda ke setiap penjuru kepulauan yang masih memiliki raja dan desa merdeka. Pada 1910 seluruh Sumatra untuk pertama kali berada di bawah satu penguasa, meski penguasa asing yang sangat dibenci.

Dataran Tinggi dan Orang Kristen Sumatra

Sejauh ini pembaca akan mendapat kesan bahwa sejarah Sumatra semata-mata menyangkut kerajaan-kerajaan maritim di sekitar pantai, termasuk tentu saja Perusahaan Belanda. Karena semua ini merupakan lembaga yang mengumpulkan catatan dan laporan dan berhubungan dengan orang asing, suara mereka selalu cenderung suara yang kita dengar berbicara untuk Sumatra dalam sejarah. Namun Bab 3 menunjukkan, selama berabad-abad sebelum abad ke-20 nyatanya sebagian besar penduduk Sumatra hidup di lembah-lembah dataran tinggi yang sebagian besar tidak diketahui dunia luar. Orang Minangkabau di Sumatra Tengah, barangkali karena emas mereka, paling banyak punya hubungan dari antara penduduk dataran tinggi ini dengan dunia dagang di luar, dan mereka menerima Islam sampai batas tertentu sejak abad ke-16. Sebagian besar penduduk dataran tinggi yang lain menolak kedua kekuasaan itu dan Islam dan Kristen sampai sekitar abad ke-19 atau awal abad ke-20.

Penduduk di bagian selatan bukit barisan itu semakin banyak menyerap unsur-unsur Islam dari tetangga mereka di pesisir pada abad ke-19 dan abad ke-20. Orang Batak di wilayah paling selatan, sekarang dikenal sebagai Mandailing, dipaksa masuk Islam dengan kekerasan pada tahap-tahap terakhir gerakan Padri. Ketika penyebar agama Kristen untuk pertama kali mulai berupaya sungguh-sungguh mencari tempat yang baik untuk menyebarkan agama Kristen di pulau perbatasan ini, hanya penduduk yang hidup terpencil dan dengan tegas menolak Islam – orang Batak dan penduduk pulau di lepas pantai barat – yang memberikan dorongan.

Meski sebelumnya sudah ada beberapa upaya semacam itu, sejarah penyebaran agama Kristen di Sumatra sebenarnya baru mulai dengan keputusan German Rhenisch Mission Society (Masyarakat Rhein Jerman untuk Penyebaran Agama) pada 1861 untuk melakukan kegiatan di situ, dan kedatangan Ludwig Nommenson, salah satu pimpinan lembaga itu, pada tahun berikut. Berhasil mendapat kepercayaan penduduk sebagai seorang dokter, mediator, dan guru, ia memperluas kegiatannya menyebarkan agama ke utara dari Silindung ke danau Toba, dan selalu lebih dahulu dari kontrol oleh Belanda. Agama Kristen Protestan diramu ke dalam identitas Batak Toba dengan cerdik, dan hasilnya adala diterimanya agama Kristen oleh sebagian besar orang Batak Toba pada periode 1880-1900. Sebagai jawaban pada gerakan nasionalis melawan kekuasaan Barat pada tahun 1920-an, sebuah gereja Batak yang berdiri sendiri didirikan pada 1930, yang membantu mempertahankan identitas Batak Toba saat mereka

memulai ekspansi mereka yang berhasil ke dalam peran sebagai pedagang dan guru di seluruh Indonesia. Berbeda dengan tempat agak tersisih yang diduduki orang Kristen di sebagian besar Asia, orang Kristen Batak Toba yang berjumlah 3-4 juta jiwa penuh percaya diri dan yakin mengenai kedudukan mereka sebagai orang Indonesia.

Kelompok-kelompok orang Batak yang lain lebih kemudian dan tidak sepenuhnya menjadi penganut agama Kristen, dan semuanya menurut kepentingan masing-masing berusaha menjaga jarak dengan orang Toba pemeluk Kristen sebagai kelompok orang Batak terbesar. Orang Batak Mandailing di Tapanuli Selatan menganggap diri mereka orang Islam dan beradab ketika orang Batak Toba masih makan daging manusia, dan mereka menghindari istilah Batak begitu istilah itu dikaitkan dengan orang Toba. Gereja Simalungun dan gereja Karo menyelenggarakan ibadah agama masing-masing dalam lingkup keberagaman, dalam arti sebagian besar orang sekampung mereka adalah orang Islam (dan orang Karo juga masih menganut animisme). Orang Karo yang berjumlah satu juta orang, yang secara keseluruhan menolak agama Kristen dan pendidikan modern sampai tahun 1940-an, dengan cepat merangkul kedua kelompok ini sesudahnya. Pada akhir abad ke-20 mereka bahkan sudah mengalahkan orang Toba sebagai kelompok masyarakat Indonesia paling terpelajar, dan seperti orang Toba tersebar di seluruh perkotaan Indonesia.

Sumatra dan Indonesia

Bab-bab berikut tidak sepenuhnya membahas dampak perubahan yang dibawa kekuasaan Belanda atas Sumatra pada paruh pertama abad ke-20. Untuk pertama kali pulau itu berada di bawah satu penguasa, meski penguasa asing yang berpusat di Batavia (Jakarta). Untuk pertama kali banyak penduduk dataran tinggi yang berkenalan dengan struktur kekuasaan yang memonopoli alat kekerasan, sistem pajak, dan awal dari kedaulatan hukum. Kaum elite baru dari berbagai kelompok mendapat pengalaman bersekolah bersama, dan dengan itu menyadari bahwa mereka orang Sumatra dan orang Indonesia. Perbedaan pandangan antara kaum elite semakin banyak dilihat bukan sebagai konflik daerah tetapi sebagai perpecahan antara elite yang disukai dan yang disisihkan Belanda, seperti dijelaskan dalam Bab 12. Bagi orang Aceh, dan sampai batas tertentu juga bagi orang Batak Karo, pemerintahan Belanda dialami sebagai kekalahan dan penghinaan, tetapi di sisi yang lain, bagi banyak penduduk di dataran tinggi pemerintahan Belanda dialami sebagai pembuka berbagai

peluang baru yang menakjubkan untuk bepergian, berdagang, bersekolah, dan mencari pekerjaan.

Dari sisi ekonomi, paling tidak ada tiga kota di Sumatra pada awal abad ke-20. Masing-masing dari ketiga kota besar ini merupakan pusat jaringan kereta api dan jalan raya, yang berdiri sendiri-sendiri. Medan di utara merupakan pusat perdagangan yang sibuk, warna Eropanya sangat kuat dan karakternya karakter Cina, simpul niaga yang hiruk pikuk, dengan hubungan keluar terdekat Malaya Inggris, bukan pusat-pusat dagang Belanda. Padang di tengah-tengah adalah kota kolonial tertua tetapi paling terlelap dari antara kota-kota kolonial. Palembang adalah kota tua dengan kekayaan baru berupa minyak, dihubungkan dengan Jawa oleh sejarah, oleh transmigran di pedalaman yang dibiayai pemerintah Belanda, dan oleh jalan raya dan jalan kereta api ke selatan ke pelabuhan feri menuju Jawa. Jalan trans-Sumatra dibahas untuk pertama kali pada 1916, tetapi baru akhirnya selesai pada 1938. Pada tahun itu pula pemerintah kolonial membangun administrasi pan-Sumatra yang pertama, dengan seorang gubernur di Medan yang membawahi sepuluh karesidenan (lihat bab berikutnya).

Pada 1917 beberapa orang Sumatra mendirikan Ikatan Pemuda Sumatra yang terpusat di sekolah-sekolah menengah di Batavia, dan pada 1921-2 menyelenggarakan konferensi persatuan Sumatra di Sibolga, Bukittinggi dan Padang. Sebagian besar dukungan datang dari orang Islam Minangkabau. Jumlah siswa Kristen Batak bertambah besar dan pada tahun 1920-an cukup besar sehingga mereka ingin memiliki perhimpunan sendiri, dan pada 1926 tampaknya satu-satunya cita-cita yang dapat diterima di atas ikatan berdasar suku dan bahasa adalah cita-cita persatuan nasional Indonesia. Sebenarnya Sumatra menyumbang jauh lebih besar daripada bagiannya pada perkembangan nasionalisme Indonesia, dengan tokoh-tokoh seperti Mohammad Hatta (kelak menjadi Wakil Presiden), Soetan Sjahrir (Perdana Menteri pertama), dan Amir Sjarifuddin (Perdana Menteri kedua) memainkan peran dalam perumusan cita-cita persatuan nasional.

Bahkan jauh lebih penting lagi adalah peran orang Sumatra dalam pengembangan sastra nasional. Bagi sebagian besar orang Sumatra bahasa Melayu sudah merupakan bahasa tulisan utama, dan diterimanya bahasa itu sebagai bahasa nasional tidak menimbulkan masalah bagi mereka, dibandingkan dengan bagi orang Jawa. Pengembangan novel Indonesia modern hampir seluruhnya dilakukan oleh orang Minangkabau, dengan Marah Rusli, Takdir Alisjabana, Nur Iskandar, Abdul Muis, dan pemimpin Islam Hamka sebagai

tokoh-tokoh terkemuka pada 1920-an dan 1930-an. Aceh merupakan pusat utama yang pertama bagi sastra Melayu "klasik" pada abad ke-17, dan tulisan-tulisannya tetap sebagian besar menggunakan bahasa Melayu sedangkan bahasa percakapan sehari-hari adalah bahasa Aceh.

Mengingat sumbangan besar pada nasionalisme Indonesia di berbagai bidang ini, dan tidak adanya benih persatuan di pulau itu secara keseluruhan, tidak mengherankan jika Sumatra menolak semua upaya untuk memisahkannya dari Jawa pada masa bergolak pada tahun 1940-an. Jepang pada 1945 meski terlambat mencoba memperjuangkan gagasan Sumatra merdeka dengan pusat di Bukittinggi, sedangkan Belanda pada 1948-9 mencoba membentuk sebuah payung Sumatra bagi negara-negara bagian yang telah dibentuknya di berbagai wilayah di pulau itu. Tetapi orang Sumatra sendiri sudah memutuskan pada 1920-an bahwa mereka dapat mempersatukan suku-suku mereka yang beraneka ragam itu hanya pada tingkat Indonesia.

Revolusi, Pemberontakan, dan Persatuan

Ketika kemerdekaan diproklamasikan di Jakarta pada 17 Agustus 1945, Sumatra berada di bawah sepuluh unit pemerintahan administrasi Jepang yang terpisah satu sama lain, sehingga menutup peluang bagi orang Indonesia untuk berhubungan satu sama lain. Revolusi, pertama melawan Jepang dan kemudian melawan Inggris yang menduduki tiga kota utama pada Oktober 1945, dan akhirnya melawan Belanda, harus dilancarkan terpisah-pisah di setiap karesidenan, tanpa apa-apa selain siaran radio dari Jawa untuk mengobarkan semangat. Sumatra harus mengalami beberapa dari aspek-aspek paling penuh kekerasan dari revolusi sebelum dapat masuk tanpa kesulitan ke dalam sebuah kerangka nasional. Di Aceh, ulèëbalang yang pernah berkuasa di bawah Belanda dan Jepang ditumbangkan dengan kekerasan pada Desember 1945 oleh sebuah koalisi di bawah pimpinan kaum Islam. Tiga bulan kemudian sultan-sultan Malaya dan raja Simalungun yang menanjak ke puncak kekayaan yang sering sudah melampaui batas sama halnya juga ditumbangkan, dalam apa yang dinamakan "Revolusi Sosial" oleh kaum Komunis di antara pendukungnya. Gerakan-gerakan ini tidak dikendalikan oleh pemerintah Republik dan mengakibatkan runtuhnya kekuasaan yang berwenang, terutama di Sumatra timur tempat gerombolan-gerombolan nasionalis bertindak menurut kemauannya sendiri.

Meskipun perbuatan-perbuatan yang melampaui batas ini menimbulkan reaksi dalam kalangan sejumlah kelompok, yang mencari perlindungan dari Belanda pada 1947-9, orang Sumatra barangkali memang benar-benar sepenuh hati menolak kekuasaan Belanda dibandingkan dengan wilayah-wilayah penting yang lain di koloni itu. Selama periode enam bulan (1948-9) ketika Belanda menduduki semua kota besar dan kecil di Java, Aceh merupakan satu-satunya provinsi yang menurut pertimbangan Belanda sebaiknya tidak disentuh, dan Banda Aceh menjadi ibukota dari apa yang tersisa dari republik. Meski Belanda mencoba mengepung Jawa yang republik dengan lingkaran sejumlah minoritas yang khawatir mengenai dominasi Jawa, mereka terpaksa menerima kenyataan adanya semangat republik di Sumatra.

Namun demikian, pulau yang luas itu jauh dari terintegrasi dari sisi politik atau ekonomi ketika revolusi berakhir dengan penyerahan kedaulatan penuh kepada Indonesia pada 1950. Setiap bekas karesidenan memiliki pasukan yang sudah digodok oleh peperangan dan tidak ingin kembali ke kehidupan sipil, dan merasa sudah berbakti dan karena itu berhak turut memainkan peran dalam republik menurut kemampuan masing-masing. Perdagangan sangat menguntungkan via penyeludupan ke Singapura, yang tampak patriotik selama masa pendudukan Jepang dan revolusi, tidak mudah untuk diserahkan kepada pemerintah pusat di Jakarta yang tidak memiliki apa-apa untuk diberikan sebagai gantinya.

Krisis yang pertama muncul di Aceh, yang menolak dipersatukan dengan orang Batak Kristen dalam sebuah provinsi Sumatra Utara, kegagalan menyatakan Indonesia sebuah negara Islam, dan menolak imbalan tidak setimpal bagi para pemimpinnya dalam negara yang baru itu. Pada 1953 pemimpin Islam Aceh memberontak melawan Jakarta, dan menyatakan Aceh bagian dari Dar ul-Islam. Tentara yang dikirim dari Jawa menduduki kembali kota-kota Aceh, tetapi pemberontak menguasai pedalaman sampai 1959, ketika mereka menyerah dengan imbalan status otonomi bagi Aceh. Sebelum itu para pemimpin militer Minangkabau dan Batak bersekutu dengan politisi nasional yang tidak puas karena pemusatan kekuasaan oleh pemerintah, korupsi dan kebijakan pro-Komunis pemerintah pusat, pada Februari 1958 dan membentuk Pemerintah Revolusioner Republik Indonesia (PRRI). Pemerintah pusat mengambil tindakan tegas, Padang dan Bukittinggi dibom dan pasukan dalam jumlah besar dikirim dari Jawa. Pertempuran berakhir dalam enam bulan; tetapi peristiwa itu meninggalkan dalam hati Minangkabau, seperti Aceh pada periode yang sama, perasaan seperti provinsi pendudukan dengan

warga setempat tidak lagi dipercaya untuk memangku jabatan-jabatan tinggi kemiliteran atau pemerintahan sipil.

Di bawah Presiden Suharto perasaan tidak puas orang Sumatra tampak sudah berkurang. Kebijakan anti-Komunis dan kebijakan pasar bebas yang dijalankan Orde Baru merupakan kebijakan-kebijakan yang sebelumnya diperjuangkan oleh pimpinan PRRI, dan pemerintah pusat memiliki sumberdaya untuk memberikan imbalan yang layak kepada pronvinsi-provinsi di Sumatra atas kesetiaan mereka. Jaringan jalan raya akhirnya pulih pada 1970-an ke tingkatnya pada masa sebelum perang dan lebih baik. Provinsi-provinsi besar multi-suku dipecah-pecah hingga semua, kecuali Sumatra Utara (Sumatra Timur pra-perang plus Tapanuli) kembali ke garis batas karesidenan-karesidenan lama di zaman Belanda. Meski di Aceh setelah 1989 gerakan kemerdekaan menjadi ancaman yang nyata dan kehadiran militer Indonesia dengan sendirinya bersifat menekan, di provinsi-provinsi yang lain kehadiran militer tidak lagi menyolok mata di bawah Suharto. Kita sering mendengar keluhan mengenai pusat, tetapi keluhan-keluhan ini tidak terlalu banyak bedanya dengan keluhan-keluhan yang kita dengar di Jawa.

Tumbangnya Suharto pada 1998 membawa perubahan besar. Pers dibebaskan oleh Presiden Habibie, sedangkan di bawah penggantinya Abdurrahman Wahid militer berangsur-angsur melepaskan peran politiknya di pusat yang dimainkannya di bawah Suharto. Bagi Aceh, ini berarti pengungkapan kekejaman-kekejaman yang dilakukan militer ketika mencoba membasmi Gerakan Aceh Merdeka (GAM) di bawah Hasan Mohammad Tiro, dan tuntutan-tuntutan terus bertambah agar pelanggar-pelanggar hak asasi manusia dibawa diadili. Di bawah suasana referendum kemerdekaan Timor Timur pada 1999, semakin banyak orang Aceh yang berpikir bahwa mereka juga seharusnya disuruh memilih apakah mereka ingin tinggal di Indonesia. Perundingan-perundingan serius dengan GAM dimulai oleh pemerintahan Abdurrahman, yang menghasilkan di bawah penggantinya Megawati perjanjian gencatan senjata yang berumur pendek pada Desember 2002, yang dipantau oleh pengamat-pengamat asing. Sejarah kebanggaan Aceh menjalin hubungan sendiri dengan dunia luar, yang dibahas dalam Bab 4-8, berbenturan langsung dengan semangat tinggi merangkul nasionalisme Indonesia seperti dibahas dalam Bab 12 dan 13.

Iklim reformasi demokrasi periode 1988-2001 menimbulkan rasa percaya diri yang lebih besar untuk mengungkapkan keinginan di antara semua orang Sumatra. Khususnya, kekayaan yang diperoleh Provinsi Riau dari minyak

dan jaraknya yang dekat dengan Singapura yang sedang tumbuh pesat juga memicu pembicaraan-pembicaraan mengenai kemerdekaan bagi Riau. Namun, otonomi daerah, dan pengembalian sumberdaya kepada provinsi, memberikan secara nyata kepada gerakan ini apa yang diinginkannya. Daya tarik otonomi daerah juga berbuah provinsi-provinsi baru, dengan Bangka dan Belitung lepas dari Palembang, dan Kepulauan Riau dengan pedalaman Singapura pulau Batam dan Bintan lepas dari Riau. Namun, tidak seorang pun mengangkat suara mengenai separatisme Sumatra. Dibandingkan dengan kemungkinan pada 1940-an, kemungkinan persatuan Sumatra dengan ciri khasnya sendiri merupakan gagasan yang dapat diwujudkan jauh lecih kecil lagi.

Pembangunan Ekonomi

Sumatra seringkali dinamakan pulau masa depan Indonesia, dengan potensi tidak terbatas untuk pembangunan sumberdaya pertanian dan mineralnya yang kaya. Memang benar bahwa sejak persatuan Indonesia pada awal abad ini, Sumatra-lah yang tumbuh paling cepat dari sisi penduduk, ekspor, dan kekayaan. Baik dari sisi imigrasi (tiga juta penduduk Sumatra yang sekarang tidak lahir di situ) maupun dari sisi kenaikan alami, Sumatra tumbuh lebih dari tiga persen setahun selama hampir seluruh abad ke-20, sedangkan pertumbuhan di wilayah selebihnya negeri itu mendekati dua persen. Medan merupakan kota yang paling cepat tumbuh dari semua kota di Indonesia, dari 5.800 pada 1893 menjadi lebih dari dua juta sekarang.

Tanah pertanian yang berlimpah dan tradisi wirausaha yang kuat membangkitkan kegairahan penduduk Sumatra untuk turut ambil bagian dalam pertumbuhan tinggi karet pada 1920-an, dan cengkeh, lada, kopi, tembakau, kelapa sawit, dan tanaman-tanaman yang lain sejak itu. Selain itu Sumatra juga pemasok terbesar minyak mentah, dengan sumur-sumur di Langkat dan Palembang, yang diikuti kemudian oleh sumur-sumur baru di Pekanbaru dan pada 1970-an oleh ladang gas alam yang maha luas di Lhokseumawe.

Jawa merupakan pemasok bagian terbesar ekspor Indonesia pada abad ke-19, Sumatra pemasok terbesar pada abad ke-20, dan juga pada zaman lampau. Pada 1930-an pelabuhan-pelabuhan Sumatra melayani sekitar separuh dari nilai total ekspor Indonesia, tetapi ini naik menjadi hampir 70 persen pada tahun 1950-an dan 1960-an, tanpa memperhitungkan penyeludupan yang sangat besar. Pertumbuhan manufaktur di Jawa dan mineral di Indonesia timur setelah itu mengurangi dominasi ini, tetapi Sumatra tetap merupakan

penyumbang terbesar pada ekspor Indonesia yang terus meningkat itu. Banyak dari mereka yang mulai sebagai pekerja ekspor kemudian menjadi pengusaha terbesar Indonesia pada 1950-an dan 1960-an. Namun, pemusatan ekonomi dan peranan penting koneksi politik cenderung menurunkan peranan orang Sumatra dalam bidang ekonomi menjelang akhir abad itu.

Kekayaan telah memungkinkan orang Sumatra mencapai tingkat kesejahteraan yang cukup tinggi, meski infrastruktur komunikasi, sambungan listrik, dan air bersih tetap belum seberapa berkembang dibandingkan dengan di Jawa.

Dari 1920-an hingga 1960-an pendapatan rata-rata orang Sumatra mungkin dua kali lipat pendapatan rata-rata orang Jawa, tetapi kesenjangan ini juga semakin berkurang dengan berkembangnya perekonomian berbasis industri di Jawa. Provinsi-provinsi di selatan yang lebih miskin — Lampung dan Bengkulu — tidak lagi di atas rata-rata nasional seperti pada 1950-an. Namun demikian, orang Sumatra tetap lebih lama duduk di bangku sekolah, lebih banyak memiliki mobil, sepeda, televisi, dan berbelanja makanan dan pakaian lebih besar dibandingkan dengan rata-rata orang Indonesia. Semangat percaya diri wirausahawan selama berabad-abad akan terus menjadi pendorong bagi mereka.

2

Identitas "Sumatra" dalam Sejarah

Pulau-pulau seperti Sumatra, sangat luas dan berpenduduk besar, mungkin tampak sebagai cara alam menetapkan batas tempat tertentu untuk penduduk tertentu. Bagi Inggris Raya, Honshu dan pulau-pulau kecil di sekitarnya, Madagascar, Sri Lanka atau Kuba, ini sudah sangat jelas sehingga tidak perlu ditegaskan. Tetapi pulau-pulau beriklim sedang dan lembab di Indonesia tidak menggairahkan perhubungan darat dan persatuan yang dapat dihasilkannya, dan baru bersatu setelah menjadi bagian dari satuan nasional yang lebih besar. Karena itu timbul pertanyaan, apakah tidak sebaiknya Sumatra sebagai keseluruhan dibedakan sebagai bidang penelitian tersendiri.

Menarik bahwa William Marsden dan rekan-rekannya sezaman A. Eschels-Kroon dan J.C.M. Radermacher selang tiga tahun satu sama lain sudah memulai penelitian ilmiah mengenai Sumatra sebagai satu unit, pada 1780-an.[1] Dalam periode kolonial sesudah itu juga ada sejumlah penelitian berbobot, yang memperlakukan Sumatra sebagai satu unit — terutama oleh C. Lekkerkerker, O.J.A. Collet, dan Edwin Loeb.[2] Selama periode Indonesia tidak menghasilkan penelitian-penelitian seperti itu, meski pada periode 1971-5 ada penerbitan *Sumatra Research Bulletin* oleh sarjana antropologi Mervyn Jaspan, yang berharap ini dapat mendorong ilmuwan untuk melakukan penelitian yang lebih terarah mengenai "salah satu wilayah budaya paling penting di Asia Tenggara". Kelahiran majalah yang bagus inilah yang mendorong saya untuk memikirkan kesatuan Sumatra, meski kematian majalah itu empat tahun kemudian membawa saya pada kesimpulan bahwa persoalan ini sudah ditutup. Tingkat kesatuan objektif Sumatra dari sisi bahasa, budaya, mitologi, pra-sejarah, atau ekonomi, belum pernah diteliti dengan mendalam. Namun, karena penelitian sering mengikuti realitas politik (meski proses sebaliknya juga dapat terjadi, seperti akan kita lihat di bawah), mungkin ada baiknya kita ikuti bagaimana orang Sumatra menelusuri identitas mereka sepanjang sejarah mereka akhir-akhir ini.

Geografi selalu menyulitkan Sumatra untuk menampilkan identitas tunggal, setidaknya selama perhubungan paling efektif hanya terbatas pada jalur laut. Selat Malaka menyatukan sungai-sungai besar di pantai timur dengan Semenanjung Malaya dan pedalamannya, sama seperti Selat Sunda mempersatukan bagian selatannya dengan Jawa. Karena itu, hasil-hasil besar dalam sejarah yang pernah dicapai orang Sumatra tidak pernah sepenuhnya milik orang Sumatra. Dan lebih parah lagi, bahkan sejumlah nama yang dipakai untuk Sumatra untuk pertama kali dalam pentas sejarah – Melayu (dalam *Nagarakertagama)* dan Jawa (dalam tulisan-tulisan dari Arab dan Eropa abad pertengahan, termasuk tulisan-tulisan Ibnu Battuta dan Marco Polo) – diambilalih oleh tetangga-tetangga Sumatra.

Khususnya, ada dua hasil besar dalam sejarah yang sebenarnya dapat diharapkan menjadi landasan bagi sebuah nasionalisme budaya Sumatra dalam zaman modern. Pertama, kerajaan Sriwijaya, dengan pusat di Palembang dan Jambi, menguasai semua pelabuhan pantai di Sumatra dan Semenanjung Malaya dari abad ke-7 hingga abad ke-13 –pada waktu itu kerajaan besar yang terlama berkuasa di Indonesia.

Kedua, bahaya Melayu dan sastranya, sekarang sudah menjadi bahasa resmi empat negara, yang berkembang terutama, jika tidak sepenuhnya, di serangkaian pusat-pusat Sumatra –Sriwijaya, Samudra-Pasai, Aceh, Palembang, Riau-Lingga– dan digunakan sehari-hari dan sebagai bahasa tulisan di seluruh pulau itu. Keberhasilan bahasa Melayu menjadi *lingua franca* yang pertama di Nusantara dan kemudian menjadi bahasa nasional inilah yang menyebabkan bahasa Melayu tidak dilihat sebagai "bahasa Sumatra".[3]

Jika kita bandingkan jejak Sriwijaya dengan jejak Majapahit dalam historiografi nasional,[4] jelas bahwa Sriwijaya tidak dalam kedudukan yang menguntungkan. Kedua kerajaan besar itu umumnya sudah dilupakan orang pada abad ke-19, meski masih ada sisa-sisa aura kejayaan masing-masing yang sudah lama sirna. Karena penelitian oleh Belanda terpusat pada Jawa, edisi *Pararaton* dan *Nagarakertagama* Brandes menjadi dasar, paling tidak hingga buku Fruin-Mees yang populer *Geschiedenis van Java* (1919) terbit, untuk memasukkan kejayaan Majapahit sebagai sudut pandang Jawa, dan karena itu sudut pandang Indonesia, ke dalam buku pelajaran. Sebaliknya, penelitian Belanda mengenai Sumatra lebih sederhana dan terpisah satu sama lain. Sebagian besar tulisan lebih mendalam tentang Sumatra selalu merupakan karya bangsa-bangsa Eropa yang lain selain dari Belanda, dan dua ahli dari Prancis-lah, George Coedes (1918)dan Gabriel Ferrand (1922), yang akhirnya memberikan bukti-

Peta 1 Pembagian Sumatra pada zaman penjajahan

bukti bahwa Sriwijaya memang sebuah kerajaan besar. Dampak hasil penelitian mereka pada orang Sumatra lambat dirasakan, tidak saja karena dalam bahasa Perancis (baru dikenal setelah dimasukkan ke dalam buku pelajaran sekolah Belanda, terutama oleh N.J. Krom pada 1930-an), tetapi juga karena nama yang mereka gunakan, "Srivijaya", sama sekali tidak menimbulkan ingatan apapun dalam benak penduduk. Di Sumatra, kejayaan sebuah kerajaan di masa lampau lebih banyak dikaitkan penduduk dalam pikiran mereka dengan Bukit Siguntang, sebuah bukit kecil suci di salah satu wilayah ibukota Sriwijaya, atau

dengan "Andalas" dan "Pulo Percha". "Andalas" dan "Pulo Percha" adalah kerajaan di hulu sungai Musi atau sungai Batang Hari, yang berkembang dalam perjalanan panjang kejayaan Sriwijaya ke hulu sungai sampai akhirnya menetap di Yang Dipertuan Sakti Minangkabau, di Pagarruyung.[5]

Di pihak lain, begitu pusat kepentingan Inggris di Asia Tenggara pindah dari Sumatra ke Malaya (terakhir pada 1824), tidak ada lagi hasil penelitian seperti hasil penelitian Marsden. Penelitian oleh bangsa Inggris cenderung mengaitkan warisan dari Sriwijaya dan hasil yang dicapai bahasa Melayu dengan semenanjung Malaya, khususnya dengan Singapura (Tumasek) dan Malaka – tradisi yang meletakkan landasan alami bagi nasionalisme budaya Melayu, bukan Sumatra.

Para penulis abad ke-19 mungkin benar ketika mengatakan bahwa Sumatra waktu itu "tidak memiliki nama yang mudah diingat penduduk".[6] Seperti dijelaskan seorang penjelajah Prancis yang berpengalaman,

> Jika kita tanya seorang Sumatra asli apa nama yang diberikannya untuk pulaunya, sulit untuk menjelaskan kepada dia apa yang kita maksud. Ia tahu ada pulau-pulau, banyak sekali, di sekitar dia, tetapi Sumatra, dengan negeri-negerinya yang banyak, suku-sukunya yang beragam, bahasa-bahasanya yang tidak terhitung, bagi dia sebuah dunia tersendiri.[7]

Di pihak lain, bagi pengarung lautan dari tempat-tempat lain, nama seluruh pulau itu diambil dari nama salah satu bagiannya—khususnya, dari kerajaan terkuat di sudut barat laut pulau itu, tanah daratan yang pertama-pertama terlihat oleh pelaut dari Arab, India, dan Eropa. Lamri (Lamuri, Lambri, atau Ramni), dekat kota Banda Aceh sekarang, digunakan sebagai nama untuk seluruh pulau itu oleh banyak ahli geografi bangsa Arab abad ke-10-13, sedangkan kerajaan yang semakin menanjak, Samudra (atau Pasai), dekat kota Lhokseumawe sekarang, mulai menggunakan Samudra untuk nama seluruh pulau itu menjelang akhir abad ke-14 (misal, Nicolo de Conti, Ludovico de Varthema). Namun, ada kemungkinan, seperti kata Krom[8], bahwa berhasilnya Samudra/Sumatra dipakai sebagai nama seluruh pulau itu karena ada kaitan dengan istilah lebih tua dari bahasa Sanskerta, *Suwarna-bumi* ("tanah emas"), yang sudah dilekatkan kadang-kadang kepada pulau Sumatra, khususnya oleh sebuah tulisan Singasari pada 1286.

Warisan Sriwijaya

Penduduk pulau itu mulai menamakannya Sumatra akibat pengaruh Eropa, dan sebagian besar baru menggunakannya akhir-akhir ini saja, pada abad ke-20. Bukan bagian utara tetapi bagian tengah pulau itu yang menimbulkan ingatan yang sangat kuat dalam pikiran sebagian besar penduduknya. Ingatan ini pasti berasal dari kejayaan Srivijaya. Raja Alam atau Yang Dipertuan Sakti dari Pagarruyung, meski kecil kekuasaan nyatanya, bahkan di Minangkabau sendiri, diyakini sebagian besar penduduk memiliki kekuasaan wahyu Ilahi sebagai salah satu dari tiga ahli waris, bersama Cina dan Rum (Konstantinopel/Turki), penguasa dunia, Iskandar Zulkarnain. Paling tidak dua kali seorang panglima perang berhasil mendapatkan dukungan yang luas di Sumatra atas dasar hubungan yang benar-benar ada atau rasa-rasanya ada dengan dinasti Pagarruyung. Pada 1680-an Ahmad Shah bin Iskandar mendapat dukungan dari penguasa-penguasa Palembang dan Jambi, dan dari kepala-kepala suku di Lampung dan Bengkulu, dalam "perang suci"-nya melawan Belanda.[9] Satu generasi kemudian, pada 1717-8, Raja Kecil berhasil dengan mengaku sebagai pangeran keturunan dari Pagarruyung merebut singgasana Siak dan singgasana Riau.[10]

Bahkan orang Batak, yang hidup terpencil di lembah-lembah pegunungan, tampaknya juga hormat pada raja Pagarruyung. Menurut Marsden,

> Orang Batak meski berjiwa bebas memiliki rasa hormat tinggi berdasar tahyul bagi Sultan Menangkabau, dan menunjukkan kepatuhan membabi buta kepada sanak keluarga dan utusan-utusannya, baik yang sejati maupun yang palsu, bila mereka ini muncul untuk tujuan mengumpulkan sumbangan . . . mereka percaya hidup mereka tidak akan selamat, padi mereka akan diserang hama, dan kerbau mereka akan mati: bahwa mereka akan terus termakan kutuk, jika perasaan utusan-utusan suci itu tersinggung.[11]

Kekuasaan Minangkabau yang amat jauh tetapi menarik ini tampaknya diakhiri oleh ekspansi militan kaum Padri pada tiga dekade pertama abad ke-19. Para pejuang reformasi Islam ini mungkin mencoba mempersatukan seluruh Sumatra dengan Islam sebagai landasan, dan menjadikan lembah-lembah di tengah-tengah Sumatra Tengah dan Sumatra Timur, bukan kota-kota pantai, sebagai pusat-pusat kekuasaan.[12] Namun, taktik mereka yang agresif di Tapanuli Selatan, menghasilkan dampak yang sebaliknya, yakni mengubah citra suci tetapi jauh Minangkabau menjadi citra permusuhan dan ancaman,

sama dengan citra yang sudah lama melekat pada Aceh. Seorang penulis Batak baru-baru ini[13] melihat serangan kaum Padri sebagai sebuah titik tolak penting yang memecah-mecah orang Batak satu sama lain dan dengan Minangkabau. Diterimanya agama Kristen setelah itu oleh orang Batak Toba dapat dilihat sebagai jawaban bagi ancaman atas identitas Toba ini.

Karena itu, pada akhir abad ke-19 tidak ada ingatan mengenai identitas Sumatra atau kesetiaan bersama kepadanya. Bahkan perasaan anti-Belanda yang dibangkitkan oleh Perang Aceh tidak dapat berkobar lebih luas kecuali dalam kalangan kecil pengikut Singamangaraja XII pada tahun 1880-an. Pucuk pimpinan Aceh menulis surat kepada pucuk pimpinan Minangkabau dan Batak meminta dukungan pada 1873, tetapi karena surat-surat mereka dipercayakan kepada seorang mata-mata Belanda tidak ada kemungkinan surat-surat itu sampai ke alamatnya. Utusan-utusan Aceh lebih berhasil di antara penduduk yang bertetangga, yakni penduduk Gayo dan penduduk Karo, meski para utusan yang dikirim ke Karo pada akhirnya dibunuh di situ pada 1874, barangkali karena rasa tidak percaya mendarah daging orang Karo atas niat orang Aceh seperti disinggung oleh Singarimbun.[14]

Perhubungan Wilayah

Jika ada pusat perekonomian dan perhubungan untuk Sumatra pada abad ke-19, maka pusat itu terletak di wilayah kekuasaan Inggris, Penang, dan Singapura. Karena perdagangan mereka terpusat di situ, hanya di situ orang Sumatra dari berbagai pelosok pulau itu kemungkinan bertemu muka. Bagi orang Aceh, misalnya, kata Snouk Hurgronje pada 1893, "Penang adalah gerbang ke dunia; ya, dunia itu sendiri".[15] Jika orang Aceh menggunakan istilah *pulau* tanpa disertai keterangan-keterangan tambahan, maka itu berarti Penang, bukan Sumatra.

Persoalan nama ini juga dihadapi oleh dua kekuatan Eropa yang, melihat Sumatra sebagai sebuah nama tempat di atas peta, mengirimkan konsul ke situ pada abad ke-19. Prancis menempatkan konsulnya untuk Sumatra di Padang, pos utama Belanda, pada periode 1856-65,[16] dan Inggris menempatkan konsulnya di Ulèëlheuë, pelabuhan yang memasok kebutuhan pasukan Belanda di Aceh, pada 1883-5. Kedua konsulat itu ternyata "gagal besar", karena perdagangan yang dimaksudkannya untuk dilayaninya berkembang hanya dengan menghindari pusat-pusat kekuasaan Belanda ini dan dengan berdagang di sejumlah pelabuhan bebas kecil di sepanjang pantai Sumatra.[17]

Belanda pada abad ke-19 tahu paling tidak ada dua Sumatra – Pantai Barat dan Pantai Timur – dengan Palembang sebagai sesuatu yang lain lagi, yang hampir menjadi bagian dari Jawa. Surat-surat kabar paling awal di kedua Sumatra ini menyatakan diri sebagai orang Sumatra, tetapi dalam kenyataan, *Sumatra Post* (Medan, 1889-) hanya beredar dalam kalangan pekebun di Sumatra Timur, sedangkan *Sumatra Bode* (Padang 1893-) hanya di Pantai Barat.

Jawa secara fisik dipersatukan oleh sebuah jalan kereta api 1894, yang terbentang di atas jaringan jalan pos yang sudah lama ada. Sebaliknya, pembangunan jalan kereta api di Sumatra bukan dimaksud untuk mempersatukan seluruh pulau itu tetapi masing-masing dari ketiga daerah tersebut di atas. Jalan kereta api Sumatra utara mulai pada kedua ujungnya pada tahun 1880-an, dan akhirnya baru menghubungkan Aceh dengan Medan, Belawan, dan Asahan pada 1916. Sama halnya, jalan kereta api Lampung dan jalan kereta api Palembang–Lahat terhubung pada 1927. Sementara itu, jalan kereta api ketiga dan lebih pendek dibangun di Sumatra Barat pada tahun 1880-an. Ketiga jalan kereta api yang terpisah-pisah ini tidak pernah terhubung satu sama lain, dan jalan rayalah akhirnya yang mewujudkan kesatuan ekonomi pulau itu. Lonjakan tinggi pembangunan jalan raya dan impor kendaraan ke Sumatra terjadi bersamaan dengan lonjakan tinggi harga karet pada pertengahan 1920-an. Jumlah truk dan bus yang diimpor ke Sumatra naik dari 94 pada 1924 menjadi 1172 pada 1926, sementara impor kendaraan pribadi pada periode yang sama naik dari 539 menjadi 3059. Dari sisi penduduk, kendaraan bermotor memainkan peranan yang lebih besar di Sumatra daripada di Jawa, dan akhirnya mematahkan isolasi daerah-daerah pulau itu satu sama lain. "Jalan Raya Sumatra" *(longitudinalen weg)* yang pertama dirancang pada 1916, tetapi jembatan terakhir yang menghubungkan jaringan selatan dengan jaringan utara dan jaringan tengah baru selesai pada 1938. Bukan suatu kebetulan karena itu bahwa dekade Sumatra sebagai sebuah satuan politik/administrasi otonom juga mulai pada 1938, dan karena itu diresmikan pada saat perhubungan antar-daerah lebih mudah daripada pada waktu-waktu sebelumnya atau sejak itu. Selama 1940-an para pejabat Sumatra terus melakukan inspeksi di seluruh pulau itu dengan mobil, sesuatu yang dapat dilakukan hanya oleh orang yang sangat berani dan sabar pada 1950-an dan 1960-an.

"Nasionalisme Sumatra"

Namun, puncak "nasionalisme Sumatra" terjadi lebih awal—dua dekade

sebelum landasan bagi persatuan diletakkan oleh jaringan jalan raya ini. Seperti halnya dengan gerakan-gerakan Indonesia lainnya, nasionalisme Sumatra mulai di sistem persekolahan berbahasa Belanda, terutama di sekolah kedokteran STOVIA di Batavia. Sekolah elite ini, yang mendidik putra-putra paling cerdas dari berbagai daerah dan penduduk Indonesia, melahirkan Budi Utomo dan Jong Java, dan tidak mengherankan bahwa siswa-siswa Sumatra yang minoritas merasa perlu memiliki kendaraan sendiri untuk mengungkapkan cita-cita bersama mencapai persatuan dan kemajuan. Pada Desember 1917 Jong Sumatranen Bond (JSB) dibentuk "untuk pemuda-pemuda Sumatra yang sedang menuntut ilmu di sekolah menengah pertama atau sekolah kejuruan", dengan tujuan utama "memperkuat ikatan antara pemuda-pemuda Sumatra yang sedang belajar, dengan menghilangkan semua perasaan berdasar ras *(rassenwaan)...* dan dengan mengajukan kepada setiap anggota tuntutan yang tidak dapat dihindari bahwa ia menamakan dirinya sendiri orang Sumatra" (*Jong-Sumatra,* 1918). Ketuanya yang pertama, pangeran dari Asahan (Sumatra Timur) dan mahasiswa kedokteran Tengku Mansur, dalam pidato pembukaannya menekankan bahwa orang Sumatra akan tetap dianggap remeh kecuali jika mereka bersatu. Namun kerjasama perlu tidak saja antara orang Sumatra tetapi juga dengan kelompok-kelompok suku yang lain di India Belanda. Ketua kedua, orang Minangkabau (kemudian Dr) Amir, jauh lebih tegas lagi menolak "chauvinism" sejumlah orang yang bermimpi memisahkan "sebuah negara dan bangsa mutlak Sumatra" dari ikatan dengan India Belanda.[18] Seperti kata Lance Castles,[19] kaum nasionalis Sumatra ini berbicara "bahasa . . . persatuan, bukan pemisahan; . . . . mereka benar-benar tidak memiliki alasan meyakinkan mengapa bekerja sama harus dibatasi pada Sumatra saja". Nasionalisme Sumatra adalah sebuah tahap dalam gerakan menuju nasionalisme Indonesia, bukan kontradiksinya (berbeda dengan nasionalisme Jawa, dengan kaitan-kaitan budayanya yang lebih dalam, yang kadang-kadang memang kontradiksi dari nasionalisme Indonesia).

Tidak mengherankan bahwa rasa persatuan Sumatra pertama-tama dirasakan oleh para siswa di Batavia, yang sadar benar bahwa mereka kalah suara dalam sebuah lingkungan yang asing. Namun, prakarsa JSB mendapat sambutan yang cepat di Sumatra sendiri. Cabang-cabang JSB didirikan di Bukittinggi dan Padang (Hatta menjadi seorang pemimpinnya yang penuh semangat) pada Januari 1918, dan di Medan pada Mei. Lebih menarik lagi, gerakan-gerakan politik rakyat di Sumatra Barat dan Tapanuli memasuki periode menakjubkan semangat pan-Sumatra antara 1918 dan 1922. Suratkabar seperti *Tjahaja Sumatra, Sinar Sumatra,* dan *Sumatra Bergerak* didirikan, dan

kongres-kongres persatuan mengucapkan sumpah setia kepada Sumatra sebagai ”pulau masa depan”.

Penggagas kongres-kongres persatuan adalah aktivis-aktivis politik muda yang kebetulan berpijak di atas lebih dari satu kelompok suku bangsa. Karim M.S. (kemudian menjadi pemimpin PKI Sumatra) adalah orang Minangkabau yang besar di Aceh dan Sumatra Timur; Manullang, orang Batak Toba yang berapi-api, yang sebagai pemimpin dari Hatopan Kristen Batak yang radikal itu sering bekerja sama dengan orang Batak selatan Islam dari Sarekat Islam; dan wartawan Batak Angkola Abdulmanap dan Parada Harahap keduanya bekerja untuk suratkabar radikal di Sibolga, *Hindia Sepakat,* yang dibaca di Aceh, Tapanuli, dan Sumatra Barat. Mereka mengadakan dua kongres persatuan persiapan, di Sibolga dan Padang berturut-turut, pada dua bulan terakhir 1921, dan memperjuangkan antara lain pemindahan kantor pusat Sarekat Sumatra dari Batavia (di situ bertindak terutama sebagai lobi bagi anggota Volksraad dari Minangkabau, Abdul Rivai dan Abdul Muis) ke Sumatra.[20]

Titik puncak gerakan Persatuan Sumatra ini adalah sebuah konferensi di Padang yang dihadiri banyak peserta pada Juli 1922, dengan Manullang sebagai ketua dan Karim sebagai sekretaris. Partai-partai politik yang paling aktif di Sumatra pada waktu itu, Sarekat Islam dan NIP (bekas Indische Partij), dan banyak himpunan setempat di Sumatra Barat, Tapanuli, Sumatra Timur, dan Aceh, mengirimkan utusan ke konferensi itu. Nadanya yang radikal terungkap dalam sejumlah resolusi, satu di antaranya menyerukan ”pemberian otonomi secepatnya kepada Sumatra, karena Sumatra mengharapkan pembebasan India Belanda dari bawah kekuasaan Belanda”.[21] Namun, setelah itu, gerakan itu mengalami kemunduran dengan sangat cepat. Salah satu sebab ialah radikalismenya yang berakibat sejumlah aktivis ditangkap dan dimasukkan ke dalam penjara dan menimbulkan ketakutan di kalangan pemimpin yang sudah berkedudukan mantap. Sebab yang lain adalah kesulitan mencapai kesepakatan mengenai kantor pusat atau pemimpin yang benar-benar dapat mewakili semua pihak. Dan sebab yang lebih penting lagi, kenyataan bahwa semakin banyak reformasi yang dituntut dari pemerintah Belanda, semakin jelas terlihat kepentingan bersama dengan organisasi-organisasi nasionalis di seluruh India Belanda.

Seperti halnya dengan sebagian besar politisi yang terlibat dalam gerakan persatuan Sumatra, JSB juga bergerak semakin banyak ke arus utama nasionalisme Indonesia. Sejak 1926, JSB menghadiri serangkaian konferensi pemuda nasional, dan kehilangan dinamika nyata dirinya sendiri jauh sebelum meleburkan diri ke dalam Pemuda Indonesia pada 1931. Salah satu faktor yang

memperlambat peleburan ini ialah pemisahan diri sebuah organisasi Jong Batak pada 1926. Para siswa Batak Toba memutuskan bahwa mereka akan menjalin sendiri hubungan mereka dengan nasionalisme Indonesia sebagai orang Batak, bukan melalui perantaraan apa yang mereka lihat (ada benarnya juga) sebagai organisasi yang didominasi oleh orang Minangkabau. Dalam iklim semangat nasionalisme yang berkobar-kobar setelah 1926 itu tampaknya bagi pihak-pihak yang lain jalan yang tepat untuk ditempuh.

Seorang skeptis mungkin akan mengatakan, Belanda akan mempertimbangkan soal otonomi Sumatra hanya bila mereka telah merasa yakin bahwa para pemimpin politik Indonesia yang mengajukannya. Pada 1930 titik pusat politik rakyat jelas nasionalisme Indonesia dan pemerintah penjajahan yang bergerak dengan lamban menuju pembentukan "Provinsi" tunggal Sumatra sebagai salah satu dari enam satuan besar tanah jajahan itu. Meski pemerintah sekarang mengatakan ingin mendorong rasa "kesumatraan" yang dilihatnya,[22] tidak ada langkah yang diambil untuk itu. Pembentukan provinsi Sumatra, dengan undang-undang 1936 dan mulai berlaku pada 1938, seluruhnya hanya menyangkut penyusunan ulang fungsi-fungsi administrasi. Tidak ada sama sekali langkah diambil untuk membentuk unsur-unsur perwakilan — bahkan juga tidak untuk unsur perwakilan tidak bergigi seperti lembaga penasihat provinsi di Jawa. Seperti halnya dengan setiap diskusi mengenai persatuan Sumatra, soal paling sulit dalam perdebatan kolonial ini menyangkut ibukota. Pertama kali dipilih Padang, kemudian dipertimbangkan Palembang, tetapi akhirnya Medan yang dipilih Gubernur Sumatra pertama untuk tempat kedudukan dan kantornya.[23] Pilihan ini menekankan keutamaan kepentingan-kepentingan dagang dan administrasi Eropa.

Sumatra dalam Isolasi, 1943-5

Seperti diketahui, pendudukan Jepang mulai dengan penolakan penuh persatuan Indonesia. Jepang memperlakukan Sumatra dan Malaya sebagai satu kesatuan, "zona inti rencana Kekaisaran Jepang untuk Wilayah Selatan", dan dikelola oleh Angkatan Darat Ke-25 Jepang. Ibukota wilayah baru ini adalah Syonan (Singapura), yang mencerminkan realitas ekonomi abad ke-19 dengan lebih baik daripada realitas politik dan budaya abad ke-20. Langkah ini gagal sebagian besar karena kesulitan-kesulitan komunikasi antar-pulau yang semakin besar yang dihadapi Jepang, tetapi juga karena sistem hukum dan politik di kedua sisi Selat Malaka itu sekarang sudah jauh terpisah. Pada Mei 1943

hubungan dengan Malaya putus, dan Angkatan Darat Ke-25 mengurus Sumatra seorang diri. Sekarang ibukota dipindahkan ke Bukittinggi, bukan karena menghargainya sebagai "pusat budaya" Sumatra, seperti diperkirakan beberapa orang Minangkabau, tetapi semata-mata karena perhitungan-perhitungan strategi.

Slogan yang disukai Angkatan Darat Ke-25 setelah itu ialah "Sumatera Baru". Semua hubungan antara orang Indonesia di Sumatra dan orang Indonesia di pulau-pulau yang lain diputus, dan pembicaraan mengenai nasionalisme Indonesia dilarang. Namun, sampai detik-detik terakhir, Jepang tidak pernah melakukan suatu apapun untuk membangun identitas Sumatra yang positif untuk mengisi kekosongan ini. Tata administrasi sangat terpecah-pecah, setiap karesidenan *(sh)* harus mengembangkan sendiri perekonomian dan lembaga perwakilan rakyatnya. Hanya di sejumlah sekolah spesialis pan-Sumatra dan dua delegasi se-Sumatra ke Jepang dapat orang Sumatra dari berbagai karesidenan menyusun strategi bersama atau memupuk perasaan bersama. Dorongan bagi kemunculan kepemimpinan politik Sumatra semakin kecil ketika ketua delegasi se-Sumatra ke Jepang pada Oktober 1943 yang suka berterus terang, T.M. Hasan (dari Glumpang Payung, Aceh), dihukum mati oleh *Kempeitai* kurang dari setahun kemudian.

Baru pada empat bulan terakhir Pendudukan pimpinan Angkatan Darat Ke-25 mulai membangun kepemimpinan pan-Sumatra, dan itupun semata-mata sebagai cara menolak untuk tekanan yang tidak diinginkan dari Tokyo untuk bergerak menuju kemerdekaan Indonesia. Pada 24 Maret 1945 diumumkan akan dibentuk sebuah Dewan Penasihat Pusat Sumatra *(Chuo Sangi In)* – hampir dua tahun setelah lembaga seperti itu dibentuk di Jawa. Pada akhir Mei *Gunseikanbu* (Administrasi Militer) di Bukittinggi mengumumkan pilihannya menyangkut pemimpin-pemimpin untuk dewan itu. Ketua, Engku Mohammad Sjafei, pembaru pendidikan dari Minangkabau yang juga muncul sebagai politisi paling terkemuka di Sumatra Barat di bawah Jepang. Sekretaris, juga orang Minangkabau, Djamaluddin Adinegoro, barangkali seorang wartawan Indonesia yang terkemuka pada zamannya. Ia dipindahkan dari Medan ke Bukittinggi untuk memangku jabatan baru itu. Dua wakil ketua, masing-masing Teuku Njak Arif dan Mr. Abdul Abbas, berturut-turut, ketua dewan perwakilan di Aceh dan dewan perwakilan di Lampung. Selama Juni dan Juli tokoh-tokoh ini mulai diperkenalkan kepada masyarakat luas oleh pers yang dikendalikan dengan ketat oleh Jepang sebagai *empat serangkai* dari Sumatra, sama dengan empat serangkai di Jawa yang sudah lebih dahulu dikenal masyarakat.[24]

Satu-satunya pertemuan Dewan Penasihat Sumatra Tengah, yang bersidang selama lima hari dan berakhir pada 2 Juli 1945, memiliki arti yang sangat penting sebagai konferensi pertama yang mewakili semua kekuatan sosial dan politik yang penting-penting di Sumatra. Konferensi itu mengajukan sejumlah tuntutan berupa pengembangan secepatnya lembaga-lembaga rakyat, militer, dan pendidikan di seluruh Sumatra, dan tidak syak lagi membantu mengesahkan untuk pertama kalinya kepemimpinan Sumatra yang murni — Dr. A.K. Gani, seorang politisi Minangkabau yang bermukim di Palembang, dan pemimpin Batak Toba Dr. Ferdinand Lumbantobing, bergabung dengan *empat serangkai* di atas. Semangat pertemuan itu tampaknya menginginkan Sumatra yang lebih kuat dan lebih mengatur diri sendiri, tetapi menentang upaya Angkatan Darat Ke-25 untuk memisahkan pulau itu seluruhnya dari Indonesia merdeka yang telah diputuskan oleh Tokyo.

Provinsi Sumatra Republik Indonesia

Meski tergopoh-gopoh dan terlambat Angkatan Darat Ke-25 mempersiapkan sebuah Sumatra yang otonom, pemerintah Sumatra dapat sebenarnya mewujud menjadi sesuatu yang berarti seandainya saja persiapan-persiapan ke arah itu dilanjutkan oleh Republik yang datang kemudian. Tetapi karena sebab-sebab yang masih belum jelas, tiga utusan Sumatra yang dikirim ke rapat-rapat persiapan kemerdekaan di Jakarta pada pertengahan Agustus 1945 bukanlah pemimpin-pemimpin yang telah disiapkan di Bukittinggi. Jepang mengirim Mr Abbas dari Lampung, dan dua cendekiawan Medan yang tidak banyak berperan dalam persiapan-persiapan di Sumatra, Dr. M. Amir (obor bagi JSB pada masa jayanya) dan Mr. T. Hasan. Di tengah-tengah persiapan-persiapan yang dilakukan dengan tergesa-gesa setelah proklamasi kemerdekaan di Jakarta, Dr. Amir berhasil memastikan Medan, bukan Bukittinggi, yang akan ditetapkan sebagai ibukota Provinsi Sumatra Republik, dan orang Aceh yang tidak banyak dikenal itu, Mr. Hasan, diangkat sebagai Gubernur. Dr Amir, anggota non-aktif kabinet pertama Sukarno, diangkat menjadi Wakil Gubernur Sumatra pada Desember.

Sumatra Barat dan Palembang tidak puas dengan keputusan-keputusan yang diambil di Jakarta itu dan dengan kepemimpinan Hasan dan Amir di Medan. Selama bulan-bulan pertama kemerdekaan Sjafei dan Adinegoro di Sumatra Barat dan Dr. Gani di Palembang keduanya terus mengeluarkan proklamasi-proklamasi atas nama Sumatra sebagai keseluruhan, mengisyaratkan

dengan demikian mereka telah kehilangan kesabaran atas kelambanan Hasan melakukan apa yang diperlukan untuk membentuk Pemerintah Republik. Klaim mereka atas kepemimpinan tandingan mendapat semacam pengesahan dengan pengangkatan Gani untuk mewakili Partai Negara PNI dan kemudian Angkatan Darat Republik di Sumatra, dan pengangkatan Adinegoro untuk mewakili Kementerian Penerangan Republik di Sumatra.

Singkatnya, kepemimpinan se-Sumatra Republik mendapat dukungan yang sangat kecil dari pulau itu secara keseluruhan. Bandingkan ini dengan para pemimpin yang ditunjuk Jepang di setiap Karesidenan di Sumatra (kecuali Sumatra Timur, di sini tidak ada), yang dapat mengambil alih kendali dengan cukup lancar setelah kemerdekaan. Hal yang ternyata sangat menguntungkan bagi persatuan Indonesia kelak bahwa tidak ada kepemimpinan Sumatra yang kuat yang telah disiapkan oleh Jepang dan diakui oleh Republik.[25]

Hasan dan Amir, terutama Amir, tampaknya memang memperjuangkan "otonomi mengenai urusan dalam dan luar" untuk Sumatra.[26] Setelah sebuah kunjungan ke Jawa pada Desember 1945 Amir mengadakan konferensi pers yang menyatakan bahwa "pemerintah Republik di Jawa menganggap Sumatra dari sisi politik dan ekonomi bebas dari Jawa, dan bebas mengambil tindakan apa saja yang tidak bertentangan dengan kepentingan Republik".[27] Ia tampaknya sudah berpikir mengenai sebuah konfederasi Indonesia yang longgar. Namun, ia dipaksa menarik pernyataannya itu kembali secepat-cepatnya oleh *pemuda* yang curiga atas segala sesuatu yang berbau separatisme di pihak generasi yang lebih tua. Terutama pada paruh pertama 1946, organisasi-organisasi *pemuda* di Sumatra Timur terus mengintimidasi kepemimpinan resmi Republik, dan tidak memberi mereka peluang untuk menjalankan kekuasaan. Dr. Amir demikian kecewa dengan dirinya sendiri karena tidak efektif sehingga ia menyeberang ke pihak Sekutu pada April 1946, mengeluhkan, "Sama sekali tidak ada persatuan di Sumatra — Tidak ada satu pun alat kekuasaan."[28]

Namun sebenarnya sebuah pemerintah se-Sumatra sudah mulai menampakkan bentuk agak jelas sekitar waktu ini, tetapi lebih sebagai penghubung antara Karesidenan dan ibukota Republik daripada sebagai sebuah pusat kekuasaan yang bebas. Tergugah oleh laporan-laporan mengenai keadaan kacau di Sumatra, terutama di Sumatra Timur, delegasi pertama Pemerintah Pusat mengadakan perjalanan keliling pada bulan April di seluruh pulau itu di bawah pimpinan Amir Sjarifuddin. Para menteri menghadiri pertemuan pertama dewan perwakilan se-Sumatra (KNI) di Bukittinggi, yang membantu memberikan semacam keabsahan kepada Hasan sebagai Gubernur, dan

membentuk sebuah komite kerja untuk membantu dia. Pada Juni dan Juli para anggota komite kerja ini mulai bertemu di Pematang Siantar, yang telah dipilih sebagai ibukota baru Sumatra untuk menggantikan Medan yang didominasi Sekutu. Kepala-kepala berbagai kementerian se-Sumatra juga diangkat untuk berdiam di situ. Setelah itu, misi-misi dari Jogjakarta datang secara berkala dalam upaya memperkuat posisi Republlik dengan bekerja melalui pemerintah se-Sumatra ini. Karena pemerintah Belanda sudah mengumumkan pada awal Mei tidak dapat mengakui klaim Republik atas Sumatra mengingat kekacauan yang terjadi di situ, menjadi prioritas utama bagi Republik untuk membuktikan bahwa keadaan stabil dan terkendali. Wakil Presiden Hatta sendiri mulai berkeliling Sumatra bersama Gubernur Hasan pada Juni 1947, dan tinggal di situ selama aksi militer Belanda.

Sementara Yogyakarta mencoba memperkuat pemerintah Provinsi Sumatra yang lemah itu, para politisi di Sumatra sendiri terus menerus menuntut pembubarannya. Untuk Sumatra Tengah dan Sumatra Selatan ibukota terlalu jauh, dan bahkan di Utara kelompok-kelompok *pemuda* lebih memberikan perhatian kepada utusan-utusan pemerintah pusat daripada kepada utusan-utusan gubernur Sumatra. Penjarahan *raja* Sumatra Timur dan perdagangan melalui penyelundupan yang sangat menguntungkan ke Singapura menghembuskan bau korupsi ke berbagai tingkat pemerintah di Sumatra Republik, sehingga berkembang keinginan bagi suatu pemerintah yang cukup dekat untuk dikendalikan, atau cukup jauh (dari Jawa) untuk dianggap bersih. Pertemuan pertama KNI Sumatra memulai proses pelimpahan kekuasaan dengan memutuskan pengangkatan tiga wakil gubernur, di Sumatra Utara, Sumatra Tengah, dan Sumatra Selatan, yang bertanggung jawab kepada gubernur. Namun, ketiga wakil gubernur ini belum sempat bertugas karena kedahuluan oleh aksi militer Belanda dan kepindahan ke *Daerah Militer.* Aksi militer itu juga mempercepat kembalinya ibukota Sumatra ke Bukittinggi di bawah bimbingan Hatta.[29]

Pemecahan Provinsi Sumatra menjadi tiga provinsi—Sumatra Utara, Tengah, dan Selatan—diusulkan oleh dewan perwakilan se-Sumatra dalam sidangnya di Bukittinggi pada Mei 1947. Namun, mengingat krisis yang disebabkan oleh aksi militer Belanda, tidak ada langkah diambil untuk melaksanakan ini sampai April 1948, ketika sebuah undang-undang (UU No. 10 tahun 1948) disetujui oleh parlemen Republik yang dengan demikian mengakhiri dekade Sumatra sebagai sebuah satuan administrasi. Tiga provinsi dibentuk di Sumatra, masing-masing di bawah seorang Gubernur, dibantu oleh

sebuah badan pelaksana yang dipilih oleh dewan perwakilan rakyat (DPR). Mr S.M. Amin, seorang pengacara asal Mandailing tetapi tinggal di Aceh, menjadi gubernur pertama Sumatra Timur pada 19 Juni 1948. Meski timbul banyak perdebatan antara Tapanuli dan Aceh mengenai ibukota Sumatra Utara (karena sebagian besar wilayah Sumatra Timur di bawah kekuasaan Belanda), Amin tetap di Kutaraja (Banda Aceh).[30]

Federal / Harapan Belanda

Strategi Belanda untuk mengepung Republik melalui sebuah Indonesia berbentuk negara federal juga melibatkan dari sejak awal semacam satuan se-Sumatra. Rencana Belanda menggariskan pembentukan negara-negara bagian besar di Sumatra, Borneo, dan Indonesia Timur (satu-satunya yang berhasil dibentuk), masing-masing terdiri dari kumpulan satuan-satuan kecil otonom berdasar suku bangsa. Namun, pada Februari 1947, sebuah memorandum Belanda yang paham situasi[31] mengakui bahwa Belanda tidak berdaya untuk memisahkan Sumatra dari Jawa karena justru perlawanan bersama keduanya terhadap Belanda yang menyebabkan kedua pulau itu merasa dekat satu sama lain. Bahkan kalaupun perjuangan anti-Belanda itu berakhir, kata Idenberg, "dalam praktek akan sangat sulit mendirikan sebuah pemerintah sendiri di Sumatra yang mendapat dukungan dari rakyat Sumatra".[32] Dari keempat pengelompokan utama di Sumatra itu tidak ada satu pun yang merasa gagasan bagi sebuah pemerintah Sumatra yang kuat benar-benar menarik. Orang Sumatra Selatan secara keseluruhan lebih takut dominasi Minangkabau daripada dominasi Jawa; orang Minangkabau, meski melihat diri mereka sebagai pemimpin alami Sumatra secara umum, tidak dapat meyakinkan diri mereka sendiri untuk menerima keabsahan struktur pemerintahan atau kepemimpinan apapun; orang Batak dan orang Aceh, dua kelompok yang lain, tidak terlalu bersemangat mengenai struktur politik apapun jika mereka tidak dominan di dalamnya. Dengan kata lain, semuanya "lebih suka mengaitkan diri kepada gagasan separuh-sakti, Republik Indonesia, daripada kepada gagasan yang jauh lebih nyata, Sumatra Raya, yang mengharuskan mereka menerima pengaruh orang-orang Sumatra yang lain."[33] Direktur Urusan Umum mencapai kesimpulan bahwa akan sangat sulit memasukkan satuan Sumatra macam apapun ke dalam sebuah struktur federal yang mengandalkan Sumatra untuk membayar semua biaya tetapi di dalamnya orang Sumatra kalah suara.

> Begitu kita sampai pada pengaturan mendasar hubungan-hubungan Indonesia kita dihadapkan kepada berbagai kontradiksi, yang lebih mudah diselesaikan untuk sementara melalui gejala emosional seperti Republik Indonesia daripada melalui sebuah struktur politik yang tertib.[34]

Konferensi-konferensi se-Sumatra yang diselenggarakan oleh kaum federalis pada 1949 tampaknya sudah ditakdirkan akan to fulfil this prophecy. Dr. Tengku Mansur, ketua pertama JSB, menjadi kepala Negara Sumatra Timur (NST) dukungan Belanda pada Januari 1948, yang berkuasa atas wilayah yang diduduki pasukan Belanda pada tahun sebelumnya. Ia, seperti telah diperkirakan, sangat bersemangat mengenai Sumatra yang kuat dan bersatu, dan ia mendapat dukungan kuat dari rekannya di Negara Sumatra Selatan, Abdul Malik. Pada 29 Maret mereka berhasil mengumpulkan untuk menghadiri sebuah "Muktamar Sumatera" di Medan 84 delegasi dari 16 daerah. Hanya Aceh dan Nias, yang tidak pernah diduduki pasukan Belanda dalam "Aksi Polisionil Kedua", yang tidak diwakili.[35]

Pidato pembukaan Dr. Mansur mengingatkan orang kembali kepada kata-kata JSB, yang menekankan persatuan, bukan pemisahan. Ia mengibaratkan Sumatra sebagai sebuah tonggak tempat bersandar gedung besar federasi Indonesia. Tetapi "tonggak yang terbuat dari batu akan pecah bercerai berai dan tidak memiliki kekuatan . . . kita harus bekerja menjadi semen perekat batu-batu itu".[36] Namun konferensi tidak dapat mencapai kesepakatan mengenai apa pun kecuali niat "untuk mewujudkan sebuah Sumatra yang kuat dan bersatu" dan bertemu kembali.[37] Persaingan antar-suku dan antar-daerah mewarnai seluruh konferensi, sebagian besar delegasi lebih banyak memusatkan perhatian kepada upaya memperkuat otonomi daerah masing-masing daripada memberikan kekuasaan apapun kepada sebuah pemerintah Sumatra. "Muktamar Sumatera" kedua diadakan di Medan pada 28 Mei, dan memilih sebuah "federasi sementara" di Sumatra sebagai bagian dari Indonesia federal. Namun hanya satu pekan setelah keputusan ragu-ragu ini diambil keputusan itu ditorpedo oleh pendukung utama seluruh gerakan itu, Negara Sumatra Timur; dewan perwakilan rakyatnya menolak partisipasi NST dalam federasi Sumatra karena ini akan membahayakan kemerdekaannya.[38] Dengan kata lain, mereka yang prinsipnya percaya kepada federalisme sekalipun, tidak dapat membentuk sebuah satuan Sumatra.

Kesimpulan

Dalam jangka panjang Republik Indonesia menyadari bahwa bahkan provinsi-provinsi yang lebih kecil—Sumatra Utara, Sumatra Tengah, dan Sumatra Selatan—sarat dengan pertentangan yang tidak memungkinkan ketiganya bersatu. Masing-masing provinsi terpecah-pecah sedemikian rupa sehingga garis batas provinsi sebagian besar kembali ke garis batas lama menurut suku yang membentuk karesidenan-karesidenan di bawah pemerintahan Belanda. Kecuali Sumatra Utara. Dua wilayah bagiannya pada masa sebelum perang, Sumatra Timur dan Tapanuli, masing-masing demikian terpecah-pecah menurut suku sehingga sebuah Sumatra Utara multi-suku yang lebih kompleks tampaknya tidak akan banyak mendapat tentangan. Barangkali sebagian karena alasan ini maka Medan masih tetap berambisi menjadi fokus bagi seluruh Sumatra.[39]

Sejarah pemberontakan PRRI mempertegas tema bab ini, bahwa lebih mudah bagi orang Sumatra zaman modern mengaitkan diri kepada sebuah pemerintah yang jauh di Jawa daripada kepada sebuah pemerintah yang dekat di Sumatra. Banyak manfaatnya dari kacamata keilmuan untuk melihat Sumatra sebagai satu keseluruhan, tetapi kita tidak akan pernah dapat melihatnya dalam isolasi terpisah dari tetangga-tetangganya—seperti pernah dilakukan oleh orang Sumatra sendiri.

3

Dari Darat ke Pesisir: Arus Perpindahan Penduduk Sumatra pada Zaman Penjajahan

> Pelancong pada masa lalu hampir sepenuhnya dibatasi pada dataran rendah, taman, pantai menyilaukan, dan kehidupan sibuk di laut. Sebenarnya, sejarawan tidak berbeda dengan pelancong. Ia cenderung bermalas-malasan di dataran rendah, pentas pelaku-pelaku utama zaman bersangkutan, dan tampak enggan mendekati ke pegunungan tinggi di dekatnya.[1]

Penduduk kepulauan Indonesia yang sekarang tidak memiliki sejarah yang amat panjang di situ. Bukti-bukti linguistik dan peninggalan-peninggalan purbakala menunjukkan pergerakan bahasa-bahasa Austronesia ke selatan dari Taiwan selama lima ribu tahun terakhir, dibawa oleh bangsa-bangsa yang juga terkenal dengan pertanian sawah dan tembikarnya.[2] Banyak migrasi maritim penting-penting terjadi pada waktu akhir-akhir ini saja. Karena itu bukankah masuk akal jika kita sampai pada kesimpulan bahwa bangsa-bangsa itu menempati terlebih dahulu tanah-tanah subur di dataran rendah dan di pesisir yang sekarang kita lihat penuh hamparan sawah, dan juga dekat dengan lumbung ikan? Baru ketika tekanan penduduk atau konflik di antara mereka memaksa beberapa perintis keluar dari dataran pesisir, akan kita saksikan mereka menembus pegunungan pulau-pulau itu.

Akan tetapi, mitologi asal-usul suku-suku bangsa yang menghuni kepulauan Indonesia tidak pernah berbicara tentang laut, pantai dan migrasi berangsur-angsur ke pedalaman, tetapi tentang nenek moyang di pegunungan.[3] Di pulau-pulau seperti Bali dan Nias ada semacam rasa tidak suka kepada laut, dan kebiasaan membangun desa di puncak gunung, bukan dekat perairan.

Bahkan pulau-pulau kecil yang pernah memainkan peranan maritim sangat penting sepanjang sejarah masa lalu, seringkali menoleh ke tradisi yang lebih lama, tradisi membangun desa di tempat tinggi di pedalaman. Tidore (Maluku Utara), misalnya, pernah mengirim ekspedisi *kora-kora* sampai ke New Guinea dan menerima upeti dari puluhan pulau, tetapi ibukotanya yang pertama bukan di pesisir tempat Soa sekarang tetapi enam kilometer di atas gunung di Gurabanga.

Selama periode pertumbuhan penduduk yang cepat pada abad ke-20, migrasi terpenting di Indonesia bukan migrasi penduduk dataran rendah ke dataran tinggi berpenduduk jarang, yang merupakan ciri khas di Tiongkok dan Vietnam (dan sampai batas tertentu merupakan tujuan pemerintah Indonesia melalui program transmigrasi) tetapi sebaliknya. Orang Batak, orang Minangkabau, orang Banjar, orang Minahasa, orang Toraja, dan orang Atoni pindah dari lembah-lembah pegunungan yang relatif padat dan miskin ke kota-kota pantai dan dataran rendah.

Bagaimana kita menjelaskan hal yang bertentangan ini dari apa yang dianggap wilayah paling "maritim" di Asia? Apakah kondisi pra-kolonial lebih mendukung permukiman di dataran tinggi, sedangkan kota-kota di dataran rendah baru menarik di bawah kondisi kolonial tinggi dan modern? Apakah kolonialisme membelokkan perkembangan dataran tinggi yang lebih "alami" yang kita harapkan tanpa itu [kolonialisme]? Atau, apakah ini sebuah paradoks palsu, berdasarkan mitologi asal-usul yang terkait dengan gunung-gunung suci? Sebelum membahas penjelasan-penjelasan yang mungkin ada, akan saya tinjau secara sangat singkat pola migrasi di pulau-pulau Indonesia yang lebih besar, dan kemudian akan saya kumpulkan bukti-bukti tentang Sumatra.

Pola Migrasi Indonesia yang Lebih Luas

Borneo secara keseluruhan teramat jarang penduduknya bahkan menurut standar Asia Tenggara sepanjang sejarah tertulis. Daerah rawa dan deltanya yang luas di pesisir dan sebagian besar belum tersentuh tangan manusia, baru sejak sekitar seratus tahun yang lalu mulai digarap, dan banyak dari penduduk yang sekarang mendiami daerah dataran rendah ini berasal dari luar pulau itu — terutama dari Sulawesi Selatan, Tiongkok Selatan, Filipina selatan, dan Jawa.[4] Bahkan orang Dayak Iban dan kelompok-kelompok terkait yang sekarang membentuk bagian terbesar orang "Dayak" atau penduduk asli bukan-Islam Sarawak dan Kalimantan Barat memiliki bahasa yang sangat dekat dengan

bahasa Melayu dan tradisi-tradisi yang menunjukkan imigrasi ke Borneo dari wilayah Selat Malaka selama seribu tahun terakhir.[5]

Meski Borneo memiliki wilayah dataran tinggi sejati yang relatif kecil untuk mendukung tahap-tahap awal pertanian, namun wilayah kecil ini tampaknya memainkan peran yang sangat besar dalam perkembangan tanah pertanian tertua di situ. Orang Kelabit di Borneo Utara-Tengah khusunya tampaknya sudah mahir bersawah sejak berabad-abad di lembah-lembah aluvial lebih dari 1.000 meter di atas permukaan laut di sekitar ujung timur laut perbatasan Sarawak-Kalimantan sekarang, dan mengembangkan sebuah budaya kompleks tempa besi dan tembikar di situ, dan juga menciptakan kuburan-kuburan batu berukir dan tugu-tugu yang sudah berusia ribuan tahun barangkali.[6] Orang Kayan dan orang Kenyah yang jumlahya lebih besar di daerah bertetangga di hulu-hulu sungai di timur dan barat laut Borneo adalah petani ladang, tetapi juga telah mengembangkan seni kerajinan tangan ke tingkat yang tinggi, tugu-tugu batu berukir, dan struktur sosial berjenjang. Menurut Raymond Kennedy semua kelompok orang Kayan menelusuri asal-usul mereka ke tanah nenek moyang di Apo Kayan. Ia yakin "negeri di dataran tinggi yang naik turun" itu pusat pembauran kelompok-kelompok penduduk Borneo yang lebih "beradab."[7]

Kadazan (dusun) yang berjumlah lebih besar, yang mendominasi daerah pesisir barat yang subur Sabah sekarang pada awal kekuasaan Chartered Company, menelusuri asal-usul mereka ke Nunuk Ragang ("pohon beringin merah"), yang sekarang adalah wilayah persimpangan sungai Liwagu dan sungai Gelibang di timur pegunungan Crocker yang membentuk punggung Sabah. Menurut dongeng itu, tekanan penduduk menyebabkan penduduk pindah dari daerah dataran tinggi ini ke lembah-lembah di pantai barat.[8]

Sejauh ini penduduk terpadat Borneo pada masa pra-kolonial adalah di Hulu Sungai, beberapa ratus kilometer di hulu sungai Barito di atas Banjarmasin. Memanfaatkan lembah-lembah aluvial di timur anak-anak sungai sungai Barito, yang mengalir ke laut dari Pegunungan Meratus, atau wilayah di sekitar danau-danau dan daerah-daerah rawa tempat sisa-sisa air bah menciptakan kondisi yang bagus untuk bertanam padi sawah, orang Banjar di daerah kecil ini barangkali mewakili hampir separuh dari seluruh penduduk Borneo pada awal abad ke-18.[9] Migrasi orang Banjar mulai pada tahun 1850-an, mula-mula ke sekitar Borneo tenggara dan pada tahun 1870-an ke wilayah tengah Sungai Mahakam di Borneo Timur. Pada 1890 mereka mulai pindah ke Sumatra Timur dan Semenanjung Malaya. Menurut Sensus 1930 ada 551.571

jiwa orang Banjar di Hulu Sungai dengan kepadatan 47 per km^2 (dan juga 200.000 jiwa lagi di hilir Distrik Banjarmasin), sedangkan kepadatan penduduk seluruh Borneo Belanda hanya 4 jiwa per km^2. Tetapi hingga saat itu sudah ada sekitar 80.000 orang Banjar di Sumatra dan 45.000 di Malaya.[10]

Di Sulawesi harus dibedakan antara orang Bugis, orang Makassar, dan orang Mandar yang tinggal di barat daya semenanjung itu, yang tampaknya sudah mengembangkan pertanian padi di dataran rendah di pesisir pada abad ke-16, dan hampir di sebagian besar daerah lainnya pulau itu—tempat pertanian terutama merupakan kegiatan dataran tinggi. Pusat beras dan penduduk di Minahasa tampaknya di lembah antar-pegunungan yang menadahi danau Tondano.[11] Danau-danau dataran tinggi yang lain, seperti danau Poso dan danau Lindu, merupakan pusat-pusat permukiman yang penting, meski pusat utama peninggalan-peninggalan penuh rahasia dari zaman batu di Sulawesi Tengah adalah lembah pegunungan di tengah di antara kedua danau ini. Orang Toraja dari daerah pegunungan tengah juga sudah mengembangkan peradaban tanpa kekuasaan terpusat yang kompleks di ketinggian lebih dari 1.000 meter dari permukaan laut.

Bahkan untuk budaya-budaya yang tidak dapat dikatakan budaya dataran tinggi atau pedalaman, danau patut mendapat perhatian sebagai pusat penduduk dan fokus bagi sejumlah kerajaan pertama. Danau Limboto tampaknya memainkan peran dalam perkembangan budaya perikanan dan padi di Gorontalo, sementara C. Pelras[12] berpendapat danau Tempe-lah, di Wajo (Sulawesi Selatan), yang memungkinkan orang Bugis mengembangkan budaya tersendiri. Cadangan besi dan nikel di sekitar danau Matano tampaknya turut berperan pada awal-awal perkembangan kerajaan Bugis di Luwu.[13]

Timor memiliki daerah pesisir yang sempit dengan ketinggian kurang dari 300 meter, dan hingga sekarang belum banyak digarap. Pola pertanian dominan adalah pola pertanian dataran tinggi, yang menghasilkan beras dan jagung melalui pertanian berpindah yang lama kelamaan semakin sulit dipertahankan karena kondisi kering di sebagian besar wilayah itu. Orang Atoni Pa Meto ("orang dari tanah kering") yang besarnya tiga perempat dari seluruh penduduk Timor Barat, menganggap diri murni petani dataran tinggi. Seperti banyak penduduk di pulau-pulau Indonesia bagian timur, mereka menolak upaya pemerintah pada abad ini untuk memindahkan mereka ke dataran rendah pesisir dengan maksud memudahkan pemerintah mengendalikan dan mengubah mereka.[14]

Jawa adalah pulau besar yang paling sulit untuk dimasukkan ke dalam pola "Sumatra" yang saya usulkan. Jawa Barat memang memiliki kesamaan dari sisi tanah dan iklim dengan Sumatra, dan lembah-lembahnya yang luas di dataran tinggi barangkali memiliki potensi pertanian yang lebih besar daripada dataran rendah. Selain itu pada abad ke-16 sebuah kerajaan Islam di pesisir dan berbahasa Jawa—Banten—menciptakan dua budaya yang terpisah tajam dengan orang Sunda setengah tidak berkerajaan di lembah-lembah dataran tinggi ini. Tetapi berbeda dengan dataran tinggi Sumatra, Priangan memberi kesan kepada para pengunjung Belanda paling awal pada abad ke-18 sebagai daerah tidak berpenduduk yang menurut F. de Haan[15] akibat epidemi, khususnya penyakit cacar, dan pasokan makanan yang tidak menentu. Namun, karena pengendalian oleh Belanda umumnya lebih dahulu daripada pelaporan yang memadai Belanda di wilayah ini, keadaan tidak berpenduduk itu mungkin karena penduduk dataran tinggi itu ingin mempertahankan kemerdekaan mereka dan karena itu mundur ke timur sebelum sersan-sersan kopi Belanda muncul.

Bukti-bukti dari Sumatra yang disajikan di bawah mungkin menuntut tinjauan ulang atas sejarah Jawa Barat yang sedikit sekali diteliti itu, dan barangkali tinjauan ulang atas asumsi-asumsi lama bahwa budaya Sunda mulai di sekitar wilayah Bogor-Jakarta, tempat bukti-bukti utama mengenai semacam kerajaan difokuskan. Apakah "ekspansi orang Jawa Islam ke sepanjang pesisir utara memutus hubungan orang Sunda dengan laut dan memaksa mereka untuk bermukim di dataran tinggi Priangan," seperti kata Th.G.Th. Pigeaud[16] atau apakah mereka sudah ada di situ sejak awal, sedangkan "kerajaan" Pajajaran bertindak hanya sebagai penengah antara peradaban gunung ini dengan dunia luar, seperti halnya "raja-raja" Batak dalam periode yang sama?[17]

Jawa Tengah dan Jawa Timur tidak dapat dijadikan model untuk Indonesia, keduanya adalah kekecualian, dalam arti di situ, "berbeda dengan wilayah-wilayah Asia Tenggara di sekitarnya, ada [...] homogenitas suku yang tinggi dari sejak periode sebelumnya".[18] Pertanian sawah beririgasi di dataran rendah dan delta sudah dikerjakan sejak abad ke-14 dan barangkali sebelumnya, yang kemudian membasmi nyamuk malaria *Anopheles sundaicus* dari wilayah-wilayah yang sudah digarap. Meski orang Jawa sangat jarang bersatu dari sisi politik sepanjang sejarah mereka yang panjang, lalulintas yang relatif mudah di sepanjang sungai Solo dan sungai Brantas tampaknya menciptakan interaksi budaya dan ekonomi yang lebih tinggi antara pesisir dan pedalaman dibandingkan dengan di pulau-pulau besar lainnya.

Namun, Jawa dapat dijadikan model yang dapat membantu kita memahami bagaimana "abad perniagaan" mempengaruhi perimbangan penduduk di beberapa daerah yang lain. Pusat-pusat Hindu-Jawa tertua terletak jauh dari pantai, di sekitar wilayah pertanian beras di dataran Mataram dan di hulu sungai Solo dan sungai Brantas. Namun, dari sekitar 1300 hingga 1600, ketika manfaat perdagangan menarik penduduk dan produksi beras ke arah pesisir, pertama Majapahit dan kemudian Demak, Cirebon, Gresik, dan Surabaya semuanya berkembang sementara kita hampir tidak mendengar apa-apa mengenai wilayah pedalaman. Tahap ini dapat dikatakan sama dengan perubahan yang terjadi pada periode yang sama di pesisir utara (Aceh) Sumatra dan di semenanjung Sulawesi Selatan, tempat pertanian sawah beririgasi di dataran rendah juga berkembang untuk memberi makan kota-kota pelabuhan yang semakin besar.

Krisis yang kompleks pada abad ke-17, dengan elemennya yang paling jelas, jika bukan paling mendasar, monopoli paksa VOC, tampaknya memulihkan keunggulan banding dataran tinggi pedalaman.[20] Penguasa baru Mataram mempersatukan dataran rendah pedalaman Surakarta dan Yogyakarta yang subur, dan Sultan Agung menyerang *pasisir* (daerah pesisir utara) dan memindahkan sebagian besar sisa penduduk ke pedalaman. Ketika istana Mataram menjelaskan jumlah rakyatnya yang dipersenjatai kepada Rijklof van Goens pada tahun 1650-an, dicatat 630.000 untuk Mataram pusat dan wilayah pedalaman, dan hanya 290.000 (30 persen) untuk distrik-distrik *pasisir* (termasuk Cirebon).[21] Ketika *cacah* (rumah tangga) dihitung pada 1755 untuk bagian-bagian kerajaan itu, jumlah rumah tangga di pedalaman masih lebih dari dua kali lipat daripada jumlah rumah tangga di *pasisir* yang berada di bawah kekuasaan VOC – meski Ricklefs telah membuktikan angka-angka ini kemungkinan angka-angka konvensional yang mengabaikan jumlah korban di daerah pedalaman yang dicabik-cabik perang.[22] Ketika Belanda pertama kali mengadakan cacah jiwa pada 1795 *pasisir* dan Madura bersama-sama sudah menyamai (perkiraan kemungkinan terlalu rendah) *cacah* jiwa di pedalaman Jawa Tengah dan Jawa Timur .[23] Kita dapat menggunakan dengan lebih yakin cacah jiwa pertama Belanda untuk seluruh pulau itu, pada 1831, ketika daerah pedalaman, yang disebut Peter Boomgaard *kejawen,* dan *pasisir* masing-masing berpenduduk sekitar 2,2 juta jiwa, ditambah penduduk dataran rendah dan pantai Oosthoek sebesar 0,8 juta.[24]
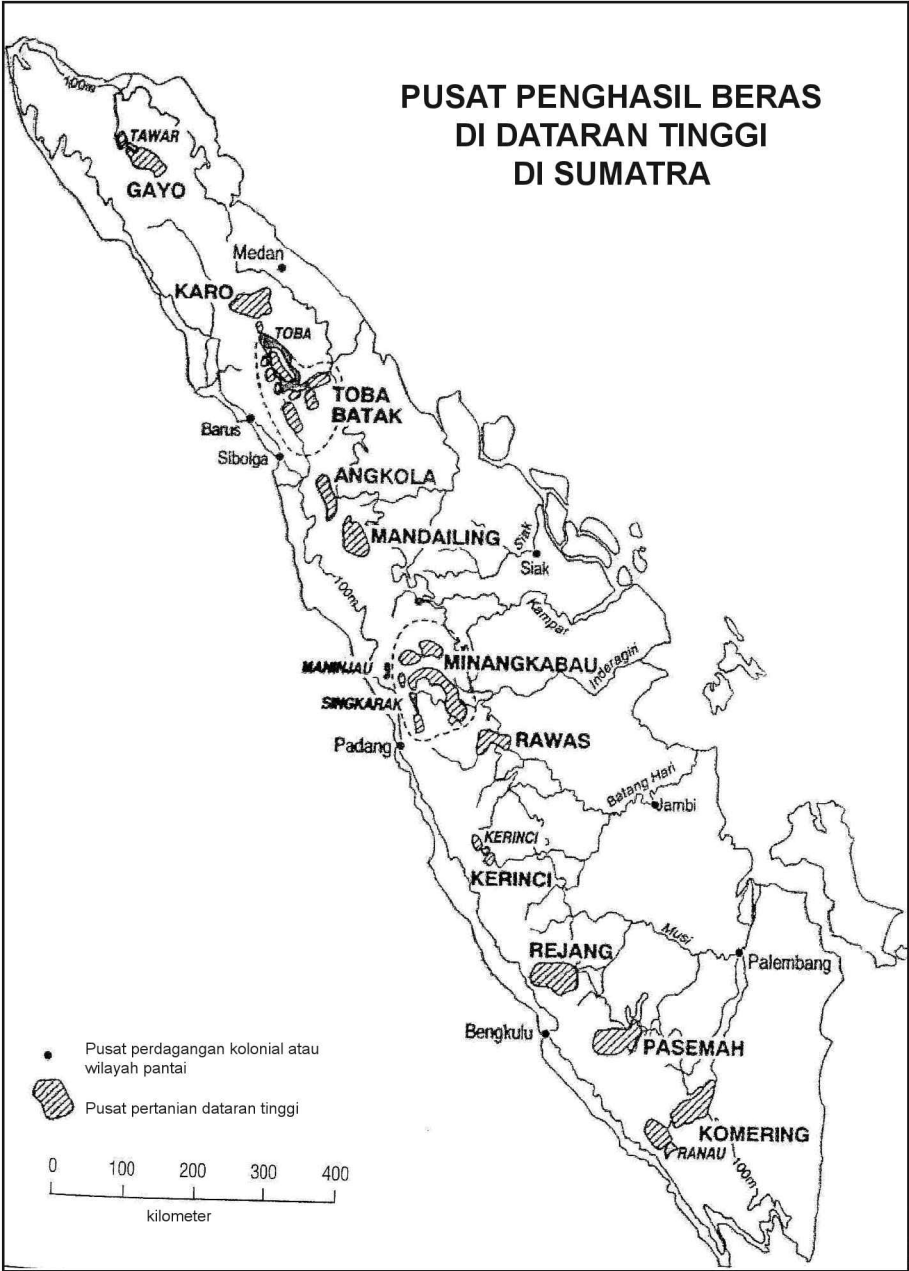
Kita dapat mengambil kesimpulan bahwa sementara intervensi Belanda di pesisir pada abad ke-17 turut menimbulkan keadaan tidak stabil di wilayah itu sehingga tidak menarik untuk tempat tinggal, hal sebaliknya terjadi setelah 1755. Kendali Belanda atas *pasisir* antara 1755 dan 1830 mendorong perpindahan penduduk yang kedua keluar dari jantung Mataram, dan tidak syak lagi perpindahan ini sebagian disebabkan oleh Perang Jawa yang ganas pada 1825-30 itu. Perpindahan penduduk zaman modern ke dataran rendah di Jawa dihadapkan pada hambatan geografi dan budaya yang jauh lebih rendah daripada di pulau-pulau lain, dan mulai 50-100 tahun lebih dahulu.

Sumatra

Sumatra contoh yang sangat baik mengenai pertanian dataran tinggi dan dataran rendah yang kosong penduduk sebelum akhir abad ke-19. Ahli agronomi dan pra-sejarah sudah lama tahu mengenai gejala ini, tetapi sejarawan tetap terpesona oleh kemilau kerajaan-kerajaan seperti Sriwijaya, Pasai, Aceh, Barus, Palembang, Jambi, Riau, dan Siak dalam sumber-sumber tertulis dari dalam dan luar, dan tidak sadar daerah pedalaman yang padat penduduk tidak pernah disinggung oleh sumber-sumber itu. Penjelajah-penjelajah pemberani abad ke-19 yang menembus lembah-lembah di pegunungan Bukit Barisan, dari Raffles dan Burton dan Ward dan seterusnya, terheran-heran setiap kali bertemu dengan daerah pertanian yang subur dan berpenduduk padat di dataran tinggi di pedalaman. Tetapi karena penduduk dataran tinggi tidak meninggalkan catatan tertulis atau membangun kerajaan terpusat, kita terus saja menulis sejarah yang mengabaikan mereka dan melihat mereka sebagai pelaku paling tidak penting, atau paling-paling sebagai orang ulu yang sekali-sekali mengirimkan hasil pertanian, upeti, dan budak kepada penguasa di pelabuhan-pelabuhan sungai. Peta Sumatra utara dalam buku terbitan 1874 karangan seorang ahli geografi Eropa terkemuka dan spesialis mengenai Indonesia, P.J. Veth, menceminkan masalah di atas — segala sesuatu di luar dataran rendah di sepanjang pantai diberi keterangan, "sangat banyak gunung dengan pedalaman sama sekali tidak dikenal" dan kehadiran danau Toba tampaknya diragukan seperti tercermin dalam gambar di peta berupa torehan kecil yang menunjukkan ukurannya sepersepuluh dari ukurannya yang sebenarnya dan terletak di sekitar Tarutung (Gambar 4).[25]

Bukti-bukti sudah semakin banyak terkumpul, pertanian paling awal di Sumatra tidak lahir di delta sungai atau dataran rendah di pesisir seperti

Gambar 4 Peta Sumatra utara 1873 oleh P.J. Veth, daerah pedalaman diberi keterangan "sangat banyak gunung dan sama sekali tidak dikenal".
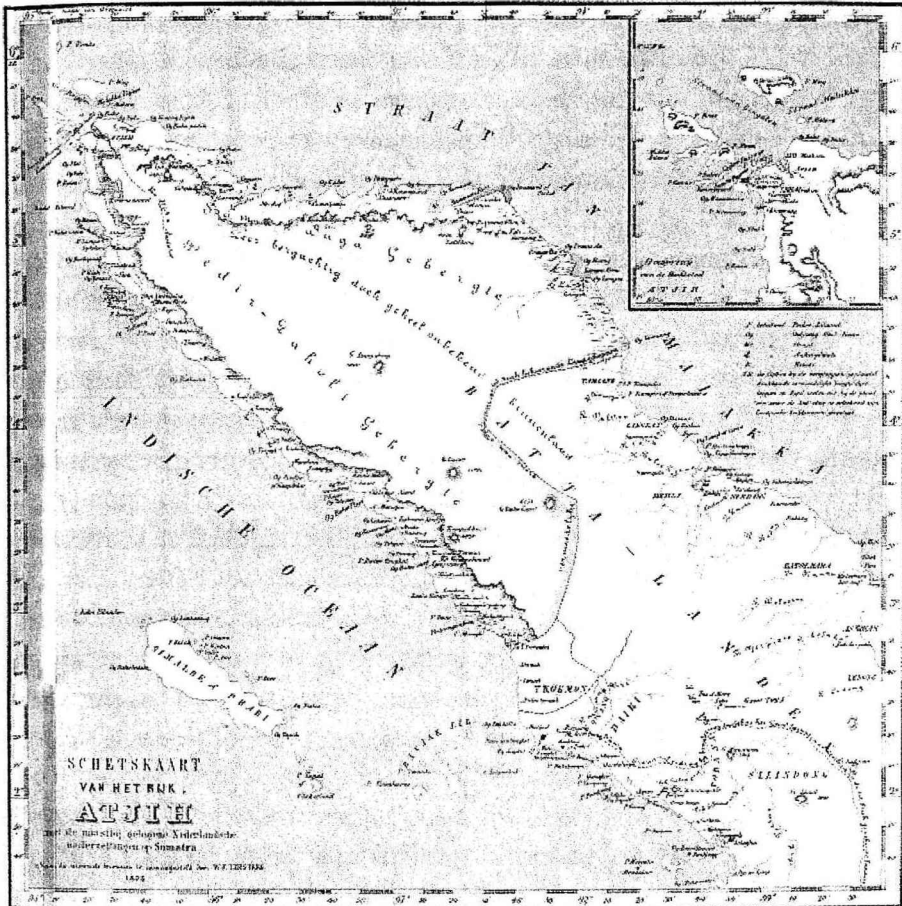
Sumber: P.J. Veth, *Atjeh* (Leiden: Kolff, 1893).

kita perkirakan, tetapi di lembah-lembah tinggi di pegunungan Bukit Barisan, dan umumnya lebih dari 500 meter di atas permukaan laut. Analisis Pollen mengenai bebatuan di dasar danau yang diambil dari sebelah selatan danau Toba dan di sekitar danau Kerinci menunjukkan bukti-bukti bahwa pertanian sawah sudah ada di daerah danau Toba 5.000 tahun yang lalu dan di daerah danau Kerinci 3.000 tahun yang lalu.[26] Para sejarawan agronomi dari Jepang sudah membuktikan bahwa lembah-lembah di dataran tinggi di Sumatra, seperti di Thailand, cocok sekali untuk tahap-tahap awal pertanian padi, dan salah seorang dari mereka membuktikan bahwa lembah Besemah (Pasemah)

meninggalkan bekas-bekas pertanian sawah basah dan berteknologi rendah (tidak pakai bajak, *sawah-mini* yang diairi dari anak sungai, menuai dengan *ani-ani)* seperti juga ditemukan dua ribu tahun yang lalu di Jepang dan Yunnan.[27] Sebagian besar peninggalan dari zaman pra-Islam di Sumatra ditemukan di dataran tinggi sekitar beberapa hari perjalanan dari pelabuhan – patung-patung batu luar biasa, peti-peti mati dari batu, dan menhir di Besemah (0-500 Sesudah Masehi), sisa-sisa candi Buddha Tantrik di Padang Lawas (abad ke-10 hingga ke-13), dan tulisan dan patung Adityawarman di Pagarruyung (abad ke-14). Kerajinan perunggu setara perunggu Dongson ditemukan dekat danau-danau di pegunungan—danau Kerinci dan danau Ranau—di dataran tinggi Sumatra Selatan, sedangkan salah satu dari patung-patung batu Besemah di Pagaralam menggambarkan sebuah tabuh Dongson tipe Heger I.[28]

Di pihak lain, pesisir Sumatra tidak cocok untuk pertanian awal, dengan satu kekecualian, wilayah pesisir sempit di utara Aceh, tempat sejak sekitar abad ke-16 sawah-sawah permanen dibuat untuk memberi makan penduduk di kota dan di wilayah pantai yang terus bertambah di zaman perdagangan. Pesisir timur di selatan sungai Asahan dikelilingi oleh rawa air pasang, dan bahkan di belakang rawa ini hujan turun terus menerus (hampir tidak ada musim kemarau), sehingga sangat sulit mengerjakan pertanian berpindah-pindah. Kota-kota seperti Palembang dan Jambi mendapat pasokan beras hampir seluruhya dari daerah hulu sungai-sungai yang pelabuhan-pelabuhannya dikuasainya.[29] Pesisir barat tidak memiliki tanah datar, dan sebagian besar berupa rawa-rawa di delta-delta. Christine Dobbin melukiskan perpindahan penduduk ke pesisir utara Padang pada awal abad ke-19 sebagai berikut:

> desa-desa pantai yang kecil dan lusuh sangat berbeda dengan desa-desa di dataran tinggi. Desa-desa itu kecil dari sisi ukuran dan jumlah penduduk; bahkan desa-desa utama, seperti Ulakan [ ] menampilkan "wajah melarat" (Nahuijs). Di balik desa-desa ini terbentang dataran rawa-rawa yang sangat jarang penduduknya [ ] Bahkan di wilayah-wilayah paling luas, ada rawa-rawa dan padang alang-alang yang luas, yang memisahkan satu desa dari desa yang lain.[30]

Di Bengkulu pada abad ke-18 orang Inggris terus bertanya-tanya mengapa wilayah kekuasaan mereka demikian jarang penduduknya. Mereka menyalahkan tidak suburnya tanah, penyakit, seringnya pengguguran kandungan, rumitnya adat perkawinan, dan menghindarnya penduduk dari permintaan Inggris akan

tenaga kerja, tetapi beberapa yakin wilayah pesisir itu dapat menampung 50 kali lipat penduduknya.[31]

Sebaliknya, lembah-lembah di dataran tinggi yang didiami (dari selatan ke utara) orang Ranau, orang Komering, orang Rawas, orang Besemah, orang Rejang, orang Kerinci, orang Minangkabau, orang Mandailing, orang Angkola, orang Toba Batak, dan orang Batak Karo, semuanya menurut laporan berpenduduk padat di setiap tempat mereka terlihat untuk pertama kali oleh orang Eropa pada abad ke-19. Sebagian besar penduduk yang tinggal di pantai pindah ke sana baru-baru ini dari dataran tinggi yang lebih padat penduduknya – seperti orang Besemah dan orang Rejang di daerah pantai Bengkulu, orang Minangkabau yang turun ke pelabuhan-pelabuhan di pantai barat untuk berniaga, orang Batak Toba yang menetap di pelabuhan Barus dan pelabuhan Tapanuli (Sibolga) di pantai barat, dan di daerah pertanian di Asahan di pantai timur (sejarah asal usul di sini menunjukkan perpindahan dari dataran tinggi terjadi pada abad ke-18), atau orang Batak Karo yang bertanam lada di daerah Deli Langkat, Sumatra Timur, pada awal abad ke-19. Beberapa mitologi asal-usul dari orang-orang ini berkisah tentang kontak nenek moyang mereka dengan Jawa (kadang-kadang sebagai Majapahit) atau India, tetapi semua percaya mereka berkembang menjadi suku berciri khas tersendiri di dataran tinggi mereka sendiri, di sebuah tempat asal-usul keramat, dan dari sini semuanya kemudian menyebar.

Angka-angka penduduk jarang ada dan tidak dapat dipercaya sebelum transformasi modern, tetapi cenderung menguatkan gambaran ini. Kunjungan Thomas Stamford Raffles ke Pagarruyung di dataran tinggi Minangkabau pada 1818 meyakinkan dia bahwa penduduk dalam radius 75 kilometer "tidak mungkin lebih rendah daripada satu juta jiwa", sedangkan Burton dan Ward pada 1824 memperkirakan "seluruh tanah Batak" didiami oleh 1,5 juta jiwa." Pada 1817 seorang penjelajah Inggris mengatakan di Besemah Lebar saja jumlah penduduk 100.000[33] dan pada tahun berikutnya Raffles melaporkan, daerah Pagaralam di Besemah yang dikunjunginya merupakan "salah satu dari negeri-negeri yang terbaik di dunia", banyak desanya berpenduduk lebih dari 500 orang dan beras di situ harganya hanya seperlima dari harga beras di wilayah pesisir Bengkulu.[34]

Tekanan penduduk atas lahan sawah di Besemah pada akhir abad ke-18 mulai mendorong Besemah untuk menggarap tanah lain di dataran tinggi, di hulu sungai Ogan, sungai Komering dan sungai di sisi timur, dan sungai Manna dan sungai Alas di sisi barat, dan juga di selatan, di daerah Ranau

dan Lampung. Tetapi pada umumnya orang Besemah menghindari pindah ke wilayah di bawah 500 meter dari permukaan laut karena sistem pengairan sawah mereka membutuhkan air dari bukit. "Kami bisa bertanam hanya di kaki gunung yang ada sumber airnya untuk dialirkan ke sawah kami", seperti kata seorang penduduk kepada seorang pejabat Belanda.[35]

Dibandingkan dengan penduduk di dataran tinggi yang besar pada abad ke-19, daerah pesisir Bengkulu hanya berpenduduk 60.000 ketika orang Inggris mengadakan survei di situ pada 1819,[36] meski sensus setelah 1960 menunjukkan antara dua pertiga dan tiga perempat penduduk provinsi Bengkulu bermukim di daerah pesisir. Sensus 1920 mencatat hanya ada 61.000 orang Palembang, tetapi memasukkan 212.000 orang Sumatra Selatan ke dalam kategori orang ulu, yang mencakup orang Ogan, orang Komering, orang Semendo, orang Rejang, orang Besemah, dan orang Serawai.[37]

Untuk Sumatra Barat dapat dibuat tabel penduduk dataran tinggi dan dataran rendah (Tabel 1) untuk periode agak lebih panjang, meski kita tetap harus waspada mengenai angka-angka dari periode-periode sebelumnya. Penduduk dataran tinggi terpusat di tiga lembah antar-pegunungan Tanah Datar, Limapuluh Kota, dan Agam, bersama dengan lembah Solok di selatan danau Singkarak–yang tidak memainkan peranan penting dalam bidang pertanian tetapi perkembangan modern banyak terjadi di situ.

Angka-angka penduduk paling awal adalah angka perkiraan yang sangat kasar sehingga dapat diabaikan saja, seandainya angka-angka itu tidak lebih dahulu ada daripada Perang Padri yang membawa kehancuran itu, yang mungkin sekali salah satu faktor yang memulai tahap modern perpindahan luar biasa penduduk dari dataran tinggi Minangkabau tempat perang itu berkecamuk. Kalaupun kita lihat pola itu hanya dari angka-angka tahun 1852 yang lebih dapat dipercaya, perubahan perimbangan penduduk dalam periode kolonial jelas sekali terlihat. Antara 1852 dan 1990 penduduk dataran tinggi naik hanya empat kali lipat (dan penduduk di tiga daerah lumbung beras asal kenaikan hanya tiga kali lipat), sedangkan penduduk dataran rendah naik 14 kali lipat. Sebagai perbandingan, penduduk Jawa naik 11 kali lipat dalam periode yang sama. Bahkan lebih banyak lagi orang Minangkabau yang pindah ke dataran rendah di pantai timur Sumatra atau di Jawa atau Malaya, daripada ke dataran rendah di pesisir yang tetap berada dalam garis batas provinsi Sumatra Barat. Menurut sensus 1930, 211.000 orang Minangkabau atau 11 persen dari penduduk Sumatra Barat sudah tinggal di luar kampung halaman mereka – kelompok terbesar ada di Jambi (58.000), Riau (51.000), Sumatra

Timur (51.000), dan Malaya (14.000 – tidak termasuk migran Negri Sembilan dari abad ke-18).[38] Setelah kemerdekaan

TABEL 1
Perubahan perimbangan penduduk di Sumatra Barat

	ca 1830[a]	1852[b]	1920[c]	1990[d]
Tanah Datar Solok	Antara 200.000 dan 600.000	153.604 70.752	260.835 221.316	380.709 782.551
Limapuluh Kota	300.000	103.567	182.672	387.847
Agam	100.000	197.217	246.890	491.520
Jumlah dataran tinggi	ca 800.000 (91%)	556.980 (80%)	958.784 (64%)	2.042.627 (51%)
Dataran rendah berpantai	ca 80.000 (9%)	138.937 (20%)	546.777 (36%)	1.956.050 (49%)

Catatan:

[a] Angka-angka Belanda tahun 1824 dan 1833, dikutip oleh Dobbin.[39] Angka untuk dataran rendah angka perkiraan saya sendiri, berdasarkan angka-angka Belanda (13.000 untuk Padang dan 50.000 untuk dataran rendah pantai di sebelah utara.

[b] Sensus Belanda 1852 yang dikutip E. Graves.[40] Angka "Total dataran tinggi" lebih besar daripada jumlah penduduk empat distrik utama karena ada tambahan dari Ophir dan Rau, daerah dataran tinggi yang tidak luas di utara.

[c] Angka-angka diambil dari Graves.[41] Angka total penduduk dataran tinggi juga lebih tinggi di sini karena sebab yang sama.

[d] Biro Pusat Statistik.[42] Perbatasan Kabupaten agak berbeda dari perbatasan dalam onderafdelingen Belanda; penduduk kota yang sekarang terpisah dari sisi administrasi sudah ditambahkan kepada angka total kabupaten.

Jakarta dan kota-kota besar Republik yang lain menjadi daya tarik bagi migran Minangkabau. Lance Castles memperkirakan ada 60.000 orang Minangkabau di Jakarta pada 1962 dan pemuka-pemuka Minangkabau memperkirakan 10 persen penduduk Jakarta pada tahun 1970-an terdiri dari orang Minangkabau (meski tidak syak lagi ini agak dibesar-besarkan).[43] Sensus zaman modern tidak menurut suku tetapi menurut tempat lahir, dan ini tentu dapat menangkap hanya migran generasi pertama. Berdasarkan ini berarti, 15 persen dari orang Minangkabau yang lahir di Sumatra Barat tidak lagi berada di situ menurut sensus 1990, dengan kelompok-kelompok terbesar berada di Jakarta (154.000), Riau (146.000) dan Jawa Barat (88.170).[44]

Orang Batak Dataran Tinggi

Tradisi lisan Batak Toba, dan tradisi lisan banyak lagi marga Batak yang lain,

menelusuri asal usul mereka ke nenek moyang Si Raja Batak, yang turun dari punggung pegunungan (Pusuk Buhit) yang menguasai pantai barat danau Toba. Di situ ia membangun sebuah desa dan sawah Sianjur Mula-Mula, dan dianugerahi dua orang putra, yang menjadi nenek moyang belahan suku Batak—Lontung dan Sumba. Pada zaman sekarang, tidak pelak lagi karena pengaruh garis keturunan rinci marga yang terbit pada tahun 1920-an,[45] orang Batak Toba menarik garis kekerabatan dengan menelusuri nenek moyang bersama ke angka-angka mengenai nenek moyang ini. Namun, garis keturunan terpanjang tidak lebih dari 25 hingga 30 generasi, nampaknya ada kemungkinan penduduk yang bertalian darah dengan orang Batak sudah menempati pantai danau Toba lebih dari 2.000 tahun.[46]

Konsentrasi suku-suku Batak di sekitar danau Toba, pada ketinggian sekitar seribu meter, tidak dapat dijelaskan semata-mata oleh unsur tidak cocoknya daerah dataran rendah Sumatra Utara untuk permukiman. Kedua pantai Sumatra memiliki tanah yang subur dan pelabuhan-pelabuhan yang aman pada ketinggian danau Toba, dan Pantai Timur khususnya sudah berkembang pada abad ke-20 menjadi salah satu daerah pertanian yang makmur di Indonesia. Namun, daerah dataran rendah ini juga masih tetap merupakan rimba berpenduduk jarang sampai tahun 1860-an, sementara orang Batak mengembangkan peradaban pertanian yang kompleks di lembah-lembah dataran tinggi mereka di sekitar danau Toba, yang perlahan-lahan menyebar ke selatan dan timur ke wilayah-wilayah dataran tinggi yang lain, tetapi jarang bertani dekat pesisir.

Angka perkiraan Burton dan Wardin pada 1824, bahwa seluruhnya ada 1,5 juta orang Batak, umumnya dianggap terlalu tinggi, karena bahkan pada zaman sekarang pun, jumlah penduduk dataran tinggi Batak tengah masih belum mencapai angka itu. Angka perkiraan Lance Castles yang cermat merupakan angka paling bermanfaat untuk abad ke-19, yang berdasarkan ekstrapolasi angka-angka rinci 1840 Junghuns. Dengan cara itu ia sampai pada angka 352.000 untuk penduduk Karesidenan Tapanuli pada 1840, dan sekitar dua-pertiga dari ini diam di kabupaten Batak Toba sekarang, Tapanuli Utara. Namun Junghuhn sendiri merasa angka ini mungkin dua kali lipat lebih besar sebelum kehancuran besar yang dibawa gerakan Islam Padri militan yang menyerang wilayah Batak antara kunjungan Burton bersama Ward dan kunjungan Junghuhn sendiri.[47]

Dihitung dengan cara apapun, wilayah kecil yang terdiri dari pulau Samosir dan lembah dataran tinggi di selatan danau Toba dihuni penduduk

yang beberapa kali lipat daripada penduduk dataran rendah yang kemudian dimasukkan ke dalam Karesidenan Sumatra Timur. Ketika penduduk Karesidenan Sumatra Timur pertama kali dihitung pada 1880, hanya ada 119.000 orang di situ,[48] dan dari ini sekitar 30.000 migran baru dan kuli kontrak dari luar Sumatra, sedang beberapa (barangkali terlalu kecil) pasti orang Batak Karo dan orang Batak Toba yang tertarik pindah ke dataran rendah karena peluang yang semakin banyak seperti dicerminkan oleh perkebunan-perkebunan. Kalaupun kita anggap hitungan angka penduduk daerah pedalaman terlalu rendah, pada pertengahan abad ke-19 penduduk dataran rendah Sumatra Timur seluas 90.000 km2 itu tidak mungkin lebih dari 100.000 orang. Penduduk pulau kecil Samosir (670 km^2) di danau Toba saja sudah hampir sebanyak itu. Penduduknya ketika pertama kali dihitung pada 1907 sebesar 74.000, dengan kepadatan 110 per km^2 (tertinggi dibandingkan dengan daerah mana saja di luar Jawa dan Bali), meskipun mutu tanah dan curah hujan jauh lebih rendah dibandingkan dengan tanah dan curah hujan di Sumatra timur.[49] Mengingat perpindahan penduduk keluar dari Samosir tinggi, dapat kita simpulkan bahwa penduduk Samosir sudah sangat padat menurut standar Sumatra pada abad ke-19.

Begitu distrik perkebunan Sumatra Timur mulai mengimpor tenaga kerja secara besar-besaran, perubahan perimbangan penduduk Sumatra Utara bahkan lebih mengejutkan lagi dibandingkan dengan perubahan perimbangan penduduk Sumatra Barat (Tabel 2). Arus terbesar pada 1870-90 adalah arus orang Cina dan pada 1890-1930 arus kuli kontrak dari Jawa, tetapi juga ada, pada mulanya sedikit dan sejak 1940 sebagai unsur sangat dominan, arus setempat orang Batak, yang turun ke daerah dataran rendah.

Orang Batak lebih lambat daripada orang Minangkabau meninggalkan kampung halaman mereka di pegunungan yang luas. Tujuan-tujuan awal perpindahan dari jantung Batak Toba yang padat penduduk di sekitar danau Toba terutama ke lembah-lembah lain di dataran tinggi, di Dairi dan Alas di utara dan Silindung, Angkola, dan Asahan di selatan.[50] Migrasi besar-besaran orang Batak Toba ke dataran rendah ditopang oleh pemerintah kolonial, yang ingin mengembangka pertanian sawah basah di wilayah Simalungun ketika wilayah ini menjadi perbatasas baru bagi pengembangan perkebunan. Dari 1915 dan seterusnya petani Batak Toba membuka sawah di daerah Simalungun yang terletak lebih rendah dengan fasilitas pengairan disediakan oleh pemerintah. Pada 1930, 12 persen dari penduduk Batak Toba bermukim di dataran rendah Sumatra Timur, 49.000 di Simalungun dan 18.000 di Asahan.[51]

Seluruhnya, sensus 1930 menunjukkan "Batak" sudah menjadi migran terbesar di Indonesia, dengan 15,3 persen dari jumlah mereka tinggal di luar provinsi asli Batak, Provinsi Tapanuli, dibandingkan dengan 14 persen untuk Banjar, 11 persen untuk Minangkabau, 10,5 persen untuk Bugis, dan 9,5 persen untuk orang Manado –dan hanya 3,4 persen untuk orang Jawa, meski pemerintah berusaha sekuat tenaga mendorong mereka untuk ikut transmigrasi, dan 0,1 persen untuk orang Bali dan Sasak.[52]

Pada waktu bersamaan, orang Mandailing dari Tapanuli Selatan, yang cepat memanfaatkan peluang pendidikan kolonial dan sementara orang Islam dengan cepat bergabung ke dalam lapisan atas Melayu di Pantai Timur, mulai menduduki jabatan-jabatan bidang administrasi dan tata niaga di dataran rendah timur. Ada 45.000 orang dari mereka di pantai timur pada 1930, lebih dari setengah kali jumlah orang Mandailing yang tetap tinggal di kampung halaman.[53]

Revolusi 1945-9 dengan kehancuran yang dibawanya atas kekuasaan, tidak saja kekuasaan kolonial Belanda, tetapi juga atas kesultanan-kesultan Malaya dan perkebunan-perkebunan Barat, membuka pintu lebih besar lagi bagi migrasi orang Batak ke daerah dataran rendah. Meski angka-angka sensus menurut suku juga tidak ada, Cunningham (1958:95) menunjukkan dalam satu tahun rata-rata 17 gereja Batak Toba dibuka di Sumatra Timur pada periode 1950-5, dibandingkan dengan hanya dua gereja dalam satu tahun selama 50 tahun sebelumnya. Kekuatan arus migrasi keluar digambarkan dalam penelitiannya atas satu desa di lembah Meat yang berakhir di danau Toba. Dari 59 orang di desa itu pada 1950, setidak-tidaknya 34 (58 persen) sudah meninggalkan Pantai Timur hingga 1955, meski tingkat kesuburan yang tinggi ibu-ibu Batak meningkatkan jumlah penduduk yang tetap tinggal di desa hingga 42.[56]

Meski orang Batak Karo dari dataran tinggi Karo (kira-kira 1.300 meter di atas permukaan laut, di sebelah utara danau Toba) paling dekat dengan daerah Medan dan mungkin pernah mendominasi di situ, turun gunung mereka pada abad ke-20 ke dataran rendah adalah paling mutakhir dari semua arus turun gunung. Baru setelah pengalaman revolusi 1945-9 maka orang Karo secara besar-besaran menangkap peluang pendidikan dan kehidupan modern, dan turutserta bersama orang Toba menduduki tanah-tanah bekas perkebunan dekat Medan. Pada 1981 ada 52.000 orang Karo di Medan – jauh lebih sedikit daripada jumlah total orang Toba (183.000), orang Mandailing atau orang Minangkabau, tetapi bagian yang lebih besar (sekitar 10 persen) dari seluruh orang Batak Karo.[57]

TABEL 2
Perubahan perimbangan penduduk di Sumatra Utara (tidak termasuk Nias)

	Pertengahan abad ke-19[a]	1930[b]	1990[c]
Dataran tinggi Tapanuli Utara	ca 200.000	418.736	695.777
Tapanuli Selatan	ca 140.000	276.681	954.245
Dataran tinggi Karo	ca 60.000	86.411	257.981
Dairi	ca 20.000	54.053	276.980
Total dataran tinggi	ca 420.000 (79%)	835.881 (33%)	2.184.983 (23%)
Sumatra Timur minus Karo	ca 100.000	1.587.272	7.192.77
Sibolga dan Barus	ca 10.000	92.036	285.912
Total dataran rendah	ca 10.000 (21%)	1.679.308 (67%)	7.478.685 (77%)

Catatan:

a Angka-angka Tapanuli berdasarkan angka-angka Castles,[54] yang memperkirakan jumlah penduduk sekitar separuh dari jumlah pada 1930, sama dengan skala kenaikan dalam angka-angka sementara Junghuhn. Tetapi saya mengasumsikan tingkat kenaikan penduduk rata-rata sedikit di atas angka untuk Dairi, karena Dairi adalah perbatasn untuk imigrasi orang Batak Toba jauh sebelum 1930; dan sedikit di bawah imigrasi untuk Karo, yang sepanjang abad ke-20 berbeda dari daerah-daerah Batak yang lain, yakni tingkat kenaikan penduduknya rendah, dan yang lebih banyak menderita daripada daerah-daerah lain di bawah penaklukan Belanda. Angka perkiraan penduduk oleh Joustra pada 1906-8 ialah 84.000 untuk dataran tinggi Karo (dokumentasinya bagus), 25.000 untuk Dairi, 75.000 untuk Samosir dan 248.000 untuk daerah dataran tinggi Tapanuli Utara selebihnya.[55]

b *Volkstelling 1930, IV.*

c Biro Pusat Statistik, *Penduduk Indonesia,* hlm. 19.

Arah perkembangan dalam 20 tahun terakhir adalah migrasi tidak lagi ke kota-kota setempat di pesisir, dengan peluang cenderung dibatasi oleh dominasi suku tertentu di setiap kota, tetapi ke Jakarta. Jumlah migran kelahiran Sumatra Utara di provinsi-provinsi lain naik pesat menurut tiga sensus: 188.326 pada 1971, 417.659 pada 1980, dan 770.093 pada 1990. Dari angka terakhir, 200.000 di Jakarta dan 116.000 di Jawa Barat, artinya orang Sumatra Utara (sebagian besar orang Batak dari berbagai marga) merupakan kelompok ketiga terbesar di ibukota setelah orang Jawa dan orang Sunda.[58]

Perkembangan migrasi terkini dapat ditangkap dengan lebih baik dengan pertanyaan yang diajukan dalam dua sensus terakhir, yakni di mana orang tinggal selama lima tahun yang lalu. Ini menunjukkan, 177.289 orang meninggalkan Sumatra Utara dalam lima tahun sebelum sensus 1980 dan 277.647 sebelum sensus 1990. Kedua angka mutlak untuk 1990 dan tingkat kenaikan menunjukkan bahwa orang Batak (dalam arti seluas-luasnya) sekarang merupakan kelompok suku dengan kemungkinan paling untuk beremigrasi keluar provinsi mereka, meski provinsi itu sekarang mencakup wilayah asli tempat tujuan migrasi mereka (Sumatra Timur).

Pada 1995 saya mengadakan survei di Tiga Binanga (Karo) dan Samosir (Toba), serupa dengan survei Cunningham pada 1956. Hasil kedua survei ini menunjukkan arus migrasi yang sedemikian cepat sehingga mencapai titik hampir semua anak muda meninggalkan desa ketika berusia belasan tahun, dengan sebagian sangat kecil kembali ke kampung setelah menikah untuk merawat orang tua. Tetapi jika migran Cunningham hampir semuanya menuju dataran rendah Sumatran Timur, sekarang migran menuju Jakarta, Bandung, dan kawasan industri baru Batam dekat Singapura.

Sembilan rumah tangga di dusun (huta) Lumban Tongatonga (Pangururan, Samosir) melahirkan 69 anak sejak tahun 1950-an. Enam puluh satu dari ini sudah cukup umur untuk bermigrasi, dan dari ini hanya empat (7 persen) tetap tinggal di dusun. Empat puluh lima orang, atau 73 persen dari seluruh generasi, sudah meninggalkan Sumatra Utara, dengan konsentrasi terbesar di Bandung (23) dan Sumatra Barat (7). Kelompok ini tidak menonjol dari sisi pendidikan, hanya tiga orang tampaknya tamat perguruan tinggi.

Orang Batak Toba, terutama di Samosir, tetap memiliki keluarga besar; bagi mereka migrasi keluar merupakan satu-satunya pilihan nyata. Sebaliknya, orang Batak Karo memiliki tingkat kelahiran paling rendah di Sumatra Utara dan tingkat pendidikan tertinggi. Dengan orang Karo motivasi untuk bermigrasi

adalah keinginan mereka yang luar biasa untuk memanfaatkan pendidikan guna mendorong generasi berikut mencapai kehidupan yang lebih baik.

Di kelompok orang Karo yang lebih besar, di desa Gunung, 90 persen dari generasi termuda yang dilahirkan orang tua yang sekarang berusia di bawah 60 sudah meninggalkan kampung pada waktu mereka berusia 20 tahun, dibandingkan dengan 58 persen dari mereka yang dilahirkan orang tua berusia 60-75. Bagi generasi termuda, tujuan favorit adalah Jakarta (40 persen), diikuti oleh Medan, Batam, dan Bandung. Tingkat pendidikan anak-anak ini tinggi bagi sebuah negara industri maju, dan menakjubkan bagi anak-anak yang lahir di desa Indonesia tanpa peluang mendapat pendidikan sama sekali sebelum 1950. Sembilan puluh lima persen generasi lebih muda dan 41 persen generasi lebih tua tamat sekolah menengah atas, sedangkan 45 persen dan 22 persen tamat perguruan tinggi.

Pada abad ke-20, dan terutama setelah kemerdekaan politik menghilangkan keterasingannya di bawah kekuasaan Belanda, kota menjadi kutub daya tarik bagi penduduk dataran tinggi yang ambisius. Seperti kata seorang pendeta Batak Toba yang mengalami masa transisi: ”Ketika saya masih kecil di Tapanuli dan kemudian pergi ke Singapura untuk bersekolah [. . .] kaum ibu dalam keluarga saya menangis dan meratap, cemas jangan-jangan saya nanti terjatuh dari tepi bumi [. . .] Sekarang kaum ibu akan menangis dan meratap jika seorang anak laki-laki tidak berambisi dan tidak berminat meninggalkan huta.” [59] Penduduk kota Indonesia, hanya sekitar 4 juta atau 7 persen pada 1930, menjadi 14 juta (15 persen) pada 1961 dan 55 juta (31 persen) pada 1990.[60] Dengan Bandung di Jawa sebagai kekecualian yang menarik, semua pusat pertumbuhan perkotaan terletak di dataran rendah. Meski dataran tinggi Sumatra menampung sebagian besar penduduk pulau itu hingga 1900, di situ tidak ada kota, tidak ada pelabuhan udara (yang menimbulkan kekecewaan di pihak perusahaan perjalanan), dan tidak ada universitas negeri. Lebih daripada di waktu yang sudah-sudah, jalan menuju modernisasi adalah meninggalkan dataran tinggi.

Hipotesis

Mengapa orang Sumatra pada masa pra-modern, dan banyak orang Indonesia lainnya, sebagian besar tinggal berkelompok-kelompok di lembah-lembah dataran tinggi? Jika kita dapat mengetahui sebab-sebabnya, dapatkah kita menjelaskan mengapa mereka berubah sedemikian rupa sehingga selama abad

ke-20 penduduk dataran tinggi berlomba-lomba menuju kota-kota dataran rendah dan meninggalkan lembah-lembah mereka yang sejuk dan nyaman sehingga lembah-lembah itu menjadi museum tanpa penghuni? Apakah perubahan-perubahan ini tahap yang harus dilalui dalam proses modernisasi, atau, sampai batas tertentu, merupakan penyimpangan akibat pengendalian oleh kekuasaan kolonial?

Tampaknya ada lima faktor yang turut memainkan peran dalam membuat dataran tinggi menarik di masa lampau: pertanian, kesehatan, tidak ada negara, keamanan, dan budaya.

1. *Pertanian*

Lembah dan delta dataran rendah tempat sebagian besar produksi beras Asia Tenggara saat ini terpusat dalam kenyataan tidak ramah kepada generasi-generasi penggarap tanah pada masa lalu. Banjir merupakan masalah abadi, yang menghancurkan tananam, membahayakan ternak, serta mengancam rumah tangga dan persediaan air minumnya. Hanya sistem irigasi dan drainase besar yang dapat mengendalikan volume air yang besar di dataran rendah dan menyalurkannya untuk merawat sawah permanen dan tergenang yang kita tahu sekarang sangat efisien. Seperti kata Odum, pertanian sawah basah di lembah dan delta dataran rendah adalah "salah satu dari sistem-sistem pertanian paling produktif dan paling dapat diandalkan yang pernah diciptakan manusia", tetapi pertanian sawah menuntut perubahan total lingkungan alam dan sangat banyak tenaga kerja.[61] Dengan teknologi sederhana dan tenaga kerja yang terdiri dari satuan keluarga kecil, lembah-lembah dataran tinggi dengan aliran air kecil tetapi permanen dari anak-anak sungai jauh lebih mudah dikelola. Sementara sudah kebiasaan untuk menarik garis yang tajam antara pertanian berpindah-pindah tadah hujan di dataran tinggi dengan sawah basah permanen di dataran rendah, dalam kenyataan kedua jenis pertanian padi ini sudah lama berjalan bersama-sama sebagai bagian dari sebuah spektrum berbagai strategi pertanian. Bidang kecil sawah beririgasi relatif mudah dikerjakan bahkan tanpa dibajak jika terletak di sisi sungai, dan penduduk dataran tinggi menggunakan sawah beririgasi dan ladang berpindah di lereng yang lebih tinggi.

Kedua, kepadatan hutan hujan di sebagian besar Sumatra, Borneo, Jawa Barat, dan Maluku Utara menimbulkan berbagai masalah khusus bagi petani perintis. Di sebagian besar wilayah ini (berbeda dengan di Jawa timur dan Nusa Tenggara) musim kering sebentar sekali, cahaya yang menembus tutupan hutan

yang tebal itu sedikit sekali, dan tanah tidak banyak mendapat zat gizi dari daun-daun yang membusuk. Hutan sulit ditebang, dan tidak pernah dapat benar-benar kering agar mudah dibakar. Pembakaran hutan yang gagal merupakan penyebab utama kegagalan pertanian berpindah-pindah di daerah semacam itu dan kegagalan terutama sangat besar di hutan primer.[62] Hutan lebat seperti itu juga miskin binatang perburuan. Wilayah-wilayah dengan musim kering lebih lama sangat baik untuk pengembangan pertanian menetap, baik kering maupun basah. Dan lembah-lembah pegunungan Bukit Barisan memiliki musim kering seperti itu ketika angin muson barat daya mencurahkan hujan lebat di atas perbukitan barat dekat pantai, tanpa menyentuh lembah-lembah terlindung di belakang. Tidak lebih dari 50 mm rata-rata jatuh setiap bulan pada Juni, Juli, dan Agustus di wilayah danau Toba dan lembah-lembah di utara dan selatannya.[63] Hingga batas tertentu gejala yang sama terjadi di lembah-lembah Sumatra Barat. Musim ini sangat penting untuk petani berpindah-pindah, kesempatan untuk membakar hutan, dan untuk padi, kesempatan untuk masak dengan sempurna.

Karena sebab-sebab ini para sejarawan pertanian tidak heran melihat lembah-lembah dataran tinggi menghasilkan pusat-pusat paling awal pertanian padi menetap. Petani dataran tinggi pindah ke daerah pantai terutama menjelang akhir abad ke-19 dan ke-20. Beberapa, seperti orang Banjar pada akhir abad ke-19, tampaknya memperluas pertanian mereka ke daerah delta berawa ketika tekanan penduduk pada sumberdaya sudah sedemikian rupa sehingga mengeringkan tanah rawa dan menanaminya menguntungkan sekarang. Di tempat lain intervensi kolonial dalam bentuk drainase dan irigasi, seringkali untuk melayani terlebih dahulu perkebunan-perkebunan Barat, menjadi stimulus untuk membuka wilayah baru di dataran rendah untuk sawah. Pada akhir periode kolonial beberapa wilayah berpenduduk terpadat di Indonesia adalah delta Brantas dan pantai utara Jawa dari Cirebon hingga Demak; para ahli teknik Belanda telah mengatur wilayah wilayah dataran rendah yang kerap dilanda banjir ini.

2. *Kesehatan*

Terlalu mudah untuk mengatakan malaria sebagai penyebab utama mengapa wilayah dataran tinggi relatif lebih sehat daripada wilayah dataran rendah sampai zaman modern. Pierre Gourou paling gigih mempertahankan pendapat bahwa semua masalah Asia Tenggara disebabkan oleh nyamuk anopheles.

> Nyamuk itu menyerang sekitar sepertiga dari umat manusia, tetapi dalam praktek seluruh penduduk daerah panas dan basah dapat dikatakan kurang lebih terjangkit [...]. [Setelah mengutip angka-angka kematian yang mengejutkan] fakta paling serius barangkali adalah satu kematian karena malaria setara dengan paling tidak sakit 2.000 hari. Tidak diragukan lagi, malaria merupakan penyebab utama buruknya kesehatan, kecilnya jumlah penduduk, tidak adanya gairah kerja, statisnya karakter demografi, dan terbelakangnya penduduk daerah tropis.[64]

A.W. Nieuwenhuis pada 1930 juga yakin bahwa berabad-abad exposure to malaria adalah penyebab mengapa orang Indonesia lebih kecil, lebih mudah sakit, dan kurang dinamis dibandingkan dengan orang Polinesia, dengan setiap generasi menjadi semakin lemah jiwa dan raga.[65]

Tetapi Gourou sendiri mengakui, bagi petani di delta Tongking malaria bukan masalah besar, karena sebagian besar nyamuk anopheles di Asia Tenggara tidak dapat berkembang biak di sawah berlumpur. Ini juga berlaku di daerah beras berpenduduk padat di Jawa. Tetapi paling berbahaya tampaknya memang dataran rendah di "wilayah kosong" Asia Tenggara pra-kolonial di Malaya, Sumatra timur dan Borneo selatan dan barat. Di situ Anopheles umbrosus menguasai rawa-rawa di pesisir, dan Anopheles sundaicus mengambil alih begitu hutan-hutan rawa dibuka. Di wilayah ini orang baru benar-benar aman dari malaria hanya bila tinggal di atas 2.000 kaki atau 600 meter di atas permukaan laut — tempat sebagian orang Sumatra membuat rumah mereka. Sebuah tesis oleh Peter van der Brug baru-baru ini menunjukkan dengan meyakinkan bahwa tingkat kematian yang mengkhawatirkan di Batavia antara 1733 dan 1776, ketika 50 persen prajurit VOC mati dalam setahun setelah tiba di kota itu, disebabkan oleh serangan Anopheles sundaicus ketika tambak ikan air payau dibuka tidak lama kemudian di dekat kota itu. Kelompok elite Belanda yang punya uang untuk membuat rumah beberapa kilometer saja di pedalaman selamat dari epidemi itu.[66]

Ada sejumlah faktor lain selain malaria. Penyakit-penyakit menular lewat air seperti tifus dan kolera pasti telah menewaskan banyak orang di daerah dataran rendah, yang jarang memiliki sumber air bersih dan sering dilanda banjir, daripada di dataran tinggi tempat air dari sungai-sungai dari pegunungan sering dapat disalurkan dengan pipa atau dibawa ke perumahan. Kota pantai dan muara sungai adalah perangkap maut paling buruk. Sumber-sumber sejarah untuk Sumatra abad ke-19 memang mengatakan penduduk dataran tinggi lebih

sehat dan lebih tegap.[67] Bahkan sampai jauh memasuki abad ke-20 penduduk dataran tinggi tetap yakin kampung mereka jauh lebih sehat daripada wilayah pantai. ”Sejuk dikaitkan [oleh orang Rejang] dengan kesuburan, damai, dan sehat. Sebaliknya, orang Melayu tinggal di wilayah beriklim panas [. . .] di situ banyak penyakit dan penduduknya miskin dan menderita. Kesan-kesan ini sebagian besar sesuai dengan kenyataan di lapangan.”[68]

Berbagai kelebihan ini dibalik pada abad ke-20. “Dijinakkannya” dataran rendah melalui pengeringan tanah rawa, penebangan hutan, perluasan sawah, dan penyediaan air bersih dan sarana kesehatan yang lebih baik di kota-kota dan wilayah-wilayah yang mudah dijangkau berdampak menjadikan daerah dataran rendah tempat yang jauh lebih sehat untuk bermukim sekarang.

3. *Tidak Ada Negara*

Di Indonesia negara pada dasarnya selalu negara pantai dan didukung oleh sumberdaya asing, sedangkan daerah-daerah dataran tinggi merupakan mukjizat—di situ tidak ada negara—yang diikat satu sama lain secara longgar oleh sistem kekerabatan dan upacara-upacara suci, bukan oleh birokrasi.

Dalam kaitan dengan Laut Tengah Fernand Braudel mencoba menjelaskan mengapa pegunungan menjadi ”suaka kebebasan”; itu karena pegunungan kosong: ”penduduk demikian kecil, distribusinya tipis dan penyebarannya luas, sehingga negara, bahasa-bahasa dominan, dan peradaban-peradaban penting tidak dapat terbentuk”.[69] Ini tidak mungkin penyebab bagi kepulauan Indonesia pada zaman pra-kolonial. Seperti telah saya tunjukkan, kepadatan penduduk di lembah-lembah dan dataran tinggi relatif tinggi. Orang Batak, orang Minangkabau, dan orang Rejang jelas telah mengembangkan peradaban-peradaban yang kompleks di lembah-lembah ini, dengan masing-masing memiliki sistem tulis-menulis sendiri, tetapi tanpa melahirkan suatu negara. Raja Minangkabau dan raja Batak merupakan tokoh-tokoh yang memiliki kharisma atau kekuatan sakti, mereka menyorotkan kekuasaan mereka keluar, tetapi mereka tidak memerintah rakyat mereka.[70]

Demikian gigih setiap langkah menuju negara-negara yang lebih kuat di kepulauan itu yang diambil oleh pelabuhan-pelabuhan dagang, dengan bantuan dan inspirasi dari orang luar, sehingga kita cenderung mencari dinamika politik pribumi pada kemahiran menata diri tanpa negara. Gagasan-gagasan dan pelaku-pelaku dari India, Cina, Islam, dan Eropa masing-masing menawarkan bentuk-bentuk negara yang lebih ambisius dan efektif daripada bentuk-bentuk negara

sebelumnya.[71] Dengan beberapa kekecualian di Jawa dan Bali, semua negara di kepulauan itu terletak di muara sungai atau di tempat strategis di pesisir. Negara-negara ini menyerap beberapa penduduk pedalaman dan menjalin hubungan upeti yang longgar dengan penduduk pedalaman lainnya, tetapi sebagian besar penduduk dataran tinggi membela otonomi mereka melalui paduan perang gerilya, kelihaian diplomasi dan sengaja membesar-besarkan mitologi mengenai kekejaman mereka. Masashi Hirosue (1996) baru-baru ini mengangkat kembali dengan meyakinkan argumen bahwa kebuasan kanibalisme Batak sengaja dibesar-besarakan oleh orang Batak untuk memastikan mereka tidak diganggu oleh penguasa-penguasa di pesisir dan petualang-petualang asing. Beberapa penduduk dataran tinggi di Sumatra Selatan dengan sadar mengatakan diri orang mardika, orang bebas; mereka tidak membayar pajak dan tidak punya kewajiban apa-apa kepada raja di muara sungai, dan juga tidak kepada Belanda dan Inggris.[72]

Pada abad ke-17 dan abad ke-18, pemancangan kekuasaan kolonial Eropa di benteng-benteng pertahanan barangkali cenderung mendorong penduduk Indonesia masuk lebih jauh lagi ke pedalaman untuk menghindari kaum penjajah. VOC melarang penduduk tinggal dekat Batavia dan benteng-benteng yang lain karena alasan strategi. Penduduk desa mencoba menghindari kerja paksa yang dibebankan Perusahaan Belanda atau Perusahaan Inggris, dan retribusi berkala, dengan cara pindah lebih jauh lagi ke pedalaman. Faktor ini berangsur-angsur menjadi sebaliknya pada abad ke-19 ketika Pax Neerlandica meluas ke dataran rendah. Perang tingkat rendah dan serangan-serangan yang diderita wilayah dataran tinggi tanpa negara itu adalah harga yang semakin tinggi yang harus dibayar untuk mempertahankan kemerdekaan begitu daulat hukum yang baru tersedia pada abad ke-20. Meski tidak banyak yang menyerahkan kemerdekaan kepada kekuasaan kolonial tanpa perlawanan, penduduk dataran tinggi beruntung karena baru berkenalan dengan kekuasaan kolonial pada waktu akhir-akhir ini ketika kepadanya juga ditawarkan peluang-peluang positif untuk modernisasi.

4. *Keamanan*

Mereka yang memilih hidup tanpa negara harus mencari cara-cara lain untuk mempertahankan diri. Gunung-gunung tinggi dan jarak yang besar adalah modal. Kekuasaan negara, terutama dalam bentuk kekuasaan penjajah, dijalankan terutama melalui laut. Dalam perang setempat desa-desa di perbukitan memiliki posisi pertahanan yang menguntungkan.

Desa-desa di pesisir dengan kerajaan-kerajaan yang lemah atau tanpa kerajaan sangat menderita akibat ekspedisi-ekspedisi penjarahan melalui laut. Dokumentasi terbaik mengenai hal ini (sejak penelitian yang cermat James Warren) menyangkut serangan Iranun/Balangingi pada abad ke-18 dan abad ke-19, yang diperkirakan menawan 200.000-300.000 orang dari wilayah-wilayah pantai Filipina dan kepulauan Indonesia pada periode 1770-1870.[73] Di daerah Selat Malaka orang laut juga melarikan banyak penduduk daerah pantai untuk dijual kepada kesultanan-kesultanan kaya di Jambi, Palembang, dan di tempat-tempat lain.[74] Serangan-serangan ini tidak diragukan lagi menyebabkan penduduk menghindari bermukim di daerah yang mudah dijangkau kapal-kapal penyerang.[75]

Danau dikaitkan dengan asal-usul nenek moyang penduduk pedalaman: Toba untuk orang Batak; Kerinci untuk orang Kerinci; danau Kapuas tengah untuk orang Iban; Tondano untuk orang Minahasa; Limboto untuk orang Gorontalo; Poso dan Lindu di Sulawesi Tengah, Tempe dan Matano untuk asal-usul kerajaan-kerajaan Bugis; dan Lanau untuk orang Magindanao dan Illanun dari Mindanao. Danau-danau itu pasti kaya sumber air tawar dan ikan air tawar yang tidak habis-habisnya, tetapi mungkin juga ada faktor strategi — ini paling jelas terlihat di pulau Samosir di danau Toba. Bila musuh menyerang dari perairan, dia sudah terlihat jauh sebelumnya dan serangan mendadak dari dia tidak terlalu ditakutkan.

5. *Kebudayaan*

Mereka yang turut memainkan peran dalam negara dan tinggal di kota cenderung mengelompokkan orang tidak memainkan peran sama sekali sebagai orang tidak beradab, biadab, dan tidak bertuhan (dalam arti harfiah dan arti agama). Dikotomi biadab/beradab ini sudah ada sejak jaman purba di Asia Tenggara, dan penjelajah seperti Marco Polo, Ibn Battuta dan Ma Huan menyebarkannya kepada khlayak yang lebih luas. Pada abad ke-16 dan abad ke-17 Islam di Indonesia (seperti agama Kristen di Filipina) menjadi garis batas utama antara orang beradab dan orang biadab, kota dan pedalaman, dan peperangan untuk memperluas garis batas ini membuat garis batas itu terasa semakin kuat. Di pihak lain, berhasilnya tahap pertama penyebaran Islam di antara penduduk dataran tinggi Minangkabau dan Jawa, hampir sepenuhnya mengikis garis batas budaya itu.

Di tempat garis budaya masih tetap kuat, tidak diragukan lagi garis batas itu memperpanjang rasa berbeda dan terpisah penduduk dataran tinggi dari daerah-daerah yang sudah kenal modernisasi. Sampai abad ke-20 orang Batak, Toraja, Alfura, Dayak, dan Dusun pedalaman sadar mereka akan diperlakukan dengan hina bila berdagang atau pindah ke kota dataran rendah kecuali jika mereka menerima pakaian, bahasa, makanan, dan perilaku Melayu-Islam. Selama batas budaya itu tetap tinggi, penduduk dataran tinggi jarang pindah secara sukarela ke dataran rendah, yang mereka kaitkan dengan gerakan tidak sukarela perbudakan atau pelarian keluar dari lingkungan masyarakat mereka sendiri. Bagi beberapa dominasi dataran rendah oleh orang Eropa merupakan alasan berikutnya untuk menghindarkan diri dari situ.

Masuknya penduduk dataran tinggi ke dalam agama Islam atau agama Kristen menandai keruntuhan sangat menentukan batas budaya ini dalam jangka panjang, kalaupun dalam jangka pendek keruntuhan itu kadang-kadang memperkokohnya. Ketika orang Mandailing atau Besemah masuk agama Islam dan orang Batak Toba, Toraja atau masuk agama Kristen mereka menerima kegiatan modernisasi di kota-kota abad ke-20. Mereka memiliki identitas yang dapat mereka gunakan dengan efektif di kota, apakah identitas itu identitas khas atau tidak dataran tinggi. Contoh orang Batak Karo dapat dijadikan pelajaran di sini. Meski tinggal di daerah pedalaman langsung kota Medan, dan bertanam sayur mayur untuk kota itu dan kota-kota lain di dataran rendah sejak boleh dikatakan begitu jalan raya dibangun melalui dataran tinggi Karo pada 1909, mereka tetap curiga pada dataran rendah dan struktur kekuasaannya. Upaya pemerintah kolonial untuk memperluas pendidikan, terutama melalui Misi Protestan Belanda, mendapat sambutan dingin dan bahkan sikap bermusuhan. Hanya dengan pendudukan Jepang dan Revolusi Indonesia pada tahun 1940-an barulah orang Karo secara besar-besaran mengakui bahwa nasib mereka juga ditentukan oleh negara modern, pendidikan, urbanisasi, dan semua perubahan budaya terkait. Begitu keputusan telah diambil, mereka meninggalkan kampung mereka secepat-cepatnya. Orang Karo sekarang barangkali orang paling berpendidikan di antara kelompok-kelompok suku di Indonesia, dan salah satu yang paling akrab dengan kehidupan perkotaan.[76]

Kemajuan Perkotaan atau Penyimpangan Kolonial?

Dunia modern yang terdiri dari negara bangsa tidak punya tempat untuk "suaka kebebasan" yang juga merupakan kantong-kantong kehidupan dan

pemilikan pribadi yang tidak aman. Tidak ada keraguan di sini bahwa abad sekarang akan menyaksikan dataran tinggi Indonesia, seperti halnya dengan bagian-bagian dunia yang lain, diserap ke dalam sebuah negara bangsa dengan tuntutan-tuntutan seperti biasa berupa monopoli atas penggunaan kekerasan di dalam garis batas wilayah tertentu. Namun alat kolonial yang digunakan untuk penyerapan ini, sebagian besar menjelang akhir abad ini, menentukan sebagian besar dari apa yang terjadi.

Negara jajahan Belanda, agen penyerapan ini adalah bentuk ekstrim kesatuan politik pantai berbasis laut. Negeri itu dibangun oleh kekuatan laut, dan sampai akhir abad ke-19 tetap enggan melebarkan sayap jauh dari kesatuan politik itu. Di pihak lain, ini memungkinkan penduduk dataran tinggi tetap mempertahankan kedudukan tidak bernegara mereka lebih lama daripada penduduk dataran tinggi di bagian-bagian lain dunia. Pada waktu mereka dengan kekerasan dipaksa masuk ke dalam negara jajahan itu, negara itu sendiri sedang membuang karakternya yang buas dan merangkul modernisasi. Ini tidak ragu lagi memungkinkan penduduk dataran tinggi melihat peluang-peluang positif yang terkandung di dalam kekacauan yang dibawa penaklukan kolonial, dan menangkap peluang-peluang itu dengan lebih bergairah daripada penduduk dataran rendah yang mengalami pahit getir abad-abad yang penuh konflik. Orang Minahasa, orang Minangkabau, orang Mandailing, dan orang Batak Toba menjadi orang Indonesia berpendidikan terbaik pada paruh pertama abad ini, diikuti oleh orang Karo dan orang Toraja pada paruh kedua.

Di pihak lain, penyerapan daerah dataran tinggi oleh daerah dataran rendah merupakan proses paling satu arah yang dapat dibayangkan, karena semua pusat kekuasaan, pengaruh, modal, dan pengetahuan kukuh tertancap di daerah pesisir. Tidak ada berkembang pusat-pusat pedalaman atau dataran tinggi untuk berperan sebagai fokus modernisasi seperti sebuah Mexico City, Bogota atau La Paz; sebuah Delhi atau Lahore; sebuah Nairobi, Entebbe atau Johannesburg. Bahkan di wilayah-wilayah seperti Tapanuli (Sumatra Utara), Sumatra Tengah, Sumatra Selatan dan Timor yang berpenduduk besar itu, pertanian, dan peluang ekonomi tetap berada di dataran tinggi pada 1900, sedangkan pusat-pusat kolonial tetap berada di Sibolga, Padang, Palembang, dan Kupang. Sebabnya sebagian adalah realitas kekuatan militer Belanda yang berperan sebagai penengah selama tiga abad. Namun, bila kita lihat pola yang sangat berbeda dalam hal koloni-koloni Spanyol dan Inggris, sulit untuk menghindari kesimpulan bahwa warisan Negeri-negeri Rendah (Belanda) terlalu mengandalkan diri kepada negarawan Belanda karena mengira mereka

ini punya kemampuan membayangkan sebuah kota juga dapat berhasil walau tidak terjangkau oleh kapal laut. Bahkan daya tarik sebuah pangkalan di antara penganut agama Kristen atau penduduk dataran tinggi yang berpotensi menjadi penganut agama Kristen tidak dapat mengalahkan godaan dari laut.

Kemerdekaan tidak melakukan apa-apa untuk menghilangkan pola ini. Para pejabat yang tinggal di kota di pesisir tetap tidak percaya kepada dataran tinggi, yang tidak dapat menawarkan banyak kesenangan hidup dan jangkauan tangan pemerintah lemah. Banyak desa dataran tinggi yang terus dipindahkan ke lembah-lembah, di situ penduduk dapat dijangkau pemerintah, sekolah, polisi, dan lembaga-lembaga agama. Begitu jaringan komunikasi kolonial sudah terpasang, yang menghubungkan dataran tinggi dengan pelabuhan, bukan menghubungkan dataran tinggi satu sama lain, tidak ada kemungkinan lagi bagi pola itu untuk berubah. Pesawat terbang dan bis tidak harus mengikuti rute pesisir dan dataran rendah yang diikuti oleh kapal dan kereta api, tetapi pelabuhan udara dan jalan raya dibangun seolah-olah mengikuti rute pesisir dan dataran rendah. Dataran tinggi Indonesia masih memiliki iklim yang nyaman dan pemandangan yang indah, dan warisan dari peradaban-peradaban purba. Industri paling berkembang sekarang adalah industri pariwisata, tetapi komunikasi yang buruk menghambat industri ini seperti industri-industri yang lain. Bahkan cara murah menerbangkan wisatawan ke danau-danau di dataran tinggi dengan pesawat terbang air sejauh ini tidak diminati oleh warga kota.

Penduduk dataran rendah yakin rute menuju modernisasi yang mereka inginkan ialah meninggalkan kampung leluhur mereka. Bentuk khas sejarah modern Indonesia, dan peranan penting yang dimainkan faktor kolonial di dalamnya, membantu menjelaskan mengapa dataran tinggi sekarang dalam kenyataan memiliki kualitas daerah pinggiran seperti selalu dibayangkan orang Eropa dalam pikiran mereka.

4

Hubungan dengan Turki

Adanya hubungan diplomasi dan militer antara Turki Ottoman dan Aceh sudah diketahui selama berabad-abad. Para pencatat sejarah dari Portugal, terutama Couto dan Pinto, terus menghidupkan kenangan mengenai hubungan itu di Barat; tradisi lisan dan sejumlah catatan sejarah terus menghidupkan kenangan itu secara lebih konkret dalam ingatan orang Aceh; dan di Turki hidup kembali perhatian kepada hubungan Turki-Aceh ini, paling tidak sejak 1873. Sebuah upaya karena itu tampaknya patut dijalankan untuk mencari keterangan yang lebih rinci mengenai hal yang menarik ini, dengan meninjau kembali paling tidak sumber terbaik dari sumber-sumber dari ketiga pihak itu.

Bagi orang Indonesia dan orang Malaysia, Raja Rum sudah menjadi salah satu dari raja-raja besar dunia sejak kesusasteraan Islam paling awal. Sejak abad ke-16 gelar ini jelas mengacu kepada Sultan Ottoman, terkuat di antara raja-raja Islam dan ahli waris keagungan Kalifah itu. Namun, jauh sebelum kebangkitan Ottoman, kesusasteraan Persia dan Turki menggunakan Rum untuk Byzantine, dan kadang-kadang juga untuk Kekaisaran Romawi.[1] Jelas, kejayaan melegenda kerajaan yang jauh itu bersumber pada kejayaan ketiga raja yang menduduki tahta di Constantinople.

Banyak tradisi Malaya dan Sumatra, khususnya, mengaitkan Raja Rum, raja besar Barat, dengan Raja Cina, raja besar Timur. Mitologi asal-usul yang umum adalah mitologi mengenai Johor, seperti dikutip oleh William Marsden.[2] Iskandar Dzul Karnain memiliki tiga putra dari permaisurinya, putri Raja Samudra. Setelah pertandingan antara ketiga putra bersaudara itu di Selat Singapura, putra tertua pergi ke Barat untuk menjadi Raja Rum, putra kedua pergi ke Timur untuk menjadi Raja Cina, sedangkan putra ketiga tetap tinggal di Johor, dan kemudian memulai dinasti Minangkabau. Bahkan pada hingga zaman Marsden di Sumatra (1771-9) Sultan Minangkabau menamakan diri adik raja Rum dan raja Cina.[3]

Sebuah mitologi asal-usul yang juga seperti itu adalah mitologi asal-usul Kedah, dalam Hikayat Marong Mahawangsa.[4] Kisahnya begini. Garuda, burung Vishnu, yang diam di pulau Langkapuri, bertaruh dengan Suleiman (Suleiman – penguasa dunia hewan dalam sastra Islam) bahwa ia dapat menggagalkan pernikahan putra Raja Rum dengan putri Raja Cina. Garuda berhasil menculik putri Cina dan membawanya ke Langkapuri, dan kemudian menenggelamkan armada yang membawa Pangeran Rum bersama pengawalnya, pahlawan Marong Mahawangsa. Namun, sang pangeran hanjut ke Langkapuri dan di situ menikah dengan putri Cina itu. Garuda sangat kecewa. Sementara itu Marong Mahawangsa mendirikan Kerajaan Langkasuka. Tidak lama kemudian ia kembali ke Rum, Langkasuka diserahkannya kepada putranya, nenek moyang dinasti-dinasti Siam (tertua), Kedah, Patani, dan Perak.

Kisah-kisah yang juga penuh khayal beredar dalam kalangan orang Gayo, yang sekarang diam di pedalaman Aceh di Sumatra Utara meski mereka tampaknya datang dari pesisir. Menurut mereka, seorang anak Raja Rum dikirim ke Sumatra, di situ anak itu dibesarkan oleh seorang nelayan, dan dalam perjalanan waktu menjadi nenek-moyang orang Gayo.[5]

Daftar tradisi-tradisi semacam itu jelas dapat diperpanjang. Namun cukuplah untuk dikatakan, ketika Turki Ottoman pertama muncul sebagai sebuah kekuatan di Samudra India, kerajaan itu menjadi fokus dari warisan besar tradisi mengenai sebuah kerajaan besar di Barat.

Namun hanya di Aceh kita temukan kisah-kisah tertulis mengenai hubungan dengan Turki yang memiliki karakter sejarah. Catatan Aceh paling terpercaya dari abad ke-16 ialah Bustanu's-Salatin, ditulis di ibukota Aceh oleh seorang Gujarat, Nurud-din ar-Raniri, pada 1638. Dengan gayanya selalu menggunakan fakta, Nurud-din menyebutkan, pembukaan hubungan dengan Turki diprakarsai oleh Sultan Aceh Ala'ad-din Ri'ayat Shah al-Kahar (1539-71):

Dialah yang menciptakan tata pemerintahan Aceh Daru's-Salam dan mengirimkan utusan ke Sultan Rum, ke kerajaan Istanbul,

> untuk memperkuat agama Islam. Sultan Rum mengirim ahli-ahli pertukangan dan pandai senjata untuk membuat senjata. Pada waktu itulah senjata-senjata besar dibuat. Dan dia pula orang yang pertama-tama mendirikan sebuah benteng di Aceh Daru's-Salam, dan dia yang pertama-tama memerangi semua orang kafir, bahkan sampai terjun sendiri melakukan penyerangan atas Malaka.[6]

Senjata paling termashur dari antara "senjata-senjata besar" yang disebutkan Raniri itu dikenal oleh orang Aceh dengan nama lada sa-cupak – satu (bambu) takar lada. Senjata besar ini terletak di muara sungai Aceh sampai di bawa ke Belanda pada 1874 (lihat Gambar 16 di halaman . . .), dan masih berhiaskan motif bintang Turki di sekujur larasnya.[7] Sebagian besar tradisi lisan yang masih hidup di Aceh mengenai sebuah utusan ke Turki dibangun di sekitar meriam ini. Paling tidak salah satu dari kisah ini, puisi kepahlawanan Aceh Hikayat Meukota Alam,[8] mempertahankan tradisi ini dalam bentuk tulisan. Hikayat ini mengatakan utusan itu dikirimkan oleh Iskandar Muda (1607-36), roi soleil Aceh yang menurut tradisi banyak menghasilkan prestasi-prestasi besar pada masa awal kesultanan itu. Ia memutuskan untuk mengirimkan seorang utusan dan uang ke Istanbul untuk mendukung tempat-tempat suci, karena Sultan Turki adalah raja teragung di antara raja-raja Islam dan bertanggung jawab atas perawatan Mekkah dan Madina. Ia mengirimkan tiga kapal, sarat dengan padi, beras dan lada. Tetapi awak kapal dihadapkan pada berbagai kesulitan sedemikian rupa sehingga mereka baru tiba di Istanbul setelah berlayar selama tiga tahun, dan mereka memakan habis semua beras yang dibawa, dan menjual sebagian besar lada yang mereka bawa untuk menghidupi diri. Hanya sacupak lada yang tersisa. Para utusan itu sangat malu, tetapi Sultan Rum berjiwa besar, dan mengirim mereka kembali dengan upacara besar bersama meriam besar itu, yang namanya dia sendiri yang memberi. Dia juga mengirim ke Aeh dua belas pahlawan (panglima perang). Mereka ini demikian cekatan sehingga memungkinkan Iskandar Muda membangun benteng besar Aceh, istana raja, dan bahkan membuat Gunongan yang termasyhur itu [sebenarnya dibuat pada masa pemerintahan Iskandar Thani (1637-41)]. Sultan Rum menasehati Iskandar Muda agar membunuh kedua belas pahlawan itu jika mereka telah selesai melaksanakan tugas mereka. Pada awalnya ia enggan mengikuti nasehat itu, tetapi kedua belas orang Turki itu akhirnya menjadi kebencian orang Aceh karena pongah, dan dilempari batu hingga tewas.[9]

Kisah pahlawan tampaknya merupakan ciri khas penyair itu, tetapi dari sisi lain kisah ini sama dengan kisah-kisah yang telah dituliskan baru-baru ini berdasarkan tradisi lisan. Versi-versi lebih kemudian, yang dicatat Snouck Hurgronje [pada 1891[10] dan Saffet Bey pada 1911,[11] berkisah tentang para utusan Aceh itu yang menghabiskan dua tahun di Istanbul bukannya di laut. Mereka juga menekankan ada sebuah desa Turki di Aceh bernama Bitay, yang diambil orang Aceh dari kata Bait ul-mukaddis (Jerusalem). Penduduknya konon anak-anak keturunan artisan-artisan Syria dari kota itu, yang dikirim ke situ oleh

Sultan Turki. Menurut versi Snouck Hurgronje, Sultan Ottoman membebaskan orang Aceh dari keharusan menyerahkan upeti berkala kepada dia sebagai raja mereka. Sebagai gantinya, orang Aceh harus merayakan kelahiran Muhammad dengan penuh suka cita. Dengan cara inilah orang Aceh dari zaman-zaman kemudian menjelaskan semangat mereka yang luar biasa ketika merayakan Mo'lot ini. Versi Saffet juga memberikan karakter keagamaan kepada wewenang Kalifah Turki. Konon ia mengirimkan sebuah khotbah untuk dibacakan di mesjid raya Aceh setiap hari Jumat.

Tradisi lisan ini cukup kuat untuk membentuk unsur yang penting dalam ofensif diplomasi Aceh pada 1873, ketika Aceh diserang oleh Belanda. Aceh bahkan masuk, walau tidak lama, ke dalam perhitungan-perhitungan Kekuatan-kekuatan besar. Aceh memohon Turki untuk memberikan perlindungan atas dasar hubungan yang telah lama terjalin antara kedua negeri. Pemerintah kerajaan Ottoman (Porte) mempertimbangkan gagasan itu dengan serius, dan menyatakan dalam sebuah tawaran resmi untuk berperan sebagai penengah dalam perang itu, yang dikirimkan kepada Belanda dan Kekuatan-kekuatan lain:

> Ketika Sultan Selim[12] membawa senjata-senjatanya yang ampuh ke bagian terujung Semenanjung Arab, yang telah dikuasainya, kemenangan-kemenangannya bergema jauh sekali, sampai ke pulau Sumatra. Orang Aceh mengirimkan sebuah utusan ke bawah duli penakluk itu, mengakui sebagai kekuasaan tertinggi dari kekuasaan yang terkandung dalam gelarnya Khalif, bersembah sujud di hadapan Sinan Pasha yang masyhur, mengibarkan bendera Ottoman di pelabuh-pelabuhan mereka dan di kapal-kapal layar mereka, menyatakan diri mereka hamba Sultan Selim dan memohon sebagai imbalan perlindungan dari dia. Sultan Selim menerima semua permohonan itu dengan tangan terbuka. Berdasarkan titah Sultan, Vezir Sinan Pasha mengirimkan kepada hamba/vassal Sultan itu meriam-meriam dan pedang-pedang kehormatan, yang masih dapat disaksikan hingga sekarang di Aceh.[13]

Sementara tanggal utusan itu dikirim dengan demikian tampaknya telah diundur ke belakang oleh orang Turki ke sebuah periode sebelum Aceh muncul di panggung internasional, kisah-kisah lain dari orang Aceh lebih menyukai versi yang mengatakan utusan itu dikirim pada masa pemerintahan Iskandar Muda yang agung. Tetapi utusan itu menjelma dalam bentuk yang berbeda-beda tergantung pada tujuan penulis kisah. Jadi, Hikayat Atjeh, sebuah himne pujian untuk Iskandar Muda yang ditulis pada waktu ia masih

hidup, menafsirkan insiden itu sebagai sebuah peluang untuk menunjukkan bagaimana "kisah Djohan Alam [Iskandar Muda] menjadi terkenal di semua negeri di muka bumi".[14] Insiden Turki dibuat sebagai lanjutan dari kisah sebuah utusan dari Siam, yang melambungkan nama Iskandar Muda semakin tinggi di antara kerajaan-kerajaan di Timur. Kemudian sebuah utusan datang dari Rum, via Yaman dan Mocha, yang mencari obat dari timur untuk mengobati penyakit Sultan Muhammad (Mehmed III, 1595-1603). Para utusan itu tiba ketika Iskandar Muda sedang berperang melawan Deli (jadi pada 1612), tetapi mereka diterima dengan penuh kehormatan setelah Iskandar Muda kembali [dari pertempuran]. Kemudian utusan itu melaporkan kembali kepada Sultan Rum mengenai keajaiban-keajaiban Aceh, dan penguasa Ottoman kemudian menyatakan:

> . . . pada waktu yang sudah-sudah berkat kehendak Tuhan ada dua raja besar di dunia, nabi Sulaiman dan Raja Iskandar. Sekarang pada zaman kita juga ada berkat kehendak Tuhan dua raja besar di dunia. Di barat kamilah raja besar itu, dan di timur Sri Sultan Perkasa Alam [Iskandar Muda] lah raja besar itu dan yang menjunjung tinggi agama Allah dan Nabinya.[15]

Di kemudian hari Pasha Yaman menguji laporan utusan itu mengenai Aceh dengan menanyai sejumlah jamaah haji Aceh di Medina. Haji-haji inilah yang membawa kembali kepada guru agama besar Aceh Sheikh Shamsuddin dari Pasai kisah tentang semua yang terjadi di Turki.[16]

Untuk kisah yang lebih sulit lagi diterima akal kita dapat berpaling kepada kisah romantik Melayu yang tetap populer, Hang Tuah. Pahlawan legendaris ini pada masa-masa terakhir Kesultanan Malaka dilukiskan dalam berbagai tugas penjelajahan untuk kepentingan Sultan-nya. Setelah kunjungan ke Majapahit, India, dan Cina, ia akhirnya dikirimkan ke Rum untuk membeli meriam untuk Malaka. Meski banyak ditambah-tambah, kisah intinya mungkin sekali dipinjam dari Bustanu's-Salatin.[17]

Jadi, ide bahwa hubungan diplomatik dijalin dengan Turki, dan meriam diterima sebagai imbalan bagi upeti, sudah tertanam dalam kesusasteraan asli. Dari sumber-sumber yang disebutkan di atas, Bustanu's-Salatin adalah sumber yang paling dapat dipercaya dari sisi urutan waktu. Karena itu cukup masuk akal untuk menyimpulkan, berdasarkan sumber-sumber dari Indonesia sendiri, bahwa hubungan seperti ini dibangun pada masa pemerintahan Sultan Ala'ad-din Ri'ayat Shah al-Kahar (1539-71), dan hubungan ini menjadi dasar untuk

berbagai kisah dengan tanggal berbeda-beda dalam sumber-sumber yang lain. Seperti dijelaskan Charles Boxer, sumber-sumber Portugis (dan juga Turki) mengenai hubungan ini juga hampir sepenuhnya memusatkan perhatian pada periode pemerintahan al-Kahar.[18]

Sumber Portugis ini, dan data arsip Turki yang sekarang sudah dapat diperoleh,[19] jelas menunjukkan bahwa Turki memainkan peranan penting dalam kehidupan dan persekutuan kerajaan-kerajaan Islam di Asia Tenggara pada abad ke-16. Uraian berikut ini berupaya mengaitkan perkembangan di Asia Tenggara dengan bidang yang lebih luas, yakni perpolitikan Turki dan Islam.

Seperti dijelaskan dalam bab sebelumnya, Aceh muncul sebagai sebuah kerajaan setempat yang kuat berkat penaklukan-penaklukan oleh Sultan Ali Mughayat Shah (1516?-30). Penaklukan-penaklukan ini menyangkut kekalahan-kekalahan besar orang Portugis, dan menjadikan Sumatra Utara aman dari tantangan Barat selama beberapa abad yang akan datang. Kekuatan Aceh selama periode awal ini bertumpu sebagian besar pada senjata rampasan dari orang Portugis, dan juga barangkali pada dukungan dari pedagang Islam di pusat-pusat perdagangan lama, yakni Pasai dan Pidie. Tetapi Aceh belum dalam kedudukan dapat mengancam musuh-musuh luar negeri seperti Malaka Portugis. Dekade yang relatif tidak aktif ini menyusul ditaklukkannya Pasai mungkin sebuah periode konsolidasi, atau periode perselisihan dalam istana di bawah Salah-ad-din (1530-9) — "seorang yang lemah, tidak cocok untuk menjadi penguasa", menurut sumber-sumber Melayu.[20]

Sementara itu perdagangan Islam di Samudra India bangkit kembali setelah serangan orang Portugis, yang hampir melumpuhkannya sepenuhnya selama dua dekade pada abad itu.[21] Tahun 1534 menurut Boxer,[22] atau "beberapa tahun" setelah 1526 menurut M.A.P. Meilink Roelofsz,[23] untuk pertama kali pengapalan lada Aceh yang tercatat ke Laut Merah menjadi latar belakang bagi sebuah ekspansi baru menjelang tahun 1530-an. Tampaknya lebih dari mungkin bahwa pusat pelayaran Islam pada periode ini bukan di Banda Aceh, ibukota kerajaan di bawah Salahad-din yang lemah, tetapi di Pasai, tempat adiknya yang cerdas Ala'ad-din (kemudian Sultan) memegang kekuasaan setempat.[24] Lembah sungai Aceh, di belakang Banda Aceh, tidak pernah banyak menghasilkan lada, pertanian lada sudah lama terpusat di Pasai dan Pidie. Acuan F. Mendes Pinto berupa sebuah perjanjian yang menganugerahkan sebuah pabrik untuk Turki di Pasai sekitar 1540 (di bawah) membuktikan bahwa perdagangan tetap terpusat di situ untuk beberapa lama setelah pusat politik bergeser. Jika serangan

pertama Aceh atas Malaka pada 1537 terjadi sebelum Ala'ad-din naik tahta, ada kemungkinan ekspedisi itu dilancarkan oleh Ala'ad-din dari Pasai.

Tidak jelas pada tanggal berapa Ala'ad-din menumbangkan kakaknya dari kekuasaan, tetapi jelas ini tidak mungkin sesudah 1539, dan mungkin pada 1537.[25] Peristiwa-peristiwa yang berujung dengan perebutan kekuasaan ini dan awal dari periode ekspansi yang lebih besar dengan demikian terjadi bersamaan dengan ekspedisi besar Turki di Samudra India — ekspedisi Suleiman Pasha, yang gagal, ke Diu pada 1537-8.

Menurut Pinto,[26] penentang utama Aceh menjelang akhir 1530-an adalah sebuah kerajaan Batak yang luas dan memiliki jalur ke utara dan ke pantai barat Aceh, tetapi dengan pusat yang barangkali terletak di wilayah sungai Singkil dan masih dalam wilayah Batak, yakni Tapanuli. Perang pertama antara Aceh dan orang Batak berakhir dengan perjanjian perdamaian yang menguntungkan orang Batak.

> Berkah perjanjian perdamaian ini hanya bertahan dua setengah bulan, waktu yang diperlukan [raja] Aceh bagi kedatangan tiga ratus orang Turki yang telah ditunggu-tunggunya. Mereka tiba dari Selat Mekkah dengan empat naos [kapal besar] yang dikirimnya ke situ dengan muatan lada, dan sekembalinya sarat bermuatan berpeti-peti bedil dan senjata-senjata yang lain, termasuk sejumlah artileri berat dari perunggu dan besi tempa.

Pasukan yang terlatih ini dan persenjataan moderen mereka memungkinkan Aceh menghalau orang Batak yang melakukan pengepungan kembali ke bukit-bukit dan menimbulkan korban yang besar di pihak mereka. Seorang utusan Batak kemudian dikirim untuk mohon pertolongan ke Malaka, di situ ia menunggu Gubernur baru de Faria dan Pinto pada Juni 1539.[27]

Bantuan Turki yang cukup besar bagi Aceh dan pertama kali dicatat ini tidak dapat tidak pasti dilaksanakan pada 1537 atau 1538: jadi tidak lama sebelum atau tidak lama setelah upaya besar Turki untuk menghancurkan armada Portugis di bawah Suleiman Pasha, Gubernur Mesir. Kita tahu, Suleiman mengirimkan utusan ke Gujarat dan pelabuhan-pelabuhan Arab pada 1537 untuk meminta dukungan bagi serangan atas orang Portugis itu.[28] Apakah dia juga mengirim utusan ke Aceh, yang pasti sudah dikenalnya dari pengapalan-pengapalan lada Aceh ke kerajaannya? Jika demikian halnya, ini mungkin menjadi stimulus untuk serangan Aceh yang pertama atas Malaka pada

Peta 3 Samudra Hindia
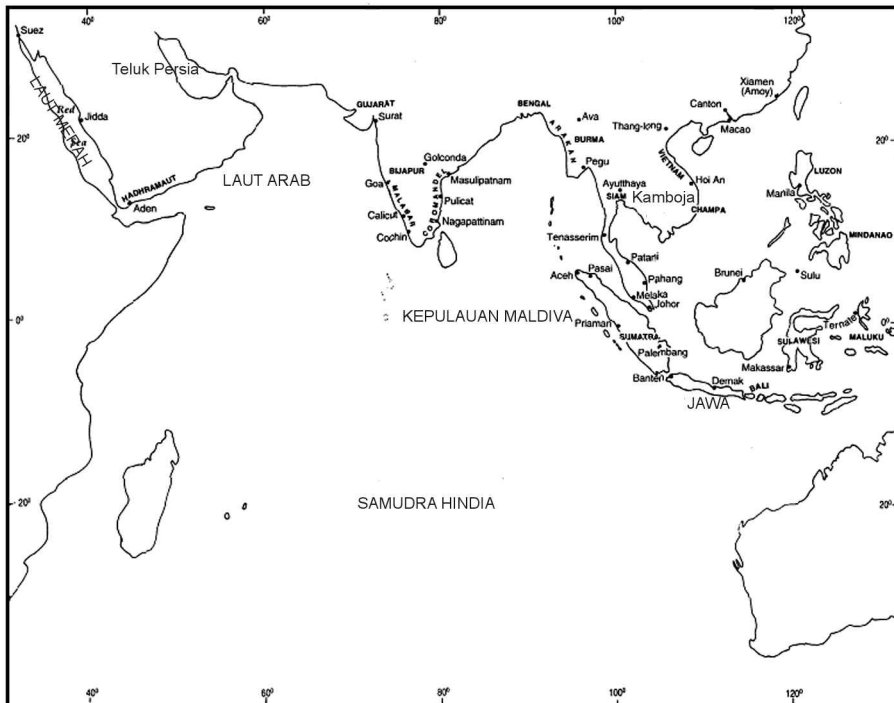
September 1537, dan juga untuk surat menyurat antara Johor dan Aceh pada musim gugur 1538 tentang serangan bersama atas orang kafir itu di Malaka.[29] Di pihak lain, dapat pula dikatakan, pasukan Turki yang masuk catatan Pinto itu, merupakan manfaat tidak terduga bagi Aceh; pasukan Suleiman Pasha yang besar itu terdiri dari 20.000 orang. Banyak dari mereka ini "terpencar-pencar karena penduduk India menghalau mereka keluar" selama pengepungan mereka yang gagal atas Diu pada September, 1538.[30] Dalam hal ini tanggal-tanggal dari peristiwa-peristiwa yang dicatat oleh Pinto ini harus dimampatkan menjadi beberapa bulan sebelum Pinto tiba di Malaka. Apapun tanggalnya, ada kemungkinan tampaknya bahwa hubungan dengan Turki merupakan sumber legitimasi dalam mata Ala'ad-din untuk mengambilalih tahta dari kakaknya.

Kekalahan ekspedisi 1538 dan karena tidak berdaya mengendalikan bawahannya yang berada demikian jauh menyebabkan "Grand Turk" itu, Sultan Suleiman Yang Agung, mengambil keputusan untuk memusatkan perhatian kepada Eropa. Ekspedisi-ekspedisi Turki di Samudra India setelah itu tidak terlalu berarti, kecuali barangkali ekspedisi armada Piri Bey, yang dihancurkan orang Portugis di Teluk Persia pada 1551.[31]

Di Aceh sendiri kedatangan prajurit dan persenjataan Turki memungkinkan Ala'ad-din Ri'ayat Shah al-Kahar mengalahkan orang Batak dan kemudian menggunakan pasukan Turki itu untuk menyerang Aru, sebuah kerajaan yang pernah jaya di timur laut Sumatra. Dalam hal ini ia kembali berhasil, menurut Pinto, karena bantuan prajurit dan senjata dari Turki yang masih terus mengalir dari Mesir. Salah seorang panglima perang Aceh, menurut Pinto,

> seorang Abyssinia bernama Mamedecan [Mahmud Khan] yang datang dari Jeddah kurang dari sebulan sebelumnya untuk menandatangani dan mengucapkan sumpah setia kepada liga dan perjanjian yang disiapkan Pasha Cairo bersama Raja Aceh atas nama Grand Turk, dan sebagai imbalan ia mendapat hak eksklusif perwakilan dagang di Pelabuhan Pazem [Pasai]. Memimpin pasukan yang terdiri dari enam puluh prajurit Turki, empat puluh Jannissary, dan sejumlah orang Moor dari pantai Malabar, kapten Abyssinia ini berhasil merebut benteng-benteng di tepi sungai itu.[32]

Namun, tidak lama kemudian, barangkali masih pada 1540, orang Aceh diusir dari Aru oleh kekuatan gabungan Melayu dari Johor, Riau, Siak, Perak dan tempat lain di bawah pimpinan Sultan Johor, yang mengawini janda dari penguasa Aru yang tewas. Dalam pertempuran pada 1540 untuk merebut Aru sebagian besar pasukan elite Turki di pihak Aceh tampaknya dibabat habis.[33] Jadi kembali ekspansi Aceh dihentikan. Selama 1540-an dan 1550-an tidak banyak lagi kita dengar tentang Sultan Ala'ad-din al-Kahar, yang pusat perhatiannya tampaknya kembali ditujukan kepada upaya memperkuat posisi ekonominya sebagai pemasok lada utama bagi perdagangan Islam. Pertanian lada meluas ke pantai barat Sumatra, ke selatan Minangkabau, dan kendali Aceh atas perdagangan mengikuti perluasan itu.

Satu-satunya serangan penting dari Aceh atas orang kafir Kristen dalam periode ini ialah sebuah serangan atas Malaka pada 1547, tetapi serangan ini bukan serangan yang besar menurut ukuran Aceh. Sebuah detasemen Turki kembali tampak di antara pasukan penyerang, tetapi pencatat-pencatat sejarah dari Portugal tidak menyebut adanya persekutuan tertentu [antara Aceh dan Turki). Kehadiran detasemen Turki ini mungkin dapat dijelaskan dalam kaitan dengan semakin banyaknya pedagang dari Laut Merah yang singgah di Aceh selama periode ini.

Sebenarnya penguasa Johor, bukan penguasa Aceh, yang dilihat orang Portugis Malaka sebagai "orang paling ditakuti di benteng ini", atau "musuh

besar kami" selama dua dekade ini.[34] Sumber-sumber yang ada tidak memberi bukti bahwa kekuatan-kekuatan internasional Islam mulai menoleh kepada Johor untuk memperkuat barisan mereka di sayap timur. Tetapi di tingkat setempat Johor memang memainkan peranan ini untuk dirinya sendiri. Pada 1550-1 Johor menyusun sebuah koalisi anti-Portugis atas nama Islam, yang terdiri dari Japara, lawan utama Portugal dalam perdagangan rempah-rempah Maluku, dan kerajaan-kerajaan kecil Melayu di Semenanjung.[35]

Di pihak lain, tahun 1560-an menyaksikan Aceh tiba-tiba muncul kembali sebagai benteng timur yang kokoh bagi perang sabil Islam melawan orang Portugis. Charles Boxer memperingatkan kita agar tidak melihat hubungan politik ini sebagai akibat dari hubungan dagang yang sama sekali baru dengan pelabuhan-pelabuhan di Laut Merah. Tahun 1560-an hanya merupakan periode puncak dari perdagangan yang berangsur-angsur terus berkembang, dan mengalahkan orang Portugis sejak tahun 1530-an. Pertumbuhan dagang ini dapat dijelaskan sebagian oleh meningkatnya volume dan kekuatan pelayaran Gujarati dan Arab di Samudra India dalam kaitan dengan orang Portugis. Dan sebagian lagi, berkaitan dengan peristiwa-peristiwa di Indonesia. Pada 1560-an perkebunan-perkebunan lada yang baru dan kaya dibuka di Tiku, Pariaman dan Indrapuri di pantai barat Sumatra, dan dibawah ke bawah kendali Aceh.[36] Selain itu, pedagang Islam dari Japara dan Banda terus mengikis kendali Portugis atas perdagangan rempah-rempah Maluku, terutama sejak tahun 1550-an. Sebagian besar rempah-rempah pedagang Islam diangkut ke Barat melalui Aceh.

Meski kita dapat dengan aman mengasumsikan adanya hubungan dagang yang stabil dan berkembang antara Turki dan Aceh dari 1540 dan seterusnya, bukti-bukti mengenai hubungan politik sangat tidak berkesinambungan. Sepanjang tahun 1560-an ada sumber-sumber Turki, Portugis, dan Venesia yang menyebut-nyebut mengenai hubungan politik antara kedua kerajaan itu, sedangkan selama dua dekade tidak pernah terdengar apa-apa mengenai hal ini.

Sumber-sumber Venesia adalam sumber-sumber paling dahulu yang mengatakan adanya persekutuan militer antara Aceh dan Turki. Duta besar Venesia untuk Constantinople sudah melaporkan pada Juni 1562 bahwa seorang dutabesar Aceh sedang berada di kota itu untuk memohon artileri untuk memerangi orang Portugis.[37] Pada 1564 sumber-sumber Venesia sudah menyatakan bahwa Turki sudah mengirim senjata dan awak meriam ke Aceh.[38] Hubungan awal ini didukung oleh laporan-laporan Portugis mengenai sebuah pertempuran laut di lepas pantai Arab Selatan pada Maret–April 1561. Menurut

Diogo Do Couto, kapal besar dari Aceh yang diserang Portugis sarat dengan emas dan perhiasan untuk Sultan Turki — ini menunjukkan ada upaya besar Aceh untuk mendekati Turki pada tahun 1560-an.[39]

Untunglah sumber-sumber Turki lebih spesifik. Sumber-sumber ini mencakup sebuah petisi pada Januari 1566 dari Sultan Aceh Ala'ad-din Ri'ayat Shah al-Kahar, yang dialamatkan kepada Sultan Suleiman sebagai Khalifah Islam. Penguasa Aceh itu mengucapkan terima kasih atas kedatangan delapan juru tembak Turki yang dikirimkan Suleiman, dan dengan demikian menegaskan keberhasilan pengiriman utusan 1561-2 yang disebutkan oleh sumber-sumber. Surat itu memohon Sultan Turki berulang kali untuk memberikan bantuan kepada jemaah haji dan pedagang Islam yang terus diserang oleh orang kafir Portugis dalam perjalanan mereka ke Hejaz. Orang Islam Calicut dan Ceylon, yang juga diganggu oleh orang Portugis, berjanji penguasa-penguasa mereka yang bukan penganut Islam akan bersedia bertempur melawan orang kafir itu jika Sultan Ottoman memimpin serangan. "Jika tidak ada bantuan dari Yang Mulia, orang kafir keparat itu akan tetap membunuhi orang Islam yang tidak berdosa."[40]

Duta besar yang membawa permohonan ini, bernama Husain, tiba setelah Sultan yang baru, Selim II, menduduki tahta menggantikan Suleiman (Gambar 5). Selim menunjukkan semangat luar biasa besar untuk memberikan bantuan kepada orang Islam di Samudra India, dan untuk memperluas kekuasaan Ottoman ke wilayah itu. Jawaban awalnya, tertanggal 16 Rabi'ul-awal 975H (20 September 1567), menguraikan dengan tepat dalam garis besar isi petisi yang dibawah utusan Aceh itu. Surat jawaban itu menyampaikan keputusan Selim untuk mengabulkan permohonan itu dengan mengirimkan 15 kapal dayung dan 2 perahu layar, serta pembuat senjata, prajurit, dan artileri dalam jumlah besar. Laksamana Suez, Kurtoglu Hizir Reis, diperintahkan untuk memimpin armada itu, untuk menghancurkan musuh-musuh Aceh, dan merebut "benteng lama" (Malaka?) dari tangan orang *kafir.* Surat jawaban itu dikirimkan kepada Ala'ad-din melalui seorang utusan Turki, Mustaffa Camus.[41]

Sepucuk surat lagi kira-kira pada tanggal yang sama memberikan instruksi kepada Kurtoglu Hizir mengenai ekspedisi itu. Gaji dan perlengkapan bagi semua anak buahnya disediakan oleh kerajaan selama satu tahun, setelah itu Sultan Aceh yang harus memikul biaya hidup mereka jika ia masih membutuhkan mereka.[42] Berapa besar ambisi Selim di Samudra India tercermin dalam sebuah *firman* kepada Gubernur Mesir pada Januari 1568, yang juga melukiskan gambaran serupa mengenai serangan dan penjarahan

yang dilakukan orang Portugis atas jemaah haji dan pedagang Islam yang tidak berdosa. Untuk memperlancar gerakan armada besar yang dimaksudkan Selim untuk dikerahkannya untuk menghancurkan orang Portugis, Gubernur harus membuat sebuah terusan antara Laut Tengah dan Laut Merah. Proyek ini mungkin 300 tahun terlalu pagi dari sisi teknologi, tetapi dari situ tercermin betapa sudah jauhnya Ottoman melihat ke depan pada masa itu.

Namun, hanya beberapa hari sebelum instruksi mengenai terusan Suez itu, pada 5 Rajab 975H (5 Januari 1568), Selim terpaksa menulis surat permintaan maaf kepada Husain utusan dari Aceh itu. Ekspedisi Sumatra itu terpaksa ditangguhkan karena ada pemberontakan di Yaman, dan armada Kurtoglu Hizir telah diperintahkan untuk berbelok ke Yaman dan memadamkan pemberontakan itu. Namun demikian, ekspedisi itu akan dilaksanakan "tahun depan" (yaitu tahun Hijra 976 mulai Juni 1568).[43]

Hanya hingga ini sumber-sumber primer berbicara. Kita tahu mengenai upaya memadamkan pemberontakan di Yaman, yang akhirnya diselesaikan oleh Sinan Pasha pada 1571, tetapi tidak mengenai apakah ada kapal-kapal dari armada itu yang melanjutkan perjalanan ke Aceh.

Tidak jelas apakah meriam besar dan ahli-ahli pembuat senjata yang tiba di Aceh dan dicatat oleh sumber-sumber Aceh dan Portugis sisa-sisa dari ekspedisi ambisius Selim II ini, atau apakah mereka rombongan yang dikirimkan Suleiman sekitar 1563 dan dinyatakan telah tiba dan untuk itu diucapkan terima kasih dalam petisi 1566.

Sumber Portugis yang paling banyak dikutip, *Decade Eight* oleh Couto, jelas merujuk kepada ekspedisi lebih awal. Couto berbicara tentang persiapan-persiapan yang dilakukan Sultan "Alaharadi" [Ala'ad-din] untuk merebut Malaka, yang menjadi penghalang satu-satunya bagi dia untuk menjadi maharaja orang Melayu setelah menaklukkan Aru dan Johor (umumnya diartikan telah ditaklukkan pada 1564). Ia mengirimkan berbagai hadiah untuk Grand Turk, dan menjanjikan semua rempah-rempah dari wilayah Indonesia bila Malaka telah kembali ke dalam tangan orang Islam. Sultan Turki Ottoman segera menjawab permohonan bantuan itu dengan mengirimkan "500 prajurit Turki, banyak bom besar, banyak sekali, banyak ahli teknik dan banyak pandai artileri".[44] Utusan-utusan dari Aceh lainnya dikirim ke "Baroche" [Bijapur?], Demak, Calicut, dan kepada penguasa pantai Koromandel untuk mencari bantuan. Semuanya mengirimkan bantuan, kecuali Demak, yang sangat ketakutan akan ambisi Sultan Aceh yang tidak terpuaskan itu, dan karena itu menghukum mati utusan-utusan Sultan Aceh itu.

Gambar 5 Sultan Selim II dari Turki

Gambar 6 Aceh mengepung Malaka pada 1629

Semua ini, kata Couto selanjutnya, disampaikan kepada Viceroy Antonio Noronha ketika ia mulai memangku jabatannya pada 1564. Ia segera memerintahkan agar benteng Malaka diperkokoh, untuk mempertahankannya dari serangan Aceh, yang pada akhirnya berlangsung dari 20 Januari hingga 25 Februari 1568. Couto kemudian melanjutkan, dalam bab berikutnya, kisahnya mengenai serangan besar Aceh pada 1568.[45] Karena itu terlalu harfiah kita barangkali mengartikan uraian Couto jika kita mengasumsikan semua persiapan yang menurut dia dilakukan oleh Aceh dilakukan sebelum 1564.[46]

Tampaknya jelas, bantuan Turki sebelumnya pada sekitar 1563 telah membantu serang Aceh atas Aru dan Johor (boleh dikatakan teman-teman dengan orang Portugis) pada tahun berikut, dan mendorong perencanaan untuk sebuah serangan yang lebih ambisius atas Malaka. Menurut sumber-sumber Jesuit, seorang duta besar Turki berada di Aceh ketika beberapa kapal Portugis tiba di situ untuk berdagang pada 1565. Meski Aceh sebelumnya tidak bermusuhan dengan Malaka, intervensi Turki Ottoman mengakibatkan orang Portugis dihadapkan pada pilihan memeluk agama Islam atau mati kafir.[47] Surat-surat Jesuit yang sama, ditulis di Malaka pada akhir 1566, menunjukkan bahwa serangan atas Malaka sudah diperkirakan, dan bahwa prajurit dan artileri untuk itu telah dikirimkan dari Turki, "karena Turki berdagang dengan raja ini, yang, setiap tahun, mengirimkan kepada Sultan banyak kapal yang sarat dengan muatan ke Mekkah".[48]

Couto sangat jelas mengatakan bahwa selama serangan pada Januari–Februari 1568 orang Aceh dibantu oleh sekitar 400 prajurit Turki, dan juga ada bantuan dari Japara dan Calicut. Tetapi menurut kaum Jesuit, bantuan Turki untuk Aceh diteruskan setelah serangan itu gagal. Sepucuk surat dari Malaka pada akhir 1568 melaporkan, penduduk Malaka masih tetap hidup dalam ketakutan, karena Sultan Aceh masih terus mengadakan persiapan-persiapan perang, dan persekutuan-persekutuan dengan orang Islam di India, Malaya dan Jawa. Karena perdagangannya yang sangat besar dengan Turki, "Turki memberi dia bantuan berupa prajurit, awak meriam dan artileri, yang digunakannya untuk menyerang kami".[49] Tekanan ini dipertahankan, dan menimbulkan saat-saat paling mengkhawatirkan bagi orang Portugis di Asia, sampai pada 1570-1 ketika Bijapur, Ahmadnegar (Gujarat), Calicut, dan Aceh melancarkan serangan bersama atas wilayah-wilayah yang dikuasai Portugis. Serangan ini ditangkal dalam serangkaian pertempuran besar, terutama di Malaka pada 21 Oktober 1570.[50]

Menggabungkan semua sumber yang kita miliki, rekonstruksi berikut ini mengenai berbagai peristiwa pada 1560-an tampaknya lebih masuk akal.

Perdagangan yang terus berkembang antara Laut Merah dan Sumatra pasti menarik pedagang-pedagang dan petualang-petualang Turki untuk datang ke Aceh; kemahiran militer petualang-petualang itu sering ternyata berguna untuk Aceh. Serangan-serangan Portugis atas perdagangan ini dari 1554 mendorong penyusunan rencana untuk serangan besar-besaran atas ancaman orang Portugis. Dari 1561-2 Aceh telah mengirimkn utusan-utusan ke Constantinople untuk memperoleh perbekalan dan prajurit, dan untuk mencoba membangkitkan minat Sultan Ottoman pada sebuah operasi militer besar. Upaya-upaya ini berhasil memperoleh bantuan tambahan yang cukup besar dari Turki berupa awak senjata paling tidak pada 1564, ketika mereka ini membantu Aceh muncul kembali sebagai kekuatan militer dengan menaklukkan Aru dan Johor. Sejumlah senjata barangkali juga dibeli. Utusan Aceh Husain, yang barangkali meliputi periode 1565-8, sudah hampir mencapai hasil yang lebih besar. Setelah penangguhan karena wafatnya Suleiman pada 1566, Selim II cukup terkesan oleh peluang-peluang yang terbuka di Samudra Hindia untuk mengumumkan sebuah ekspedisi besar. Keputusannya itu, diambil pada musim gugur 1567 tidak lama setelah dia memegang tampuk kekuasaan, tampaknya awal dari perubahan bersejarah arah kebijakan Turki, seperti ditunjukkan oleh proyek terusan Suez. Hasil positif misi Husain itu pasti sudah diketahui di Aceh jauh sebelum 1567, dan berlanjut dengan persiapan-persiapan secepatnya untuk sebuah serangan atas Malaka. Pada 20 Januari serangan dimulai tanpa armada Turki yang diharapkan turut ambil peranan, barangkali karena Ala'ad-din sudah mendengar berita buruk bahwa Kurtoglu Hizir diperintahkan menuju Yaman, tetapi tidak dapat menangguhkan rencananya begitu persiapan penyerangan telah tuntas.

Kurtoglu Hizir dan armadanya tidak pernah mencapai Aceh. Tetapi perlakuan istimewa yang diberikan orang Aceh kepada meriam, bendera, dan pandai senjata Turki menunjukkan paling tidak semua ini pasti telah dikirimkan, bersama sebuah pesan dari Sultan Turki. Mereka barangkali tiba di Aceh pada 1568 atau 1569, dan memperbesar kekuatan Aceh dalam kaitan dengan lawan-lawan Indonesia-nya. Mereka juga pasti mendorong lebih lanjut gagasan bagi sebuah front pan-Islam melawan orang Portugis, yang mencapai puncaknya pada manuver-manuver 1570-1.

Semangat menyala-nyala solidaritas Islam dengan kerajaan-kerajaan India tidak lama kemudian redup, tetapi dampaknya di wilayah Indonesia masih terasa selama satu dekade berikutnya. Kematian Ala'ad-din Ri'ayat Shah al-Kahar pada 1571 tampaknya mengurangi ketakutan tetangga-tetangga Aceh

kepadanya. Penggantinya Ali Riayat Shah (1571-8) menunjukkan hasrat yang lebih sungguh-sungguh untuk mengajak Johor bersekutu melawan orang *kafir.* Barangkali pada awal tahun 1570-an ia mengirimkan salah satu dari meriam besar yang diterimanya dari Turki kepada Johor sebagai lambang persekutuan ini.[51] Tahun 1573 Aceh mohon, dan berhasil, kepada Ratu Japara yang militan untuk melakukan serangan bersama atas Malaka, yang berlangsung secara bertahap selama 1573 dan 1574. Armada Japara baru tiba di depan Malaka setelah armada Aceh mundur. Johor juga memainkan peran pendukung dalam persekutuan ini, karena menurut laporan kapal-kapal Japara singgah di situ dalam perjalanan ke medan laga.[52] Persekutuan dengan Johor tampaknya berkembang setelah itu selama sisa pemerintahan Ali Riayat Shah di Aceh. Menurut salah satu catatan Portugis persekutuan itu diperkokoh dengan perkawinan agung antar-istana kedua kesultanan itu.[53]

Dua dekade dari 1560 hingga 1580 merupakan titik puncak bagi kejayaan militer Islam di Asia Tenggara. Selama periode ini orang Portugis selalu berada dalam posisi bertahan. Aceh mendominasi Selat Malaka, dengan dukungan tidak tetap dari Johor dan Japara, sedangkan pedagang Islam dari Japara, Gresik, Ternate dan kepulauan Banda unggul di kepulauan timur. Berapa besar bobot yang harus kita berikan kepada intervensi Turki dalam mewujudkan kekuatan militer yang lebih besar dan ikatan ini di pihak kerajaan-kerajaan Islam?

Kegagalan kekuatan-kekuatan Islam untuk bersatu pada abad ke-16 tidak mengherankan kita. Tidak ada contoh-contoh sebelumnya di Asia Tenggara, dan sedikit sekali di dunia Islam, mengenai kerajaan-kerajaan yang bekerja sama atas dasar kesetaraan dan saling menghormati.[54] Garis batas wilayah tidak ditetapkan dengan jelas, dan kerajaan-kerajaan terkuat dipengaruhi oleh gagasan kerajaan dunia yang diwarisi dari kerajaan-kerajaan India lama. Dan selain itu, mengingat ada persaingan dagang di antara kerajaan-kerajaan itu, tidak mengherankan jika ambisi kerajaan-kerajaan yang kuat selalu mengundang kecurigaan.

Lebih menarik lagi dalam kaitan dengan latar belakang perpecahan ini, bagi saya tampaknya ada penjajagan-penjajagan tahun 1560-an dan 1570-an untuk membentuk sebuah persekutuan Islam. Islam merupakan satu-satunya landasan untuk persekutuan semacam itu. Bukti-bukti dari abad ke-19 mendukung kesimpulan bahwa gagasan persatuan umat di bawah satu Kalifah memiliki bobot tertentu bagi orang Islam yang bercerai berai di Asia Tenggara. Kesusasteraan Melayu menunjukkan gagasan ini tidak kurang pentingnya pada abad ke-16. Pada suatu saat ketika nama besar Rum dan prestise Kalifah didukung oleh kekuatan militer yang besar Suleiman Yang Agung, kemungkinan

bagi sebuah perang sabil bersama di bawah pimpinan Turki bukannya tidak masuk akal.

Tentu saja kita jangan menyimpulkan ini terlalu jauh. Kekuatan-kekuatan Islam satu-satunya di Asia Tenggara yang tampaknya menunjukkan minat pada cita-cita pan-Islam adalah Aceh, Jepara, Ternate, Gresik, dan, sampai batas tertentu, Johor. Seperti kata Meilink-Roelofsz, kekuatan-kekuatan Islam ini semuanya adalah kerajaan-kerajaan yang terlibat dalam perdagangan rempah-rempah Islam dari Ternate melalui Jawa dan Aceh ke barat. Karena itu semuanya sama-sama mengikuti perkembangan internasional dalam dunia Islam.

Halnya sebaliknya dengan jantung pertanian Jawa, apakah ini terpusat dari sisi politik di Demak, Pajang atau Mataram. Kecuali untuk saat yang sangat pendek di bawah Demak pada awal abad ke-16, wilayah ini dari sisi ekonomi dan budaya lebih berdiri sendiri. Namun, Banten agak aneh karena tidak masuk daftar sekutu-sekutu Islam. Didirikan oleh Falatehan, seorang penyebar agama Islam, yang meninggalkan tanah kelahirannya Pasai sebagai protes atas kontrol Portugis di situ, Banten tetap merupakan bagian dari dunia maritim Islam kosmopolitan. Namun seperti Brunei dan beberapa kerajaan-kerajaan kecil Banten jarang bersengketa dengan orang Portugis. Ini pasti karena persaingan dagang antara Portugis dengan Aceh untuk memperoleh lada Sumatra dan untuk mendominasi pengapalan lada ke Eropa. Barangkali karena kebijakan Aceh menghalang-halangi perdagangan di Barat, Banten mengirimkan sebagian besar ladanya ke Cina dan Malaka Portugis.[55]

Jika kita terima pendapat bahwa intervensi Turki atas persekutuan Asia Tenggara penting artinya, apakah kita setuju dengan pendapat kaum Jesuit yang mengatakan bahwa Sultan Aceh ”menentang keras semua orang Kristen, didorong dalam hal ini oleh orang Turki?”[56] Uraian di atas justru membawa kita kepada kesimpulan bahwa orang Acehlah yang mengambil inisiatif untuk membentuk persekutuan dengan Turki. Selama awal 1560-an Sultan Suleiman sangat disibukkan oleh ekspansinya ke barat, dan tidak sempat memikirkan ekspansi ke timur. Dan tampaknya dapat dikemukakan argumen bahwa justru inisiatif Aceh ini yang menarik perhatian Turki sekali lagi ke Samudra India, setelah Suleiman mengabaikannya pada 1540. Seorang sejarawan mengenai ekspansi Ottoman mengusulkan 1570 sebagai tahun para negarawan Turki yang lebih cerdas mempertimbangkan untuk mengalihkan perhatian dari Laut Tengah mengingat pentingnya strategi samudra, hal yang baru saja disadari.[57]

Pusat perhatian baru yang baru saja ditemukan ini menjadi sia-sia karena muncul bersamaan dengan memudarnya kekuatan Turki. Suleiman

adalah sultan terakhir yang benar-benar raja besar Ottoman. Kerajaan itu tetap dijaga ketertibannya cukup lama setelah ia wafat pada 1566 oleh menteri-menteri yang cakap yang dikumpulkannya di sekelilingnya – terutama Vezir Sokolli. Setelah Vezir Sokolli meninggal pada 1578 kerajaan itu menjadi bulan-bulanan kelemahan dan korupsi di pusat, sehingga kekuasaan efektif dibiarkan jatuh ke tangan Jannissary.[58] Ekspedisi terakhir Turki di Samudra India adalah ekspedisi perorangan di bawah Ali Beg (1580-9) yang lebih mengandalkan diri kepada gertakan daripada kekuatan untuk mendapatkan pengakuan dari sejumlah kerajaan Afrika Timur. Penangkapannya oleh orang Portugis pada 1589 mengakhiri kekuatan angkatan laut Ottoman di timur Aden.[59] Pudarnya kekuasaan Ottoman di Yaman, dan lenyapnya seluruh kekuasaannya di situ pada 1635, melenyapkan pula pangkalan tempat armada-armada laut sebelumnya berangkat menuju laut lepas.

Juga di Aceh, periode melemahnya kerajaan mulai dengan wafatnya Sultan Ali Riayat Shah pada Juni 1578. Setelah kerajaan diperintah oleh tiga penguasa berturut-turut, Ala'ad-din Mansur Shah dipanggil dari Perak untuk menduduki tahta yang sudah goyah; dia tidak terlalu dipatuhi oleh rakyatnya, menurut sebuah sumber Portugis.[60] Persekutuan dengan Johor roboh, dan perang pecah kembali pada 1582. Orang Portugis kembali dapat mengandalkan dukungan pasif dari salah satu dari tetangga-tetangganya kesultanan-kesultanan Islam.

Di India, Portugis berhasil membangun hubungan bersahabat dengan pelabuhan-pelabuhan Moghul di Gujarat menjelang akhir abad itu, dan bahkan semakin menguasai perdagangan di Samudra India barat. Lalu lintas pelayaran kapal-kapal Gujarat antara Aceh dan Laut Merah bertahan paling tidak hingga akhir abad itu,[61] tetapi lenyap kemudian dengan berdatangannya kapal-kapal Inggris dan Belanda ke Aceh. Dalam berhubungan dengan Aceh baik Inggris maupun Belanda menekankan dengan hati-hati bahwa mereka menentang Spanyol/Portugal, dan mereka bersahabat dengan Turki.[62] Jadi, pertentangan sederhana antara kekuatan-kekuatan Islam dengan orang kafir, yang berkecamuk selama seabad di berbagai front, tidak lagi sesuai dengan realitas pada masa itu.

Meski hubungan politik dengan Turki tampaknya hampir seluruhnya putus setelah 1580, Aceh paling tidak mempertahankan sekelumit pengaruh Turki selama beberapa waktu ke depan. Ini tampak paling jelas di bidang kemiliteran. Taktik militer Aceh, teknik militer dan artileri terkenal lama setelah pelatih-pelatih dari Turki meninggalkan Aceh. Sebagai contoh, Aceh berhasil menaklukkan Deli pada 1612 dengan menggunakan parit-parit, meski kota

itu dipertahankan dengan cerdas oleh orang Portugis.[63] Pengawal istana yang diangkat oleh Iskandar Muda (1607-36) sangat serupa dengan Jannisary Turki. Pengawal istana terdiri dari budak-budak militer, yang direbut dari musuh ketika mereka masih muda dan dilatih dengan ketat dalam seni perang.[64]

Pengendalian sumberdaya militer ini berdasarkan model dari Turki menempatkan para penguasa Aceh di puncak kekuasaan yang berbahaya. Mereka berada dalam posisi untuk memperlakukan rakyat dengan tidak semena-mena, dibandingkan dengan sebagian besar penguasa-penguasa Indonesia. Dalam hal Iskandar Muda khususnya, gambaran yang kita peroleh berupa istana yang penuh dengan kecurigaan dan intrik, istana yang dijaga ketat dan terbatas untuk bangsawan-bangsawan perempuan yang besar jumlahnya, lebih mengingatkan kita kepada kerajaan di Laut Tengah daripada kepada kesultanan Indonesia yang lebih bersifat patriarkal. Jelas kekerasanlah, bukan kesetiaan orang Melayu yang terkenal itu, yang merekat kerajaan Aceh.[65]

Dari sisi budaya, Aceh juga mempertahankan hubungan yang lebih erat dengan negara-negara Islam di Barat — meski di sini orang Arab bukan orang Turki yang memiliki sesuatu untuk ditawarkan. Dari tahun 1570-an catatan-catatan sejarah penuh dengan nama-nama ahli teologi dari Mesir, Hejaz, Yaman, dan Gujarat yang datang ke Aceh untuk mengajar.[66] Sekolah-sekolah tumbuh subur, dan pengetahuan bahasa Arab meluas di kalangan kelompok masyarakat atas. Banyak surat diplomatik Aceh pada awal abad ke-17 yang ditulis dalam bahasa Arab, termasuk sepucuk surat diplomatik yang dikirimkan kepada Ratu Elizabeth melalui Lancaster.[67]

Karena itu, sebagai kesimpulan, ada dua periode saat intervensi Turki cukup besar di Asia Tenggara. Periode pertama terjadi dalam kaitan dengan ekspedisi Suleiman Pasha ke Gujarat pada 1538; periode kedua selama puncak hubungan dagang dengan Laut Merah pada tahun 1560-an. Dalam kedua periode ini, pengaruh Turki diterapkan melalui, dan untuk manfaat, Sultan Ala'ad-din al-Kahar. Tetapi dalam kedua periode ini, dan khususnya dalam periode kedua, intervensi mendorong kerjasama yang luar biasa antara sejumlah kerajaan Islam di Asia Tenggara. Hubungan diplomatik pada 1560-an antara Turki dan Aceh mencapai puncaknya dan penting dalam kaitan dengan arah berikutnya kebijakan Turki dan kebijakan Aceh. Hal ini tercatat dalam berbagai bentuk dalam kesusasteraan Melayu dan Aceh.

Lampiran

Beberapa Sumber Turki mengenai "Ekspedisi Sumatra"

Adanya catatan-catatan Turki mengenai "ekspedisi Sumatra" pada tahun 1560-an diungkapkan pertama kali di hadapan para sejarawan Asia Tenggara oleh sebuah artikel oleh Juynboll dan Voorhoeve dalam edisi baru *Encyclopedia of Islam*.[68] Sayang, peringkasan dan salah cetak ketika mengubah tanggal Islam yang diberikan membuat artikel itu sampai batas tertentu kurang dapat diandalkan sebagai rujukan. Salih Ozbaran dari School of Oriental and African Studies (SOAS) di London dan University of Istanbul cukup sabar untuk menelaah beberapa artikel Turki bersama-sama saya, dan menterjemahkannya secara kasar. Karena tidak banyak sejarawan Asia Tenggara yang pandai berbahasa Turki, ada baiknya dipaparkan di sini isi berbagai sumber. Terima kasih saya yang sedalam-dalamnya saya sampaikan kepada Salih Ozbaran, dan juga kepada Profesor Bernard Lewis, atas bantuan yang telah mereka berikan.

Sumber paling penting adalah sebuah tulisan oleh sejarawan laut Saffet Bey, yang terbit dalam dua bagian dalam jurnal standar sejarah Ottoman pada 1912.[69] Meski tidak dalam bentuk tulisan ilmiah, tulisan itu berdasarkan beberapa surat dari arsip Ottoman dan sejumlah sumber yang telah diterbitkan yang berhasil diperolehnya. Tulisan itu mulai dengan menceritakan kembali kisah *lada sacupak* dari "sumber-sumber Eropa" — yang dapat dikatakan tidak lebih daripada terjemahan ke dalam bahasa Inggris buku Snouck Hurgronje *The Achehnese*. Saffet kemudian mengutip teks lengkap *firman* pertama Sultan Selim tentang ekspedisi Sumatra, tertanggal 16 Rabi'ul-awal 975 (20 September 1567). *Firman* pertama-tama merangkum isi petisi "Vezir" Aceh, Husain. Aceh dikatakan dibiarkan berperang sendiri melawan orang kafir sampai sekarang ini, dan meminta bantuan prajurit Turki yang berpengalaman. Di wilayah-wilayah sekitar Aceh ada 24.000 pulau, dengan penduduk Islam yang menderita di bawah tekanan orang kafir. Orang Portugis juga menembaki dan menawan pedagang-pedagang yang hilir mudik berdagang antara Aceh dan Mekkah. Selain itu, "orang kafir dari Calicut dan Ceylon" mencederai penduduk Islam di tempat-tempat itu. Husain percaya armada Ottoman di tempat-tempat itu mampu menghancurkan orang kafir. Ia juga meminta agar pandai senjata dikirim ke Aceh, dan agar gubernur-gubernur Yaman, Aden, Mekkah, dan di tempat lain diperintahkan membantu prajurit Turki dalam perjalanan mereka ke Aceh. *Firman* diakhiri dengan mengabulkan petisi Husain. Lima belas kapal dayung *(kadirqa)* dan dua perahu layar *(barça)* diperintahkan untuk berlayar

dari Suez, dengan seorang pandai senjata kepala, tujuh pandai senjata biasa, sejumlah prajurit, meriam, dan meriam lebih kecil *(tüfenk).* Laksamana Besar Kurtoglu Hizir diangkat sebagai panglima ekspedisi itu, dengan instruksi menghancurkan musuh-musuh Aceh, membela agama Islam, dan merebut benteng lama milik orang kafir. Kurtoglu diinstruksikan untuk mencari sumber-sumber dana untuk membayar gaji anak buahnya.

Selebihnya dari bagian pertama tulisan Saffet berisi ulasan mengenai surat ini, diikuti uraian mengenai ekspedisi Suleiman Pasha 1538 dan hubungan Turki-Portugal.

Bagian kedua mulai dengan ulasan-ulasan lebih lanjut mengenai utusan Aceh, yang tampaknya didasarkan pada beberapa buku Turki tidak bernama dan bukti-bukti dari "seseorang di sini bernama Lutfy, yang pergi India dan kembali". Saffet mengatakan, dutabesar Aceh itu tinggal di Istanbul selama dua tahun, di sebuah daerah khusus untuk perwakilan asing, sementara Suleiman sedang di luar kota, sibuk dengan serangan Szigetvar. Namun, Selim II menyambut dutabesar itu setelah ayahnya wafat, dan mengirim dia ke Alexandria dengan sebuah kapal Turki. Dari situ ia didampingi ke Aden oleh pejabat-pejabat Turki yang lain. Kemudian ekspedisi Aceh disiapkan di Suez, terdiri semuanya dari 19 kapal dayung dan tiga perahu layar. Kurtoglu Hizir Reis diangkat menjadi panglima dan Mehmet Bey wakil panglima. Mereka ditugaskan membantu Sultan Aceh selama Sultan Aceh membutuhkan mereka, meski anggaran untuk gaji dan perbekalan mereka hanya untuk satu tahun.

Untuk memperkuat informasi terakhir ini, Saffet mengutip dua pucuk surat lagi dari arsip Ottoman. Surat pertama, memerintahkan Kurtoglu mengepung benteng orang kafir melalui darat sedangkan wakil panglima Mehmet tetap tinggal di kapal. Surat kedua, tertanggal 5 Rajab 975 (5 Januari 1568), memberitahu Sultan Ala'ad-din Ri'ayat Shah bahwa ekspedisi tertunda karena pemberontakan di Yaman. "Dengan izin Allah pemberontakan itu akan dibasmi, dan ekspedisi akan dilanjutkan tahun depan."

Kedua surat ini merupakan satu-satunya sumber arsip yang diberikan. Saffet selanjutnya menguraikan mengenai kegiatan-kegiatan Kurtoglu Yaman; menurut dia tulisan-tulisan mengenai kegiatan-kegiatan Kurtoglu Yaman ini banyak sekali.

Ia mengutip dua penulis Turki dari pertengahan abad ke-17 yang menyebut-nyebut Aceh dalam karya mereka. Mereka adalah ahli geografi Katib Celebi dan Ebu Bekr Dimiski, dari buku masing-masing, *Cihannùa* dan *Cografya.* Mereka tidak banyak berbicara mengenai Aceh kecuali bahwa orang

Aceh prajurit yang tangguh, yang sudah belajar cara membuat senjata api dan pedang dari orang Turki.

Saffet menutup tulisannya dengan dua informan yang menarik dari zamannya. Pertama, seorang anggota keluarga istana Aceh yang bertemu dengan Saffet pada Oktober 1911 dan menceritakan kepadanya kisah berikut: Jauh di masa lalu utusan-utusan dari Aceh berangkat ke Turki untuk mencari bantuan. Hasilnya, dua kapal dikirim ke Aceh, bersama banyak prajurit dan tukang. Senjata-senjata api dan bendera-bendera dari kedua kapal itu tetap tinggal di Aceh sampai perang melawan Belanda. Tidak ada kapal atau prajurit yang kembali ke Turki. Mereka mendirikan sebuah desa Turki di Aceh. Penduduk desa ini tetap menganggap diri orang Turki, meski mereka sudah terserap sepenuhnya ke dalam budaya Aceh. Bersama kedua kapal itu tiba pula sebuah *firman,* yang masih dalam tangan Raja yang terakhir.[70] Juga tiba bersama kedua kapal itu sebuah khotbah, yang kemudian dibacakan di masjid setiap hari Jumat. Ada banyak senjata, besar dan kecil. Seorang duta besar Turki bernama Seyyid el-Kemal kemudian diangkat menjadi panglima sebuah Provinsi Aceh. Beberapa *ulama* juga berkunjung ke kapal-kapal itu, di antaranya Sheikh Abdur'rauf, Teungku Kuala.[71]

Akhirnya, Saffet mengutip seorang penjelajah Turki, Abdul Aziz, yang berkunjung ke Aceh pada 1898 dan bertemu dengan *ulèëbalang* Meureudu, Teuku Suleiman. *Ulèëbalang* ini mengatakan kepadanya, ada sepucuk meriam tua buatan Turki di kediaman Gubernur, dan satu lagi di Jawa. Abdul Aziz selanjutnya mengatakan, "Saya melihat di Aceh sebuah makam Turki dan penduduk seperti orang Turki, mereka sayangnya tidak banyak tahu tentang Turki, tetapi mereka tetap mengatakan mereka orang Turki. Saya tidak melihat hal-hal lain yang menarik."

Para sejarawan Turki lainnya yang mengamati Aceh tampaknya mengandalkan diri kepada Saffet. Tetapi hal yang masih berupa hipotesis dalam karya Saffet sudah menjadi fakta bagi para penulis sesudah zaman dia. I.H. Uzuncarsili, dalam buku *Osmanli Tarihi,*[72] mengatakan, Aceh mengirimkan seorang utusan ke Istanbul pada 1565. Utusan itu harus menunggu dua tahun, sampai Selim II menerima permohonannya dan memutuskan untuk mengirimkan lebih dari 20 kapal. Setelah ekspedisi itu dibelokkan ke Yaman, peralatan dan para pandai senjata dikirimkan ke Aceh dengan dua kapal. Orang Turki yang dikirim ke Aceh kemudian menetap di situ.

Sejarawan nasionalis Danismend[73] melangkah lebih jauh lagi dengan pernyataan bahwa ekspedisi ke Aceh itu benar-benar ada, dan ia bahkan tidak

menyinggung sama sekali hal diperintahkannya armada Kurtoglu untuk berbelok ke Yaman. Ia menekankan kekuasaan Selim atas Aceh, dan sampai pada kesimpulan bahwa setelah meluas ke sebagian besar Eropa, Asia dan Afrika, kekuasaan Ottoman akhirnya meluas sampai jauh sekali, sampai ke Aceh.

5

Perdagangan dan Masalah Kekuasaan Raja di Aceh: Tiga Tahap, sekitar 1550-1700

Persoalan

Antara sekitar 1400 dan pertengahan abad ke-17 berkembang sebuah jaringan perdagangan yang luas di Asia selatan, yang terbentang dari Laut Merah di Barat hingga ke Canton di Timur dan mencakup sebagian besar dunia Melayu maritim. Kekuatan dinamis ini tidak saja membentuk landasan ekonomi bagi penyebaran Islam di dunia Melayu, tetapi juga bagi kebangkitan kerajaan-kerajaan maritim, yang memberikan pada dunia itu sebagian besar ciri-ciri modernnya.

Apa yang telah diberikan oleh perdagangan luar negeri, diambil kembali oleh perdagangan luar negeri. Monopoli Belanda yang lebih efektif pada abad ke-17, yang didukung oleh perdagangan setempat yang dilakukan orang Cina, membawa dampak sebaliknya pada stimulus dagang, yang telah diberikan oleh para pedagang kecil Gujarati, Malabari, Coromandel, Arab, Portugis, dan Cina pada abad ke-15 dan abad ke-16. Meski demikian, negeri-negeri maritim di Asia Tenggara lebih dari sekadar korban pasif dari proses ini. Sukses atau kegagalan mereka banyak tergantung pada kapasitas mereka untuk tumbuh bersama dalam lingkungan dagang mereka, untuk memberinya [lingkungan itu] stabilitas, peralatan hukum, dan di atas semuanya "perlindungan atas orang dan harta . . . melawan kehendak sewenang-wenang penguasa", yang dilihat Meilink-Roelofsz[1] sebagai hal yang amat penting bagi kapitalisme yang sedang bersemi pada masa yang sama atau masa sebelumnya di Antwerp dan Venesia, Cairo dan Aleppo, atau bahkan di Ahmedabad dan Golconda. Sepanjang perdagangan luar negeri tetap "asing" sifatnya di berbagai kerajaan Asia Tenggara, ini penyebab utamanya tampaknya tidak adanya keamanan dan otonomi bagi pedagang dalam negeri vis-à-vis kerajaan.

Hubungan antara kekuatan dagang dan kekuasaan kerajaan inilah yang ingin saya telaah terutama dalam kaitan dengan Aceh. Seberapa jauh peranan raja dibatasi oleh perjanjian, kontrak, atau ideologi? Apakah kerajaan dari sisi konsep dan organisasi terpisah dari penguasanya? Kekuasaan dan hak-hak istimewa apa di dalam sistem itu yang dimiliki pedagang di ibukota di satu pihak, dan penguasa wilayah di pihak lain? Menurut saya semua pertanyaan ini sangat erat kaitannya dengan masalah peralihan menuju dunia modern, paling sebagaimana hal ini diartikan dalam tradisi kapitalis kita. Jawaban atas pertanyaan-pertanyaan ini, jika dapat ditemukan, akan memiliki nilai yang lebih dari sekadar nilai sejarah.

Warisan Sejarah di Sumatra Utara

Di sini bukan tempatnya untuk mencoba menggali sedalam-dalamnya asal usul kesultanan Aceh, namun ada baiknya dikemukakan beberapa ciri khas Sumatra utara.

1. Sebelum 1520 pantai Sumatra utara terdiri dari sejumlah kerajaan-pelabuhan yang berdiri sendiri-sendiri. Tidak satu pun tampaknya bahkan mengaku atasan dari kerajaan-kerajaan yang lainnya. Marco Polo memberikan gambaran yang sangat menarik pada 1292 mengenai wilayah itu, termasuk pendapatnya yang dikemukakannya dengan gigih bahwa "Ada delapan kerajaan di pulau itu [semua ini terletak di utara Sumatra], dan delapan raja . . . setiap kerajaan memiliki bahasa sendiri."[2] Meski, khususnya Pasai dan Pidie, berkembang pesat di bidang perdagangan dan kebudayaan, kerajaan-kerajaan ini, seperti Lamri di wilayah yang kelak menjadi Aceh Besar, pada dasarnya adalah kerajaan-kerajaan yang terlibat konflik dengan penduduk yang kurang beradab di pedalaman. Kesultanan Aceh yang tercipta oleh penaklukan Sultan Ali Mughayat Syah atas seluruh daerah pantai utara (1520-4) pada dasarnya adalah sebuah permulaan baru, yang dimungkinkan semata-mata karena intervensi orang Portugis yang tidak dapat diterima itu. Meski beberapa catatan sejarah memang mengatakan ada unsur wahyu ilahi berkaitan dengan asal-usul dinasti yang berkuasa, catatan yang paling dapat dipercaya, Bustanu's-Salatin, dengan tiba-tiba dibuka dengan kata-kata: "Raja pertama yang memerintah kerajaan Aceh Darus-Salam adalah Sultan Ali Mughayat Syah."[3]

2. Bahkan di kerajaan-kerajaan di Sumatra utara sebelum Aceh, konsep akibat pengaruh India mengenai kerajaan tampaknya tidak terlalu berpengaruh dibandingkan dengan di Sumatra Selatan atau Tengah atau di Jawa. Bahkan

ketika sudah diperhitungkan pula kenyataan kurangnya penelitian mengenai sejumlah situs pra-Islam yang menjanjikan di sekitar Banda Aceh, konsep/paham Hindu-Buddha tampaknya bagian yang lebih jauh dari warisan Aceh daripada di Jawa, dan karena itu pengalamannya menyangkut Islam lebih lama. Orang Sumatra Utara terkenal dengan sikap skeptis mengenai kerajaan, sedemikian rupa sehingga Tome Pires (1515) sampai dapat menulis hal berikut ini mengenai raja-raja Pasai:[4]

> Pemuka-pemuka masyarakat Pase sudah sepakat dari waktu ke waktu, siapa yang membunuh raja menjadi raja; dan mereka mengatakan pernah terjadi dalam satu hari ada tujuh raja di Pase, karena raja yang satu membunuh raja yang satu dan raja yang satu lagi dibunuh oleh raja yang satu lagi; tidak ada gejolak apapun di kota atau di antara penduduk dan pedagang apakah raja terbunuh atau hidup.

Gambar 7 *Gunongan* di Aceh, dibangun Sultan Iskandar Thani (1637-41)
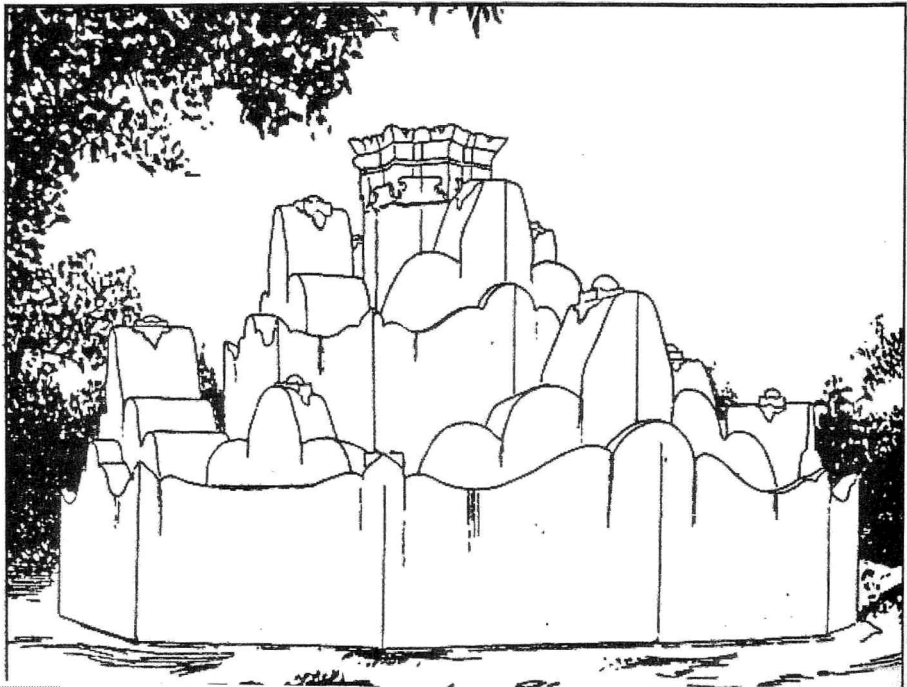
3. Lembah sungai Aceh sendiri, yang menjadi pusat politik Aceh setelah 1520, dan dikenal sebagai Aceh Besar (Groot-Atjeh), bukan sumber penting untuk barang ekspor. Lada, dan kemudian pinang, ditanam di pantai utara; lada, kapur barus, emas dan barang ekspor lainnya datang dari pelabuhan-pelabuhan di pantai barat; timah diekspor dari Perak. Kebijakan tetap Aceh ialah mendominasi wilayah-wilayah ini dari sisi politik, memastikan hasil-hasil dari wilayah-wilayah itu tidak jatuh ke tangan musuhnya, orang Portugis, dan sedapat mungkin menyalurkan perdagangan luar negeri wilayah-wilayah itu dari ibukotanya. Tampaknya kemungkinan besar Pasai tetap menjadi pelabuhan ekspor Aceh yang penting sampai 1539,[5] tetapi setelah itu langkah-langkah yang sungguh-sungguh dan umumnya berhasil diambil untuk memastikan takluknya dari sisi politik dan perdagangan pusat-pusat produksi ini.

Tahap 1: Orangkaya *hingga 1589*

Sebagian besar dari jasa atas tetap utuhnya kerajaan yang terbentuk dari berbagai macam suku bangsa dan tradisi itu tidak pelak lagi adalah jasa raja besar Aceh abad ke-16, Ala'ad-din Ri'ayat Syah al-Kahar (1539-71). Ia menaklukkan Aru di pantai timur dan Pariaman di pantai barat, dan menempatkan putra-putranya sebagai wakil raja di kedua wilayah itu. Ia memimpin kebangkitan kembali perdagangan rempah-rempah Islam antara pelabuhan Aceh dan Laut Merah, yang pada akhir pemerintahannya membawa barang dagangan sama banyaknya dengan barang dagangan yang dibawa melalui jalur perdagangan Portugis. Ia membentuk sebuah persekutuan dengan Turki dan menjadi momok bagi Portugis di Malaka. Pusat perdagangan Banda Aceh tidak syak lagi tumbuh di sekitar istananya.

Sumber-sumber Portugis mengatakan, pengiriman lada dan rempah-rempah yang lain dari Aceh ke Laut Merah memainkan peranan penting pada masa pemerintahan Ala'ad-din Ri'ayat Syah al-Kahar. Perdagangan ini mencapai puncaknya pada 1560-an, seperti telah diuraikan dalam bab sebelumnya. Setelah melaporkan tentang kedatangan 1.800 kuintal (90 ton) lada dan 3.000 kuintal rempah-rempah yang lain di Jeddah 1564, yang dibawa oleh 23 kapal Islam, sebuah laporan Portugis mengatakan lebih lanjut, "Orang-orang Aceh ini adalah orang yang paling sering melakukan perdagangan dan pelayaran ini."[6] Sumber-sumber tersebut tidak menjelaskan tentang tata cara perdagangan ini dijalankan atau tentang berapa besar bagian yang diambil oleh penguasa. Namun, sulit dibayangkan bagaimana mungkin pertumbuhan yang luar biasa

ini dapat tercapai, jika tidak dengan menarik hati pedagang-pedagang Islam yang kaya dari wilayah Selat Malaka dan sekitarnya untuk mau bernaung di bawah perlindungan yang kuat raja al-Kahar. Untuk beberapa waktu setelah itu kota Banda Aceh terkenal sebagai kota dengan penduduk berbahasa beragam, dan bahasa yang digunakan di kota itu adalah bahasa Melayu, bukan bahasa Aceh. Sebuah gambaran yang mungkin ialah perdagangan sebagian besar dibiayai dan diselenggarakan oleh kelompok beragam pedagang-pedagang Islam yang asal muasalnya dari Pasai, Pidie, Malaka, Gujarat, dan India Selatan tetapi kemudian semakin terlibat dalam sistem kerajaan Aceh, upacara-upacara kerajaan dan peperangannya.

Setelah al-Kahar dan putranya Ali Ri'ayat Syah (1571-9) wafat, pemuka-pemuka masyarakat terkuat di ibukota tampaknya berhasil menancapkan dominasi penuh atas tahta kerajaan. Lima penguasa ditumbangkan dalam masa sepuluh tahun, tanpa kecaman dari para pencatat sejarah kerajaan abad ke-17. Di tiga titik dalam periode ini *Hikayat Atjeh* menguraikan tentang keputusan "semua raja dan *hulubalang"* untuk menggulingkan seorang raja atau mengangkat penggantinya. Sultan Sri Alam digulingkan pada 1579 karena perangainya yang sudah melampaui batas dalam membagi-bagikan harta kerajaan kepada pengikut-pengikutnya;[7] penggantinya Zainal Abidin terbunuh beberapa bulan kemudian karena kekejamannya dan karena kecanduannya berburu dan adu binatang;[8] *raja-raja* dan *hulubalang* akhirnya menawarkan mahkota kepada Ala'addin Ri'ayat Syah Sayyid al-Mukamil pada 1589 (pencatat sejarah mengabaikan dua raja sebelumnya).[9] Catatan-catatan itu tidak dapat membantu kita mengidentifikasi raja-raja dan *hulubalang* ini, dan kadang-kadang *kadi* juga dimasukkan ke dalam kelompok ini, meski pucuk pimpinan disebutkan dipegang oleh Maharaja Lela dan seseorang bernama Malik az-Zahir. Terlalu pagi untuk menyimpulkan dari catatan-catatan mengenai *hulubalang* (Aceh: *ulèëbalang)* itu bahwa ada aristokrasi wilayah abad ke-18 dan abad ke-19.

Sumber-sumber Barat menjadi sumber yang lebih rinci mengenai tokoh-tokoh besar di kerajaan itu, yang menyebutnya *orangkaya.* Sumber-sumber Melayu menggunakan istilah *orangkaya* sebagai bagian dari gelar pejabat tinggi kerajaan, tetapi bagi pengunjung-pengunjung dari Eropa abad ke-17 istilah itu tampaknya diartikan sebagai gelar bagi kelas masyarakat tertinggi—bangsawan, orang istana, dan pejabat tinggi. Francois Martin mengatakan, mereka ini membedakan diri dengan memanjangkan kuku ibu jari dan kelingking "untuk menunjukkan mereka tidak mengerjakan pekerjaan kasar".[10] Best[11] dan

Beaulieu[12] diberi gelar dan kedudukan *orangkaya putih,* yang memberi mereka hak istimewa bebas keluar masuk istana.

Beaulieu, melukiskan sebuah periode 30 tahun sebelum ia sendiri tinggal di Aceh, menggambarkan dengan tajam *orangkaya* ketika mereka memiliki harta berlimpah dan kekuasaan besar sebelum 1589; dalam periode ini,

> Orangkaya hidup sangat mewah, dan mengikuti kata hati mereka, mereka gila hal-hal baru, mereka kasar, dan pongah. Harta benda berlimpah yang ditinggalkan para pendahulu mereka untuk mereka, dalam bentuk tanah dan rumah di kota, dan juga emas dan perak, mendukung kehidupan ini; tidak ada raja yang pernah menekan mereka dan tidak ada kerajaan asing yang menjarah mereka. Kota itu berpenduduk enam kali lipat seperti halnya sekarang ini, dan demikian penuh sesak sehingga sulit bergerak di jalan-jalan. Kekayaan pulau itu tersebar dalam berbagai tangan, dan pedagang demikian besar jumlahnya sehingga tidak ada kota di Indies dengan perdagangan yang demikian semarak. Selain itu, tidak ada *Alfandegue* [kantor bea cukai], atau bea cukai yang lain selain dari *tjap,* sehingga pedagang dapat menyelesaikan kegiatan mereka dalam dua pekan . . . *Orangkaya* memiliki rumah yang indah, besar, dan kukuh, dengan meriam kecil di pintu, dan budak dalam jumlah besar, baik sebagai pengawal maupun sebagai pelayan. Mereka keluar dengan berpakaian indah-indah, diiringi barisan panjang para pengiring, dan dihormati rakyat. Kekuasaan yang demikian besar itu sangat mengurangi wewenang raja, dan bahkan keamanannya, karena *orangkaya-orangkaya* utama memiliki wewenang dan kekuasaan sedemikian rupa, sehingga bila mereka sudah tidak tahan didominasi seorang raja, raja itu mereka bunuh dan mereka kemudian mengangkat raja yang lain. Jadi seorang raja sangat beruntung jika ia dapat menikmati tahta selama dua tahun. Jika ia dapat bertahan lebih lama maka itu karena ia demikian tunduk dan demikian banyak berutang budi kepada beberapa *orangkaya*, sehingga tidak ada yang tersisa dari martabatnya kecuali gelarnya.[13]

Tidak diragukan lagi, gambaran ini terlalu berlebihan, paling tidak jika dikaitkan dengan perdagangan yang terus menurun pada waktu itu. Namun, cukup banyak dukungan dari sumber-sumber lain untuk membawa kita pada kesimpulan mengenai situasi pada waktu itu bahwa para pedagang-pejabat di kota itu memiliki otonomi dan kekuasaan yang besar tanpa berhasil mendirikan landasan kelembagaan yang stabil untuk kerajaan.

Gambar 8 Seorang *orangkaya* (bangsawan pedagang) Aceh, sketsa oleh Peter Mundy pada tahun 1630-an.

Tahap 2: (1589-1636): Kekuasaan Mutlak Raja

Setelah dua pemerintahan berturut-turut oleh raja kelahiran asing yang diangkat oleh *orangkaya-orangkaya* ini, sebuah dinasti Aceh mendapatkan kembali mahkotanya pada 1589, dalam diri Ala'ad-din Ri'ayat Syah Sayyid al-Mukammil (1589-1604). Kita tahu raja ini keturunan dinasti Dar alKamal, yang berkuasa di lembah Aceh sebelum Aceh dipersatukan: ia sudah tua, dan seorang perwira laut terkemuka (barangkali Orangkaya Laksamana); dan ia pada awalnya terpilih sebagai wali seorang putra mahkota yang masih muda, Raja Asyem, yang segera

dibunuhnya.[14] Menurut Beaulieu, *kadi* (atau "uskup agung") adalah salah satu dari tokoh-tokoh pendukungnya yang setia, dan sumber-sumber kemudian menguraikan mengenai seorang *kadi* yang sangat berkuasa, kemungkinan Sheikh Shamsud-din, di istananya.[15] *Hikayat Aceh,* yang ditulis untuk cucu laki-lakinya dan anak didik Iskandar Muda, memuji-muji keadilannya dan kemakmuran kerajaannya.[16] Ia memang mengakhiri periode tidak stabil ketika tahta menjadi barang mainan bagai *orangkaya.* Beaulieu berbicara lebih jauh lagi, ia dengan rinci menggambarkan sebuah *coup* kerajaan yang menyeluruh ketika al-Mukammil naik menduduki singgasana. Raja baru itu membunuh banyak sekali *orangkaya* terkemuka melalui tipu muslihat di sebuah pesta, dan memberikan alasan berikut ini kepada rakyatnya:

> di masa lalu mereka mengangkat dan menurunkan demikian banyak raja sesuka hati mereka, mereka memusnahkan seluruh dinasti . . . Sebagai Raja, ia tidak ingin hanya menjadi bayang-bayang, atau menjadi barang mainan *orangkaya* menurut kehendak hati mereka, yang setelah membunuh raja kembali terlibat persengketaan dan perlahan-lahan melibatkan rakyat dalam sengketa dan mengakibatkan mereka paling menderita karena sengketa itu; selain itu, niatnya adalah mewujudkan ketentraman bagi semua, menjatuhkan hukuman berat kepada siapapun yang melakukan kejahatan, dan memerintah dengan adil.[17]

Setelah mematahkan kekuasaan *orangkaya,* Sultan baru itu mengambil langkah-langkah untuk memastikan mereka tidak akan dapat bangkit kembali:

> Ia perintahkan semua rumah *Orangkaya* yang terbunuh dihancurkan, membawa meriam, senjata, dan sebagian besar perabot rumah tangga mereka ke istana; melarang semua orang membangun rumah batu, memiliki meriam atau membuat parit pertahanan di dalam atau di luar . . . ia memberikan contoh tentang bagaimana membangun rumah di masa depan, terdiri hanya dari satu lantai, berdinding anyaman bambu, seperti halnya rumah-rumah sekarang . . .
>
> Ia memperlakukan pedagang Moor dengan sangat buruk, tetapi sangat hormat kepada orang Inggris dan orang Belanda, yang menetap di situ pada masa ia berkuasa.[18]

Kalaupun Beaulieu melebih-lebihkan perubahan mendadak dalam perimbangan kekuasaan ini, bahwa memang terjadi perubahan, itu diragukan lagi.[19] Catatan-catatan masa lalu dari Inggris dan Belanda melaporkan tentang sebuah otokrasi

yang tidak mengikutsertakan pedagang-pedagang penting Aceh kecuali Sultan sendiri.

Kebijakan pemusatan kekuasaan Al-Mukammil dijalankan ke puncak yang baru oleh anak didiknya yang cemerlang, yang menaiki tahta sebagai Iskandar Muda (1607-36). Di bawah sultan paling berkuasa dari sultan-sultan Aceh ini, strategi kekuasaan mutlak tampaknya dijalankan dengan sepenuh hati dan sukses luar biasa.[20] Serangkaian kemenangan militer di Sumatra Timur dan Malaya mencapai tujuan dari penguasa-penguasa sebelumnya untuk memonopoli produksi ekspor wilayah itu dan menghancurkan pesaing-pesaing utama. Kendali ketat dijalankan atas pusat-pusat produksi lada di Sumatra Barat, dengan *panglima* Aceh diganti setiap tiga tahun dan setiap tahun dipanggil untuk memberikan pertanggungjawaban.[21] Pedagang asing dipaksa memenuhi persyaratan yang ditentukan Sultan di ibukotanya sebelum mereka boleh berdagang di pelabuhan yang lain. Sultan mengendalikan sendiri di dalam wilayah kekuasaannya persentase yang sangat besar dari lada untuk dijual, dan bersikeras menjual ladanya dengan harga yang tinggi sebelum mengizinkan pedagang asing membeli lada di pasar "terbuka".[22] Pedagang Eropa dan pedagang Islam tampaknya semakin tidak puas dengan tindak tanduk Sultan ini. Pada 1620-2 semua pedagang Inggris dan Belanda diusir dari Aceh.

Juga, di Aceh sendiri, Iskandar Muda memegang kendali penuh. Pasukan permanennya hanya pengawal kerajaan (*biduanda* atau *hamba raja*)[23] sekitar 500 orang di sekitar *dalam*, digunakan sebagai pelaksana hukuman dan untuk menimbulkan rasa kagum dalam hati rakyat. Beaulieu menggambarkan mereka sebagai sebuah korps "budak" asing, yang sudah dilatih dalam seni perang sejak masih remaja seperti Janissary Turki.[24] Pasukan yang lebih besar dibentuk bila diperlukan melalui *orangkaya,* setiap kelompok prajurit ditempatkan di bawah tanggung jawab *orangkaya* tertentu pada waktu perang. Mereka bertugas atas biaya dan perbekalan sendiri, kecuali jika perang berlangsung lebih dari tiga bulan. Kendali raja diperkuat dengan pengawasan ketat atas semua senjata, yang menunjukkan bahwa penggunaan artileri cenderung berujung dengan pemusatan kekuasaan: "Raja memberi mereka senjata yang semuanya didaftar, mereka wajib mengembalikan senjata itu setelah mereka kembali."[25] Selain itu, pihak keluarga di rumah bertanggung jawab atas prestasi kaum laki-laki mereka di lapangan.

Beaulieu juga mengatakan, "setiap *orangkaya* memiliki wilayah wewenang *(continent de terre)*, dengan penduduk yang berada di bawah wewenang dan hukum mereka".[26] Jika tujuan dari peranan wilayah bagi mereka

adalah untuk memastikan tersedianya pasukan untuk peperangan-peperangan Iskandar Muda yang tidak henti-henti itu, seperti dikatakan paragraf di atas, maka dapat kita lihat *orangkaya* semacam itu benih-benih *uleebalang* (Melayu hulubalang) yang akan muncul pada waktunya untuk membentuk aritokrasi wilayah Aceh. "Ia sudah melenyapkan hampir semua kaum bangsawan lama, dan telah menciptakan kaum bangsawan baru."[27] Namun, dalam masa hidup Iskandar Muda, *orangkaya* semacam itu berada di bawah kendali yang sangat ketat. Menurut Beaulieu setiap *orangkaya* dibebani kewajiban tugas jaga, tanpa senjata, di istana sekali setiap malam ketiga, sehingga bila kapan saja ada komplotan anti-raja setidak-tidaknya sepertiga dari kaum bangsawan berada dalam tangan raja.[28]

Dokumen dan tulisan yang kita miliki mengenai Aceh di bawah Iskandar Muda meyakinkan kita bahwa di sini kita melihat sebuah puncak yang sebenarnya dari kekuasaan raja dan pemusatan kekuasaan di dunia Melayu pra-kolonial. Ada sejumlah faktor—ekspansi dagang pasar-modal; dikuasainya artileri; penguasa yang cakap—yang turut berperan melahirkan apa yang dapat dinamakan negara modern di atas puing-puing feodalisme di Inggris di bawah Tudor, di Prancis di bawah Capet atau, barangkali lebih relevan, di Venesia di bawah Hakim Agungnya. Di puncak absolutisme di Aceh ini, apakah terlihat munculnya administrasi birokrasi tulen, sistem hukum yang maju, lembaga-lembaga keuangan dan ciri-ciri yang lain dari sebuah negara wilayah yang impersonal, tidak bergantung pada pribadi?

Bahwa Iskandar Muda membukukan hukum dan membangun sebuah sistem peradilan yang kompleks tidak diragukan lagi. Kalaupun semua versi *Adat Aceh* yang masih ada lebih banyak berbicara menyangkut masa-masa yang lebih dekat dengan masa sekarang, nama Iskandar Muda selalu melekat pada versi-versi itu sebagai bapak legendaris daulat hukum. Teks Drewes dan Voorhoeve secara eksplisit mengatakan hukum yang dibukukan itu berasal dari instruksi yang diberikan Iskandar Muda kepada *orangkaya* Sri Maharaja Lela dan sejumlah pencatat sejarah istana pada tahun ia naik tahta.[29] Sejumlah sumber asing menjelaskan mengenai tata kerja badan peradilan, Beaulieu seperti biasa memberikan gambaran yang paling rinci. Ia menjelaskan mengenai empat lembaga peradilan, masing-masing dengan wewenang sendiri-sendiri: satu lembaga untuk menyelesaikan utang piutang dan menghukum pihak yang tidak membayar utang, yang bersidang setiap pagi enam hari sepekan dekat Masjid Agung; pengadilan pidana diketuai oleh *orangkaya* secara bergilir, yang menghukum pencuri dengan potong bagian badan, atau dalam hal kejahatan

ringan dengan hukum cambuk; pengadilan agama di bawah *kadi;* dan pengadilan di *Alfandegue,* di bawah Orangkaya Laksamana, untuk membuat dan menegakkan hukum dagang, terutama menyangkut kepentingan dagang istana.[30]

Tata pemerintah Iskandar Muda yang seperti itu tentu saja membutuhkan pejabat dalam jumlah relatif besar, tetapi kemajuan menuju sebuah birokrasi profesional sangat kecil. Pejabat-pejabat paling berkuasa adalah Orangkaya Laksamana (barangkali ahli kelautan yang digunakan namanya dalam *Hikayat Malem Dagang*); *orangkaya* Maharaja Sri Maharaja, juga dinamakan Perdana Menteri dalam *Bustanu's-Salatin;* dan Sheikh Shamsud-din, sekarang sudah sangat tua, dan berbagi wewenang keagamaan dengan Kadhi Maliku'l Adil.[31] Empat *syahbandar* (pejabat pelabuhan) dan sejumlah *kerkun* (kerani) ditugaskan mengurus administrasi perdagangan, sedangkan *kerkun* yang lain bertugas di pengadilan. Empat *Penghulu Kawal* bertugas melakukan patroli di kota, terutama pada malam hari.[32] Para pejabat ini kemungkinan tidak mendapat gaji. Sebaliknya, pejabat-pejabat perdagangan harus menyediakan hadiah tahunan yang bernilai tinggi untuk raja. Mereka mengumpulkan harta sebagian besar dari hadiah yang mereka minta dari para pedagang.[33] Permintaan yang sewenang-wenang kepada para pedagang itu, dan bergantungnya pada pejabat sepenuhnya pada kebaikan hati raja, tampaknya menunjukkan tidak adanya perkembangan menuju profesionalisme dalam birokrasi.

Namun, kelemahan lebih kritis lagi dari absolutisme Iskandar Muda dibandingkan dengan absolutisme yang mengantarkan kerajaan-kerajaan Eropa keluar dari feodalisme, ialah tidak sesuainya absolutisme dengan perusahaan swasta. Jika pedagang asing sering berkeluh kesah mengenai tuntutan-tuntutan Sultan kepada mereka, posisi pedagangan setempat Aceh jauh lebih buruk lagi. Tujuan Iskandar Muda tampaknya menarik sebanyak mungkin perdagangan setempat ke dalam tangannya agar ia memiliki posisi monopoli atas orang asing. Pada sekitar 1616 ia mulai berhasil membawa sebagian besar lada Pantai Barat ke ibukota dengan kapal-kapalnya sendiri, dan menyisihkan pedagang-pedagang setempat yang menjalankan fungsi ini sebelumnya.[34] Kepentingannya yang besar dalam perdagangan sebagai landasan bagi seluruh pemerintahannya membuat dia lebih tidak toleran lagi terhadap perusahaan dagang dalam negeri, bahkan jika dibandingkan dengan raja-raja setara dia di kerajaan-kerajaan yang dinamakan Wittfogel kerajaan hidraulik, seperti Ayutthaya.

Tradisi Aceh, seperti tercermin dalam semua catatan sejarah Melayu dan Aceh, menempatkan Iskandar Muda di puncak kejayaan. Namun, orang asing

yang bergerak dalam kalangan pedagang dan pejabat ibukota itu, tidak meragukan lagi betapa besar ketakutan kepadanya yang tertanam dalam hati pedagang dan pejabat ini. Beaulieu menekankan seringnya Iskandar Muda membunuh orang kaya untuk menyita harta bendanya: "Ia mendapat keuntungan yang sangat besar dengan menyita harta benda orang-orang yang dihukum matinya setiap hari . . . ada dua sebab yang menyebabkan banyak Orangkaya kehilangan nyawa; yaitu, reputasi baik mereka di kalangan penduduk, dan harta benda mereka";[35] "Ia telah mengakibatkan turunnya jumlah penduduk di seluruh wilayah Aceh, dan melucuti uang semua, bahkan semua orang asing yang pernah tinggal di situ."[36] Thomas Bowrey, yang berkunjung ke Aceh beberapa dekade setelah Iskandar Muda wafat, mencatat ketakutan luar biasa yang masih dirasakan petinggi-petinggi istana terhadap Iskandar Muda, "dan, menurut kisah-kisah yang mereka sampaikan kepada dia, Iskandar adalah Raja yang paling kejam yang pernah ada selama ini".[37] Agar tidak berat sebelah, kita juga harus mengutip pembelaan Iskandar yang klasik mengenai absolutismenya dalam sebuah pidato berapi-api kepada Beaulieu:

> Katanya *Orangkaya* itu kejam dan keji, dan mereka tidak menyadari kekejaman mereka sendirilah yang menyebabkan Tuhan marah, yang menggunakan dia untuk menghukum mereka; mereka tidak punya alasan untuk mengeluh mengenai dia, karena dia sudah mengizinkan mereka hidup dengan isteri, anak, dan budak mereka dan memiliki harta benda yang cukup makan dan bertahan hidup, menjaga agama mereka, dan mencegah raja-raja sekitar menawan mereka dan menjadikan mereka budak, atau mencegah orang asing merampok mereka; dia tahu Aceh sebelumnya adalah surga bagi pembunuh dan perampok, tempat si kuat menginjak si lemah, dan pembesar menindas rakyat; tempat setiap orang harus membela diri dari perampok bersenjata di tengah hari, dan memasang palang pintu rumah di malam hari; mereka benci kepadanya karena ia mencegah mereka berbuat kejam, memeras, membunuh, dan mencuri; mereka ingin mengangkat raja sekehendak hati mereka, dan membunuhnya jika telah bosan dengan dia.[38]

Tahap 3: Pudarnya Kerajaan; Naiknya Tiga Sagi

Akhir dari kekuasaan mutlak raja merupakan sebuah proses berangsur-angsur. Paling tidak ke luar, kekuasaan Aceh sudah mulai pudar perlahan-lahan dari puncaknya setelah kekalahan besar pertama pasukan Iskandar Muda—bencana di depan Malaka pada 1629 (lihat gambar 6 di hlm. . . .). Lebih rendahnya

kemampuan dan wewenang raja-raja yang menggantikan Iskandar Muda, dan meningkatnya kekuatan dagang Belanda dengan cepat meningkat setelah Malaka mereka taklukkan (1641), mempercepat proses ini. Ke dalam, tidak tampak ada perubahan dalam tata pemerintahan setelah raja besar itu wafat pada 1636. Namun, gaya pemerintahan dengan cepat berubah. Sumber-sumber asing dan catatan-catatan sejarah menekankan gaya pemerintahan Iskandar Thani (1636-41) dan Ratu pertama, Taj al-Alam (164175) yang lebih lunak, dan kemakmuran ibukota di bawah mereka.[39] Selain itu, di bawah pemerintahan Taj al-Alam yang lama, perubahan-perubahan mendasar terjadi dalam perimbangan kekuasaan yang akhirnya melahirkan struktur kerajaan yang sangat berbeda.

Keputusan untuk menempatkan seorang perempuan di tahta kerajaan bukanlah dengan sendirinya berarti sebuah serangan atas absolutisme, meski mempertahankan ini kemudian memang berarti serangan atas absolutisme.[40] Iskandar Muda sudah membunuh semua ahli waris laki-lakinya sebelum ia sendiri meninggal, dan hanya menyisakan menantunya, seorang pangeran dari Pahang, sebagai penerusnya yang sudah disiapkan sebelumnya. Ketika raja ini meninggal sebelum waktunya kembali tidak ada putra mahkota. *Orangkaya* tampaknya menimbulkan kekacauan di ibukota selama beberapa hari, "karena setiap *orangkaya* ingin menjadi raja". Akhirnya mereka sepakat untuk menobatkan isteri Iskandar Thani (putri Iskandar Muda) sebagai ratu.[41] Menteri-menteri besar kerajaan dengan cepat menancapkan kekuasaan dan keamanan yang lebih besar berkuasa daripada di masa lampau, tetapi kata putus tetap berada dalam tangan ratu. *Bustanu's-Salatin* yang ditulis semasa pemerintahan ratu itu menggambarkan ratu itu sebagai penyayang dan penuh perhatian kepada rakyatnya, "seperti ibu menyayangi anak-anaknya".[42] Namun, dalam praktik, sedikit sekali laki-laki yang boleh menghadapnya, terutama bila diperkirakan laki-laki bersangkutan mungkin mencoba untuk menjadi pasangannya. Ada ciri-ciri pemerintahan Elizabeth di sini, dalam hal tingginya puja puji rakyat kepadanya, persaingan sengit antara menteri-menteri kepala yang tampaknya sedikit pun tidak mempengaruhinya,[43] dan kesadaran bahwa perimbangan yang memuaskan dalam kerajaan akan sangat terancam bila Ratu menikah. Meski kekuasaan politik dan perdagangan Aceh di Sumatra Barat dan Perak dengan cepat dikikis oleh Belanda, ibukotanya digambarkan lebih baik oleh pengunjung-pengunjung asing daripada sebelumnya. Bowrey (1675) bercerita tentang kemasyhurannya "sebagai tempat tinggal Ratu mereka yang masih perawan . . . dan juga hukum dan pemerintahannya yang baik, dan lalulintas dan perdagangan yang ramai dari sebagian besar wilayah India, Cina,

dan Laut Selatan".[44] Kesan yang timbul dari laporan-laporan ini menyangkut sebuah keadaan yang memuaskan bagi para pedagang di kota itu, yang terus melanjutkan sistem hukum dan administrasi yang dikembangkan di bawah absolutisme, tanpa ada rasa cemburu di pihak raja yang pernah membuat kehidupan orang-orang berkuasa dan kaya demikian terancam.

Karena itu, tidak mengherankan jika *orangkaya* memutuskan untuk meneruskan sistem itu dengan mendudukkan kembali di atas tahta tiga ratu berturut-turut setelah Taj al-Alam wafat pada 1675. Namun, ketiga ratu baru ini tidak memiliki status seperti status yang pernah dinikmati putri dari seorang raja paling berkuasa dan janda dari raja yang lain. Dengan setiap ratu baru, kekuasaan yang dijalankan oleh *orangkaya* terkemuka menjadi semakin nyata.

Di bawah pemerintahan singkat, dan tidak terlalu mengesankan, ratu kedua, Nur al-Alam (1675-8), terjadi menurut catatan-catatan sejarah istana pembentukan tiga *sagi* (harfiah: "sudut") Aceh Besar, unsur paling penting dalam tata politik Aceh pada abad ke-18 dan abad ke-19.[45] Sebagian besar penulis Belanda mengikuti Snouck Hurgronje[46], dalam arti tidak menerima pernyataan dalam catatan-catatan itu, atas dasar anggapan bahwa *sagi* dan sistem *ulèëbalang* pasti lebih tua daripada kesultanan itu sendiri. Namun demikian, semua bukti yang ada mendukung pernyataan dalan catatan-catatan itu, seperti akan kami tunjukkan di bawah, dan dengan bukti-bukti yang lain dalam Bab 5. Sementara pejabat-pedagang membangun sebuah tata pemerintahan yang sesuai di ibukota, sebuah kekuatan baru yang besar sedang muncul di pedalaman pertanian.

Ada tiga tingkat susunan supra-desa pada abad ke-18 dan abad ke-19 di Aceh Besar: *mukim*; kelompok *mukim* di bawah seorang *ulèëbalang;* dan *sagi.* Catatan-catatan sejarah mengatakan pada awalnya pembagian ke dalam *mukim* terjadi di bawah pemerintahan Iskandar Muda, yang juga seorang pendiri masjid yang besar. Tujuh masjid Aceh dibangun pada masa pemerintahannya, dan *mukim-mukim* pertama mungkin dikelompokkan di sekitar masjid ini. *Imam mukim* harus, seperti ditunjukkan namanya, mulai sebagai pejabat agama, tetapi dengan cepat menjadi sekuler, penguasa turun temurun *mukim,* berbeda dari *imam sembahyang.*[47] *Ulèëbalang* yang berkuasa atas sejumlah *mukim* mungkin, seperti dikatakan di atas, berasal dari masa pemerintahan Iskandar Muda ketika ia membentuk sistem pengerahan penduduk untuk berperang. Catatan-catatan sejarah tidak berbicara apa-apa mengenai hal ini. Demikian pula sumber-sumber asing, kecuali Beaulieu, dalam catatannya satu-satunya, yang menyebut mengenai sebuah sistem pemerintahan wilayah di

daerah pedalaman Aceh Besar. Kerajaan adalah ibukota dan wilayah-wilayah pantai yang dikuasainya.

Tradisi lisan dan asal-usul keluarga Polem, *panglima* dari *sagi* kuat dataran tinggi 22 *mukim,* mendukung pernyataan dalam catatan-catatan bahwa sistem *sagi* lahir di bawah pemerintahan raja perempuan. Nenek moyang keluarga itu ialah Teuku Itam, putra *Sultan Iskandar Muda di luar nikah, yang menggunakan gelar Pólèm (harfiah: "kakak laki-laki") karena ia lebih tua daripada adik perempuannya sebapak, Ratu Taj al-Alam. Ia menjadi* Imam *Gle Yeueng, pada waktu itu salah satu dari* mukim-mukim *terjauh di hulu sungai dari ibukota. Putranya menggantikannya sebagai* Imam*, dan menjadi terkenal sebagai seorang pendekar perang. Tidak lama kemudian ia dipilih oleh mukim-mukim sebagai panglima perang mereka, dan lahirlah* sagi *22* mukim*. Dua kelompok* mukim *yang lainnya,* sagi *26 dan 25* mukim*, di tepi timur dan di tepi barat di hilir sungai Aceh, dibentuk sebagai reaksi terhadap kekuasaan* sagi *dataran tinggi.*[48]

Thomas Bowrey berada di Aceh pada 1675, untuk menyaksikan penobatan "ratu muda", Nur al-Alam, yang di bawah pemerintahannya menurut catatan-catatan istana *sagi* dibentuk. Menurut dia, pemerintahan oleh ratu dapat diterima di ibukota, tetapi

> Penduduk di pedalaman tidak lebih dari 25 atau 37 kilometer dari Aceh sebagian besar tidak suka pada Pemerintah semacam ini, dan tidak segan-segan mengatakan bahwa mereka menginginkan seorang Raja sebagai penguasa dan pelindung mereka, dan bahwa ahli waris sejati Mahkota masih hidup dan memiliki Beberapa Putra, dan mereka akan patuh padanya. Ia salah satu yang hidup tinggal di antara mereka, seorang penganjur gigih Pemberontakan, dan sering sangat berburuk sangka kepada Ibukota dan Kerajaan.[49]

Gambaran ini cocok sekali sebagai gambaran keluarga Polem, yang ibukotanya, Gle Yeueng, sekitar 25 kilometer dari ibukota.

Sebab-sebab dari munculnya kekuatan politik baru ini di pedalaman Aceh Besar sebagian adalah faktor ekonomi. Kekuatan relatif pelabuhan-ibukota menurun, dan demikian pula perdagangannya, dan terutama pendapatan istana dari perdagangan. Pada waktu bersamaan tampaknya ada kenaikan besar dalam produksi beras di Aceh Besar. Para pengamat asing sepanjang abad ke-17 menekankan tergantungnya Aceh Besar sepenuhnya pada impor beras dari

Pidiё, atau bahkan dari Malaya dan India Selatan, meski ada lahan yang cocok untuk bertanam padi yang menganggur.[50] Dampier, pada 1688, mendapat kesan yang sama, tetapi menambahkan:

> akhir-akhir ini mereka sudah menanam padi di sawah yang luas, padi hidup subur di sini; tetapi mereka sangat pongah, mereka memandang bekerja itu hina: mereka sendiri tidak pernah memikirkan mengenai hal menanam padi itu, tetapi membiarkan semuanya diurus oleh budak-budak mereka : budak-budak ini adalah budak-budak yang dibawa baru-baru ini oleh orang Inggris dan orang Denmark dari Pantai Coromandel, ketika di sana ada bahaya kelaparan, yang sudah saya bahas sebelumnya, untuk memenuhi permintaan orang Aceh. Namun padi yang mereka hasilkan dengan cara kerja seperti ini hanya mampu memenuhi seperempat dari kebutuhan mereka akan beras, untuk selebihnya mereka harus mendatangkannya dari kerajaan-kerajaan tetangga mereka.[51]

Sulit untuk mempercayai pergerakan besar-besaran budak-budak dari India ke lahan pertanian di Aceh Besar ini, andaikan saja tidak ada keterangan yang lebih eksplisit dari Charles Lockyer,[52] dan tanpa sengaja dipertegas dua abad kemudian oleh Snouck Hurgronje:

> Masih banyak orang yang ingat bahwa ada banyak orang Kling di daerah dataran tinggi Aceh Besar (XXII Mukim) yang hidup sebagai orang Aceh dan bekerja di bidang pertanian.[53]

Apapun peranan India, penduduk 22 *mukim* bertambah dengan cepat, mukim itu menjadi mukim berpenduduk terpadat dari ketiga *sagi* pada abad ke-19. Beras tidak termasuk salah satu impor penting bagi Aceh Besar pada abad ke-18. Kekuatan relatif Aceh Besar perkotaan dan pedesaan dengan cepat menjadi terbalik dengan cepat menjelang akhir abad ke-17.

Ancaman politik dari 22 *mukim,* yang telah terlihat gejalanya oleh Bowrey pada 1675, semakin besar pada 1688 ketika ratu keempat, Kamalat Syah, dinobatkan. Kedua belas "pengawal" tahta Aceh, yang terdiri dari empat *ulèëbalang* dari setiap *sagi,* tampaknya sudah menancapkan kuku kekuasaan mereka. Dampier menggambarkan pemerintahan Ratu, "di bawahnya ada dua belas *Orangkaya*, atau bangsawan besar. Mereka menguasai beberapa daerah dengan kekuasaan dan wewenang yang besar". Pada pemilihan ratu baru, "Empat

dari *Orangkaya* itu yang tinggal lebih jauh dari istana [kemungkinan *Orangkaya* 22 Mukims] mengangkat senjata menentang Ratu baru itu dan *Orangkaya* selebihnya, dan membawa 5000 atau 6000 prajurit orang melawan Ibukota."[54] Para pemuka 22 *mukim* tetap menuntut dikembalikannya pemerintahan ke dalam tangan laki-laki.

Meski mereka kalah tipis dalam kesempatan ini, mereka kemudian menang pada 1699, karena dibantu oleh sepucuk surat dari Mekkah yang melarang perempuan memegang kekuasaan kerajaan karena ini bertentangan dengan ajaran Islam.

Pada abad ke-18 dan awal abad ke-19 terdapat 22 *mukim* di bawah Panglima Polem berulang kali menimbulkan perang saudara di kerajaan itu karena mereka menentang sultan demi sultan. Kekuatan mereka secara formal diperhitungkan dalam rumusan "dua belas *ulèëbalang* yang mengangkat dan menurunkan pangeran". Dalam kenyataan kedua belas *uleebalang* ini jauh dari sama setara dari sisi kedudukan. *Sagi* 22 *mukim* dan pemimpinnya Panglima Polem mewakili satu kutub kekuatan Aceh, sebuah tantangan yang terus menerus terhadap sultan-sultan pelabuhan itu, yang sering berutang budi kepada pedagang dan pasukan asing untuk mempertahankan hidup mereka.[55]

* * *

Penyebaran kekuasaan pada abad ke-18 dan abad ke-19 di antara *sagi, uleebalang* dan raja-raja pesisir merupakan persoalan khusus Aceh. Keadaan turun naik Kerajaan itu pada masa jayanya, mencerminkan dilema yang jauh lebih besar. Aceh merupakan model yang berguna tidak saja karena peran sejarahnya, tetapi juga karena karakter sintetiknya: sebuah negara baru yang awalnya lebih berpijak pada kekuatan-kekuatan ekonomi, politik dan agama daripada pada tradisi wahyu ilahi atau solidaritas kesukuan. Pada abad pertama dari dua abad kehadirannya sebagai kerajaan Aceh mengalami beberapa perubahan besar, yang dapat dilihat dari berbagai sudut. Jika kategori-kategori yang saya buat dapat dipertahankan, Aceh berkembang pertama sebagai pusat bagi pedagang besar dari negeri asing, mengalami masa pemerintahan di bawah raja dengan kekuasaan mutlak yang memusatkan kehidupan perdagangan, dan juga politik, di istana raja, dan kemudian muncul sebuah reaksi menentang absolutisme ini yang dilancarkan oleh pedagang-pejabat yang mencoba mencari stabilitas tanpa tirani dalam sistem pemerintahan oleh raja perempuan. Meski kemakmuran

berlanjut, kerajaan di bawah pemerintahan raja perempuan tidak cukup kuat untuk mencegah hilangnya wilayah-wilayah sekitarnya dari bawah kekuasaannya atau munculnya tantangan baru dan memecah dari pedalaman Aceh Besar. Gerakan yang menjanjikan menuju tata pemerintahan yang melembaga gagal.

Apakah sebab-sebab yang lebih mendasar dari kemunduran ini karena tidak adanya kesepakatan mengenai hakekat kerajaan; khususnya karena kelemahan administrasi atau keuangan; karena kota dagang tidak mampu mengembangkan kehidupan yang terpisah dari kehidupan kerajaan; atau karena ancaman ekonomi barat berupa monopoli, dengan penangkal satu-satunya, yakni monopoli kerajaan? Pertanyaan-pertanyaan ini tetap menuntut perhatian dari sejarawan tentang Aceh dan ahli wilayah itu pada umumnya.

6

Gajah dan Air dalam Perhelatan Kerajaan di Aceh Abad Ke-17[1]

Bila kita baca uraian panjang lebar dalam *Adat Aceh,* atau kisah-kisah dari para pedagang dan duta besar yang berkunjung ke Kesultanan Aceh ketika Aceh sedang jaya-jayanya, hampir tidak dapat dipercaya betapa banyak waktu dan tenaga kerajaan yang digunakan untuk menyelenggarakan arakan-arakan, pertunjukan, dan hiburan kerajaan. Namun, bukan Aceh saja yang selalu sibuk dengan perayaan-perayaan megah ini. Semua kesultanan besar yang lain di Asia Tenggara pada abad ke-17–Siam, Burma, Kamboja, Banten, Patani, dan Mataram–berlomba-lomba menampilkan kemegahan dalam arakan-arakan dan acara-acara hiburan masing-masing. Sama halnya, raja-raja pada zaman itu, seperti raja Louis XIII di Prancis, raja James I di Inggris, raja Shah Abbas di Persia atau raja Akbar, dan raja Jahangir di India, juga selalu menggunakan setiap kesempatan untuk menunjukkan bahwa raja adalah pusat sebuah drama besar dan dalam drama itu ia tidak saja mewakili kekuasaan tetapi juga mewakili harta benda, semangat, kepatuhan, kemurahan hati, dan pencerahan.

Dalam tulisannya mengenai Bali sebagai "negara panggung", Clifford Geertz[2] mengatakan, "pertunjukan-pertunjukan" ini bukan sekadar pelampiasan keinginan hati kerajaan tanpa mengenal batas–pertunjukan-pertunjukan itu adalah kerajaan itu sendiri. Melalui upacara-upacara megah yang terpusat pada diri raja, kerajaan pra-moderen Asia Tenggara hendak menunjukkan kepada rakyat dan tetangganya bahwa rajanya benar-benar raja sejati, dengan kekuasaan yang berlandaskan pada tatanan alam semesta aturan ilahi.

Peristiwa-peristiwa penting dalam kehidupan istana dan kerajaan selalu diiringi oleh arak-arakan, musik, tari-tarian, dan hiburan. Peristiwa-peristiwa semacam itu yang terbesar adalah upacara agama yang penting-penting dan *rites de passage* anggota keluarga kerajaan–sunat, perkawinan, dan pemakaman. Bahkan penerimaan utusan dari negeri asing merupakan kesempatan untuk

mengadakan arak-arakan dan kenduri besar-besaran. Tamu-tamu asing ke istana kerajaan Asia Tenggara terus dikejutkan oleh demikian sering dan megahnya upacara-upacara yang diadakan. Kerajaan Siam, kata salah seorang tamu, "suka sekali mengadakan pertunjukan dan upacara besar".[3] Di ibukota Burma utusan-utusan dari negeri asing dibuat lelah oleh pertunjukan kesenian yang berlangsung berhari-hari siang dan malam hampir tidak putus-putusnya".[4] Di Banten "pertunjukan tari-tarian berlangsung hingga larut malam, setiap malam udara digetarkan oleh suara gong bertalu-talu dan tabuhan bunyi-bunyian lainnya".[5] Di Patani, istana Ratu menghibur utusan dan tamu dari negeri asing dengan tari-tarian dan pertunjukan pentas, "sangat menyenangkan untuk dilihat, saya belum pernah melihat hal semacam itu di tempat lain".[6]

Banda Aceh, paling tidak dalam paruh pertama abad ke-17, merupakan salah satu kota pantai terkaya di Asia. Duta besar dan pedagang datang ke Aceh dari Siam, Banten, Pegu (Burma), Moghul (India), Golconda (India Selatan), Persia, Inggris, Belanda, dan Prancis. Utusan-utusan dari empat negara disebut terakhir meninggalkan catatan-catatan rinci mengenai penerimaan mereka dan upacara istana. Catatan-catatan Belanda tahun 1630-an dan tahun 1640-an sangat rinci. Karena itu, lebih daripada kerajaan Islam yang lain manapun di Asia Tenggara pada periode ini, terbuka kemungkinan untuk membandingkan upacara-upacara di Aceh yang ditentukan dalam catatan-catatan istana (terutama dalam kitab *Adat Aceh*) dengan hasil-hasil pengamatan orang luar mengenai apa yang terjadi. Hasil perbandingan ini sebagian besar membenarkan adanya upacara agama dan perhelatan megah dalam paruh pertama abad ke-17, ketika Aceh berada di puncak kejayaan dalam perdagangan dan politik.

Di Siam dan Burma arak-arakan paling besar adalah arakan-arakan di sungai, yang melibatkan beratus-ratus perahu megah berhias yang membawa para pembesar setempat dan utusan-utusan dari negeri asing ke istana.[7] Di pihak lain, di Malaya dan Sumatra, iring-iringan gajahlah—gajah adalah lambang martabat dan kehormatan di seluruh Asia Tenggara—yang digunakan istana untuk arak-arakan kerajaan dan membawa tamu-tamu penting ke istana. Di kesultanan Malaka, menurut *Sejarah Melayu,* tata tertib penerimaan tamu istana mewajibkan tamu-tamu berpangkat tinggi dibawa ke istana dengan gajah.[8] Hal seperti ini ditemukan pula di Patani pada awal abad ke-17.[9] Bahkan di Jawa, yang mendatangkan gajah dengan biaya yang sangat besar, raja Tuban memiliki gajah sekitar 1.600 ekor, yang digunakan untuk arak-arakan kerajaan dan menerima utusan-utusan asing.[10]

Di hutan-hutan Aceh pada abad ke-17 banyak terdapat gajah, dan tulisan-tulisan yang ada menunjukkan wilayah perburuan gajah banyak terdapat di wilayah yang sangat dekat dengan pusat-pusat pesisir di kerajaan itu. Misalnya, kitab *Bustanu's-Salatin*[11] mengisahkan tentang Sultan Iskandar Muda yang berhenti di beberapa tempat dalam perjalanannya di sepanjang pantai dari Pidie ke Pasai pada 1638 untuk berburu gajah. Gajah dianggap bagian yang penting dari pasukan Aceh, dan juga lambang kedudukan tinggi. Karena itu, baik Iskandar Muda maupun penggantinya Iskandar Thani (1637-41) memonopoli semua gajah tangkapan di kerajaan itu. Iskandar Muda konon kabarnya memiliki 900 ekor gajah, dan menantunya Iskandar Thani memiliki 1.000 ekor.[12]

Paling tidak pada 1630-an dan 1640-an, gajah sama-sama merupakan lambang keagungan bagi raja-raja Aceh dan raja-raja Siam. Sultan Iskandar Muda dari surat-suratnya tampaknya menganggap harta bendanya berupa perhiasan emas yang tak terpermanai banyaknya sebagai lambang utama *daulat*-nya, dan menyebutkan gajah-gajahnya umumnya dalam kaitan dengan perhiasan emas yang dikenakan gajah-gajah itu.[13] Di pihak lain, Iskandar Thani (1637-41) memberikan tempat utama kepada gajah-gajahnya, sama halnya dengan raja-raja Thailand. Suratnya yang sangat resmi kepada Gubernur Jenderal di Batavia pada 1640 menyatakan bahwa Raja adalah:

> Raja seluruh dunia, ia seperti seorang dewa di atasnya, bersinar seperti matahari di tengah hari, cahayanya seperti cahaya rembulan penuh, ia pilihan Tuhan . . . ia pemilik gajah putih dengan mata yang bersinar-sinar seperti bintang pagi, gajah bergading empat, gajah ungu berbintik-bintik, gajah *Smoak* dan *Binloka* dan *Queen*, untuk gajah-gajah itu Tuhan memberi saya demikian banyak selimut emas bermacam ragam, berlapis, dan bertabur bermacam-macam batu mulia, untuk dikenakan kepada gajah-gajah itu, dan beratus-ratus gajah untuk dikerahkan ke medan perang, dilengkapi dengan besi, perisai kebal peluru, pelindung gading dari baja dan kaki dari perungu, dan juga beratus-ratus kuda. . . .[14]

Hikayat Aceh, yang ditulis pada masa pemerintahan Iskandar Muda (1604-37), yakin keberanian gajah-gajah Aceh bersumber pada iklim Aceh yang sehat anugerah Tuhan.[15] Aceh tidak perlu pertahanan fisik karena:

> semua gajah sangat kuat dan sangat berani dan jumlahnya tidak terhitung. Dan kota itu tidak dibentengi, berbeda dengan kota-kota lain yang biasanya dibentengi, karena banyaknya gajah tempur di situ.[16]

Perkawinan dan Pemakaman Kerajaan

Di antara upacara-upacara paling penting di kerajaan itu pada masa itu ialah upacara-upacara transisi penting untuk anggota keluarga kerajaan, seperti perkawinan, sunat, dan penobatan. Semua ini merupakan kesempatan untuk mengumumkan dengan semegah mungkin siapa yang bakal menjadi raja di masa datang. Perhelatan pada 1765 ketika Raja Ismail dari Johor menikah dengan seorang putri dari Trengganu "berlangsung selama tiga bulan, menyuguhkan hiburan-hiburan seperti *wayang* dan *mendora*".[17] *Adat Raja-raja Melayu* berisi uraian sangat rinci mengenai hadiah, arak-arakan, hiburan *(topeng, wayang, joget, tandak, mendora Siam)* dan permainan [*jogar* (seperti dam), catur, judi, adu ayam, dan sebagainya.] yang harus menyertai pernikahan istana. Banyak lagi contoh yang lain baik dalam catatan-catatan istana maupun dalam catatan-catatan orang asing mengenai perayaan-perayaan luar biasa megah di istana kerajaan-kerajaan Asia Tenggara.[18]

Catatan-catatan istana Aceh mengisahkan sejumlah pernikahan luar biasa megah, terutama pernikahan-pernikahan yang penting untuk legitimasi anggota keluarga kerajaan, atasan dari pencatat sejarah istana bersangkutan. Dalam *Hikayat Aceh*, pertunangan dan kemudian pernikahan orang tua Sultan Iskandar Muda yang paling banyak mendapat perhatian. Iring-iringan megah, hadiah-hadiah indah-indah, hiasan-hiasan semarak, dan hiburan aneka ragam pada pernikahan itu tampaknya membantu menutupi kelemahan-kelemahan pada keabsahan kenaikan Iskandar ke atas tahta kerajaan melalui ibunya.[19] Sama halnya, perhelatan yang diselenggarakan Sultan Iskandar Muda untuk putrinya dan pangeran muda dari Pahang yang kelak menjadi Sultan Iskandar Thani juga sangat penting bagi keabsahan kenaikan Sultan Iskandar Thani ke atas tahta kerajaan. Nuru'd-din ar-Raniri menghabiskan sembilan halaman dalam bukunya *Bustanu's-Salatin* untuk melukiskan upacara-upacara pernikahan ini. Pertama, ketika ia mencapai umur sembilan tahun, pangeran itu dikawinkan di istana yang dihiasi dengan sangat megahnya, di hadapan semua bangsawan dan petinggi kerajaan, dengan Kadhi Malikul Adil sebagai pemimpin acara.[20] Setahun kemudian, perhelatan lebih megah lagi diadakan, setelah 40 hari perhelatan di seluruh negeri. Ada nyanyi-nyanyian dan tari-tarian:

> Semua biduan yang memiliki suara indah mengalunkan suara sambil menabuh *dap* mereka yang bertaburkan intan permata dan terbuat dari emas, *suasa*, dan perak, dan *repana* mereka juga demikian. Berbagai macam biduan zikir semua mengenakan perhiasan emas bertabur mutu manikam, lapis lazuli dan *suasa.* Kemudian mereka membawakan tari-tarian sesuai dengan keahlian masing-masing. Beberapa menarikan *tari,* beberapa menarikan *tandak* [tari gaya Jawa] dan beberapa lagi menarikan *rakat* [tari topeng].[21]

Acara utama pada perhelatan ini ialah menembakkan semua meriam, diikuti kemudian oleh arak-arakan dari *dalam* (benteng) dua kali mengitari Masjid Baitu'r-Rahman, dengan pasangan pengantin dikelilingi oleh semua pembesar istana dan barisan gajah dan kuda berhias mewah:

> Semua orang, dari pejabat tertinggi hingga rakyat jelata, hadir. Semua gajah berhias itu dilengkapi dengan *howdah* [pelaminan] keemasan, dan sejumlah gajah lagi dilengkapi *howdah suasa* dan perak, atau besi berlapis emas dan *suasa.* Ada berbagai jenis kuda Arab dan kuda Irak, dan juga ada beberapa kuda Turki dan Byzantine [*rumi*], lengkap dengan hiasan-hiasan, dengan baju yang dirajut dengan emas, batu permata, dan lapis-lazuli, bertabur pertama berbagai jenis, dan diberi rumbai-rumbai mutiara.[22]

Pasangan muda itu, berpakaian demikian indah yang tidak ada duanya, kemudian berlutut di hadapan Sultan, Sultan kemudian memerciki sang pangeran dengan air suci yang dilihat Sultan dalam mimpinya dibawa dari surga oleh malaikat. Sementara itu terdengar suara riuh rendah yang belum pernah didengar telinga dari tabuhan dan tiupan berbagai gong, gendang, dan seruling.[23]

Karena Raniri sangat ingin menunjukkan keabsahan kedudukan Iskandar Thani, majikannya, di atas tahta kerajaan, ada kemungkinan ia sengaja melebih-lebihkan kemegahan perhelatan tersebut. Tetapi kita tahu dari orang luar bahwa perhelatan-perhelatan semacam itu memang sengaja dirayakan secara besar-besaran untuk memperagakan lambang-lambang gaib hak dinasti bersangkutan untuk memerintah. Ketika Sultan Iskandar Thani wafat pada Februari 1641, Nicolaus de Graaff berada di sana dan mencatat jalannya upacara pemakaman (lihat Gambar 9):

> Iring-iringan pemakaman dilaksanakan dengan penuh keanggunan: terdiri dari barisan-barisan para Pangeran, Bangsawan, dan Pejabat tinggi, dan 260 ekor

> gajah, semua berselimutkan kain sutra yang sangat mahal, kain emas, dan kain bersulam. Gading gajah-gajah itu ada yang bertatahkan emas, ada yang bertatahkan perak; ada gajah yang dilengkapi rumah-rumahan kecil dan tenda mewah dipunggungnya, penuh dengan rumbai-rumbai dari perak dan emas. Juga ada beberapa badak bercula dan kuda Persia dengan kekang dari perak dan emas, dan berselimutkan kain-kain yang mahal. Jenazah dibawa dengan peti dari *tembaga suasa,* setengah emas setengah suasa, ke liang kubur yang digali oleh leluhur. . . . Jenazah Raja baru diturunkan ke liang kubur setelah dua meriam-kembar dari perak ditembakkan, dan setelah itu semua senjata api di Aceh ditembakkan sepanjang malam, diiringi dengan seruan-seruan terus menerus "Tuhan melindungi Ratu yang baru".[24]

Upacara khusus kerajaan semacam itu barangkali upacara paling besar di mana pun di Aceh, karena upacara kerajaan semacam itu diperlukan untuk menjunjung tinggi keagungan keramat raja. Namun, perayaan-perayaan megah yang lain juga sering diadakan; jarang ada hari-hari yang kosong dari upacara yang memberi kesempatan kepada rakyat banyak untuk menyaksikan pertunjukan megah yang diadakan kerajaan.

Perayaan besar tahun Islam adalah salah satu dari kesempatan-kesempatan terbesar untuk peragaan kekuasaan raja di bagian terbesar dunia Islam pada abad ke-17. Kita dapat bertanya, mengapa di Turki, seperti juga halnya di Asia Tenggara, upacara-upacara megah itu sudah jauh berkurang pada abad berikutnya.[25] Menurut Sejarah Melayu edisi Raffles (1612), Sultan-sultan Malaka pada abad ke-15 diiringi dengan khidmat oleh iring-iringan besar menuju masjid pada tiga hari besar Muslim — Idulfitri, Idul Adh, dan 27 Ramadan.[26] Untuk Aceh pada abad ke-17 kitab Adat Aceh menguraikan tentang tata cara empat perayaan hari besar Islam dirayakan dalam masyarakat pada abad ke-17, yakni: hari permulaan bulan puasa (hari memegang puasa); malam kemuliaan pada 27 Ramadan (malam lailatulkadar); akhir puasa (hari raya puasa atau Idul Fitri); dan perayaan hari kurban selama bulan naik haji pada 10 Dhulhijja (hari raya haji atau Idul Adh).[27]

Tiga upacara kerajaan lain juga diuraikan yang tidak terlalu banyak melibatkan Islam — hari menyatakan kesetiaan (hari raya junjung duli); upacara Sabtu kala pemimpin perang (hulubalang) datang menghadap raja ke istana; dan upacara mandi raja (mandi Safar). Menarik bahwa Maulud, hari lahir Nabi, tidak disebut-sebut sebagai hari besar yang penting dalam Adat Aceh atau dalam tulisan-tulisan lain dari periode ini, meski menurut tradisi abad

Gambar 9 Pemakaman Sultan Iskandar Thani pada 1641, seperti dilukiskan oleh seorang seniman kontemporer Belanda

Lijckstatie van de Koningh van Achin .

ke-19 menurut laporan Snouck Hurgronje[28], perayaan Maulud diadakan secara besar-besaran di semua desa di Aceh karena ada perintah mengenai hal itu dari seorang Sultan Turki dari abad ke-16 sebagai lambang kepatuhan dan kesetiaan rakyat Aceh kepada Kalifah Turki.

Idul Adh

Di pihak lain, sumber-sumber Eropa menegaskan, upacara-upacara sebelum dan setelah bulan puasa dirayakan secara besar-besaran. Idul Adh, "perayaan besar", yang diharuskan dalam Islam, tampaknya memang hari besar yang paling penting bagi Aceh, apakah ini kita lihat dari jumlah halaman yang terpakai untuk menguraikan hal ini dalam kitab Adat Aceh atau dari apa yang dikatakan tulisan-tulisan orang asing.[29] Bagi Adat Aceh dan tulisan-tulisan orang asing, bagian yang paling menarik perhatian dari perayaan itu adalah arak-arakan besar dari istana ke Masjid Bait ur-Rahman. Adat Aceh berisi daftar 30 kelompok yang ikut dalam arakan-arakan itu; Sultan sendiri sambil menunggang gajah kerajaan, Lela Manikam, termasuk ke dalam kelompok ke-24. Pedagang asing mengambil tempat masing-masing di kelompok ke 27, tetapi jumlah terbesar ikut dalam tiga barisan terakhir arakan-arakan akbar itu. Dalam kelompok ke-28, ada 30 gajah berhias dan 7.000 prajurit berbagai ragam, semua membawa senjata dan mengenakan pakaian yang indah; dalam kelompok ke-29 sama; dalam kelompok ke-30 ada 50 gajah, banyak diantaranya memiliki nama, dan ribuan prajurit. Di mesjid itu, Sultan dan para pembesar masuk ke dalam untuk melaksanakan ibadah yang diperintahkan, dan kemudian Sultan keluar ke halaman mesjid untuk melakukan sayatan pertama pada hewan kurban. Akhirnya seluruh iring-iringan kembali ke dalam diiringi berbagai macam musik.[30] Upacara itu sangat indah, tetapi peserta dan penonton yang demikian banyak tidak mudah diatur, karena:

> ibu-ibu sedang hamil yang jua keluar pada hari raya itu untuk menyaksikan Johan 'Alam, banyak yang melahirkan anak di jalan atau di pasar, dan ada kelompok-kelompok orang yang tidak menemukan tempat perayaan karena banyaknya orang yang berkeliaran ke sana ke sini.[31]

Mungkin ada angka-angka yang digelembungkan dalam kitab syair istana ini—karena sulit dibayangkan berapa banyak manusia dan gajah yang dapat tertampung di tanah yang hanya seluas sekitar 500 meter antara istana dan

Gambar 10 Bagian dari arak-arakan Idul Adha di Aceh, sketsa oleh Peter Mundy pada 1637
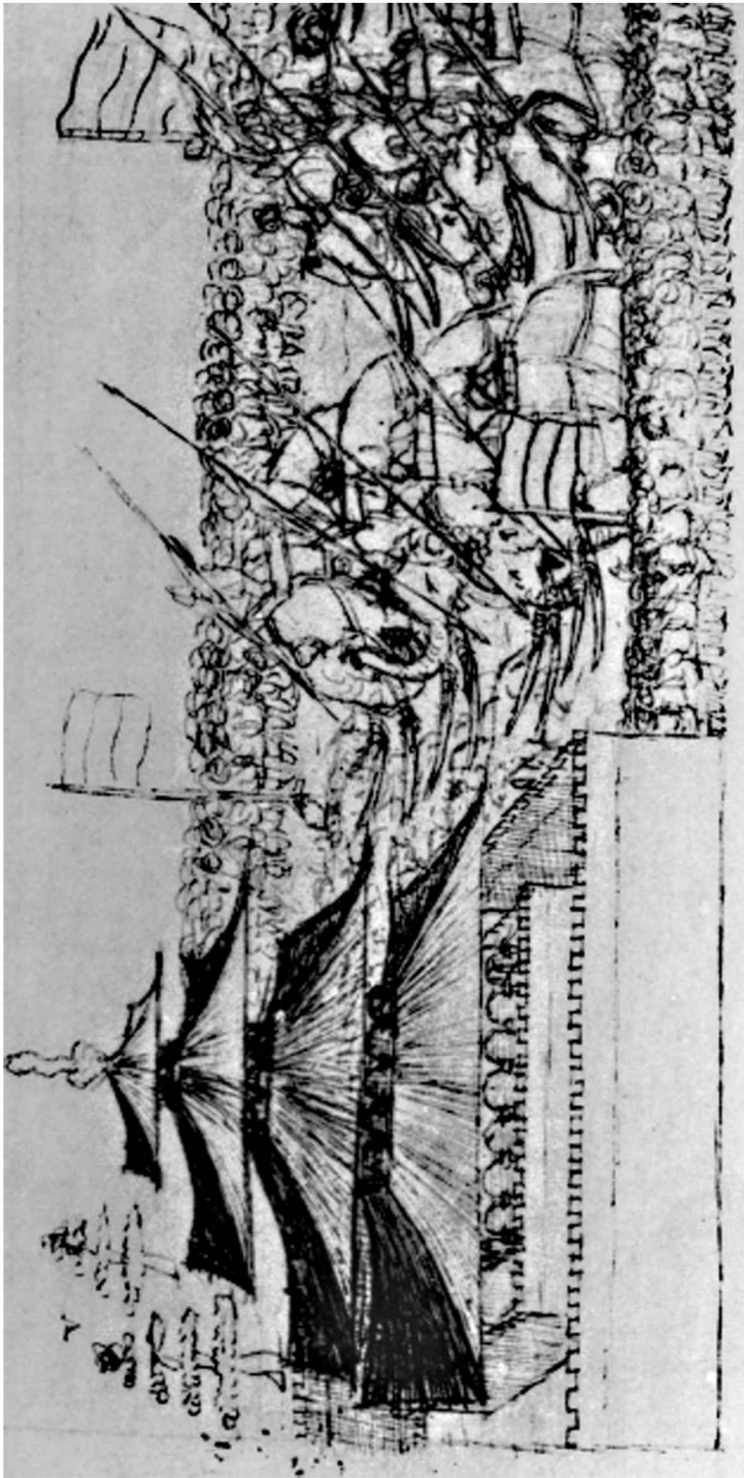
mesjid itu. Tetapi inti dari uraian mengenai upacara ini dipertegas oleh Peter Mundy, yang menyaksikan sendiri upacara Idul Adh yang pertama di bawah Sultan Iskandar Thani pada 1637 (lihat Gambar 10). Seperti kata Ito,[32] jumlah prajurit dalam upacara itu mungkin sudah berkurang akibat kekalahan besar yang diderita Aceh dan posisi Iskandar Thani yang lebih lemah dibandingkan dengan pendahulunya. Meskipun demikian, Mundy menyaksikan dengan mata kepala sendiri sebuah iring-iringan yang luar biasa dari istana ke mesjid:

> . . . Kemudian muncul iring-iringan gajah dengan sesuatu seperti sebuah menara kecil di punggung masing-masing, dan di dalam setiap menara itu seorang prajurit berseragam merah dan bersenjatakan sebuah tombak dalam tangannya berdiri tegap. . . Barisan pertama pasukan gajah (ada empat baris pasukan gajah), masing-masing gajah memiliki dua pedang besar, atau sebenarnya dua bilah besi pipih panjang yang diikatkan kepada kedua gadingnya. . . .

Kemudian setelah ini muncul iring-iringan gajah dengan menara kecil . . . di atasnya ditempatkan meriam kecil. . . . Setelah ini muncul gajah-gajah lain dengan menara kecil di punggung masing-masing dan dalam setiap menara ada 2 orang prajurit. . . . Kemudian muncul barisan gajah dengan bendera-bendera panjang. . . ; gajah-gajah yang lain berselimut dari kepala hingga ke kaki. . . .

> Setelah ini muncul iring-iringan senjata, dan kemudian iring-iringan prajurit pembawa tombak panjang. . . . Di antara semua itu juga ada banyak kuda dengan pelana yang indah-indah. . . . Kemudian muncul Raja menunggang gajah besar kerajaan yang penuh hiasan dan berselimut seluruhnya dari kepala hingga kaki seperti disebut di atas. . . .
>
> Iring-iringan itu sangat kacau dan bercampur baur, karena hampir tidak ada ruang atau waktu untuk mengatur barisan. Namun, iring-iringan ini sesuatu yang luar biasa dan menakjubkan untuk dilihat, viz., demikian banyaknya gajah besar-besar yang diberi hiasan-hiasan mewah dan dilengkapi bermacam alat, dari senjata dan perhiasan, alat rumah tangga yang mahal-mahal, dan sebagainya, dan disamping itu ada banyak lagi gajah yang juga diberi hiasan dan juga untuk upacara ini (yang tidak dapat masuk barisan karena sempitnya tempat) yang berdiri bergerombolan terpencar-pencar sementara iring-iringan gajah yang lain terus mengalir .[33]

Perayaan Bulan Puasa

Jika perayaan tahunan hari kurban merupakan perayaan tahunan yang paling bermakna, perayaan-perayaan sebelum dan sesudah bulan puasa juga diadakan secara besar-besaran. Awal dan akhir bulan puasa ditentukan dengan melihat bulan, seperti ditetapkan oleh hukum *Shafi'i,* tidak dengan hitungan.[34] Namun, bagian-bagian yang paling penting dari upacara-upacara pada awal bulan puasa dan *Idul Fitri* yang diuraikan di atas adalah iring-iringan ke istana dan ke masjid, hadiah-hadiah tanda setia yang dibawa ke hadapan Sultan pada kesempatan itu, dan bunyi-bunyian gegap gempita dan tembakan-tembakan senjata di sekitar istana untuk memulai dan mengakhiri puasa. Dalam semua ini, sekali lagi, mengagung-agungkan raja tampaknya merupakan inti dari semua pertunjukan besar, termasuk perayaan-perayaan untuk merayakan hari-hari besar Islam ortodoks.

Bagi orang asing di Aceh, unsur yang paling menonjol pada awal bulan puasa adalah suara hiruk pikuk. Pada 1600, Frederick de Houtman mencatat, semua kaum bangsawan, mengenakan pakaian masing-masing yang terindah, datang ke istana pada 29 *Sha'ban,* awal bulan puasa, dan begitu aba-aba diberikan "semua gendang ditabuh, dan trompet ditiup, dan akhirnya semua bedil ditembakkan, demikian pula dengan tujuh *arquebus* (kanon kaki tiga) di luar istana. Ini tanda dimulainya puasa.[35] Empat puluh tahun kemudian meriam-meriam yang telah dikumpulkan pada masa pemerintahan Iskandar Muda itu memainkan peranan yang lebih besar lagi, dan dentuman yang ditimbulkannya lebih memekakkan telinga:

> Sebuah meriam ditembakkan dari Inderapurwa, dan segera sesudah itu ditembakkan pula meriam-meriam dari istana dan semua benteng, meriam-meriam itu beroda dua; dan tembakan-tembakan ini kemudian dijawab oleh tembakan-tembakan [dari Inderapurwa], selain 300 atau 400 arquebuses.[36]

Di pihak lain, bagi *Adat Aceh,* upacara-upacara utama tampaknya adalah upacara serah upeti kepada raja oleh berbagai pejabat, arak-arakan agung membawa pakaian kebesaran raja ke istana, upacara persembahan di makam kerajaan, dan raja sebagai inti dalam semua upacara itu.[37]

Sama halnya, dalam uraiannya mengenai perayaan Idul Fitri, Adat Aceh memberikan perhatian utama kepada urut-urutan pejabat menurut pangkat dalam iring-iringan gajah kerajaan yang membawa mereka dari benteng ke mesjid dan kembali ke benteng, dan kepada berbagai jenis musik dan tabuhan gendang pada setiap tahap iring-iringan. Di dalam mesjid, Imam memimpin

sembahyang yang diwajibkan, dan Khatib memberikan ceramah.[38]

Tulisan-tulisan orang asing tentu saja sangat terkesan dengan semua upacara ini, yang tujuannya jelas, yakni agar semua orang dapat menyaksikan keagungan raja pada kesempatan yang berbahagia itu:

> seekor gajah besar berhias dibawa perlahan-lahan ke halaman istana. Raja muda [Ali Ri'ayat Syah, 1604-71, yang mengenakan semacam destar emas, menaiki gajah dan duduk di bawah sebuah atap yang megah; di depan dia duduk seorang prajurit berpakaian indah dan mengenakan mahkota mungil dari emas, dia mengendalikan gajah itu, dan seorang yang prajurit lain, juga berpakaian indah, duduk di belakangnya. . . Demikianlah pangeran muda itu pergi ke masjid, diiringi oleh banyak bangsawan, banyak sekali gajah dan sejumlah kecil kuda; selain itu, beberapa ribu orang, yang membawa senjata, panji-panji, panah dan bedil, juga berjalan beriring-iringan mengikuti arak-arakan itu. Suara hiruk pikuk luar biasa tersembur dari berbagai macam alat musik, seperti terompet, seruling, tambur, dan simbal.[39]

Sembahyang Jumat

Upacara-upacara untuk merayakan hari-hari besar tahunan ini pasti diadakan secara besar-besaran, dan bahkan sembahyang Jumat juga digunakan untuk menimbulkan rasa kagum rakyat dan tamu-tamunya kepada raja — paling tidak selama pemerintahan Iskandar Muda. Bahkan untuk kegiatan berkala setiap pekan inipun Adat Aceh menguraikan dengan panjang lebar cara-cara mengatur iring-iringan gajah, pembesar dan prajurit, dan ragam tabuhan apa yang harus dimainkan pada tambur dan genderang ketika iring-iringan berarak sepanjang jalan.[40]

Iring-iringan ke masjid tampaknya sudah menjadi kegiatan rutin dan para pedagang Inggris di bawah Thomas Best diberitahu untuk ikut hadir pada hari Jumat, 2 Juli 1613. Sulit dipercaya rasanya bahwa sekitar 5.000 prajuri dikerahkan setiap minggu sepanjang tahun untuk melakukan arak-arakan, tetapi dari uraian Croft mengenai dua acara Jumat berturut-turut (26 Juni dan 2 Juli) dapat disimpulkan bahwa pada masa itu arak-arakan semacam itu merupakan kegiatan rutin. Arak-arakan ini kemungkinan diadakan besar-besaran terutama karena kesempatan itu juga digunakan untuk mengucapkan selamat jalan kepada duta besar Siam.

> Kami bertemu dengan baginda raja dalam suasana paling agung dalam perjalan ke masjid dengan penuh khidmat. Ia diiringi, sebagai pengawalnya, oleh 200

> gajah besar, 2.000 bedil, 2.000 tombak panjang, 200 tombak, 100 pemanah; 20 pedang terhunus dari emas yang dibawa di depan dia; 20 pendekar anggar berjalan di depan dia, sambil bermain anggar dan memburu sasaran. Seekor kuda dituntun di depan raja, sekujur tubuhnya ditutupi selimut berlapis emas, kekangnya berlapis batu-batu mulia; di pelananya tegak bersusun terarah ke langit anak-anak panah dari batang emas yang dipipihkan dan bertabur batu-batu mulia. Di depan raja berjalan kedua putranya, 8 atau 9 tahun, bertutup perhiasan dan batu-batu mulia yang mahal-mahal dari ujung rambut ke ujung jari kaki. Paduka Yang Mulia menunggang seekor gajah berpelana emas murni; budaknya di belakang dia dengan pakaian yang indah, dengan kotak pinang dan sirih dan sebuah kipas dari emas dalam genggamannya, untuk dikibas-kibaskan mengusir lalat dari raja. Jubah raja luar biasa indah dan rumit sehingga saya tidak dapat melukiskannya dengan rinci. Ia mengenakan turban bertaburkan mutu manikam dan batu-batu mulia yang tidak ternilai harganya; *kris* dan pedang dari emas murni, sarung pedang bertatahkan batu mulia. Di depannya berjalan seekor gajah dengan sebuah tahta kerajaan di punggungnya, berselimutkan selimut dari perak*, jika turun hujan, ia dapat berganti gajah. Pada kedua gading gajah itu bergantungan kotak-kotak kecil dari emas.*
>
> Dari masjid raja kembali ke suatu tempat hiburan yang telah disiapkan untuk menghiburnya. Di mana baginda raja duduk, ke situlah semua kaum bangsawan, sesuai tata cara istana, dipanggil, dan semua duta besar asing, sesuai dengan kemasyhuran masing-masing negara yang diwakili, disilakan duduk di antara para bangsawan; setelah itu, kami menyaksikan adu gajah jinak dan liar, dan adu kerbau dan adu kambing.[41]

Seperti telah disebutkan di atas, Iskandar Muda lebih bangga dengan emas berlian harta kekayaannya dibandingkan dengan gajah-gajahnya, dan arak-arakan ke mesjid adalah kesempatan untuk membuat kagum rakyat dan tamu-tamunya melalui pertujukan-pertunjukan yang diselenggarakan istana sebagai bagian dari panggung kerajaan. Namun, tujuan dari pertunjukan itu sebagian adalah untuk hiburan, seperti terlihat dari adu binatang yang diadakan secara berkala, yang dihadiri dengan penuh semangat setiap pekan oleh penduduk Banda Aceh.

Resepsi Utusan-utusan Asing

Pertunjukan-pertunjukan megah setiap pekan itu pasti terus membuat istana sibuk dan sebagian besar penduduk Banda Aceh terhibur. Namun selain itu,

sering diadakan pula resepsi untuk wakil-wakil negeri asing, yang melibatkan tidak saja kenduri raksasa di istana, tetapi juga arak-arakan wakil-wakil negeri asing di jalan-jalan Banda Aceh dengan gajah, dan juga pertunjukan adu binatang untuk tontonan rakyat banyak. Bila wakil-wakil negeri asing membawa sepucuk surat dari raja mereka resepsi untuk menerima surat itu sangatlah megah. Surat diletakkan di atas bantal beludru di punggung gajah yang paling besar dan paling gagah, sedangkan wakil-wakil negeri asing mengikuti di belakang di atas gajah-gajah yang lain,[42] dari tempat mereka menginap ke istana. Raja-raja Eropa yang pernah berhubungan dengan Sultan Aceh antara lain Ratu Elizabeth; suratnya disampaikan James Lancaster pada 1602. Sultan yang sudah berumur Sultan Ala' ad-din Ri'ayat Syah:

> Mengirimkan enam ekor gajah besar, beserta banyak terompet, gendang, panji-panji, dengan banyak orang, untuk mengiringi jenderal [Inggris] ke istana, sehingga orang sangat berdesak-desakan. Gajah terbesar sekitar tiga belas atau empat belas kaki tingginya; dengan sebuah istana kecil (seperti kereta kuda) di punggungnya, ditutupi kain beludru merah. Di tengah-tengahnya ada sebuah tempayan besar dari emas dan sehelai sutra yang sangat indah menutupinya, dan di bawahnya terletak surat dari Ratu Inggris itu. Sang jenderal naik seekor gajah. Para pengiring ada yang menunggang gajah dan ada pula yang berjalan kaki.[43]

Tata cara ini tampaknya sama di semua istana Melayu. Sejarah Melayu mengatakan, surat-surat untuk Malaka dari raja-raja sesuai dengan kedudukan kerajaan raja-raja bersangkutan harus dibawa dengan gajah, sedangkan di Patani menurut Floris surat yang dibawanya diletakkan di atas sebuah baki emas dan dibawa ke istana, di punggung seekor gajah.[44]

Dalam perundingan-perundingan kemudian mengenai peluang untuk berdagang, sangat sulit bagi orang Eropa untuk mencapai kesepakatan dengan Aceh, terutama pada masa pemerintahan Iskandar Muda. Namun, kedatangan mereka selalu berawal dengan baik, penerimaan sangat mewah dari pihak istana sangat mengesankan, yang belum pernah mereka saksikan sebelumnya. Pesta yang diadakan untuk . Thomas Best oleh Sultan Iskandar Muda menyuguhkan "paling tidak 400 macam makanan disertai minuman panas yang demikian banyak, lebih dari cukup untuk minum beratus-ratus prajurit"; semua makanan dari daging dalam pesta untuk James Lancaster "dihidangkan dalam piring dari emas atau dari logam yang lain . . . dari emas campur tembaga [yaitu suasa]".[45]

Semua ini tentu saja dimaksudkan untuk menimbulkan kesan kagum di pihak utusan-utusan negeri asing dan rakyat Aceh. Ini tidak berarti setiap utusan negeri asing diterima dengan upacara besar seperti ini, tetapi lebih dalam arti utusan-utusan negeri asing diberikan peranan kecil untuk turut serta bermain dalam pertunjukan-pertunjukan yang diadakan istana.

Beruntung bagi sejarawan, dengan cara ini utusan-utusan negeri asing mendapat kesempatan melihat sekilas kehidupan istana yang kemudian mereka masukkan ke dalam surat-surat dan laporan-laporan tugas mereka. Khususnya, mereka sering diizinkan menghadiri pertunjukan-pertunjukan istana. Beberapa dari ini diadakan di halaman depan istana yang sangat luas, yang dapat memuat 300 gajah atau 4.000 prajurit bersenjata. Pertunjukan-pertunjukan ini juga dapat dinikmati oleh warga Aceh. Hiburan-hiburan yang lain diselenggarakan di halaman dalam, khusus untuk kelompok bangsawan dan kaum bangsawan perempuan tertentu.

Hal-hal yang ditekankan dalam pertunjukan-pertunjukan ini agak berubah dari raja ke raja. Utusan-utusan Belanda dan Inggris paling awal yang diterima oleh Ala'ad-din Ri'ayat (1589-1604) sering melihat dia menyaksikan adu ayam — "salah satu olahraga terbesar yang sangat disukai raja".[46] Di pesta-pesta dan resepsi-resepsi disuguhkan dan diminum arak banyak sekali, dan biasanya beberapa perempuan istana menari dan bermain musik untuk para tamu. Dengan Sultan Iskandar Muda dan penggantinya yang tidak berumur panjang Iskandar Thani pertunjukan utama tampaknya selalu acara adu binatang besar—gajah, kerbau dan kambing —meski kita tahu Iskandar Muda juga suka adu ayam. Di pihak lain, pada masa pemerintahan Ratu Taj al-Alam, acara adu binatang tampaknya berangsur-angsur digantikan oleh acara-acara yang lebih tenang yang diadakan di istana-istana peristirahatan kerajaan yang dibangun di atas atau dekat air—memancing, musik, dan berjudi.

Adu Binatang

Adu binatang demikian menonjol sebagai bagian dari pertunjukan yang diadakan istana kerajaan Aceh bagi rayat banyak menjelang akhir abad ke-16 dan abad ke-17 sehingga penjelasan khusus tampaknya diperlukan. Dalam hal ini, seperti dalam hal-hal lain, Aceh merupakan contoh dari ciri khas budaya Asia Tenggara pada abad itu. Senenan Jawa sangat terkenal: kaum bangsawan sambil menunggang kuda berusaha menjatuhkan lawan dari kuda menggunakan semacam tombak, dan kemudian harimau diadu dengan kerbau atau dengan

barisan prajurit bersenjatakan tombak. Sama halnya dengan di Siam dan Laos pada abad ke-17 raja seringkali mengadakan acara adu binatang untuk umum antara gajah, atau antara seekor harimau dengan sejumlah gajah. Gajah selalu berhasil menewaskan harimau dengan melambungkannya tinggi ke udara, sama halnya dengan banteng yang hampir selalu berhasil menewaskan harimau di Jawa. Adu binatang serupa itu antara harimau dengan gajah atau kerbau diadakan oleh penguasa di apa yang sekarang dinamakan Vietnam selatan, dan di Malaya.[47]

Mengingat demikian dalamnya tertancap budaya adu ayam di seluruh Asia Tenggara pada masa itu, dan kaitan adu ayam dengan agama di Java dahulu dan sampai kini di Bali, maka mungkin adu binatang berasal jauh di masa lampau ketika ada kepercayaan pra-Islam mengenai pentingnya korban darah. Barangkali perasaan-perasaan seperti itu masih hidup dalam hati Sultan Zainal Abidin, yang tewas pada 1579 karena ia "orang yang sangat pemarah, dan seorang pembunuh. Dia harus melihat darah, kalau tidak, makanpun ia tak mau."[48] Hikayat Aceh memaparkan dengan lebih rinci mengenai kesenangan keji penguasa ini pada olahraga berdarah:

> sultan itu selalu keluar ke lapangan parade untuk melakukan kesenangannya, mengadu gajah liar dengan gajah jinak, dan banyak orang mati akibat kena tusuk gading gajah, dan beranda istana Bunga Setangkai rusak; . . . dan kerbau, sapi dan biri-biri disuruh berlaga satu sama lain. Bila sejumlah kerbau terjun ke lapangan beberapa orang terbunuh, luka-luka, lumpuh dan buta. Dan ia memerintahkan beberapa orang bertarung dengan pedang, dan melindungi diri dengan perisai . . . dan di antara orang Aceh dan orang India yang bertarung dengan pedang itu, beberapa tewas dan beberapa lagi luka-luka.[49]

*N*amun, pada abad ke-17, adu binatang tampaknya sudah seluruhnya diganti dengan adu manusia, dan dalam hal ini pertarungan jarang keluar dari kendali.

Motif utama adu binatang tampaknya ada kaitan dengan perang dan lambang kemenangan bagi raja. Karena gajah dianggap bagian penting dari kekuatan pasukan Aceh, mengadakan pertarungan antara gajah barangkali dimaksudkan untuk memperagakan kekuatan gajah dan melatih gajah dan pawangnya. Paling tidak untuk Iskandar Muda, adu gajah secara berkala barangkali dilihat dari kaca mata yang sama seperti senenan Jawa (atau joust di Eropa pada Abad Pertengahan) — sebagai latihan perang-perangan dan sebagai semacam lambang keberhasilan di bidang kemiliteran. Iskandar Muda ketika

remaja sangat suka pada olahraga melawan gajah. Jika Hikayat Aceh dapat dipercaya, ia bermain, dan menunggang, gajah dan kuda dengan cekatan setiap hari Senin dan Kamis.[50] Karena itu, ketika ia menjadi raja, tidak mengherankan jika ia suka sekali menonton pertarungan semacam itu, dan ia percaya tontonan semacam itu menambah tebal semangat prajuritnya.

Di wilayah-wilayah lain Asia Tenggara, kekalahan harimau dari gajah atau kerbau merupakan simbol kekalahan kekuatan-kekuatan yang mengancam keselamatan kerajaan. Raffles mengatakan, pada zaman dia, orang Jawa menyamakan harimau dengan orang Eropa, dan demikian gembira bila kerbau berkali-kali menang, yang mereka anggap sama dengan diri mereka sendiri.” Di Aceh pasti juga ada pemikiran seperti ini, bahwa harimau harus dikalahkan, karena harimau diikatkan pada sebuah tiang dan harus melawan empat gajah sekaligus.[52]

Namun, di Aceh pada masa pemerintahan Iskandar Muda, tampaknya binatang yang diadu dalam adu binatang lebih sering binatang sejenis. Pada 1608 Belanda melihat 58 gajah diadu, sepasang-sepasang bergiliran.[53] Pada 1613 Sultan memperagakan kepada utusan-utusan Inggris pertarungan antara 6 gajah, satu lawan satu secara bergiliran, kemudian 4 kerbau, dan kemudian 10 atau 12 ekor kambing.[54] Adu binatang terus berlangsung di bawah Iskandar Thani. Peter Mundy melukiskan adu gajah yang pernah disaksikannya pada awal pemerintahan Iskandar Thani. Sekitar 150 gajah disusun dalam bentuk lingkaran sehingga membentuk sebuah arena luas, sedangkan 12 atau 13 pasang bertarung mati-matian secara bergiliran. Mundy menyaksikan pertarungan paling seru yang membuka dan menutup acara adu binatang pada hari bersangkutan. Pertarungan ini melibatkan gajah jantan yang sedang dalam musim berahi, yang menjadi galak karena ada gajah betina di sekitar tempat pertarungan (lihat Gambar 11). Kerbau, ”antelopes” (barangkali dimaksud rusa) dan kambing juga diadu.[55] Di bawah Sultan Taj al-Alam utusan-utusan dari negeri asing masih dihibur dengan adu binatang seperti itu setidak-tidaknya hingga 1644.[56]

Pesta Air

Salah satu aspek paling menimbulkan teka teki dari perayaan-perayaan di istana Aceh pada abad ke-17 ialah peranan yang dimainkan air. Kembali di sini ada persamaan dengan hampir semua tempat di Asia Tenggara, terutama *mandi Safar* atau upacara-upacara bersih diri di dunia kepulauan itu yang tidak kalah menyenangkan dari acara perang air pada Tahun Baru di daratan Asia Tenggara.

Gambar 11 Adu gajah di Istana Aceh
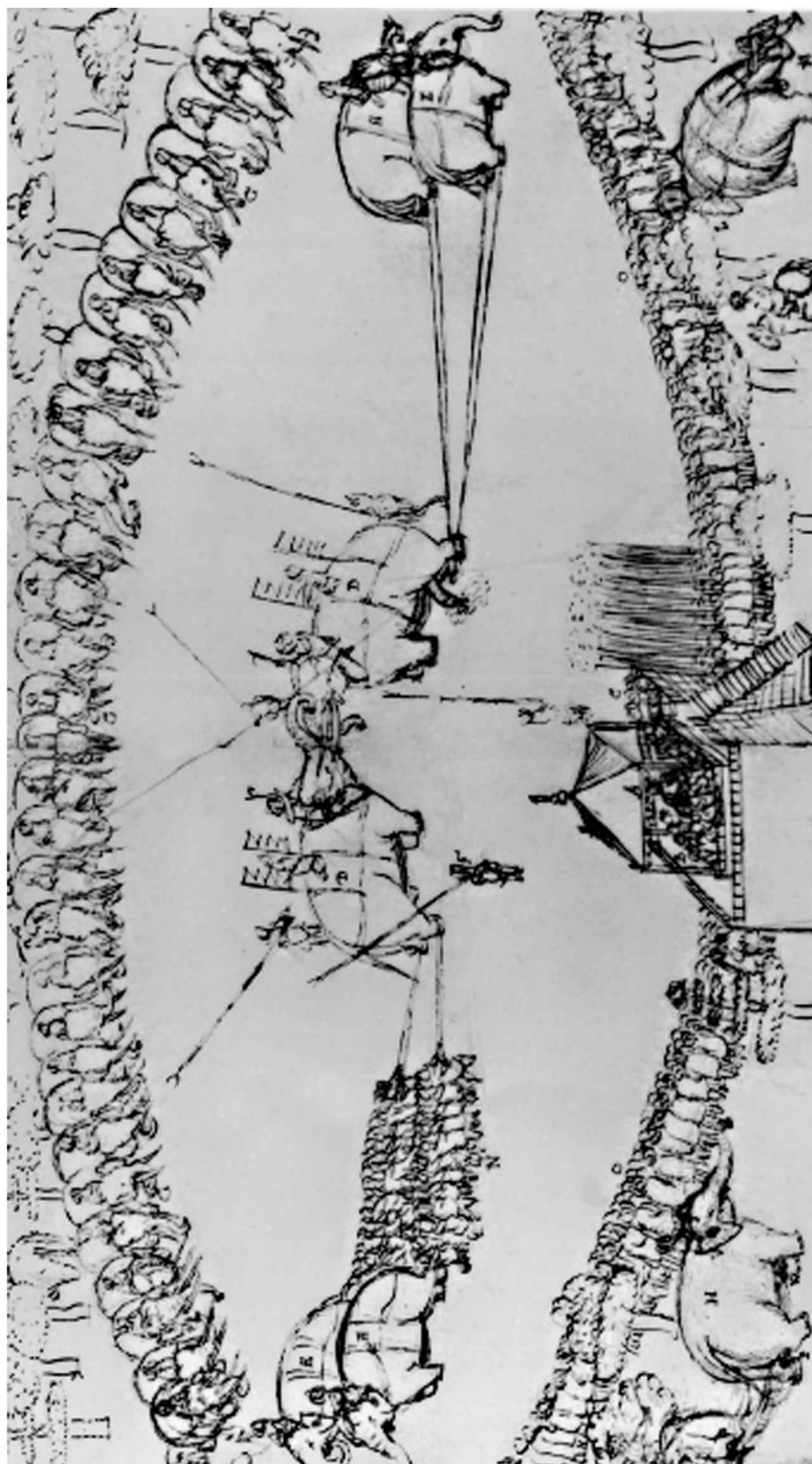
Sultan-sultan Malaka pada abad ke-15 mandi di kolam dari batu pualam dengan air yang dialirkan dari mata air yang mungkin sama dengan pola pesta air Aceh dikemudian hari.[57] Pada abad ke-17 utusan-utusan dari negeri asing di Aceh sering diundang untuk menemani raja ke pesta di sungai, dan sebagian besar dari kisah-kisah yang kita peroleh berasal dari laporan-laporan para utusan itu.

Laporan semacam itu yang pertama adalah laporan Frederick de Houtman, yang diperkuat oleh pandu Inggris Davis, juga anggota ekspedisi de Houtman. De Houtman hadir dalam sebuah pesta kerajaan pada 10 Juli 1599 (16 Dulhijjah 1007H), yang menyuguhkan tarian oleh dua gadis berpakaian sangat indah. "Setelah itu saya pergi ke sungai bersama raja, dan berdiri dalam air bersama-sama semua kaum bangsawan. Di situ semua orang makan dan minum sepuas hati, misalnya minuman keras yang sangat keras."[58] Sesudah itu pada 19 September de Houtman hadir pula dalam sebuah pesta semacam itu; semua orang berdiri dalam air sambil makan. Ini bertepatan dengan 28 Safar, pesta kedua ini mungkin acara keagamaan mandi Safar.[59]

Iskandar Muda juga mengadakan pesta-pesta air semacam itu, dan tampaknya kemungkinan ia sering pergi ke Mata Ië [cf. Melayu mata ayer], tempat yang nyaman 8 km ke barat daya dari dalam tempat air jernih sungai Krueng Daroy mengalir dari dua mata air di kaki sebuah bukit. Pada 2 Mei 1613 Iskandar Muda mengundang jenderal Inggris Thomas Best:

> ke pancurannya untuk berenang, yang 8 atau 9 kilometer jauhnya dari tengah kota. Dia mengirimkan dua ekor gajah untuk membawa saya dan perbekalan saya. Dan setelah kami membasuh diri dan mandi di air itu, raja menyilakan kami menikmati hidangan yang sangat banyak, dan terlalu banyak arak; semua harus disantap dan dimimum sambil berendam dalam air; semua kaum bangsawan dan nakhoda-nakhoda besar hadir. Pesta kami terus berlangsung dari pukul satu hingga menjelang pukul lima, pada pukul ini raja membebaskan saya; dan setengah jam setelah semua orang asing.[60]
>
> Di sini semua makanan dibawa melalui air; bujang-bujang masing-masing memegang satu piring dengan satu tangan dan berenang dengan tangan yang satu lagi (demikian pula cara mereka membawa minuman keras); setelah tamu mencicipi makanan satu demi satu (mereka harus mencicipi semua makanan), makanan yang tersisa mereka buang ke air sungai.[61]

Seperti digambarkan oleh orang-orang Inggris yang lain, perayaan ini sama dengan acara *mandi Safar,* karena Sultan duduk di tempat istimewa di tengah-

tengah sungai, dikelilingi oleh orangkaya terkemuka, sementara kemenakannya menyirami dia dengan air upacara dari sebuah panci emas.[62] Namun, 2 Mei jatuh pada 12 Rabi'al awal, ini adalah perayaan Maulud al-Nabi, hari lahir Nabi – dua pekan setelah acara mandi Safar. Mungkin raja sakit atau ada masalah lain sehingga mandi Safar terpaksa ditunda, karena sultan diberitakan jatuh sakit beberapa hari sebelum itu, tetapi ini juga mungkin bukti terbaik yang dapat kita peroleh mengenai perayaan lebih awal Maulud di Aceh. Tidak mengherankan jika di sini, seperti di Jawa, hari lahir Nabi dirayakan terutama sebagai sebuah perayaan kerajaan dan pengukuhan kembali kesetiaan kepadanya. Namun, apapun dampaknya pada raja, pesta air ini tidak terlalu bermanfaat bagi orang-orang Eropa yang menghadirinya, karena nakhoda Belanda dan dua orang Inggris anak buah Best meninggal beberapa hari kemudian; menurut orang Inggris yang lain ini mungkin akibat terlalu lama berendam dalam air dan terlalu banyak minum arak.[63]

Kisah berikutnya yang kita peroleh mengenai pesta seperti itu ialah pesta pada 1642, ketika putri Iskandar Muda, Sultana Taj al-Alam, beberapa kali mengundang utusan-utusan asing untuk menghadiri pesta air yang diadakannya. Paling tidak ada dua tempat yang sangat disukai Ratu–satu di Mata Ië, tempat "sebuah sungai mengalir dari dalam dua gua", dan satu lagi di muara sungai. Pada Juli 1642 Pieter Sourij dan orang-orang Belanda lainnya, bersama pedagang-pedagang besar India dan pembesar-pembesar istana, mengiringi Ratu bersama gajah-gajahnya yang sangat banyak ke Mata Ie, yang dinamakan orang-orang Belanda itu speel hoff (taman kencana). Rombongan Belanda diberi tempat duduk di atas sebuah bibir batu berukir di tepi sungai, dari situ mereka dapat mengamati ribuan ikan gurame berenang-renang dalam air, sambil menikmati makan besar yang terdiri dari tujuh macam hidangan. Di antara hidangan ada pertunjukan, sementara para bangsawan Aceh berdoa dan membasuh badan. Di antara pertunjukan dihidangkan "nyanyi pujaan" (barangkali pantun Aceh mengenai kepahlawan yang dikenal sebagai hikayat) yang dipersembahkan untuk ayahanda Ratu, Sultan Iskandar Muda. Nyanyian ini menimbulkan haru dan menerbitkan air mata banyak orang Aceh yang hadir karena "meski sangat ditakuti semasa hidupnya, ia meninggalkan untuk orang Aceh sebuah nama yang kekal untuk selama-lamanya."[64] Mata acara pertunjukan berikutnya termasuk lawak oleh seorang pelawak Jawa, dan musik dan tari-tarian oleh seniman-seniman Siam, India dan lain-lain. Semua tamu tiba di tempat pesta sekitar pukul sepuluh pagi, dan baru kembali ke kota pada pukul enam petang.[65] Lima hari kemudian ada lagi undangan untuk

menghadiri pesta di sebuah "pemandian yang terletak di sebuah tempat yang sangat indah", barangkali pemandian yang lain. Kembali ada acara mandi dan memancing, dan makanan disediakan, yang terdiri dari ikan yang ditangkap saat itu dan dimasak di tempat, disertai berbagai macam buah-buahan.[66]

Menjelang akhir tahun dua arak-arakan kerajaan yang sama diselenggarakan di pantai di Indrapura, tempat berdiri sebuah "benteng batu yang besar dan tampan", tetapi juga "sebuah speelhuijs yang dibangun di atas sebuah sungai besar itu". Di sini tidak ada acara mandi, tetapi memancing, dan juga beraneka ragam permainan judi antara Ratu, kaum bangsawan perempuan, dan beberapa orang kasim istana.[67]

Kisah-kisah dari sumber-sumber Aceh dan asing yang lain tidak banyak bercerita tentang acara-acara perintang waktu ini. Mandi di air jernih sungai Aceh dianggap orang Aceh sangat baik untuk kesehatan. Sejumlah orang asing menyaksikan orang-orang yang menderita berbagai penyakit selalu dibawa ke sungai untuk dimandikan. Francois Martin berpendapat, daya air sungai yang jernih itu untuk menyembuhkan penyakit mungkin berasal dari tanaman-tanamam obat, seperti pohon kapur barus dan benzoin, yang tumbuh rimbun di kedua tepi sungai itu.[68] Hikayat Aceh menjelaskan:

> Ada sebuah sungai di kota Aceh Dar as-Salam yang banjir di musim semi dan datang dari sebuah bukit dan kemudian mengalir ke laut. Airnya sangat manis dan menyembuhkan. Banyak orang sakit bila mereka mandi di sungai itu . . . . [atau] bila mereka minum airnya, disembuhkan oleh Tuhan dari penyakit mereka. Dan banyak pedagang dari dunia Arab, Turki, Kekaisaran Mughal dan seluruh India, . . . setelah merasakan pengaruh dari mandi di sungai itu dan minum airnya, . . . mengatakan: "Ah, di semua negeri yang telah pernah kami kunjungi dan amati, tidak ada sungai seperti Sungai Aceh Dar as-Salam dari sisi rasa atau manfaatnya bagi kesehatan manusia."[69]

Namun, bagi para raja dan pengikut mereka, sungai Dar al'Isyki ("persemayaman cinta"), kemudian dikenal dengan nama Krueng Daroy, yang paling menarik perhatian. Ini pasti sungai yang mengalir dari bawah dua gua yang pernah dikunjungi Pieter Sourij, karena Hikayat Aceh juga mengatakan demikian.

> Ada sebuah sungai yang lain yang mengalir dari sebuah mata air dalam sebuah gua batu. Airnya sangat sejuk dan manis. Nama sungai itu Dar al'Isyki. Dan air minum semua raja adalah air dari sungai ini .[70]

Sultan Iskandar Muda mengalihkan aliran sungai yang jernih dan cantik itu ke timur laut pada 1613, sehingga airnya mengalir langsung melalui tengah-tengah benteng kerajaan (kota Dar ad-Dunia) dari selatan ke utara dan juga menjadi sumber air bagi parit pertahanan yang mengelilingi benteng itu.[71] Sesudah itu menantunya Iskandar Thani yang memerintahkan agar sungai itu lebih dipercantik lagi dan dijadikan sebuah taman, Taman Ghairah, dikelilingi oleh dinding dan berisi Gunongan Menara Permata (lihat Gambar 7 di hlm. . . .), dan tampaknya merupakan sebuah tempat semedi, dan sebuah masjid yang dinamakan Isyki Musyahadah ("cinta penglihatan gaib").[72] Uraian sangat panjang Raniri mengenai taman ini, dan terutama mengenai Dar al'Isyki, kedua sisinya yang penuh hiasan, pulau batu pualam di dalamnya, dan kolam mandi yang menampung aliran airnya, menunjukkan dengan jelas bahwa kebun ini tidak hanya untuk bersenang-senang, tetapi juga bentuk tertinggi dari kenikmatan berupa hubungan mistis dengan Tuhan. Banyak dari ciri-cirinya dimaksudkan untuk membangkitkan bayangan mengenai taman di surga menurut gambarannya yang dibayangkan dalam Islam. Seperti kata Lombard, Brakel dan Wessing,[73] "Taman Ghairah adalah salah satu dari taman-taman kerajaan yang pada awalnya dimaksudkan untuk tempat bersemedi di istana-istana Indonesia, di antaranya Taman Sari di Yogyakarta dan Cirebon, yang sangat terkenal. Namun, lebih lagi daripada di Jawa, air di Aceh tampaknya menjadi titik pusat dalam pemikiran Aceh mengenai kesehatan jiwa dan jasmani. Mandi itu menyenangkan tetapi juga memiliki fungsi menyembuhkan dan membersihkan. Tampaknya, acara-acara yang berkaitan dengan mandi tidak terbatas pada upacara mandi Safar, meski ini juga jelas merupakan kegiatan yang penting dalam jadwal kegiatan kerajaan Aceh.[74] Barangkali banyak saat penting dalam kehidupan keluarga istana yang membutuhkan upacara pembersihan diri dengan mandi di Dar al'Isyki, diikuti oleh berbagai pertunjukan.

* * *

Aceh pada abad ke-17 bukan sekadar pusat perdagangan dan kekuatan senjata. Aceh adalah sebuah kota besar dan makmur, yang memiliki sumberdaya dan budaya untuk mengembangkan gaya hidup yang menyenangkan, dan banyak waktu untuk olahraga, hiburan dan pertunjukan. Sebagian besar dari kegiatan ini diselenggarakan oleh istana dan dirancang terutama untuk tujuan memperagakan semegah mungkin kebesaran dan aura gaib penguasa kerajaan.

7

Peralihan dari Otokrasi
(*ditulis bersama Takeshi Ito*)

Meski sejarawan perbandingan harus sangat berhati-hati ketika memindahkan kategori-kategori "besar" sejarah Eropa seperti feodalisme (atau zaman kuno, perbudakan, abad pertengahan) ke Asia, namun tidak dapat disangkal bahwa beberapa peralihan yang penting terjadi pada beberapa masyarakat yang sangat berbeda satu sama lain dan karena itu perlu penjelasan yang lebih luas melampaui lingkungan terbatas budaya atau bangsa. Dalam bab ini perhatian akan kita pusatkan kepada satu peralihan semacam itu di Aceh, yang bergema ke kerajaan-kerajaan yang lain di Asia Tenggara. Peralihan ini ialah peralihan dari sebuah pola kerajaan otokrasi yang didominasi oleh pelabuhan-ibukota dagang ke kerajaan dengan kekuasaan tersebar di antara kepala suku atau wilayah yang mengakui aura kerajaan-kerajaan sebelumnya tetapi tanpa mengambil alih kesatuan berdasarkan kekuasaan militer atau hukum terpusat. Meski tahap terpenting dari peralihan ini terjadi menjelang akhir abad ke-17, di Eropa tahap ini sudah pernah dilalui, yakni peralihan dari Zaman kuno ke Feodalisme.

Peralihan Asia Tenggara

Akhir abad ke-16 dan lebih-lebih lagi awal abad ke-17 menyaksikan sejumlah kerajaan kuat dan berpusat di kota yang membuat kagum para pengamat Eropa—Burma di bawah raja Bayinnaung (1551-81) dan raja Anaukhpetlun (1606-29); Ayutthaya (Siam) di bawah raja Songtham dan raja PrasatThong (1610-56); Mataram (Jawa) di bawah Sultan Agung dan Amangkurat 1 (1613-77); Makassar di bawah Sultan Mohammad Said dan Sultan Hasanuddin (1639-69); dan Aceh di bawah Sultan al-Mukammil dan Sultan Iskandar Muda (1589-1636). Ciri-ciri

utama kerajaan-kerajaan otokratik (pemusatan kekuasaan mutlak dalam tangan satu penguasa) itu sebagai berikut:

1. Pasukan yang sangat besar, dengan pengerahan bagian terbesar dari seluruh tenaga manusia yang ada. Sebuah pasukan kecil tetap pengawal istana, serdadu asing bayaran, dan sebagainya. Kendali ketat senjata api oleh kerajaan. Banyak orang tawanan akibat perang penaklukan.
2. Perdagangan internasional terpusat pada satu pelabuhan saja di bawah kekuasaan raja (ibukota pada umumnya, kecuali di Mataram). Penghasilan raja tergantung sebagian besar pada pelabuhan yang ramai, termasuk sektor perdagangan yang lebih besar milik raja.
3. Kewajiban mengabdi di istana bagi para bangsawan.
4. Mulai ada tatanan birokrasi dalam pemerintahan, pejabat diangkat secara berkala, tidak turun temurun.
5. Kodifikasi hukum dan pelembagaan struktur hukum, umumnya berdasar model-model India atau Islam sebagai dasar legitimasi bagi pemusatan wewenang menyusun undang-undang dalam tangan istana.
6. Pengembangan budaya kosmopolitan perkotaan, yang mendominasi pedesaan dan menjadi model budaya bagi periode-periode berikut.

Sebagian besar sejarawan, seperti halnya sebagian besar pengamat pada zaman kini, melihat semua perkembangan ini dari sisi satu negara, dan karena itu menjelaskan otokrasi-otokrasi kuat dari segi kemampuan masing-masing raja, dan kemudian dari segi pelimpahan kekuasaan akibat konflik dalam negeri, tekanan dari luar, atau ketidakmampuan penguasa-penguasa abad ke-18.[1] Setelah membahas gejala yang sama di sejumlah kerajaan, kita perlu melihat sejumlah faktor kelembagaan di balik gejala itu. Faktor-faktor terpenting tampaknya adalah perdagangan internasional, senjata api, dan peran orang Eropa di Asia.

Sampai pertengahan abad ke-17, peranan pedagang Eropa dan perusahaan dagang tampaknya menguntungkan penguasa-penguasa kuat, terlepas dari kekacauan-kekacauan akibat serangan orang Portugis pada tahun-tahun pertama. Dalam mengejar pasokan yang stabil bagi rempah-rempah dan barang-barang tropik lainnya, orang Eropa lebih suka mengadakan perjanjian monopoli dengan para penguasa yang tampaknya mengendalikan bagian terbesar dari pasokan lada atau cengkeh, dan dengan demikian sering lebih unggul daripada pedagang-pedagang India atau pesaing-pesaingnya dari Eropa. Namun, ketika VOC mulai berakar di Asia, diupayakannya dengan segala

daya untuk memperoleh monopoli total atas rempah-rempah Asia Tenggara, dan akhirnya berhasil menghancurkan kekuatan militer pelabuhan-pelabuhan setempat yang sangat penting bagi perdagangan rempah-rempah—Banten dan Makassar—dan bersamaan dengan itu memisahkan wilayah-wilayah utama produsen lada dari ikatannya pada Aceh. Orang Inggris, orang Perancis, dan orang Denmark, yang lebih aktif mendorong perdagangan dengan raja-raja kuat Banten, Ayutthaya dan Makassar, diusir oleh Belanda dengan kekerasan atau oleh revolusi dalam negeri menjelang abad ke-17.

Senjata yang paling awal diperkenalkan sebagai alat perang di Asia Tenggara adalah meriam. Pada abad ke-16 dan ke-17, meriam pada umumnya diperagakan kepada, dibeli oleh, atau dibuat semata-mata untuk raja. Raja-raja yang kuat biasanya mengawasi dengan ketat artileri dan mesiu—sangat berbeda dengan tradisi setempat bahwa seorang laki-laki menganggap pakaiannya belum lengkap jika tidak disertai sebilah kris atau pisau. Namun, ketika senjata genggam semakin banyak digunakan dan semakin efektif, semakin sulit bagi penguasa mempertahankan monopoli atas senjata semacam itu. Sementara pembuatan meriam tampaknya terbatas pada While craftsmen yang bekerja atas dasar perlindungan istana, bedil pada abad ke-18 dibuat dan diekspor oleh perajin di Bali, Bugis, dan Minangkabau—wiayah-wilayah dengan struktur politik yang sangat terpecah-pecah.

Lebih kabur daripada faktor-faktor luar semacam itu adalah faktor-faktor dalam negeri, yang berkaitan dengan efektif tidaknya dan bertahan tidaknya struktur administrasi yang dibangun pada masa otokrasi. Dalam tulisan ini kami tidak dapat melakukan lebih daripada meminta para peneliti yang lain untuk memberikan perhatian yang lebih besar kepada penelitian masalah ini lebih lanjut. Sepintas lalu tampaknya sulit menarik satu penjelasan umum yang dapat menjelaskan semua kasus di bawah, tetapi kita harus ingat bahwa perbedaan dalam peralihan serupa itu juga ada dalam peralihanEropa dari masa kuno ke feodalisme, dan dari feodalisme ke kapitalisme, dan ini tidak pernah mencegah kegiatan penelitian untuk mencari penjelasan-penjelasan umum.

Jawa: Kemenangan militer Sultan Agung (1613-45) di medan perang, diikuti oleh tirani luar biasa Amangkurat I (I645-77) mengakibatkan pemberontakan, intervensi Belanda, dan kemudian pemecahan Jawa untuk selama-lamanya ke dalam kerajaan-kerajaan yang saling bersaing (1755).

Bali: "Kerajaan" Bali, dengan ibukota di Gelgel, terpecah-pecah untuk selama-lamanya ke dalam delapan kerajaan pada akhir abad ke-17.

Sulawesi Selatan: Dominasi Makassar atas seluruh Sulawesi Selatan berlangsung dari 1610 hingga 1669, dengan pemusatan kekuasaan yang terus meningkat, sampai penaklukan Makassar oleh Belanda/Bugis mengakibatkan pemecahannya ke dalam sejumlah kerajaan dan sub-kerajaan.

Banten: Kesultanan ini ditaklukkan oleh Belanda pada 1684, dan setelah itu kehilangan perdagangan luar negeri dan kemampuan mengendalikan dengan ketat wilayah-wilayah kekuasaannya di Sumatra.

Banjarmasin, Palembang, Ternate, Johor, Brunei: kehilangan perdagangan internasional pada abad ke-17 dan abad ke-18 mengakibatkan semakin sulit bagi kerajaan-kerajaan ini untuk mengendalikan wilayah-wilayah kekuasaan masing-masing.

Siam: Revolusi 1688 mengusir rekan-rekan dagang Raja orang Eropa, dan awal abad ke-18 menyaksikan terus menyeberangnya pengikut Raja ke dalam aristokrasi.[2]

Burma: Ibukota Burma pindah dari Pegu ke Ava pada 1635, setelah itu tidak ada lagi peranan penting yang dimainkan kerajaan dalam perdagangan internasional; dan terus menurunnya pengendalian dari pusat sejak Tha-lun wafat (1648) hingga Ava runtuh (1752).[3]

Ada pemulihan yang cukup berarti dalam kekuasaan terpusat pada abad ke-19, yang terjadi lebih awal di Siam dan Burma tetapi juga mempengaruhi kerajaan-kerajaan Indonesia yang masih bebas, yakni Aceh dan Lombok, pada paruh kedua abad ke-19. Namun, umumnya, masih ada celah yang besar antara gambaran yang diberikan tulisan-tulisan standar tentang kerajaan-kerajaan Asia Tenggara abad ke-19—J.M Gullick tentang Kerajaan-kerajaan Melayu; D.E. Brown tentang Brunei, C. Snouck Hurgronje tentang Aceh, John Crawfurd tentang Siam, H.J. Friedericy tentang Sulawesi Selatan,[4] dsb.—dan tulisan-tulisan mengenai kerajaan-kerajaan abad ke-16 dan abad ke-17.

Aceh

Aceh mungkin satu-satunya kerajaan Sumatra yang mengikuti sepenuhnya semua proses peralihan yang lebih umum ini. Setidak-tidaknya di antara

kerajaan-kerajaan di Indonesia, Aceh memiliki keuntungan yang unik berupa sejarah berkesinambungan yang tidak terpotong oleh intervensi langsung dari luar sampai menjelang abad ke-19.

Seperti kasus-kasus yang diuraikan secara singkat di atas, ada kontras yang sangat ekstrim antara Aceh dalam periode ”absolutisme kerajaan” seperti dibahas dalam Bab 5 di atas dan gambaran tentang Aceh yang diberikan oleh para ilmuwan Belanda pada akhir abad ke-19. Menurut Beaulieu pada 1629, Sultan Iskandar Muda mampu mengumpulkan kekuatan militer yang terdiri dari 40.000 orang dalam 24 jam. Gudang senjata, berisi lebih dari 2.000 meriam, berada di bawah kendali ketat kerajaan, senjata api dibagikan kepada prajurit hanya pada waktu ada perang. Perintah raja berlaku di seluruh Sumatra utara dan barat dan sebagian besar Semenanjung Malaya, dan orang asing dapat ikut jual beli lada yang menjadi rebutan itu hanya menurut persyaratan yang ditetapkan oleh raja.[5] Di dalam negeri, citra kekuasaan Iskandar Muda di antara generasi-generasi Aceh yang berikut sedemikian rupa sehingga semua hukum menurut tradisi diakui berasal dari zaman dia, dan namanya ditorehkan pada cap semua sultan berikutnya. Sebaliknya, kekuasaan Aceh pada abad ke-19, seperti dilukiskan oleh ahli Islam Belanda Snouck Hurgronje, terpecah-pecah di antara beberapa puluh *ulèëbalang* (108 diakui Belanda) yang adalah ”gubernur, hakim dan pemimpin perang dalam wilayah kekuasaan masing-masing yang tidak mengakui wewenang yang lebih tinggi,” turun temurun.[6] Kekuasaan efektif Sultan terbatas pada lingkungan istananya, meski ia dihormati di mana-mana di Aceh.[7] Meski Sultan tidak memiliki kekuasaan untuk mempengaruhi pergantian *ulèëbalang,* kedua belas *ulèëbalang* terkemuka memiliki wewenang berdasar tradisi untuk memberikan mahkota kepada calon sultan kelahiran istana pilihan mereka sendiri.

Seperti dijelaskan dalam Bab 5, ada penyebab dari luar dari transformasi ini, yakni menurunnya secara terus menerus peranan Aceh sebagai pelabuhan internasional di Teluk Bengali dan sebagai salah satu pemasok utama lada ke pasar dunia—kemunduran yang terus berlangsung tanpa henti antara sekitar 1630 dan 1820. Meski ekspor lada dari Aceh bergairah kembali pada abad ke-19, ibukota itu tidak lagi memiliki kendali yang cukup atas dapat wilayah-wilayah pengekspor lada sehingga karena itu hanya dapat menarik penghasilan sekadarnya dari situ. Namun, kemunduran dalam perdagangan merupakan akibat dari dan penyebab transformasi dalam negeri, dan tidak cukup digunakan sebagai penjelasan bagi perubahan besar kelembagaan di dalam negeri.

Meski ada sangat banyak spekulasi mengenai asal-usul sistem *ulèëbalang* di Aceh pada abad ke-19, dan mengenai satuan-satuan lebih kecil, *mukim*, di bawah *ulèëbalang* dan federasi *ulèëbalang* yang disebut *sagi* di atas *ulèëbalang,* data tidak cukup untuk menarik kesimpulan mengenai hal ini. Snouck Hurgronje, sebuah pengaruh yang mendominasi pada semua penelitian selanjutnya, sangat tidak banyak dapat menolong mengenai persoalan ini. Ia bersikeras untuk melukiskan Kesultanan itu sebagai kesultanan yang lemah dan tidak relevan dengan maksud dapat membunuh upaya-upaya lebih lanjut untuk mengadakan perundingan damai dengan Kesultanan itu pada masa hidupnya, dan ia mengasumsikan tanpa bukti sejarah bahwa *ulèëbalang* dan *sagi* sudah ada sebelum Sultan. Sebagai kontras, argumen yang kami kemukakan di sini adalah ciri-ciri kunci dari sistem politik Aceh yang "tersebar" pada abad ke-19 pada dasarnya mulai mendapat bentuk dalam setengah abad setelah kematian Iskandar Muda pada 1637.

Referensi pertama yang kami peroleh berkaitan dengan *ulèëbalang* adalah dalam konteks militer—di kalangan prajurit Aceh yang menyerang Malaka Portugis pada 1547.[8] Referensi Portugis ini memperkuat arti awal istilah *ulèëbalang,* yakni panglima perang, yang penggunaannya masih terdapat dalam bahasa Melayu *(hulubalang)* meski dipertahankan dalam bahasa Aceh hanya melalui kesusasteraan lama.[9] Catatan-catatan sejarah Aceh sudah menyebut petinggi-petinggi utama kerajaan sebagai *ulèëbalang* pada tahun 1570-an,[10] yakni setelah pemerintahan Sultan Ala'ad-din Ri'ayat Syah al-Kahar (1539-71) yang selalu siap tempur. Tampaknya ada kemungkinan karena itu bahwa pada waktu itu *ulèëbalang* memiliki dua fungsi, yakni panglima perang dan kepala wilayah, karena telah dianugerahi tanah di wilayah yang ditaklukkan sebelumnya oleh sultan-sultan dahulu yang ekspansionis. Tanah yang paling berharga pada waktu itu tidak syak lagi adalah wilayah di sepanjang pesisir utara, terutama di sekitar Pidië dan Pasai, karena ini merupakan sumber utama bagi ekspor lada pada abad ke-16.[11] Anugerah tanah semacam itu merupakan sumberdaya yang memungkinkan *ulèëbalang* menyediakan tenaga dan segala yang diperlukan bagi kampanye-kampanye militer lebih lanjut. Meski ada perkembangan ini, kerajaan-kerajaan pra-penaklukan tampaknya mempertahankan sampai batas tertentu identitas sebagai bawahan pembayar upeti, karena kita tahu beberapa penguasa abad ke-16 mengangkat putra-putra mereka sebagai *raja* Pidië, Pasai, Deli (di Sumatra Timur) dan Pariaman (di Sumatra Barat).[12] Salah satu dari daftar-daftar paling awal dari orang-orang besar dari kerajaan itu, tahun 1579, mulai dengan "semua *raja,* dan *kadi* dan *ulèëbalang".*[13]

Kita tidak tahu apakah pengangkatan *raja* dan *ulèëbalang*, yang tampaknya berada di bawah *raja*, dimaksudkan untuk selanjutnya bersifat turun menurun. *Ulèëbalang* mungkin sekali sudah mengambil hak-hak seperti itu bagi mereka sendiri pada tahun 1570-an dan tahun 1580-an ketika empat Sultan berturut-turut ditumbangkan atau dibunuh oleh kaum bangsawan ibukota itu. Namun jelas sekali bahwa dua penguasa terkuat pada awal abad ke-17 tidak memiliki waktu untuk mengurus hak turun temurun semacam itu, dan berusaha sekuat tenaga menciptakan elite baru yang bergantung sepenuhnya kepada mereka. Yang pertama dari penguasa otoriter yang tiada duanya ini adalah Ala'ad-din Ri'ayat Syah Sayyid al-Mukammil (1589-1604) yang menegakkan kekuasaan raja kembali dengan tegas, seperti diuraikan dalam Bab 5.

Cucu laki-laki dan anak didik al-Mukammil, Sultan Iskandar Muda (1607-36), membawa kebijakan keras ini ke puncak yang baru. Mengenai dia juga dilaporkan bahwa "Dia menghabisi nyawa hampir semua kaum bangsawan lama, dan menciptakan kaum bangsawan baru."[14] Seperti telah kita lihat, Sultan ini juga menciptakan cara yang sangat ampuh untuk mempertahankan kesetiaan pejabat-pejabat baru yang diangkatnya. Sebuah hirarki administrasi dan hukum yang kompleks dikembangkan di bawah kekuasaannya, sementara sedikit saja ada tanda-tanda tidak setia atau kegagalan di pihak elite *ulèëbalang* hukuman yang sangat kejampun dijatuhkan sebagai penjera.[15]

Beberapa bukti dari cara Iskandar Muda menciptakan anugerah-anugerah baru bagi orang yang diangkatnya untuk menduduki suatu jabatan dapat dilihat dalam dua titah raja (*sarakata*) yang masih tersimpan hingga sekarang, satu tertanggal dari awal abad ke-18 dan satu lagi dari abad ke-19. Kedua *sarakata* ini mencatat bahwa pada 1613 Sultan Iskandar Muda menganugerahkan kepada seorang *orangkaya* tertentu sebuah wilayah di Samalanga (di pantai utara berbatasan dengan Pidië) yang terdiri dari enam *mukim.* Tiga puluh tahun atau lebih kemudian, pada masa pemerintahan putri Iskandar Muda, anugerah ini diperkukuh untuk penerima yang sama yang sekarang memiliki gelar Orangkaya Seri Paduka Tuan Seberang.[16] Keabsahan dokumen-dokumen ini ditegaskan dalam oleh laporan-laporan Belanda,[17] yang mengidentifikasi orang ini sebagai Panglima Bandar atau pejabat pelabuhan sampai kematiannya pada 1663 (atau 1658 menurut *sarakata),* yang terus bekerja di bawah Sultana Safiyyat al-Din. Karena *sarakata* itu juga menceritakan kepada kita bahwa anugerah tanah itu diwariskan kepada putranya, maka kita dapat mengambil kesimpulan bahwa anugerah tanah dari Iskandar Muda kepada bawahannya itu sudah menjadi turun temurun di bawah sultan-sultan setelah dia. Tampaknya

tidak ada referensi di sini mengenai *mukim* di Aceh yang lebih awal daripada anugerah tanah pada 1613 ini. Karena itu, asal-usul pembagian Aceh ke dalam *mukim* (dari bahasa Arab *muqim,* warga laki-laki dewasa di lingkungan masjid tertentu, dan, barangkali wilayah itu sendiri) mungkin prakarsa Sultan Iskandar Muda, seperti dikatakan oleh beberapa penulis pada masa lalu.[18] Iskandar Muda dikenal sebagai pendiri masjid, pelindung *ulama* (terutama *ulama* aliran mistik Wujuddiya), dan pendorong hukum Islam.[19] Karena itu ia mungkin telah mengangkat *imam* yang bertanggung jawab atas *mukim* di seluruh Aceh, dengan maksud sebagian untuk memperbaiki pelaksanaan ajaran Islam, dan sebagian lagi untuk bertindak sebagai pengendali kekuasaan *ulèëbalang* yang menikmati anugerah tanah yang terdiri dari beberapa *mukim.* Di bawah penguasa berikutnya yang lebih lemah, *imam* ini menjadi turun temurun, kepala sekuler *mukim* mereka*,* dan kadang-kadang mereka sendiri yang memakaikan kepada diri mereka sendiri gelar *ulèëbalang* dan juga gelar *imam.* Dalam titah raja 1640 dua *imam* masuk dalam daftar pejabat istana atau bawahan di Pasai dan Samalanga yang harus membayar upeti tahunan yang telah ditentukan besarya kepada raja.[20] Pada abad ke-19 *imam* yang memimpin sembahyang Jumat di masjid-masjid di seluruh Aceh sepenuhnya berbeda daripada kepala *mukim.*[21]

Anugerah tanah yang diberikan oleh Iskandar Muda pada 1613 dan dibahas di atas hampir pasti bukan tidak ada kelanjutannya. Untuk pemerintahan berikutnya, yakni pemerintahan menantu Iskandar Muda, Iskandar Thani (1636-41), bukti-bukti yang lebih baik yang kami peroleh menunjukkan sebuah pola teratur anugerah tanah bagi bawahan. Sebuah laporan Belanda pada 1640 mengatakan bahwa satu dari orang kasim istana, Seri Bijaya, bertanggung jawab atas "pemasukan dari tanah", dan harus memutuskan tanah yang mana yang akan diberikan sebagai anugerah kepada pejabat yang berkedudukan sebagai pengawal raja.[22] Sebuah titah yang kemungkinan besar dari penguasa yang sama, yang tercatat dalam kumpulan titah dan hukum Aceh, *Adat Aceh,* merinci sembilan wilayah di daerah Pasai disertai batas-batas masing-masing wilayah. Banyak dari wilayah ini milik orang-orang besar di ibukota, termasuk Sultan sendiri, *orangkaya* Maharaja dan Laksamana.[23]

Jelas dari kendali yang sangat ketat yang dilakukan Sultan Iskandar Muda atas bawahan dan penjabat istana bahwa anugerah apa saja yang diberikannya dasarnya adalah kehendak hatinya, dan sama sekali tidak berarti dimaksudkan untuk menjadi anugerah turun temurun atau untuk selama-lamanya. Tampaknya sangat berarti dalam konteks ini bahwa titah raja atau *sarakata,* yang pada abad ke-19 digunakan sebagai bukti hak turun temurun

oleh *ulèëbalang* atas wilayahnya, sampai pada 1660 dilukiskan sebagai titah terbuka yang diberikan oleh raja "sampai dicabut", berbeda dengan *eseuteumi*—titah tertutup yang "absah sepanjang masa".[24] Namun, dalam dekade-dekade setelah ia wafat pada 1636, sifat dari anugerah-anugerah ini tampaknya sudah berubah secara mendasar dan telah menjadi untuk selama-lamanya.

Pilihan pengganti Iskandar Muda merupakan petunjuk dari sikap mendua elite istana mengenai pemerintahannya. Di satu pihak, aura kebesarannya terus bersinar; di pihak lain, tidak seorangpun menginginkan kembalinya pemerintahan teror. Iskandar Muda tampaknya tidak meninggalkan ahli waris lelaki yang sah yang masih hidup, tetapi ia menunjukkan ia sangat menyukai seorang pangeran Melayu tawanan dari Pahang, yang sebagai anak berusia sembilan tahun diizinkan kawin dengan putrinya dan menduduki tempat paling terkemuka di istana. Pangeran dari kerajaan lain ini meneruskan pemerintahannya sebagai Sultan Iskandar Thani, dan pemerintahannya tampaknya aman dan damai dan sejahtera, meski kekuatan luar Aceh *vis-a-vis* Belanda dibiarkannya agak mengalami kemunduran.

Ketika Sultan Iskandar Thani meninggal pada 1641 *orangkaya* kuat berebut-rebutan untuk mendapat posisi selama beberapa hari "karena mereka semua ingin menjadi raja", menurut seorang saksi mata, seorang Belanda.[25] Akhirnya mereka memutuskan untuk menobatkan ratu yang kemalangan, janda Iskandar Thani dan putri Iskandar Muda, sebagai raja perempuan pertama kerajaan itu. Meski dia sangat dihormati sebagai pengambil kata putus dalam hal-hal yang menyangkut kerajaan, kekuasaan Sultana Safiyyat ad-Din Taj alAlam Syah (1641-75) jauh lebih sedikit kekuasaan vis-a-vis setengah lusin lelaki paling berkuasa di kerajaan itu, melebihi kekuasaan ayahnya. Hukuman mati dan hukuman yang mengerikan bagi ketidaksetiaan yang menjadi ciri pemerintahan Iskandar Muda dan bahkan sampai batas tertentu pemerintahan Iskandar Thani tampaknya tidak ada sama sekali dalam gaya pemerintahan raja perempuan itu. Baik sumber-sumber dari dalam maupun sumber-sumber dari luar mengatakan bahwa Aceh di bawah pemerintahan ratu ini sangat tertib dan makmur, dengan iklim yang sangat menguntungkan bagi perdagangan luar negeri.[26] Ketika ia wafat pada 1675 eksperimen dengan perempuan sebagai pemegang kekuasaan tertinggi dianggap demikian berhasil sehingga cara itu diulangi kembali tiga kali lagi. "Istilah raja itu sendiri sudah lama menimbulkan kengeriaan dalam diri mereka, pertama karena pemerintahan tirani raja mereka yang terakhir" [sic] (i.e. satu-satunya dan terakhir—Iskandar Muda).[27] Dengan kata lain, penguasa perempuan tampaknya sudah menjadi sama dengan sebuah

tata politik yang sangat lain, dan menarik bagi para elita terkemuka di ibukota.

Tidak mengherankan karena itu bahwa *orangkaya* terkemuka, yang sebagian besar masuk dalam lingkar kecil istana atau menduduki jabatan tinggi pada akhir pemerintahan Iskandar Muda, enggan kembali ke pemerintahan semacam itu. Pada awal pemerintahan Taj al-Alam, empat dari *orangkaya* ini membentuk semacam dewan pelaksana yang banyak mengambil keputusan politik.[28] Bila pada masa Iskandar Muda berkuasa upeti dari wilayah-wiayah bawahan Aceh dan hasil pajak perdagangan sebagian besar diserahkan kepada istana, sekarang upeti dan hasil pajak perdagangan mulai disalurkan kepada *orangkaya* ini.[29] Laporan-laporan Belanda mencatat bahwa kebebasan bergerak yang besar yang diberikan Ratu kepada *orangkaya* bawahannya menimbulkan konflik di antara mereka, sehingga kekuasaan yang tersisi bagi Sultana berasal dari kemampuannya memainkan dengan hati-hati perimbangan antara dua kelompok besar di istana.[30] Namun, dibelokkannya sumberdaya ke dalam tangan berbagai oligarki, tidak syak lagi mengurangi kemampuan militer Aceh untuk menangkal ancaman yang semakin besar dari pihak Belanda. VOC menjadi kekuatan laut yang dominan di Selat Malaka setelah Malaka ditaklukkannya (1641), dan Aceh tampaknya tidak berdaya untuk menolak tuntutan-tuntutan Belanda, yang dilaksanakan melalui sebuah blokade pada 1647-50, untuk mendapatkan bagian yang besar dari ekspor perak dari Perak dan lada dari Sumatra Barat.[31]

Perlu dikemukakan, konflik antara *orangkaya* dapat menjelaskan perubahan sikap yang terjadi mengenai anugerah raja. Pada 1642, wakil-wakil dagang Belanda melaporkan mengenai sengketa yang timbul antara dua kelompok utama istana mengenai hak atas tanah di wilayah penghasil beras Pidië. Maharaja Sri Maharaja dituduh pesaing-pesaingnya memperoleh sejumlah tanahnya di wilayah itu dengan cara-cara lancung pada masa pemerintahan Sultan Iskandar Thani.[32] Pada akhirnya, Ratu menyelesaikan masalah itu dengan keputusan bahwa hanya tanah yang dianugerahkan oleh ayahnya, Sultan Iskandar Muda, yang diakui sebagai hak tanah yang sah.[33] Dengan kata lain, karisma Sultan besar itu digunakan untuk mendukung sebuah kebijakan yang sangat berbeda daripada kebijakan Sultan itu sendiri—menganugerahkan tanah untuk selama-lamanya dan turun temurun. Sebagian dari sebab diangkatnya penguasa yang relatif lemah pastilah untuk mencegah terulangnya pembantaian dan akibat sampingannya, yakni pembagian ulang anugerah tanah yang terjadi pada pemerintahan al-Mukammil dan Iskandar Muda.

Ulèëbalang dan *orangkaya* yang pernah dianugerahi tanah untuk membantu mereka memenuhi kewajiban mereka kepada raja dalam waktu tidak terlalu lama menjadi penguasa turun temurun di tanah-tanah yang diberikan kepada mereka, dan di mana mungkin mereka selalu menarik hak mereka atas tanah bersangkutan ke belakang hingga ke masa pemerintahan Iskandar Muda. Pada masa *Hikayat Pocut Mohammad,* ditulis pada awal abad ke-18, istilah *ulèëbalang* memiliki arti tersendiri untuk masa itu. Kata itu berarti penguasa turun temurun atas sejumlah *mukim,* yang memerlukan dukungan Sultan atau calon Sultan sebelum suatu tindakan dapat diambil.[34] Banyak dari dinasti turun temurun ini memakai gelar yang menunjukkan bahwa mereka keturunan pejabat-pejabat istana kerajaan—*Maharaja* di Lhokseumawe (Pasai); *Laksamana* di Ndjong (Pidië); *Mantroe* (bahasa Melayu Mantri) di beberapa wilayah di Pidië.

Di atas telah dijelaskan bahwa raja-raja Aceh dari abad ke-16 menunjuk putra-putra mereka sebagai *raja* di negeri-negeri taklukan - Pidië, Pasai, Deli, dan Pariaman. Ini menunjukkan bahwa raja-raja bawahan yang banyak ini tetap, sebagai satu kesatuan, berkedudukan satu tingkat di atas *ulèëbalang* yang mendapat anugerah tanah. Pengangkatan yang terakhir tampaknya dilakukan oleh Iskandar Muda, yang mengangkat putra satu-satunya yang sah sebagai Raja Pidië pada awal kekuasaannya.[35] Iskandar Muda tidak punya toleransi bagi siapapun, termasuk bagi sanak saudaranya, yang membangun landasan kekuasaan cukup besar yang kemungkinan dapat digunakan kemudian untuk menentang dia. Ia karena itu membentuk lembaga *panglima* sebagai alat untuk mengendalikan provinsi-provinsinya. Fungsi utama seorang *panglima* tampaknya adalah memastikan upeti, pajak pelabuhan, dan peraturan niaga yang ditetapkan Iskandar Muda dilaksanakan sepenuh-penuhnya, sehingga sumberdaya pusat-pusat ekspor yang penting-penting mengalir ke pundi-pundi istana. Kita karena itu mendengar bahwa sebagian besar *panglima* di wilayah-wilayah pengekspor lada di pantai barat Aceh. Pada 1621 wilayah pesisir sampai jauh ke selatan ke Padang dikendalikan dengan ketat melalui dua orang *panglima* yang ditempatkan di Tiku dan Pariaman. Beaulieu menceritakan kepada kita bahwa pejabat-pejabat ini diganti setiap tiga tahun untuk memastikan bahwa mereka tidak lepas dari kontrol istana. Ketika menjabat mereka harus melapor secara langsung ke istana setiap tahun.[36] Pada 1633 Inderapura, lebih jauh ke selatan, ditambahkan ke dalam wilayah Aceh dan seorang *panglima* diangkat di situ.[37] *Panglima* lebih banyak lagi diangkat setelah Iskandar Muda meninggal, dan pada tahun 1660-an menurut laporan ada *panglima* di tujuh pelabuhan

pantai barat –Barus, Pasaman, Tiku, Pariaman, Padang, Salida, dan Inderapura.[38] Setiap *panglima* memiliki anak buah, yang terdiri dari dua jurutulis *(kerkun),* satu orang jurutimbang *(penghulu dacing),* dan seorang petugas keamanan pelabuhan *(penghulu kawal),* yang menunjukkan bahwa tugas utama *panglima* adalah mengendalikan perdagangan.[39]

Di provinsi-provinsi di timur ibukota produk ekspor tidak terlalu penting dan peranan *panglima* karena itu tidak terlalu jelas. Perak yang kaya timah di Semenanjung Malaya berada di bawah kekuasaan Aceh selama berpuluh tahun setelah 1620, dan seorang *panglima* Aceh kadang-kadang tampaknya pernah ditempatkan di situ.[40] Namun, di wilayah-wilayah yang tidak berada di bawah kekuasaan Aceh, perhatian tampaknya lebih banyak diberikan kepada memanipulasi *raja* setempat atau kalau perlu mengganti dia. Elite turun temurun Melayu, Minangkabau atau Batak terus memerintah wilayah-wilayah ini bahkan ketika pejabat-pejabat Aceh memegang kendali ketat atas perdagangan ekspor.[41]

Di wilayah-wilayah pedalaman di pantai utara, yang dapat dikatakan pada masa ini telah diserap dari sisi suku ke dalam masyarakat Aceh, *panglima* mungkin dijadikan percobaan untuk menggantikan peran yang pernah diambil alih, di Pidië dan Pasai, oleh pangeran-pangeran kerajaan. Ada sebuah laporan Belanda pada 1649 mengenai seorang "Panglima Pidië" yang menyerahkan kepada Ratu upeti berupa beras, kelapa, gula dan sirih pinang,[42] dan seorang "Panglima Pidië" sebelumnya adalah seorang pahlawan dalam *Hikayat Malem Dagang* yang dikatakan hidup pada masa pemerintahan Iskandar Muda.[43] Namun, di wilayah-wilayah seperti itu, *ulèëbalang* pemegang anugerah tanah tampaknya memiliki hubungan langsung dengan istana, dan karena itu hanya meninggalkan celah kecil saja bagi seorang *panglima.* Dalam beberapa peperangan pada awal abad ke-18 banyak pemimpin wilayah yang memakai gelar *panglima,* yang menunjukkan keturunan salah satu dari pejabat-pejabat pada abad ke-17 ini, tetapi tidak seorangpun memiliki hubungan khusus dengan ibukota.[44] Karena itu tampaknya aman untuk mengasumsikan bahwa *jabatan panglima* sebagai alat untuk mengendalikan provinsi menghilang dengan hilangnya wilayah-wilayah kebun lada pantai barat yang dikuasai Aceh pada tahun 1660-an.

Kemudian, selama dua dekade setelah Iskandar Muda wafat, *ulèëbalang* pemegang anugerah tanah tampaknya sudah menanamkan hak permanen atas wilayah-wilayah yang membentuk beberapa *mukim* di wilayah-wilayah kekuasaan Aceh di pesisir Sumatra Utara. Ketika perniagaan Banda Aceh

(ibukota) dan bagian dari penguasa dalam perniagaan itu keduanya terus mengalami kemunduran, wilayah-wilayah semacam itu pasti menjadi semakin lama semakin penting dibandingkan dengan jabatan di istana. Ekspor lada yang selama ini merupakan kunci bagi kesejahteraan lenyap dengan hilangnya pelabuhan-pelabuhan Pantai Barat dan Deli di bawah Taj al-Alam. Ekspor timah yang menguntungkan dari Perak hilang juga di sekitar masa itu, sehingga menyebabkan Banda Aceh bergantung pada ekspor yang relatif kecil berupa emas, gajah, kuda, dan hasil hutan. Setelah pernah selalu makmur sehingga dapat mengimpor beras bagi penduduk perkotaannya yang besar jumlahnya, Aceh menjelang akhir abad ke-17 harus menaikkan setinggi mungkin produksi bahan makanannya dengan tenaga sendiri—terutama di Lembah Sungai Aceh yang bersebelahan dengan ibukota dan hingga saat itu diabaikan.[45] Ini dengan demikian berarti pula bahwa *ulèëbalang* muncul di situ bersama sejumlah besar anak buah yang berada dibawah kendali mereka, cukup dekat dengan ibukota sehingga dapat mempengaruhi langsung perpolitikan di situ.

Meski ratu pertama dari empat ratu Aceh, Taj al-Alam (1641-75), kuat dan dihormati, halnya tidaklah demikian dengan ratu-ratu selanjutnya yang menggantikanya. Pada 1688, mendekati akhir dari kekuasaan ratu yang ketiga, seorang penyebar agama berkebangsaan Italia mencatat bahwa "mereka tidak lagi memilih raja tetapi Ratu, meski dalam kenyataan kerajaan itu diperintah oleh tujuh orang bangsawan." Sepuluh tahun kemudian, seorang penjelajah Perancis tidak yakin apakah Ratu benar-benar ada, karena kekuasaan terbagi-bagi di antara para bangsawan di istana.[47] Oligarki semacam ini disukai dalam lingkungan dagang kosmopolitan ibukota itu, tetapi para *ulèëbalang* baru di pedalaman semakin tidak dapat menerima oligarki itu. Pemimpin mereka adalah Panglima Polem pertama, konon kabarnya anak tidak sah Sultan Iskandar Muda dan kakak sebapak Taj al-Alam, yang tinggal di Gle Yeueng sekitar 30 km di atas ibukota. Ia dan anak laki-lakinya muncul pada masa pemerintahan oleh ratu perempuan sebagai penentang utama kelanjutannya. Pada setiap kematian ratu perempuan para pengikut mereka menuntut agar tahta diberikan kepada dinasti Panglima Polem ini. Pada 1675, 1678, dan 1688 mereka mengerahkan anak buah mereka dari apa yang kemudian dikenal sebagai *sagi* (sudut) XXII *mukim*, yang terpusat di GleYeueng, ke ibukota dalam upaya yang sia-sia untuk mempengaruhi keputusan mengenai pergantian penguasa.[48] Namun, ketika pemerintahan perempuan akhirnya dihapuskan pada 1699, mahkota diserahkan kepada orang baru keturunan Arab dan kemudian kepada orang baru keturunan Bugis yang bersaing untuk mendapat dukungan dari para

ulèëbalang. Dalam pertarungan-pertarungan ini Panglima Polem tidak menjadi raja tetapi menjadi penentu siapa yang menjadi raja, atau lebih sering penentu siapa yang tidak boleh menjadi raja. Ketika masa yang relatif stabil pulih pada tahun 1730-an, banyak pemeo beredar bahwa Panglima Polem, apakah sendiri,[49] atau bertindak sebagai salah satu dari tiga atau dua belas *ulèëbalang* terkemuka dari wilayah Lembah Aceh (dikenal sebagai Aceh Besar),[50] memiliki "kekuasaan untuk mengangkat dan menurunkan Sultan".

Dalam waktu lebih sedikit dari setengah abad, sebuah otokrasi yang terpusat di sebuah pelabuhan yang makmur telah berubah menjadi kesatuan politik yang tersebar dan terdiri dari bangsawan keturunan yang diikat bersama-sama oleh ingatan bersama dan warisan bersama dari sebuah masa lalu. Sama halnya seperti bahasa sehari-hari Eropa muncul dari dominasi bahasa Latin dengan peralihan ke feodalisme, Aceh muncul pada awal abad ke-18 dari hegemoni Melayu, ketika semua teks yang diketahui ada ditulis pada "zaman keemasan" kesusasteraan yang menyertai otokrasi.[51] Persamaan yang lain dengan peralihan Eropa ke feodalisme adalah mundurnya perbudakan dengan cepat, yang mengandalkan, di otokrasi Aceh seperti halnya di Romawi kuno, budaya perkotaan yang sukses dengan tingkat penyerapan budak baru yang tinggi melalui peperangan.[52] Asimilasi budaya, dengan biaya yang sangat besar untuk memelihara budak, mengubah kelas bawah masyarakat Aceh menjadi petani yang mengerjakan berbagai pekerjaan bagi *ulèëbalang* atasan mereka, tetapi barangkali bukan budak dalam arti istilah ini diartikan dari sisi hukum di Eropa.

Kesimpulan

Perbedaan-perbedaan sosial antara Eropa dan Asia Tenggara cukup jelas sehingga siapa saja akan berhati-hati menggunakan cap "feodal" pada sistem politik tersebar yang kami paparkan di atas. Meski beberapa gambaran klasik dari ciri-ciri kunci feodalisme[53] dapat diterapkan kepada Aceh dan masyarakat Asia Tenggara yang lainnya pada abad ke-18, ada beberapa ciri penting Asia Tenggara yang tetap sangat berbeda [daripada Eropa]—peran otonomi kota, peran otonomi Gereja, dan peran otonomi hukum tidak ada padanannya di Asia Tenggara, misalnya. Kami lebih suka menekankan di sini bahwa sebuah *peralihan* seperti peralihan dari Zaman Purba ke Feodalisme tampaknya telah terjadi di berbagai wilayah Asia Tenggara, pada masa menjelang akhir abad

ke-17. Kepada peralihan-peralihan semacam itulah, bukan kepada penelitian persamaan-persamaan yang statis, perhatian para sejarawan sebaiknya terutama ditujukan.

Peta 4 Pelabuhan-pelabuhan Aceh pada abad ke-18 dan ke-19

JURUSAN GEOGRAFI MANUSIA ANU
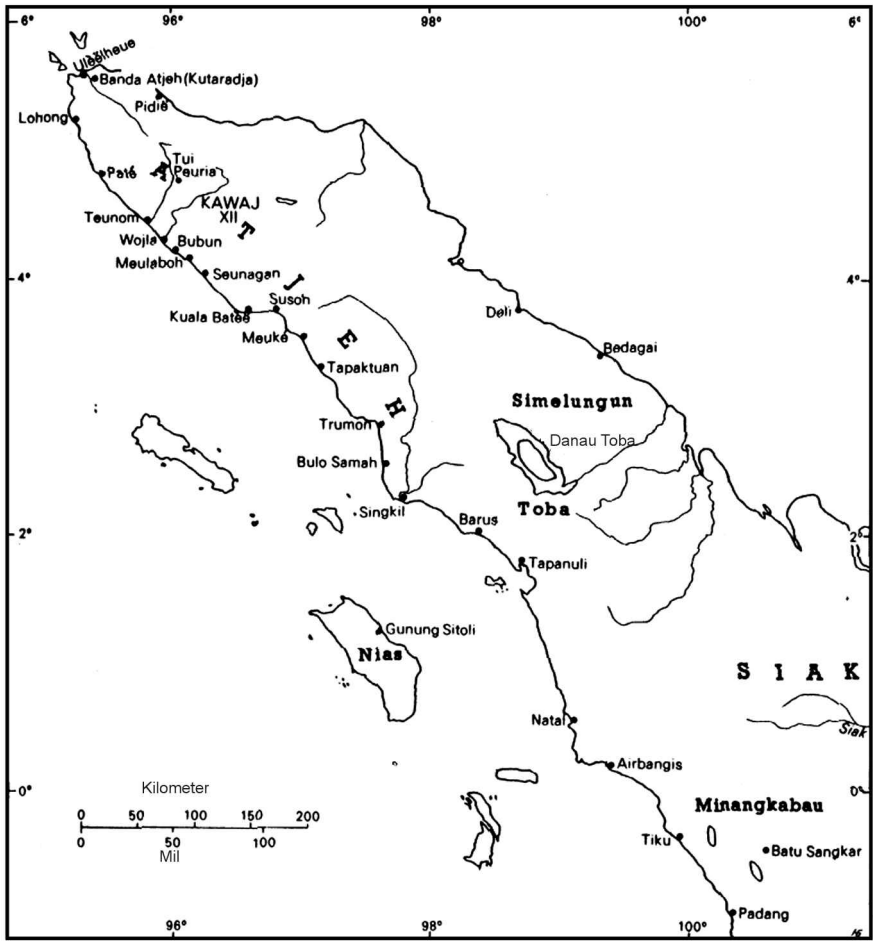
8

Hubungan dengan Prancis

Ketika militer Belanda dalam jumlah besar akhirnya berhasil menaklukkan *dalam* (benteng) Aceh pada Januari 1874, setelah dua pertempuran yang mahal mereka tidak menemukan bukti-bukti dokumen mengenai masa lampau Aceh yang gemilang, dengan kekecualian sepucuk surat yang ditulis dengan tulisan yang indah dalam garis tepi biru dan keemasan dan ditandatangani oleh Louis Philippe dari Prancis dan Menteri Luar Negeri Guizot pada Januari 1843. Konsul Prancis di Batavia memastikan keaslian surat itu, tetapi ia tidak dapat menjelaskan mengapa surat itu dialamatkan kepada Sultan Aceh. Dalam tulisannya empat puluh tahun kemudian, E. S. de Klerck mereproduksi surat itu "sebagai sebuah benda menarik untuk dipandang—surat itu tidak memiliki makna politik apa-apa".[1]

Upaya saat ini untuk menyingkapkan motivasi di balik surat ini, dan kemunculan-kemunculan misterius Prancis lainnya di panggung Sumatra, belum sepenuhnya berhasil menghapuskan kesan semu motivasi itu. Prancis tidak pernah memainkan peranan penting dalam perdagangan rempah-rempah di Kepulauan itu, dan tampak tidak terlalu memahami arti penting kegiatan dagang Portugis, Belanda, dan Inggris di situ. Sadar atau tidak, Prancis tampaknya cenderung lebih tertarik kepada kebijakan dan ikatan-ikatan di daratan Asia. Ambisi yang kadang-kadang mendorong Prancis menyangkut Kepulauan itu cenderung terfokus kepada wilayah-wilayah di kedua ujungnya, Sumatra atau daerah Sulu-Basilan, yang menurut pandangannya melayani kegiatan-kegiatan yang lebih penting di Samudra India dan Cina.

Prakarsa-prakarsa yang diambil di Kepulauan tidak saja didorong oleh hasrat untuk mempertahankan status sebagai kekuatan besar, atau untuk mengejar tujuan-tujuan khayali baik kebendaan maupun rohaniah, tetapi juga oleh perhitungan-perhitungan dengan kepala dingin mengenai manfaat praktis. Kegiatan-kegiatan paling berani setelah beberapa tahun dibiarkan

terlantar kemudian. Kegiatan-kegiatan lebih sederhana (Misi Katolik Prancis di di Malaya, dan beberapa perusahaan dagang kecil), yang memang membangun landasan secara selangkah demi selangkah bagi penyebaran pengaruh Prancis di dunia Melayu, tampaknya tidak mampu merangsang daya cipta Prancis.

Namun demikian, kegiatan-kegiatan di sana sini semacam itu tetap menimbulkan kesan pada beberapa penguasa Indonesia bersangkutan. Pada abad ke-18 dan terutama pada abad ke-19, Prancis tampak dalam mata banyak penguasa Melayu dan Indonesia sebagai kekuatan alternatif dalam menghadapi ancaman dari tetangga mereka, Belanda dan Inggris. Selain itu, Inggris dan Belanda sendiri sering menggunakan ancaman intervensi Prancis sebagai alasan untuk melakukan ekspansi lebih lanjut. Sumbangan jangka panjang Prancis kepada sejarah kolonial Kepulauan Melayu lebih penting dalam bayang-bayang daripada dalam substansi.

Kontak pertama antara Prancis dan dunia Melayu menjadi ciri khas bagi kontak-kontak yang terjadi kemudian, dari sisi keberanian konsepsi dan hasil yang menyedihkan. Parmentier bersaudara yang berbakat dari Dieppe memimpin ekspedisi non-Portugis yang pertama dari Eropa mengitari Tanjung Harapan ke Indonesia. Dengan harapan dapat mencapai Cina, mereka mendarat di Tiku, Pantai Barat Sumatra, pada November 1529. Kedua bersaudara itu meninggal di situ sebulan kemudian, dan tidak ada orang yang mengikuti jejak mereka.[2]

Orang Prancis bergabung dalam gelombang orang Eropa utara abad ke-17 merebut perdagangan lada dan rempah-rempah antar-Indonesia dari tangan pedagang Portugis dan Islam. Sejumlah ekspedisi berlayar dari pelabuhan Breton di St. Malo dan Dieppe pada periode 1601-30, untuk berdagang di pelabuhan Aceh, Banten, dan Makassar. Ekspedisi ini lebih banyak dikenang dari sisi makna budayanya daripada dari sisi makna ekonominya. Ekspedisi yang pertama, terdiri dari dua kapal di bawah Michel Frotet de la Bardeliere, tiba di Aceh dari St. Malo pada 1602. Salah satu pedagang Breton dalam ekspedisi itu, Francois Martin, meninggalkan catatan yang sangat menarik mengenai kesultanan Aceh selama lima bulan dia tinggal di situ, yang sayangnya sangat jarang digunakan dibandingkan dengan catatan-catatan Inggris dan Belanda.[3]

Namun, kesulitan-kesulitan dalam menghadapi dominasi angkatan laut Belanda maupun kerumitan politik wilayah itu dengan cepat mematahkan semangat para pemilik modal yang membiayai ekspedisi itu. Meski sebuah pabrik milik beberapa pedagang St Malo mempertahankan kehadiran yang

lemah di Banten dari 1617 hingga 1684, seorang sejarawan Belanda sampai pada kesimpulan yang benar bahwa VO.C. "tidak banyak dirugikan oleh persaingan dari orang Prancis itu".[4]

Di antara pelayaran-pelayaran awal yang paling ambisius adalah pelayaran Augustin de Beaulieu, yang meninggalkan catatan yang pertama mengenai sepucuk surat dari seorang penguasa Indonesia kepada seorang raja Prancis. Raja Aceh Sultan Iskandar Muda yang perkasa menyambut baik Beaulieu, pada 1621, dan menyerahkan kepadanya sepucuk surat untuk Louis XIII: "Karena Tuhan telah menjadikan kita raja-raja besar di dunia ini, tampaknya masuk akal jika kita bersahabat dan berbicara satu sama lain."[5] Seabad kemudian, istana Prancis kembali mendapat sepucuk surat berbahasa Melayu, dari seorang penguasa Melayu yang berada dalam situasi yang sama sekali lain. Sultan Johor Abdul Jalil diusir dari ibukotanya oleh Raja Kechil pada 1718, tetapi ia bertahan di Trengganu sampai ia tewas dalam tangan musuhnya pada 1721. Dari Trengganu dengan sia-sia ia meminta pertolongan kepada Belanda, Inggris, dan akhirnya Prancis, untuk membantunya memperoleh kembali kedudukannya. Seorang pedagang Inggris, Alexander Hamilton, dan seorang pedagang Prancis, Pierre Villaumont-Gardin, kebetulan singgah di Trengganu pada1719; pedagang Prancis itu sedang dalam perjalanan ke Cina. Ketika Sultan Abdul Jalil tidak didorong oleh Hamilton, ia bertanya kepada Villaumont-Gardin:

> apakah menurut pendapatnya negeri Prancis mungkin dapat diyakinkan untuk menetap di Kerajaannya dan Tuan Prancis itu memberi dia Harapan bahwa Raja Prancis mungkin dapat diyakinkan untuk menerima Persahabatannya, dan menetap di sebuah Koloni, asalkan dia mau menyatakan Permohonannya itu dengan sepucuk Surat, yang segera disetujui oleh Raja Johor.[6]

Surat Sultan, yang menawarkan sebagai imbalan jika dibantu kebebasan sebanyak mungkin bagi warga Prancis "seperti untuk rakyat saya sendiri" untuk berdagang, bermukim, dan mendirikan benteng itu, sekarang disimpan di Bibliotheque Nationale.[7] Surat itu tampaknya sama sekali tidak menarik perhatian orang di Prancis.

Pada saat ini kepentingan Prancis di Asia sudah berkurang hingga hanya terbatas pada perdagangan Asia Timur yang dilakukan oleh *Compagnie de Chine,* kegiatan penyebaran agama oleh Missions Etrangères, Misi Asing, dan di atas semua ini pada pertarungan panjang dan melelahkan dengan Inggris memperebutkan kendali atas India. Pertempuran-pertempuran yang

menentukan pada abad ke-18 untuk hegemoni di Bengal dan Carnatic tergantung kepada kekuatan angkatan laut yang dapat dibangun oleh pihak-pihak yang berhadapan di Teluk Bengal. Karena wilayah pantai Teluk Bengal menjadi tidak aman selama musim muson yang banyak membawa angin ribut selama November-Desember, armada Inggris biasanya "beristirahat" dan dirawat di Bombay. Di pihak lain, armada Prancis berulang kali mundur ke Mergui atau Aceh, dan dari situ mereka dapat kembali untuk bertempur di India sebelum armada Inggris dapat mencapai Ceylon. Paling tidak pada awal 1746 armada Prancis sudah menggunakan Aceh seperti ini.[8] Namun, kunjungan semacam itu yang paling terkenal adalah pada 1782, ketika de Suffren mengatur bertemu di Aceh dengan de Bussy.

Meski kedua armada itu tidak berhasil bertemu di Aceh karena armada de Bussy datang terlambat, armada de Suffren saja pasti sudah merupakan armada paling besar yang pernah membuang sauh di lepas pantai Aceh, dengan delapan kapal dan beberapa ribu prajurit. Sultan yang berkuasa waktu itu, Ala'ad-din (1781-95), yang bisa berbahasa Prancis sedikit dan memiliki pengetahuan yang luas mengenai taktik kemiliteran Prancis, karena ia pernah bekerja selama satu bulan di pangkalan militer Prancis di Ile de France (Mauritius) ketika masih muda.[9] Namun Sultan dan rakyatnya dapat dipahami sangat khawatir mengenai kedatangan armada Prancis itu, karena "mereka belum pernah menyaksikan kekuatan militer yang demikian besar di pelabuhan mereka".[10] Hanya dengan membelanjakan uang banyak-banyak dan mengendalikan dengan ketat awak kapalnya maka de Suffren dapat menghindari permusuhan. Orang Aceh, menurut de Suffren, "sangat cemburu dengan perempuan-perempuan mereka, walau sebenarnya kecantikan mereka tidak terlalu menggoda".[11]

Kunjungan de Suffren yang cemerlang itu merupakan kunjungan terakhir yang mengancam dominasi angkatan laut Inggris dengan serius di Samudra India. Namun, ia terus mengganggu pelayaran Inggris di perairan India dan perairan Indonesia melalui serangan-serangan sekonyong-konyong yang berani yang dilancarkan dari Ile de France. Tidak puas dengan hasil-hasil yang diperoleh dari serangan-serangan atas kapal-kapal dagang Inggris, penyerang-penyerang ini menjarah pabrik-pabrik East India Company di Pantai Barat Sumatra. Sebagian besar pabrik-pabrik itu demikian buruk pertahanannya sehingga dapat direbut untuk dimintai tebusan atau dijarah tanpa kesulitan cukup dengan menggunakan sebuah kapal bersenjata.

Jalan bagi *privateer* [kapal dagang bersenjata] berikutnya ditunjukkan oleh Laksamana Angkatan Laut Comte d'Estaing, selama Perang Tujuh Tahun.

Pada 1760 ia merebut pos utama Inggris di Indonesia, Fort Marlborough (Bengkulu), dan juga serangkaian wilayah bawahannya di sepanjang pantai barat Sumatra. Namun, pasukan pendudukan Prancis demikian menderita karena serangan penyakit sehingga terpaksa meninggalkan Sumatra dalam beberapa bulan.[12]

Pada waktu Perang Revolusi-lah, ketika Angkatan Laut Prancis tidak lagi merupakan kekuatan di Samudra India, Ile de France mendapat reputasi sebagai *nid de corsairs*, sarang perompak lanun, melalui serangan-serangan berani oleh *privateer* seperti oleh Surcouf bersaudara yang terkenal.[13] Satu *privateer* yang pertama-tama terjun ke lapangan ialah Le Même, yang dalam dua ekspedisinya mendapat hasil luar biasa dengan direbutnya Padang pada Desember 1793. Wilayah Belanda yang terkemuka di Sumatra, Padang masih dianggap setia kepada Stadtholder. Le Même meninggalkan Padang setelah dua pekan pendudukan, dengan uang tebusan yang besar dari masyarakat dan orang Cina Padang.[14]

Sebelumnya pada tahun itu juga ada tiga *privateer* dari Ile de France yang menyerang pos-pos Inggris di Bengkulu dan Natal ketika sedang dalam perjalanan ekspedisi, yang gagal, melawan Batavia.” Pada 1794 Natal dan Tapanuli kembali untuk waktu singkat diduduki oleh *privateer*.[16] Ketika perang Napoleon pecah Laksamana Prancis Linois kembali dengan cepat menyerang Sumatra, merebut Bengkulu pada Desember 1803 melalui tipu muslihat memasuki pelabuhan di bawah kibaran bendera palsu. Selama empat hari pendudukan ia membakar gudang-gudang dan semua kapal di pelabuhan yang tidak dapat dibawanya.[17] Bahkan hingga 1809, ketika perimbangan kekuatan angkatan laut sudah nyata-nyata tidak menguntungkan Prancis, Laksamana Hamelin berhasil menghancurkan pos Inggris yang kecil tetapi makmur di Tapanuli, dan membakar dan menjarah seluruh kota.[18]

Kegiatan Prancis yang penuh semangat ini berakhir ketika Inggris merebut Ile de France pada December 1810. Ile de France adalah pangkalan Prancis terakhir dan paling kuat di timur Suez, dan baru dikembalikan kepada Prancis setelah perang usai. Tetangganya Reunion, yang dikembalikan kepada Prancis pada 1815, hanya secara berangsur-angsur dikembangkan sebagai pangkalan alternatif pada 1830-an.

Peluang yang Disia-siakan

Besar dan frekuensi ekspedisi angkatan laut ini pasti membuat Sumatra menjadi

lebih dikenal, paling tidak bagi kalangan Angkatan Laut dan Kolonial Prancis. Namun, mencolok sekali betapa tidak berartinya pengaruh permanen Prancis yang masih tersisa pada abad ke-19. Sejumlah perorangan Prancis, sisa-sisa dari reruntuhan sebuah imperium, tetap tinggal di Sumatra sebagai orang terbuang[19] atau petualang, tetapi Prancis tidak memiliki kekuatan maupun minat untuk memanfaatkan mereka.

Laporan yang paling menimbulkan rasa ingin tahu tetapi tidak dapat dibuktikan kebenarannya mengenai kelangsungan hidup orang perorangan Prancis di Sumatra muncul dalam majalah resmi *Le Moniteur* pada 1858. Menurut laporan itu, beberapa anggota keluarga de Molac berhenti mengabdi pada de Bussy (kemungkinan pada Februari 1783 ketika armadanya singgah di Aceh) untuk tinggal di "bagian yang paling buas dari Sumatra". Mereka mendirikan "sarana-sarana pertanian" yang mengagumkan di pantai, dan akhirnya memperoleh pengaruh yang besar di kalangan orang Batak. Pada tahun 1850-an satu dari keluarga itu konon terpilih sebagai "kepala suku Batak". Meski laporan itu ditolak dengan tegas oleh Konsul Prancis di Padang, fakta yang melandasi laporan itu tetap menimbulkan tanda tanya.[20]

Seperti para petualang itu, "pedagang negeri" Prancis boleh dikatakan tidak memiliki kontak dengan pemerintah mereka pada akhir abad ke-18 dan awal abad ke-19. Berpangkalan di pelabuhan-pelabuhan di pantai Coromandel, mereka memainkan peranan kecil di antara pedagang negeri Inggris Br dan pedagang Chulia (Tamil Muslim) dalam tukar-menukar kain Coromandel dan candu Bengal dengan lada, rempah-rempah, sirih pinang, dan timah dari Kepulauan Melayu. Pedagang-pedagang semacam itu kemudian mendominasi urusan-urusan perniagaan sejumlah kerajaan di Sumatra dan Semenanjung Malaya pada masa itu.

Antara sekitar 1806 dan 1810 sebuah kelompok kecil pedagang negeri "Prancis", bekerja sama dengan erat dengan pedagang Chulia, memperoleh posisi dominan di Kesultanan Aceh. Pemimpin mereka, Francis L'Etoile, dianggap memegang "seluruh kendali atas kerajaan dan memiliki pengaruh yang tidak terbatas atas Raja" tidak lama sebelum ia meninggal pada 1810.[11] Namun, ketakutan Inggris kepadanya tidak beralasan. Jauh daripada bertindak sebagai seorang agen Prancis, L'Etoile telah mengubah kewarganegaraannya dari kewarganegaraan Prancis menjadi kewarganegaraan Denmark di Tranquebar, setelah bekerja beberapa waktu di kapal Prancis, Inggris, dan Denmark. Kebijakannya adalah mencegah kekuatan Barat manapun mendapat tempat berpijak di Aceh, meski dalam keadaan darurat ia tampaknya lebih suka

mengandalkan diri kepada bantuan Inggris daripada bantuan Prancis.[22]

Karena itu, Prancis, kapan pun selama itu, tidak pernah memperoleh keuntungan dari kegiatan yang dilakukan oleh putra-putranya yang liar itu di Sumatra. J.E. Heeres[23] mencatat sebuah rencana Prancis pada awal abad ke-18 untuk menjalin hubungan dagang dengan Aceh. Rencana itu kemudian tampaknya tidak menarik bagi Pemerintah Prancis, tetapi menarik bagi Inggris, bahwa sebuah pangkalan permanen di wilayah Selat Malaka akan sangat berharga bagi operasi angkatan laut di Samudra dan bagi kegiatan dagang intra-Asia. Pertama, nilai tinggi sebuah pangkalan sudah cukup dibuktikan oleh de Suffren; kedua, sudah dibuktikan sejak 1740-an oleh Pierre Poivre yang gesit dan gigih. Orang-orang Prancis terkemuka lainnya, termasuk penakluk Bengkulu, D'Estaing, mendukung pandangan gigih Poivre bahwa selain daripada memperoleh tanam-tanaman rempah-rempah untuk ditanam di Ile de France dan Bourbon, Prancis juga membutuhkan sebuah pangkalan permanen di Asia Tenggara. Hanya ini yang dapat menyediakan barang-barang yang diperlukan untuk perdagangan dengan Cina, dan menghindari terkurasnya uang logam Prancis.[24]

Namun, berbeda dengan Kekuatan-kekuatan yang lain, Prancis tetap lebih suka mencari pangkalan seperti itu di daratan Asia Tenggara. Untuk memenuhi kebutuhan armada Prancis di Teluk Bengali Dupleix menjalin hubungan dengan Burma, yang diperbarui oleh beberapa orang dari para penggantinya.[25] Orang-orang yang memperjuangkan sebuah pelabuhan dagang terbuka untuk melayani perdagangan Cina agak tertarik kepada Vietnam, terutama karena kehadiran penyebar agama Prancis di situ dan anggapan yang salah bahwa pulau-pulau Asia Tenggara sudah berada dalam tangan Spanyol atau Belanda. Kepulauan itu boleh dikatakan tetap tidak masuk hitungan, kecuali ada minat sedikit pada Mindanao dan Sulu pada 1760-an dan 1770-an.[26]

Namun, kekhawatiran berlebihan pada kegiatan Prancis di Selat Malaka mempengaruhi kebijakan Inggris di beberapa bagian yang penting. Selama Perang Kemerdekaan Amerika, kekhawatiran bahwa Prancis mungkin menduduki Aceh, atau menghancurkan Bengkulu sekali lagi, berujung dengan pengangkatan seorang "wakil dagang" Inggris untuk Aceh pada 1784. Meski tidak produktif, langkah ini merupakan langkah yang penting menuju keputusan untuk menduduki Penang dua tahun kemudian.[27]

Pengaruh L'Etoile atas Sultan Jauhar al-Alam yang masih muda itu menimbulkan kekhawatiran baru di pihak Inggris selama Perang Napoleon. Kekhawatiran ini tampaknya terbukti pada Juni 1809 dengan tertangkapnya

di selatan Bengkulu Let. Kol. Leon de la Hussaye, *aide-de-camp* (ajudan) Marshal Daendels di Batavia. Daendels mengutus de la Hussaye ke kerajaan Burma, untuk menyelidiki keuntungan apa yang dapat diperoleh dari rencana-rencana Raja Bodawpaya mengenai Bengal.[28] Begitu lemahnya kekuatan laut Prancis sehingga ia dikirim ke pantai barat Sumatra dengan sebuah perahu kecil Indonesia, yang bocor di mana-mana sehingga terpaksa mendarat dekat Bengkulu. De la Hussaye membawa surat-surat untuk diserahkan kepada Sultan Aceh, kemungkinan dimaksudkan untuk mempermudah dia melanjutkan perjalanannya ke Burma. Namun, ketika tertawan, ia tampaknya berhasil mengelabui Inggris mengenai tujuan dia yang sebenarnya dengan "mengakui" bahwa ia mendapat tugas khusus ke Aceh. Gubernur Penang, Macalister, menulis surat marah-marah kepada Sultan Jauhar melaporkan tertangkapnya "dokumen-dokumen yang membuktikan ada perundingan sedang berlangsung antara Paduka Yang Mulia dengan Prancis".[29] Baru setahun kemudian bahwa misi-misi yang dikirim ke Aceh oleh Pemerintah Penang mengungkapkan tidak berminatnya sama sekali L'Etoile dan rekan-rekannya sesama orang Prancis bahkan pada hal-hal yang berkaitan dengan Prancis.[30]

Tidak diragukan lagi kekhawatiran-kekhawatiran di Penang ini memperkokoh Raffles, ketika pada 1810 ia bersikeras pasukan Inggris harus menduduki Aceh sebagai bagian dari strategi besarnya untuk dunia Melayu." Raffles juga menggunakan momok Prancis lebih luas lagi dalam upayanya untuk mendorong kebijakan Inggris yang lebih bersemangat di Asia Tengggara.

> Bahwa perhatian Pemerintah Prancis tertuju terutama pada Jawa dan Kerajaan-kerajaan Melayu dari saat mereka kehilangan harapan untuk mendapatkan tempat berpijak yang kukuh di Kontinen Hindustan, dapat disimpulkan dari berbagai keadaan, dan salah satu dari ini ialah pengembangan bahasa Melayu di Paris di bawah Professor Langlis yang terkenal itu.[32]

Penilaian Raffles meleset jauh. Ketika Louis-Mathieu Langlès menjadi pengurus pertama *Ecole Spéciale des Langues Orientales Vivantes* yang baru pada 1795, lembaga itu memang dimaksudkan untuk mengajarkan bahasa Melayu di situ. Tetapi kenyataan bahwa baik Langlès maupun orientalis Prancis tampaknya baru berusaha menguasai bahasa itu 40 tahun kemudian merupakan cermin dari terbatasnya minat Prancis.[33]

Kemampuan Prancis yang sudah sangat terbatas di Timur dari Tanjung Harapan Baik lenyap sama sekali dengan ditaklukkannya Ile de France dan

Réunion oleh Inggris pada 1810—dibandingkan dengan ini, penaklukan Jawa hanya tambahan saja. Ile de France, yang ternyata pangkalan yang sangat berbahaya bagi *privateer*, dipertahankan oleh Inggris di bawah nama yang diberikan Belanda kepadanya, Mauritius. Pabrik-pabrik Prancis di India (Pondichéry, Chandernagore) dikembalikan pada 1816 dengan syarat dilarang dilindungi dengan benteng. Jadi satu-satunya pangkalan strategis yang tersisa bagi Prancis di Samudra India hanyalah Reunion, yang diganti namanya menjadi Bourbon oleh kerajaan yang sudah dipulihkan. Bourbon perlahan-lahan dikembangkan menjadi sebuah pangkalan angkatan laut, meski baru menjelang akhir tahun 1830-an Prancis mencoba menggunakannya untuk kembali ke posisi berpengaruh di Asia Tenggara.

Para penyebar agama dan pedagang lada peroranganlah yang memulai kontak yang lebih intensif antara Prancis dengan dunia Melayu pada abad ke-19.

Penyebar Agama Prancis di Sumatra

Société des Missions Etrangères (masyarakat penyebar agama luar negeri), yang dibentuk di Paris pada 1663 sebagai jawaban atas seruan Alexander de Rhodes agar dibentuk lembaga penyebar agama untuk IndoCina dan Siam, bertahan dengan bersusah payah, dan kadang-kadang terputus, di situ sejak itu. Kegiatan pertama penyebar agama Prancis dari lembaga itu dalam dunia Melayu hanyalah perpanjangan kegiatan mereka di Siam. Setelah penyebaran agama dilarang, meski singkat, oleh Raja P'ya Taksin pada 1781, tidak lama sebelum ia meninggal, sebuah stasiun penyebar agama didirikan di Kedah untuk melayani sekitar 80 pengungsi Siam Kristen dari Junk Ceylon (Phuket). Jauh dari melihat hal itu sebagai pintu masu ke dalam dunia Melayu, Vicar Apostolic Coude mengucapkan terima kasih kepada Tuhan atas "berkah berada di Siam, dan atas kehadiran Gereja Siam di Kedah, tempat Tuhan tidak pernah dipuji dalam bahasa itu".[34] Namun, dalam satu tahun Fr. Garnault sudah berharap dapat bekerja di tengah-tengah orang Cina dan orang Melayu. Ketika Inggris menduduki Penang pada 1786, Garnault dengan cepat membuat pulau ini pusat selatan dari parokinya di Bangkok, karena mudah berhubungan dengan daerah itu.[35] Pulau itu memberi kesan dapat menjadi pusat stabilitas dalam lingkungan yang tidak menentu sehingga pada 1806 Penang dipilih sebagai lokasi baru untuk Collège Général, satu-satunya seminari milik Society di Timur Jauh, yang menjalani hidup yang tidak menentu dan berubah-ubah

sejak didirikan di Ayutthaya pada 1665.[36] Namun, keputusan ini datang pada masa paling kritis bagi misi agama Prancis, yang terkungkung dan kehilangan semangat akibat Revolusi anti-pemerintahan-agama. Kadang-kadang itu berarti perjuangan keras untuk mendapatkan tiga pendeta untuk mencakup seluruh dan Semenanjung Malaya. Hanya setelah pemulihan Bourbon dan kebangkitan kembali Katolik pada tahun 1820-an maka baru mungkin bagi misi agama di Penang untuk mempertimbangkan kegiatan-kegiatan baru.

Meski misi agama Prancis terus memperluas kegiatan mereka di antara penduduk non-Melayu Malaya sepanjang abad ke-19, Sumatra adalah bagian pertama dari dunia Melayu yang membangkitkan semangat para penyebar agama. Pada 1826 seorang Vicar Apostolic baru, Florens, mengajukan permohonan untuk memperoleh seorang pendeta untuk dikirim ke Aceh. Gagasan yang tidak biasa ini datang dari uskup Pondichéry, yang pasti mendapat gagasan ini dari mendengar percakapan-percakapan para pedagang lada Prancis.[37] Tetapi pulau Nias yang tersisolasi, dan masih menganut animisme, di lepas pantai barat Sumatra, lebih banyak menarik perhatian serius.

Jean-Baptiste Boucho, yang kemudian menjadi Vicar Apostolic pertama untuk Semenanjung Malaya (1845), dialah, dengan semangatnya yang berapi-api, yang mendorong terwujudnya kegiatan di pulau Nias. Ia menjalin hubungan dengan budak dan bekas-budak Nias tidak lama setelah tiba di Penang pada 1824, dan membaptis sekitar 30 orang dari mereka. Hampir separuh bebas berkat sistem hukum Inggris:

> Tahun lalu beberapa pedagang Cina membawa sejumlah besar orang Nias yang malang ini ke mari untuk dijual; karena perdagangan ini terlarang menurut hukum Inggris para pedagang itu ditangkap dan dimasukkan ke dalam penjara, tetapi untuk menghukum mereka diperlukan saksi, dan hanya orang-orang Nias itu sendiri yang dapat bersaksi. Kesulitannya adalah orang-orang Nias itu karena tidak tahu apa-apa mengenai kehidupan masa depan atau hukuman bagi orang tidak beragama tidak dapat menurut undang-undang disumpah . . . . Tanpa kehilangan waktu, saya minta kepada pemerintah wewenang untuk mengajari orang-orang ini, yang diberikan kepada saya dengan sangat mudah karena pemerintah tidak memiliki cara lain daripada itu untuk membawa masalah ini ke penyelesaian yang adil. Melalui orang Nias yang sudah memeluk agama Kristen, orang-orang Nias yang lainnya diajari demikian baiknya, sehingga pengadilan yang memeriksa mereka di depan juri merasa sangat puas. Semua dibebaskan. Ada 10 anak perempuan dan 3 anak laki-laki. Semua anak perempuan sudah

> menjadi orang Kristen, dan 4 dari mereka menikah dengan 4 orang Cina yang juga baru saja menjadi orang Kristen. Tiga anak laki-laki itu akan dibaptis pada waktu perayaan Pantekosta.[38]

Boucho tidak henti-henti memuji orang-orang Nias itu, "baik, sederhana, setia, dan sangat patuh kepada agama begitu mereka telah menjadi orang Kristen". Dari mereka dia belajar cukup banyak untuk menyusun sebuah kamus bahasa Nias dan menulis beberapa doa dalam bahasa itu. Boucho sangat gembira mengetahui bahwa mereka sudah mempunyai seorang Tuhan pencipta yang maha penyayang, "Laubalangi", meski sebagian besar upacara keagamaan mereka ditujukan untuk mengambil hati roh jahat bernama "Cekhou". Aturan moral mereka sangat ketat, orang tidak setia pada pasangan dan orang yang berzinah dijatuhi hukum mati.[39]

Namun, meski Boucho sangat ingin pergi ke Nias, ia tidak dapat dilepas dari College di Penang, dan tugas itu diberikan kepada dua pendeta muda. Jean-Pierre Vallon, baru saja ditahbis setiba di Penang pada Agustus 1831, menangkap semangat Boucho sebegitu jauh sehingga Vicar Apostolic itu tidak dapat menentang "pengabdian yang demikian jelas" untuk Nias. Rekannya, Jean-Laurent Bérard, tampaknya bergabung dengan misi itu sebagian karena kesulitan-kesulitan yang dialaminya di Penang.[40]

Pada 14 Desember 1831 kedua orang pendeta itu meninggalkan Penang dengan sebuah kapal kecil Melayu milik Raja Trumon, didampingi oleh seorang Nias bernama Francisco dan isterinya Sophie. Perjalanan mereka ke Trumon melalui delapan pelabuhan Aceh sangat lambat dan sulit. *Nakhoda* Melayu dan sejumlah *haji* yang kembali dari Mekkah melakukan apa yang terbaik untuk menjadikan Vallon dan rombongannya orang Islam. Di Trumon mereka menemukan keadaan perang antara Raja dan rakyatnya. Ketika mereka tiba di pelabuhan pertama Belanda, Tapanuli (sekarang Sibolga), seluruh rombongan jauh sakit dan Sophie hilang ingatan.[41]

Rencana semula ialah pergi lebih dahulu ke pusat utama Belanda di Padang, untuk mendirikan sebuah pusat Kristen di antara lima atau enam ribu orang Nias (sebagian besar budak) yang tinggal di Padang. Namun, setelah sehat kembali di Tapanuli dan di wilayah tetangga Natal, Vallon ingin sekali langsung pergi ke Nias daripada mengambil risiko lagi menghadapi berbagai macam kesulitan dalam perjalanan. Karena itu Berard melanjutkan perjalanan seorang diri ke selatan ke Padang.[42]

Tanpa menghiraukan peringatan dari militer Belanda, yang memiliki pengalaman yang sangat buruk di Nias, Vallon berlayar bersama Francisco ke pelabuhan dagang dan budak, Gunung Sitoli, pada Maret 1832. Vallon sempat menambah pengetahuannya mengenai bahasa Nias, melakukan perjalanan melalui beberapa desa dan membaptis sejumlah anak-anak, sebelum meninggal karena sebab yang tidak diketahui pada Juni 1832. Berard, ”sangat terpukul”, mendapat berita sedih ini ketika sedang terbaring karena demam di Natal dan bersiap-siap bergabung dengan rekannya itu.[43] Namun demikian, ia tetap berangkat ke Gunung Sitoli, dan meninggal di situ beberapa hari kemudian. Kedua pendeta itu baru berumur 30 tahun. Seorang pedagang yang baik, tuan rumah Berard di Padang, menceritakan apa yang diketahuinya mengenai kematian mereka:

> Teman-teman kami sudah pandai bercakap bahasa Nias ketika tiba di pulau itu untuk membuat penduduk yang malang itu mengerti bahwa misi mereka sepenuhnya damai—bahwa mereka sama sekali tidak datang untuk menindas mereka—sebaliknya justru, mereka datang untuk kebaikan rohani dan jasmani mereka. Mereka diterima dengan ramah oleh penduduk, yang tidak sejahat seperti dikatakan orang, yang menimbulkan rasa iri di pihak kepala-kepala suku mereka dan kepala-kepala orang Islam, dan, *diperkirakan,* akibatnya mereka diracun.[44]

Tuduhan diracuni ini sangat diragukan oleh pedagang ini, Embrecht. Namun, setelah itu tuduhan ini memperoleh status fakta dalam catatan resmi[45] para pejabat Belanda yang sangat ingin menekankan unsur kekerasan di Nias, dan para pencatat yang taat agama yang mencoba menambahkan unsur martir pada misi heroik kedua pendeta muda itu. Racun tidak disebutkan oleh Lyman dari American Congregation, satu-satunya penyebar agama yang lain yang berada di Nias waktu itu. Lyman berada di Gunung Sitoli dan daerah sekitarnya selama dua pekan pada Juni 1834, tidak lama sebelum kematiannya kemudian di antara orang Batak. Meski dia takut pada ”kutukan . . . paus”, Lyman memberikan gambaran yang simpatik mengenai Vallon dan Berard:

> Mereka, dari semua yang dapat kami pelajari, sederhana, jenaka dan penuh semangat. Gaji mereka hanya seratus dolar Spanyol setahun, dan mereka miskin perlengkapan. Namun, mereka menolak semua bantuan untuk diri mereka sendiri, tetapi dengan senang hati menerima pakaian-pakaian lama dari para perwira, untuk diberikan kepada orang Nias.[46] Satu dari mereka berangkat ke

> Padang,[47] dengan sebuah perahu kecil terbuka, yang, setelah ia menaruh barang-barangnya di dalamnya, hampir tidak punya tempat untuk dirinya sendiri. Ia tiba di Gunung Stollis [Gunung Sitoli], dan diterima dengan baik hati oleh Messam [seorang Kristen dari Tapanuli, penduduk gunung Gunung Sitofi dan menikah dengan seorang bangsawan Nias], yang menawarkan kepadanya rumahnya sendiri. Tetapi ia lebih suka mendirikan sebuah gubuk kecil terbuka, di atas bukit, dekat rumah seorang kepala suku. Ia mengunjungi penduduk, dan memperoleh seorang anak dari kepala suku itu sebagai muridnya; tetapi dalam waktu singkat ia jatuh sakit dan meninggal. Pembantunya juga jatuh sakit, tetapi ia kembali tidak lama kemudian ke Padang, dan tinggal untuk sementara waktu dengan Mr. Embrecht. Orang ini was hardly dead, dan barang-barangnya dibungkus, sebelum orang satu lagi datang, setelah mendarat di Natal, di situ ia mengunjungi stasiun-stasiun Belanda di dataran tinggi. Tetapi demam itu sudah menyerang dia, dan ia baru saja mendarat di Gunong Stolis, dan terbaring selama delapan atau sepuluh hari, dan kemudian menghembuskan napas yang penghabisan.[48]

Société des Missions Etrangères sama sekali tidak putus asa mengenai Nias. Dikirimkannya lebih banyak pendeta Prancis untuk melanjutkan pekerjaan berdasarkan persiapan-persiapan yang lebih baik pada 1834. Namun, masalah-masalah menyangkut wilayah wewenang gereja sudah bermunculan, dan pendeta-pendeta itu berlayar ke Padang via Batavia, di situ mereka terlibat dalam berbagai urusan dengan Vicar Apostolic Belanda untuk Batavia dan dengan birokrasi kolonial. Pastor Katolik Roma baru diizinkan masuk ke India Belanda secara resmi sejak 1808, dan dengan berbagai syarat yang ketat pula. Mereka dilarang menyebarkan agama di antara orang Indonesia yang berada di bawah kekuasaan Belanda. Ketiga pendeta itu dihadapkan kepada tekanan pemerintah yang terus menerus agar mengalihkah perhatian mereka dari Nias ke penduduk Eropa di Sumatra.

Sampai ada prakarsa misi Prancis, tidak ada pendeta Belanda tampaknya yang telah mengunjungi Sumatra. Vallon dan Berard menemukan, lebih dari separuh dari 2.000 atau lebih serdadu Belanda di Sumatra Barat yang dikerahkan dalam Perang "Padri" beragama Katolik Roma, dan mereka terutama berasal dari Belgia. Sebagian besar hidup bersama perempuan Indonesia, tetapi menurut Berard mereka bersedia untuk meresmikan perkawinan mereka jika isteri-isteri mereka dapat diajar dan dibaptis. Undang-undang Belanda tidak mengizinkan perkawinan antara serdadu Belanda dengan orang tidak beragama Kristen.

Berard menghabiskan sekitar tiga bulan mengurus serdadu-serdadu dan perempuan-perempuan mereka sebelum ia perjalanannya yang naas ke Nias. Ia sempat berkunjung jauh ke selatan seperti ke Padang dan Painan untuk menemui serdadu-serdadu dan perempuan-perempuan itu, dan jauh ke pedalaman hingga ke Batu Sangkar, di situ ia mendaki sebuah gunung (Merapi?) dengan kaki telanjang![49] Paroki Eropa yang tersebar ini karena itu menyediakan kesempatan untuk mengalihkan pikiran dari tantangan-tantangan berbahaya di Nias. Entusiasme heroik Vallon dan Berard walaupun begitu tampakya tidak dirasakan begitu oleh orang-orang yang menggantikan mereka. Salah satu dari ketiga pastor itu balik kembali dari Padang ke Batavia untuk meminta uang lebih banyak. Dua orang lagi, Candalph dan Galabert, menerima begitu saja gambaran bermusuhan mengenai Nias yang dberikan oleh para pejabat Belanda yang kecewa:

> tidak mungkin bagi orang asing untuk memasuki pulau itu tanpa berakibat kematian atau paling tidak dijual sebagai budak; dan sampai pulau ini diduduki oleh militer, orang asing manapun yang masuk pulau itu pasti lenyap.[50]

Lebih buruk lagi, Fr. Candalph mengandalkan "metode alternatif yang hampir pasti berhasil untuk membeli budak Nias di Padang untuk dididik menjadi pendeta atau calon orang Kristen". Sementara menunggu persetujuan, Candalph dan Galabert tetap tinggal di Padang melayani orang-orang Katolik Eropa dan membaptis anak-anak luar nikah mereka. Vicar Apostolic Belanda dari Batavia melakukan perjalanan pertama ke Sumatra pada November 1834, dan secara resmi mengangkat Candalph sebagai Vicar Padang. Namun, pendeta-pendeta Prancis itu meninggalkan Sumatra enam bulan kemudian, karena Gubernur-Jenderal Belanda terus menerus menentang kehadiran mereka.[51]

Hubungan dekat dengan kekuatan kolonial yang tidak populer ini berakibat berakhirnya kegiatan penyebaran agama tidak saja oleh misi Prancis tetapi juga oleh semua misi Katolik yang berjalan baik selama ini di Sumatra selama satu abad.

Belanda menduduki Gunung Sitoli pada 1840, dan membawa api dan pedang ke wilayah sekitarnya pada 1863. Tidak mengherankan bahwa proses menjadikan orang Nias orang Kristen, yang dimulai oleh Rhenische (Lutheran) Mission setelah penaklukan itu berjalan sangat lambat.[52]

Pedagang dan Kapal Perang

Pemerintah Prancis tampaknya tidak tahu sama sekali mengenai penyebaran agama di Sumatra itu. Baru setelah terjadi ekspansi yang cepat kegiatan dagang Prancis di wilayah itu pada 1820-an dan 1830-an maka timbul minat serius pejabat pemerintah di Paris.

Menjelang tahun-tahun terakhir abad ke-18, mulai berkembang dengan pesat pertanian lada di wilayah-wilayah bawahan paling selatan Kesultanan Aceh di pantai barat Sumatra. Pada 1820 wilayah ini menghasilkan sekitar separuh dari pasokan lada dunia. Sementara Belanda dan Inggris masih harus bersusah payah untuk memperoleh walau sedikit apa yang masih dapat diperoleh dari kebun-kebun lada mereka jauh di selatan yang terus mengalami kemunduran di bawah kondisi monopoli dan kerja paksa, pedagang-pedagang pribadi berdatangan untuk membeli lada Aceh. Kapal-kapal New England mengambil bagian terbesar, tetapi kapal-kapal Arab, India Penang (Inggris dan Cina), dan Prancis semua ikut pada tahun 1820-an. Pada 1823 empat kapal besar Prancis dilaporkan memuat lada dari pantai itu, dibandingkan dengan 27 kapal Amerika.[53] Dua puluh tahun kemudian Prancis dianggap menduduki tempat ketiga di bawah Amerika dan Inggris. Sembilan atau sepuluh kapal Prancis singgah di Penang setiap tahun, dan sebagian besar dari kapal-kapal ini berlayar ke Aceh untuk memuat lada.[54]

Keberhasilan berdagang di pantai Aceh tergantung kepada kemahiran berbahasa Melayu, kalau tidak berbahasa Aceh, pengetahuan mengenai mana-mana wilayah pantai yang berbahaya dan mengenai pelabuhan-pelabuhan yang kecil-kecil dan banyak sekali, dan hubungan dengan penguasa dan pedagang Aceh yang mengendalikan perdagangan lada. Mereka yang menguasai pengetahuan khusus ini cenderung menghabiskan sebagian besar hidup mereka dalam dunia dagang. Dengan pengembangan Penang sebagai sebuah pelabuhan dagang terbuka mereka sering menggunakannya sebagai pangkalan untuk kunjungan berulang kali ke Aceh dalam setiap satu kali pelayaran dari Prancis. Sebuah contoh diberikan oleh pedagang Prancis yang paling terkenal dan dihormati pada masa itu, Kapen Martin dari Marseilles.[55] Meninggalkan Marseilles pada Maret 1838, ia berlayar ke Sumatra via Bourbon untuk memuat lada yang kemudian dijualnya di Penang. Ia kemudian kembali untuk kembali memuat lada, yang dijualnya di Singapura. Akhirnya ia memuat timah sebanyak 80.000 kg di Penang, mengisi sepertiga palkanya dengan lada di Aceh, dan berlayar

kembali ke Prancis via Bourbon dan tiba di Marseilles pada November 1839—pelayaran yang makan waktu seluruhnya dua puluh bulan.[56]

Kenyataan bahwa ”pantai lada” Aceh terdiri dari banyak sekali wilayah otonomi, yang mengakui kedaulatan Kesultanan Aeeh tetapi tidak mengacuhkan perintahnya, menjadikan pantai lada itu wilayah klasik ”diplomasi kapal perang” barat. Kapten kapal yang menunjukkan kehalusan perasaan, kesabaran dan berlaku adil tidak banyak mengalami kesulitan, dan bahkan dapat berdagang secara kredit, yang menuntut kepercayaan yang tinggi kepada mereka di pihak pedagang-penjual Aceh. Namun, fluktuasi harga yang sangat cepat di pasar yang tidak stabil ini, menimbulkan konflik-konflik yang tidak dapat dipecahkan oleh pemegang wewenang politik manapun. Sedikit sekali orang asing yang menyukai kontrol terpusat, apakah oleh Aceh atau pemerintah kolonial, yang mungkin menetapkan pembatasan-pembatasan atas perdagangan mereka. Sebaliknya, jalan akhir yang akan mereka tempuh jika diserang ketika sedang berdagang di Aceh adalah meminta angkatan laut masing-masing untuk menghancurkan desa tempat serangan terjadi. Sebagai sebuah "sistem" perlindungan perdagangan cara seperti itu jelas sewenang-wenang dan biadab, tetapi paling tidak kerusakan yang ditimbulkannya tidak banyak, jika dilakukan secara besar-besaran. Orang Aceh selalu mundur ke pedalaman sampai kapal perang yang menuntut balas bersangkutan telah selesai melakukan penghancuran, dan mendirikan kembali rumah-rumah kayu mereka secepatnya ketika kapal perang itu meninggalkan tempat itu.

Kapal-kapal perang Inggris dan Belanda sudah lama menggunakan cara ini di dunia Melayu, bahkan juga di bagian-bagian lain pantai Aceh. Namun, orang Amerikalah yang memperkenalkan bentuk hukuman ini kepada perdagangan lada di Aceh Barat. Kapal-kapal Amerika menghancurkan desa pantai Kuala Batèë pada 1826, dan desa ini kembali diserang bersama desa tetangga Meuké (Muckie) pada 1838, sebagai balasan atas pembunuhan Kapten Endicot dan Kapten Wilkins. Tidak lama setelah kejadian yang kedua ini, pada Mei 1839, Kapten Prancis Van Tseghem dari Nantes luka parah kena tusukan dalam sebuah perkelahian dengan seorang pedagang kaya Aceh di Meuke. Gubernur Bourbon, tempat Prancis sekarang menghadirkan angkatan laut yang kuat, dengan segera mengirimkan *La Dordogne* untuk membakar Meuke, yang baru saja akan mulai berdiri kembali setelah baru saja diserang kapal perang Amerika.

Dengan tindakan yang merusak ini mulailah sebuah periode singkat kebangkitan minat resmi Prancis kepada pantai lada Aceh Barat. Tempat ini

dikunjungi oleh empat kapal perang dari Bourbon setelah bertahun-tahun [tidak ada kunjungan]. Sebagian besar dorongan untuk ini datang dari laporan-laporan Kapten Martin mengenai peristiwa Van Tseghem, pertama kepada Gubernur Bourbon dan kemudian kepada para pejabat angkatan laut di Prancis. Setelah menguraikan serangan-serangan atas Wilkins, Endicot dan Van Tseghem, Martin meneruskan,

> Apakah bukan tidak sebaiknya kita secara sewajarnya mengambil kesimpulan . . . bahwa mereka adalah orang-orang yang kejam, dengan siapa semua hubungan harus diputuskan? Namun, adalah kasus bahwa kita akan melakukan kesalahan dalam menganggap mereka demikian. Saya bukannya ingin menjadi pembela mereka atau apologis, tetapi saya sampai pada kesimpulan dan saya berhasil membuktikan melalui pengalaman bahwa dalam proporsi terhadap penduduknya Pantai Barat Sumatra tidak memberikan lebih banyak lagi orang-orang yang berniat jahat dibandingkan dengan bagian-bagian lain dari India. Kapten Wilkins dan Kapten Endicot dibunuh menunut perintah Raja-raja; dan mereka tidak akan memerintahkan perbuatan biadab ini tanpa sebelumnya menanyakan dan memohon kepada kapten-kapten ini sediri, selama beberapa tahun, untuk tidak berperilaku menipu, memuat separuh muatan mereka pada malam hari. Sedangkan mengenai peristiwa Kapten Van Tseghem, tidak ada perencanaan terlebih dahulu di pihak Raja; ini hanyalah akibat yang disayangkan dari sebuah perkelahian.[57]

Martin menyarankan, sebagai ganti membakar desa pasar, yang menyebabkan kerugian yang tidak besar pada orang Aceh, kapal perang sebaiknya merebut dan menghancurkan kapal-kapal milik pelabuhan yang bersalah, yang selalu penuh bermuatan senjata dan uang. Di sisi positif, kapten itu menyarankan agar Prancis memanfaatkan ketakutan orang Aceh di sekitar Meuke atas balasan yang akan menimpa untuk menuntut penutupan bagian dari pantai itu untuk perdagangan. Orang Aceh, menurut dia, yakin bahwa orang Prancis, berbeda dengan orang Amerika yang masih hijau, "pertama dari antara orang-orang kulit putih", akan menjatuhkan hukuman yang berat. Selain itu, serangan-serangan Belanda atas permukiman-permukiman orang Aceh di perbatasan tidak jauh ke selatan pantai lada ini memperlihatkan dengan jelas perluya perlindungan bagi semua.[58]

Gubernur Bourbon menerima saran-saran Martin dengan gembira, dan ia mengirimkan kapal layar *Le Lancier* beberapa bulan di belakang *La Dordogne* untuk memperagakan bendera Prancis di pantai Aceh dan

menyelidiki kemungkinan mendirikan semacam pangkalan di situ. Menekankan perdagangan Prancis di dunia Melayu yang tidak berkembang, dan ekspansi cepat wilayah-wilayah Inggris dan Belanda di situ, ia mendesak Paris untuk bergerak dengan cepat untuk mendirikan sebuah pangkalan di wilayah Sumatra yang belum diduduki oleh Belanda.[59]

Peluang ini datang kepada Prancis pada saat hidupnya kembali minat besar pada Timur Jauh pada umumnya dan pada dunia Melayu khususnya. Sementara kekuatan ekonomi dan angkatan lautnya berangsur-angsur pulih, Prancis sangat khawatir melihat begitu jauh dan terus meningkatnya dominasi dagang Inggris di Timur. Pemerintah-pemerintah yang "sudah hampir putus asa" yang memerintah Prancis setelah 1830 untuk membangkitkan kembali status internasional Prancis sebagai kekuatan besar menimbulkan hasrat yang tidak biasa untuk memberikan bantuan kepada pedagang dan misi agama Prancis.[60] Demikian terbatasnya peranan Prancis saat itu dalam perdagangan Asia sehingga para pedagang lada di pantai Aceh mengucapkan rasa syukur atas keadaan itu. Di Bourbon, Kamar Dagang mengaku dengan tersipu-sipu bahwa Prancis mendominasi perdagangan di pantai Sumatra.[61]

Tidak ada yang lebih menyadarkan Prancis mengenai nilai yang terus meningkat dari perdagangan Timur Jauh, dan peranan kunci yang dimainkan Singapura dalam perdagangan ini untuk Inggris, daripada kegiatan Adolphe Barrot sebagai Konsul Prancis pertama di Manila (1835-8). Ia ternyata seorang promotor piawai untuk perdagangan di Asia Tenggara. Mengambil cuti pada 1839 ia berhasil meyakinkan Pemerintahnya dan sejumlah perusahaan dagang terkemuka di seluruh Prancis untuk menerima sebuah strategi besar untuk berkecimpung ke dalam dunia perdagangan yang sedang tumbuh pesat di Timur. Ia dikirim kembali sebagai Konsul Jenderal untuk "Indochine" (seluruh Asia Tenggara), berkantor pusat di Manila. Wakilnya Eugene Chaigneau, seorang veteran perundingan-perundingan panjang dan sia-sia di Annam, berkantor di Singapura, tempat ia baru saja memperoleh *exequatur,* hak-hak istimewa, sebagai Konsul Prancis yang pertama sampai pada 1840. Belanda tidak mengizinkan Konsul di Batavia, tetapi Barrot mengangkat seorang pedagang Prancis di situ sebagai "koresponden". Seorang agen lain ditempatkan di Macao. Dari semua sumber ini, tetapi terutama dari Chaigneau di Singapura, dihasilkan arus informasi mengenai kemungkinan-kemungkinan dagang di wilayah itu. Namun, Barrot dan Chaigneau sepakat bahwa cara yang terbaik untuk bersaing dengan Inggris di Singapura dan Belanda di Batavia ialah mendirikan sebuah pangkalan Prancis di perairan Asia Tenggara.[62]

Selama beberapa bulan setelah diterimanya laporan Martin dan laporan Gubernur Bourbon, kemungkinan untuk memperoleh wilayah di Sumatra bagi angkatan laut dan dagang Prancis dipertimbangkan dengan serius di Paris. Namun, pada awal 1841, Kementerian-kementerian terkait (Luar negeri, Angkatan Laut dan Koloni, Perdagangan) semua sepakat bahwa ini tidak dapat dijalankan mengingat hubungan baik Prancis dengan Belanda, yang sudah "mengaku punya hak . . . bagi pendudukan seluruh Sumatra".[63] Perhatian diarahkan lebih jauh ke Timur, tempat Perang Candu akan segera membuka Perjanjian Pelabuhan di Cina, yang berarti semua perdagangan akan di arahkan ke situ. Berbagai kemungkinan untuk pangkalan dipertimbangkan di tepi-tepi wilayah kekuasaan Belanda dan Spanyol di Kepulauan Melayu—Sulu, Basilan, Sumbawa, Borneo, dan juga Pulo Condore atau Tourane di Vietnam. Ketika upaya besar-besaran Lagrene untuk menduduki Basilan untuk Prancis berakhir dengan kekalahan besar pada 1845, perhatian Prancis beralih sama sekali dari Kepulauan itu ke daratan Asia Timur. Prancis menjadi semakin jauh terlibat dalam peristiwa-peristiwa di Vietnam dan Cina, dan penaklukan Saigon pada 1859 menjadi *point d'appui*, titik tumpu, yang dibutuhkan untuk perdagangan Prancis di situ.

Periode perhatian resmi Prancis pada dunia Melayu dengan demikian boleh dikatakan singkat, antara sekitar 1839 dan 1845. Namun, prakarsa-prakarsa yang diambil selama periode ini memiliki makna yang bertahan lama. Seksi Melayu yang diabaikan pada awal abad itu akhirnya dikukuhkan pada 1844, sebagai hasil dari sikap Menteri Luar Negeri yang bersikeras mengenai perlunya "mengembangkan di Prancis pengajaran bahasa Melayu, sebuah bahasa yang demikian luas digunakan, dari Tanjung Harapan hingga New Guinea dan utara Filipina", terutama ketika Prancis sedang terlibat dalam upaya memperkuat hubungan dagang dan politiknya dengan Asia Tenggara.[64] Edouard Dulaurier, ahli budaya Arab yang minatnya telah beralih ke Malaya saat berkunjung ke London pada 1838, dengan demikian menjadi satu dari profesor pertama bahasa itu di negeri manapun. Sepanjang sisa abad ke-19, dia dan para penggantinya Favre dan Marre menyulap Oriental Languages School di Paris menjadi salah satu pusat penelitian Melayu terkemuka di dunia.[65]

Hubungan Resmi antara Aceh dan Prancis

Pengalihan perhatian resmi Prancis dari Sumatra ke Basilan dan kemudian ke Indo-Cina tidak mencegah berkembangnya minat yang semakin besar di pihak

Aceh kepada negeri yang berpotensi menjadi sekutu baru ini. Orang Aceh tidak dapat tidak terkesan oleh rangkaian kapal-kapal perang Prancis yang tiba-tiba melindungi para pedagang lada Prancis antara 1839 dan 1843. Kunjungan pertama tidak terlalu bersahabat. *La Dordogne* menghancurkan Meuke pada 1839, dan *Le Lancier* melakukan hal yang sama atas Seunagan pada Februari 1840 setelah pembunuhan di situ atas perwira sebuah kapal dagang Marseilles *Comte de Paris*.[66] Serangan kedua ini, sebelum ada usaha apapun dilakukan untuk menyelidiki penyebab pembunuhan itu, menurut laporan menimbulkan amarah besar Sultan Aceh pada periode itu, Ala'ad-din Mansur Shah, yang lebih umum dikenal sebagai Ibrahim (1838-70).[67]

Di pihak lain, Kapten Martin, dalam kunjungan ke ibukota Aceh pada Agustus 1840, berhasil menyakinkan Sultan itu bahwa hukuman atas Seunagan tidak pernah disetujui oleh Bourbon dan sama sekali tidak mencerminkan permusuhan resmi Prancis terhadap Aceh. Bahkan Gubernur Bourbon mengirimkan kapal perang *La Magicienne* ke Seunagan pada September 1840, semata-mata untuk tujuan memulihkan hubungan baik yang terputus oleh serangan yang terlalu tergesa-gesa oleh *Le Lancier*.[68]

Sebelum *La Magicienne* tiba, Sultan Ibrahim sudah memberikan kepada Kapten Martin sepucuk surat untuk Raja Louis-Philippe, "yang memerintah kota Marseilles dengan adil". Sultan memohon sebuah persekutuan antara Prancis dan Aceh yang ia dengar pernah ada pada zaman kakeknya.[69] Ia mencoba menghidupkan kembali persekutuan khayali ini mengingat kemajuan Belanda yang tampaknya tidak terbendung di Pantai Barat, di situ mereka telah menguasai Singkil dan Barus (1839-40). Ibrahim yakin:

> kami akan harus bertempur melawan Belanda karena mereka ingin menduduki Kerajaan kami. Namun, dengan bantuan Tuhan, kami tidak akan menyerahkan kepada mereka sejengkal tanah pun dari Kerajaan kami. Apa yang menjadi kekhawatiran kami terutama dalam hal ini ialah kemampuan Belanda di laut, sedangkan kami tidak memiliki pengetahuan bagaimana bertempur di situ. Kami karena itu datang kepada tuan untuk meminta bantuan dari kawan kami. . . . Jika dia membantu kami merebut kemenangan, kami akan memberi dia sebuah pangkalan di mana saja yang ia sukai.
>
> Kami memberi tahu lebih lanjut kepada kawan kami, mengenai kapal-kapal dagang yang datang dari Kerajaan Prancis, yang berada di bawah perintahnya, bahwa ia hendaknya memerintahkan kapal-kapal dagang itu untuk berkunjung ke Kerajaan kami [yaitu ibukota, Banda Aceh] agar kami dapat memberi mereka

> izin dan kemudahan untuk berlayar ke mana saja mereka ingin berdagang. Jika, setelah tiba di Aceh, mereka kemudian dirampok, kami berjanji dengan resmi akan bertanggung jawab pada mereka senilai semua barang yang hilang. Inilah yang ingin saya sampaikan kepada sekutu kami yang perkasa.[70]

Tuntutan Ibrahim bahwa kekuatan-kekuatan Eropa mengakui kedaulatan raja Aceh, dan bukan menyelesaikan persoalan langsung dengan wilayah-wilayah bawahannya, merupakan tuntutan yang konsisten sepanjang abad ke-19. Meski sepenuhnya berhak mengatakan hal ini kepada orang Prancis, Inggris, Amerika dan Belanda, namun Sultan itu terlalu lemah untuk menegakkannya. Bagi para pedagang Barat, lebih baik bagi mereka untuk menghindari tersangkut paut dengan Kesultanan itu dan untuk tetap bebas mengadu domba wilayah-wilayah bawahan penghasil lada yang tidak berdaya di Pantai Barat itu satu sama lain. Orang Amerika, meski nilai perdagangannya dengan Aceh sangat tinggi selama paruh pertama abad ke-19, tampaknya tidak pernah memiliki hubungan resmi dengan Kesultanan pada periode ini. Prancis sama halnya lebih suka menghindari ibukota itu hingga setelah menerima surat Ibrahim. Baru pada Februari 1843 korvet La *Fortune* singgah di Banda Aceh dalam rangka penelitian mendalam atas Sumatra Utara dan Pegu, atas perintah Menteri Angkatan Laut dan Koloni. Gubernur Bourbon juga menugaskan komandan korvet, Le Comte, untuk mendorong perdagangan Prancis, terutama dengan mengupayakan agar Aceh mau menerima uang logam lima franc Prancis untuk perdagangan.

Dalam perjalanan keliling pendahuluannya ke pelabuhan-pelabuhan Pantai Barat Le Comte berkali-kali diminta berhubungan dengan ibukota mengenai persoalan mata uang—terutama, sebagai cara yang santun untuk menghindari keharusan menjelaskan kesulitan-kesulitan dalam menerima uang logam Prancis, dibandingkan dengan dollar perak Spanyol yang populer. Di satu pihak, ia mendapati bahwa para penguasa di wilayah-wilayah terdekat dengan benteng Belanda di Singkil lebih mengharapkan lagi daripada yang sudah-sudah perlindungan dari Prancis. Bulo Samah dan Trumon, tempat pemuka-pemuka masyarakat Singkil menetap setelah gagal mempertahankannya, sangat benci kepada Belanda:

> Mereka mengatakan kepada saya bahwa hasrat mereka yang terbesar adalah bahwa Prancis membawa mereka ke bawah perlindungannya, dan bahwa mereka ingin menjadi orang Prancis.[71]

Di Banda Aceh Le Comte diterima secara resmi tetapi dengan dingin. Sultan Ibrahim berusaha melakukan yang terbaik agar uang logam Prancis dapat diterima, dan menjawab sambutan Le Comte atas nama Gubernur Bourbon dengan kata-kata:

> *Bahwa sebelumnya* sudah ada hubungan baik persahabatan antara negeri dia dan Prancis, dan bahwa tidak tergantung kepada dia untuk menghidupkannya kembali.[72]

Masalah serangan atas Seunagan secara halus dikesampingkan pada waktu pertemuan Le Comte dengan Sultan di istana pada Februari 25. Namun, pada hari berikutnya, Shahbandar dan sekretaris Sultan menjelaskan kepada Le Comte bahwa Ibrahim tetap sangat marah mengenai serangan atas Seunagan, dan mengulangi tuntutannya bahwa kapal-kapal Prancis singgah dulu di Banda Aceh sebelum berdagang di sepanjang pantai.[73]

Le Comte sebenarnya dapat lebih banyak mendapat hasil seandainya dia membawa beberapa jawaban atas surat Sultan Ibrahim 1840. Namun, sejalan dengan kesewenang-wenangan yang tampaknya menjadi ciri semua tindakan Prancis di Sumatra, sebuah jawaban baru disiapkan pada Januari 1843, ketika La *Fortune* sudah dalam perjalanan menuju Aceh. Louis-Philippe sendiri kemudian menandatangani sepucuk surat yang santun yang mengungkapkan hasratnya untuk menjalin hubungan yang lebih erat, dan untuk mendapatkan perlindungan terus menerus dari Sultan bagi kapal-kapal dagang Prancis.[74]

Ibrahim sudah biasa menerima surat dari Gubernur Inggris di Straits Settlements, atau dari Gubernur Belanda di Padang. Ini adalah untuk pertama kali bahwa dia, atau siapa saja dari pendahulunya sejak abad ke-17, mendapat surat yang bersahabat dari seorang Kepala Negara Eropa. Tidak mengherankan jika surat yang mengesankan itu, yang tampaknya disampaikan dengan sebuah kapal perang, merupakan satu dari sejumlah kecil dokumen yang disimpan dengan baik di istana Aceh sampai penaklukan oleh Belanda pada 1874. Juga tampaknya itulah mendorong Ibrahim untuk melihat Prancis yang tidak banyak dikenalnya itu sebagai barangkali negeri yang berpotensi menjadi sekutu yang paling menjanjikan.

Jauh sebelum raja Prancis menandatangani surat ini, Quai d'Orsay, Kementerian Luar Negeri, sudah memutuskan menolak kemungkinan mendirikan pangkalan angkatan laut di Aceh. Namun, periode minat resmi pemerintah yang singkat pada Aceh ini telah menimbulkan kesan pada

sejumlah pedagang lada Prancis, yang mungkin selain itu telah didekati oleh Sultan ketika mereka berkunjung ke Banda Aceh. Pada 1845 Noel Berchou dari Nantes, seorang pedagang lada Aceh selama 15 tahun, menghidupkan kembali gagasan itu dengan kementerian luar negeri. Ia mengaku memiliki pengaruh besar di Aceh, dan Sultan dan bawahan-bawahannya "sudah sering menyatakan kepada saya hasrat mereka untuk berada di bawah perlindungan Raja Prancis".[75] Berchou dengan sopan ditolak, dan tampaknya semakin lama semakin putus asa pada tahun berikut, ketika Menteri Pertanian dan Perdagangan diberitahu bahwa Berchou berencana "menjual" kepentingannya di Aceh kepada Inggris, karena telah ditolak oleh pemerintahnya sendiri.[76]

Sultan Ibrahim baru menjawab surat Louis-Philippe secara resmi pada awal 1849. Memanfaatkan rencana Muhammad Ghauth untuk naik haji ke Mekkah, kemenakan kaya *ulèëbalang* Meulaboh yang masih ada hubungan keluarga dengan istana, Ibrahim mempercayakan kepada dia dua misi lebih lanjut yang penting. Ia ditugaskan membawa ke Constantinople sebuah permohonan untuk dukungan diplomasi dan militer berdasarkan hubungan batin dan keagamaan yang kuat antara Aceh dan Turki. Bersamaan dengan itu ia ditugaskan pula untuk melakukan perjalanan ke Paris untuk menyerahkan sepucuk surat kepada Louis Napoleon, yang disebutnya "Paduka Sri Sultan Republic Peranchis".

Surat Ibrahim kepada Presiden Prancis dibuka dengan ucapan terima kasih atas surat Louis Philippe, menjanjikan bahwa uang logam Prancis akan diterima, dan mengulang kembali permohonan bahwa pedagang Prancis singgah terlebih dahulu di Banda Aceh untuk memperoleh surat jalan. Tetapi Ibrahim memiliki hasrat sendiri yang sangat mendesak:

> Mohon paduka beri kami sebuah kapal perang atau jika mungkin dua, agar kami dapat mengenadalikan penduduk di setiap wilayah dan kota. Jika ada kapal perang semua uleebalang pasti akan takut kepada saya. Mengenai pembayaran untuk kapal ini kami memiliki barang yang diperlukan, tetapi kami ingin mengundurkan pembayaran jika mungkin selama dua tahun. Bila batas waktu ini telah berakhir kami akan membayar paduka harga kapal itu. Mohon dipastikan kapal disertai lengkap dengan perlengkapannya.
>
> Selain dari itu, kami memohon bantuan, karena negeri kami telah diduduki oleh Belanda. Ada dua atau tiga kota, mulai dengan Airbangis dan terus ke Singkil dan juga ke pulau Nias, yang telah diduduki oleh Belanda karena wilayah-wilayah ini agak jauh dari Aceh. Semoga dengan doa paduka dan keputusan paduka Belanda dapat diusir keluar dari semua wilayah ini.

Surat Sultan itu diakhiri dengan pernyataan percaya penuh kepada Muhammad Ghauth sebagai duta besar berkuasa penuh.[77]

Tugas Muhammad Ghauth di istana Prancis dan istana Turki memberikan hasil yang memuaskan. Kedua istana tampaknya sangat gembira mendapat bukti mengenai status internasional masing-masing dari negeri yang sangat jauh itu. Utusan itu melanjutkan perjalanan dari Mekkah ke Constantinople sekitar 1850, dan Sultan Abdul Mejid sangat puas dengan pengakuan yang dibawa Ghaut dari "vassal" yang demikian jauh. Sultan Turki menerbitkan dua *firman* yang memperbarui "perlindungan" lamanya atas Aceh. Untuk memperlancar perjalanannya pulang, Muhammad Ghauth diberi surat pengantar untuk Khedive di Mesir, sementara Gubernur Turki di Yaman diperintahkan untuk mengirimkan utusan itu selanjutnya ke Aceh.[78]

Penerimaan oleh kerajaan ini tidak memungkinkan Muhammad Gauth pergi ke Paris, selain di samping ada pula kesulitan-kesulitan lain menyangkut uang dan bahasa. Karena itu, ketika di Cairo dalam perjalanannya pulang pada 1852, ia mempercayakan surat Sultan Ibrahim kepada Konsul Prancis, bersama permintaan maaf karena "tidak dapat datang sendiri".[79]

Namun, Louis Napoleon jelas merasa dilambungkan flattered mendapat surat dari kerajaan timur yang tidak jelas ini, terutama dalam bahasa Prancis tinggi hasil terjemahan orientalis Desgranges dari surat berbahasa asli yang bisasa saja.[80] Ia menyetujui perjalanan Ghauth ke Paris sebagai tamu pemerintah, sementara 5.000 franc disisihkan untuk uang belanjanya di Prancis.[81]

Apakah utusan itu masih di Cairo ketika mendapat jawaban ini tidak jelas. Namun, orang Aceh yang memanfaatkan tawaran ini, yang didampingi ke sekeliling Paris oleh para pejabat Kementerian Luar Negeri, dan yang akhirnya diterima oleh Pangeran-Presiden itu pada 31 Oktober 1852, jelas bukan Muhammad Ghauth. Dia adalah Teuku Nyak Adum, penulis muda Muhammad Gauth, yang dikenal di Prancis sebagai Sidi Muhammad. Barangkali orang Prancis tidak peduli. Yang jelas, mereka tidak menyadari kesalahan ini sampai setelah tamu itu meninggalkan Prancis. Sementara itu Teuku Nyak Adum dan temannya orang Aceh tinggal di Prancis atas biaya pemerintah Prancis selama hampir satu tahun, sebelum kemudian dikirim kembali ke Aceh pada Januari 1853 dengan sebilah pedang yang indah sebagai kenang-kenangan dari Napoleon untuk Sultan Ibrahim.

Peristiwa ini tentu saja menimbulkan kekhawatiran di Hague, Belanda, yang tidak terbiasa dengan perlakuan-perlakuan istana sarat upacara semacam

itu. Belanda tidak perlu khawatir. Seperti disampaikan kepada mereka, kunjungan orang Aceh itu semata-mata soal "barang aneh".[82] Makna politiknya hanyalah hiasan eksotik yang dimaksudkan dari semula bagi istana Pangeran-President—yang tidak lama lagi akan menjadi Maharaja.

Kehormatan untuk membawa "Sidi Muhammad" kembali ke Sumatra diberikan, pada Januari 1853, kepada Noel Berchou, pedagang lada dari Nantes yang sebelumnya mengaku memiliki pengaruh di Aceh. Ia semakin curiga mengenai identitas utusan itu, dan akhirnya mengetahui identitasnya yang sebenarnya ketika tiba di Aceh. Berchou tampaknya kecewa, ia mengeluh bahwa "Sidi" itu bahkan mencoba menipunya dalam perdagangan lada.[83]

Peristiwa Sidi Muhammad mengakhiri hubungan resmi Prancis dengan penguasa-penguasa bebas di Sumatra. Seperti penyebar agama sebelumnya, Pemerintah Prancis sejak itu menjalankan hubungannya sepenuhnya melalui Belanda sebagai penguasa. Pada 1856 seorang Konsul Prancis penuh waktu untuk Sumatra dikirim ke tempat kedudukan Gubernur Belanda di Padang, lebih dari tiga puluh tahun lebih awal daripada konsul asing lainnya di pulau itu. Pengangkatan ke sebuah kota benteng kecil Belanda pasti bermula dari kepentingan dengan perdagangan lada Aceh pada dekade sebelumnya. Namun, menjadi ciri khusus hubungan Prancis dengan Sumatra, bahwa satu-satunya periode perwakilan resmi Prancis juga merupakan periode yang sepi keterlibatan Prancis. Selama tahun 1850-an kapal-kapal lada Prancis boleh dikatakan tidak lagi mengunjungi Sumatra karena pasar bagi lada Aceh pindah ke Penang, dan dilayani oleh pelayaran kapal uap terjadwal. Sampai penghapusan Konsulat itu pada 1865, konsul-konsul yang berturut-turut bertugas di situ tidak memiliki kegiatan lain untuk mengisi waktu mereka selain daripada kadang-kadang melaporkan kegiatan militer Belanda dan percekcokan terus-menerus dengan Belanda untuk mendapatkan hak-hak istimewa diplomatik mereka.[84] Tugas untuk membangkitkan kembali kepentingan dagang Prancis jelas sia-sia. Konsul terakhir dan paling menarik, Le Comte A. de Pina, mengatakan bahwa kebijakan Belanda menyebabkan tidak mungkin bagi pedagang Eropa manapun untuk bertahan hidup di wilayah-wilayah milik Belanda di Sumatra.[85]

Meski de Pina mengumpulkan sejumlah bahan yang menarik mengenai Sumatra, hanya setelah bangkitnya kembali minat Prancis selama tahun 1870-an maka ia dapat menemukan penerbit untuk bahan-bahan itu. Buku itu sangat menarik, terutama bab akhirnya, yang menceritakan perjuangannya untuk mengembangkan bahasa Melayu sebagai *lingua franca* besar bagi Asia. Prancis, kata de Pina, seharusnya mendorong bahasa Melayu, bukannya berusaha

menguasai bahasa Vietnam, Thai, dan Cina:

> perluas bahasa itu di wilayah-wilayah milik kita di Asia Timur, dorong orang mempelajarinya di rumah, dan jadikan bahasa wajib bagi pejabat yang ditugaskan ke wilayah kolonial.[86]

Perang Aceh-Belanda, 1873

Minat yang ditunjukkan Prancis kepada Aceh pada awal tahun 1850-an tidak dapat dipegang, sama seperti minat Turki. Kedua negeri itu telah lupa pada kehadiran Aceh dalam beberapa tahun. Tetapi meski tidak ada hubungan yang berkesinambungan, Aceh terus saja menganggap kedua Kekuatan ini sebagai sumber berpotensi paling menjanjikan bagi bantuan melawan Belanda. Pada sekitar 1862 Sultan Ibrahim meminta seorang petualang Italia di istananya, Cesar Moreno, untuk menyelidiki dengan segera kemungkinan bagi sebuah perjanjian pertahanan melawan Belanda.[87] Ketika Habib Abdur-Rahman az-Zahir datang untuk memimpin urusan hubungan luar negeri Aceh setelah 1870, kembali Prancis dan Turki yang juga dilihatnya dengan penuh harapan. Habib itu bahkan mengatakan dalam memoarnya ia telah dua kali mengunjungi Prancis, sekali ketika masih muda dan sekali lagi ketika dikirim sebagai utusan Aceh pada 1873.[88]

Ketika pada November 1872 menjadi jelas bagi para pemimpin Aceh bahwa Belanda bertekad menegakkan kekuasaannya atas Aceh apapun caranya, ada kegiatan diplomasi yang melonjak dengan tiba-tiba. Anak emas kerajaan Muhammad Tibang dikirim ke Singapura untuk memperlambat gerak gerik Belanda sambil mendekati wakil-wakil kekuatan-kekuatan utama Eropa. Inggris sudah jelas ternyata mengecewakan. Arti penting Prancis bagi Aceh tercermin dari kenyataan bahwa Tibang membawa sepucuk surat kerajaan khusus dialamatkan kepada Konsul Prancis, dan sepucuk surat terbuka untuk para konsul dari kekuatan-kekuatan Eropa yang lain. Namun Tibang tampaknya berhasil diyakinkan di Singapura untuk melupakan Konsul Prancis yang tidak simpatik dan sebagai gantinya mendekati Konsul Amerika.[89]

Tidak lama setelah Habib Abdur-Rahman az-Zahir, wali raja Aceh, tiba di Penang dengan kapal uap Prancis *Patty* milik temannya Edouard Roura. Awal Januari 1873 ia berangkat dengan sebuah kapal uap pos ke Jeddah dan Eropa, dan sengaja membiarkan tersebar berita bahwa ia bermaksud meminta bantuan kepada pemerintah Prancis dan pemerintah Turki. Ketika Belanda menyatakan perang atas Aceh pada 26 Maret ia masih tetap belum beranjak

dari Mekkah. Pemikirannya yang pertama ketika mendengar tentang serangan Belanda tampaknya ialah untuk pergi ke Prancis, dan Konsul Prancis di Jeddah melaporkan pada awal April bahwa Habib sedang dalam perjalanan ke Paris.[90] Namun, seperti Tibang ia tampaknya dengan cepat telah mengetahui apa sikap Prancis yang sebenarnya, barangkali di Cairo, dan ia memutuskan kemudian untuk memusatkan perhatian semata-mata kepada Turki.

Dalam suasana panik yang timbul di pihak Belanda sebelum pernyataan perang atas Aceh, dan lebih-lebih lagi setelah ekspedisi Belanda mundur dari Aceh karena kalah pada 25 April, sedikit saja ada petunjuk mengenai adanya dukungan kekuatan asing bagi Aceh diberitakan dengan sangat berlebih-lebihan. Prancis, bersama Italia, Amerika, Turki, dan Inggris, untuk sementara dicurigai. Tetapi dari semua ini, Prancis-lah yang berusaha sekuat tenaga untuk meyakinkan Hague mengenai dukungan penuh Prancis untuk perang itu. Sementara Inggris dan Amerika berusaha mengejar status netral, Presiden Thiers menulis surat pribadi kepada Hague untuk menyampaikan doanya, "semoga militer Belanda berhasil menegakkan dominasinya yang sah di Indies". Dia menambahkan, jika "Sultan Aceh mempunyai pikiran untuk menghubungi kami, dia serta merta akan kami tolak".[91]

Sesuai dengan kebijakan ini, pengganti Thier MacMahon menolak membalas sebuah permohonan tertulis tertanggal Juli 1873 dari Teuku Paya, seorang pemimpin Aceh di Penang, yang mengeluhkan tuduhan-tuduhan palsu Belanda. Surat itu dengan segera diperlihatkan kepada Pemerintah Belanda.[92] Dutabesar Prancis di Constantinople, sama halnya, diinstruksikan untuk menyarankan kepada Turki untuk membatalkan rencananya untuk menjadi penengah dalam perang itu.[93]

Setelah akhirnya mendapatkan kembali perannya sebagai sebuah kekuatan kolonial di Asia, Prancis tidak lagi berminat bermain mata dengan wilayah-wilayah tepi wilayah kekuasaan Belanda. Pemerintah Prancis sekarang tidak melihat kepentingan khusus bagi Prancis di Sumatra Utara selain daripada "kekacauan akibat perompakan", yang ditakutinya akan menjadi kenyataan jika Aceh menang.[94] Kebijakan ini karena itu dilandaskan sepenuhnya pada persahabatan dengan Belanda dan "solidaritas di antara semua negeri di Eropa dalam kaitan dengan kebijakan masing-masing mengenai dunia timur", untuk memastikan bahwa "prestise" Eropa dapat terus dipertahankan.[95]

Gerakan Geografi

Bagi pemerintah-pemerintah Prancis tahun 1870-an strategi Kontinental sangat penting artinya. Mengejar rencana-rencana kolonial yang efektif harus dikorbankan untuk memenuhi tuntutan yang menyita seluruh tenaga dan waktu untuk menghapus penghinaan 1871, dan menyembuhkan luka-luka komune Paris. Sentimen masyarakat luas sepenuhnya menentang penghamburan sumberdaya untuk koloni yang mahal karena lebih baik digunakan untuk tujuan ketahanan kehidupan nasional di Eropa.

Di pihak lain, sebuah minoritas intelektual dan pengusaha memberikan reaksi yang sangat berbeda, mereka mencari kehidupan di luar negeri untuk keluar dari bencana yang diderita di Eropa. Kendaraan untuk pandangan semacam itu adalah gerakan geografi. Himpunan-himpunan geografi berkembang biak di seluruh Eropa pada tahun 1870-an, tetapi di Prancis gerakan itu menjadi sebuah kegiatan yang mencandu. *Société de Géographie* di Paris yang selama ini tertutup membuka jalan dengan mengumumkan pada 1871 akan tidak lagi membatasi diri kepada penelitian murni semata-mata, tetapi akan mengejar kepentingan-kepentingan yang lebih mendesak yaitu membuktikan sebuah peranan baru dan berhasil di negeri asing bagi perusahaan Peranis. Dalam tiga tahun jumlah anggota himpunan itu naik dua kali lipat, dan sebelum akhir dekade himpunan itu telah mencakup puluhan himpunan geografi di provinsi-provinsi. Kiat yang digunakan untuk mengembangkan himpunan-himpunan ini bersifat campuran, seperti kata Mackay, yakni "harga diri nasional, kepentingan ilmiah, dan kemakmuran ekonomi".[96] Orang Prancis harus dibangkitkan kesadarannya mengenai peluang yang menyilaukan bagi perdagangan dan bagi upaya memajukan peradaban yang menunggu mereka di Afrika dan di Timur. Dengan mendukung eksplorasi dan kolonisasi, orang Prancis mengabdi ilmu pengetahuan, perdagangan dan Tanah Air sekaligus.

Satu dari buah yang paling menarik dari gerakan ini adalah *Société de Géographie Commerciale*, yang dihasilkan sebuah komisi yang dibentuk pada 1874 oleh *Société de Géeographie* di satu pihak dan Kamar Dagang Paris di pihak lain. Pada 1876 himpunan ini telah dapat berdiri di atas kaki sendiri, dan mengabdikan diri kepada ilmu pengetahuan mutakhir mengenai tempat-tempat di luar negeri untuk digunakan oleh perusahaan Prancis. Di antara proyek-proyeknya ialah menyiapkan sebuah peta bumi yang menunjukkan setiap tempat orang Prancis tinggal dan pemerintah Prancis diwakili.[97]

Meski perhatian utama dari gerakan ini ditujukan kepada Afrika, peluang-peluang untuk Prancis di Timur Jauh tidak dilupakan. Kegiatan yang paling ambisius di Asia yang muncul dari *Société de Géeographie* Paris adalah pembentukan sebuah kelompok kerja yang dinamakan *colons explorateurs,* untuk mendirikan sebuah koloni dagang percobaan di Timur sebagai pangkalan untuk penelitian ilmiah dan kegiatan dagang lebih lanjut. Pendiri dan pembangkit semangat proyek ini, Brau de St.-Pol Lias,[98] mengumumkan manifesto kelompok ini sebagai berikut:

> cara sebenarnya untuk mempelajari sebuah negeri dengan serius adalah mendukung eksplorasi wilayah-wilayah koloni yang memungkinkan kegiatan itu memperoleh seluruh waktu yang diperlukannya, kesinambungan yang dituntutnya, keamanan yang harus dinikmatinya; sama halnya, cara memanen semua hasil eksplorasi adalah memperluas eksplorasi ke segala penjuru, menempatkan, mengikuti para peneliti, penghuni koloni sebagai barisan depan, yang dapat mengambil manfaat dari temuan-temuan para peneliti, dan berurat berakar di tempat-tempat yang telah mereka masuki, dan mendorong mereka menjelajahi wilayah lebih luas lagi.[99]

Semangat Brau de St.-Pol Lias bagi kebangkitan kembali Prancis yang ekspansionis tidak mengenal batas dan menjalar dengan cepat ke mana-mana. Satu dari pengambil prakarsa bagi pembentukan *Sociéte de Géographie Commerciale,* ia yakin bahwa Prancis dapat kembali ke tempat terhormat di antara bangsa-bangsa hanya dengan mengobarkan semangat baru dalam kancah penjelajahan di luar negeri:

> Kolonisasi adalah batu loncatan yang paling efekfif dari mana kekuatan rakyat dapat disegarkan kembali. Kolonisasi tidak saja menghasilkan kekayaan: ia membuat manusia bersemangat dan energik; ia menempa karakter.[100]

Ia tidak henti-hentinya mengecam argumen bahwa orang Prancis tidak memiliki bakat untuk kolonisasi, atau kemampuan menyesuaikan diri pada bahasa dan adat istiadat asing. Setiap contoh yang tidak mendukung argumen ini ditonjolkannya dalam bukunya. Menurut dia, menggunakan dengan menarik logika berpikir Hobson, bukan hanya kebutuhan akan tempat untuk membuang kelebihan manufaktur saja yang menyebabkan Eropa perlu memperoleh koloni di Asia, tetapi juga masalah kelebihan bakat, pendidikan dan kepemimpinan.

Orang-orang yang terampil, "karena tidak memiliki kegiatan di rumah . . . akhirya melakukan hal-hal yang tidak terarah".[101] Kekurangan yang membawa bencana bagi Prancis bukan bakat, tetapi kebijakan kolonial yang tegas.

Namun, berbeda dengan rekan-rekannya dalam gerakan geografi, perhatian Brau tidak terbatas pada ekspansi wilayah Prancis. Kolonisasi bagi dia adalah pekerjaan individu dan perusahaan dan juga pemerintah. Prancis, seperti Jerman sebelumnya, akan mendapat manfaat dari kegiatan dagang putra-putranya di koloni-koloni asing. Sama halnya, seperti Belanda, Prancis akan mendapat manfaat bila memiliki wilayah kolonial sekalipun wilayah itu dieksploitasi oleh orang asing.[102] Meski jengkel pada Inggris yang terus berupaya membatasi ekspansi Prancis sementara memperluas wilayahya sendiri, Brau sebenarnya adalah seorang yang berorientasi pada Eropa sebagai kesatuan dalam pendekatannya pada kolonisasi. Kecaman-kecamannya yang sangat pahit kepada Inggris disebabkan oleh sikap Inggris yang menolak kerja sama dalam rangka "patriotisme de race", patriotisme ras, yang menjadi visinya bagi Eropa dalam berhadapan dengan Asia.[103]

Karena itu kegiatan dagang pertama Brau ditujukan kepada wilayah-wilayah terbaru dan tampaknya kaya milik Belanda dan Inggris, bukan wilayah milik Prancis. Brau melihat dirinya sebagai seorang pelopor Prancis di perbatasan kolonial, yang upaya-upayanya akan menghasilkan kekayaan, prestise, dan stimulus yang bertambah besar bagi kegiatan luar negeri, bagi Prancis tanpa harus memperluas wilayahnya.

Sebagai pangkalan percobaan awal untuk *colons explorateurs* Brau memilih wilayah perkebunan baru yang sedang tumbuh pesat di Sumatra Timur, yang terpusat di sekitar kesultanan kecil Deli. Bahwa wilayah ini sangat cocok untuk bertanam tembakau telah dibuktikan satu dekade yang lalu oleh pekebun Belanda Nienhuys. Meski banyak orang yang mengundurkan diri, Brau akhirnya berhasil mengumpulkan setengah lusin orang Prancis yang entusias, yang menanamkan modal masing-masing untuk ekspedisi dengan mereka sendiri sebagai anggotanya. Ada seorang ahli teknik pertambangan muda, Wallon; bahkan seorang yang lebih muda lagi, "ahli pertanian", Tabel, dan asistennya; seorang dokter; dan beberapa non-spesialis. Setelah dua bulan di Jawa untuk memperoleh dukungan resmi Belanda yang diperlukan, mereka berhasil menentukan perbatasan sebuah perkebunan pada bulan-bulan menjelang akhir 1876. Konsesi mereka terletak jauh di Bedagai, berbatasan dengan Batu Bara dan wilayah Batak Simelungun. Pada waktu itu bagian selatanlah yang dikenal sebagai perbatasan perkebunan tembakau Deli.[104]

Selama dua tahun perkebunan tembakau ini, yang dibuka dari hutan perawan di Bedagai, terus digarap. Panen pertama baik, yang kedua mengecewakan. Tetapi bukan kegiatan rutin dan terus menerus—mencari pekerja, menanam, dan memanen yang menarik hati orang-orang Prancis romantik ini, tetapi harapan akan menemukan sesuatu. Dalam enam bulan sejak kedatangan mereka, *colons explorateurs* itu sudah saling bermusuhan bersaing satu sama lain mengejar emas Sumatra yang sngat terkenal itu.

Mencari Emas Aceh

Emas terdapat di banyak titik di punggung pegunungan yang membujur di sisi barat Sumatra, dan telah digali pada masa lampau. Bagi penjelajah Portugis yang pertama Minangkabau merupakan wilayah yang paling terkenal sebagai penghasil emas. Lebih jauh ke utara, Aceh juga menggali emas aluvial di punggung pegunungan itu sejak setidak-tidaknya abad ke-17. Wilayah terkaya di Aceh adalah federasi *ulèëbalang* yang dikenal sebagai Kawaj XII, di hulu sungai Teunom dan sungai Wojla, yang penduduknya sebagian besar bekerja mendulang emas sampai pertumbuhan produksi lada yang cepat pada abad ke-19 menarik mereka lebih dekat ke pantai Barat. Sekitar 1840 penguasa Seunagan, lebih jauh ke selatan, juga mendorong 200 orang Cina untuk bekerja menambang emas aluvial di wilayah hulu sungai miliknya, meski upaya mereka akhirnya gagal akibat penyakit.[105] Bahwa ada emas di wilayah-wilayah ini tidak pernah menjadi rahasia. Pada 1877 sebuah brosur diterbitkan di Amsterdam yang mengatakan bahwa emas di punggung pegunungan Sumatra punya potensi sekaya tambang emas California dan Australia, tetapi karena telah digali selama berabad-abad penambang yang tidak sunggu-sungguh tidak akan mendapat hasil apa-apa dari situ.[106] Namun, kekalahan-kekalahan besar yang diderita Belanda dan luas diberitakan dalam upayanya mencoba menaklukkan Aceh setelah 1873 cenderung semakin menggelembungkan gambaran tentang kekayaan berlimpah yang menunggu sang penakluk.

Minat *colons-explorateurs* pada emas di Aceh Barat barangkali dibangkitkan oleh Edouard Roura, satu-satunya kapten kapal Prancis yang masih beroperasi di perairan Sumatra. Meski keturunan Spanyol Roura masuk menjadi warganegara Prancis di Marseilles, dan sudah berdagang di Aceh sejak tahun 1850-an dengan pangkalan di Penang. Pada waktu pecah perang Aceh ia dipandang sebagai pedagang Eropa yang paling banyak tahu mengenai Aceh, ia pandai berbahasa Aceh dan memiliki hubungan erat dengan *ulèëbalang*

dari wilayah-wilayah penghasil lada di Pantai Barat—terutama Paté. Habib Abdur-Rahman, wali raja Aceh, adalah temannya. Belanda mengambil hatinya dengan membebaskan dia secara khusus dari blokade Belanda, dan kemudian menyewa kapalnya *Patty,* sebagai imbalan bagi informasinya dan pengaruhnya. Tetapi Roura tahu sekali mengenai tekad Aceh untuk menentang habis-habisan sehingga tidak selalu mengikuti keinginan Belanda. Ia terus menekankan perlunya mengadakan perundingan, dan semakin lama semakin tidak disukai oleh pemerintah yang bertekad mencapai kemenangan militer itu. Pada 1876 ia merasa sangat kecewa dengan Belanda, karena menurut dia imbalan yang diberikan Belanda atas kerugian yang dideritanya dalam perdagangan lada dan atas bantuan yang telah diberikannya, tidak memadai.

Selama bulan-bulan pertama 1877 ahli teknik pertambangan *colons-explorateurs,* Wallon, berkeliling Teunom dan Woyla, barangkali dibantu oleh Roura yang berlayar ke pantai itu pada akhir Januari.[107] Wallon pasti paling tidak mendapat dukungan dari Teuku Imam Muda dari Teunom, *ulèëbalang* paling terkemuka di wilayah itu, yang baru saja berunding dengan Belanda mengenai penyerahan dirinya.

Meskipun ia tidak berhasil dalam kunjungan kali ini memecahkan masalah air yang menyusup ke dalam galian-galian tambang percobaannya, Wallon sangat ingin kembali untuk menggali emas Aceh yang terkenal itu.[108] Ia segera menyusun rencana bagi sebuah ekspedisi besar atas biayanya sendiri, yang menimbulkan silang pendapat yang tajam dengan Brau de St.-Pol Lias, "dengan akibat berakhirnya semua hubungan antara kami".[109] Pada November 1877 Wallon berhasil mendapat dukungan modal sendiri di Paris dan kembali ke Singapura dengan seorang ahli teknik yang lain, Moulle, dan seorang pengusaha, Pillard. Dalam upaya yang kurang matang untuk memperdayakan Belanda, kelompok itu menyatakan akan pergi ke Aceh Barat untuk membeli lada dan mendirikan sebuah perusahaan pertanian. Tampaknya mereka berpikir dangkal bahwa jika mereka berhasil merundingkan persetujuan mineral dengan penguasa setempat, Belanda akan terpaksa meski dengan enggan menerima didahului oleh mereka untuk menguasai kekayaan berlimpah ruah yang mereka bayangkan terdapat di situ.

Dalam kenyataan para pejabat Belanda di Aceh Barat bukan tidak tahu mengenai tujuan Wallon yang sebenarnya, dan memuji upaya yang dilakukannya.[110] Namun, orang-orang Prancis itu tidak diizinkan masuk wilayah Teumon pada akhir 1877, yang sangat mengecewakan mereka, karena Belanda tidak dapat sedikitpun menjamin keamanan mereka.[111]

Colons-explorateurs tidak berhasil menyelesaikan perselisihan di antara mereka mengenai emas. Brau meninggalkan perkebunan Sumatra Timur dan kembali ke Paris sekitar Maret 1877. Ia berharap dapat mengumpulkan modal tambahan untuk digunakannya di perkebunan itu sebagai pangkalan untuk menggali emas Aceh Barat. Namun, ia tidak dapat lagi mengendalikan *colons-explorateurs* yang lain, yang sudah menyumbangkan uang mereka sendiri masing-masing dan mengharapkan peranan yang jauh lebih besar bagi mereka daripada bertanam tembakau. Sebagian besar anggota kelompok itu satu per satu mundur dan kembali ke Prancis. Brau gagal mengumpulkan dana di Paris untuk mmbiayai Tabel, dan ketika uangnya sendiri habis pada 1878 pangkalan percobaan itu terpaksai ditutup. Tabel tetap tinggal di Deli sebagai asisten kepala pada satu-satunya perkebunan Prancis yang lain di Sumatra—milik dua bersaudara De Guigné, dari Reunion.[112] Pada 1886 Tabel mengumpulkan dana di Paris untuk himpunannya sendiri, *Société de tabac de Deli,* tetapi ini juga gagal setelah beberapa tahun karena lokasi konsesinya yang buruk.[113]

Pengalaman dengan *colons-explorateurs* banya mengubah teori-teori kolonial Brau. Asumsi-asumsi romantik, yang telah mendorong *colons* yang pertama menyatukan sumberdaya dan energi mereka, sekarang tampak tidak realistis sama sekali bagi sebuah operasi permanen perusahaan. Di atas semua ini, *colons-explorateurs* gagal memperkokoh wewenang pemimpin mereka dengan modal yang berasal dari satu sumber. Karena itu tujuan yang dikejar haruslah pembentukan *Compagnie coloniale d'études et de préparation d'entreprises commerciales, industrielles, et agricoles* yang besar, sama dengan Chartered Companies Inggris besar-besar yang sedang dibentuk pada waktu itu.[114]

Pada awal 1880 Brau berhasil paling tidak membentuk "embrio perusahaan ini", dengan tujuannya membuktikan bahwa gagasan barunya dapat dilaksanakan.[115] Namun, laba yang paling besar sekarang tampaknya berada di bidang pertambangan mineral, bukan di bidang pertanian. Teman Brau satu-satunya karena itu seorang ahli teknik pertambangan, M.J. Errington de la Croix, yang mendampinginya ketika dia meninggalkan Toulon pada Januari 1880. Tujuan pertama adalah emas Aceh, "satu dari negeri-negeri terkaya di dunia, dan paling sedikit yang diketahui tentangnya".[116] Jika ini gagal, mereka akan melakukan eksplorasi timah Malaya atau mineral Borneo.

Meski kondisi di Aceh Barat hampir tidak banyak bedanya pada 1880 dibandingkan dengan pada 1877, sikap Belanda telah berubah. Sangat kekurangan tenaga manusia, uang, dan tekad nasional untuk terus melakukan pembunuhan atas orang Aceh, Belanda sangat ingin membuktikan kepada

dirinya sendiri dan kepada dunia, walaupun bukti-bukti menunjukkan lain, bahwa perang benar-benar sudah usai.[117] Menjawab peryataan-pernyataan Belanda mengenai hal ini, kelompok Brau dan kelompok Wallon pada akhir 1879 mulai berlomba-lomba mencapai *eldorado* yang terlarang hingga saat itu di Aceh Barat.

Wallon berusaha sekuat tenaga keluar sebagai pemenang. Didampingi oleh Guilhaume, seorang ahli teknik tambang yang lain, dan Courret, putra pemodal utama kelompoknya, ia tiba di Singapura beberapa pekan sebelum Brau. Setelah periode singkat mendapatkan persetujuan yang diperlukan di Batavia, Wallon berlayar dengan sebuah kapal uap ke Padang dan kemudian dengan sebuah perahu kecil Aceh berlayar dari situ ke utara ke Meulaboh, tidak mengikuti rute biasa via Penang dan Ulèëlheuë. Ketika Brau dan Errington de la Croix tiba di Singapura pada 1 Maret 1880, kelompok Wallon sudah berada di Meulaboh.

Hubungan Wallon dengan pejabat Belanda merupakan gambaran kasar hubungan Brau dengan para pejabat Belanda. Brau dan Errington, meski resmi diberi kepercayaan oleh Kementerian Pendidikan Umum untuk menjalankan sebuah *mission scientifique,* misi ilmiah, menjelaskan kepada pejabat Belanda bahwa mereka menganggap mencari kegiatan ekonomi yang menguntungkan sebagai tujuan yang lebih penting dari perjalanan mereka.[118] Wallon tidak memiliki surat keterangan misi ilmiah seperti ini tetapi berpura-pura bahwa ia buru-buru mencapai Aceh dan melakukan eksplorasi di wilayah-wilayah yang mengandung emas karena ”didorong oleh cinta yang amat dalam kepada ilmu pengetahuan”.[119] Konsul Prancis khawatir jika hal ini tercium, Wallon akan menyebabkan Prancis menderita malu besar, terutama karena dia menyelundupkan sejumlah senjata sebagai hadiah bagi *raja* yang diinginkannya untuk menandatangani kesepakatan dengan dia.[120] Namun, pejabat Belanda tampaknya telah memutuskan untuk membiarkan kedua kelompok dari Prancis itu memainkan permainan mereka.

Meski menderita akibat pelayaran mereka yang menyengsarakan dari Padang, Wallon dan Guilhaume bermalam beberapa hari saja di pos Belanda di Meulaboh. Namun Courret, karena sakitnya terlalu parah tidak dapat meneruskan perjalanan bersama mereka ke Bubun, Teunom dan Woyla. Wallon berunding di Woyla dengan Teuku Dy-Blanc, satu dari *ulèëbalang* yang mengendalikan wilayah emas itu, tetapi dia menginginkan lebih dari seperlima dari pemasukan yang ditawarkan Wallon kepadanya. Wallon kemudian memutuskan untuk melakukan eksplorasi di wilayah hulu Teunom. Teuku

Imam, *ulèëbalang* berpengaruh Teunom, mencoba membujuk Wallon untuk menunggu sampai ia sendiri dapat mendampingi mereka. Gagal dalam hal ini, ia menugaskan beberapa anak buahnya untuk memuluskan jalan setapak di antara penduduk dataran tinggi yang penuh kecurigaan. Ini sia-sia belaka. Seorang yang disebut Panglima Lam Ara dari wilayah Kawaj XII membunuh Wallon dan Guilhaume di Tui Peuria, dua hari perjalanan ke hulu sungai Teunom, pada 11 Maret. "Kalian penduduk pesisir sudah menjadi orang *kafir*", katanya kepada orang-orang Aceh yang menemani Wallon, dengan membedakan secara halus orang *kafir* Belanda dengan orang *kafir* Prancis.[121]

Jauh daripada mengakhiri upaya Prancis untuk mencari emas Aceh, kematian kedua penjelajah nekat itu malahan semakin memperkuat keyakinan rekan-rekan mereka bahwa buah terlarang itu nikmatnya tidak ada bandingannya di dunia. Brau dan Errington tiba di Aceh pada awal April, tidak seberapa jauh di belakang pesaing-pesaing mereka yang bernasib malang. Mereka tiba tepat waktu untuk bergabung dengan ekspedisi yang dikirimkan Gubernur Militer Belanda ke wilayah itu untuk "menuntut balas" atas kematian orang-orang Prancis itu. Seperti biasa dengan ekspedisi-ekspedisi semacam itu, hasil utamanya adalah memburuknya hubungan antara Belanda dan Teuku Imam Muda dari Teunom, yang dianggap bertanggung jawab atas pembunuhan itu—berdasarkan logika yang aneh bahwa wilayah kekuasaannya mudah dimasuki orang.[122] Itu juga berarti bahwa Belanda melarang Perncis untuk melakukan kegiatan lebih lanjut di wilayah pedalaman Aceh Barat yang keadaannya tidak menentu dari sisi politik.

Brau de St.-Pol Lias, yang juga gigih menjalin hubungan dengan lapisan atas, dengan cepat memulihkan kembali hubungan baik dengan pejabat Belanda setempat. Asisten Residen untuk Pantai Barat, Van Langen, mengajak kedua orang Prancis itu ke semua pelabuhan penting Pantai Barat, sampai-sampai jauh ke selatan ke Tapak Tuan, dan menguraikan dengan bahasa muluk-muluk emas yang dilaporkan oleh orang Aceh terdapat di hulu beberapa dari sungai-sungai itu. Namun, ia tidak mengizinkan Brau dan rekan-rekannya melanjutkan perjalanan ke pedalaman yang tidak berada di bawah wewenangnya. Setelah satu bulan perjalanan di sepanjang pesisir, kedua orang itu mengalihkan perhatian mereka ke Lohong, kerajaan paling utara di Pantai Barat Aceh dan satu dari kerajaan-kerajaan yang paling pro-Belanda. Setelah memeriksa penggalian emas yang sangat terbatas di situ yang dilakukan oleh sekitar selusin orang Cina, Brau memutuskan untuk mencoba mendirikan sebuah pangkalan, jika perlu yang berbasis pertanian, agar dapat sudah berada di tempat ketika arus manusia

pemburu emas yang masih diharapkannya akan muncul menjadi kenyataan.[123] Sementara menunggu persetujuan pemerintah untuk melakukan operasi yang lebih luas di Lohong, Brau dan Errington de la Croix pada Agustus 1880 mendapat sebuah undangan dari Hugh Low untuk mengunjungi Perak. De la Croix tinggal selama tujuh bulan menyelidiki metode penambangan Cina dan Melayu di situ. Ia memperoleh dua konsesi timah yang menjadi modal dasar bagi *Société des Etains de Perak,* yang didirikan di Paris untuk tujuan itu.[124]

Namun, Brau de St.-Pol Lias tetap dihantui oleh janji-janji dari Sumatra yang tidak mudah diwujudkan itu. Ia meninggalkan Perak setelah beberapa pekan untuk mengelilingi wilayah Deli sekali lagi, sampai persetujuan tiba untuk kegiatan eksplorasi Lohong tanpa kawalan Belanda. Kemudian dia cepat-cepat kembali untuk tinggal dengan *"mon ami le kedjourouan"* di Lohong, dan untuk memastikan garis batas salsh satu konsesinya yang akan dijadikannya pangkalan di Aceh. Jarang terjadi bahwa demikian besar entusiasme dicurahkan kepada sebuah proyek yang menjanjikan manfaat yang demikian kecil. Beruntung bagi Brau de St.-Pol Lias bahwa Gubernur Jenderal menolak menandatangani konsesi-konsesinya walau ia telah melakukan pendekatan intensif selama tiga bulan di Batavia pada awal 1881. Orang Prancis itu tampaknya akhirnya terpaksa meninggalkan proyek itu dan menggantinya dengan proyek yang lebih realistis di Perak, dan dengan demikian terhindar dari kepastian dilanda bencana ketika kekuasaan Belanda di Aceh berangsur-angsur terkikis.[125] Minat Brau kemudian bergeser ke daratan Asia Tenggara, ia mengirim sebuah misi ke Burma dan sebuah ke Indo-Cina pada 1884. Bahwa ia tetap terpukau oleh emas Aceh terbukti dari kenyataan bahwa tulisan-tulisannya yang demikian banyak mengenai ekspedisinya pada 1880-1 yang diterbitkannya setelah ia kembali ke Paris emas sama sekali tidak disebut-sebut di dalamnya, yang merupakan tujuan utama dari kegiatan eksplorasinya. Baru pada 1891, ketika harapannya untuk dapat kembali [ke Aceh] jatuh ke titik terendah, ia menerbitkan rincian mengenai emas Aceh itu dalam bukunya yang terakhir, *La Côte du Poivre,* untuk manfaat "mereka yang akan datang setelah kita".[126]

Entusiasme yang ditimbulkan di Paris oleh Wallon dan Brau de St.-Pot Lias makan waktu lama untuk surut. Hanya sembilan bulan setelah kematian Wallon, dua ipar laki-lakinya sudah berada di Singapura, dengan harapan dapat meneruskan perburuan emas di bawah lindungan alasan palsu hendak mencari jasad Wallon. Konsul Prancis di Batavia, yang masih menderita trauma karena menyembunyikan senjata dalam kopor Wallon dari penglihatan Belanda, memastikan mereka tidak bakal mencapai Sumatra.[127] Pada akhir 1882 sebuah

lagi *Compagnie Malaisienne* didirikan di Paris, yang mengirimkan tiga orang ke situ untuk melanjutkan perburuan emas. Juga untuk ini digunakan rumus yang sama berupa alasan palsu. Pemimpinnya, Paul Fauque, memperoleh sebuah *mission gratuite* dari Menteri Pendidikan untuk meneruskan kegiatan "ilmiah" Wallon dan Guilhaume dan menyelidiki kematian mereka. Namun, *"certains affaires delicates"* mengganggu pembiayaan proyek itu setelah mereka tiba di Singapura. Dua rekan Fauque langsung kembali ke Paris, dan Fauque menyusul mereka kemudian setelah melakukan dua bulan eksplorasi potensi dagang Siak di Sumatra Timur.[128] Namun, pada Mei berikutnya (1884) ia kembali ke Sumatra bersama Burlaud, yang sudah bekerja di sebuah perkebunan Deli selama dua tahun. Fauque menghabiskan sekitar dua bulan di Aceh Barat, pada saat Belanda dengan sia-sia berselisih dengan Teuku Imam Muda dari Teunom, yang menahan awak kapal Inggris yang tertangkap dari sebuah kapal uap yang kandas, *Nisero.* Fauque tidak berhasil mencapai Woyla yang merupakan tujuan utamanya, tetapi dia sempat mengeksplorasi Meulaboh, dan melaporkan dengan optimis mengenai batubara dan tembaga di situ, tetapi menghindari sama sekali menyinggung emas.[129]

Tidak mau ketinggalan, Edouard Roura, sangat mungkin pencipta mimpi Prancis yang bertahan lama itu, berhasil membentuk misinya sendiri di Prancis, tempat ia berdiam sejak 1878. Membawa seperti biasanya surat tugas resmi, kali ini sebuah tugas dari bagian hidrografi Kementerian Angkatan Laut Prancis, Roura mencapai Aceh Barat pada Oktober 1883 bersama rekannya seorang Prancis, Denis Richards. Namun, sekali lagi, Konsul Prancis yakin:

> bahwa misi ilmiah M. Roura adalah sebuah topeng, dan bahwa ia diberi tugas oleh sejumlah kapitalis Prancis untuk menyelidiki mineral dan sumberdaya lainnya di pedalaman Sumatra; barangkali bahkan untuk memperoleh dari pangeran-pangeran setempat sejumlah konsesi.[130] Persahabatan Roura dengan raja Teunom dan raja Woyla menempatkan dia pada posisi yang lebih baik daripada orang-orang sebelum dia untuk merundingkan konsesi, tetapi tidak untuk memperoleh persetujuan Belanda.

Suatu kebetulan yang menarik, Roura dan Richards sedang berunding dengan Raja Woyla persis pada hari *Nisero* kandas di dekat situ. Roura menyetujui permintaan Belanda untuk menggunakan pengaruhnya atas Teuku Imam Muda dari Teunom untuk merundingkan pembebasan 29 awak kapal. Namun, selama tiga hari Roura berada di Teunom, 29-31 November, Raja mengajukan

Gambar 12 Brau de St.-Pol Lias di Aceh dengan penguasa pro-Belanda Lohong, pembawa sirih-pinangnya (kiri) dan pembantu (kanan), dari *Chez les Atchés. Lohong* (1884).
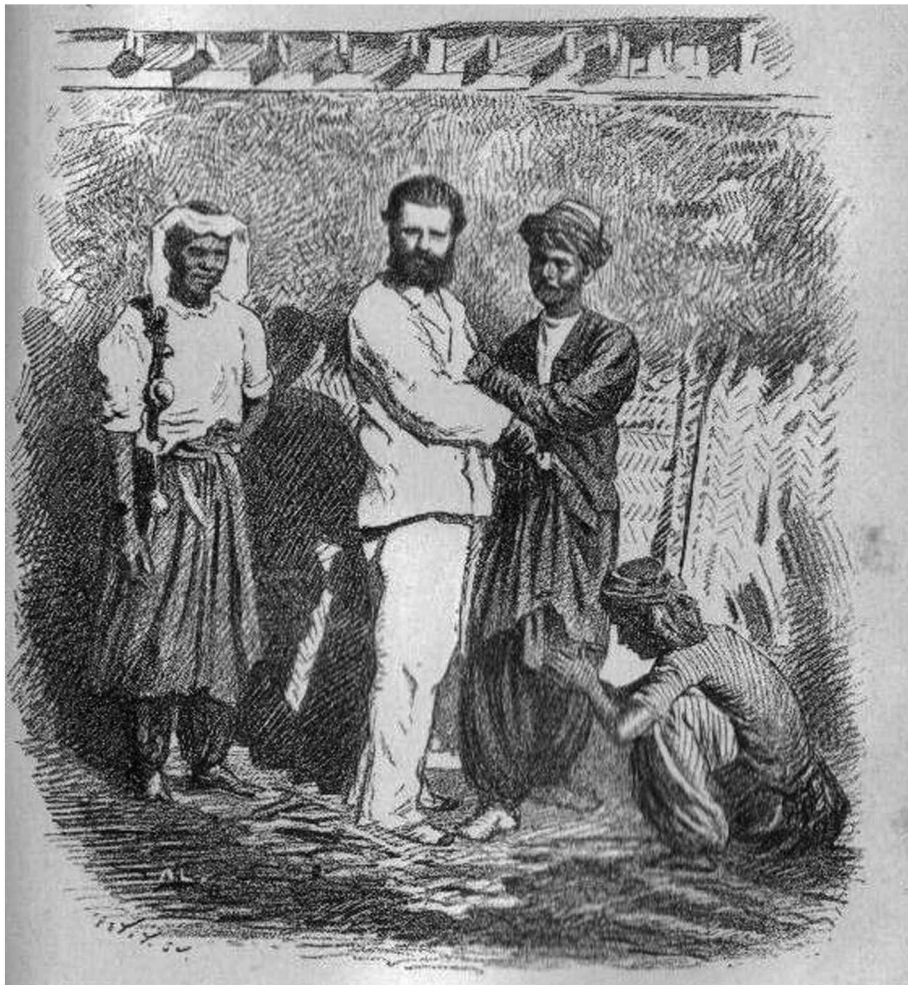
syarat yang mencakup jaminan dari Inggris bagi kebebasan perdagangannya, sebuah jurus cemerlang yang dengan segera membawa persoalan ini ke dunia internasional dan mendorong sebuah lobi dagang yang kuat di Penang untuk berpihak kepada dia. Dalam hiruk pikuk meluasnya persoalan ini pejabat Belanda dengan cepat mencurigai Roura, dan ini bukan tanpa alasan, bahwa ia telah membantu Teuku Imam merumuskan syarat ini. Ia dilarang memasuki wilayah pantai oleh Belanda.[131] Merasa sangat kecewa, lebih daripada yang

sudah-sudah, Roura pergi ke Singapura untuk menawarkan jasanya kepada Inggris dalam kaitan dengan upaya membebaskan awak kapal *Nisero*. Namun, dihadapkan kepada sikap bermusuhan Belanda, Sir Frederick Weld dengan enggan menolak tawarannya.[132]

Roura kembali ke Eropa pada 1884, tetapi ketika pelabuhan-pelabuhan Pantai Barat dibuka kembali setahun kemudian, ia cepat-cepat kembali ke perburuannya. Secara kebetulan, yang menimbulkan tanda tanya, ia juga terlibat dalam peristiwa besar yang kedua menyangkut pelaut-pelaut Eropa yang tertangkap di Aceh. Pada 14 Juni 1886 ia turun di Rigas sebagai satu-satunya penumpang S.S. *Hok Canton,* untuk menutup transaksi lada dengan Teuku Umar, panglima perang Aceh yang terkenal itu yang pada saat itu bertindak sebagai panglima perang di Pantai Barat ke utara Teunom. Beberapa jam kemudian anak buah Teuku Umar menyerang lima orang Eropa yang masih tinggal di atas kapal itu, tampaknya dengan tujuan menangkap mereka dan menciptakan kembali sebuah situasi *Nisero*. Roura muncul pada waktunya untuk memandu *Hok Canton* kembali Uleeheue, setelah dua dari perwiranya terbunuh dan dua lagi tertangkap, bersama isteri kapten kapal itu. Tampaknya ada kemungkinan besar bahwa tindakan Umar ada kaitan dengan ucapan yang dikeluarkan Roura, tetapi tidak ada bukti mengenai motivasi yang mendorong Roura untuk ikut terlibat.[133]

Bagi pemburu emas yang gigih tidak adanya kontrol Belanda sama sekali di Pantai Barat Aceh antara 1885 dan 1893 mengakhiri harapan untuk eksplorasi lebih lanjut. Ketika wilayah itu akhirnya dapat di tenangkan pada akhir abad itu ahli pertambangan Belanda Jansen mengadakan penyelidikan di wilayah-wilayah paling dikenal di Kawaj XII dan Lohong, dan sampai pada kesimpulan yang pada umumya negatif mengenai kemungkinan-kemungkinan bagi penambangan ekonomi.[134] Baru pada 1939 ada upaya serius untuk menggali emas Kawaj XII pada skala ekonomi. Hasrat pengabdian Brau de St.-Pol Lias kepada tanah airnya akhirya menjadi kenyataan. Sebuah perusahaan Prancis, "Marsman Concern", memulai penambangan ekonomi emas Aceh.[135]

Raja Sedang

Barangkali tidak adil mengakhiri catatan mengenai prakarsa-prakarsa salah sasaran ini dengan nada iba, terutama karena Charles David de Mayrenai [136] tampaknya tidak pernah menjejakkan kaki di Sumatra. Namun, dalam keanggunan gayanya, heroisme mengawang-awang kegiatannya, dan kekaburan

landasan keuangannya, ada suatu ciri khusus petualangan-petualangan Prancis di pulau itu pada abad ke sembilan belas. "Tampan, penembak jitu . . . cakap dan lincah",[137] Mayrena adalah James Brooke-nya Prancis, lengkap dengan semua gayanya tetapi tanpa isi. Ia menjalani karir militer yang gemilang sampai terluka dalam perang Prancis-Prusia. Kemudian pada 1883, ia harus meninggalkan Prancis dengan tiba-tiba ketika dituduh melakukan penipuan, dan dari saat itu ia terbenam semakin dalam ke dunia khayal ciptaannya. Dengan satu dan lain cara ia tiba di Jawa, di situ ia tinggal dengan berutang kiri kanan selama hampir satu tahun sebelum dideportasi pada Agustus 1884 atas tuduhan penipuan.[138]

Namun, pengalamannya bernilai tinggi bagi dia sekembalinya dia di Paris. Di situ ia mengumumkan bahwa ia desersi militer Belanda di Aceh (seperti dilakukan oleh puluhan serdadu Eropa bayaran) dan ia dipercaya penuh oleh Sultan Aceh. Optimisme yang berlebih-lebihan mengenai Aceh yang dibangkitkan dalam kalangan pemodal di Paris oleh Brau de St.-Pol Lias dan Wallon dapat dimainkannya. Selain itu, orang Aceh baru saja merayakan kemenangan gilang gemilang melawan Belanda yang mundur ke sebuah "garis konsentrasi" dan menduduki hanya beberapa mil persegi saja dari wilayah Aceh. Mayréna berhasil meyakinkan seorang pialang Paris, baron Selliere, untuk memberi dia uang muka sebesar 30.000 franc untuk kembali ke Aceh dan mengambil alih bagian-bagian yang menguntungkan dari ekonomi Kesultanan, termasuk pertambangan, senjata, manufaktur, dan pencetakan uang. Meski memiliki latar belakang yang tidak jelas, ia juga mendapat tugas dari Kementerian Pendidikan untuk melakukan eksplorasi ilmiah di Aceh.[139] Namun, setibanya di Saigon pada Mei 1885, Mayréna dan adik laki-lakinya Henri tidak melakukan upaya yang serius untuk mencapai Sumatra, tetapi menggunakan uang Selliere di Saigon tanpa menghasilkan laba. Dukungan Selliere dan tugas dari Pemerintah ditarik kembali pada 1886.[140]

Namun, Mayréna berhasil luar biasa di Indo-Cina. Pada Januari 1888 ia berhasil meyakinkan pemerintah kolonial untuk mempercayakan kepadanya tugas politik setengah-resmi menyangkut suku Moi yang tinggal dekat perbatasan selatan Laos, di wilayah yang sekarang dinamakan provinsi Kontum. Di bawah samaran sebagai pencari emas Mayrena mencoba membujuk suku Montagnards untuk keluar dari Siam dan masuk ke wilayah perlindungan Prancis. Atas permintaan Saigon Fr. Gerlach dari misi Kontum mempetaruhkan prestisenya yang sangat tinggi untuk suku Moi di belakang Mayrena. Hasilnya menakjubkan. Dalam beberapa bulan ia berhasil meyakinkan berbagai desa yang berseteru satu sama lain, yakni desa-desa Sedang, Hamong dan Balmar,

untuk bersatu. Pada 3 Juni 1888 mereka sepakat untuk mendirikan sebuah Kerajaan Sedang, dengan Mayréna sebagai Raja Marie pertama.

Namun, setelah mencapai persatuan yang unik ini, Mayréna lebih tertarik pada upaya memperbesar kekuasaan *jabatan*-nya daripada menyerahkan urusan pemerintahan kepada Hué atau Saigon. Untuk menghasilkan pemasukan bagi kerajaannya yang baru itu ia menerbitkan perangko dan memberikan gelar-gelar kerajaan dan bintang-bintang penghargaan kepada pengusaha-pengusaha yang tidak tahan dipuji atau mudah diperdaya di Saigon dan Hong Kong. Ketika orang Prancis menentang praktik-praktik ini dan membawanya ke depan pengadilan dengan tuduhan penipuan, ia mengancam akan menjual kerajaannya kepada orang Jerman.[141]

Pada 1889 Raja Sedang kembali ke Paris dengan harapan mendapat pengakuan resmi dan uang. Ia tidak memperoleh satupun dari ini, meski ia sudah bersusah payah memberikan warna kemegahan kerajaan pada berbagai perhelatan di Paris dan membagi-bagikan berbagai gelar tinggi-tinggi. Pada Juli 1889 ia pindah ke Belgia untuk menghindari dikejar-kejar pengadilan. Di situ akhirnya ia menemukan seorang pemodal yang lain yang mudah termakan oleh kata-katanya. Industrialis muda Belgia Somsy melunasi semua utangnya dan membiayai perjalanannya kembali ke kerajaannya dengan 5 anak muda Belgia yang punya banyak koneksi, 11 peti senjata dan amunisi, dan perbekalan berlimpah.[142]

Namun, setibanya di Singapura pada Februari 1890, senjata Mayréna disita oleh polisi. Prancis dan Siam dengan tegas tidak mengizinkan dia mencapai kerajaannya melalui wilayah masing-masing. Dengan cepat dunia Mayréna mulai runtuh dan rekan-rekannya meninggalkan dia seorang diri. Ia mulai berbicara lagi tentang akan kembali ke Sumatra untuk memimpin prajurit Aceh melawan Belanda. Meskipun ia menjadi orang Islam dan menikah dengan seorang perempuan Melayu (isteri keempat), bernama Aisa, ia tidak berhasil membentuk pasukan di antara orang Islam Singapura. Ketika dunia khayalnya mulai tampak menggelikan, ia meninggalkan Singapura pada Maret untuk hidup di dunia mimpinya seorang diri di Pulau Tioman, sebuah pulau kecil di lepas pantai Rompin, di Pahang. Ia meninggal tanpa sebab-sebab yang jelas pada 11 November 1890, dan hanya meninggalkan seekor *anjing peranchis* di Pulau Tioman sebagai tanda abadi kehadirannya di dunia Melayu.[143]

Mayréna tampaknya petualang Prancis yang terakhir yang berniat untuk melakukan intervensi langsung dalam urusan-urusan Indonesia di tepi wilayah

kekuasaan Belanda, tanpa menghiraukan Belanda yang mengaku punya wewenang atas wilayah bersangkutan. Kepentingan Prancis yang selanjutnya di wilayah itu, dalam bentuk perkebunan dan perusahaan dagang dan juga tradisi penelitian ilmiah yang baik, berjalan dalam jalur tata pemerintahan kolonial Belanda. Bahkan banyak peneliti dan pejabat Prancis, seperti Angoulvant dan Bousquet, yang lebih tertarik kepada koloni Belanda daripada kepada koloni Prancis dalam kaitan dengan kegiatan penelitian mencari unsur-unsur yang sama antara koloni Prancis dan koloni Belanda.

Catatan mengenai kegiatan-kegiatan Prancis di Sumatra tetap merupakan catatan tanpa kesinambungan, tanpa benang penghubung selain daripada kebiasaan membiarkan kegiatan-kegiatan besar terbengkalai atau dialihkan ke jalur-jalur yang tidak menguntungkan. Namun nama Prancis tetap jaya, meski penuh teka-teki, bagi banyak penduduk pesisir, dan memainkan peranan dalam perhitungan-perhitungan diplomasi mereka.

Lampiran

Sultan Ibrahim kepada Presiden Prancis
15 Rabi 1, 1265H (8 Februari 1849)
(Teks Melayu huruf Romawi)[144]

Bismi'llahi `l-rahmani `l-rahim

Al-hamdu li'llah wahdahu wa'l-salatu wa'l-salamu `ala rasuli'llah wa anna Isa ruhu'llah wa `ala alibi wa sahbihi ridha Allah. Amma ba'du, adapun kemudian dari itu maka inilah *warakat al-ikhlas wa tuhfat al-ainas* yang termaktub dalamnya dengan beberapa sembah salam serta ta'zim dan takrim yang keluar daripada kalbi yang nurani dan fu'ad vang hakiki dan sir yang khafi dan rahsia yang terbuni, ya'itu ialah yang datang daripada pihak hamba yang hina dina lagi fana lagi tiada menaruh daya dan upaya lagi dhacif dan miskin serta dengan tiada mengetahui `adat dan majlis, ya'itu yang bernama Sultan Mansur Syah ibni al-marhum Sultan Jawhar al-`alam Syah yang ada jabatnya memerintahkan cadat yang kuat dan hukum yang `adil, ya'itu dalam daerah negeri Aceh bandar Daru'l-salam. Maka barang disampaikan Allah subhanahu wa ta'ala datang mendapatkan kebawah kadam sahabat hamba yang mahamulia lagi acla dan fudhla yang telah dikurniai daripada Tuhan yang bernama rabbukum al-a'la, ya'itu sayyidina wa maulana Paduka Seri Sultan Republik Peransis yang ada jabat takhta kerajaan daripada emas kudrati yang sepuluh mutu lagi yang bertatahkan ratna mutu macnikam daripada intan dikarang dan berumbai2-kan mutiara dan zabarjad yang telah terseradi dalam daerah negeri Pari makam Daru'l-ma'mur wa'l-masyhuriah serta dengan memerintahkan `adat yang kuat dan hukum yang `adil dengan ke'adilannya, ya'itu dalam daerah negeri Peransis Daru'l-amen. Maka tiadalah hamba perpanjangkan kalam melainkan sekadar hamba mengatakan hal dengan ahwal yang maksud sahaja. Amin.

Syahadan hamba beri ma'lumlah kepadaTuan yang sahabat hamba lagi syaudara hamba: Adapun karena tatkala dahulu zaman Louit Pilib (Louis Philippe) adalah dikirimkan surat kepada hamba serta dengan kapal perang dan adalah khabarnya dalam surat itu dianya hendak bersahabat dengan hamba dan serta dengan disuratkan kepada hamba mengambilkan rial Peransis kepada sekalian negeri hamba dalam makam Sumatara bak jadilah rial Peransis jual beli dalam tiap2 negeri dan tiap2 bandar. Sudah itu maka hamba berfikirlah dengan segala hulubalang dan segala syaudagar dan serta dengan segala ra'yatnya

fasal rial itu. Maka sudahlah ridha sekalian orang yang dalam negeri Sumatara menerima rial Peransis itu pada tiap2 negeri dan tiap2 bandar yang dalam perintah hamba. Sudah itu dengan takdir Allah tacala maka gaduhlah Louit Pilib dengan segala orang Peransis dan berperanglah dianya dengan segala ra'yatnya, maka Louit Pilib pun larilah kenegeri yang lain. Sekarang sudahlah jadi yang memerintahkan `adat yang kuat hukum yang `adil dengan sifat ke'adilannya Sultan Republik dan daripada hamba sama juga Sultan Republik sahabat hamba lagi syaudara hamba. Dan hendaklah sekarang Tuan suruh kapal Peransis berniaga kenegeri Sumatra dan hendaklah mula2 datang kepada hamba kenegeri Aceh, kemudian maka berlayarlah kepada tiap2 negeri dan tiap2 bandar serta, `alamat daripada hamba kepada segala hulubalang surat satu pucuk. Dan hendaklah mula2 bak banyak kapal sekali itu dan lain kali miski satu kapal pun jadi juga karena sebab setelah macruf banyak rial Peransis pada tiap2 bandar. Dan hendaklah Tuan beri kapal perang kepada hamba al-kadar dua buah karena sebab hamba dha'if sedikit pada menghukumkan ra'yat pada tiap2 negeri dan bandar; jika ada kapal perang niscaya takut segala hulubalang kepada hamba dan tentangan harga kapal itu barang yang patut adalah diatas hamba tetapi hendaklah hamba bertangguh pada Tuan kadar dua tahun. Jika sudah sampai hadnya maka hamba bayarlah akan harganya itu kepada Tuan. Dan hendaklah dengan siap alatnya kapal itu sematanya. Sebagai lagi hamba minta' kasihan banyak2 pada Tuan karena negeri hamba sudah diambil oleh orang Belanda adalah dua tiga buah bandar, mula2 negeri Airbangi hingga sampai kenegeri Singkil dan serta dengan satu pulau Nias sudah diambilnya oleh orang Belanda itu karena negeri itu jauh sedikit daripada negeri Aceh dan hendaklah dengan do'a Tuan serta dengan ikhtiar Tuan bak maulah berpindah orang Belanda pada tiap2 negeri itu. Itulah hal ahwalnya dan yang lain dari itu tiadalah hamba sebutkan melainkan hendaklah Tuan periksa pada orang yang membawa surat ini namanya Muhammad Ghauth karena dianya hulubalang hamba lagi nasab dengan hamba. Apa2 khabarnya, sungguhlah khabar hamba dan apa2 pekerjaannya maka sungguhlah pekerjaan hamba karena dianya badal ganti hamba, yang mutlak menyuruh pergi berjalan kepada Tuan kenegeri Peransis karena harap hamba seharap2, kecil laut besar harap, rendah bukit tinggi harap. Demikianlah harap hamba akan Tuan, janganlah Tuan beri putus harap, dan tiadalah tanda hayat hamba melainkan do'a sahaja fi kulli'l-lail wa'l-ayyam. Dan hendaklah dengan segara2 Tuan kurnia perintah dan niat, seperti Muhammad Ghauth hendaklah lekas2 kembali kenegeri Aceh serta dengan kapal dan orang2 daripada Tuan, dan hendaklah Tuan berikan apa2

yang dipinta' oleh Muhammad Ghauth, janganlah syak waham akan dianya. Itulah khabarnya.

Tersurat2 ini pada tatkala lima belas hari bulan Rabi'u'l-awwal pada hari Khamis pada waktu zuhur pada tarikh sanat 1265. Bibarakat al-Syaikh Macruf al-Karkhi. Tammat kalam.

Al-Sultan Mansur

9

Migrasi Orang Cina ke Sumatra Utara

Komunitas Cina Indonesia paling besar di Sumatra, dan bahkan sebenarnya di mana saja di luar Jawa, adalah komunitas Cina Indonesia di provinsi yang sekarang bernama Sumatra Utara. Provinsi ini mencakup dua bekas Karesidenan pada zaman India Belanda dahulu, yakni Karesidenan Tapanuli, yang jarang penduduknya, dan Pemerintah Pantai Timur Sumatra, yang berpenduduk keturunan Cina sebanyak 99.000 menurut sensus 1905 dan 193.000 menurut sensus 1930.[1]

Aspek paling menarik dari sejarah komnitas ini bukan bagaimana komunitas itu terbentuk, tetapi mengapa komunitas itu tidak berkembang menjadi lebih besar; mengapa, meski perkembangan keadaan pada abad ke-19 menunjuk ke arah yang lain, Deli, Langkat, dan Serdang tidak mengikuti pola Perak dan Selangor di Malaysia—di sini imigran Cina berkembang menjadi kelompok suku bangsa utama pada akhir zaman kolonial. Pemilik perkebunan di Sumatra sama sekali tidak merahasiakan bahwa mereka lebih menyukai pekerja Cina daripada pekerja Jawa, dan arus masuk orang Cina ke Singapura dan Penang yang sangat besar setiap tahun antara 1880 dan 1930[2] merupakan sumber pasokan pekerja yang tidak habis-habisnya. Namun, kesulitan-kesulitan dalam cara memperoleh pekerja Cina akhirnya menyebabkan pemilik perkebunan beralih menggunakan pekerja Jawa, yang sekarang membentuk komponen tunggal terbesar penduduk *cultuurgebied* (wilayah perkebunan).

Apa penyebab kesulitan-kesulitan ini? Para penulis Belanda pada umumnya berpendapat bahwa kesulitan-kesulitan itu disebabkan oleh kebijakan menghalangi yang dijalankan pejabat Inggris dan tipu muslihat "coolie brokers" (calo kuli), di Straits Settlements.[3] Para penulis di pihak Inggris atau Malaya yang juga melihat kesulitan-kesulitan itu cenderung menyalahkan pekebun Sumatra, karena perkebunan mereka mendapat nama buruk karena

ulah mereka sendiri dalam kalangan imigran Cina.[4] Dalam kenyataan, hal ini tentu saja tidak dapat dijawab dengan penjelasan-penjelasan mutlak semacam itu; diperlukan penelitian yang dalam untuk memahami pola-pola migrasi di Nanyang.

Sebelum pertengahan abad ke-19, peranan orang Cina di Sumatra terpusat di Selatan. Sriwijaya adalah bandar penting penampung barang ekspor Asia Tenggara ke Cina antara abad ke-7 dan ke-12, dan juga tempat singgah peziarah penganut agama Buddha yang akan menuju India. Menjelang akhir abad ke-14, para pedagang kaya asal Canton yang menentang Dinasti Ming (dan karena itu "perompak" dalam mata ekspedisi-ekspedisi Zheng He) merebut kendali atas Palembang, ibukota bekas kerajaan Sriwijaya. Ini mendorong Zheng He (Cheng Ho) untuk melakukan intervensi bersenjata pada 1407; ia membawa penguasa Canton bersangkutan kembali ke Cina untuk dihukum mati, dan mengangkat dinasti Cina atau Cina-Melayu yang lain sebagai pengganti.[5] Palembang dan Jambi kembali menjadi pusat kepentingan dagang Cina ketika jung yang berdagang ke Nanyang harus mendapat izin dari Maharaja pada 1567. Dari 88 kapal Cina yang dikirim secara resmi ke Asia Tenggara pada 1589, tujuh (8 persen) ditugaskan mengumpulkan lada Sumatra di pelabuhan Palembang dan Jambi.[6] Sampai ambisi monopoli Belanda menyingkirkan pedagang Cina dalam kuartal kedua abad ke-17, kapal-kapal Cina merupakan pembeli paling penting bagi lada Sumatra selatan. Banyak orang Cina yang menetap di Jambi dan Palembang dalam periode lada ini, memperistri perempuan setempat, dan menjadi pihak yang tidak tergantikan dalam perekonomian setempat.[7] Dalam abad berikutnya kegiatan orang Cina terpusat di pulau-pulau di lepas pantai Sumatra, khususnya di tambang timah di Bangka dari sekitar 1750 dan pertanian lada di Kepulauan Riau dari sekitar 1740.

Pada awalnya orang Cina sangat sedikit di bagian utara Sumatra. Sultan Aceh, Sultan Iskandar Thani (1637-41), yang ortodoks dan sangat taat beragama, dengan tegas melarang orang Cina masuk ke wilayah yang luas yang berada di bawah kekuasaan Aceh, konon karena mereka tidak mau berpisah dengan ternak babi mereka. Meski pedagang Cina kembali datang ke Aceh pada 1680-an, mereka pada awalnya tidak memainkan peran dalam pertumbuhan hasil lada yang tinggi di Aceh dari 1790-an. Orang Aceh membawa lada mereka ke pasar di Penang atau menjualnya langsung kepada pembeli orang Amerika, Eropa, atau India. Meski orang Cina Malaka dan kemudian orang Cina Singapura sering datang ke pelabuhan-pelabuhan Sumatra Timur di antara Siak dan Jambi, perahu-perahu Bugis, Arab, India, dan setempat masih mendominasi

perdagangan ini pada 1820-an, dan pedagang Minangkabau dari Batu Bara mendominasi perdagangan lada di wilayah Deli-Asahan lebih jauh di utara.[8] Anderson, yang berkeliling ke wilayah-wilayah pantai timur pada 1823, melihat "sedikit sekali orang Cina" di Deli,[9] dan hampir tidak pernah melihat orang Cina di tempat-tempat lain.

Pertumbuhan komunitas pedagang Cina di pelabuhan-pelabuhan bebas yang terus berkembang dengan pesat, Penang dan Singapura, membawa sebuah perubahan besar sekitar 1860. Pedagang Cina Straits Settlements telah menjalin ikatan yang kokoh dengan semua kerajaan Melayu di pantai timur antara Siak dan Temiang ketika pengaruh Belanda akhirnya meluas ke wilayah itu (1858-65). Ini terutama demikian halnya di Asahan, yang mempercayakan bea impor dan ekspor, dan juga monopoli candu dan judi, kepada pedagang Penang Boon Keng. Belanda menganggap pengaruh Boon Keng, dan dukungan yang berhasil dihimpunnya di Penang, sebagai satu faktor terbesar penyebab perlawanan Raja kepada pendekatan-pendekatan yang dilakukan Belanda sampai 1865, ketika serdadu Belanda dikirim ke situ." Satu dari alasan-alasan utama yang diajukan sebagai dasar bagi pendudukan permanen Belanda atas Asahan ialah jika tidak "pedagang Cina akan menyebarkan pengaruh Inggris dan lebih-lebih lagi menjarah kerajaan itu daripada sebelumnya".[11]

Meski dihadapkan pada berbagai perlawanan pada masa-masa awal, perluasan kekuasaan Belanda secara berangsur-angsur di Pantai Utara Sumatra membuka peluang lebih lebar lagi bagi perusahaan Cina. Perusahaan Cina yang berbasis di Straits Settlements tetap mengendalikan monopoli candu, minuman keras, dan judi di sebagaian besar kerajaan-kerajaan di situ, dan bahkan impor dan ekspor beberapa kerajaan, antara lain Siak dan Asahan. Pada 1876 Residen melaporkan bahwa "perdagangan Karesidenan ini sepenuhnya berada dalam tangan orang Cina", yang sebagian besar mempunyai hubungan dengan perusahaan-perusahaan di Singapura atau Penang.[12] Mengenai perusahaan Barat, tidak ada jalur pelayaran milik Eropa ke Pantai Timur Sumatra sampai kapal pos Belanda mulai beroperasi pada 1873, dan tidak ada persaingan dagang serius yang dihadapi kapal-kapal uap dan *tongkang* Cina sampai Ocean Steamship Company mulai melayani jalur Singapura-Deli pada 1880.[13] Karena itu, dari sudut pandang hubungan dagang, Pantai Timur Sumatra menjadi halaman belakang bagi orang Cina Straits Settlements dan bagi Semenanjung Malaya.

Permukiman permanen orang Cina dalam jumlah besar mulai ada tidak lama setelah Belanda menanamkan kekuasaan di situ. Pada 1875 sudah ada

komunitas Cina yang cukup besar di Bengkalis, dengan sumberdaya ikan dan kayu yang penting, yang tidak lama kemudian didominasi oleh orang Cina; di Tanjung Balai (Asahan) dan Labuan Bilik (Panai), di pusat-pusat perniagaan dengan wilayah-wilayah pedalaman Batak; dan terutama di perusahaan-perusahaan pertanian di Deli.[14]

Ketika pemerintah kolonial di Batavia mengirimkan untuk pertama kali seorang utusan, yang kurang berpengalaman, ke Deli pada 1864, ada sekitar 20 orang Cina di situ—sebagian besar pandai emas dan pedagang kecil.[15] Pejabat ini mula-mula bermalam di rumah pelopor Belanda di Deli, J. Nienhuys, yang tiba tahun sebelumnya untuk mencari tembakau. Ia baru saja memutuskan untuk membuka kebun tembakau sendiri dengan menggunakan pekerja upahan, setelah menderita kerugian besar menjual tembakau bermutu rendah yang diborongnya dari orang Batak Hamperan Perak yang telah bertanam tembakau selama bertahun-tahun. Baik orang Batak maupun orang Melayu tidak mau bekerja sebagai pekerja upahan, dan Nienhuys mencari jalan lain dengan membawa beberapa *haji* dari Penang, yang mungkin masih berhutang kepadanya untuk biaya perjalanan haji mereka ke Mekkah. Sebagai bekas pekebun tembakau di Jawa, Nienhuys menoleh terlebih dahulu kepada sumber pekerja yang sudah dikenalnya ini. Namun, satu musim yang mengecewakan sudah cukup untuk mendorongnya untuk kembali mengadakan percobaan. Pada 1865 ia membawa 88 orang Cina dan 23 orang Melayu dari Penang sebagai pekerja upahan. Ini menghasilkan imbalan yang sepadan. Tembakau Nienhuys 1865 mendapat pengakuan di Amsterdam sebagai tembakau bermutu tertinggi, dan ia menjualnya dengan harga yang menakjubkan, sebesar 1,49 guilder per setengah kilogram.[16]

Sukses ini memulai periode 25 tahun ekspansi industri tembakau Deli tanpa putus. Modal mengalir dengan cepat ke wilayah itu, yang tidak lama kemudian mencakup Serdang dan Langkat dan juga Deli. Sebagian besar modal datang dari tempat yang tidak jauh, Penang. Wirausahawan Cina menonjol pada awalnya, dan pada 1867 tiga dari mereka sibuk menanami lahan sewaan masing-masing dengan tembakau, dan juga dengan kelapa dan buah pala.[17] Tetapi dalam beberapa tahun, kebutuhan akan investasi skala besar dan tata kelola teknik dan pemasaran yang canggih menjadikan industri tembakau bidang usaha yang didominasi oleh orang Eropa. Memimpin di bidang itu dari 1869 adalah Deli Maatschappij, perkawinan antara pengalaman setempat Nienhuys dengan modal dari NHM.

Mengikuti jejak Nienhuys, semua perusahaan baru menggunakan orang Cina semata-mata untuk merawat tanaman tembakau, sedangkan orang India, Jawa, Batak, dan Melayu dipekerjakan untuk pekerjaan yang lebih rutin. Deli Maatschappij sendiri membawa 900 orang Cina dari Penang ketika memulai operasi pada 1869.[18] Penduduk Cina Deli naik dari 20 pada 1864 menjadi hampir 1.000 pada 1867[19] dan lebih dari 4.000 pada 1872.[20] Setiap tahun sepanjang 1870-an dan 1880-an ribuan pekerja Cina dibawa dari Straits Settlements untuk mendukung ekonomi Asia Tenggara yang sedang berkembang dengan sangat pesat.

Nienhuys dan para perintis yang lain pada tahun 1860-an memperoleh pekerja Cina melalui sistem *kongsi* yang sudah demikian kokoh berdiri di Straits Settlements. Kepala *kongsi* diberi bagian lahan dari konsesi tanah perawan dan sejumlah benih, dan daun tembakau terbaik dibeli dari dia pada akhir tahun. Namun sistem ini tidak lagi digunakan mulai sekitar 1870, diganti dengan kontrak langsung antara majikan Eropa, yang dibantu oleh mandor-mandornya (*tindal*) orang Cina, dengan pekerja bersangkutan. Uang muka diberikan kepada pekerja sepanjang tahun setiap setengah bulan, sampai pada Desember ia membawa panen tembakaunya kepada asisten orang Eropa yang membayarnya menurut penilaiannya mengenai mutu tembakau bersangkutan. Para pekebun yakin: "Hal yang pertama paling penting dalam menanam tembakau adalah memastikan kesehatan daun tembakau . . . dan kecuali upah pekerja didasarkan kepada kondisi daun tembakau yang dihasilkannya, . . . tidak mungkin dapat dihasilkan tembakau yang bermutu."[21] Deli dengan demikian membawa pekerja Cina ke dalam hubungan yang jauh lebih dekat dengan seorang majikan Eropa daripada jalur-jalur pemasokan pekerja yang lain di Nanyang.

Sebelum masuk ke dalam pembahasan pola pengadaan pekerja Cina yang rumit itu, perlu dikemukakan catatan berikut. Seperti penelitian-penelitian sebelumnya mengenai hal ini, tulisan ini sepenuhnya didasarkan kepada sumber-sumber kolonial, yang memberikan gambaran yang sangat tidak memadai mengenai sebuah gejala dengan tingkat kerumitan yang tidak dipahami oleh sumber-sumber itu. Ini terutama tampak jelas dalam laporan-laporan dari Protectors of Chinese (Pelindung Pekerja Cina) di Straits Settlements, yang demikian dibebani oleh tugas rutin mendaftar arus masuk migran Cina sehingga mereka tidak sempat memberikan perhatian kepada urusan-urusan yang lebih mendasar.[22] Dua sumber utama informasi, laporan-laporan 1876 dan 1890 Labour Commissions (Komisi Perburuhan) di Straits Settlements berisi kesaksian-kesaksian dari orang Cina yang terlibat dalam pengadaan pekerja.

Namun, kesaksian-kesaksian itu lebih banyak menyembunyikan daripada mengungkapkan, kecuali jika dibaca dengan bekal pengetahuan yang mendalam mengenai struktur ekonomi dan ikatan kesukuan pada masa itu, dan apa peran setiap pemberi kesaksian di dalamnya. Penulis sangat sadar bahwa banyak dari bab ini berdiri di atas pondasi desas-desus dan spekulasi yang sama tidak menentunya dengan pondasi yang digunakan pejabat kolonial sendiri untuk membentuk pandangan mereka ketika berurusan dengan orang Cina.

Mengikuti Konvensi Inggris-Prancis-Cina 1866 yang mengatur emigrasi orang Cina, pengadaan pekerja di Cina dan pengangkutan mereka ke Straits Settlements dilakukan dengan cara yang cukup beradab. Dengan kekecualian sejumlah kecil pekerja, yang semakin kecil, yang berlayar ke Singapura dengan jung-jung Hainan, migran diangkut dengan kapal uap sewaan yang mencapai Singapura dalam waktu enam hingga delapan hari. Sebuah perusahaan di salah satu pelabuhan konvensi menerbitkan jadwal kedatangan dan keberangkatan salah satu dari kapal-kapal sewaannya, dan calon migran dibawa oleh *khehtau*—biasanya orang dari daerah yang sama di Cina yang sudah kembali dari Nanyang. Menurut Konvensi 1866 uang muka tidak boleh diberikan, atau kontrak ditandatangani, di Cina, dan reputasi Singapura sebagai sebuah *eldorado* menarik orang Cina yang melarat tanpa menggunakan cara-cara kekerasan.

Di pihak lain, sedikit sekali emigran yang memiliki uang enam hingga delapan dollar untuk biaya perjalanan ke Singapura, dan karena itu sebagian besar barangkali berutang kepada seseorang begitu tiba di Straits Settlements.[23] Umumnya, tidak diragukan lagi, utang ini tidak lebih daripada utang informal kepada seorang relasi atau orang lain yang sudah lama tinggal di Straits Settlements, yang mempekerjakan *sinkheh* (pendatang baru) bersangkutan. Mengenai hakikat dan sampai seberapa jauh ikatan semacam itu mengikat seorang pekerja tidak ada orang yang tahu, karena pejabat Inggris sudah tidak memikirkan lagi lebih jauh orang Cina yang telah memberikan jawaban "ya" pada pertanyaan, "Apakah saudara sudah membayar biaya perjalanan saudara?" Sebagian besar selalu menjawab ya, yang berarti mereka tidak harus ditahan di sebuah depot atau menandatangani kontrak di depan Pelindung Pekerja Cina. Terutama orang Hokkien, mereka jarang dimasukkan ke dalam kategori resmi "penumpang belum membayar", karena pihak berwenang Cina di Amoy melarang emigrasi *sinkheh* yang belum, paling tidak, membayar uang muka biaya perjalanannya.[24]

Sebelum pembentukan Pelindung Pekerja Cina pada 1877, barangkali lebih dari seperempat dari semua imigran berutang kepada mandor kapal

begitu mendarat. *Khehtau* migran semacam itu biasanya berangkat bersama *sinkheh* yang diajaknya dan bertanggung jawab kepada mandor kapal untuk pembayaran biaya perjalanan mereka. Setiba di Singapura atau Penang *sinkheh* ditahan di atas kapal sampai *khehtau* bersangkutan telah mendapat calon majikan untuk melunasi uang perjalanan. Utang uang perjalanan ini biasanya sekitar $12, dan *khehtau* mengharapkan laba bagi dirinya sendiri sebesar $5-8. Meski tidak ada kontrak tertulis, *sinkheh* kemudian terikat kepada majikannya selama paling tidak tidak satu tahun oleh rasa setia, rasa takut dan kekerasan.[25]

Chinese Immigrants Ordinance 1877 (Peraturan Imigran Cina 1877) (diganti dengan Ordinance IV 1880) berisi sebuah kategori ”penumpang belum membayar” yang didaftar dan dibawa ke ”coolie depots”, depot kuli, berlisensi yang memiliki wewenang hukum untuk menahan mereka di bawah pengawasan pemerintah. Pada awalnya kategori ini diartikan imigran yang berutang kepada mandor kapal untuk perjalanan mereka. Sebagian besar penumpang semacam itu memulai perjalanan mereka dari Shantou. Namun tidak lama kemudian, kapal uap di jalur pelayaran Shantou menghentikan praktik spekulasi membawa penumpang berutang yang dilakukan oleh kapal uap Hong Kong beberapa waktu sebelumnya. Seluruh lalulintas migran ditata lebih baik guna menghadapi perubahan ini dan migran yang terus meningkat jumlahnya dengan pesat pada tahun 1880-an. Pada 1890 perusahaan pengadaan pekerja di pelabuhan-pelabuhan konvensi umumnya membayar biaya perjalanan migran terlebih dahulu dan kemudian mendapat ganti dari sebuah perusahaan ”coolie-brokers” di Straits Settlements, yang menampung *sinkheh*. Variasi dari praktik ini adalah *khehtau* yang bertanggung jawab atas *sinkheh* membayar biaya perjalanan dan mendapat pembayaran kembali plus laba dari calo yang menampung *sinkheh*.[26]

Meski status mereka yang memberikan jawaban “tidak” pada pertanyaan, ”Apakah saudara membayar sendiri biaya perjalanan saudara?” berubah secara mendasar antara 1877 dan 1890, kelompok ini tetap (sampai 1888, ketika tekanan dari pemerintah di Shantou menjadi terlalu besar) terdiri sebagian besar dari migran dari pelabuhan Shantou, dengan tujuan perkebunan di Sumatra, Sabah, Provinsi Wellesley dan Johor. Ini memperkuat kecurigaan bahwa kategori ”penumpang belum membayar” ditentukan tidak berdasar kemiskinan emigran tetapi lebih oleh kiat-kiat perusahaan pengadaan pekerja yang terlibat dalam lalulintas pekerja ini. Pekebun Eropa di Sumatra, Borneo Utara (Sabah) dan Provinsi Wellesley bergantung kepada Pelindung Pekerja Cina untuk memperoleh pekerja, karena mereka tidak memiliki kontak-kontak langsung yang diperlukan untuk itu. Di pihak lain, banyak, barangkali sebagian

Gambar 13 Kuli kontrak Cina tiba di pelabuhan Belawan, sekitar 1903
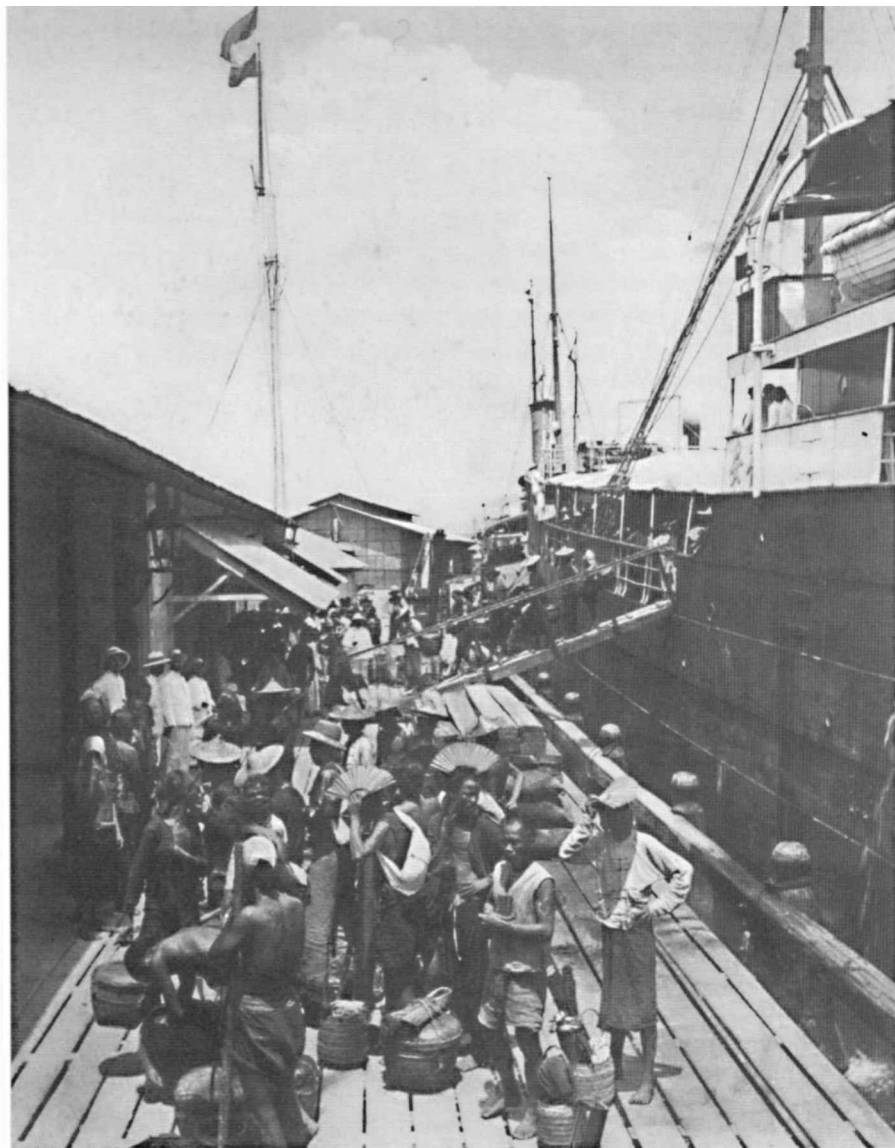
Sumber: M.A. Loderichs *et al.*, *Medan: Beeld van een Stad* (Purmerend: Asia Major, 1997).

besar, majikan Cina di Malaya, pasti memilih untuk tidak berurusan dengan Pelindung Pekerja Cina. Ini bukan hal yang sulit karena *sinkheh* dapat disuruh menuliskan jawaban bahwa mereka membayar sendiri biaya perjalanan mereka.

Laporan-laporan resmi tidak banyak berbicara tentang pelanggaran-pelanggaran peraturan seperti itu. Namun, sikap kedua belah pihak dicerminkan oleh perilaku seorang majikan Cina yang mengutarakan kekecewaannya mengenai Peraturan Imigran Cina itu di depan Komisi Perburuhan 1890 seolah-olah Peraturan itu bukan sesuatu yang luar biasa, dan ketika kiat-kiat yang digunakannya mendapat pujian khusus dari Komisi itu. Orang ini adalah Gan Eng Seng; rombongan *sinkheh*-nya dengan tujuan Tanjong Pagar Dock Company menandatangani kontrak di Cina, yang tentu saja tidak sah dalam mata pemerintah manapun. Pelayaran mereka telah dibayar semuanya di Cina, tetapi hanya *sinkheh* yang tidak dapat dipercaya yang dibawa ke depan Pelindung Pekerja Cina untuk menandatangani kontrak yang sah.[27]

Menurut Komisi Perburuhan 1876, penyalahgunaan tidak banyak terjadi pada imigrasi ke Straits Settlements, tetapi banyak terjadi pada emigrasi dari situ, terutama ke Sumatra. Penyalahgunaan, baik nyata maupun sangkaan, dalam pengadaan pekerja untuk Sumatra merupakan pemicu protes yang berujung dengan pembentukan Pelindung Pekerja Cina. Protes ini dimulai oleh majikan Cina di Singapura dan Johor yang didorong, seperti kata Eunice Thio, "oleh kepentingan pribadi dan barangkali jiwa sosial".[28] Kendaraan organisasi mereka untuk ini adalah Gambier & Pepper Society, yang didominasi oleh pekebun Teochiu. Para anggotanya menghadapi kelangkaan pekerja pada awal tahun 1870-an, terutama karena persaingan dari perkebunan-perkebunan baru di Deli yang berusaha menarik pekerja Teochiu. Mereka mengajukan petisi kepada pemerintah pada 1871 menentang penahanan dan penyaluran *sinkheh* secara paksa, dan ini disusul kemudian pada 1873 oleh sebuah permohonan agar dibuat "peraturan untuk mencegah 'bad characters' (orang tidak baik) menculik imigran yang baru tiba".[29] Desakan-desakan berikutnya akhirnya menghasilkan pembentukan Komisi 1876 dengan tugas menyelidiki "Kondisi Pekerja Cina di Koloni", yang mendengarkan banyak kesaksian mengenai "penculikan" untuk Sumatra.[30]

Salah seorang saksi di depan Komisi ini, Komisioner Polisi Penang Plunket, menggambarkan bahwa ada kelompok penculik *sinkheh* di Penang untuk diperkerjakan di Deli pada awal 1870-an. Ada, katanya, lebih dari seratus "bad characters" di Penang dengan kegiatan satu-satunya berupa mencari pekerja untuk Sumatra, dan yang sering dijatuhi hukuman karena melakukan

"penculikan".[31] Gambaran yang diberikan Plunket bahwa ada komplotan yang menculik orang Cina dari jalan, warung, dan rumah bordil, agak tidak tepat di sini. Semua korban "penculikan" yang diselidiki oleh Komisi 1876 memang imigran berutang dan karena itu kehilangan sebagian kebebasan mereka untuk bergerak. Ini tidak berarti bahwa nasib buruk mereka agak berkurang karena itu, tetapi menyebut mereka korban "penculikan" berarti mencampuraduk persoalan—yang sengaja dilakukan oleh beberapa pihak berkepentingan.

Meski selalu ada migran yang memiliki tiket langsung dari Cina ke Penang, sebagian besar meninggalkan kampung mereka dengan maksud untuk pergi ke Singapura. Jika *khehtau* mereka berhasil mencarikan mereka pekerjaan di kota itu atau di perkebunan di Johore atau Riau, mereka tampaknya mau menerima ini tanpa mengeluh. Namun, jika permintaan dari majikan semacam itu tidak besar, *sinkheh* ditahan dengan paksa di darat atau dikirim ke Penang tempat proses ini diulang kembali. Di Singapura atau di Penang mereka terus diawasi sampai dapat ditemukan seseorang yang bersedia membayar biaya perjalanan mereka. Karena biaya sehari-hari untuk mereka terus meningkat, perlakuan kasar semakin sering terjadi. *Khehtau* menggunakan kekerasan atau tipu muslihat untuk memaksa mereka pergi ke tempat yang jauh, yang menurut pendengaran mereka bukan tempat yang baik, dan untuk melakukan pekerjaan di luar bidang pekerjaan yang mereka bayangkan.[32]

Meski sebagian besar bukti yang ada di depan Komisi 1876 berkaitan dengan Singapura, ada catatan menarik mengenai sistem pengadaan pekerja di Penang, pusat pengadaan pekerja untuk Deli. E. Karl, juru bahasa Cina di Penang, mengisahkan tentang bagaimana "Tan Tek" (Khoo Thean Tek, dihukum dideportasi pada 1867 karena memimpin Toh Peh Kong Society pada waktu kerusuhan Penang tetapi kemudian diampuni sebagai warganegara Inggris) boleh dikatakan memegang monopoli penuh untuk memutuskan ke mana imigran yang berutang akan dikirim untuk dipekerjakan. "Tan Tek bertindak sebagai semacam pelindung Kuli Cina, dan dibayar seribu dolar setahun atau lebih oleh pihak-pihak berkepentingan di Shantou. Ia memiliki sebuah rumah untuk tempat menampung pekerja. Ia ketua Toh Pek Kong Society, dan orang paling berkuasa di tempat itu."[33] Menurut Karl semua migran yang berutang ditahan di depot "Tan Tek" sampai ditebus oleh agen majikan. Berbagai "coolie-brokers" (calo kuli) Penang yang memasok pekerja *sinkheh* untuk pekebun Deli karena itu pasti punya hubungan dekat dengan Khoo Thean Tek. Calo kuli memasok pekerja kepada agen perusahaan tembakau Sumatra dengan harga $40-50, dari ini $25-30 untuk uang muka *sinkheh*. Setelah membayar

biaya angkutan, laba *khehtau* dan biaya bermalam di depot Khoo Thean Tek, uang untuk *sinkheh* hanya tersisa beberapa dollar, dan calo sering mencoba menipunya untuk juga mendapatkan uang sisa ini. Berapa pun yang diterima *sinkheh,* ia akhirnya harus membayar kembali jumlah total yang ditetapkan sebagai uang muka. Sisa $15-20 dari biaya merupakan laba bagi calo—jauh lebih tinggi dalam hal pekerja Sumatra daripada bagi pekerja Semenanjung Malaya.[34]

Hampir sejak dari awal berdiri, perkebunan tembakau Deli mendapat nama yang sangat buruk dalam kalangan imigran. Seperti dikeluhkan oleh seorang pekebun Inggris pemilik perkebunan di Provinsi Wellesley dan Sumatra pada 1875:

> Di pasar pekerja Cina ada rasa benci yang dalam terhadap nama 'Deli', yang tidak saja berdampak buruk kepada perkebunan itu, tetapi juga kepada seluruh Pulau, sedemikian rupa sehingga orang Cina yang bersedia berlayar ke Langkat atau Serdang, tanpa mengetahui letak kedua tempat itu, akan benar-benar menjadi gila bila mendengar kata 'Deli' di atas kapal.[35]

Pada 1871 nama buruk ini tersiar di Cina dan juga di Straits Settlements. Pada tahun itu Konsul Inggris di Shantou mengirimkan ke Singapura terjemahan plakat-plakat yang dipasang di jalan-jalan oleh "orang-orang Cina di sini yang biasa mengirim pekerja Cina", menentang cara-cara yang digunakan untuk memaksa *sinkheh* berangkat dari Straits Settlements ke Deli dan tempat-tempat lain.[36]

Apapun penyebab dari nama buruk itu pada awalnya, penyebab itu menjadi besar karena paksaan dan pengelabuan yang digunakan untuk memastikan imigran berangkat ke Deli meski sebenarnya mereka tidak mau. Segi-segi kasar usaha pengadaan pekerja ini menarik sejumlah manusia paling lancung untuk menjadi agen pengadaan, dan kekerasan melahirkan kekerasan lebih lanjut. Pada 1874-5 khususnya, ketika permintaan akan pekerja jauh lebih besar dibandingkan dengan penawaran, ada banjir protes dalam suratkabar Straits Settlements menentang "penculikan" untuk Deli. Menjelang akhir 1875 ada dua kejadian menyangkut pekerja untuk perkebunan di Sumatra. Mereka menundukkan awak kapal uap kecil yang sedang mengangkut mereka menyeberangi Selat Malaka dan melarikan diri dengan uang muka mereka. Penyelidikan menunjukkan bahwa pemberontak itu ternyata penjahat yang mengeruk uang dengan mengumpulkan uang muka, bukan *sinkheh* yang tidak tahu apa-apa dan dikelabui mengenai tempat tujuan mereka.[37] Tan Seng Poh,

Gambar 14 Kuli Cina merawat tanaman tembakau Deli pada 1880-an
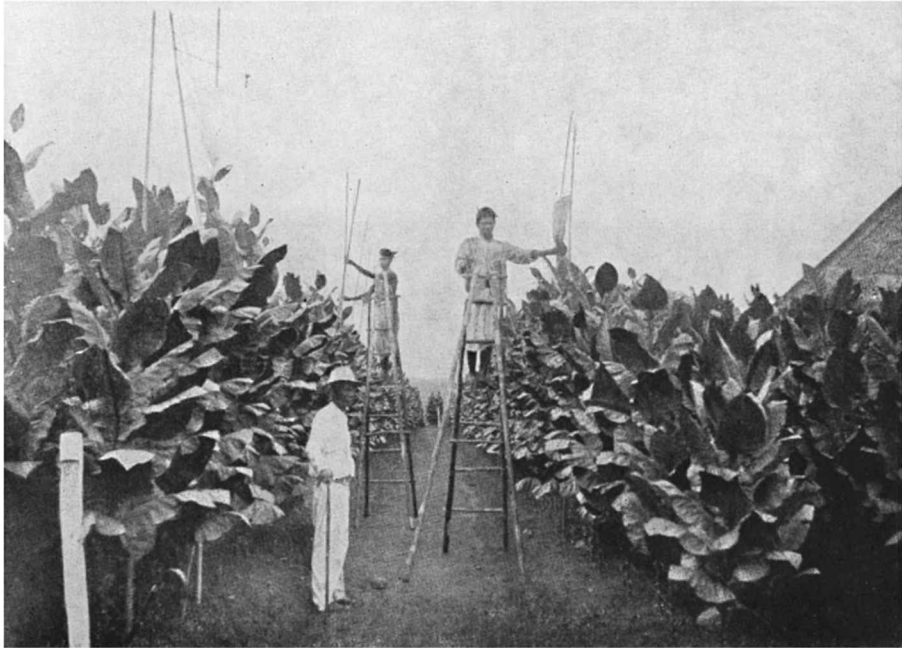
Sumber: Senembah maatschappij, 1889-1939 (Amsterdam, 1939).

pemimpin Teochiu Singapura dan pejuang terkemuka perlindungan *sinkheh,* mengakui: "Sebagian besar dari orang yang mengambil uang muka untuk pergi dari sini orang tidak baik, dan banyak yang ikut berlayar dengan maksud merampok dan melarikan diri. Singapura menjadi bersih dari orang-orang tidak baik ini dengan cara ini."[38] Namun, berita mengenai kejadian-kejadian tersebut semakin memperburuk nama Deli dalam kalangan orang Cina.

Seberapa jauh kondisi pekerja di Sumatra dapat dikatakan penyebab dari nama buruk Sumatra pada tahun 1870-an? Ketika mencoba menjawab pertanyaan ini, kita dihadapkan pada hal yang agak meragukan: apa sebenarnya yang dikeluhkan mengenai Deli. Beberapa orang Cina Singapura yang menjadi saksi di depan Komisi 1876 banyak berbicara tentang iklim yang tidak sehat di situ, tetapi juga menyebutkan soal kesulitan untuk kembali.[39] Pengamat Inggris dan Belanda pada umumnya lebih memusatkan perhatian kepada tuduhan-tuduhan mengenai perlakuan buruk oleh pekebun.[40]

Ada hal-hal yang benar dalam semua keluhan ini. Tetapi sulit untuk mengatakan bahwa Deli, dari sisi manapun, lebih buruk daripada komunitas-

komunitas "perbatasan" yang lain pada masa itu, misalnya Perak dan Selangor. Keluhan mengenai iklim yang tidak sehat sangat aneh. Deli lebih baik dibandingkan dengan Perak. Di Perak ada sekitar 3.000 penambang timah yang mati setiap tahun karena beri-beri dalam periode 1879-82.[41] Perkebunan-perkebunan tembakau yang lebih besar menyediakan rumah sakit untuk pekerja masing-masing, yang memang berkepentingan untuk menyediakannya.

Ada alasan yang lebih kuat untuk menuding perlakuan buruk oleh majikan sebagai penyebab nama buruk Deli, meski juga dalam hal ini sulit untuk mendapatkan bukti-bukti yang jelas. Seperti komunitas-komunitas perbatasan lainnya, Deli pada masa awalnya tidak memiliki sistem peradilan dan kepolisian, atau tata tertib berperilaku yang baik. Pemegang kekuasaan ekonomi mutlak atas pekerja, pekebun juga pemegang kekuasaan hukum. Sultan Deli pada awalnya memberi pekebun wewenang yang luas atas pekerja mereka, meski tetap memegang kekuasaan tertinggi mengadili pelanggaran hukum yang berat. Namun, dalam praktik hampir semua pelanggaran diadili di tempat. Sultan berusaha sekuat tenaga menunjukkan kemauan baik kepada pekebun, tetapi jumlah polisi kerajaan sangat tidak memadai dan pekebun enggan kehilangan jam kerja pekerja yang melanggar peraturan dan pekerja yang ditugaskan mengawalnya selama proses pengadilan yang makan waktu di ibukota. Perlakuan buruk tidak terhindarkan, tetapi seperti halnya dengan *tauke* tambang di Malaya, tidak ada bukti tertulis untuk dasar menentukan hukuman.

Ekspansi perkebunan yang sangat cepat menuntut intervensi pemerintah, yang seharusnya sudah dilakukan pada 1874, ketika badan peradilan akhirnya dibentuk untuk mengatur penduduk imigran Pantai Timur Sumatra. Dalam teori, pekebun tidak lagi memiliki wewenang hukum, yang mencakup wewenang menghukum pekerja yang mencoba meninggalkan perkebunan. Tetapi perangkat pemerintah yang dibentuk sebagai pengganti sama sekali tidak memadai. Hanya 12 polisi bersenjata ditempatkan di Deli, dan tidak ada polisi sama sekali di Langkat dan Serdang, wilayah perkebunan yang sedang berkembang dengan cepat itu.

Selama periode 1874-7 Deli terkenal dengan kekerasannya bahkan dalam kalangan orang Eropa. Serangan-serangan atas pekebun dan pedagang sering terjadi, dan mencapai puncak dengan tewasnya sejumlah pekebun pada 1876-7. Perlakuan buruk atas pekerja oleh pekebun barangkali bukan penyebab utama. Sebagian besar serangan itu diprakarsai oleh orang Gayo dan orang Batak, meski penduduk Melayu setempat dan pekerja Cina pelarian juga semakin banyak yang

ikut karena tidak ada pihak berwenang yang jelas. Perlunya reformasi hubungan perburuhan terlihat dengan jelas, dan sebuah komisi hukum dikirim dari Batavia pada akhir 1876 untuk menyelidiki kondisi kehidupan pekerja. Komisi itu membawa ke depan pengadilan empat pekebun yang didakwa melakukan perlakuan buruk, dari ini satu orang bunuh diri tidak lama kemudian. Pada waktu bersamaan polisi tambahan yang cukup besar dikirim ke *cultuurgebied* itu.[42]

Di sisi tata peradilan, tahun 1870-an menyaksikan perlawanan oleh pekebun Deli, dipimpin oleh J.T. Cremer yang pemberani, menentang usul Mirandolle kepada States-General untuk penghapusan sanksi pidana yang tercantum dalam kontrak perburuhan. Akibat kontroversi ini, dibuat peraturan perburuhan khusus untuk Sumatra Pantai Timur pada 1875, yang dirinci lebih lanjut dalam "coolie ordinance" 1880 yang terkenal itu. *Coolie ordinance* ini menjadi contoh bagi semua perkebunan di luar Jawa. Sanksi pidana dipertahankan (dihapus di Jawa), tetapi ada tambahan beberapa syarat, yang sangat maju untuk zamannya. Semua kontrak perburuhan harus didaftarkan pada pemerintah, dan tidak mengikat pekerja setelah tiga tahun. Setelah kontrak berakhir (atau setelah tiga tahun jika pekerja belum melunasi utang kepada pekebun) pekerja harus dikembalikan ke tempat ia pertama kali diambil. Majikan wajib memberikan uang muka dua kali sebulan kepada pekerja, menyediakan perumahan yang memadai, air, dan perawatan kesehatan, dan mengizinkan dia mengajukan keluhan kepada pejabat pemerintah terdekat.[43]

Di atas kertas karena itu, dan barangkali juga dalam praktik, kuli kontrak tidak lagi dapat diperlakukan dengan tidak semena-mena, dibandingkan dengan kuli kontrak di Malaya setelah pertengahan tahun 1870-an.[44] Komisi Perburuhan 1876 merasa perlu menyatakan demi keadilan bahwa "apapun yang terjadi pada masa yang sudah-sudah, kami percaya bahwa kesejahteraan pekerja sama terjaminnya di sana seperti di sini, dan bahkan sebenarnya jauh lebih banyak intervensi di pihak Pemerintah Belanda daripada di pihak kami untuk menjamin kesejahteraan itu".[45]

Penilaian ini mengabaikan satu faktor yang sangat penting. Kecuali sebagian dari kuli kontrak Cina di perkebunan gula di Penang, kuli kontrak Cina di Malaya hampir tidak pernah berurusan dengan siapapun yang bukan dari suku bangsanya sendiri. Di pihak lain, pekerja tembakau bertanggung jawab langsung kepada asisten majikan orang Eropa masing-masing, yang membayarkan uang muka dan upah terakhir mereka. Selain itu, kelas pekebun Eropa di Deli dilukiskan oleh sebagian pengamat luar sebagai luar biasa

sombong, "mereka menuntut sangat banyak dari sisi penghormatan atas diri pribadi mereka".[46] Selama dekade-dekade pertama abad ke-20 ada cukup banyak bukti, misalnya serangan-serangan yang sering terjadi atas pekebun dan mandor, yang menunjukkan bahwa pekerja perkebunan di Deli menjadi sasaran penghinaan yang luar biasa, kalau bukan kekejaman fisik.[47] Ada kemungkinan gejala-gejala ini sudah tampak pada tahun 1870-an, ketika bukti-bukti bahkan lebih jarang ada. Andaikata tidak demikian halnya, tetap mudah dibayangkan bahwa *sinkheh* yang belum pernah berhadapan dengan "setan-setan berambut pirang" itu pasti merasa tidak aman mempercayakan diri kepada mereka daripada kepada majikan yang harus berpedoman kepada standar perilaku yang dijunjung tinggi bersama.

Akhirnya, keluhan yang juga umum terdengar mengenai Deli ialah sulit untuk kembali pulang. Hal ini sebagian disebabkan oleh jarak dari salah satu pusat-pusat kehidupan Cina—terutama Singapura,[48] dan sebagian lagi oleh kenyataan bahwa kuli kontrak di Deli baru melunasi utang setelah jangka waktu yang amat lama, itupun jika ia melunasi.

Di perkebunan dan di tambang timah Malaya, pola yang umum ialah *sinkheh* bekerja tanpa upah selama satu tahun, untuk melunasi ongkos perjalanannya. Setelah itu, jika ia berhasil bertahan hidup dengan ransum seadanya yang disediakan perusahaan, ia pada dasarnya berstatus orang bebas.[49] Namun, di perkebunan tembakau, semuanya tergantung kepada kinerja pekerja. Pekerja paling sukses boleh meninggalkan perkebunan setelah setahun dengan dibekali surat berhenti bekerja dan $100 dalam saku. Pekerja paling tidak berhasil mungkin tidak akan pernah bebas dari utang, seandainya tidak ada klausul maksimum tiga tahun dalam "coolie ordinance" yang ditambahkan pada 1880. Rata-rata imbalan bagi hasil panen seorang pekerja di Deli diperkirakan $45 (di satu perkebunan) pada 1869,[50] $68 pada 1874,[51] dan $78 pada 1882.[52] Karena masa tanam hingga panen hanya makan waku delapan atau sembilan bulan setiap tahun, pekerja diberi pekerjaan lain selama bulan-bulan yang tersisa dengan upah rata-rata $6 per bulan. Pada 1882, jumlah yang biasanya ditagih dari pekerja pada akhir tahun pertama sebesar $93 (atau $78 untuk *laukheh* yang dipekerjakan kembali di Sumatra), terdiri dari:

	$
Panjar ke *sinkheh* di Penang (atau dalam hal *laukheh* $15)	30
Uang muka dua kali sebulan sebesar $2	48
Uang muka khusus waktu Tahun Baru Cina, dan sebagainya.	7
Biaya membuka hutan sebelum ditanami	5
Biaya perkakas, dan sebagainya.	3
Total	93

Karena itu, pada 1882, pekerja *rata-rata* di Deli tidak dapat melakukan hal-hal lain selain daripada melunasi utang, dengan asumsi ia tidak punya utang baru, dan berharap mendapat untung lima atau sepuluh dollar. Di tingkat lebih rendah pada tahun 1870-an, ada kemungkinan sebagian besar pekerja dalam kenyataan tidak mampu melunasi utang setelah satu tahun. Di pihak lain, sementara industri tembakau berbenah diri, dicapai produktivitas yang lebih tinggi, sehingga sampai pada 1890 banyak saksi mengakui di depan Komisi Perburuhan bahwa tembakau Deli menawarkan upah yang terbaik kepada *sinkheh.* Bukti-bukti menunjukkan bahwa sekitar 75 persen *sinkheh* mendapat laba pada tahun pertama, dan bahwa dalam hal pekerja Teochiu jumlah yang mendapat laba mencapai hingga 90 persen.[53]

Jumlah orang Cina yang meninggalkan Sumatra dengan surat berhenti bekerja karena kontrak sudah selesai dari perkebunan tidak besar—2.101 pada 1881, dibandingkan dengan sekitar 8.000 yang berimigrasi tahun sebelumnya. Tetapi pekebun mengatakan banyak yang dipekerjakan kembali di perkebunan, "karena mereka tidak dapat memperoleh upah yang setara di tempat lain", atau menetap di wilayah bersangkutan sebagai pedagang. Pada 1881 ada 4.597 "orang Cina bebas" di *cultuurgebied* yang membayar pajak perdagangan.[54]

Pendeknya, pekerja Cina di Sumatra lebih baik keadaannya dari sisi pelayanan kesejahteraan, dan pekerja yang paling beruntung juga mendapat upah yang tinggi. Di pihak lain, pekerja yang paling tidak berhasil atau boros cenderung harus meringkuk lebih lama dalam perbudakan dalam lingkungan yang sangat tidak nyaman. Biasanya, pekerja biasa yang gagal melunasi utang pada tahun pertama menjadi patah semangat dan mencari pelarian dengan mengisap candu. Mereka kemudian kemungkinan besar berutang kepada penyedia candu, minuman keras, dan bandar judi. Dalam hal ini, pasal maksimum tiga tahun "coolie ordinance" tidak dapat membantu mereka, karena orang yang meminjamkan

uang kepada mereka mengharuskan mereka untuk menandatangani kontrak baru dan memulai kembali proses pelunasan utang itu.[55]

Faktor-faktor ini dapat menjelaskan sebagian dari nama buruk Deli dalam mata pekerja pada awal 1870-an. Namun, bila Deli dibandingkan secara objektif dengan peluang-peluang kerja di tempat lain, nama buruk yang terus ada sampai 1880-an dapat dijelaskan sebagian lagi oleh pengaruh para majikan Cina Malaya yang memiliki kepentingan tertentu.

Pada 1875-6 nama Deli sangat buruk, dan semakin diperburuk oleh kekerasan yang sangat sering digunakan *khehtau* dan calo untuk memaksa *sinkheh* naik ke kapal menuju Deli. Calo di Penang meminta imbalan $40-50 kepada agen perusahaan Deli untuk setiap *sinkheh* yang disediakannya, dibandingkan dengan hanya $22-26 untuk Penang atau $32-36 untuk Perak.[56] Selisih harga itu bukan pendapatan tambahan untuk *sinkheh.* Selisih itu jatuh ke tangan calo sebagai keuntungan atau mungkin ke tangan orang lain yang terlibat dalam pengadaan pekerja. Sampai batas tertentu ini jelas mendorong calo dan *khehtau* yang paling serakah untuk menggunakan cara-cara intimidasi atau pengelabuan yang lebih kejam lagi untuk mengirim *sinkheh* ke perkebunan. Juga, keuntungan ekstra ini mungkin untuk pemimpin-pemimpin yang lebih berkuasa seperti "Tan Tek"—majikan pekerja dan kepala perhimpunan rahasia—sebagai uang pisah dengan pekerja yang dapat mereka pekerjakan sendiri sebenarnya.

Bahkan dengan ongkos yang lebih tinggi ini tetap saja sangat sulit bagi pekebun Sumatra untuk memperoleh pekerja di bawah kondisi 1875-6. Karena itu, pada tahun-tahun itu mereka mulai mencoba membawa orang Cina langsung dari Cina, dan lebih banyak mempekerjakan orang Jawa.[57] Dan untuk sementara jelas mereka diselamatkan dari cara-cara pengadaan pekerja yang sulit ini dengan terbentuknya Pelindung Pekerja Cina di Straits Settlements.

Sebagai akibat dari laporan 1876 Komisi "Pekerja Cina" dua peraturan diterbitkan pada tahun berikut. "Chinese Immgrants' Ordinance" (Peraturan Imigran Cina) membentuk "Protector of Chinese Immigrants", pelindung imigran Cina, dan "Crimping Ordinance" (Peraturan Pemasokan Pekerja) membentuk "Protector of Emigrants", pelindung emigran. Kedua jabatan itu dalam praktik digabung menjadi satu dengan pengangkatan Pickering sebagai Pelindung Pekerja Cina di Singapura pada Mei 1877, dan Karl di Penang tidak lama kemudian. Peraturan-peraturan itu memerintahkan pembentukan Depot Imigrasi Pemerintah, tempat imigran yang berutang ongkos perjalanan ditahan di bawah pengawasan sampai ada majikan ditemukan untuk mereka. Namun, depot-depot itu tidak pernah didirikan. Yang terjadi, depot-depot milik "coolie-brokers" diberi lisensi oleh pemerintah dengan syarat harus

mematuhi standar perawatan tertentu. Penahanan di tempat tidak berlisensi ditetapkan melanggar hukum. Bila majikan ditemukan, kontrak yang mengikat secara hukum ditandatangani di hadapan Pelindung Pekerja Cina, dan kepada *sinkheh* yang menandatangani kontrak dijelaskan hak-hak dan kewajibannya menurut hukum.[58]

Pelindung Pekerja Cina memutus lingkaran setan kekerasan dalam pengadaan pekerja untuk Sumatra. Di satu pihak, perangkat administrasi yang lebih baik dibentuk sehingga penculikan dengan kekerasan dan pelanggaran hukum dapat dibawa ke depan pengadilan. Di pihak lain, satu bagian dari pasar pekerja—"penumpang belum membayar"—ditarik dari bawah kendali perhimpunan-perhimpunan rahasia Cina. Di bagian ini persaingan harga dimungkinkan, baik antara *sinkheh,* yang diberitahu mengenai persyaratan kerja yang lebih baik dalam kontrak kerja di Sumatra, dan antara calo, yang masih dapat mengharapkan komisi yang lebih tinggi dari agen perusahaan tembakau. Dengan demikian, pasokan pekerja Cina dari Straits Settlements untuk perkebunan di Sumatra, yang tidak lebih dari tiga atau empat ribu per tahun pada 1870-an, naik dengan cepat pada 1880-an (lihat Tabel 3).

TABEL 3

Kontrak kerja untuk Langkat, Deli, Serdang dan Asahan dibuat di depan Pelindung Pekerja Cina, Penang dan Singapura[59]

	Penang	Singapura	Total
1879	3.529	500*	4.000*
1880	6.600*	1.381	8.000*
1881	7.426	2.378	9.804
1882	5.990	1.498	7.488
1883	6.740	1.977	8.717
1884	8.540	2.464	11.004
1885	11.434	3.617	15.051
1886	12.391	14.317**	16.708**
1887	11.953	4.811	16.764
1888	10.913	7.439**	18.352**

Notes: * Hanya perkiraan, berdasarkan angka-angka untuk seluruh Sumatra.

**Angka-angka ini mencakup orang Jawa dan orang Banjar yang cukup besar jumlahnya. Jumlah orang Indonesia yang menandatangani kontrak di Singapura untuk bekerja di *cultuurgebied* mencapai 1726 pada 1887, dan naik dalam dua tahun berikut.

Namun, oposisi terhadap Deli di antara pihak-pihak berkepentingan terus berlanjut. Pada 1880 Pickering mengeluh bahwa *khehtau* terus meniup-niupkan prasangka buruk terhadap Sumatra, untuk mempengaruhi *sinkheh* untuk menolak "persyaratan kerja yang jauh lebih baik yang ditawarkan pekebun Deli" di Singapura. *Sinkheh* itu kemudian pergi ke Penang, tempat "pemerasan-pemerasan yang luar biasa" terjadi karena lemahnya staf Pelindung Pekerja Cina. Setelah menolak di Singapura uang muka sebesar $24, dipotong $16 untuk *khehtau* untuk pengeluaran, *sinkheh* terpaksa menerima kontrak yang sama di Penang dengan uang muka $30, dan dari ini *khehtau* mengantungi $26.[60] Pickering barangkali melebih-lebihkan di sini peranan *khehtau* dibandingkan dengan peranan kepala perhimpunan rahasia Cina dan calo di Penang,[61] tetapi pengalamannya menunjukkan betapa sulit mengganti sistem penyaluran pekerja yang dikuasai orang Cina itu dengan sistem pasar pekerja terbuka.

Sebagai kelompok terbesar dan paling teratur para majikan Eropa pekerja Cina, pekebun Deli pada awalnya mendapat manfaat yang besar dari kerjasama saling menghormati dengan Pickering:

> Percaya bahwa prospek bagi seorang Cina yang pergi ke Deli benar-benar bagus (tulis Pickering), saya menggunakan waktu saya untuk berkunjung ke depot-depot bersama-sama dengan para pekebun dan agen-agen mereka, dan membagikan poster untuk menjelaskan kepada para imigran dan orang Cina yang lain manfaat yang akan mereka peroleh jika mereka pergi bekerja ke Sumatra.[62]

Tetapi Pelindung Pekerja Cina, Pickering, sebenarnya pegawai penguasa Inggris. Sikapnya yang penuh pengertian tidak lama kemudian berubah karena tekanan dari para majikan di Penang, di bawah pimpinan tauke gula Provinsi Wellesley Khaw Boo Aun dan didukung oleh Karl.[63] Pada September 1881 mereka mendesak Pickering untuk memberi majikan setempat hak untuk memilih *sinkheh* terlebih dahulu dan melarang agen pengadaan pekerja dari Deli masuk ke depot-depot sampai kebutuhan majikan setempat benar-benar telah terpenuhi. *Sinkheh*, menurut mereka, "sebenarnya tidak ingin keluar dari wilayah Inggris, tetapi mereka dipancing dengan janji muluk-muluk dan uang muka yang besar agar mau pergi ke Sumatra". Sebagai akibat dari tekanan ini Pickering tidak lagi berusaha mendorong imigran untuk pergi ke Sumatra.[64]

Permohonan majikan Penang agar diberi hak untuk memilih *sinkheh* terlebih dahulu di depot-depot ditolak oleh Pickering pada 1881. Namun, sikap pemerintah mengenai hal ini tampaknya melemah pada 1890 jika dilihat dari pernyataan W. Cowan di depan Komisi Perburuhan. Ditanya mengapa tidak ada *sinkheh* tertarik pergi ke Deli padahal upah di situ lebih tinggi, ia menjawab, "Karena pekebun Provinsi Wellesley diizinkan menebus kuli terlebih dahulu."[65]

Pekebun Deli sangat jengkel dengan sikap Pickering mengenai pelayaran langsung pekerja dari Cina ke Sumatra. Ocean Steamship Company, yang sudah mengoperasikan kapal uap dari Cina ke Singapura, membuka jalur Singapura-Belawan (Deli) pada 1880, dan menawarkan tiket-langsung dari Cina ke Sumatra untuk migran Cina. Pickering mengeluarkan peraturan mengharuskan migran yang pindah kapal di Singapura menghadap dia untuk menandatangani kontrak. Tetapi ini berarti tujuan pekebun Sumatra untuk melindungi *sinkheh* yang mereka ambil dari Cina dari calo, majikan, dan perhimpunan rahasia di Straits Settlements tidak tercapai. Meski mereka tetap mengirimkan orang yang berpengalaman ke Cina untuk mengambil pekerja untuk Sumatra, ini tidak dapat lagi dinamakan emigrasi langsung jika semua *sinkheh* harus melewati depot-depot berlisensi di Singapura atau Penang.[66]

Semua ini dan perselisihan-perselisihan kecil lainnya menimbulkan kejengkelan pada kedua belah pihak tetapi sedikit sekali kaitannya dengan krisis pasokan pekerja yang akhirnya menyebabkan pekebun Deli memutuskan mengakhiri hubungan mereka dengan Straits Settlements sebagai sumber pekerja. Krisis pada akhir 1880-an ini sebagian disebabkan oleh kondisi ekonomi, sebagian oleh sikap pejabat pemerintah di Cina yang semakin keras.

TABEL 4
Permintaan dan penawaran pekerja Cina

	Harga timah *Straits*, per pikul ($)[60]	Harga tembakau Amsterdam per 500 gram (sen guilder)	Imigran Mendarat di Penang dan Singapura[61]	Dari ini dimasukkan ke depot sebagai "penumpang belum membayar"
1881	27,74	115,0	89.803	32.316
1882	30,85	137,5	101.009	28.415
1883	30,29	134,0	109.136	26.446
1884	25,14	144,0	106.748	24.871
1885	23,53	141,5	111.456	26.391
1886	33,82	154,0	144.517	39.192
1887	36,89	121,0	166.442	42.400
1888	42,10	128,5	166.353	34.607
1889	35,52	146,0	146.820	21.213
1890	31,97	72,5	132.274	14.335

Harga tembakau mencapai puncak pada 1884-6, dan semakin luas hutan Sumatra yang dibakar untuk dijadikan perkebunan. Produksi terus meningkat dari 93.500 pak pada 1883 menjadi 236.300 pak pada 1890, akibatnya permintaan akan pekerja meningkat.[70] Tahun-tahun itu menyaksikan awal dari periode harga tinggi dan ekspansi industri timah yang sangat cepat di Malaya, yang berlangsung dari 1886 hingga 1895.[71] Pasokan pekerja imigran meningkat dengan cepat sebagai jawaban atas kondisi pertumbuhan tinggi ini pada 1886-7, meski tidak cukup cepat untuk memenuhi permintaan akan pekerja pada tingkat upah yang berlaku. Sayangnya, hasilnya bukan naiknya upah ke tingkat keseimbangan ekonomi, tetapi laba luar biasa bagi calo dan pihak lain yang terlibat dalam pengadaan pekerja migran. Mereka ini terus menaikkan premium dan komisi mereka setinggi-tingginya, terutama terhadap majikan Eropa di Sumatra. Setelah 1887 imigrasi tidak lagi meningkat, bahkan menurun, meski permintaan akan pekerja tetap tinggi selama dua tahun berikut. Angka-angka dalam Tabel 4 menunjukkan kesenjangan antara penawaran dan permintaan akan pekerja di sektor-sektor utama.

Kegagalan pasokan pekerja untuk memenuhi permintaan yang terus meningkat paling jelas terlihat pada kategori “penumpang belum membayar”, yang menjadi tumpuan majikan Eropa. Sebagian besar dari penurunan pasokan antara 1887 dan 1890 terjadi pada kategori ini. Penyebab utama ialah sikap pejabat Cina.

Emigrasi orang Cina di bawah kondisi yang pasti berujung dengan kuli kontrak tentu saja tidak disukai oleh para pejabat Cina yang progresif. Lalu lintas *sinkheh* kontrak pada umumnya dipandang menghina, dan bahkan kadang-kadang dinamakan ”buying and selling little pigs”, jual beli babi kecil. Inilah sebabnya mengapa pihak berwenang di Amoy mewajibkan emigran membayar ongkos perjalanan mereka sebelumnya. Bagi perkebunan Sumatra pelabuhan yang terpenting adalah Shantou (Swatow). Teochius dipandang sebagai pekerja tani terbaik, diikuti oleh Hai-lokhong, yang juga sering dimasukkan ke dalam kategori Teochius. Kedua kelompok ini biasanya beremigrasi dari Shantou. Satu-satunya kelompok dialek yang lain yang juga banyak dipekerjakan di perkebunan tembakau, meski mereka tidak terlalu dihargai, adalah Kheh, yang dapat berangkat dari Shantou atau Hong Kong.[72] Pekebun Sumatra, untuk memperoleh pekerja, bergantung pertama kepada kerjasama Pelindung Pekerja Cina Straits Settlements, tetapi pada akhirnya kepada kerjasama, kepada peduli tidaknya atau kepada dapat tidaknya pejabat Cina di Shantou yang berwenang mengizinkan *sinkheh* beremigrasi secara terbuka dalam kategori ”penumpang belum membayar” disogok.

Gerakan-gerakan di sana sini untuk reformasi di pihak pejabat tinggi di Shantou tidak pernah sepenuhnya efektif, sebagian besar karena seluruh sistem emigrasi sangat bergantung kepada korupsi dan penipuan. Namun, gerakan-gerakan itu dapat menurunkan cukup besar jumlah migran yang tiba dengan status “penumpang belum membayar”. Awal 1879, misalnya, pihak berwenang di Chaozhou (wilayah Shantou) melarang emigrasi pekerja berutang dari pelabuhan itu, dengan alasan *sinkheh* berutang ”dijual dengan cara-cara seperti jual beli sapi” saat tiba di Singapura. Tekanan Straits Settlements melalui Konsul Inggris di Shantou menyebabkan peraturan ini dicabut setelah berjalan beberapa bulan. Tetapi larangan ini sempat menurunkan dengan sangat besar jumlah ”penumpang belum membayar” dan jumlah kontrak untuk Sumatra tahun itu.[73]

Usaha yang lebih gigih untuk reformasi menjelang akhir 1880-an sebagian besar dilakukan oleh Tso Ping-lung, Konsul Cina kedua di Singapura (1881-91).[74] Setelah gagal meyakinkan Inggris agar melarang imigrasi calon pekerja berutang ke Straits Settlements, Tso mulai, pada Juni 1885, melancarkan tekanan-tekanan

kepada pejabat Cina di Chaozhou. Dia menggambarkan kepada mereka secara berlebih-lebihan perlakuan buruk yang dihadapi pekerja berutang setiba mereka di Straits Settlements. Akibatnya sebuah peraturan kembali diterbitkan di Shantou melarang emigrasi calon pekerja berutang, tetapi ditarik setelah ada tekanan dari Konsul Inggris, yang didesak untuk bertindak atas permintaan Pickering.[75]

Tso kemudian menggunakan bentuk-bentuk tekanan yang tidak langsung menentang pekerja berutang, terutama di Deli. Suratkabar Singapura *Lat Pau*, yang turut didirikannya dan didukungnya, menurunkan dua artikel utama pada 1886 menyerang kondisi pekerja di Deli.[76] Tso juga bekerja sama dengan pihak berwenang di Chaozhou dalam serangkaian tindakan terhadap calo-calo yang dituduh menculik pekerja dari Cina. Sasaran utama adalah perusahaan E. Kee di Shantou, pemasok terbesar pekerja Teochiu untuk Straits Settlements. Pada 1886 perusahaan ini dituduh menculik tujuh orang laki-laki Cina untuk Singapura, tetapi kemudian menandatangani kontrak untuk Deli. Ke tujuh orang ini membantah tuduhan itu, tetapi tekanan dari anggota keluarga mereka di Shantou, dan dari para pejabat Cina, sedemikian rupa sehingga E. Kee harus mengeluarkan uang $500 untuk memulangkan mereka ke Cina, termasuk biaya menyogok beberapa dari mereka.[77] Perusahaan itu juga dipaksa memulangkan seorang *sinkheh* dari Serapong (Bengkalis) pada Juni 1888 untuk memberi kesaksian bahwa ia beremigrasi atas kemauan sendiri. Tidak lama setelah ini perusahaan itu dibubarkan. Sebuah perusahaan Eropa di Shantou juga dipaksa memulangkan dua emigran pada 1888. Namun, contoh yang paling menyeramkan bagi agen-agen yang lain ialah hukum pancung atas Siau Khai di Shantou pada September 1888. Ia dituduh oleh dua emigran yang baru kembali dari Nanyang menculik mereka bertahun-tahun yang lalu.[78]

Dalam semua kasus ini Pelindung Pekerja Cina, dan tentu saja Belanda, mengatakan tuduhan-tuduhan itu palsu, dan dilansir semata-mata untuk tujuan pemerasan. Memang tidak dapat dibantah bahwa korupsi yang merajalela melenyapkan hasrat untuk mengadakan reformasi di pihak pejabat. Banyak pengamat yang berpendapat bahwa sebagian besar komisi yang tinggi yang diminta calo kuli di Penang dan Singapura dalam periode ini digunakan untuk menyogok dan mempengaruhi pihak-pihak berkepentingan di Shantou dan Hong Kong.[79] Namun, Pemerintah Straits Settlements di atas segalanya bertanggung jawab dalam hal ini karena menolak bekerja sama secara terbuka dan memberikan dukungan kepada pejabat-pejabat Cina yang memperjuangkan reformasi untuk mengakhiri kejahatan yang jelas ada itu.[80]

Semua majikan utama *sinkheh* terkena dampak kurangnya pasokan pekerja akibat tekanan-tekanan baru dari pihak berwenang Cina ini setelah 1885, tetapi majikan yang terpaksa bergantung kepada "penumpang belum membayar" yang tiba sebelum pembentukan Pelindung Pekerja Cina paling menderita. Komisi yang diminta "coolie-brokers" terus meningkat. Pada Maret 1885, Deli Planters Union (DPV) memutuskan bahwa semua anggotanya diharuskan membayar komisi tidak lebih dari $50 untuk setiap *sinkheh* yang diterima. Namun, posisi calo kuli terlalu kuat sehingga upaya ini dihentikan pada Januari 1887. Dengan segera komisi melonjak menjadi $60-70. Pada akhir tahun itu komisi naik lagi menjadi $110-15 di Singapura dan $125 di Penang.[81] Dari ini tidak lebih dari $30 yang digunakan untuk menutup uang muka untuk *sinkheh* dan untuk ongkos perjalanan.

Karena penanam tembakau Sumatra tidak memiliki sumber pekerja Cina yang lain, dan mereka sanggup membayar komisi, pasokan pekerja berutang untuk mereka tetap tinggi, seperti terlihat dalam Tabel 5.

TABEL 5
Kontrak pekerja ditandatangani di depan Pelindung Pekerja Cina, *Straits Settlements*[82]

	Semua Tujuan[83]	Penang dan Provinsi Wellesley	Kerajaan-kerajaan Melayu	Pantai Timur Sumatra	(Plus pengadaan langsung di Cina)[84]
1886	45.717	6.221	16.721	16.757	-
1887	51.859	5.464	21.397	17.489	-
1888	44.451	2.476	16.367	19.561	(+1.152)
1889	32.666	3.170	7.071	11.793	(+5.176)
1890	26.211	1.880	8.972	8.972	(+6.666)

Jumlah pekerja berutang di tambang timah Malaya berkurang seiring dengan turunnya harga timah secara berangsur-angsur setelah 1888, tetapi barangkali lebih menurun lagi karena diganti dengan imigran "bebas" yang diperoleh dari depot-depot berlisensi. Pekebun gula Eropa di Provinsi Wellesley paling menderita.

Industri tembakau Deli mencapai puncak kemakmuran pada 1887-9. Sebelumnya, keinginan pekebun untuk melepaskan diri dari ketergantungan kepada calo pekerja di Straits Settlements terhambat karena metode-metode yang lain untuk memperoleh pekerja lebih sulit lagi. Selama krisis pasokan pekerja ini mereka berhasil melepaskan diri dari krisis itu.

Jalan keluar yang paling disukai pekebun ialah membawa pekerja langsung dari Cina ke Sumatra. Namun, ini memerlukan izin dari Pemerintah Cina. Untuk tujuan ini Belanda pada 1873 menandatangani protokol Inggris-Prancis-Cina 1866. Protokol ini menghapus uang muka untuk pekerja, atau biaya pengadaan yang dibebankan kepada pekerja. J.T Cremer, pekebun Deli Maatschappij yang gesit itu, mencoba melaksanakan protokol ini dengan pergi sendiri ke Cina 1875. Ia menemukan bahwa ada kecenderungan untuk tidak mengizinkan emigrasi ke Deli atas dasar persyaratan apapun juga. Cremer sampai pada kesimpulan bahwa perkebunan Deli sebaiknya mengirim *laukheh* (migran berpengalaman) terpercaya ke Cina untuk meyakinkan teman-temannya untuk bermigrasi ke Sumatra tanpa kontrak. Dengan cara ini perkebunan-perkebunan yang paling sukses, terutama Deli Mij., berhasil mempengaruhi makin banyak emigran untuk dengan penuh kesadaran memilih Deli ketika persaingan untuk memperoleh pekerja mulai marak di Straits Settlements.[85]

Lima perusahaan tembakau Sumatra,[86] yang kembali dipimpin oleh Deli Mij., bekerja sama pada 1886 dalam upaya yang lebih gigih untuk mewujudkan migrasi langsung. Dr J.J.M. de Groot, pejabat juru bahasa Cina di Batavia, pada waktu itu sedang mengadakan perjalanan studi banding di Cina Selatan. Atas permintaan kelima perusahaan itu, ia ditugaskan pada waktu bersamaan untuk mencoba mewujudkan emigrasi langsung ke Sumatra.

Setelah konsultasi dengan pekebun, De Groot memutuskan untuk menghindari kontak dengan Inggris, yang dianggapnya berkepentingan untuk menentang migrasi langsung. Karena itu, De Groot menghindari bekerja melalui Shantou, karena Konsul Belanda di situ seorang Inggris. Ia memutuskan untuk mencari pekerja Teochiu melalui perusahaan Jerman Pasedag & Co. di Amoy; direktur utama perusahaan ini, Piehl, adalah Konsul Belanda di situ. Perusahaan ini kemudian meminta bantuan Lauts & Haysloop, sebuah perusahaan Jerman di Shantou, dan bantuan Konsul Jerman di Shantou. Sukses yang akhirnya dicapai dengan cara ini lebih disebabkan oleh desakan Jerman kepada pemerintah Cina daripada kepada Belanda.[87]

De Groot dan pendukung-pendukungnya menyadari bahwa tidak mungkin memperoleh izin untuk emigrasi di bawah kontrak–terutama dari

Amoy. Pada awal 1887 mereka memfokuskan upaya mereka untuk mendapat izin bagi emigrasi ke Sumatra berdasarkan persyaratan yang sama dengan persyaratan bagi "penumpang belum membayar" ke Straits Settlements. Pihak berwenang tetap tidak mengizinkan. Peking ingin memaksa Belanda untuk mengizinkan Cina menempatkan sejumlah konsul di India Belanda, dan menegaskan bahwa Cina harus sangat berhati-hati dalam mengambil keputusan mengenai emigrasi ke wilayah-wilayah yang tidak memiliki konsul Cina di situ.

Konsul Jerman di Canton menghasilkan terobosan menjelang akhir 1887, ketika ia memanfaatkan dengan jitu pengangkatan seorang penasihat pemerintah Cina untuk Urusan Cina di Medan, yang dilukiskannya sebagai semacam Pelindung Pekerja Cina. Gubernur Guangdung agak melunak dan meminta laporan dari Shantou mengenai hal ini. Sementara itu De Groot dan Konsul Jerman menggunakan semua pengaruh mereka kepada pejabat-pejabat lebih tinggi Chaozhou, dan menyogok beberapa pejabat bawahan. Hasilnya, izin resmi diperoleh untuk emigrasi bebas ke Sumatra pada April 1888.[88]

Lima perusahaan Deli sudah menandatangani kontrak Februari yang lalu dengan Lauts & Haysloop untuk pengadaan dan pengangkutan imigran bebas ke Deli. Pada Mei 1888 dua kapal yang pertama tiba di Belawan, *China* membawa 70 migran dari Shantou dan *Glucksburg* 68 dari Amoy. Bulan berikutnya *Duburg* membawa 60 lagi dari Shantou, meski beberapa melarikan diri di Singapura ketika kapal itu singgah di situ karena ada wabah cholera.

Biaya sewa ketiga kapal uap ini—di atas $11.000—dibebankan kepada kelima perusahaan yang mendukung sistem pengadaan pekerja ini, meski pekerja migran sama sekali tidak wajib menandatangani kontrak dengan perusahaan-perusahaan ini atau perusahaan-perusahaan yang lain setiba di tempat tujuan. Dua puluh tujuh imigran di kapal uap *China* tidak menandatangani kontrak, karena para calo berlayar bersama mereka, dan berhasil mencegah imigran itu untuk menandatangani kontrak kecuali jika para calo diberi komisi yang besar.[89] Untuk selanjutnya calo dilarang berlayar bersama imigran, dan sejak itu sedikit sekali *sinkheh* yang menolak menandatangani kontrak setiba di Sumatra. Di atas kertas mereka masih berstatus imigran "bebas", paling tidak dalam kaitan dengan urusan dengan Pemerintah Cina. Namun, dari kacamata *sinkheh*, kelebihan utama sistem baru ini dibandingkan dengan sistem lama ialah ia dapat mengirimkan uang muka $30 yang diterimanya kepada keluarganya di Cina, dan tidak lagi harus menggigit jari karena uang muka jatuh ke tangan calo kuli dan *khehtau.*

Pada tahun-tahun awal migrasi langsung biaya yang harus ditanggung pekebun untuk setiap *sinkheh* yang dibawa langsung sekitar $100, sementara

calo kuli di Straits Settlements menurunkan komisi mereka menjadi $85. Namun, pekebun tidak mau kembali ke situasi lama, yakni bergantung kepada Straits Settlements, dan berharap biaya akan turun seiring dengan meningkatnya perdagangan untuk mengisi kapal-kapal uap yang kosong di jalur Sumatra-Cina. Pada konperensi tahunan mereka pada Juli 1888, Planters Union membentuk sebuah Biro Imigran untuk membebaskan lima perusahaan Deli yang merintis sistem baru ini dari tanggung jawab keuangan mereka. Anggota DPV berjanji untuk mencari pekerja hanya melalui biro ini, yang akan mencari pekerja di Straits Settlements bilamana pasokan langsung dari Cina tidak mencukupi. Ongkos yang harus dibayar untuk setiap *sinkheh* yang diperoleh melalui biro ditetapkan pada mulanya $60 (atau $40 untuk *sinkheh* yang diperoleh di Straits), ini dinaikkan menjadi $85 (atau $50) pada 1889, dan akhirnya menjadi $75 (atau $40) pada 1891.[90] Dari jumlah ini, $20 adalah uang muka yang diberikan kepada *sinkheh* setiba di perkebunan, dan harus dikembalikannya. Jumlah ini tidak cukup untuk menutup semua biaya, tetapi kerugian dibagi rata di antara para anggota Biro Imigran.

Pada 1890 pekebun menghentikan menyewa kapal khusus untuk migran dan menandatangani kontrak dengan agen Hong Kong dari Aziatische Kustenfahrte Gesellschaft of Hamburg, yang mengoperasikan dua kapal untuk selamanya pada jalur Cina-Sumatra.[91] Lauts dan Haysloop tetap bertindak sebagai agen pengadaan, dan pada gilirannya bekerja sama dengan Heng Thye, "cooliehong" Shantou. Heng Thye mengikat diri untuk tidak lagi berhubungan dengan calo kuli di Straits Settlements, dan untuk mengambil pekerja semata-mata dari Deli. *Laukheh* terpercaya dikirim pulang dari Sumatra untuk membantu pengadaan pekerja di tingkat desa.[92]

Namun, semua upaya ini tetap belum memungkinkan pekebun memenuhi semua kebutuhan mereka akan pekerja. Calo kuli berkepentingan untuk menggagalkan sistem baru itu; mereka menggunakan prasangka-prasangka lama terhadap Deli. Para pengamat Belanda menuduh bahwa agen-agen para calo kuli di Straits Settlements berlayar bersama 270 *sinkheh* dengan S.S. *China* menuju Sumatra dari Hong Kong pada Maret 1889.[93] Ketika dekat Singapura, *sinkheh* ini menyerang *khehtau* mereka, mereka menuduh mereka ditipu untuk dibawa ke Sumatra. *China* terpaksa singgah di Singapura untuk menghindari pemberontakan. Di situ *sinkheh* dibawa menghadap Pelindung Pekerja Cina, dan pekebun Deli kehilangan pasokan pekerjanya. Kerusuhan-kerusuhan serupa itu terjadi di atas dua kapal uap yang lain pada 1889-90, tetapi masing-masing kapal berhasil menaikkan serdadu ke kapal dari Riau

atau Singapura untuk memulihkan keadaan tanpa harus singgah di pelabuhan Inggris.[94]

Juga di Cina tekanan-tekanan menentang emigrasi ke Deli terus ada. Perusahaan pengadaan pekerja Heng Thye, misalnya, dibanjiri orang-orang yang mengancam akan mengadukan kepada pejabat pemerintah penculikan anggota keluarga mereka kecuali jika mereka dibayar untuk menutup mulut. Pada awal 1890 poster-poster dipasang atas prakarsa perorangan di Shantou memperingatkan bahwa Heng Thye akan kehilangan kepalanya karena melakukan jual beli manusia. Gerakan-gerakan ini dikecam secara resmi pada Mei berikut setelah ada tekanan dari Hoetink, penasihat pemerintah Cina di Medan yang dikirim ke Shantou untuk memperjuangkan kepentingan Deli di Cina Selatan.[95] Namun, meski kecaman ini bernada santun, Peking sendiri sangat menentang emigrasi, sebagian karena hasratnya yang semakin besar untuk menempatkan konsul di India Belanda. Dalam sebuah pernyataan resmi 4 Oktober 1891, Pemerintah Cina menetapkan tiga syarat bagi kelanjutan emigrasi: pengangkatan konsul; penghapusan sarang candu dan judi di Deli; dan jaminan bahwa ada aliran uang dari pekerja emigran di luar negeri ke Cina. Syarat tersebut terakhir diwujudkan dengan peraturan yang mewajibkan pekerja mengirimkan upah, setelah dipotong untuk memenuhi kebutuhan pokok pekerja, ke Cina. Peraturan ini menimbulkan kekhawatiran yang besar tetapi tidak ada langkah lebih lanjut, dan perlahan-lahan dilupakan setelah 1892.[96]

Pada sekitar 1897 imigrasi langsung ke Sumatra dapat dikatakan sudah bersifat permanen, tidak lagi terancam dihentikan dengan mendadak karena ditentang pemerintah atau ada bencana alam. Tetapi arus perlawanan terhadap imigrasi langsung yang tetap ada menyebabkan pekebun tidak pernah dapat memenuhi kebutuhan mereka akan pekerja atau memiliki sumber pasokan yang pasti. Upaya-upaya untuk memulai migrasi langsung dari Hong Kong, Macao, dan Hainan tidak berhasil, sementara kapal-kapal migran dari Amoy tidak lagi beroperasi setelah 1889. Shantou, lebih daripada sebelumnya, memegang monopoli pemasokan pekerja untuk *cultuurgebied*.[97]

Meski sudah ada migrasi langsung, pekebun semakin terpaksa menengok ke sumber-sumber yang lain untuk memenuhi kebutuhan mereka akan pekerja. Pekerja India, sangat penting bagi perkebunan Malaya, tidak pernah besar jumlahnya. Sejumlah orang India yang menandatangani kontrak di Straits Settlements untuk bekerja di Sumatra melanggar undang-undang Pemerintah India. Serangkaian perundingan antara Batavia dan Calcutta pada tahun 1870-an tidak berhasil mencapai kesepakatan mengenai migrasi pekerja. Pada 1887,

sebagai akibat krisis pekerja di Deli, Pemerintah India Belanda mengadakan pendekatan-pendekatan yang lebih serius dengan mengirimkan sebuah komisi ke India. Namun, ini gagal mengubah tuntutan Calcutta bagi penempatan seorang Inggris sebagai pelindung pekerja India di Sumatra.[98] Ini tidak diizinkan oleh Belanda.

Di pihak lain, pekerja Jawa tersedia setiap saat. Di Jawa ada kantor-kantor urusan pekerja, sumber yang sangat besar bagi pekerja setengah menganggur, dan kerjasama yang besar dari pejabat Belanda. Tetapi pekebun menolak beralih kepada pekerja Jawa, terutama untuk perawatan tanaman, karena pekerja Cina dipandang lebih peka pada insentif uang. Dalam periode-periode seperti pada tahun-tahun awal Pelindung Pekerja Cina, ketika pekerja Cina dapat diperoleh dengan mudah dari Straits Settlements, orang Jawa tidak digunakan dan jumlah mereka menurun.[99] Di pihak lain, menjelang akhir tahun 1880-an, orang Jawa mulai dipekerjakan di semua bidang kecuali perawatan tanaman. Pada 1887, terdapat 2.210 orang Jawa singgah di Singapura dengan kontrak yang sudah ditandatangani untuk bekerja di berbagai perkebunan di Sumatra, dan 1.940 "natives of Netherlands India", penduduk asli India Belanda (orang Banjar dan orang Boyan, dan juga orang Jawa), menandatangani kontrak di depan Pelindung Pekerja Cina di Singapura untuk bekerja di situ.[100] Angka-angka ini terus naik sampai 1890, ketika harga tembakau yang terus turun hingga setengah menghentikan ekspansi untuk sementara. Imigrasi orang Jawa mulai ada kembali pada pertengahan tahun 1890-an, dan dengan cepat melampaui imigrasi orang Cina. Kopi, dan kemudian teh dan karet, memperluas landasan ekonomi wilayah perkebunan setelah 1890, dan tanaman-tanaman baru ini didominasi oleh pekerja Jawa dari sejak awal.

Tabel[101] berikut menunjukkan perubahan komposisi pekerja perkebunan di Pantai Timur Karesidenan Sumatra:

TABEL 6
Komposisi suku bangsa pekerja perkebunan Pantai Timur

	1874	1884	1890	1900	1916	1926
Cina	4.476	21.136	53.806	58.516	43.689	27.133
Jawa	316	1.771	14.847	25.224	150.392	194.189
India	459	1.528	2.460	3.270	-	-

Imigrasi Cina mencapai puncaknya pada periode 1886-9, ketika lebih dari 16.000 masuk setiap tahun. Untuk tahun 1880-an secara keseluruhan, ketika pekerja diambil dari Straits Settlements, ada rata-rata sekitar 12.000 imigran berutang Cina setiap tahun. Bandingkan ini dengan angka kurang dari 7.000 pekerja per tahun yang dibawa Biro Imigrasi selama masa operasinya, 1888-1930.[102]

Meskipun jumlah pekerja berutang Cina berangsur-angsur menurun, penduduk total Cina di Sumatra Timur terus naik. Sebuah komunitas yang lebih berimbang muncul, terdiri dari pedagang, pemilik warung, petani kecil, nelayan dan penebang kayu. Namun kelompok-kelompok ini tetap merupakan minoritas kecil.

Menoleh ke belakang, tampaknya hambatan terbesar yang dihadapi industri tembakau Sumatra dalam memperoleh pekerja Cina adalah orang Cina Straits Settlements yang mengendalikan sebagian besar pasokan pekerja tidak memiliki minat besar pada Sumatra. Pada tahap-tahap awal industri tembakau, ketika hal ini, ditambah dengan prasangka terhadap Deli sebagai tempat bekerja yang asing dan jauh, pekebun tembakau menghadapi kesulitan besar menarik pekerja bahkan setelah membayar komisi yang luar biasa tinggi kepada calo-calo kuli pemegang kendali pasokan pekerja. Ada kemungkinan = bahwa majikan Deli akan harus beralih dari pekerja Cina sebelum 1880, seandainya tidak ada pembentukan Pelindung Pekerja Cina di Straits Settlements. Keuntungan majikan Eropa ialah mereka dapat mempengaruhi langsung pemerintah kolonial, sedangkan pengaruh majikan Cina sering terbatas hanya pada para pekerja. Melalui Pelindung Pekerja Cina salah satu bagian dari lalulintas migran dikeluarkan dari bawah kendali perhimpunan-perhimpunan rahasia Cina, dan terbuka untuk persaingan harga di antara para majikan Eropa. Namun, bagian ini terbatas pada pasokan pekerja oleh kelompok-kelompok di Shantou yang sudah menjalin hubungan dengan majikan Eropa, dan melakukan kegiatan melalui Pelindung Pekerja Cina. Namun, bagian terbesar imigran tetap luput dari penetapan status oleh Pelindung sebagai migran "bebas", dan diperkerjakan sebagian besar menurut pola lama.

Pelindung Pekerja Cina juga ternyata tidak mampu menyediakan pekerja dalam jumlah yang memadai untuk memenuhi permintaan yang semakin tinggi menjelang akhir tahun 1880-an. Kendala utama adalah oposisi Pemerintah Cina, yang menjadikan sistem emigrasi cabang Deli sebagai sasaran utama serangannya karena Deli merupakan pihak yang paling diuntungkan oleh sistem tiket-berutang. Pekebun Deli barangkali patut dikecam habis-

habisan atas keangkuhan dan kekejaman mereka, terutama pada tahun-tahun awal. Mereka tidak berminat mencoba mengganti sistem *sinkheh* berutang yang ditandai oleh keluar masuk pekerja dengan cepat, dengan sistem pengadaan pekerja yang bebas dan stabil. Menurut mereka, kenaikan upah sedikit sekali pengaruhnya pada pasokan pekerja; pasokan pekerja dapat diperbesar dengan biaya jauh lebih murah dengan memberikan komisi yang lebih besar kepada calo kuli.[103] Mereka lebih suka menggunakan *sinkheh* daripada pekerja yang sudah berpengalaman; ini menunjukkan bahwa mereka mendorong hubungan sosial dan ekonomi yang berpengaruh buruk kepada perkembangan pasokan pekerja yang stabil. Namun, ada faktor-faktor lain yang mempengaruhi pasar pekerja selain daripada kondisi objektif di Deli.

Sumber resmi diterbitkan yang sering dikutip:

Straits Settlements Legislative Council Proceedings (SSLCP), terutama Lampiran 22 tahun 1876: "Report of the Committee appointed to consider and take evidence upon the Conditions of Chinese Labourers in the Colony", 3 November 1876.

Annual Reports of the Protector of Chinese, Straits Settlements, dalam *Straits Settlements Government Gazette (SSGG).*

Straits Settlements Labour Commission Report, Singapore, 1890 *(SSLCR). Koloniale Verslagez,* The Hague.

Verzameling van Consulaire en andere Verslagen en Berigten (Consulaire Verslagen), The Hague.

10

Pan-Islam Abad Ke-19 di Negeri Bawah Angin

Tulisan-tulisan tentang pergerakan nasional Indonesia biasanya selalu mulai dengan kegiatan-kegiatan di bidang kebudayaan dan pendidikan yang dilakukan oleh kaum bangsawan Jawa berpendidikan Barat pada periode dua dekade pertama abad ke-20. Sambutan luar biasa dari rakyat banyak yang dibangkitkan oleh gerakan politik massa yang pertama di Kepulauan itu, Sarekat Islam, pada 1912-20, dalam tulisan-tulisan itu dilihat sebagai suatu kejutan, atau bahkan hampir sebagai penyimpangan dari kisah arus utama mengenai penegakan sebuah negara. Selama tahap penting antara mempertahankan masyarakat tradisional dan boleh dikatakan terisolasi dengan kekuatan sendiri dengan nasionalisme modern dan sekuler, Islam diakui, jika diakui, sebagai semacam proto-nasionalisme atau pra-nasionalisme.[1] Pandangan dominan mengatakan bahwa negara sekuler itu puncak dari gerakan politik, karena itu aspirasi untuk mempersatukan *umma* Islam adalah kesadaran palsu, yang bernilai historis terbatas sebagai perambah jalan menuju gerakan-gerakan yang sukses mencapai tujuan akhir, yakni sebuah negara-bangsa sekuler.

Pandangan ini tidak tepat untuk abad ke-21, karena identitas-identitas global seperti misalnya berbagai aliran dalam Islam, mulai tampak setidak-tidaknya sebagai bagian dari masa depan yang juga mungkin terwujud seperti halnya nasionalisme sekuler. Peneliti semakin banyak yang mengakui peranan penting yang terus dimainkan oleh masyarakat-masyarakat pemikir yang menghubungkan Asia Tenggara dengan pusat-pusat yang lain di dunia Islam, sehingga gerakan pan-Islam berkembang pada akhir abad ke-19 dan memainkan peranan yang lebih utama dalam tulisan-tulisan penelitian. Bahwa semua kaitan ini perlu dikaji ulang sudah dikemukakan dengan meyakinkan oleh Michael Laffan. Laffan menekankan pentingnya baik Cairo sebagai pusat

tandingan terhadap Eropa bagi kaum intelektual yang melakukan pembaruan dan berusaha melenyapkan kolonialisme, maupun peranan yang tak terputus-putus cita-cita pan-Islam di zaman kita.[2]

Perubahan-perubahan ini menyebabkan penting untuk menerbitkan kembali versi revisi dari artikel tahun 1967 itu, tidak lagi sebagai suara tersisih yang merekam sebuah episode yang sudah dilupakan orang, tetapi sebagai data tambahan dari sumber-sumber Belanda mengenai arah perkembangan zaman yang sekarang sudah menampakkan diri sebagai arus utama. Kita tidak perlu lagi mengeluh mengenai "kekurangan data" yang sudah disadari Berg pada 1932,[3] dan tidak perlu meminta maaf karena mengalihkan perhatian dari nasionalisme dan Marxisme.

Istilah pan-Islam baru digunakan semakin luas oleh aktivis Islam sendiri setelah kekalifahan Ottoman hancur dalam Perang Dunia Pertama, yang menimbulkan persoalan: bagaimana mengungkapkan persatuan politik umat. Pada awal 1920-an dunia Islam sibuk dengan berbagai kongres yang dirancang untuk menghidupkan kembali kalifah universal yang kokoh, antara lain Kongres Islam Sedunia—yang gagal—yang diselenggarakan oleh Ibn Saud, gerakan Khilafat India, dan kongres-kongres al-Islam di Indonesia.[4] Pada abad ke-19 sultan-sultan Ottoman mengaku diri sebagai lambang Kekalifahan, dan "pan-Islam" adalah istilah yang digunakan orang Barat untuk gerakan solidaritas Islam internasional, yang biasanya mengharapkan bantuan dari Turki.

Pembahasan dalam bab ini dipusatkan kepada fungsi Islam sebagai pengikat yang, pertama, memisahkan pengikutnya dengan tegas dari orang Eropa yang sudah mulai menguasai kehidupan mereka; kedua, menyebabkan dominasi kekuasaan Eropa pada akhirnya tidak dapat ditolerir lagi karena pemerintahan Eropa bukan pemerintahan Islam; dan, ketiga, membuka ruang kesetiaan yang lebih luas dan lebih meyakinkan daripada kesetiaan yang ditunjukkan rakyat jelata kepada raja yang biasanya tidak patut menerimanya. Sebuah gerakan dianggap gerakan pan-Islam jika memiliki landasan ideologi untuk membangun kerjasama antara, atau mencakup, unit-unit politik dalam suatu perjuangan politik di bawah panji-panji Islam. Pengikat ini sangat disukai karena menghubungkan orang Islam yang tampaknya lemah dan terbelakang di Asia Tenggara dengan Kalifah sendiri, raja paling berkuasa di muka bumi, dalam pikiran rakyat banyak, yang pasti akan datang menyelamatkan sesama penganut agama Islam yang sedang tertindas jika mereka ini dapat membuktikan bahwa mereka pantas mendapat pertolongan dari dia. Ledakan-ledakan antusiasme pan-Islam seperti itu tidak harus muncul dari gerakan internasional yang

dikendalikan dari pusat. Turki tidak pernah berada dalam posisi pemimpin gerakan seperti itu, dan kendaraan organisasi yang efektif baru muncul pada periode berikut ketika nasionalisme menjadi pesaingnya yang kuat.

Solidaritas Islam

Saat Portugis pertama kali muncul di Asia, masyarakat Asia Tenggara barangkali masih toleran dan mudah menyerap pengaruh-pengaruh baru, seperti halnya mereka toleran terhadap agama Hindu, agama Buddha dan agama Islam. Tetapi dengan diserangnya sistem perdagangan Islam oleh Portugis secara langsung dan dengan kejam, Portugis menimbulkan reaksi yang tajam di sejumlah kota dagang tempat Islam sudah kokoh berdiri. Kemakmuran sejumlah kerajaan penting, terutama Aceh dan Banten, sebagian besar bersumber pada pelarian-pelarian dari pusat-pusat yang telah jatuh ke tangan pendatang baru Kristen itu, dan pada pengalihan perdagangan Islam ke pelabuhan-pelabuhan mereka yang baru milik orang Islam yang lebih agresif.

Dihubungkan dengan Asia Barat melalui perdagangan, wajar bila kerajaan-kerajaan ini menganggap perjuangan mereka sendiri bagian dari perjuangan dunia Islam secara keseluruhan. Seperti dijelaskan dalam Bab 4, Kesultanan Aceh memiliki hubungan dagang dan politik dengan Sultan Ottoman pada abad ke-16, dan dianugerahi hadiah-hadiah berupa ahli pembuat senjata, meriam, dan prajurit Turki sebagai imbalan bagi kedudukannya sebagai "vassalage", wilayah bawahan. Meski hubungan ini tidak dapat dipertahankan setelah itu, meriam dan bendera Turki di Aceh dan juga perlindungan Ottoman atas tempat-tempat suci ibadah haji, turut berperan memberikan gambaran yang berlebihan mengenai posisi dan kekuatan Turki di Asia Tenggara pada abad ke-19.

Perlawanan agama yang menyambut tahap baru ekspansi Eropa pada abad ke-19 lebih luas landasannya dibandingkan perlawanan agama pada abad ke-16. Tidak saja pedagang yang saling bersaing tetapi juga semua lapisan masyarakat sekarang merasakan dampak dari pengaruh barat yang ada di mana-mana. Islam menurut perkiraan sebenarnya dapat memperdalam pengaruhnya di Asia Tenggara selama tiga abad bahkan tanpa kehadiran orang Eropa sekalipun. Namun tidak diragukan bahwa orang Eropa melancarkan ekspansi khususnya dalam bentuk hasrat internasional penuh kesadaran diri untuk membela ortodoksi. Karena tidak dapat menyerap orang Eropa seperti telah dilakukannya dengan orang India, orang Indonesia memperoleh tempat

berlindung untuk menentang kebudayaan baru dan kekuasaan asing itu dalam agama Islam. Bahkan pada awal abad ke-20, seorang misionaris Jerman mengatakan dengan nada penuh penyesalan betapa akan cepatnya penganut animisme yang sangat toleran itu berubah menjadi penganut Islam yang sangat fanatik karena tekanan faktor-faktor ini:

> Hal yang sangat ganjil bagi penduduk setempat di zaman baru ini tentu saja latar belakang kehidupan orang Eropa . . . keseimbangan dirinya terganggu oleh zaman baru itu.
>
> Dalam ketidakpastian jiwa ini, Islam merupakan benteng yang sangat kuat bagi kedamaian, karena masuk Islam berkaitan terutama dengan kepentingan-kepentingan utama penduduk. Islam menawarkan keselamatan bagi kehidupan batin, jiwa setiap orang, di bawah sorotan mata tidak menyenangkan penguasa. Sebuah ruang disisihkan yang tidak dapat ditembus oleh kearifan Eropa dan pengetahuan teknik modern, yakni kepribadian nasional dalam balutan sebuah agama baru.

Selain itu, Islam menawarkan keyakinan bahwa penindasan dan rasa rendah diri yang menjadi ciri seseorang dalam kehidupan ini akan dibalik dalam kehidupan di akhirat.[5] Jika ditambah dengan animisme, faktor-faktor semacam itu juga mendorong kepercayaan ortodoks dan eksklusif di antara orang-orang yang menyebut diri orang Islam dari generasi ke generasi.

Gerakan-gerakan reformasi berulang kali muncul di sekitar dunia Islam atas nama ortodoksi ajaran agama yang lebih besar dan persatuan internasional, dan selalu ditentang oleh kekuasaan-kekuasaan setempat. Jawa merupakan kasus ekstrim perlawanan kekuasaan setempat. Di situ kompromi budaya abad ke-17 dengan Islam menjamin berlanjutnya mitologi Hindu dalam tradisi pertunjukan panggung yang bergairah, dan pemupukan kehidupan batin yang menjadi ciri agama-agama dari India.[6] Namun, orang Islam Indonesia, betapapun mereka lekat kepada adat istiadat, sangat luar biasa dalam kesediaan mereka untuk mengakui bahwa adat istiadat itu biadab dan jahat, jika demikian dikatakan oleh *sayyid* yang berpengatahuan luas atau *haji* yang baru pulang. Karena itu, hubungan yang lebih erat antara Asia Tenggara dan Arab pada abad ke-19 patut mendapat perhatian yang lebih besar di sini.

Meski jaraknya jauh, dan banyak peraturan menghambat yang dikeluarkan pemerintah Belanda, banyak sekali orang Indonesia yang pergi ke Mekkah untuk menjalankan ibadah haji. Dalam tiga puluh tahun terakhir abad ke-19,

ada empat hingga delapan ribu orang yang berangkat ke Mekkah setiap tahun, atau rata-rata sekitar 15 persen dari jumlah total orang asing yang mendarat di Hejaz.[7] Sebelum Sumatra Utara dibawa ke dalam orbit Belanda, jemaah *haji* sudah berlayar dengan bebas dari Aceh. Pada 1873 kapal-kapal perang Belanda menghentikan sebuah kapal Madras yang mencoba menurunkan 270 *haji* ke darat di negeri yang cabik-cabik karena perang itu.[8]

Kota suci itu memiliki daya tarik yang luar biasa bagi orang Indonesia. Snouck Hurgronje, yang berkunjung ke Mekkah pada 1885, mengatakan bahwa orang "Jawa" di situ dapat dikenali dari sikap mereka yang memburuk-burukkan negeri mereka sendiri, mengatakan negeri mereka negeri setengah biadab, dan sikap hormat mereka yang naif terhadap tanah yang dianggap segala-galanya di dunia itu tempat semua lembaga dianggap telah sesuai dengan ajaran Nabi.[9]

Ibadah haji merupakan sumber utama gagasan-gagasan asing bagi orang Indonesia pada abad ke-19, terutama bagi mereka yang berasal dari luar Jawa. Sedikit sekali orang yang pergi ke Mekkah karena alasan lain selain daripada melaksanakan ibadah haji, dan Belanda tanpa malu-malu melarang pendidikan barat. Meski sebagian besar orang "Jawa" hanya beberapa pekan saja tinggal di Hejaz, mereka menjalin hubungan di situ dengan orang Jawa yang sudah menetap di Mekka dan sangat besar jumlahnya dan menganut pandangan internasional dan sikap anti-kolonial kota suci itu.[10] Hubungan ini mencerminkan dengan lebih tajam skandal kekuasaan orang kafir atas orang Islam. Snouck Hurgronje bercerita mengenai seorang sheikh asal Sumatra di Mekkah yang meledak marahnya dalam sepucuk surat kepada sepupunya di kampung, ketika sepupunya itu dengan lugu menawarkan diri untuk membantu Belanda menaklukkan Aceh. Ketakutan karena ledakan amarah ini, sepupu itu berjanji akan selalu berdoa semoga prajurit Islam selalu menang di masa datang.[11]

Orang Arab dan *Haji*

Sebagai wakil dari sumber murni Islam, imigran Arab dengan sendirinya sangat dihormati di Asia Tenggara pada abad ke-19, terutama jika mereka *sayyid.* Orang Arab secara sendiri-sendiri sudah mengembara ke timur sejak abad ke-17, dan menjadi sangat berpengaruh di kerajaan-kerajaan seperti Aceh, Siak, Palembang, dan Pontianak. Emigrasi besar-besaran dari Hadhramaut yang miskin mulai pada akhir abad ke-18, yang membawa dampak pertama-tama atas Sumatra, dan kemudian atas Jawa pada pertengahan abad ke-19. Jumlah mereka tetap kecil.

India Belanda mencatat ada 20.500 orang yang mengaku keturunan Arab pada 1885 dan 29.000 pada 1905. Straits Settlements dan Federasi Kerajaan-kerajaan Melayu menambah 20.000 pada 1901, dan Kerajaan-kerajaan Melayu Bukan-Federasi menambah kurang dari 1.000, dilihat dari angka-angka kemudian. Tetapi orang Arab merupakan masyarakat tersendiri, dengan kekayaan dan pengaruh yang jauh lebih besar daripada jumlah mereka. Jumlah terbesar ada di kota-kota besar—Surabaya, Batavia, dan Singapura—dan di pusat-pusat pengaruh Arab tradisional seperti Palembang, Aceh, dan Pontianak.[12]

Meski Pemerintah India Belanda tidak membatasi imigrasi Arab ke Jawa, namun imigran Arab diharuskan, sebagai "orang timur asing", tinggal di wilayah khusus di kota, dan mereka harus minta surat jalan setiap kali mereka ingin keluar dari wilayah tempat tinggal mereka. Hal-hal yang menjengkelkan ini, dan sikap tidak percaya di pihak pejabat Belanda di balik peraturan ini, menciptakan potensi berbahaya rasa tidak puas di kalangan penduduk Arab di India Belanda.

Hal yang sama dialami oleh *haji,* yang sama rata dipandang berpotensi melakukan subversi, sampai Snouck Hurgronje memperjuangkan pendekatan yang lebih cerdas pada awal abad ke-20. Sebuah peraturan yang berlaku antara 1825 dan 1852 bertujuan menghambat perjalanan *haji* dengan menetapkan biaya yang sangat besar, yakni 110 guilder, untuk paspor haji. Hambatan-hambatan baru pada 1859 mengharuskan setiap calon haji memperoleh surat keterangan dari bupatinya yang menyatakan bahwa ia mampu membiayai perjalanan haji pulang pergi dan meninggalkan bekal bagi kehidupan anak istrinya di rumah.[13] *Haji* dan *ulama* adalah pihak-pihak yang pertama-pertama dicurigai jika ada gerakan-gerakan anti-Eropa. Jadi ada lingkaran setan ketegangan antara Pemerintah dan pemimpin agama. Belanda, karena itu, secara selalu memilih berpihak kepada pemimpin sekuler *adat* daripada kepada pemimpin Islam kapan saja ada peluang untuk mengeksploitasi perpecahan di antara mereka. Karena itu, sudah lumrah bagi jemaah haji Indonesia untuk saling berbagi pengalaman di Mekkah mengenai perlakuan-perlakuan tidak adil Pemerintah Belanda atas orang Islam.

Berbagai keluhan dan rasa tidak puas ini bersama-sama menyebabkan Pemerintah India Belanda mendapat nama buruk di Timur Tengah sebagai musuh Islam yang sangat fanatik. Snouck Hurgronje sangat terkejut bahwa "dalam suratkabar Islam pemerintah kita sering dicerca sebagai musuh Islam, sementara dalam buku geografi yang digunakan di sekolah-sekolah di Turki dan di Arab Belanda dengan terang-terangan dikatakan sebagai sebuah Kekuatan

yang tidak kenal prinsip-prinsip toleransi, dan di bawah injakan kakinya berjuta-juta orang Islam hidup menderita".[14]

Perlu ditekankan di sini bahwa pandangan ini pandangan yang sangat keras dan tidak adil mengenai kebijakan Belanda mengenai Islam. Dalam hal-hal yang dilihatnya murni bersifat keagamaan Batavia bersikap benar-benar netral dan tidak banyak mendorong kegiatan misi-misi Kristen dibandingkan dengan pemerintah-pemerintah kolonial yang lain. Dan bahkan sebenarnya, sebagian besar karena tidak ada sekolah-sekolah Kristen atau baratlah maka para ulama konservatif dapat mempertahankan kepemimpinan moral mereka sepanjang abad ke-19.

Konsulat Turki

Ancaman dari Pan-Islam yang dipercaya Belanda dihadapi pemerintahannya menjadi terasa semakin besar tajam karena kenyataan bahwa pusat komunikasi bagi wilayah kepulauan mereka berada dalam tangan orang asing. Seperti dikeluhkan oleh Menteri Kolonial pada 1864, "Singapura merupakan tempat berkumpul jemaah haji yang pergi ke Mekkah setiap tahun dari wilayah kekuasaan kami dan bagi orang-orang yang kecewa, petualang, dsb. yang, seperti telah sering dibuktikan, memilih tempat ini sebagai pangkalan untuk kegiatan-kegiatan atau tindakan-tindakan yang berbahaya bagi kepentingan Belanda di Kepulauan India."[15] Di sini musuh pemerintah Belanda dapat bertemu, dan kadang-kadang menyusun permohonan untuk diajukan kepada Turki, dengan penuh kepastian bahwa Pemerintah Straits Settlements tidak banyak tahu mengenai, atau tidak berminat kepada, apa yang mereka lakukan. Di antara orang Islam Singapura ada orang-orang seperti Abubakar dari Johor dan keluarga Arab Alsagoff dan Junied, dengan harta kekayaan luar biasa besar dan hubungan internasional yang mengagumkan. Mereka adalah pemimpin masyarakat yang relatif terpelajar dari sisi politik, dengan semangat antikolonial yang ditujukan semata-mata untuk melawan Belanda, tidak pernah untuk melawan Inggris.[16]

Karena alasan-alasan ini, Batavia sangat cemas ketika Turki mengangkat Konsul yang pertama di Singapura pada 1864. Dia seorang pedagang setempat yang kaya asal Hadhramaut, Sayyid Abdallah al Junied. Seperti ditakutkan Belanda, dia tidak melakukan apapun untuk menghentikan kecenderungan alami jemaah haji Jawa dan orang Islam lainnya untuk memandang dia sebagai wakil Khalifah rohani dan politik. Karena itu, ketika ia meninggal pada

1865, Belanda meminta agar pengangkatan seorang Islam yang lain untuk menggantikannya dilarang oleh London. Inggris juga, demikian dikemukakan, seharusnya waspada terhadap ”elemen fanatisme yang membara dan mudah terbakar ” di antara orang Islam Asia Tenggara.[17]

Porte tampaknya sudah berniat untuk mengangkat saudara laki-laki Abdallah, Sayyid al Junied, untuk mengisi jabatan yang kosong itu, tetapi menerima saran Inggris untuk tidak melakukan hal ini. Namun demikian, saudara laki-laki ini dipandang penduduk Islam Singapura sebagai ”semacam pejabat konsul untuk Turki” selama beberapa tahun setelah itu.[18] Sayyid Muhammad Alsagoff mengisi peran yang serupa pada tahun 1880-an. Inggris mengalah pada tekanan Belanda ketika soal pengakuan atas seorang Konsul Turki dikemukakan pada 1866, 1873 dan 1884. Namun, Salisbury, yang mulai memangku jabatan pada 1885, bersedia mengubah kebijakan ini dengan imbalan konsesi konsuler yang ingin diperolehnya dari Turki.[19] Tawaran ini ditolak, dan tidak ada pengangkatan Konsul secara resmi sampai Juli 1901, ketika Haji Attaoullah Effendi mulai menjalankan tugas di Singapura.

Meski ada kecurigaan-kecurigaan besar dalam hal ini, Pemerintah India Belanda mengizinkan seorang Konsul-Jenderal Turki dtempatkan di Batavia, karena di situ ia dapat terus diawasi, sejak tahun 1880-an.

Rangkaian protes pan-Islam pada abad ke-19 yang dibahas di sini tidak banyak membawa dampak pada Jawa Tengah dan Timur, karena sebab-sebab yang sudah kita ketahui. Persekutuan antara VOC. dan kaum bangsawan Mataram berhasil menghambat pertumbuhan kepemimpinan Islam kelas menengah yang di tempat-tempat lain menimbulkan inspirasi bagi pan-Islam. Selain itu, ”pulau-pulau luar”-lah yang paling banyak dipengaruhi oleh militer Belanda pada abad ke-19, dibandingkan dengan oleh ekspansi ekonomi.

Gerakan Kebangkitan Kembali

Gerakan ”Padri”[20] di Minangkabau, yang dinamakan A.H. Johns ”puncak dari gerakan Islam modern Islam di Indonesia”[21] merupakan bukti pertama yang jelas mengenai dinamisme baru Islam pada abad ke-19 di Asia Tenggara. Sebuah kelompok Islam penting yang keras tampaknya sudah ada di Minangkabau pada abad ke-18, tetapi baru menjelma menjadi kegiatan agresif dengan kembalinya pada 1803 tiga *haji* yang diperkirakan dipengaruhi oleh militan Wahhabi di Arab.[22] Intervensi militer Belanda di pihak kepala-kepala adat konservatif pada 1820-an dan 1830-an berangsur-angsur mengubah perjuangan

"Padri" menjadi perjuangan bela tanah air, mewakili kepentingan yang lebih luas daripada kepentingan militan-puritan yang menjadi titik tolak gerakan itu. Meski kaum "Padri" akhirnya dihancurkan oleh militer pada 1837,[23] warisan mereka tidak diragukan lagi sangat penting dalam membawa Islam Indonesia lebih dekat kepada Islam Asia Barat, dan bersamaan dengan itu menempatkan dengan kokoh kampiun-kampiun utamanya di baris depan di pihak kelompok yang menentang kekuasaan Belanda.

Meski arti penting kaum Wahhabi sebagai inspirasi bagi ketiga *haji* 1803 itu pada umumnya masih diakui, Schrieke memberikan peringatan yang masuk agar kita tidak terlalu menekankan pengaruh asing dalam gerakan ini. Satu-satunya bukti nyata mengenai kerjasama antara kaum "Padri" dan kekuatan-kekuatan Islam di luar Minangkabau adalah perlawanan atas posisi-posisi Belanda di pantai paling utara, yang berulang kali diserang oleh orang Aceh Pantai Barat melalui laut dan oleh kaum "Padri" melalui darat." Momok persekutuan Islam yang besar ini menimbulkan ketakutan pada Belanda sedemikian rupa sehingga Belanda menduduki wilayah pedalaman sampai jauh ke utara, sampai-sampai ke wilayah Batak yang tidak beragama. Dorongan pemerintah Belanda pada 1860-an kepada utusan Rhenische untuk menjalankan kegiatan di antara orang Batak juga mungkin disebabkan oleh ketakutan ini.[25]

Jika perlawanan yang sedang berlangsung terhadap Belanda di Palembang, Banten, dan di tempat lain ada kaitannya dengan kaum "Padri", ini tampaknya tidak menimbulkan kecurigaaan di Batavia. Baru pada pertengahan abad itu, dengan komunikasi yang lebih baik, jumlah jemaah haji yang lebih besar, dan masuknya pengaruh Barat semakin dalam, pejabat Belanda mulai menyebut-nyebut dengan penuh kekhawatiran gerakan-gerakan Islam yang dapat membawa dampak yang luas. Besar sekali artinya bahwa sheikh pertama Minangkabau dari mazhab Naqshibandiyah, yang dilihat Schrieke sebagai sumber utama pengaruh ortodoks Mekkah di Sumatra, membawa sebuah bendera Turki dari Mekkah ketika ia kembali beberapa tahun sebelum 1850, sehingga ajarannya pada mulanya dikaitkan dengan Turki.[26]

Periode ini menyaksikan serangkaian gerakan anti Belanda di Sumatra Selatan, yang memang tampak memiliki kaitan satu sama lain. Sebuah pemberontakan di Banten dengan pendukung utama para pemimpin agama dari daerah Cilegon dibasmi oleh serdadu Belanda pada Maret 1850. Sejumlah *ulama* berhasil melarikan diri, untuk memimpin perang sahid yang lain di Lampung, yang baru berakhir ketika pemimpinnya, Haji Wachia, ditangkap oleh pasukan Belanda yang kuat pada 1856. Palembang juga melancarkan

pemberontakan yng kurang lebih terbuka antara 1848 dan 1859, dan perlawanan di situ semakin memiliki karakter keagamaan ketika berangsur-angsur semakin tidak berdaya menghadapi Belanda.[27]

Perlawanan Palembang mendapat dukungan dari tetangganya, Jambi, yang telah mengakui kedaulatan Belanda sejak 1833 sementara tetap mempertahankan otonomi sepenuh-penuhnya. Seorang Sultan baru, Taha Safi'ud-din, lalai tidak menyatakan kesetiaan kepada Belanda ketika naik tahta pada 1855, dan melawan upaya Belanda dua tahun kemudian untuk merundingkan persetujuan yang lebih mengikat dengan dia. Sementara para utusan dari Batavia mencoba membujuknya untuk berpihak kepada Belanda, Taha memohon dengan surat kepada Sultan Ottoman agar mengeluarkan pernyataan mengenai Jambi sebagai wilayah Turki sehingga orang asing tidak berhak untuk campur tangan di situ. Taha mempercayakan surat itu kepada orang-orang kepercayaannya di Singapura, dan salah satu dari orang-orang ini diberi uang sebesar 30.000 dollar Spanyol untuk melakukan perjalanan ke Constantinople. Utusan itu, Sharif Ali, tampaknya melakukan perjalanan hanya sampai Mekkah, dan di situ ia memperoleh surat-surat palsu dari Khalifah yang memberikan wewenang bagi pengusiran Belanda dari Asia Tenggara. Tetapi surat Taha sampai ke tujuannya. Grand Vezir Turki menanyakan kepada Duta Besar Belanda apakah Jambi merdeka, dan ketika diyakinkan bahwa Jambi bagian dari India Belanda ia berjanji tidak akan memberikan jawaban.

Pada November 1858 sebuah ekspedisi Belanda menduduki ibukota Taha setelah pertempuran yang sengit dan mengangkat seorang Sultan baru yang bersedia menerima tuntutan-tuntutan Belanda. Taha berhasil melarikan diri, dan setelah pasukan Belanda ditarik ia tetap menjadi penguasa *de facto* Jambi selama hampir setengah abad. Selama beberapa tahun ia meneruskan upaya-upayanya untuk mendapatkan pengakuan bagi Jambi sebagai bagian dari Turki, dan agen-agennya di Singapura menurut laporan mengumpulkan dana dan senjata untuk dia di situ. Seorang Arab yang aktif memperjuangkan kepentingan Taha di Singapura pergi ke Mekkah pada 1861, mungkin, juga, membawa sebuah permohonan untuk Kalifah.[28]

Pertempuran di Jambi belum terlihat tanda-tandanya akan berakhir ketika para pemimpin di Banjarmasin mulai berontak terhadap seorang Sultan yang diangkat Belanda dan tidak disukai rakyat (1859-63). Juga di sini para pemimpin semakin mengandalkan diri kepada ulama untuk memperoleh dukungan rakyat bagi perjuangan mereka. Dalam hal ini, jelas tidak ada persoalan hubungan atau aspirasi internasional, dan *beratib beamaal* yang

dikumandangkan sekeras-kerasnya untuk melawan pasukan Belanda lebih didasarkan pada mistisisme primitif daripada pada solidaritas Islam.[29]

Namun, rangkaian peristiwa ini, bersama dengan dampak sangat menakutkan yang dibawa Indian Mutiny, meyakinkan banyak petinggi Belanda bahwa sebuah gerakan pan-Islam merupakan bahaya paling besar bagi kekuasaan kolonial itu.

Akibatnya, tahun 1860-an ditandai oleh kekhawatiran besar di pihak pejabat pemerintah. Satu-satunya perolehan wilayah, yang dilakukan dengan setengah hati, adalah pantai yang besar tapi berpenduduk jarang antara Aceh dan Siak di pantai timur Sumatra. Penguasa Asahan, paling pelawan (*defiant*) di antara kerajaan-kerajaan kecil di wilayah ini, menyerukan perang sabil untuk memperoleh dukungan dari sesama raja guna melawan Belanda. Orang Indonesia di Mekkah menurut laporan juga mendorong dia untuk bekerja sama dengan Aceh agar dapat memperjuangkan perlindungan dari Turki secara lebih efektif. Namun, dalam kenyataan, meski ada hal-hal yang terlalu dilebih-lebihkan oleh beberapa pejabat Belanda, pedagang Inggris di Straits Settlements-lah yang memberikan dukungan moral kepada perlawanan yang tidak seberapa itu. Dalam upayanya untuk mengajak Inggris untuk bersatu melawan pasang naik "fanatisisme" Islam, Pemerintah Belanda juga mengutip penerbitan beberapa pamflet Melayu di Singapura, yang menyerukan persatuan Islam dalam menghadapi agresi Eropa atas Turki di Balkan.[30]

Perang Aceh

Jika bahaya-bahaya 1860-an dibesar-besarkan oleh pejabat kolonial, ada alasan yang masuk akal untuk memilih 1873 sebagai tahun gerakan agama pertama melawan Belanda yang berdampak kepada seluruh kepulauan. Setelah satu dekade ketegangan Belanda akhirnya menyatakan perang kepada Aceh pada Maret tahun itu. Pasukannya berkekuatan 3.000 orang dipaksa mundur setelah kehilangan komandannya dalam sebuah serangan di ibukota Aceh. Selama enam bulan sebelum pasukan yang lebih besar dapat dihimpun, cita-cita berabad-abad untuk mengusir Belanda bertambah kuat daripada sebelumnya di kalangan orang Islam Asia Tenggara.

Sebagai akibat dari pertarungan awal Aceh melawan orang Portugis, militan Islam dan rasa punya ikatan dengan Turki telah menjadi dan tetap merupakan bagian tidak terpisahkan dari perjuangan Aceh. Sultan Ibrahim memperbarui ikatan lama pada 1850 dengan mengirimkan seorang utusan ke

Constantinople untuk memohon agar Aceh dipertimbangkan kembali sebagai sebuah provinsi bawahan Kesultanan Turki. Tersanjung dan merasa puas, Sultan Abdul Mejid mengeluarkan dua *firman* kerajaan, satu memperbarui perlindungan Turki atas Aceh, dan satu lagi meneguhkan kedudukan Ibrahim sebagai raja di kerajaannya.[31] Beberapa tahun kemudian Ibrahim mengirimkan sumbangan $10.000 untuk biaya perang Turki di Crimea dan dianugerahi bintang penghargaan Mejidie.[32]

Hubungan Aceh dengan Turki kemudian banyak berutang budi kepada Habib Abd ar-Rahman az-Zahir, seorang Sayyid Hadhramaut yang mengunjungi Aceh pertama kali pada 1864 setelah pengalaman yang luas di Arab, Mesir, India, Eropa, dan Malaya. Ambisius dan cakap luar biasa, ia demikian berhasil dalam menjalankan tugas pilihannya sebagai seorang pendorong reformasi agama dan hukum sehingga dalam beberapa tahun pengaruhnya menimbulkan ketakutan pada Sultan Ibrahim. Merasa bahwa ambisinya terhambat oleh kecemburuan Sultan, ia pergi ke Mekkah pada 1868, dan barangkali berada di balik permohonan dari 67 "pemuka" Aceh kepada Sultan Turki pada tahun itu, meminta perlindungan terhadap gerakan-gerakan maju pasukan Belanda.[33] Pada kesempatan ini Porte tampaknya sudah lupa sama sekali mengenai Aceh, dan dutabesar Belanda diberitahu bahwa permohonan itu akan ditolak.[34]

Di Hejaz, jika tidak di Constantinople, hubungan Aceh dengan Turki terus hidup karena arus jemaah haji. Pada 1872 Pasha Turki di Jeddah, dan beberapa bawahannya, berulang kali meyakinkan Konsul Belanda bahwa Aceh adalah bagian dari Maha Kerajaan Ottoman.[35]

Abd ar-Rahman kembali ke Aceh pada 1869, dan setahun kemudian menjadi orang paling berpengaruh di kerajaan itu sebagai wali Sultan Mahmud yang masih muda dan kemudian menggantikan Ibrahim. Namun, tidak lama sebelum invasi Belanda pada 1873, ia kembali pergi ke Mekkah. Ia membawa sebuah permohonan dari Mahmud meminta perlindungan Turki, dan cepat-cepat berangkat ke Constantinople dengan permohonan ini begitu ia mendengar mengenai serangan Belanda itu.

Diwakili dengan cerdas oleh dutabesar yang meyakinkan ini, perjuangan Aceh mendapat simpati yang besar dari masyarakat luas di Turki. Sultan Abdul Aziz sendiri tersanjung oleh permohonan untuk mendapat perlindungan Turki itu, sedangkan partai reformasi Midhat Pasha melihat perjuangan anti-Barat itu sebagai perjuangan yang benar. Selama beberapa bulan nasib Aceh menjadi "la grande question du jour", perdebatan hangat, di Constantinople; sebagian

besar suratkabar mendesak agar Aceh diberi dukungan diplomasi atau militer.[36] Tetapi tidak satupun dari Kekuatan-kekuatan utama yang entusias. Bahkan Inggris menolak memberikan dorongan serupa dorongan yang diberikannya kepada utusan dari Kashgar ketika negeri itu diancam oleh Rusia.[37] Akibatnya, Abd ar-Rahman tampaknya diberitahu pada awal Juni bahwa tidak ada satupun yang dapat dilakukan untuk perjuangan yang diwakilinya.

Habib kemudian mencetuskan sebuah krisis baru dengan menelusuri arsip Kerajaan *firman* 1850 yang mengakui perlindungan Turki atas Aceh. Kelompok radikal dalam Kabinet Turki kemudian berhasil memaksakan sebuah keputusan untuk meminta Belanda untuk tidak memulai kembali permusuhan karena Aceh adalah wilayah yang sudah lama tunduk kepada Turki. Tekanan dari Dutabesar Rusia akhirnya mengubah keputusan ini menjadi sebuah tawaran yang hati-hati mengenai kesediaan Kalifah untuk menjadi penengah, yang menjelaskan mengenai kedaulatan Turki atas Aceh sedemikian santun sehingga dapat dengan sopan dikesampingkan oleh Belanda.[38] Pada Desember masalah ini sudah cukup reda sehingga Porte dapat melepas Abd ar-Rahman dengan anugerah kecil untuk dia sendiri dan sepucuk surat dari Vezir untuk Sultan Aceh, berisi ringkasan upaya-upaya Turki untuk menolong Aceh.[39]

Meski kekhawatiran Belanda yang paling buruk tidak menjadi kenyataan, kegiatan Abd ar-Rahman di Constantinople membawa dampak besar atas Asia Tenggara. Aceh dan seluruh kepulauan dapat terus mengikuti perkembangan di Turki melalui Penang dan Singapura, tempat-tempat netral dengan mayoritas penduduk yang terdiri dari pedagang yang menentang ekspansionisme Belanda. Masyarakat Islam di kedua wilayah Inggris ini bersatu padu dan aktif berdiri di belakang Aceh. Laporan-laporan mengenai perang itu diumumkan secara teratur setelah sembahyang Jumat di masjid-masjid, dan tokoh-tokoh perlawanan sering bertemu setelah itu untuk membahas apa yang dapat dilakukan untuk membantu Aceh. Sejumlah orang Arab Singapura melancarkan seruan-seruan permintaan sumbangan dalam kalangan orang Arab di Straits Settlements dan Jawa, yang konon berhasil mengumpulkan 100.000 dollar Spanyol untuk perjuangan Aceh pada akhir 1874.[40] Di Penang ada perkampungan masyarakat Aceh yang penting, yang mendorong sesama orang Aceh untuk menyebarkan laporan-laporan gembira mengenai kemungkinan adanya bantuan dari luar negeri.

Dampak di Kawasan

Kegembiraan meluap-luap karena Belanda mundur pada April 1873 sudah reda pada Juni, tanpa menimbulkan apapun yang dapat disebut sebuah gerakan. Tetapi pada 9 Juli suratkabar Constantinople *Basiret* menurunkan berita bahwa Pemerintah Ottoman telah memutuskan untuk mengirimkan delapan kapal perang ke Sumatra untuk mencegah serangan atas Aceh, dan untuk menugaskan satu kapal perang secara permanen di perairan Aceh. Berita itu didasarkan tidak lebih pada harapan partai pan-Islam dan gerakan angkatan laut yang tidak berkaitan satu sama lain; dalam 36 jam berita itu sudah dibantah secara resmi sebagai "an absurd fiction", fiksi gila, dan *Basiret* untuk sementara dilarang terbit.[41] Tetapi sementara itu berita itu telah disebarluaskan ke seluruh dunia oleh Reuters. Bantahan resmi kurang efektif di Asia Tenggara dibandingkan dengan di Eropa. Agen-agen Aceh di Penang segera mengirimkan laporan pertama ke Aceh, tetapi tidak menyinggung mengenai bantahan resmi itu.[42]

Juga di Singapura, bantahan-bantahan gagal meredakan semangat Muslim. Mata-mata Konsulat Belanda di Singapura tidak dapat melacak arus surat-surat yang menghasut, pesan-pesan lisan, dan desas-desus tersebar di kepulauan itu dalam kaitan dengan intervensi Turki dalam perang itu. Namun mereka, bersama pihak berwenang di Jawa, meninggalkan bagi sejarawan bukti yang cukup untuk menunjukkan bahwa ada kegiatan terorganisir di balik agitasi pada Juli-September 1873. Pendorong-pendorong utamanya tampaknya *haji* Jawa atau orang Arab dari Jawa, yang mencari penghidupan di Singapura melalui lalulintas jemaah haji atau perdagangan kecil dengan Jawa. Selain menulis surat kepada kontak mereka di Jawa, kelompok ini menerbitkan surat edaran kepada hampir penguasa setempat yang penting-penting di Jawa dan Rhio, mendesak mereka untuk bergabung dalam perang itu melawan Belanda setibanya kapal-kapal perang Turki. Cara untuk mengirim surat edaran itu sangat sederhana, surat edaran dimasukkan ke dalam amplop yang dialamatkan kepada kepala orang Arab di Batavia dan Semarang, yang dengan patuh menyerahkannya kepada Belanda. Kelompok Aceh di Penang juga menyumbangkan uang untuk mengirim seorang Arab Kelantan sebagai utusan kepada penguasa-penguasa setempat di Jawa. Orang ini ditangkap oleh Residen Belanda Surakarta sebelum dia sempat bertemu dengan Susuhunan kerajaan itu.[43]

Para juru propaganda perintis ini tampak sekali tidak berpengalaman karena sebagian besar upaya mereka ditujukan kepada kaum bangsawan Jawa yang jelas sepenuhnya bergantung kepada Belanda dan juga tidak peduli kepada

orang Islam. Bahaya terbesar pada kekuasaan Belanda ada di wilayah-wilayah di Sumatra, Borneo, dan Sulawesi karena di situ para penguasa adat masih mampu melakukan perlawanan, Islam memainkan peranan penting dalam kehidupan politik, dan hubungan dagang yang erat dengan Singapura terpelihara. Di wilayah-wilayah ini kejadian-kejadian di Aceh diikuti dengan penuh perhatian, dan desas desus sering beredar mengenai perlawanan-perlawanan yang akan bermunculan terhadap Belanda. Seperti kata Residen Borneo Selatan dan Timur: "Bahwa perang dengan Aceh itu menimbulkan ketegangan di sini, dan membangkitkan harapan pada banyak orang untuk melihat perubahan keadaan sebagai hasilnya, adalah hal yang wajar." Tetapi, katanya selanjutnya, berita mengenai ekspedisi Belanda kedua yang akan datang terhadap Aceh akan cenderung menangguhkan rencana-rencana pemberontakan yang ada sampai hasil ekspedisi itu diketahui.[44] Jadi tidak ada terjadi pemberontakan, pemimpin di mana-mana lebih suka berbincang-bincang mengenai pemberontakan daripada melakukannya.

Penasihat Urusan Dalam Negeri Pemerintah India Belanda ditugaskan untuk menyelidiki dampak perang itu hanya atas Jawa dan Singapura. Di Jawa Barat ia menemukan banyak pemimpin agama dan sekuler yang bersimpati kepada Aceh, tetapi ia berpendapat para pendukung perang itu di Singapura tidak mungkin banyak berhasil kecuali jika pasukan Belanda kembali dikalahkan, atau kecuali jika Turki benar-benar campur tangan dalam perang itu. Meski Penasihat itu tidak banyak melihat kemungkinan campur tangan Turki, namun ia melihat ada keyakinan dalam kalangan luas di Jawa dan juga di Singapura bahwa Turki memiliki hak dan juga kemampuan untuk melakukan intervensi jika diinginkannya, karena Aceh berada di bawah perlindungannya.[45]

Dalam periode penuh semangat bernyala-nyala ini ada sejumlah orang Jawa yang mencoba bergabung dengan perang suci di Aceh, sebagai pengganti terhormat bagi para *haji* yang lebih mahal itu. Namun, sebagian besar dari mereka dicegat oleh blokade Belanda di pantai Aceh. Sekelompok yang terdiri dari 30 pejuang yang kecewa kembali ke Singapura dari Penang pada Desember 1873 setelah gagal memperoleh kapal untuk membawa mereka menyeberangi Selat Malaka.[46]

Para petinggi negara di Belanda, dan sampai batas tertentu di Batavia, melakukan kesalahan melihat agitasi 1873 terhadap mereka sebagai bagian dari gerakan pan-Islam sedunia yang mengancam semua "Kekuatan Kristen" di Asia. Dutabesar Inggris untuk Belanda mendapat kesan bahwa Pemerintah Belanda "serius sekali berpegang pada pendapat bahwa suatu propaganda besar-

besaran Islam sedang disiapkan".[47] Sebuah permohonan yang bersungguh-sungguh dikirim ke Inggris untuk menggalang solidaritas melawan pasang naik persatuan Islam ini.[48] Pada kesempatan ini Kementerian Luar Negeri Inggris cukup terkesan sehingga mengeluarkan surat edaran ke semua Konsul meminta mereka melaporkan tanda-tanda "kebangkitan agama dan politik" di kalangan orang Islam.[49] Tetapi sebenarnya, meski simpati kepada orang Islam yang tertindas di berbagai bagian dunia bermunculan di Mekkah, tidak ada gerakan sedunia sama sekali. Di India terutama "tidak ada alasan untuk mengatakan bahwa gerakan militer Belanda di Aceh telah menbangkitkan rasa simpati yang besar dalam, atau bahkan menarik perhatian, kalangan orang Islam di India".[50] Di Malaya, pemberontakan Perak menentang Inggris pada 1875 tidak mendapat dukungan sama sekali dari kelompok orang Islam sadar politik di Penang dan Singapura yang telah pernah memimpin agitasi anti Belanda pada 1873.[51] Karena itu, agitasi itu harus dilihat bukan sebagai khusus reaksi anti-Barat tetapi sebagai identifikasi diri orang-orang yang memiliki keluhan-keluhan tertentu dengan masyarakat Islam.

Perhatian kepada Aceh berangsur-angsur sirna setelah ekspedisi kedua Belanda menduduki ibukota Aceh setelah Januari 1874. Tetapi harapan akan mendapat pertolongan dari Turki tidak pernah sepenuhnya padam. Sejumlah perwira militer mencapai Aceh atas usaha sendiri pada 1875 dan 1876, meski mereka barangkali tidak lama tinggal di situ.[52] Orang Aceh mengatakan kepada seorang pedagang Perancis pada 1875 bahwa banyak pemimpin mereka yang bertekad tidak akan menghentikan perlawanan sampai Khalifah turun tangan untuk menyelesaikannya.[53] Pada tahun itu orang Islam Singapura gembira mendengar desas desus bahwa dutabesar Turki sedang dalam perjalanan untuk menyelidiki masalah Aceh dan umumnya untuk melindungi kepentingan orang Islam Asia Tenggara.[54]

Kembali ke Aceh pada 1876 setelah gagal dalam semua upayanya untuk memperoleh dukungan di Constantinople, Abd ar-Rahman az-Zahir barangkali melenyapkan sebagian besar dari khayalan yang masih hidup di situ mengenai kekuatan dan niat Turki. Namun pada 1890, ketika sebuah kapal perang Turki dalam perjalanan kunjungan ke Jepang menimbulkan kegembiraan besar di Singapura, harapan-harapan orang Aceh kembali tertuju kepada Constantinople. Seorang utusan dikirim ke Singapura dengan surat-surat memohon komandan kapal perang itu dan Sayyid Muhammad Alsagoff untuk mengemukakan persoalan Aceh kepada Khalifah. Kapal perang Turki itu sudah lama berangkat sejak itu, tetapi harapan-harapan besar diletakkan sekarang di pundak Alsagoff,

yang berangkat untuk perjalanan keliling Eropa tidak lama setelah menerima surat Aceh itu. Pejabat-pejabat Belanda mengeluh bahwa harapan-harapan ini menghapus dampak dari langkah-langkah kekerasan khusus yang mereka ambil untuk pada akhirnya mencoba menaklukkan Aceh.[55]

Sekembalinya di Singapura pada 1892 Alsagoff mengirim seorang utusan pribadi ke Aceh, dan memberitahu Belanda bahwa ini dimaksudkan untuk menyarankan kepada Aceh untuk menyerah. Namun, misi itu tampaknya membawa hasil yang sebaliknya, dan seorang utusan Aceh ke Constantinople segera disiapkan. Utusan itu, Teuku Laota, membawa sebilah pedang Turki dan bintang penghargaan sebagai bukti pengakuan Turki di masa lalu sebagai pelindung Aceh. Laota tampaknya belum sempat menempuh perjalanan lebih jauh daripada Singapura, ketika di situ ia barangkali diyakinkan oleh orang-orang Islam yang lebih realistis untuk melupakan saja misinya itu.[56] Sebagai pengganti, Sultan Aceh menulis surat langsung ke Constantinople pada akhir 1893. Suratnya jatuh ke tangan Belanda, bukan ke tangan Turki,[57] dan sejak itu tidak ada bukti-bukti bahwa upaya-upaya semacam ini masih dilanjutkan.

Dukungan Turki

Hanya pada masa pemerintahan Sultan Abdul Hamid di Turki (1876-1908) gerakan untuk kekhalifahan universal dan efektif mendapat dukungan terus menerus dari atas. Setelah perang Rusia-Turki 1877-8 yang membawa kekalahan besar Abdul Hamid berpaling dari Barat dan membekukan undang-undang dasar liberal 1876. Terdorong oleh ungkapan-ungkapan simpati yang diterimanya dari dunia Islam, termasuk Asia Tenggara, ia berharap dapat memperoleh pengaruh di Asia sebagai pengganti pengaruh yang tidak dapat dipertahankannya di Eropa. Mengingat kelemahan yang sudah menjadi ciri khas Turki dan terutama pemerintahan sangat buruk Abdul Hamid maka tidak ada pikiran untuk membentuk gerakan anti-Eropa terencana yang dikendalikan dari Constantinople. Namun, Sultan sendiri menjelaskan bahwa ia dipandang sebagai semacam Paus dan pelindung Islam Sunni di mana-mana, dan ini memancing reaksi alami dari kalangan orang-orang istana dan pers Turki.[58]

Buah pertama barangkali dari sikap baru ini di Asia Tenggara ialah sebuah misi ke Mekkah pada 1881. Agen-agen Inggris di Arab melaporkan keberangkatan ke Singapura dua Imam dan seorang pedagang yang "menduduki posisi yang demikian penting di dunia Islam sehingga gerak gerik mereka jarang yang tidak memiliki tujuan politik".[59] Peringatan itu diteruskan kepada pihak

berwenang Belanda, yang mencegah upaya-upaya kedua Imam itu untuk berlayar dari Singapura ke Batavia, Padang, atau Palembang. Misi itu terpaksa tinggal di Singapura selama tiga bulan sampai diminta pergi dari situ oleh Inggris. Sementara itu Belanda menangkap 30 orang Palembang, termasuk sejumlah anggota bekas dinasti kerajaan, dengan tuduhan ikut dalam komplotan untuk membunuh semua orang Eropa di situ. Pimpinan komplotan itu dikatakan dua orang bekas *perwira* militer Turki yang mengunjungi Palembang dari Singapura tidak lama sebelumnya dengan alasan hendak berdagang. Peranan kedua Imam dari Mekkah itu tidak jelas, tetapi Belanda mencegat sepucuk surat dari salah satu dari Imam itu kepada seorang *haji* di Palembang tidak lama sebelum penangkapan itu. Dalam surat ini Imam itu menyatakan kecewa tidak berhasil mencapai Palembang, dan menyarankan seorang *haji* yang lain untuk "menggantikan dia sebagai penanggung jawab propaganda".[60]

Bahwa komplotan yang kasar seperti itu secara sadar diilhami oleh kedua orang Arab berkedudukan tinggi itu jelas paling tidak mungkin. Apa yang dinamakan "propaganda" kemungkinan dimaksudkan untuk mendapat dukungan Indonesia untuk perjuangan Islam atau Turki di Asia barat. Namun, prakarsa-prakarsa semacam itu membawa dampak mempertinggi harapan bagi persatuan Islam di Asia Tenggara, dan sampai sejauh ini kecurigaan Belanda mungkin beralasan. Sejumlah orang Palembang percaya bahwa orang Islam Jawa sedang didorong untuk perjuangan yang sama, dan menafsirkan sebagai sesuatu yang bermakna sangat penting kunjungan biasa ke Jawa yang dilakukan oleh Muhammad Alsagoff dan Sultan Johor pada 1881.[61]

Peristiwa-peristiwa dramatis ini terjadi bersamaan dengan sebuah keributan baru di Banten, wilayah Jawa satu-satunya yang selalu mengungkapkan rasa tidak puas dalam perlambang-perlambang Islam.[62] Karena itu pejabat Belanda diperingatkan agar waspada terhadap "gerakan keagamaan berdampak politik".[63] Pembatasan gerak gerik orang Arab diperketat dan beberapa wilayah terlarang sama sekali bagi mereka. Pada periode inilah terutama pada akhir abad ke-19 bahwa Belanda mendapat reputasi di kalangan orang Islam sebagai musuh paling fanatik.

Selama dua tahun terakhir abad itu keluhan-keluhan yang kadang-kadang muncul dari orang Arab di Indonesia dan mencapai Asia barat membengkak menjadi banjir. Salah satu penyebab barangkali perlakuan istimewa yang diberikan kepada orang Jepang berupa status hukum sebagai orang Eropa di India Belanda pada 1899. Penyebab lebih langsung ialah semangat pan-Islam Muhammad Kiamil Bey, Konsul Jenderal Turki di Batavia dari 1897 hingga 1899.

Meski menikmati prestise alami sebagai wakil Sultan, kegiatan Konsul-konsul Turki sebelumnya tidak lebih daripada membagi-bagikan Al-Quran saja, dalam upaya untuk mendapat teman orang Indonesia. Kiamil segera mendorong teman-temannya orang Arab untuk menganggap diri mereka warga Turki dan untuk menyampaikan keluhan-keluhan mereka kepada dia. Kiamil mengirim sebelas anak muda Arab untuk belajar ke Constantinople. Murid-murid ini ditanggung oleh kerajaan ketika tinggal di ibukota Turki dari 1898 hingga 1904, dan sekembali ke Indonesia mereka bersikeras bahwa mereka adalah orang Turki dan berhak mendapat status orang Eropa, dan menunjukkan paspor mereka sebagai bukti.[64] Belanda akhirnya dengan gigih meminta Kiamil Bey ditarik pulang karena ia menulis surat menawarkan bantuan bersahabat kepada Sultan Deli. Dan kemudian diketahui bahwa ia juga mencoba berkiriman surat dengan penguasa Aceh yang mengaku berhak atas tahta Aceh—tuduhan yang lebih serius.[65]

Kiamil terus menimbulkan kekhawatiran pada pejabat Belanda karena upaya-upayanya untuk diangkat sebagai Konsul Turki di Singapura pada 1899 dan juga pada 1904. Pada 1904 ia dipindahkan ke Singapura oleh pemerintahnya, tetapi Inggris menolak mengakuinya. Selain keluhan-keluhan Belanda mengenai dia, orang-orang Islam terkemuka di Singapura juga marah kepada Kiamil karena ia mengawini janda Sultan Abu Bakar tanpa berunding lebih dahulu dengan anggota-anggota keluarga Johor yang masih ada.[66] Kementerian Luar Negeri sudah mulai waspada pada 1899 karena sebuah artikel dalam suratkabar Turki *Ikdam* yang barangkali diilhami oleh Kiamil. Artikel ini mengatakan bahwa "tugas terpenting Konsul Ottoman adalah memperkokoh ikatan di antara orang Islam di manapun mereka berada". Pejabat yang diangkat menjadi konsul untuk Singapura, kata *Ikdam* selanjutnya, di atas segalanya "haruslah orang yang taat agama", karena agama merupakan cara yang sangat penting untuk memperluas pengaruh Turki di wilayah-wilayah seperti itu.[67]

Hasil terpenting Kiamil Bey selama ia bertugas di Batavia ialah terjalinnya hubungan yang lebih erat antara orang Arab Asia Tenggara dengan pers Timur Tengah. Menjelang akhir 1897 suratkabar Arab *al-Malumat* di Constantinople, *Thamarat al-funun* di Beirut, dan sejumlah suratkabar Mesir mendapat sejumlah koresponden di Batavia atau Singapura yang terus mengeluhkan perlakuan-perlakuan tidak adil Belanda atas orang Islam umumnya dan orang Arab khususnya. Kampanye pers ini menimbulkan harapan-harapan besar bahwa Turki akan melakukan intervensi untuk mendapatkan status orang Eropa bagi orang Arab di India Belanda. Seperti kata *al-Malumat* bergurau,

pihak berwenang Belanda memperlakukan pemberian status itu seperti sebuah armada kapal perang ketika tiba di Batavia.[68]

Mengetahui bahwa tidak ada bahan yang kontroversial seperti itu yang dapat muncul dalam pers Turki tanpa persetujuan diam-diam dari pihak kerajaan, Snouck Hurgronje menyarankan membawa masalah itu ke Constantinople daripada mencoba melarang suratkabar bersangkutan di Indonesia. Dutabesar Belanda diyakinkan oleh Sultan Abdul Hamid pada 1899 bahwa jauh dari mendorong pan-Islam di Indonesia ia selalu mendesak "Jawa" agar menjadi bawahan setia Belanda. Beberapa suratkabar diwajibkan memuat bantahan-bantahan atas berita berlebihan yang lebih absurd yang telah muncul.[69]

Walau sudah mendapat jaminan-jaminan ini, Porte mencoba mendekati Inggris kurang dari setahun kemudian untuk mendapat dukungan untuk upayanya memperoleh bagi orang Turki hak yang telah diberikan kepada orang Jepang di India Belanda. Frank Swettenham, di Singapura, menganggap ide ini bagian dari gerakan pan-Islam, dan Kementerian Luar Negeri tidak memberi dukungan.[70] Akibatnya kampanye pendek di Turki itu berangsur-angsur hilang.

Kekhawatiran mengenai Gerakan yang Meluas

Meski gerakan ini hampir seluruhnya terbatas pada kalangan orang Arab, selalu ada bahaya dapat meluas. Juru propaganda biasanya tidak jelas mengenai dasar pemberian perlindungan Turki kepada orang Arab, apakah karena mereka orang Arab atau karena mereka orang Islam; dan pada 1900 mereka mengadakan persiapan untuk menerbitkan tulisan-tulisan pan-Islam dalam bahasa Indonesia untuk mendapat dukungan yang lebih besar. Edisi pertama, *Bintang Timur,* sebuah suratkabar Melayu di Penang, mengatakan sejak Kiamil Bey mendaftarkan penduduk India Belanda sebagai warga Turki, penduduk menyampaikan keluhan-keluhan mereka kepada Constantinople, tidak kepada Batavia.[71]

Prakarsa-prakarsa semacam itu tampak berbahaya bagi Belanda terutama pada akhir abad itu, ketika pasukan Belanda mulai melakukan ofensif sistematis di wilayah-wilayah seperti Aceh, Jambi, dan sebagian besar Borneo dan Sulawesi. Setelah serangkaian ofensif di Jambi, pasukan Belanda akhirnya membunuh Sultan Taha pelawan itu pada April 1904, dan menangkap sisa-sisa pengikutnya. Namun, lima bulan kemudian, sebagian besar bangsawan Jambi bangkit kembali untuk melakukan perlawanan di bawah pimpinan Karl Hirsch, alias Abdullah Yussuf, seorang Hongaria dalam militer Turki, yang mengaku memiliki tugas

khusus dari Sultan Turki untuk membantu pertahanan Jambi. Ia dengan cepat ditangkap, 19 kepala ada ditangkap dan dibuang, dan Jambi berangsur-angsur dapat ditaklukkan kembali dalam dua tahun berikut.[72]

Hirsch mungkin didorong dalam misi ini oleh sejumlah perwira Turki, tetapi ia tidak dapat dikatakan utusan pemerintah. Ia bahkan sudah tidak disukai Pemerintah Turki, yang memberi peringatan kepada Inggris sebelumnya agar mewaspadai kegiatan-kegiatannya di Singapura.[73] Namun, Sultan Taha tampaknya berhasil membawa keluhannya kepada Sultan tidak lama sebelum kematiannya. Pada 1903 ia mengirim seorang utusan untuk meminta dukungan kepada Haji Attaullah, Konsul Jenderal Turki pertama dan terakhir di Singapura.[74] Pada Juli 1904 Sultan Abdul Hamid menyampaikan kepada wakil Belanda untuk Turki bahwa ia ingin secara pribadi menyampaikan permohonan kepada Ratu Belanda atas nama orang Islam Indonesia. Ia menerima petisi dari seorang kepala adat ”tidak jauh dari Singapura”, bernama ”Tachar”, yang menuduh masjid-masjid telah dihancurkan dan orang Islam ditindas. Selain itu, Sultan mengatakan, jemaah haji Indonesia sering mengeluh di Mekkah mengenai perlakuan buruk yang mereka dapat di negeri mereka. Ketika Belanda dengan sopan menjawab bahwa ini bukan urusan Sultan, ia menggunakan analogi seringnya Paus berbicara atas nama orang Katolik di Syria.[75]

Meski tidak ada bukti sejarah, pernyataan-pernyataan mengenai kepausan Islam semacam itu kadang-kadang diterima oleh Inggris, yang dipandang kalangan orang Islam pada abad ke-19 sebagai sahabat khusus Turki. Konsul Turki diizinkan ditempatkan di Afrika Selatan pada 1860-an khusus untuk menjaga kepentingan orang Islam. Tetapi Belanda selalu merasa khawatir dan cemburu mengenai kekuasaannya, dan terus menolak kepentingan Turki di semua wilayah koloninya. Sama halnya, pemuka Islam yang tidak berada di bawah kendali Belanda, seperti mereka yang tinggal di Singapura, secara otomatis dicurigai berpotensi sebagai fokus pembangkangan.

Dalam hal ini seperti dalam hal-hal yang lain, ahli Arab terkenal beragama Kristen Snouck Hurgronje itu memberikan landasan teori bagi kebijakan yang sebelumnya dijalankan tanpa pertimbangan yang masak oleh pemerintahnya.[76] Sebagai seorang humanis liberal pantang berkompromi, ia melihat kaitan ”Abad Pertengahan” antara politik dengan agama sebagai musuh utama bagi perdamaian dan kemajuan di Indonesia. Pan-Islam adalah bentuk sempurna dan paling terkutuk dari ancaman ini: ”Hanya kebingungan dan kerusuhan yang dapat dihasilkan Pan-Islam. Paling-paling hanya kerusuhan setempat yang

dapat ditimbulkannya. Pan-Islam tidak akan pernah memiliki pengaruh yang membangun."[77] Karena itu, pemerintah harus menetapkan sebuah ruang agama, terutama termasuk *haji,* dan dalam ruang itu sikap netral dan toleran yang paling ketat dipelihara. Di pihak lain, pemerintah harus membuang keragu-raguannya untuk menghancurkan sehancur-hancurnya pemimpin agama mana saja, seperti pemimpin agama di Aceh, yang mendorong pemberontakan atau kesetiaan kepada kekuasaan asing.

Di sisi positif, Snouck Hurgronje mendesak perluasan pendidikan Barat untuk membangun ikatan yang bermanfaat antara orang Eropa dan orang Asia Belanda berdasarkan budaya modern Belanda. "Gagasan pan-Islam, yang hingga kini tidak banyak berpengaruh pada kaum bangsawan Jawa dan kelas-kelas orang Islam setara itu di kepulauan luar, akan kehilangan peluang untuk menanamkan pengaruhnya di masa datang begitu anggota-anggotanya telah menjadi penganut sukarela kebudayaan kita." Jika massa petani tertular "penyakit" pan-Islam, yang dapat terjadi kapan saja, elite yang sudah berpendidikan barat akan berkepentingan untuk menyingkirkan penyakit itu.[78]

Hubungan yang rumit dan dekat antara Islam dan nasionalisme di Indonesia pada abad ke-20 sudah menjadi bahan pokok sejumlah penelitian yang mengesankan.[79] Di sini kami hanya ingin menjelaskan peranan pan-Islam dalam konteks berbagai aspirasi pada abad ke-19. Seperti kata Benda,[80] munculnya dengan cepat elite berpendidikan Belanda yang tidak puas bersamaan dengan memudarnya Kesultanan Turki, mengakibatkan diagnosis Snouck Hurgronje mengenai situasi Indonesia tampak tidak relevan lagi pada dekade ketiga abad ke-20. Ini melahirkan kecenderungan di pihak mereka yang menaruh perhatian kepada nasionalisme abad ke-20 untuk menganggap remeh pan-Islam. Penulis berharap semoga penelitian ini dapat membantu memperjelas mengapa satu generasi orang Belanda termasuk orang Belanda yang sangat peka seperti Snouck Hurgronje begitu dihantui oleh ancaman pan-Islam.

Bukti-bukti dalam bab ini mendukung pendapat bahwa ikatan yang semakin erat antara orang Islam di Asia Tenggara dengan orang Islam di Timur Tengah penting untuk menciptakan rasa memiliki tujuan bersama melawan penjajah. Dalam sebagian kasus yang dibahas konflik awal antara orang Indonesia dan orang Belanda bersifat lokal dan tidak ada kaitan langsung dengan agama. Tetapi konfik-konflik yang berlangsung lama pasti akan mengembangkan momentumnya sendiri, terutama ketika ada upaya mencari bantuan dari luar. Dan demikianlah terjadi elemen solidaritas pan-Islam semakin banyak mewarnai konflik-konflik itu.

Selain itu, menjelang akhir abad itu perasaan pan-Islam tampaknya semakin membara, sedemikian rupa sehingga stimulus yang murni datang dari luar sudah cukup untuk mencetuskan sebuah pemberontakan, seperti di Palembang pada 1881 atau Jambi pada 1904. Tidak ada alasan untuk menganggap remeh pandangan Snouck Hurgronje mengenai pan-Islam sebagai ancaman dari dalam yang paling serius bagi "asosiasi", Belanda-Indonesia yang permanen dalam periode sebelum pelaksanaan Politik Etis.

11

Imperialis Pedagang: W.H. Read dan Konsulat Belanda di *Straits Settlements*

Setidaknya ada dua karakter "W.H. Read" dalam historiografi Asia Tenggara. Salah satu dari kedua karakter ini masuk secara dramatis ke dalam sejarah Indonesia dan sejarah kolonial Belanda, sebagai penulis serangkaian telegram pada Februari 1873 yang menghasut Belanda untuk melancarkan serangan—yang tergesa-gesa dan berakhir dengan bencana—atas kesultanan merdeka Aceh, dan dengan demikian memulai perang kolonial Belanda yang paling pahit dan menelan biaya paling tinggi di antara semua perang kolonial yang dilancarkan Belanda. Dia juga Konsul Belanda pertama dan paling lama menduduki jabatan itu di Singapura, yang mendapat penghargaan tertinggi dari raja Belanda, dan orang kepercayaan berpengaruh dari serangkaian Gubernur Jenderal dan serangkaian Menteri Kolonial Belanda selama beberapa dekade. Ada hal yang ganjil mengenai W.H. Read ini: ia bukan orang Belanda. Namun demikian ia berhasil meyakinkan Batavia bahwa ia dapat mengisi pos konsulat Belanda yang paling strategis itu dengan lebih baik daripada warga Belanda.

W.H. Read yang seorang lagi diperingati dalam memoar yang ditulisnya pada 1980-an, *Play and Politics: Recollections of Malaya by an Old Resident.* Agak mengherankan bahwa memoar ini sama sekali tidak menyinggung peranan bersejarah yang dimainkan W.H. Read sebagai pencetus perang Aceh dan peranan Konsulat Belanda yang memberinya gaji, status, dan pengaruh setelah 1873. Sebaliknya justru. Buku itu menggambarkan seorang Inggris pembela negara yang luar biasa, bahkan anti-asing, penuh dengan semangat kekanak-kanakan melihat petualangan James Brooke dan Stamford Raffles, dan selalu siap mencoba cara-cara yang tidak lazim tetapi ampuh untuk memperluas wilayah kekuasaan Inggris di Asia Tenggara. Ini adalah Read yang sama, kawan

dan pendukung James Brooke, dan yang membantu mewujudkan intervensi Inggris di negeri-negeri Melayu di Semenanjung pada 1873-4. Namun, kerajaan Belandalah yang menghargainya, bukan kerajaan Inggris.

Tentu saja W H. Read hanya menjalani satu kehidupan, dan menurut saya ada konsistensi yang besar dalam kehidupan itu. Namun tetap mengherankan mengapa memoar yang umumnya memuji-muji diri sendiri itu tidak menyinggung sama sekali pengabdiannya di bawah Belanda. Apakah ini barangkali karena bagian kehidupannya yang di bawah Belanda berangsur-angsur terasa pahit di masa tuanya, atau karena ia sendiri merasa sulit menyelaraskan nafsu menjajah yang dipilihnya untuk mewarnai kehidupannya, dengan kenyataan semakin besarnya ia harus mengandalkan diri kepada sebuah pemerintah asing, dan terutama karena telah mendorong pemerintah itu ke dalam peperangan yang sangat tidak terencana dan tidak populer?

W.H. Read dan Singapura

William Henry MacLeod Read (1819-1909) adalah khas pedagang Singapura. Ia memainkan peranan utama dalam hampir semua aspek kehidupan kolonial dari saat ia mulai menetap di situ pada 1841, pada umur baru 22. Latar belakangnya untuk memikul kepemimpinan ini tidak mungkin dapat lebih baik lagi. Ayahnya C.R. Read pindah ke Singapura dari Bengkulu pada 1822 atas nasihat Raffles, dan di situ menjadi anggota "perusahaan dagang Eropa perintis setempat" yang didirikan A.L. Johnston setahun atau dua tahun sebelumnya. C.R. Read tidak lama kemudian menjadi salah seorang rekan A.L. Johnston & Co., dan putranya "W.H." menggantikannya sebagai rekan di Singapura empat bulan kemudian setelah tiba di Settlements.[1] Dalam peranan ini ia bertindak sebagai agen sebagian besar kapal-kapal Eropa yang singgah di Singapura, termasuk semua kapal penting Belanda–kapal Angkatan Laut, kapal Netherlands Trading Company (NHM) dan kapal-kapal milik berbagai perusahaan lainnya.

Pada tahun-tahun awal, terutama sebelum ia menikah pada 1848, Read sibuk memperbaiki kehidupan sosial Eropa di Singapura, yang hingga periode ini masih terbatas (menurut dia) pada makan malam yang membosankan di kediaman Gubernur, permainan untuk anak-anak dan main kartu untuk tamu-tamu yang lain. Bersama dua anak muda yang juga baru datang ("baru datangs", menurut dia), Read membangun sebuah lapangan pacu kuda dalam waktu dua tahun, dan memenangkan perlombaan yang pertama; memprakarsai serangkaian pertunjukan sandiwara amatir dan sering memainkan peranan

utama sebagai seorang perempuan jenaka; menyelenggarakan Regatta yang pertama di pelabuhan; dan mendirikan perpustakaan umum, dan menjadi Bendaharanya yang pertama. Pada 1845 Read adalah pengambil prakarsa kedua untuk Masonic Lodge yang pertama di Singapura, "Brethren of Lodge Zetland in the East" dan ia menjadi "Provincial Grand Master" yang pertama.[2] Menarik bahwa paling tidak salah seorang orang Melayu teman Read, Sultan Mahmud dari Lingga, diajak masuk menjadi anggota Lodge itu pada 1850-an, dan Tuhfat al Nafis mencatat seolah-olah ini penyebab sultan itu meniru gaya hidup "seperti orang kulit putih".[3]

Sebagai seorang pemimpin dunia usaha di Singapura yang paling gesit, Read berada di baris depan memimpin agitasi yang berkembang pada pertengahan 1850-an untuk menempatkan Straits Settlements langsung di bawah kendali Pemerintah Inggris, jadi tidak lagi di bawah pemerintah East India Company di India. Ia mengajukan usul kunci mendorong pemisahan dari India dalam rapat terbuka Singapura pertama mengenai hal itu pada 11 Agustus 1855.[4] Ia mendesak pembentukan dewan kota dengan otonomi yang lebih besar melalui pemilihan umum, dan bekerja sebagai anggota dewan itu selama 15 tahun dan sebagai Ketuanya selama enam tahun. Ketika Straits Settlements menjadi Koloni Kerajaan Inggris di bawah Kementerian Kolonial dan tidak lagi di bawah Kementerian India pada 1867, sebagian karena hasil usaha Read, ia seperti sepatutnya diangkat sebagai anggota tidak resmi Dewan Legislatif koloni itu.[5] Pada waktu itu, dan beberapa tahun setelah itu, ia juga menjabat ketua Kamar Dagang Singapura. *The Straits Times* pada 1873 mendukung gagasan untuk memasang potret Read di Balai Kota sebagai pengakuan atas "jasanya yang besar dan sangat banyak dan tidak mengenal kepentingan pribadi kepada Straits Settlements".[6] Gubernur kolonial yang pertama, Sir Harry Ord, berselisih pendapat dengan Read pada 1869 mengenai tata administrasi Singapura dan mengenai apa yang dianggap Read (dan sebagian besar warga Singapura) kebijakan Ord yang tidak tegas menyangkut kerajaan-kerajaan Melayu.[7] Ketika pada 1873 Ord meninggalkan Singapura di bawah gempuran cercaan dari surat-surat kabar Singapura, penggantinya memastikan bahwa ia selalu berkonsultasi terlebih dahulu dengan Read sebelum mengambil keputusan.

Imperialis Bertubuh Kekar

Buku-buku memoar tidak resmi yang ditulis Read pada masa tuanya penuh dengan entusiasme untuk perluasan daerah jajahan. Buku-buku itu sangat

bangga terutama dengan persahabatan dan dukungannya untuk James Brooke, "white raja"(raja putih) Sarawak, dan untuk sekutu militer utama James Brooke, Laksamana Henry Keppel yang berusaha keras meyakinkan pihak-pihak yang enggan mendukung mereka.[8] Ketika kerusuhan Cina pecah di Singapura (terutama pada 1854 dan 1863) Read menjalankan kebijakan yang tegas. Ia menggunakan orang Eropa dan orang Cina kelahiran Straits Settlements sebagai "special constables" (polisi khusus) guna mendesak perkumpulan-perkumpulan rahasia Cina untuk membubarkan diri.[9] Ia pendukung paling bersemangat bagi kebijakan intervensi Inggris yang lebih agresif di kerajaan-kerajaan Melayu, karena ia yakin ini akan dapat memenuhi kebutuhan Singapura di bidang perdagangan, dan terutama kebutuhannya sendiri, lebih baik daripada kebijakan yang sekarang, yakni bekerja melalui pemuka-pemuka Melayu seperti misalnya dengan Temenggong dari Johor.

Strategi Peninsula Read pada awal tahun 1850-an ialah mendukung Sultan Ali, putra Sultan Hussain, yang ditunjuk Inggris, dalam kaitan dengan pengaturan kedudukan Singapura, sebagai penguasa kerajaan lama Johor-Riau. Tanpa membuang-buang waktu Read mengambil dan memegang stempel resmi Sultan dan selama beberapa tahun tampaknya bertindak atas nama Sultan Ali.[10] Pada 1850-an ia berusaha meski sia-sia menempatkan Sultan Ali sebagai penguasa di Johor di bawah seorang Residen Inggris. Karena persekutuannya dengan Sultan Ali dalam perpolitikan Malaya itu, dia menjadi musuh utama keluarga Temenggong, yang berhasil mendudukkan Abubakar keturunan keluarga itu sebagai Sultan Johor. Urusan dagang Abubakar dipegang oleh pesaing Read di Singapura, Paterson, Simons & Co, yang termasuk kelompok mereka yang memperjuangkan agar Johor tetap sebuah kerajaan merdeka dengan hubungan yang erat dengan Singapura daripada ditempatkan di bawah pemerintah kolonial seperti yang dibayangkan Reid.[11]

Konflik ini meluas ke dalam perpolitikan kerajaan-kerajaan yang lain di Semenanjung Malaya. Dalan kaitan ini Abubakar mencoba mencegah pengaruh langsung Inggris sementara Read bekerja sama dengan pihak-pihak yang menentang Abubakar dan memperjuangkan kendali atas perdagangan dan politik yang lebih langsung oleh Inggris. Di Selangor pada 1860-an dan 1870-an Read mendukung dengan gigih Tengku Kudin,Yap Ah Loy, dan intervensi Inggris, melawan Abubakar di pihak yang satu lagi dalam konflik ini. Pada 1867 ia membantu mencatatkan saham Eastern Asia Telegraph Company di London, yang mencoba memperluas layanan telegraf dari Rangoon melalui darat ke Bangkok, Singapura, Jawa dan Australia, dan membutuhkan peranan Inggris di

kerajaan-kerajaan Semenanjung untuk meyakinkan calon-calon pemodal. Pada akhirnya, Inggris memilih kabel bawah laut karena dalam hal ini tidak ada masalah kedaulatan wilayah. Namun, momentum yang diciptakan Read dan teman-temannya ternyata cukup ampuh untuk meyakinkan Gubernur Straits Settlements yang baru, Sir Andrew Clarke (1873-6), untuk campur tangan di Perak, Selangor dan Pahang, dan dengan demikian meletakkan landasan bagi Inggris sebagai pelindung kerajaan-kerajaan Melayu.[12]

Konsulat Belanda

Sebagai seorang agen niaga paling menonjol bagi kapal-kapal yang singgah di Singapura, Read adalah pilihan yang tepat bagi negeri-negeri yang ingin memiliki wakil berbiaya rendah, terutama untuk mengizinkan penerbitan visa dan lisensi, mengembalikan barang-barang milik awak kapal yang meninggal, dan hal-hal seperti itu. Sangat tidak biasa bagi seorang pedagang Singapura, Read mahir berbahasa Prancis, karena ia pernah bersekolah beberapa tahun di Prancis. Sebagian besar surat-suratnya sebagai konsul menggunakan bahasa diplomasi pada zaman itu. Swedia dan Norwegia mengangkatnya sebagai konsul kehormatan masing-masing (1851-62) sebelum kedudukan di konsulat Belanda yang jauh lebih penting bagi dia itu diberikan kepadanya, dan ia juga bertindak sebagai Konsul untuk Portugal. Dalam memoarnya, Read mengenang kembali pekerjaan-pekerjaan semacam ini sebagian besar dari sisi tindakan-tindakan keras tidak diplomatis yang diambilnya, seperti misalnya ketika ia mendapat teguran dari Pemerintah Swedia karena memenjarakan awak kapal yang memberontak, untuk menakut-nakuti mereka, meski ia tidak memiliki wewenang untuk mengambil tindakan itu.[13] Read juga bertindak sebagai agen di Singapura bagi Raja James Brooke, dan kemudian menjadi salah seorang rekan utama Alfred Dent dalam upaya Dent untuk menguasai Borneo Utara.

Bersama dengan kontak-kontaknya yang banyak di kerajaan-kerajaan Melayu, Read juga berpengaruh di Siam. Ia berkirim-kiriman surat secara teratur dengan Raja Mongkut IV dan putra mahkota Chulalongkorn. Dalam memoarnya Read bercerita surat menyurat ini berawal dari hubungan kerjanya dengan Konsul Siam di Singapura, Tan Kim Ching, pemilik kincir padi di Siam dan Saigon dan rekan Read dalam pengembangan usaha di Selangor pada 1860-an. Menjelang akhir tahun 1850-an Tan meminta pendapat Read mengenai keinginan Raja Mongkut untuk melepaskan diri dari perjanjian tidak menguntungkan yang baru saja ditandatanganinya dengan Prancis. Read mengaku bahwa strateginya

mempersoalkan surat-surat kepercayaan Konsul Prancis yang mengatur perjanjian itu ternyata berhasil, karena Konsul itu tidak memiliki wewenang untuk menandatangani perjanjian itu. Ini berlanjut dengan datangnya sebuah undangan bagi Read untuk berkunjung ke Bangkok, dan dengan surat menyurat setelah itu, yang digunakan Read untuk terus menerus mendorong Raja King Mongkut agar waspada terhadap tipu muslihat Prancis dan agar meletakkan kepercayaan yang lebih besar kepada Inggris. Pada 1867, Mongkut mengeluh dalam sepucuk surat yang dialamatkannya kepada duta besarnya untuk Prancis, "Mr Read kembali menulis surat kepada saya dari Singapura. Dia mengatakan di Prancis saudara dutabesar akan menemui kesulitan besar dari berbagai penjuru", dan menasihatinya agar tidak terlalu percaya pada orang Prancis. Pada 1871 Read ikut mendampingi Raja Chulalongkorn yang masih muda dalam kunjungannya yang pertama ke Jawa, dan setelah itu dianugerahi medali kehormatan "Royal Siamese Throne" oleh Chulalongkorn.[14]

Singapura jauh lebih penting bagi Belanda daripada bagi negara-negara Eropa yang lain yang sudah mulai mengangkat Konsul di situ. Salah seorang pedagang yang ikut mengajukan petisi agar dibuka sebuah konsulat mengatakan bahwa Singapura merupakan pelabuhan terbesar bagi kapal-kapal Belanda di luar Eropa. Singapura sudah berkembang selama 30 tahun yang pertama menjadi sebuah pusat pelayaran bagi India Belanda sendiri. Perusahaan-perusahaan pelayaran yang terpenting di Kepulauan itu adalah milik Inggris, dan perusahaan-perusahaan itu menjadikan Singapura pelabuhan persinggahan antara Kepulauan dengan jalur-jalur internasional. Singapura juga sangat penting dari sisi politik sebagai tempat berkumpul orang Islam Asia Tenggara sebelum berlayar menuju Mekkah untuk melaksanakan ibadah haji, dan tempat mereka dipertemukan dengan gagasan-gagasan dari luar dalam suasana yang boleh dikatakan bebas. Namun Kementerian Luar Negeri tampaknya sama sekali tidak menyadari potensi politik sebuah konsulat; peran konsulat baru menonjol ketika Belanda bergerak ke utara di Sumatra mulai pada 1862.

Pengangkatan Read sebagai Konsul Belanda pertama di Straits Settlements sepenuhnya karena hubungannya yang dekat dengan perusahaan-perusahaan Belanda, melalui kegiatannya mengurus segala keperluan kapal-kapal Belanda yang singgah di situ. Sekelompok perusahaan perkapalan Belanda mengajukan petisi kepada Pemerintah Belanda pada 1851 agar Read diangkat sebagai konsul kehormatan, tetapi ditolak karena ada kebijakan Belanda yang melarang pengangkatan Konsul di koloni-koloni karena dikhawatirkan ini akan mendorong negeri-negeri yang lain untuk juga mendirikan konsulat di India

Belanda. Namun, pada 1856, kebijakan ini diubah, niat untuk mengangkat Konsul di Asia diumumkan, dan petisi-petisi pun masuk, mengusulkan berbagai nama. Perusahaan-perusahaan Amsterdam yang berpengaruh mengajukan Read, sedangkan Rotterdam tampaknya lebih suka Johannes Mooyer, agen Singapura untuk perusahaan Hamburg, Behn Meyer. Ketika Batavia mengetahui rencana ini beberapa waktu kemudian, Gubernur-Jenderal menyarankan agar diangkat pejabat Belanda sebagai Konsul dengan gaji tetap—mereka paham sekali betapa penting Singapura bagi India Belanda. Namun, pada saat itu, Raja sudah mengangkat W.H. Read sebagai Konsul, "tanpa biaya bagi negara", pada 6 Desember 1856.[15]

Pada zaman sebelum ada telegraf ini komunikasi berjalan lambat sekali. Surat pengangkatan sebagai Konsul tiba di Singapura pada Juni 1857, dan baru sampai ke tangan Read pada Oktober di London, tempat ia cuti sejak April. Read menjawab dengan desakan agar M.F. Davidson, rekan Read di A.L. Johnston and Co., dan tampaknya orang yang dipercayanya untuk mengurus semua urusannya di Singapura selama ia cuti, diangkat sebagai Wakil Konsul. Dalam sepekan Raja telah mengambil langkah-langkah sesuai dengan saran Read, sebelum pihak-pihak berkepentingan di Batavia yang lebih suka seorang Belanda sebagai konsul dapat menghimpun kekuatan.[16] Davidson meneruskan tugasnya di konsulat selama Read tidak ada sampai Februari 1863, ketika Read menggunakan kesempatan keberangkatan Wakil Konsul ke Eropa untuk menyarankan seorang kerani Belanda berusia 23 tahun di kantornya, Jean Canters, sebagai pengganti. Ini kembali dengan cepat disetujui oleh Raja, sebelum NHM yang maha penting itu sempat mengajukan keberatan. NHM sudah mengangkat agen permanen Belanda, H.J. van Hoorn, di Singapura sejak 1857, dan sudah lama merasa bahwa ia seharusnya yang diangkat sebagai Konsul Belanda, untuk menggantikan Read yang sering tidak ada di tempat.[17] Meski Read merasa tidak perlu menyampaikan apa-apa kepada The Hague mengenai Canters kecuali bahwa ia orang Belanda asli, Canters tampaknya sebelumnya adalah anggota staf NHM Singapura, yang ditarik Read masuk A.L. Johnston untuk mengurus perdagangan perusahaan itu dengan Jawa dan mengurus kapal-kapal Belanda yang singgah. Canters memungkinkan konsulat untuk pertama kali dapat melaksanakan kegiatannya dalam bahasa Belanda.

Penang, wilayah kedua terpenting di Straits Settlements Inggris, juga mulai memiliki konsul kehormatan; mereka diangkat menjelang akhir tahun 1850-an, karena Penang juga merupakan sebuah *entrepôt* yang penting untuk pelayaran dari Sumatra dan Teluk Benggala. Ketika sejumlah petisi yang pertama

tiba pada 1860 dari para pedagang di Penang yang menginginkan pengangkatan Konsul Belanda, Kementerian Luar Negeri sudah cukup banyak menarik pelajaran sehingga sekarang meneruskan masalah itu ke Batavia. Jawaban dari Gubernur-Jenderal adalah pembukaan konsulat di Penang sekarang belum perlu, tetapi pedagang Jerman Kustermann merupakan calon yang terbaik bila waktunya tiba untuk mengangkat konsul kelak.[18]

Tiga tahun kemudian situasi berubah secara radikal dan pemerintah sangat ingin mengangkat seorang Konsul untuk Penang, tetapi bukan Kustermann yang mendapat jabatan itu, melainkan calon yang disodorkan Read. Pada 1863 sebuah armada kapal perang dikirimkan ke pantai Sumatra di depan Penang, dipimpin oleh Residen Riau, Netscher, untuk menegakkan wewenang Belanda dan menangkap atau mengusir penguasa Melayu dan pedagang Cina Penang yang menentang wewenang itu dan mengharapkan perlindungan dari Inggris. Belanda tidak ingin merusak hubungannya dengan Inggris yang menjadi tumpuannya untuk mempertahankan posisinya di Asia Tenggara.[19] Karena itu diperlukan seseorang di Penang yang dapat meredakan amarah para pedagang setempat dan pada waktu bersamaan mewakili kepentingan-kepentingan Belanda di *entrepôt* itu, yang sekarang akan dijadikan pusat perdagangan koloni-koloni Belanda di Pantai Timur Sumatra.

Sementara sebagian besar pedagang Straits Settlements yang lebih berani bersuara dan suratkabar mereka sangat menentang gerak maju Belanda di Sumatra Timur, W.H. Read berhasil menjadikan dirinya anak kesayangan The Hague dengan laporannya bahwa dalam kenyataan gerak maju Belanda itu tampaknya sama sekali tidak merugikan perdagangan Inggris. Seperti telah kita lihat, Read sangat percaya bahwa Eropa perlu memperluas kekuasaannya ke kerajaan-kerajaan Melayu, dan ini juga berlaku bagi Sumatra (di sini Inggris dilarang masuk menurut Persetujuan 1824) sama seperti Malaya. Jadi ketika Read mengajukan temannya H.J.D. Padday, kepala perusahaan dagang Penang, Win Hall & Co., dan ketua Kamar Dagang Penang, sebagai konsul, Menteri Koloni Franssen van de Putte tanpa berpikir panjang setuju. Read seperti dapat diperkirakan menyampaikan kepada Menteri-menteri Belanda bahwa "pedagang Jerman di Penang tidak terlalu dihargai". Ketika mengajukan calon dari Read kepada Menteri Luar Negeri, van de Putte mengatakan:

Mr Padday memiliki hubungan dagang dan persahabatan dengan Mr Read, dan ini bagi saya suatu hal yang memiliki nilai yang tinggi dalam kaitan dengan hubungan kita dengan Pemerintah Inggris, dalam kaitan dengan perluasan kekuasaan India Belanda di Pantai Timur Sumatra."[20]

Dibandingkan dengan cara tanpa pertimbangan yang dalam, dan bahkah tanpa konsultasi dengan Batavia, dalam pengangkatan Read, pertimbangan kolonial dan politik memainkan peranan penting dalam pengangkatan Padday sebagai konsul untuk Penang pada September 1863. Surat pengangkatan Padday merinci tugas-tugasnya bahwa Konsul baru itu terutama harus berusaha keras untuk menyanggah pandangan-pandangan yang salah di Penang mengenai niat Belanda, dan mengawasi setiap aspek lalu lintas antara Penang dan Sumatra. Residen Riau, Netscher, yang bertanggung jawab atas kebijakan Belanda di wilayah rebutan pantai timur Sumatra, akan terus menyampaikan kepada Padday perkembangan mutakhir mengenai kebijakan itu.[22] Netscher memang berkunjung ke Penang dan memberi penjelasan kepada Padday pada November. Ia melaporkan kepada The Hague berita gembira bahwa Padday "umumnya sangat dihormati di Penang", dan ia tampaknya dapat diyakinkan oleh Netscher bahwa gerak maju Belanda di Sumatra bermanfaat bagi perdagangan Straits Settlement.[22]

Namun, Padday tidak memiliki kegigihan yang dimiliki Read dan tidak berambisi seperti Read untuk memperjuangkan wilayah kekuasaan Eropa, dan tampaknya tidak banyak dapat membantu memajukan kepentingan-kepentingan Belanda. Pada Februari 1864 ia melaporkan dengan nada minta maaf mengenai sebuah pertemuan Kamar Dagang Penang—dia Ketua organisasi itu—yang memutuskan untuk terus melancarkan protes atas pendudukan Sumatra Timur oleh Belanda, padahal dia sudah menyampaikan kepada rapat apa yang disampaikan oleh Netscher kepadanya. Pada bulan berikut ia berangkat menuju Eropa tanpa memberitahu The Hague, setelah "commissioning" (menugaskan) adik laki-lakinya sebagai Wakil Konsul—padahal ia tidak punya wewenang untuk melakukan ini.[23]

Ketidakhadiran Read di posnya untuk waktu cukup lama juga menyebabkan kekhawatiran di The Hague. Ia meninggalkan Singapura menuju Inggris pada Oktober 1863 melalui Penang, dan di Penang ia mendorong Padday (atau demikian ia melaporkan) untuk berani menghadapi pedagang Penang. Pihak-pihak berkepentingan di Singapura di bawah pimpinan NHM yang berusaha mendapatkan Konsul penuh waktu warga Belanda untuk Singapura menyampaikan kepada Kementerian Luar Negeri bahwa Read mungkin tidak akan kembali dan bahwa perlu dipersiapkan perwakilan yang lebih dapat diterima orang banyak. Tetapi van de Putte menolak saran-saran semacam itu, dan menambahkan bahwa ia berniat berbicara dengan Read mengenai Straits Settlements dan urusan-urusan Sumatra ketika Konsul itu sedang berada di

Eropa. Sebuah nota tertulis dengan pensil dari seseorang di Kementerian Luar Negeri mengatakan Read ”sangat dikenal di lingkungan [Kementerian] Koloni, dan saya kira secara pribadi juga dikenal Menteri”.[24] Read berkunjung ke The Hague pada Mei 1864, ketika ia tampaknya telah lebih memperkuat lagi hubungannya dengan van de Putte yang sangat berpengaruh.[25]

Read kembali ke Singapura pada 1865, setelah sekitar 18 bulan lamanya Wakil Konsul Canters menjalankan semua urusan konsulat. Kemudian pada Juli 1867 ia kembali melaporkan bahwa ia harus segera kembali ke Eropa atas nasihat dokter. Karena Canters sedang di Belanda, ia mengusulkan adiknya R.B. untuk diangkat sebagai Konsul sementara sampai Canters kembali pada Februari yang akan datang. Namun Canters tidak pernah kembali ke Singapura, menunda beberapa kali keberangkatannya ke Singapura, dan akhirnya bekerja untuk Rotterdam Bank pada 1869. Meski W H. Read sudah berada kembali di Singapura pada pertengahan 1868, Kementerian Luar Negeri terus mendapat petisi dari pedagang Belanda terkemuka di Singapura, J.D. Hooglandt, bahwa tidaklah pantas Belanda diwakili oleh seorang Inggris. Jika ia tidak dapat diangkat sebagai Konsul, seperti dimintanya setiap kali Read meninggalkan Singapura untuk cuti, ia seharusnya diangkat sebagai Wakil Konsul untuk menggantikan Canters yang tidak tentu rimbanya. Akhirnya, pada April 1869, setelah membuktikan tanpa bantuan dari Read bahwa Canters tidak akan kembali ke Singapura, Kementerian Luar Negeri menulis surat kepada Read menyarankan pengangkatan Hooglandt sebagai Wakil Konsul.[26]

Ini adalah saat yang barangkali telah diperkirakan Read akan tiba, ketika ia akhirnya harus meyakinkan The Hague mengapa dia yang harus diberi kepercayaan, bukan seorang Belanda. Pertama-tama ia mengatakan bahwa karena di kantornya sudah ada seorang Belanda, yakni Sebastian Maier, yang membantunya, maka tidak diperlukan seorang Wakil Konsul. Ketika The Hague bersikeras bahwa pemerintah Belanda memerlukan seorang Wakil Konsul yang dapat dipercayanya, Read melancarkan serangan sengit terhadap Hooglandt bahwa ia mutlak tidak dapat bekerja sama dengan Hooglandt karena pedagang Belanda itu terus mencoba menghambat perusahaan Read dan mendorong perusahaan-perusahaan Belanda.[27] Mendapat serangan-serangan ini, Kementerian mundur, dan jabatan wakil konsul tetap kosong sampai 1871, ketika Read, setelah upaya berkali-kali untuk menempatkan Maier dalam jabatan itu, akhirnya berhasil meyakinkan The Hague.[28] Pada tahun itu Read juga dianugerahi gelar pribadi “Konsul Jenderal” atas saran Gubernur Jenderal,

meskipun Gubernur Ord menentangnya ketika melihat musuh utamanya itu dengan demikian naik ke puncak korps diplomatik Singapura.[29]

Pada 1872-3 karena itu status Read dengan Belanda berada di puncaknya, sebagai Konsul Jenderal dan Knight of the Netherlands Lion (1865), dengan pembantu seorang Konsul di Penang dan seorang Wakil Konsul di Singapura, yang keduanya orang-orangnya sendiri. Di pihak Inggris hanya diperlukan pergantian Gubernur pada 1873 dari Sir Harry Ord yang memusuhinya itu ke "new broom" (sapu bersih) Sir Andrew Clarke, untuk menjadikan Read juga warga perorangan Singapura yang paling berpengaruh di situ.

Para pendukung Read kadang-kadang menekankan bahwa dia telah berjasa melakukan yang terbaik dengan gigih untuk Belanda tanpa biaya sepeserpun bagi Pemerintah Belanda. Namun di pihak lain jelas sekali terlihat bahwa Konsulat Belanda itu sangat penting bagi Read pribadi dan bahwa ia bersedia melakukan apa saja untuk memastikan jabatan itu tetap berada dalam tangannya dan juga dalam tangan perusahaannya. Konsul diizinkan mengutip pungutan untuk penerbitan visa dan penyediaan jasa konsuler bagi kapal. Namun, bagi sebagian besar Konsul di Singapura, pungutan itu berjumlah beberapa ratus dollar saja setahun; daya tarik utama posisi ini ialah status dan kontak, yang bermanfaat untuk perusahaan.

Hal yang membedakan konsulat Belanda di Singapura ialah lalulintas jemaah haji Islam dari India Belanda ke Mekkah, yang semuanya melalui Singapura tempat mereka naik kapal-kapal uap Inggris yang penuh sesak (seperti misalnya kapal uap yang dikisahkan Conrad dalam *Lord Jim*) untuk Jeddah. Pemerintah India Belanda, khawatir mengenai kontak yang dijalin jemaah haji di Singapura, mengharuskan jemaah haji menghubungi konsulat untuk mendapat visa. Keharusan ini ditangguhkan pada 1875, sebagian karena prosedur kontrol yang lebih efisien atas jemaah sudah ada melalui konsulat Belanda di Jeddah. Tetapi tampaknya jemaah haji tidak pernah diberitahu mengenai hal ini, dan konsulat Read tetap mendapat pemasukan dengan menarik biaya untuk visa dari jemaah haji.[30] Baru pada 1881, ketika persiapan-persiapan yang sungguh-sungguh dilakukan untuk mengganti konsul kehormatan dengan Konsul yang digaji (*consul missus*), kementerian luar negeri Belanda menemukan betapa besar pemasukan yang dapat diperoleh dari situ. Jumlah yang besar untuk orang Jawa yang miskin, yakni 2,50 guilder (satu dollar Straits), dapat dipungut untuk biaya setiap visa, dan setiap tahun ribuan orang yang berangkat melalui Singapura. Pemasukan tahunan konsulat rata-rata $11.370 pada tahun 1875-80, dan tiga perempat dari jumlah ini berasal dari visa yang diterbitkan untuk

jemaah haji.[31] Bandingkan ini dengan sekitar $2.000 setahun untuk gaji seorang pejabat muda Eropa di konsulat atau di tempat lain di Singapura.

Perang Aceh Dimulai oleh Seorang Inggris?

Secara harafiah tidak diragukan lagi bahwa telegram Read tertanggal 16 Februari 1873 yang dijadikan Belanda alasan untuk menyatakan perang terhadap Aceh. Pesan bernada kekhawatiran ini juga mempercepat pelaksanaan rencana invasi Belanda tanpa pemikiran yang matang, karena keyakinan yang salah bahwa kekuatan-kekuatan lain sedang mencoba untuk mendahului Belanda. Tentu ada kelompok elang dan kelompok merpati di Batavia, dan berita dari Read ini mendapat sambutan dari kelompok yang cenderung mengambil tindakan tanpa berpikir panjang. Mengingat antusiasme kekanak-kanakan Read untuk langsung bertindak tanpa mempedulikan segi hukum, dukungannya yang tidak pernah kendur bagi intervensi oleh Eropa, dan kesediaannya untuk menggunakan kontaknya yang banyak di antara orang Melayu untuk menciptakan situasi yang kemungkinan besar dapat mencetuskan intervensi, kita jangan mengenyampingkan *a priori* upaya yang dilakukan dengan sengaja oleh Read untuk mencetuskan perang. Perang kemungkinan besar tetap akan dilancarkan seandainya pun tidak ada dorongan dari Read, tetapi kebijakan Belanda akan lebih bersifat berhati-hati.

Perjanjian Sumatra 2 November 1871 sudah meletakkan landasan bagi pendudukan Aceh oleh Belanda, dan menciptakan sebuah kelompok penekan di The Hague yang bersikeras bahwa Belanda akan tampak lemah jika tidak segera melaksanakan invasi itu. Menurut perjanjian ini Inggris menarik "semua keberatannya atas perluasan kekuasaan Belanda di seluruh pelosok pulau Sumatra", dan khususnya menarik jaminan atas kemerdekaan Aceh yang tertera dalam surat-surat yang dipertukarkan pada waktu Perjanjian Inggris-Belanda 1824 ditandatangani. Pemerintah India Belanda bergerak dengan cepat untuk melaksanakan perundingan-perundingan ini di Eropa dengan strategi-strateginya sendiri untuk invasi. Ada dua pilihan untuk mencapai penaklukan—melalui perundingan dengan Sultan untuk mencoba menjadikannya bawahan Belanda, atau perlindungan dan dukungan atas *ulèëbalang* yang memberontak melawan Sultan sampai Aceh dapat berangsur-angsur dipecah-belah. Masalahnya ialah kebijakan ini bertentangan satu dengan yang lain, dan Belanda tidak memiliki informasi yang cukup banyak untuk menguji kebijakan mana yang lebih realistis. Secara keseluruhan Residen Belanda di Riau, Schiff, yang ditugaskan

menjalin hubungan dengan Aceh dan Dewan India *(Raad van Indië)* di Batavia, mendukung kebijakan berunding dengan Sultan, sementara Kementerian di The Hague, James Loudon yang diangkatnya sebagai Gubernur Jenderal pada 1872, dan Read sendiri, lebih suka kebijakan konfrontasi, dan mendukung musuh-musuh Sultan.

Pada Agustus-September 1871 sudah muncul tujuan-tujuan yang bertentangan. Kapal Belanda *Djambi* diterima dengan baik di ibukota Aceh, yang mendorong Batavia untuk berunding dengan Sultan, tetapi pada waktu bersamaan kapal perang *Marnix* melakukan campur tangan untuk membantu penguasa keturunan India Idi yang memberontak dengan mengusir armada Aceh yang melakukan blokade atas Idi untuk menaklukkannya. Read adalah penyebab dari campur tangan itu, karena dia mengirim telegram dari Singapura yang berbunyi bahwa kapal-kapal Aceh di Idi mencegah kapal-kapal berbendera Belanda meninggalkan Idi, dan *Marnix* harus dikerahkan untuk membebaskan kapal-kapal Belanda itu (meski tidak satupun ditemukan).[32] Intervensi ini menambah besar kekhawatiran di Aceh, dan Aceh mengambil serangkaian langkah diplomasi untuk mengetahui apakah Aceh memiliki kawan-kawan asing jika Aceh melakukan perlawanan terhadap Belanda.

Utusan dikirim pertama-tama ke Turki (lihat Bab 9) dan kemudian ke Straits Settlements untuk mengetahui pandangan Inggris. Sementara tekanan-tekanan terus meningkat bagi pelaksanaan ekspedisi Belanda untuk menegakkan perjanjian tertentu dengan Sultan pada akhir 1872, istana Aceh mengambil langkah-langkah yang lebih mendesak. *Sjahbandar* keturunan India, Panglima Muhammad Tibang, dikirim ke Riau membawa surat-surat yang meminta agar misi Belanda diundurkan, dan ke Singapura kepada Konsul-konsul Prancis, Amerika Serikat, Italia dan Spanyol untuk melihat kalau-kalau mereka mau membantu. Residen Schiff menerima Tibang dengan baik di Riau dan bahkan mengirim dia kembali ke Aceh dengan sebuah kapal Belanda yang singgah di Singapura dalam perjalanan. Selama singgah di Singapura ini Tibang mencari teman lamanya, Tengku Mohammad Arifin, seorang Melayu yang lancar berbahasa Inggris dan banyak kontak di antara orang Eropa di Singapura. Arifin mempertemukan Tibang dengan Konsul Amerika Serikat, Mayor Studer, dan mereka ini membahas kemungkinan-kemungkinan perjanjian Amerika Serikat-Aceh untuk mencegah Belanda. Setelah Tibang berangkat meninggalkan Singapura pada akhir Januari 1873, Arifin menyingkapkan perundingan ini kepada Read; Read meneruskan hal ini dengan telegraf ke Batavia yang menilai perundngan itu sebagai "betrayal" (pengkianatan) dan karena itu

menuntut tindakan segera. Belanda atas dasar itu bergerak secepat mungkin dan mengirimkan ekspedisi militer ke Aceh yang diberi wewenang hanya untuk menerima penyerahan diri Aceh tanpa syarat, atau untuk melakukan invasi. Armada Belanda tiba di lepas pantai Aceh pada 22 Maret, dan mulai menembak dengan meriam pada 26 Maret sebagai tanda bahwa diplomasi sudah digantikan oleh perang.[33]

Siapa sebenarnya yang bertanggung jawab atas apa yang dinamakan "Singapore treachery" (pengkhianatan Singapura), dan karena itu menyebabkan Batavia (dan juga Aceh, yang terkejut) dengan tergesa-gesa melancarkan perang, yang sia-sia karena Batavia sama sekali tidak siap untuk itu? Belanda menuduh Aceh menipu dan mengkhianati Belanda karena Aceh berhubungan dengan wakil-wakil pemerintah asing. Tibang memang agak licin, tetapi Aceh adalah negeri merdeka dan karena itu berhak berhubungan dengan negeri lain dan tidak wajib melaporkan urusannya kepada Belanda. Read ingin melukiskan rekannya Mayor Studer sebagai penjahat atau orang pandir yang tanpa berpikir panjang mencoba melibatkan Amerika sebagai penolong Aceh.[34] Memang dari semua konsul di Singapura Studer yang paling bersemangat mengenai prospek bagi sebuah perjanjian dengan Aceh, "karena saya tahu, dari dulu dan sekarang, banyak manfaat yang dapat diperoleh untuk negeri kita dari sebuah perjanjian yang menguntungkan".[35] Tetapi ia tidak melakukan apapun selain daripada menawarkan akan meneruskan ke Washington usul-usul resmi yang disampaikan kepadanya, dan ia sama sekali tidak mengambil prakarsa untuk menghubungi Tibang dan Arifin. Dalam pandangan Gubernur Inggris orang yang sebenarnya bersalah ialah Arifin, "this rascally intriguer" (penipu ulung ini) pertama-tama meyakinkan Tibang agar berunding dengan Konsul Amerika, kemudian kedua orang ini dikhianatinya kepada Belanda.[36] Pendapat ini tampaknya dapat diterima. Namun, apakah Read semata-mata melaporkan informasi yang diperolehnya dari Arifin, tanpa kepentingan apa-apa, atau apakah ia, sampai batas tertentu, menciptakan gara-gara agar terjadi intervensi yang sangat diyakininya perlu dilakukan itu?

Arifin mengaku sudah kenal dengan Read sejak 1864, tidak lama setelah ia pindah ke Malaya dari Moko-Moko di Sumatra Barat, cucu Sultan terakhir Anak Sungei. Arifin pada akhir tahun 1860-an bekerja untuk Baginda Omar, penguasa Trengganu, karena itu mungkin dia yang melakukan koordinasi strategi dengan koalisi Melayu pro-Sultan Ali yang dibentuk Read. Arifin dikirim ke Inggris oleh Baginda Omar pada 1869, tetapi sekembalinya dari misi yang tidak berhasil itu ia dibebani utang, dan atasannya tidak bersedia

Gambar 15 a W. H. Read
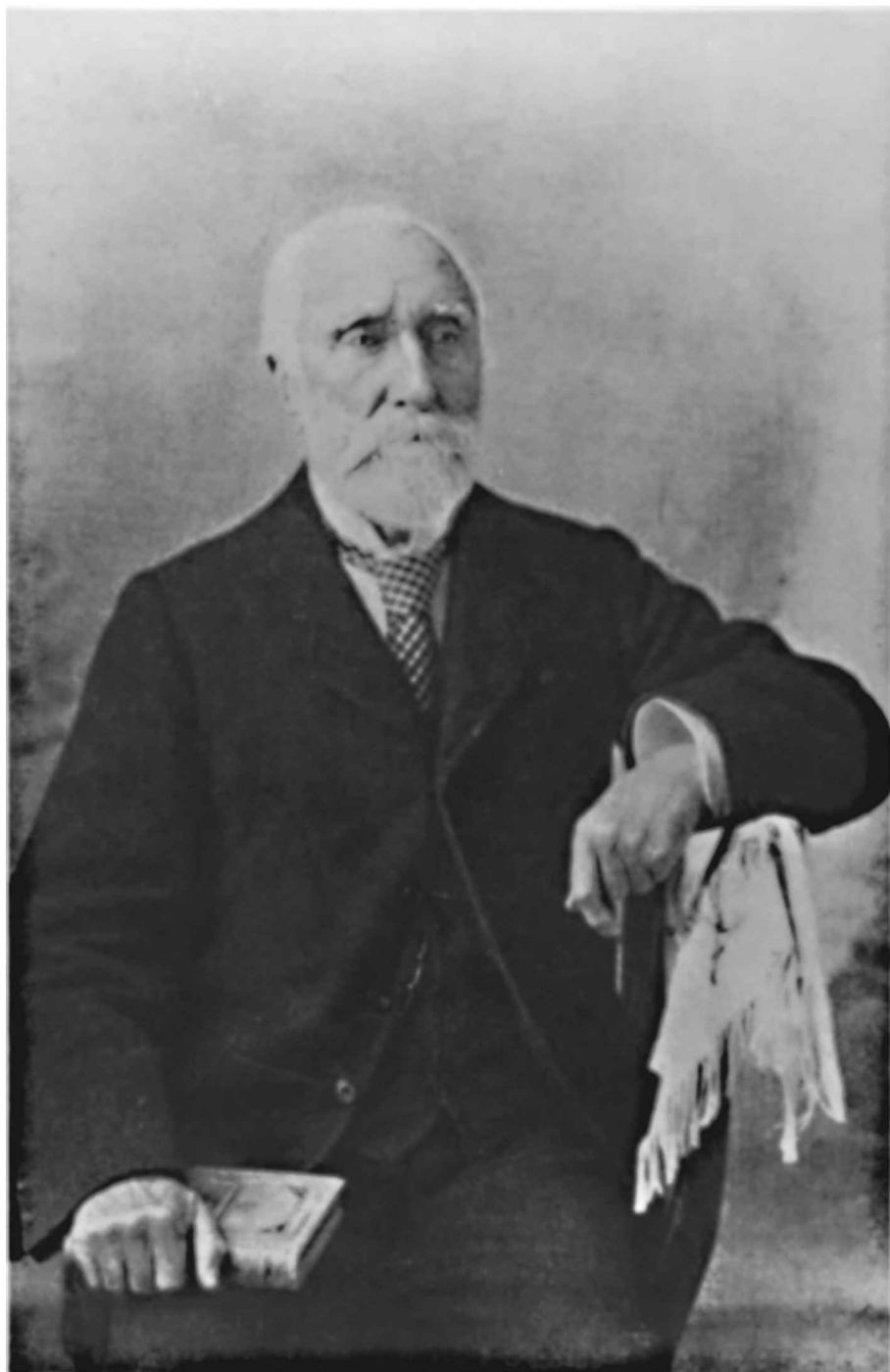
Gambar 15 b Tengku Mohammad Arifin

menutupnya. Karena itu sejak 1870 Arifin tampaknya bekerja untuk W H. Read, yang membantunya dari sisi keuangan dan sebagai imbalan Read mendapat informasi dari Arifin mengenai persekongkolan-persekongkolan politik Melayu yang diminati Read.[37] Arifin menghubungi Konsul Amerika pertama kali pada pertengahan 1872 dengan alasan untuk menanyakan kepadanya apakah benar Amerika Serikat, seperti diberitakan, berencana mendirikan sebuah pangkalan angkatan laut di Brunei. Arifin mengaku mewakili "ribuan penduduk asli" yang berharap Amerika melakukan intervensi. Studer berterima kasih kepada Arifin atas harapan itu tetapi menyatakan tidak tahu menahu mengenai rencana semacam itu. "Finding him remarkably intelligent" (Mendapat kesan bahwa Arifin sangat cerdas), Studer kemudian berbicara dengan Arifin mengenai hal-hal lain, dan mengadakan diskusi beberapa kali lagi dengan dia; dalam kesempatan itu Arifin mengungkapkan kekagumannya akan Amerika Serikat dan mendukung peran yang lebih besar bagi Amerika di dunia Melayu.[38]

Sepanjang dapat diketahui, Arifin tidak memiliki kepentingan di Brunei, tetapi Read jelas berkepentingan di situ. Selain mewakili kepentingan Belanda di dua pertiga wilayah selatan pulau Borneo, Read adalah agen dan pendukung gigih di Singapura bagi pemerintahan Brooke di Sarawak, dan aktif mengamati gerakan-gerakan yang dilakukan Inggris sehingga Inggris berhasil menancapkan kekuasaan di Borneo Utara. Ada kemungkinan besar bahwa Read mendorong Arifin untuk mendekati Studer untuk menggali informasi mengenai niat Amerika di Borneo dan melaporkan hal ini kepadanya. Tidak jelas apakah Arifin terus memberi informasi kepada Read mengenai semua percakapannya dengan Studer, tetapi Read sendiri memberikan kesan bahwa Arifin berada di bawah kendalinya. Pada September 1872 Panglima Tibang mengunjungi Singapura untuk pertama kali dalam upaya sia-sia untuk memperoleh dukungan Inggris bagi Aceh, dan pada kesempatan itu tampaknya bertemu dengan Arifin. Tidak lama kemudian (barangkali pada Oktober), Arifin menjelaskan misi Tibang kepada Studer, dan tekad Aceh untuk mempertahankan kemerdekaannya dan mengadakan perjanjian dengan negeri-negeri yang bersahahabat dengannya. Ia bertanya kepada Studer apakah ia bersedia berunding atas nama Amerika Serikat mengenai perjanjian dan mendapat jawaban bahwa usul semacam itu akan diteruskannya ke Washington.[39]

Jika Arifin menyampaikan isi percakapan ini kepada Read, Read tidak meneruskannya ke Batavia, karena tidak ada hal yang mencurigakan untuk diteruskan, karena bukankah anak buahnya, Arifin, yang menghubungi dan berbicara dengan Studer, bukan Tibang. Persoalannya adalah apakah Read terus

mendorong Arifin untuk mempertemukan Tibang dengan Konsul Amerika itu sampai ada bukti yang cukup kuat mengenai "duplicity" (kelancungan) Aceh. Menjelang akhir Desember 1872 Read meninggalkan Singapura untuk berkunjung ke Bangkok, dan baru kembali pada 14 Februari, setelah pembicaraan antara Tibang, Arifin dan Studer berlangsung pada akhir Januari. Kenyataan bahwa ia tahu mengenai apa yang dilakukan Arifin dalam boleh dikatakan sekejap mata menunjukkan ada hubungan kerja yang erat antara Read dan Arifin, dalam arti Arifin memberikan laporan secara teratur kepada Read. Laporan pertama Read [ke Batavia] mengatakan bahwa Arifin menyampaikan informasi kepadanya semata-mata sebagai ucapan terima kasih atas bantuan yang telah diberikannya kepada Arifin selama bertahun-tahun, karena itu informasi dari dia dapat dipercaya.[40] Kemudian, ketika peranan Arifin, ini dapat dimengerti, dipersoalkan di Batavia, Read menjelaskan, "Bahwa Mohamed Arifin pada awalnya mungkin berpihak kepada Aceh, menurut saya sangat mungkin; namun, seandainya saya ada di Singapura, ia tidak akan berani bersikap begitu; yang jelas saya harus menggunakan tekanan yang agak keras kepada dia sebelum saya dapat memperoleh informasi yang saya peroleh."[41] Jika Arifin benar-benar tidak berani bertindak untuk kepentingan Aceh dan bukan kepentingan Read ketika Read berada di tempat, kepentingan siapa yang diperjuangkannya ketika ia berbicara dengan Studer mengenai Aceh pada Oktober yang lalu? Menurut saya, interpretasi yang paling mungkin ialah Read mendorong Arifin untuk berbicara dengan Studer dan melapor kepada Read, khususnya untuk membicarakan persoalan Aceh dengan Konsul Amerika Serikat itu. Keengganan Arifin untuk mengungkapkan semuanya kepada Read pada Februari mungkin karena ia memang yakin bahwa kemerdekaan Aceh di bawah perlindungan Amerika Serikat merupakan suatu kemungkinan, dan ia dapat menarik keuntungan dari kemungkinan itu. Pada April Read melaporkan bahwa Arifin berharap untuk diangkat sebagai Konsul Aceh di Singapura. Barangkali tidak sulit bagi Read untuk menghilangkan khayalan ini dan mengganti "janji-janji kosong" orang Aceh itu dengan uang tunai dari kantongnya sendiri.[42]

Surat-surat Read secara berkala mencantumkan jumlah uang yang telah dibayarkannya kepada Arifin dengan harapan Batavia akan menggantinya. Read mengirim Arifin mendampingi ekspedisi Belanda ke Aceh, dan juga membawa dia ke Batavia pada Juli. Belanda sangat kecewa dengan Arifin setelah bertemu dengan dia di Jawa dan ingin mengusir "extremely cunning intriguer" (penipu yang luar biasa ulung) ini,[43] tetapi Read tetap mempertahankan Arifin

sebagai orang gajiannya selama ia menjadi Konsul Jenderal di Singapura. Pada 1884 Read menugaskan Arifin untuk memainkan peranan yang juga sangat tidak jelas dalam upaya membebaskan awak kapal orang Inggris kapal S. S. *Nisero,* yang ditahan sebagai sandera di pantai barat Aceh setelah kandas di situ. Juga dalam kejadian ini Arifin melapor secara teratur kepada Read, dan mengungkapkan rasa terima kasihnya yang tak terhingga kepada Konsul itu, "pemilik nyawa saya, setelah Tuhan dan Nabi".[44]

Laporan-laporan Read kepada Gubernur Jenderal Loudon selama 1873 isinya penuh dengan bahan-bahan yang mendorong imperialisme agresif dan tidak bertanggung jawab, yang mencoba mempertahankan momentum yang dibangunnya dengan telegram-telegram yang dikirimkannya sebelumnya. Sementara Ekspedisi Pertama disiapkan di Batavia, Read meneruskan [kepada Loudon] sebuah permohonan dari pedagang Singapura agar dicari jalan damai, disertai ulasan dari dia yang bernada sangat menghina. Kekuatan merupakan satu-satunya jawaban bagi orang Aceh. "Kita tidak akan pernah dapat mempercayai mereka lagi setelah apa yang terjadi. Gabungan dari sifat-sifat orang Arab dan sifat-sifat orang Kling, kedua-duanya keturunan langsung 'father of all lies' (bapak segala dusta), tidak dapat diandalkan.[45] Kekalahan luar biasa Ekspedisi Pertama Belanda sama sekali tidak mengurangi nafsu imperialismenya yang menggebu-gebu. Pada Juni tampaknya ia bermimpi bahwa ia seorang panglima. "Sekaranglah saatnya bagi setiap orang untuk bekerja sekuat tenaga dan membuang semua tata krama dan upacara resmi, birokrasi berbelit-belit dan omong kosong tak berujung pangkal, untuk bertindak dengan penuh semangat demi kejayaan Tanah Air."[46] Sementara Ekspedisi Kedua dimulai, Read mendesak agar diupayakan penyerahan tidak bersyarat dari pihak Aceh dan meyakinkan Loudon bahwa perlawanan Aceh akan berumur pendek.[47] Sayangnya Gubernur Jenderal yang baru itu tampaknya, paling tidak pada awalnya, lebih condong mendengarkan kata-kata Read daripada menyimak laporan George Lavino yang berpengetahuan sangat luas, yang bertanggung jawab atas pengumpulan intelijen mengenai Aceh, atau mendengarkan saran-saran penuh pertimbangan matang dari pejabat-pejabat berpengalaman. Berapa besar kadar pengetahuan mengenai Aceh atau Belanda dalam sikap Read yang menantang perang itu dipertanyakan setelah ia mengadakan sejumlah diskusi pada awal 1874 dengan Gubernur baru Straits Settlements, Sir Andrew Clarke. Ketika seorang utusan Aceh dan Maharaja Johor mengusulkan kepada Clarke semacam intervensi Inggris untuk mengakhiri perang itu, Read memberikan informasi tanpa diminta bahwa Belanda akan menyambut baik tindakan

semacam itu. "Ia berhasil membawa dia [Clarke] pada kesimpulan bahwa Gubernur Jenderal Belanda dan Pemerintah Sipil sudah muak dengan perang itu dan tidak terlalu optimis mengenai hasilnya, dan bahwa jika diteruskan ini semata-mata karena keinginan Panglima Tertinggi dan militer Belanda."[48] Ini jauh sekali dari kebenaran, seperti dijelaskan tanpa membuang-buang waktu oleh Pemerintah Belanda.

Barangkali Read sudah lelah dengan perang kecilnya. Seperti kata satu-satunya penelitian Belanda yang penting akhir-akhir ini mengenai perang Aceh, memoar Read yang penuh dengan hasutan perang itu sama sekali tidak menyinggung Ekspedisi Kedua ini, sukses tindak tanduk politiknya yang paling gemilang, karena "perang ini ternyata bukan perang yang mudah dan menguntungkan dibandingkan dengan perang yang berhasil dikobarkannya di Malaya".[49] Perang itu adalah perang paling mahal daripada semua perang kolonial di Asia Tenggara, yang menelan 14.000 jiwa serdadu Belanda dan paling tidak 100.000 jiwa orang Aceh dalam periode selama 40 tahun.

Konsulat sebagai Pusat Mata-mata

Peranan konsulat di Straits Settlements berubah secara besar-besaran sebagai akibat dari pecahnya perang Aceh pada Maret 1873. Dengan menyerang Aceh, satu-satunya kerajaan penting di Kepulauan yang tidak pernah berada di bawah pengaruh Belanda, Belanda masuk ke wilayah tidak dikenal. Aceh, seperti tetangganya pantai timur Sumatra, berada dalam lingkup perdagangan Straits Settlements dan tidak memiliki hubungan dengan Belanda, kecuali hubungan bermusuhan di sekitar perbatasan Straits Settlements. Melancarkan serangan besar atas Aceh, dan kemudian mempertahankan kehadiran militer dalam kepungan selama 30 tahun berikutnya, membutuhkan dukungan logistik yang sangat besar dari Straits Settlements. Karena pengetahuannya mengenai Aceh dan pendukung-pendukungnya dari luar sangat sedikit, Belanda perlu mengembangkan kegiatan intelijen yang luas di sekitar konsulat-konsulat Belanda.

Peranan konsulat yang terus meluas mulai secara *ad hoc*, karena Belanda membayangkan petualangan militernya di Aceh akan makan waktu pendek. Ekspedisi Belanda yang pertama, dan hancur luluh, ke Aceh, yang menyerang wilayah ibukota pada 8 April dan mundur ke kapal-kapalnya setelah kehilangan komandannya pada 25 April, didampingi oleh seorang "attaché" sipil yang menjadi tokoh kunci dalam tahap baru konsulat itu. Orang ini ialah George

Lavino, seorang warga Belanda dengan kemampuan berbahasa Inggris seperti orang Inggris asli, karena ia bersekolah bertahun-tahun di Inggris (kecuali dua tahun di Jerman) sebelum bekerja selama sembilan tahun untuk pemerintah kolonial di Batavia. Bahasa Inggrisnya jauh lebih lancar daripada bahasa Belandanya, sehingga semua laporannya yang penting ditulis dalam bahasa Inggris.[50] Barangkali karena hal ini maka Pemerintah India Belanda yakin bahwa ia sangat berguna bagi ekspedisi Aceh dari sisi pengumpulan informasi di Singapura dan Penang sementara ekspedisi bergerak menuju Kesultanan itu. Karena telah sangat banyak berjasa kepada Ekspedisi Belanda Pertama, Lavino dinilai sangat penting bagi ekspedisi berikut, yang akan terdiri dari—karena pihak berwenang Belanda bersikeras mengenai hal itu—pasukan yang dicari di Jawa dan di Eropa, untuk membalas penghinaan yang diderita Ekspedisi Pertama. Dia diangkat kembali pada Mei 1873 ”untuk mengumpulkan informasi yang berguna di Penang mengenai semua yang terjadi antara orang Aceh yang tinggal di situ dan pedagang setempat”. Ia ditempatkan di bawah Read untuk mengumpulkan informasi di Penang dan menyerahkan laporan secara teratur ke Batavia.[51]

Dua pekan sebelumnya Pemerintah India Belanda mengirim seorang pejabat Belanda yang lain dan lancar berbahasa Inggris, J.S. Crawfurd, untuk membantu Read langsung di Singapura. Ia berkeliling di kalangan masyarakat Inggris dan masyarakat Melayu untuk mencari apa yang dapat ditemukan mengenai ”perkembangan masalah Aceh dan penyelundupan barang-barang terlarang”. Read diberi anggaran sebesar 10.000 guilder. Dari ini Crawfurd dan Lavino masing-masing mendapat bayaran sebesar 20 guilder sehari, sedangkan sisanya digunakan untuk membayar ”native spies” (mata-mata penduduk asli) yang ditugaskan mencari informasi semacam ini.[52] Crawfurd terus disibukkan oleh pekerjaan semacam ini sampai Oktober, setelah Ekspedisi Kedua Belanda mencapai Aceh. Namun ketika Read mengunjungi Batavia pada Juli ia meyakinkan pemerintah kolonial untuk mengirimkan tambahan tenaga seorang lagi untuk ditempatkan di dinas intelijen Aceh. A.H. Hermans dibebaskan dari tugasnya sebagai kerani pada *Binnenlandse Bestuur* (administrasi dalam negeri) pada pertengahan Agustus 1873, dan masih bekerja dengan konsulat Singapura setahun kemudian ketika gajinya dinaikkan dari 10 menjadi 12,50 guilder sehari.[53]

Karena itu, selama selang waktu antara dua ekspedisi Belanda pada 1873, ada tiga pejabat orang Eropa atau orang Indo-Eropa dari India Belanda yang mendapat gaji dari konsulat untuk tugas intelijen. Selain itu juga banyak orang

Asia yang ditarik menjadi mata-mata dan informan. Bertekad untuk tidak mengulangi kegagalan Ekspedisi Pertama, para petinggi militer tidak segan-segan mengeluarkan uang untuk menarik orang Cina, orang Melayu dan orang Aceh setempat yang cukup berpengetahuan untuk memandu Ekspedisi Kedua ke tempat-tempat berlabuh dan tempat-tempat mendarat yang aman di Aceh, dan kemudian ke jalan yang dapat diandalkan menuju istana Sultan. Pada Juni 1873 Komandan Angkatan Darat menempatkan lima pandu dan lima juru bahasa yang dibutuhkan. Pada Agustus Lavino mengusulkan nama-nama tujuh pedagang Penang yang berpengalaman untuk dikirim ke Aceh, terdiri dari lima orang Cina, satu orang Portugis, dan satu orang Aceh. Dari ini yang paling berharga ialah Koh Beng Swie, yang telah berdagang ke pantai Aceh selama 31 tahun, termasuk 11 tahun sebagai nakhoda kapal kecil. Mendapat imbalan yang besar, ia sudah berlayar dengan Ekspedisi Pertama Belanda pada Maret, dan dia dipekerjakan oleh Lavino dengan gaji yang besar, yakni $100 sehari. Kecuali pedagang Aceh Teungku Lebylah yang menolak pada detik terakhir, semua ini akhirnya dikirim dengan Ekspedisi Kedua, namun separuh dikirim kembali dari Aceh oleh militer, karena mereka ternyata tidak tahu apa-apa.[54] Lavino berusaha sekuat tenaga mencari tokoh-tokoh lain yang berpengetahuan dan bersedia bekerja untuk Belanda di tengah-tengah rasa permusuhan terhadap Belanda yang hampir menyeluruh dalam masyarakat Aceh di Penang. Satu orang yang diusulkan adalah seorang Peranakan Melayu kelahiran Penang yang masih muda (berayah orang India) bernama Mohammad Hasan, yang mengaku bekerja sebagai *kerani* Melayu untuk Sultan Aceh, dan dipercaya oleh Sultan untuk melaksanakan sejumlah misi. Seorang lagi, T. Nyah Kuala, seorang Aceh berusia sekitar 50, yang pernah menjabat kepala pelabuhan Aceh selama sekitar 20 tahun.[55]

Tidak seorangpun dari kedua orang ini yang dikirim ke Aceh, meski Lavino terus sibuk dengan mata-mata yang lain yang mungkin dapat menembus masuk ke kesultanan itu. Radja Boerhanoeddin dari Minangkabau, dua *haji* Peranakan Arab dari Jawa, dan seorang pejabat Arab terkemuka di Batavia, seorang Hindu dari Singapura, dan seorang tahanan Indo-Eropa yang dibebaskan dengan syarat ia berpura-pura sebagai seorang pelarian ke Aceh, semua dikirim oleh Lavino ke Aceh dari Penang dengan menyamar sebagai pedagang dengan kapal lada setempat.[56] Hanya yang pertama dari semua mata-mata ini yang tampaknya menghasilkan informasi yang bernilai bagi militer Belanda. Di pihak lain, laporan-laporan berkala dari Lavino berdasarkan sumber-sumbernya di Penang merupakan sumber terbaik yang dimiliki Angkatan Darat

Belanda untuk mendapat informasi mengenai kekuatan dan rencana-rencana Aceh sebelum Ekspedisi Kedua. Pada Agustus September, misalnya, Lavino mengirimkan empat laporan rinci dengan lampiran berbagai peta: satu dari sembilan halaman mengenai jalur-jalur menuju benteng Aceh *(kraton,* kata Belanda, yang mencerminkan kecenderungan Belanda, yang mengherankan, berorientasi ke Jawa), satu lagi mengenai Masjid Agung yang diperkokoh, satu dari 13 halaman mengenai geografi wilayah Pidië, dan lampiran keempat mengenai wilayah penghasil lada Simpang Ulim tempat musuh-musuh Belanda dengan persenjataan lengkap berkumpul.[57] Meski Panglima Ekspedisi Kedua, Jenderal van Swieten, menyatakan pada April 1874 bahwa ia telah menang karena berhasil menaklukkan *kraton*, Lavino sudah melaporkan pada September yang lalu bahwa orang Aceh tengah menyusun rencana-rencana rinci untuk meninggalkan benteng ini bila telah terdesak dan membangun basis-basis kekuatan di wilayah XXII *mukim* di dataran tinggi sungai Aceh.[58]

Kegiatan intelijen Lavino menjadi sangat penting untuk operasi militer Belanda di Aceh, dan sementara pendudukan ibukota Aceh oleh militer terus berlangsung tanpa ada tanda-tanda perdamaian dapat dicapai, posisi Lavino harus diperjelas. Pada Februari Read mengusulkan agar ia diangkat sebagai Konsul di Penang. Konsul yang sekarang, H.J.D. Padday, sedang cuti panjang di Eropa dan tampaknya tidak akan kembali ke Penang, dan adiknya, Wakil Konsul, baru saja menyerahkan surat pengunduran diri. Menurut Read, tidak mungkin mencari pedagang Inggris di Straits Settlements yang mau bekerja untuk membela kepentingan Belanda, demikian meluasnya rasa permusuhan terhadap apa yang dilakukan Belanda di Aceh.[59] Batavia mendukung usul ini, tetapi Menteri Luar Negeri di The Hague menolak, "sebagian untuk menghindari jangan sampai terjadi perubahan sikap pada Padday yang selama ini memperlihatkan kerjasama yang baik." Konsul yang sedang tidak ditempat itu dibiarkan tetap pada jabatannya, saudara laki-lakinya yang lain, Percy, diangkat menjadi Wakil Konsul, dan Lavino diberi posisi yang tidak biasa: "Wakil Pemerintah India Belanda untuk Urusan Aceh" di Penang.[60] Dalam praktik Lavino sudah menjalankan semua urusan konsulat di Penang kecuali urusan keuangan dan perdagangan, dan berkantor di salah satu ruang di gedung kantor perusahaan Padday. Tetapi kebijakan Belanda sangat ketat, dia dilarang bertindak atas nama Konsul bila Konsul tidak ada, terutama dalam kaitan dengan pejabat-pejabat Inggris.[61]

Dalam kenyataan Percy Padday tampaknya, lebih lagi daripada kakak-kakaknya, di atas segalanya adalah seorang pedagang Penang, bagi dia urusan

konsulat adalah urusan belakangan. Kemampuan Lavino yang luar biasa membuat wakil konsul tidak terlalu diperlukan, terutama setelah April 1874 ketika kerani tambahan penuh waktu, T. de Lima, diusulkan untuk konsulat Penang oleh pemerintah kolonial di Batavia untuk membantu dengan pekerjaan di situ.[62] Namun Percy Padday tetap pemegang kekuasaan tertinggi, dan sering menimbulkan amarah pejabat Belanda karena cara-cara dia menggunakan kekuasaan itu dalam kaitan dengan pelaksanaan blokade atas Aceh. Kadang-kadang persoalannya menyangkut sikapnya yang lunak mengenai pengapalan bahan-bahan "strategis" ke Aceh; kadang-kadang mengenai sikapnya yang kurang menunjukkan penghormatan kepada *pejabat-pejabat* militer yang berkunjung. Setelah satu dari konflik-konflik semacam itu pada Juli 1874, disepakati bahwa Lavino harus memberikan paraf atas semua surat izin yang diterbitkan Padday untuk kapal-kapal dengan tujuan Aceh, dan atas surat menyurat konsulat yang bertalian dengan Aceh.[63] Setelah beberapa perubahan cara kerja antara kakak beradik Padday, yang tidak semuanya memuaskan Read, sebuah keputusan raja pada 1877 mengangkat Read menjadi Konsul Jenderal untuk Straits Settlements (bukan untuk Singapura seperti sebelumnya), sehingga ia memiliki wewenang atas konsulat Penang dan dapat memastikan bahwa kakak beradik Padday tetap berperan sebagai tidak lebih daripada sebuah lambang antara dia dan Lavino. Pada 1879 Lavino akhirnya diangkat menjadi Wakil Konsul, dan pada February 1881 menjadi Konsul.[64] Pengabdian kakak beradik Padday yang penuh masalah akhirnya berakhir.

Bagian intelijen yang dikembangkan oleh konsulat pada 1873 akhirnya menjadi bagian tetap tugas konsulat—barangkali paling tidak sampai sebagian besar tugasnya diambil alih oleh konsulat Indonesia pada 1950. Pada Maret 1874 sehari sebelum ia berangkat, dari sekian banyak keberangkatannya, Read mengatakan bahwa bagian intelijen perlu dipertahankan "sampai terwujud perdamaian dengan Aceh, dan pengapalan senjata dan amunisi perlu diawasi dan juga perlu diamati bagaimana perasaan penduduk di sini". Ia selanjutnya menyarankan agar dikirim seorang "penduduk asli yang cerdas dan setia" ke Singapura dari Batavia untuk mengepalai jaringan mata-mata, "karena sulit mencari orang Eropa yang benar-benar dapat dipercaya di sini".[65] Sampai seberapa jauh jangkauan "secret service" (dinas rahasia) ini tercermin dalam catatan-catatan konsulat 1880-an, ketika Lavino mencatat pengeluaran bulanan konsulat di Penang. Pengeluaran cenderung naik, dari rata-rata 47 dollar Straits sebulan pada 1882 menjadi $185 sebulan pada 1888-9.[66] Pada waktu ini pengeluaran Singapura barangkali lebih besar, karena Singapura berperan sebagai

pusat komunikasi bagi seluruh India Belanda, tidak saja bagi Aceh. Uang yang cukup disediakan untuk membayar gaji tetap sejumlah orang Indonesia yang dipekerjakan sebagai mata-mata di setiap kota dan imbalan sebesar beberapa dollar diberikan untuk informasi tertentu yang berguna. Mereka yang diketahui bekerja di konsulat Belanda tampaknya kadang-kadang mendapat penghasilan tambahan dari sumber lain, yakni memeras korbannya. Ahli Islam ternama berkebangsaan Belanda Snouck Hurgronje pada 1895 mengeluh bahwa mata-mata Belanda bahkan meminta "gifts" (hadiah) dari jemaah haji yang jelas tidak bersalah dan dari orang Arab yang sedang dalam perjalanan lewat Singapura, dengan ancaman mereka akan diadukan ke konsulat.[67]

Pada 1893 Wakil Konsul Penang, membela informasi berkala mengenai Aceh yang diserahkannya dari keluhan bahwa informasinya banyak berisi kesalahan, menjelaskan bahwa laporan-laporan itu berasal dari "mata-mata yang bekerja untuk konsulat, yang setiap hari mengadakan kontak dengan orang Aceh yang tiba di sini yang membawa berita-berita terakhir dari Aceh", dan juga dari orang Aceh yang datang ke konsulat atas kemauan sendiri dan sejumlah pedagang Penang.[68] Di Singapura Konsul Jenderal menguraikan peranan "secret service" yang luas dan semakin banyak pada 1893 sebagai berikut:

> Pekerjaan itu sebagian besar terdiri dari pembicaraan panjang lebar terutama dengan informan orang asli dan orang Cina dan mata-mata, mengenai gerakan dan kegiatan orang Arab, dan orang-orang yang diusir dari India Belanda atau ditetapkan berbahaya; mengenai penyelundupan barang-barang larangan untuk perang dan candu; sedang Singapura merupakan sarang berbagai persekongkolan dan penguasa India Belanda perlu tahu mengenai persekongkolan-perseknγkolan ini.[69]

Sebuah permohonan meminta tenaga tambahan pada 1888 menambahkan satu lagi kegiatan ke dalam pekerjaan konsulat, yakni melacak gerak gerik perkumpulan-perkumpulan rahasia Cina, yang berpangkalan di Singapura tetapi juga aktif di wilayah milik Belanda seperti Bangka, Riau, Sumatra Timur dan Borneo Barat.[70]

Kadang-kadang tuduhan-tuduhan mengenai persekongkolan besar di bawa ke konsulat. Satu tuduhan semacam itu yaitu persekongkolan yang melibatkan dua Imam berkedudukan tinggi dari Mekkah, dan dua bekas perwira militer Turki, yang mengakibatkan, atas dasar surat-surat dan gerak gerik mereka antara Singapura dan Palembang, 30 orang ditangkap pada 1881, yang

dilaporkan bersekongkol untuk membunuh semua orang Eropa di Palembang. Read sesuai dengan karakternya sangat khawatir mengenai semua ini, dan mencoba menyalahkan dua musuh lamanya, (sekarang Sultan) Abubakar dari Johor dan Muhammad Alsagoff dari Singapura.[71] Pada 1883 beberapa orang Jerman yang dipekerjakan di Malaya, Cramer, Schmitz, dan Forker, mencoba memeras Konsul di Penang sebesar $50.000 untuk informasi yang kata mereka mereka peroleh di pacuan kuda Penang. Kata mereka ada persekongkolan yang melibatkan orang Eropa dan orang Aceh untuk mendapat bahan peledak dari Bangkok dan menggunakannya untuk meledakkan benteng-benteng Belanda di Aceh. Setelah beberapa bulan membuat heboh, hal ini akhirnya dianggap tidak ada karena dinilai tak lebih daripada sebuah penipuan.[72]

Read Dipecat dari Konsulat

Kejutan dramatis Read, mengungkapkan kegiatan-kegiatan Panglima Tibang dan Arifin sehingga dengan demikian ada alasan untuk melancarkan invasi atas Aceh, menempatkannya pada status unik dalam mata para pejabat di Batavia selama bertahun-tahun setelah itu. Ekspansi besar dan kepekaan kepentingan-kepentingan Belanda di koloni Inggris itu dari 1873 membutuhkan seorang profesional Belanda penuh waktu, tetapi tidak seorangpun berani menyarankan untuk mengganti Read selama entusiasme untuk perang tetap tinggi. Ia dalam pandangan Belanda tampak sebagai pendukung raksasa kepentingan-kepentingan Belanda di samudra permusuhan Inggris dan persekongkolan asing. Mempersoalkan peranannya sama dengan mempersoalkan perang itu sendiri—yang baru terjadi menjelang akhir 1870-an tetapi hanya dalam lapisan-lapisan tinggi pemerintah kolonial.

Masalah pungutan untuk visa jemaah haji di Mekkah melahirkan persoalan gaji bagi Konsul. Seperti dikatakan di atas, pada 1875 keharusan jemaah haji memiliki visa Belanda di pelabuhan mana saja yang memiliki Konsul dihentikan. Read mengatakan pada Maret 1876 bahwa tanpa pungutan ini penghasilannya tidak cukup, dan tidak ada langkah diambil untuk memberi tahu jemaah haji bahwa visa tidak lagi diperlukan. Pers tampaknya mengangkat praktik ini ke permukaan pada 1880, dan Konsul Belanda di Jeddah memaksa The Hague menyelesaikan masalah itu.[73] Ketika usul agar Konsul diberi gaji disampaikan ke Batavia, Gubernur Jenderal mengulangi peryataannya bahwa ia puas dengan cara-cara Konsulat Jenderal dijalankan selama ini. Meski dia orang Inggris, Read tidak segan bertindak untuk kepentingan Belanda,

terutama selama perang Aceh, dan biasanya dengan hasil yang baik. Penting sekali untuk memiliki orang yang tepat di Singapura, karena ini adalah "pusat pergerakan-pergerakan yang timbul di Sumatra—ya, di bagian-bagian lain India Belanda—tempat upaya-upaya perlawanan yang kita hadapi didukung dengan kata-kata dan perbuatan". Gubernur Jenderal 's-Jacob karena itu tidak ingin ada perubahan yang dapat menghilangkan pekerjaan Read. Karena Konsul Jenderal telah menyebutkan ketika ia berkunjung ke Belanda pada 1881 bahwa ia tidak keberatan diberi gaji, daripada memungut biaya dari jemaah *haji,* maka penghalang utama untuk mempertahankannya tidak ada lagi. Batavia karena itu mencoba menjadikan Read Konsul Belanda bergaji.[74]

Kementerian-kementerian di The Hague tidak terlalu gembira dengan pendekatan ini. Posisi Wakil Konsul sudah beberapa lama menjadi masalah, karena S.J. Maier, orang Belanda yang menjadi asisten Read, mengundurkan diri dari jabatan itu pada 1878. Setelah itu jabatan itu tetap kosong, dan pedagang Belanda Hooglandt kembali mencoba untuk memperoleh jabatan itu untuk dirinya ketika sedang cuti di Belanda pada 1879. Meski Kementerian-kementerian di The Hague tampak mendukung, mungkin karena dapat menerima pandangan Hooglandt yang meragukan kesetiaan Read kepada kepentingan Belanda, masalah ini dikembalikan kepada Read untuk diputuskan. Ia tentu saja menolak untuk bekerja sama dengan orang yang berpotensi menjadi pesaingnya.[75] Ia kemudian mencoba mengusulkan keponakannya (dan calon penggantinya di perusahaan), R. Barclay Read, sebagai Wakil Konsul.[76] Usul Read ini tidak mengurangi rasa tidak sabar Kementerian Luar Negeri yang semakin memuncak dalam kaitan dengan kedudukan Read yang ganjil itu.

Menjelang akhir 1882 diadakan persiapan untuk pengangkatan Read sebagai Konsul bergaji tetap. Menteri Luar Negeri Rochussen menyelidiki hal-hal yang berkaitan dengan konflik kepentingan Konsul itu. Jawaban dari Loudon ialah meski A.L. Johnston sebuah perusahaan yang sangat kokoh dan terhormat, kegiatan dagangnya sudah sangat menurun, sehingga kegiatan di konsulat Belanda sekarang menjadi kegiatan utama baginya. Namun perusahaan itu masih tetap berperan sebagai penghubung di Singapura untuk Pemerintah Sarawak dan British North Borneo Company dan juga untuk sejumlah bank dan perusahaan lain.[77] Meski Belanda sudah berdamai dengan Rajah Brooke di Sarawak, namun hubungan A.L. Johnson dengan British North Borneo Company menjadi masalah bagi Rochussen. Perusahaan ini pada waktu itu baru saja mengajukan klaimnya atas wilayah sudut utara Borneo, dan The Hague sangat curiga atas kegiatan-kegiatannya, terutama di pantai timur karena di situ

klaimnya tumpah tindih dengan klaim Belanda. Read harus diberhentikan, kata Rochussen, dan diganti dengan seorang profesional Belanda. Ketika Gubernur Jenderal menyatakan keberatan bahwa peranan Read di perusahaan itu tidak penting, sedangkan kegiatannya di Singapura penting, Rochussen bersikap lebih tegas. Tidak ada orang asing yang tepat untuk mewakili kepentingan negeri lain, katanya, dan jika ia mengaku ia orang yang tepat ini membuktikan bahwa ia bukan orang yang tepat. Namun suara-suara pro-Read menang, sehingga tidak ada keputusan apapun sampai Read meninggalkan Singapura untuk cuti pada Maret 1883.[78]

Pada Juli 1883 W. H. Read berkunjung ke The Hague. Dia diberitahu Menteri Luar Negeri bahwa tenaganya sebagai Konsul tidak diperlukan lagi karena seorang Konsul karir akan segera diangkat. Ini rupanya sebuah pukulan mematikan baginya—yang menunjukkan bahwa konsulat jenderal tinggal satu-satunya penyaluran bagi naluri politik seorang anak manusia yang sekarang sudah berusia 60-an tahun. Setibanya kembali di London, Read menulis sepucuk surat yang getir dalam bahasa Prancis, mengungkapkan perasaannya bahwa ia berhak mendapat penghargaan yang lebih banyak dari Pemerintah Belanda. Bahkan sekalipun pengunduran dirinya sekarang disertai oleh lebih banyak lagi penghargaan [ini jelas tidak ada sama sekali dalam benak pemerintah Belanda], “elle n’en resterait pas moins une disgrace, car elle dénoterait de la maniere la plus évidente, un manque de confiance qui porterait atteinte à mon honneur”. Dikatakannya, “mengingat sifat suku-suku bangsa timur” kehilangan muka dapat dihindari hanya jika ia kembali ke Singapura sebagai Konsul Jenderal untuk menyelesaikan urusan-urusannya, dan kemudian menyerahkan surat pengunduran diri sebelum berangkat, ini akan memberi waktu untuk mencari pengganti.[79]

Sangat terkejut oleh serangan ini, dan menyadari bahwa Read memiliki banyak pendukung di Batavia, Menteri itu mengalah. Seorang “Konsul magang” ditempatkan di Singapura, yakni seorang pejabat kolonial bernama J.A. de Vicq, tetapi baru pada Desember 1884 ada keputusan kerajaan untuk memberhentikan Read dengan hormat atas permintaan sendiri, “dengan ucapan terima kasih atas jasa-jasa yang telah diberikannya kepada negeri ini”. Keputusan yang sama memindahkan Lavino dari Penang ke Singapura sebagai Konsul Jenderal, memindahkan J.A. Kruyt dari Jeddah ke Penang sebagai Konsul Jenderal, dan mengangkat De Vicq sebagai penggantinya di Jeddah.[80] Pada waktu bersamaan seorang “Konsul magang” tambahan, H. van de Houven van Cordt, dibebaskan dari tugas birokrasi kolonial dan ditempatkan di Straits Settlements. Pejabat

penuh waktu yang lain di Straits adalah J.J.M. Fleury, seorang muda Prancis kelahiran Straits Settlements yang fasih berbahasa Belanda, Inggris dan Melayu. Lavino menariknya ke Konsulat Jenderal di Penang sebagai Sekretaris sejak 1879, dan membawanya bersama dia ketika ia pindah ke Singapura untuk menduduki jabatan yang sama di situ.[81]

Pada dasarnya, ketiga-tiga konsulat ini, di Singapura, Penang dan Jeddah, menjadi bagian dari korps konsuler Belanda yang lebih bertanggung jawab kepada Batavia daripada kepada The Hague, dan khususnya diisi dengan orang-orang dari kalangan pejabat pemerintah kolonial. Setelah hampir 30 tahun dalam tangan seorang Inggris yang tangkas dan pantang menerima pendapat orang lain, konsulat Singapura hadir sebagai sosok yang lebih profesional dan berhati-hati.

12

Pendudukan Jepang dan Kelompok-Kelompok Elite Sumatra yang Saling Bersaing[1]

Ada kontras yang menimbulkan pertanyaan antara suasana tenang yang dangkal pada tahun 1930-an di Indonesia dengan kemelut pada periode pasca-perang. Selain daripada ledakan besar semangat anti-penjajahan, tahun-tahun setelah Jepang menyerah juga ditandai oleh meningkatnya konflik di antara rakyat Indonesia sendiri, saat masyarakat harus menyesuaikan diri kepada keadaan yang sudah berubah secara radikal sesudah kemerdekaan. Di negeri-negeri lain yang juga diduduki Jepang, terutama di Burma dan Malaya, ketegangan antar-suku bangsa juga mencuat pada masa pasca-perang. Karena itu wajar jika diajukan pertanyaan, seperti dilakukan Elsbree—pelopor dalam hal ini—dalam tulisannya pada 1973:

> Apakah pendudukan [Jepang], yang merombak ikatan-ikatan yang sudah ada, semakin memperparah perpecahan yang terjadi pada zaman Orde Lama? . . . Apakah Jepang sengaja menjalankan taktik *divide and rule*, dan apakah ini penyebab dari perseteruan dengan kekerasan dan meningkatnya ketegangan antar-suku sejak perang berakhir?[2]

Kesimpulan Elsbree sendiri tegas-tegas menolak hal di atas. Menurut pendapatnya, kebijakan Jepang, dari sisi niat maupun dari sisi kenyataan, cenderung mendorong kepada persatuan.[3] Namun, dalam hal Indonesia, sebagian besar penulis barat tetap bersikeras mengatakan bahwa kebijakan Jepang menyebabkan bertambah besarnya, atau bahkan menciptakan, jurang yang berbahaya antara tiga kelompok elite yang saling bersaing: nasionalis sekuler; pemimpin Islam; dan *pamong praja* (kaum bangsawan dalam peralihan menjadi sebuah birokrasi). Dan ini sering dikatakan akibat dari taktik *divide*-

et-impera yang dijalankan Jepang: Jepang mendukung kelompok-kelompok tandingan untuk mengimbangi kelompok-kelompok elite yang dapat menjelma menjadi kepemimpinan tunggal Indonesia yang kokoh dan berbahaya.[4]

Bahwa gambaran ini umumnya sudah jauh merasuk ke dalam tulisan-tulisan mengenai pendudukan Jepang adalah akibat langsung dari tulisan-tulisan dua cendekiawan terkemuka: A.J. Piekaar dan Harry J. Benda. Piekaar, yang pernah menjabat sebagai sekretaris Residen Belanda yang terakhir di Aceh, menulis sebuah monograf pada 1949 mengenai pendudukan Jepang di Indonesia, sebuah monograf yang tidak ada tandingannya hingga kini dari sisi pemahaman yang sangat rinci mengenai suatu daerah tertentu, Aceh.[5] Sejak Aceh mengalami krisis yang luar biasa pada masa pasca perang—pembantaian *ulèëbalang* (102 penguasa turun temurun yang digunakan Belanda untuk memerintah Aceh) oleh koalisi kekuatan-kekuatan di bawah pimpinan kelompok Islam[6]—tidak mengherankan jika Piekaar menuding Jepang sebagai pihak yang bertanggung jawab atas terjadinya konfrontasi ini. Buku Benda, yang juga tidak ada duanya, mengenai pendudukan Jawa lebih besar lagi pengaruhnya. Didasarkan pada tesisnya mengenai kebijakan Jepang mengenai Islam, buku itu mengambil sebagai tema utama cara-cara yang dijalankan Jepang untuk membentuk kelompok Islam Indonesia menjadi kekuatan politik yang kokoh dan dalam jangka panjang sebagai pesaing kelompok nasionalis sekuler dalam perebutan kekuasaan.[7] Seperti tulisan-tulisan para cendekiawan tahun 1950-an, Benda juga menekankan adanya pemikiran ke depan dan perencanaan di pihak Jepang untuk memupuk kekuatan kelompok Islam, dan "kebijakan *divide-et-impera* yang gigih"; semua ini dilihatnya sebagai faktor pendorong hubungan Jepang dengan ketiga kelompok elite itu.[8]

Saatnya sudah tiba sekarang untuk membalikkan pandangan akademisi barat ini ke pandangan yang lebih mendekati pandangan Elsbree. Baik dokumen-dokumen Jepang, yang semakin banyak dapat diperoleh dalam bahasa Inggris, berkat jerih payah Benda sendiri[9], maupun ingatan tokoh-tokoh terkemuka Jepang dan Indonesia, tidak ada yang mengatakan bahwa Jepang pernah merasa terancam oleh salah satu dari ketiga kelompok elite itu. Bagi Jepang, dibandingkan dengan bagi Belanda, mempertahankan situasi aman dan tenteram yang dangkal dalam masyarakat menduduki prioritas yang jauh lebih rendah. Asas dasar tata administrasi Jepang adalah mempertahankan unsur-unsur utama tata pemerintahan Belanda, termasuk *pamong-praja*.[10] Adanya perbedaan antara Jepang dengan Belanda dalam praktek—Jepang juga menjalin hubungan dengan kelompok Islam dan kelompok nasionalis—bukan karena

Jepang ingin menciptakan keseimbangan tetapi karena kegunaan kelompok Islam dan kelompok nasionalis, dalam arti kedua kelompok ini dapat dimanfaatkan untuk mengerahkan rakyat Indonesia, apakah itu sebagai tenaga kerja, calon prajurit, dan sebagai massa rakyat untuk menyerukan slogan-slogan anti-Sekutu, atau untuk pembentukan sebuah pemerintahan yang, di atas kertas, bila saatnya tiba. Suatu hal yang benar-benar baru dan patut dipuji yang dilakukan Jepang dalam bidang administrasi adalah dimasukkannya ke dalam tata administrasi semua sumber daya kepemimpinan yang ada ke dalam berbagai badan administrasi, penasihat, dan propaganda, yang mengharuskan mereka semua, sampai batas tertentu, untuk bekerja sama.

Jika kita telaah dampak semua kebijakan ini pada masyarakat Indonesia, akan tampak jelas adanya kecenderungan ke arah persatuan. Di bawah Belanda, hubungan sosial antara ketiga kelompok yang terpisah satu sama lain itu tidak ada, atau tegang. Di bawah kekuasaan Jepang, ketiga kelompok itu tidak saja harus bekerja sama dalam *Syu Saragi Kai* (dewan karesidenan), *Jawa Hokokai,* dan badan-badan serupa itu; mereka ternyata juga berbagi rasa, sama-sama dihadapkan pada pahit getir yang sangat serupa. Ketiga kelompok elite itu menjadi kelompok pemilik hak istimewa, dari sisi kemudahan untuk bepergian, mendapat informasi dan berbagai manfaat langka yang mereka peroleh karena keanggotaan mereka dalam badan-badan tersebut. Mereka membayar harga yang sama karena harus menjadi penengah antara tuntutan-tuntutan berat dari kekuasaan pendudukan dengan kemelaratan rakyat yang semakin menjadi-jadi. Kekalahan Jepang menjadi satu lagi sumber solidaritas ketika tiba saatnya mereka harus menjelaskan arti "collaboration", kerjasama, kepada Sekutu. Tulisan-tulisan lebih baru mengenai revolusi yang meletus begitu Jepang menyerah mengemukakan bahwa solidaritas yang terbentuk di antara para pemimpin Indonesia-lah yang perlu dijelaskan, bukan perpecahan di antara mereka.[11] Perpecahan paling nyata yang terjadi pada tahun pertama revolusi adalah perpecahan yang memisahkan seluruh elite—nasionalis, Islam, dan pamong praja—dengan mayoritas rakyat Indonesia. Kemarahan rakyat atas penderitaan selama masa perang mendapatkan juru bicaranya bukan dari kalangan "counter-elite", elite tandingan, keagamaan atau politik tetapi dari kalangan *pemuda,* yang masih terlalu muda untuk memikul tanggung jawab apapun di bawah Jepang, dan sampai batas tertentu dari kalangan para pemimpin yang lebih tua yang memilih untuk tidak bekerja sama dengan Jepang. Meskipun persaingan ideologi dan antar-pribadi bukan tidak ada dalam kerusuhan-kerusuhan yang disebut sebagai ciri *daulat* zaman atau "revolusi sosial" 1945-6, kebencian yang

tak ada duanya kepada seluruh *pemimpin* di bawah Jepang[12] dapat menjelaskan dengan lebih memuaskan gejala ini [*pemuda* sebagai juru bicara rakyat]. Kecuali ketika mereka ditumbangkan oleh aksi tertentu oleh *pemuda/*rakyat, pemimpin setempat dan nasional yang memegang kekuasaan pada waktu Jepang menyerah pada umumnya berhasil mempertahankan dukungan dari kelompok elite yang lebih tua melalui revolusi sebelumnya.[13]

Bab ini bukan tempatnya untuk membahas secara rinci dampak persatuan yang ditimbulkan kebijakan-kebijakan Jepang di Jawa, terutama karena sejumlah tulisan yang membahas hal ini sudah terbit.[14] Karena itu, di sini saya hanya akan membahas situasi di Sumatra utara, karena di situ bukti-bukti yang bertolak belakang dengan kesimpulan di atas tampaknya, sepintas lalu, jauh lebih kuat. Baik di Aceh maupun di Jawa, para penguasa yang memerintah diri sendiri (setara dengan *pamong praja* di Jawa) direnggutkan semuanya dari kursi kekuasaan dalam waktu tujuh bulan sejak Jepang menyerah, dalam sebuah "revolusi sosial" dengan kekerasan. Meskipun, seperti halnya di Jawa, kebencian *pemuda*/rakyat jelas memainkan peranan utama, namun tidak diragukan lagi bahwa pada masa sebelum perang pihak pengecam penguasa sudah memiliki pimpinan—pimpinan Islam oleh PUSA di Aceh, dan pimpinan oleh kelompok nasionalis sayap kiri di Sumatra Timur. Tulisan mengenai latar belakang semua peristiwa ini boleh dikatakan tidak ada, kecuali tulisan tak tertandingi karya Piekaar mengenai Aceh. Karena itu tidak mengherankan jika kesimpulan Piekaar mengenai dampak kekuasaan Jepang atas persaingan antar-elite di Aceh belum pernah disanggah:

> Bahwa . . . penyebab konflik antara *ulèëbalang* dan ulama diselesaikan dengan kekerasan setelah Jepang menyerah pada dasarnya harus diletakkan pada kebijakan *divide-et-impera* yang dijalankan Jepang, menurut pendapat penulis tidak dapat diragukan lagi. Kebijakan menjaga keseimbangan yang dijalankan Jepang mempertinggi ketegangan di antara kedua kelompok itu, yang masih bersifat laten di bawah pemerintahan kita [Belanda], sehingga sebuah ledakan tidak lama kemudian tampaknya tidak dapat dielakkan dengan disingkirkannya pemerintahan yang "netral" (i.e. bukan-Aceh).[15]

Kelemahan utama kesimpulan ini ialah tidak memperhitungkan berbagai pergolakan yang terjadi di Aceh dan Sumatra Timur pada 1942, yang tampaknya disebabkan oleh kebijakan Belanda yang berat sebelah, bukan oleh kebijakan keseimbangan Jepang. Meski pada 1942 pemerintahan "netral" hanya diubah,

tidak disingkirkan, intensitas konflik tidak dapat dijadikan dasar untuk mengatakan bahwa Aceh atau Sumatra Timur lebih siap untuk kemerdekaan daripada pada 1945. Pada 1942 sudah ada tuntutan-tuntutan yang riuh rendah bagi perombakan menyeluruh perimbangan kekuasaan pemerintahan di Sumatra utara. Konflik-konflik yang timbul pada masa perang di wilayah ini dapat sebenarnya dijelaskan dengan lebih baik oleh upaya kelompok-kelompok elite yang saling bersaing untuk memanipulasi Jepang, bukan oleh manipulasi rakyat Indonesia oleh Jepang.

Peranan penting yang dimainkan pergolakan-pergolakan pada 1942 di Sumatra utara pada umumnya tidak mendapat perhatian yang seharusnya diperolehnya, meski cukup banyak tersedia tulisan dari sumber-sumber Jepang dan Indonesia mengenai pergolakan-pergolakan itu. Selebihnya dari bab ini karena itu akan mencoba memilah-milah dinamika putaran pertama pergolakan memperebutkan kendali kekuasaan di Sumatra utara itu.

Menghubungi Jepang

Sumatra Utara, karena terletak dekat Malaya dan Samudra India, terbuka lebar, sepanjang sejarah, pada pengaruh-pengaruh "asing" tanpa disaring melalui pusat politik dan budaya di Jawa. Sejak didirikan pada 1786, pelabuhan Inggris di Penang merupakan fokus perdagangan dan perhubungan untuk seluruh wilayah itu. Pada 19 Desember 1941, Penang jatuh ke tangan Jepang. Hampir tiga bulan berlalu sebelum serdadu Jepang menyeberangi Selat Malaka menuju Sumatra. Selama tiga bulan itu, propaganda Jepang disiarkan setiap hari melalui radio dari Penang, biasanya oleh orang-orang Sumatra yang tinggal di kota itu;[16] dan kesempatan terbuka untuk mengadakan kontak.

Secara spontan sejumlah orang Aceh, sendiri-sendiri, meraih kesempatan itu, dan ini juga akibat dari "Japanese illusions" (demikian Belanda menyebutnya) yang sudah sejak dulu berpengaruh di Aceh.[17] Selama perang Aceh yang panjang melawan Belanda, perlawanan didorong oleh desas-desus adanya dukungan dari Turki, Perancis, Amerika Serikat, atau Inggris—umumnya dihembuskan oleh agen-agen negara-negara ini di Penang dan Singapura yang bersimpati kepada Aceh.[18] Setelah Sultan Aceh pada akhirnya menyerah pada 1903, ia masih cukup bersemangat, karena diilhami oleh kemenangan Jepang melawan Rusia dua tahun kemudian, untuk menghubungi Konsul Jepang di Singapura. Perlawanan Aceh yang muncul kembali pada 1907 tidak pelak lagi didorong oleh harapan yang ditimbulkan kemenangan Jepang itu. Pada

1930-an kelompok-kelompok Marxis dan nasionalis berpendidikan barat yang memimpin sebagian besar partai-partai Indonesia di Jawa menolak bermain mata dengan Jepang atas nama "front bersama penentang fasisme"; tetapi paham semacam ini sama sekali tidak menghalangi kelompok-kelompok utama di Sumatra utara [untuk berhubungan dengan Jepang].

Kesempatan untuk menghubungi Jepang terbuka pada awal 1942, tetapi siapa yang akan menggunakannya? Kelompok-kelompok mana dalam masyarakat Sumatra utara yang akan mencoba memastikan mendapat posisi terdepan sebagai kelompok yang Jepang? Di sinilah persaingan antar-elite menjadi penting. Integrasi sosial ke dalam orde kolonial di daerah-daerah ini sama sekali tidak dalam jika dibandingkan dengan di Jawa. Meskipun situasi cukup tenteram walau dangkal, rasa yang diciptakan penaklukan oleh Belanda dalam perang Aceh (1873-1903) dan perang Batak (Karo) (1872) masih tetap melekat dalam hati. Di Aceh dan Sumatra Utara ada kekuatan-kekuatan rakyat yang besar yang perlawanannya terhadap lapisan aristokrat yang ditopang oleh Belanda itu lebih mendasar dan absolut daripada persaingan antar-elite politisi perkotaan di Jawa. Di kedua wilayah ini, pada tahun-tahun akhir kekuasaan Belanda, organisasi-organisasi modern sudah bermunculan dengan fokus semata-mata pada dan untuk memimpin perlawanan itu. Fakta sederhana pergantian penguasa kolonial-lah yang menyebabkan ketegangan-ketegangan ini berkembang menjadi bentrokan-bentrokan terbuka yang berbahaya pada 1942, bukan kebijakan-kebijakan tertentu yang dijalankan Jepang.

Organisasi modern pertama gerakan rakyat yang berhasil muncul di Aceh setelah pendudukan militer adalah PUSA (Persatuan Ulama2 Seluruh Aceh). Organisasi ini pada 1939 menghimpun ke mayoritas *ulama* aktif di Aceh dalam program pengembangan sekolah-sekolah agama yang lebih modern dan peningkatan kekuatan Islam Aceh pada umumnya. Namun, pembentukan PUSA terjadi pada waktu peranan *ulèëbalang* sedang mendapat sorotan yang tajam. Pada 1938-9, sebuah gerakan untuk menciptakan persatuan simbolis dan administratif di Aceh melalui pemulihan Kesultanan ditentang keras oleh *ulèëbalang.* Sikap bertahan *ulèëbalang* tampak lebih mencuat karena serangan serempak pers yang mengecam kesewenang-wenangan pemerintahan *ulèëbalang* dan menuntut penyebaran wewenang *ulèëbalang* ke dewan-dewan setempat, penghapusan kerja paksa *(herendienst),* dan pencabutan wewenang kehakiman dari tangan *ulèëbalang.* Meski para *ulama* yang memimpin PUSA sangat berhati-hati menjaga bahwa hanya agama dan pendidikan yang menjadi pokok kegiatan mereka, pada 1940 gerakan itu sudah menciptakan sumber kepemimpinan

yang kuat yang tidak dapat dikendalikan oleh *ulèëbalang*. Gerakan pemudanya khususnya berkutat dengan segala macam aspirasi untuk perubahan.[19]

Di Sumatra Timur tidak ada kesatuan organisasi semacam itu. Di situ semua partai politik "nasional" bersaing dalam suatu jaringan yang sangat kompleks keragaman suku dan ketegangan sosial. Namun, sejak partai Komunis dilarang pada 1926, gerakan nasionalisme sayap kiri telah kokoh berdiri—dari PNI Sukarno (1927) ke PARTINDO (1930) ke GERINDO (1937). Kubu sayap kiri ini, dalam perlawanan militannya terhadap kolonialisme, perkebunan-perkebunan barat di Sumatra Timur, dan raja-raja Melayu dan Simelungun yang menjadi kaya raya melalui konsesi tanah perkebunan-perkebunan itu, jauh lebih radikal dibandingkan dengan para pemimpin partai-partai ini di Jawa. "Front bersama penentang fasisme" yang moderat yang digunakan oleh pimpinan nasional GERINDO sebagai dasar bagi partisipasinya dalam badan-badan resmi tidak begitu dapat diterima oleh cabang Sumatra Timur yang militan. Karena itu pemimpin GERINDO Sumatra Timur, Jacub Siregar, yang menjadi fokus gerakan itu di situ untuk mengontak Jepang. Meski karakter "nasional"nya yang multi-suku sebagian besar membatasi daya tarik GERINDO pada warga kota terdidik, partai itu sudah selama tiga tahun sebelum pendudukan Jepang melibatkan diri dalam sebuah persoalan yang sangat peka. Ini adalah ketegangan antara petani Karo di *dusun* dataran tinggi Kesultanan Deli dengan hirarki Melayu dukungan Belanda di kerajaan itu. Asal usul ketegangan ini dapat ditelusuri pada sikap Belanda pada abad ke-19 yang menerima penjelasan pihak Kesultanan mengenai sengketa tanah, yang merugikan orang Karo; akan tetapi pada 1930-an sikap Belanda itu mencuat dengan tajam kembali dengan timbulnya sengketa-sengketa baru mengenai tanah. Imigran Karo yang datang belakangan mengalami diskriminasi dalam peruntukan tahunan tanah perkebunan untuk tanaman petani, sedangkan semua petani Karo terancam oleh usul-usul baru yang diajukan untuk mengubah seluruh landasan peruntukan tanah itu pembagian itu. Pada 1938, petani Karo di *dusun* Deli membentuk serikat petani sendiri, SETIA (Sarikat Tani Indonesia), dengan bimbingan dari pemimpin GERINDO.[20]

Di pihak Jepang, tanggung jawab pelaksanaan kegiatan-kegiatan kolom kelima di Sumatra, dan juga Malaya dan India, berada dalam tangan *Fujiwara-kikan,* atau *F-kikan* (F-organisasi). Pemimpinnya Mayor Fujiwara Iwaichi, seorang perwira muda yang tidak sempat dipersiapkan dengan baik untuk memikul tugasnya yang sangat berat itu, dan boleh dikatakan tidak memiliki pengetahuan mengenai wilayah Malaya-Indonesia. Namun, sikapnya yang sungguh hangat menyambut uluran tangan kelompok nasionalis pro-Jepang

yang ditugaskan untuk bekerja sama dengan dia di wilayah itu, dan perubahan pandangannya yang cepat ke pandangan kaum nasionalis pro-Jepang bahwa sudah menjadi takdir Jepang untuk berperan sebagai pembebas negara-negara selatan, menyebabkan beberapa orang Jepang membandingkan dia dengan Lawrence of Arabia. *F-kikan* yang dipimpinnya dibentuk dengan sangat tergesa-gesa di Tokyo pada September 1944, terdiri dari lima lulusan baru dari *Nakano-gakk* (sekolah intelijen militer) dan beberapa ahli bahasa. Kelompok kecil itu menyertai invasi Jepang ke Malaya pada Desember 1941 dan menggunakan kelompok nasionalis muda Melayu, *Kesatuan Melayu Muda,* untuk kegiatan sabotase dan intelijen di garis belakang Inggris. Setelah Singapura jatuh, kelompok *F-kikan* itu tersita seluruh waktunya untuk menyelesaikan masalah-masalah yang timbul dalam kaitan dengan Angkatan Darat Nasional India yang dikerahkan Jepang di Malaya.[21]

Selain dari kedua tugas ini, *F-kikan* juga bertanggung jawab untuk menghubungi orang-orang Indonesia yang simpati [kepada Jepang] di Sumatra—sebuah tugas yang maknanya melebihi semua harapan Jepang. Tampaknya bahkan tidak mungkin Fujiwara pernah mendengar tentang Aceh sebelum invasi Malaya mulai. Dalam memoarnya dan dalam sebuah wawancara baru-baru ini, ia menekankan rasa heran orang Jepang melihat entusiasme dan tekad yang ditunjukkan orang Aceh untuk bekerja sama dengan mereka. Semua kontak di Aceh diprakarsai oleh orang Aceh, yang mengembangkan menjadi sebuah pemberontakan besar sesuatu yang dimaksudkan Jepang hanya sebagai sebuah kolom kelima yang sederhana untuk kegiatan intelijen, dan barangkali sabotase.[22]

Menurut seseorang yang kemudian menjadi pemimpin *F-kikan* Aceh, Said Abu Bakar, keputusan untuk mengangkat senjata melawan Belanda begitu Jepang mulai melancarkan serangan sudah diambil secara rahasia dalam konperensi pertama PUSA pada April 1940.[23] Tidak lama setelah konperensi itu, Abu Bakar menjadi guru agama di lingkungan kecil orang Aceh di Yen, Kedah Malaya. Tidak lama setelah Kedah diduduki Jepang pada Desember, ia pergi ke Penang berjalan kaki untuk mencoba mencari orang Jepang yang bersedia mendengarkan rencananya untuk menggunakan PUSA untuk memperlancar invasi Jepang ke Aceh.

Mayor Fujiwara sudah memindahkan markas besarnya lebih jauh ke selatan bersama pasukan yang terus maju, tetapi para asistennya mendesak Abu Bakar agar mengajak sebanyak mungkin orang Sumatra untuk ikut operasi kolom kelima. Ketika Abu Bakar berhasil bertemu dengan Fujiwara di Kuala

Peta 5 Wilayah *ulèëbalang* Aceh pada 1930-an
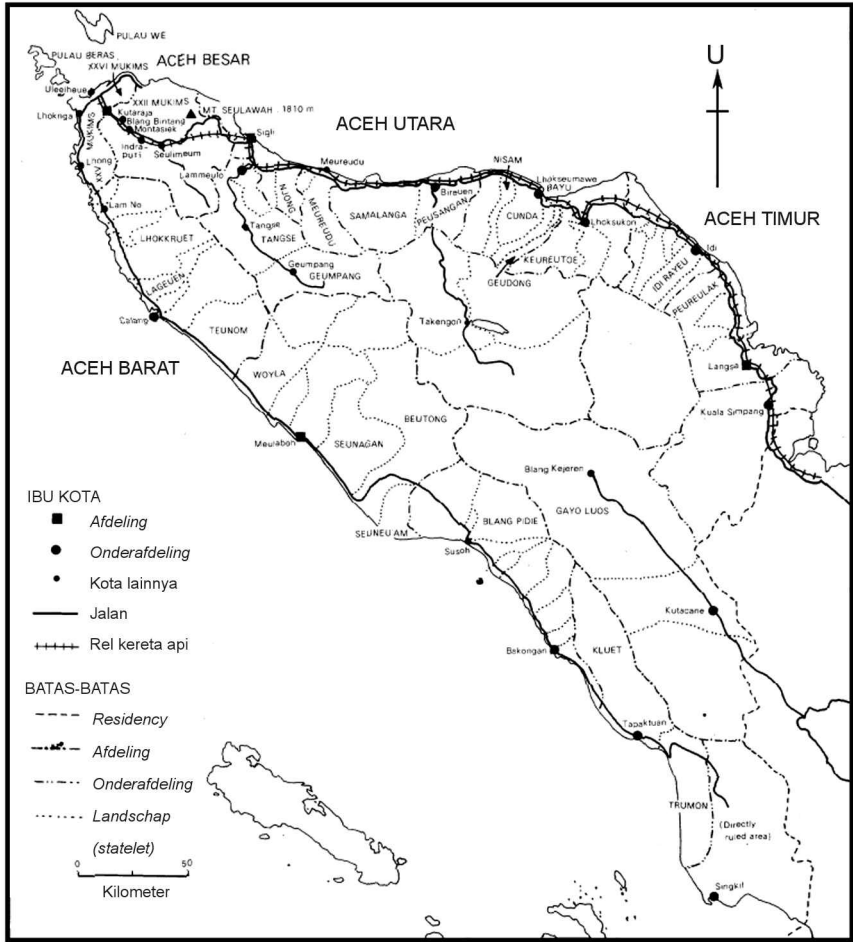
Lumpur pada 14 Januari, ada lima orang Aceh dalam kelompoknya, ditambah lima orang Sumatra Barat dan beberapa dari Inderagiri yang tampaknya telah menghubungi *F-kikan* sendiri-sendiri sebelumnya. Sebuah rumah di kawasan mewah Kenny Hill di Kuala Lumpur disita untuk dijadikan "Indonesia House" untuk mereka. Paling tidak dalam pikiran anggota-anggota muda dalam kelompok itu, dilihat dari memoar salah satu dari mereka, tampaknya telah ada kesangsian jangan-jangan semua itu permainan belaka, sampai sejumlah tanda kekejaman militer Jepang menimbulkan pertanyaan dalam pikiran mereka, apakah mereka pejuang kemerdekaan tanah air atau semata-mata tawanan Jepang.[24]

Apakah ada, seperti diperkirakan Piekaar,[25] sejumlah orang Jepang yang menjanjikan sesuatu kepada PUSA sebagai imbalan bagi dukungannya? Semua bukti menunjukkan bahwa tidak perlu ada janji semacam itu. Buku memoar Fujiwara mencatat penjelasan Said Abu Bakar mengenai situasi di Aceh dalam pertemuan mereka pada 14 Januari seolah-olah ini sesuatu yang baru baginya:

> rakyat Aceh sangat benci kepada Belanda dan *ulèëbalang. Ulèëbalang* adalah orang kepercayaan Belanda dan penindas rakyat, hampir semua orang tidak percaya kepada *ulèëbalang* dan bahkan benci kepada mereka. Rakyat Aceh adalah penganut agama Islam yang sangat taat, sedemikian rupa sehingga atas nama Islam mereka tidak takut perang dan tidak takut mati. Organisasi-organisasi Aceh semuanya berlandaskan Islam. Organisasi yang terbesar adalah PUSA.[26]

Fujiwara dan Said Abu Bakar sepakat, anak buah Abu Bakar harus berusaha menghubungi PUSA untuk memastikan kerjasamanya yang erat dengan Jepang. Orang-orang yang telah dihubungi akan diidentifikasi dengan ban (*armband*) dengan "F" *Fujiwara-kikan;* mereka bertugas merebut hati rakyat Aceh agar mendukung Jepang, melindungi jembatan-jembatan dan instalasi-instalasi vital dari akso bumi hangus Belanda, dan menyediakan perbekalan dan bantuan bagi pasukan Jepang yang masuk.

Tampaknya tidak ada tanda-tanda rakyat Aceh akan berontak melawan Belanda. Fujiwara melihat bahwa orang Aceh—bertolak belakang dengan orang India, yang menimbulkan masalah besar baginya—tidak ada mengajukan tuntutan yang berarti kepada Jepang sebagai imbalan atas kerjasama yang mereka berikan. Yang jelas, tidak ada diskusi mengenai kemerdekaan bagi Aceh atau bagi Indonesia sebagai keseluruhan, karena diskusi semacam ini tegas-tegas dilarang oleh Tokyo. Dalam buku memoarnya, Fujiwara mencatat, hanya ada satu hal yang diminta rakyat Aceh untuk dilakukan Jepang: pasukan Jepang harus "menghormati kesejahteraan dan agama rakyat Aceh".[27] Ia tidak banyak tahu mengenai persaingan PUSA- *ulèëbalang* sehingga tidak dapat mengulas hal itu, tetapi ia tampaknya menambahkan bahwa Jepang tidak akan "memungut pajak yang tinggi seperti dilakukan Belanda".[28] Sepucuk surat (yang jatuh ke tangan Belanda beberapa hari sebelum Jepang mendarat) dari orang-orang Aceh pendukung *F-kikan* menyerukan pemberontakan dalam bahasa yang lebih luas: "Bebas dari pajak dan *herendiensten* [kerja paksa untuk kaum bangsawan] sudah dijanjikan oleh Jepang."[29] Karena *herendienst* dan pajak dikenakan melalui *ulèëbalang,* maka ada kemungkinan jaminan-jaminan yang lemah dan

kabur yang diberikan Fujiwara diterjemahkan dengan cepat oleh aktivis PUSA ke dalam bahasa tuntutan-tuntutan mereka sendiri bagi perubahan.

Pemberontakan di Aceh

Tidak sabar lagi untuk segera memulai tugasnya, Said Abu Bakar berlayar menuju pantai Sumatra beberapa hari kemudian, dengan sebuah perahu motor yang mengibarkan bendera Inggris. Selama paruh kedua Januari, tampaknya ada tiga atau empat kapal penuh aktivis *F-kikan* semacam itu yang dikirim dari pantai Selangor, setiap perahu berisi sekitar enam orang–sebagian orang Aceh, tetapi juga ada beberapa orang Minangkabau, Batak, dan lain-lain. Semuanya tampaknya tertangkap oleh Belanda dan dimasukkan ke dalam penjara di Medan. Mereka bersikeras dengan sangat meyakinkan bahwa mereka "pengungsi" dari pertempuran di Malaya sehingga sebagian besar dari mereka dibebaskan Belanda pada Februari dan dikirim ke kampung mereka masing-masing. Orang yang terpenting di antara mereka, Said Abu Bakar, dibebaskan di Aceh pada 13 Februari, setelah menghubungi rekan-rekannya di PUSA dari penjara dan menggunakan jaminan dari beberapa orang Aceh paling terkemuka dalam pemerintahan untuk membuktikan bahwa ia dapat dipercaya.[30]

Abu Bakar segera pergi ke Seulimeum, sekitar 32 kilometer di hulu Kutaraja (Banda Aceh). Sebelumnya ia telah menjalin kerjasama di situ dengan sebuah sekolah Islam "modern" terkenal, *Perguruan Islam,* yang dikepalai oleh Teungku Abdul Wahab. Demikian entusiasnya pandangannya diterima di situ sehingga sebuah pemberontakan besar pecah di Seulimeum pada 19 Februari, dengan gelombang sabotase yang terus membesar atas telepon, telegraf, dan jalan kereta api. Puncaknya terjadi pada malam 23 Februari, setelah terjadi sebuah demonstrasi Islam yang panas di sekolah agama itu. Pejabat Belanda setempat *(controleur),* Tiggelman, terbunuh; 5.000 guilder disita dari kantor pos; dan esok harinya direktur setempat kereta api Aceh, Graaf von Sperling, terbunuh ketika sedang melakukan inspeksi jalan kereta api dekat Keumiroë.[31]

Inspirasi dan kepemimpinan pemberontakan Seulimeum ini berada dalam tangan Teungku Abdul Wahab dan beberapa *ulama* terkemuka Seulimeum, yang sebagian besar bersangkut paut dengan PUSA. Namun pemberontakan itu dapat mencapai hasil yang demikian besar, jauh sebelum perlawanan meluas di Aceh, karena *ulèëbalang* paling terkemuka daerah itu, Panglima Polim Muhammad Ali[32] yang masih muda, ikut ambil bagian sepenuhnya di dalamnya. Ia dan beberapa *ulèëbalang* yang lain dari Seulimeum bergerak di

bawah tanah pada malam serangan itu dilancarkan. Apa yang dikatakan Piekaar mungkin benar[33] bahwa inilah sebabnya mengapa pemberontakan itu mulai di sini, sedangkan Pidie—benteng PUSA dan pusat ketegangan *ulèëbalang-PUSA*—tetap tenang sampai malam invasi Jepang. Para pemimpin PUSA tidak cukup kuat untuk menghadapi *ulèëbalang* dan Belanda.

Ketika pasukan tambahan Belanda berhasil memulihkan kembali kontrol atas Seulimeum yang goyah dan tidak ada pasukan Jepang yang muncul, aksi sabotase berhenti—yang menimbulkan tanda tanya. Namun, *ulèëbalang* di tempat-tempat lain di Aceh, semakin sadar mengenai bahaya terperangkap di antara sekutunya orang Belanda dengan pemberontakan rakyat yang semakin meluas, sebelum Jepang dapat menghentikannya. Teuku Muda Beuni, putra tertua penguasa Blang Glumpang (Lho'Sukon, Aceh timur laut), mengirimkan saudara laki-lakinya Teuku Alibasjah ke Penang dengan sebuah kapal kecil pada 13 Februari.[34] Para *ulèëbalang* yang lain tampaknya juga telah mengirim utusan-utusan masing-masing pada waktu hampir bersamaan,[35] untuk memastikan bahwa PUSA dan kekuatan-kekuatan anti- *ulèëbalang* yang lain tidak memonopoli dukungan Jepang. Tugas Teuku Alibasjah berhasil baik, sambil menyertai pasukan Jepang yang melakukan invasi di Aceh Besar (wilayah Kutaraja) ia berhasil memastikan bahwa Jepang, paling tidak di wilayah itu, menjalin hubungan dengan *ulèëbalang*. Namun, semakin banyak kapal utusan yang tiba di Penang dari para pemimpin PUSA di berbagai tempat di Aceh, yang mendesak Jepang untuk mempercepat invasi karena jika tidak Aceh akan didera gelombang kekerasan di mana-mana. Utusan-utusan ini, yang sebagian besar tiba di Penang sekitar awal Maret, membawa tanda-tanda pertama kepada Jepang bahwa *F-kikan* telah bertindak terlalu jauh melampaui tujuan-tujuannya yang sederhana.[36]

Pada 7 Maret, aksi sabotase terencana dan pemberontakan dimulai di seluruh Aceh Besar dan di bagian-bagian utara pantai barat Aceh. Serangan yang paling terkonsentrasi dilancarkan terhadap markas besar distrik Calang, di pantai barat, pada malam hari 9 Maret. Serangan ini dipimpin oleh satu dari *ulèëbalang* Aceh yang terkuat, Teuku Sabi, yang sudah berpihak kepada PUSA dan menentang sebagian besar rekan-rekannya sesama *ulèëbalang* pada 1938/9—ia mendukung dengan sekuat pemulihan Kesultanan. Juga di Aceh Besar, dukungan atau netralitas *ulèëbalang* wilayah itu yang memungkinkan pemberontakan menjalar tidak terbendung dan disambut rakyat dengan gegap gempita. *Ulèëbalang* terkemuka Seulimeum sudah "underground" (bergerak di bawah tanah) sejak 24 Februari. Pada 8 Maret jalan ini juga diambil oleh

penasihat utama pemerintah Belanda, Teuku Njak Arif, setelah tawarannya untuk mengambil tanggung jawab penuh atas administrasi pemerintahan ditolak. Belanda dengan cepat sampai pada kesimpulan bahwa posisi mereka di wilayah-wilayah ini tidak dapat dipertahankan, dan mulai melakukan evakuasi ke timur pada Maret 10.

Di sebagian besar wilayah-wilayah Aceh yang lain, di tempat-tempat administrasi *ulèëbalang* terus mendukung *status quo* sampai akhir, kekerasan terbuka baru pecah ketika Belanda menarik pasukannya. Di Sigli, Asisten-Residen Belanda terbunuh dan kota itu dijarah begitu pasukan meninggalkannya pada 12 Maret. Di sepanjang pantai barat, pasukan Belanda yang mundur ke Selatan harus berhadapan dengan serangan-serangan yang tidak henti-hentinya dan blokade di jalan-jalan, sebagai balas dendam atas dirangsang kekejaman yang dilakukan oleh serdadu-serdadu Belanda di Lam No, Calang, dan Tapak Tuan.[37]

Pertanyaan mengenai siapa yang patut mendapat pengakuan sebagai pemberi ilham bagi pemberontakan ini, yang sudah diajukan oleh berbagai utusan dari Aceh ke Malaya, menjadi pertanyaan terbuka begitu pemerintahan baru terbentuk. Teuku Njak Arif dan rekan-rekannya di satu pihak, dan rekan-rekan Said Abu Bakar dari PUSA di pihak lain, masing-masing mengaku sebagai satu-satunya pihak yang bertanggung jawab atas gerakan itu.[38] Klaim PUSA agak lebih meyakinkan. Beberapa sumber bahkan menyebutkan bahwa sebuah rencana khusus untuk pemberontakan itu sudah disusun oleh dewan pimpinan PUSA, meski tanggal yang diberikan untuk ini berbeda-beda dari Desember 1941 hingga 6 Maret 1942.[39] Namun, mengingat bahwa pemimpin PUSA, Teungku Daud Beureu'eh,[40] tidak ikut dalam pemberontakan ini, maka tampaknya yang terjadi adalah *ulama-ulama* setempat yang berpengaruh, yang sebagian besar ada hubungan dengan PUSA atau dengan sayap kaum mudanya, mengambil prakarsa sendiri-sendiri secara terpisah [untuk mendukung pemberontakan itu]. Jika ada pengarahan terpusat untuk gerakan itu, ini terletak dalam tangan Said Abu Bakar dan beberapa *ulama* terkemuka di Seulimeum, tidak dalam tangan eksekutif PUSA di Sigli.

Pemberontakan itu menempatkan *ulèëbalang* di tempat yang sangat sulit. Beberapa, seperti sudah disebutkan, dengan cepat mendukungnya; beberapa menentangnya dengan sepenuh hati sehingga mereka menangkap aktivis dan menyerahkan mereka kepada Belanda; sebagian besar mencoba mengikuti arah angin. Di luar Aceh Besar, sementara T. Njak Arif dalam waktu singkat sudah menjadi penasehat utama Jepang, aktivis *F-kikan* PUSA menikmati posisi awal

yang menguntungkan dalam kaitan dengan Jepang. Komite-komite administrasi sementara yang dibentuk oleh militer Jepang ketika mereka menduduki suatu wilayah didominasi oleh aktivis PUSA. Periode awal selama satu atau dua bulan ini sangat pedih bagi *ulèëbalang.* "Kaum muda PUSA, didorong oleh *ulama,* menolak mengakui *ulèëbalang.* Pernikahan dilakukan tanpa melalui persyaratan administrasi yang berlaku; jual beli tanah berlangsung secara ilegal. *Mukim* dan kepala desa juga tidak diacuhkan."[41] Dua penguasa terkemuka di wilayah Meulaboh (pantai barat) dihukum mati oleh Jepang, karena mereka menangkap juru propaganda dari pusat pemberontakan Seulimeum—salah satunya ditembak mati oleh Belanda.[42]

Beberapa bulan kemudian komite-komite yang didominasi PUSA ini dibubarkan dan *ulèëbalang* dikembalikan ke tampuk wewenang administrasi di seluruh Aceh.[43] Ada kemungkinan hal ini menjadi kebijakan dasar Jepang dalam keadaan-keadaan tertentu. Administrasi *ulèëbalang* bekerja dengan efisien, dan penggunaan kembali *ulèëbalang* ini sesuai dengan pedoman dasar Jepang mengenai pendudukan, yakni sesedikit mungkin mengganggu tata administrasi Belanda. Jepang mungkin juga telah melihat bahwa potensi *ulèëbalang* untuk menimbulkan masalah bagi mereka lebih kecil dibandingkan dengan pontensi organisasi-organisasi Islam. Namun, pergantian kekuasaan mengakibatkan pertarungan memperebutkan kekuasaan menjadi sebuah pertarungan terbuka. Para pemimpin PUSA tentu saja percaya bahwa mereka jatuh akibat tipu muslihat para *ulèëbalang* yang berpengaruh, terutama ketika pemimpin-pemimpin PUSA paling terkemuka dimasukkan ke dalam penjara tidak lama setelah pertarungan.[44] Taruhan dalam pertarungan itu sudah sangat tinggi pada 1942. Jika satu pihak berhasil meyakinkan Jepang untuk memihak kepadanya, maka tidak ada prospek bagi pihak yang lain.

Kerusuhan Aron di Sumatra Timur, 1942

Sumatra Timur tidak berontak pada malam sebelum pendudukan Jepang, dan, berbeda dengan Aceh, juga tidak entusias menyambut kegiatan *F-kikan.* Namun pola dasar berupa konfrontasi terbuka antara pimpinan politik yang saling bersaing sama saja. Selain itu, konfrontasi disertai oleh jauh lebih banyak kekerasan daripada disadari orang.

Dua kelompok nasionalis, yang agak bertentangan satu sama lain, mencoba menyambut kedatangan pasukan Jepang di Medan pada 13 Maret 1942. Pemimpin PARINDRA dan *Taman Siswa* Sugondo membentuk sebuah

Komite Indonesia dari antara partai-partai nasionalis moderat, tampaknya dalam upaya menghadirkan tuntutan-tuntutan bersama untuk konsesi menuju kemerdekaan. Namun, sebuah arak-arakan yang diselenggarakan oleh komite itu ditembaki oleh polisi, sehingga beberapa orang terluka. Komite itu dibubarkan tidak lama kemudian.[45] Hal yang lebih bermakna adalah kelompok GERINDO Jacub Siregar, yang menjadi inti bagi kegiatan *F-kikan* yang kacau di Sumatra Timur. Meski anggota-anggota GERINDO—bersama sejumlah orang Batak dan orang Sumatra Timur yang lain yang dikirim *F-kikan* di Malaya—dapat memberikan bantuan nyata kepada Jepang sebagai informan dan pandu, penjarahan besar-besaran juga terjadi atas nama *F-kikan,* terutama di Pematang Siantar.[46] Masubuchi Sahei, yang ditugaskan oleh Fujiwara memimpin *F-kikan* di Sumatra, mengadakan rapat pada akhir Maret untuk menyusun rencana propaganda berkesinambungan mengenai peranan *F-kikan* di bawah Jacub Siregar. Tetapi Masubuchi tidak lama kemudian dipindahkan ke Aceh, untuk melaksanakan tugas-tugas yang lebih mendesak; maka menjadi jelas bahwa administrasi Jepang yang telah terbentuk tidak banyak dapat digunakan oleh politisi radikal dari GERINDO, kecuali sebagai mata-mata polisi.[47]

Namun, harapan-harapan yang semakin besar tidak mudah diredakan, terutama di kalangan petani Karo. Ketika militer Jepang masuk Pangkalan Brandan, mereka disambut dengan demonstrasi yang mengibarkan slogan-slogan berbunyi *hapuskan raja-raja*;[48] dan tidak diragukan lagi sentimen-sentimen ini sama dengan sentimen-sentimen pimpinan GERINDO. Menurut laporan-laporan polisi Jepang, gerakan SETIA yang kemudian[49] muncul dan diilhami oleh GERINDO di kalangan petani Karo di Kesultanan Deli berkembang menjadi semacam perkumpulan rahasia tidak lama sebelum perang. Tanah yang dituntut petani Karo mulai diduduki dengan melanggar hukum oleh koperasi-koperasi pertanian yang terdiri dari sejumlah orang, yang dikenal di Karo dengan nama *aron.* Gerakan *aron* ini menggunakan upacara yang rumit untuk menegakkan kesetiaan, kerahasiaan, dan solidaritas di antara anggota-anggotanya, yang wajib saling menolong jika polisi mencoba mengusir mereka dari tanah mereka. Gerakan itu menjalar dengan cepat dalam suasana tidak menentu dalam kaitan dengan pengambilalihan oleh Jepang. Para pemimpin GERINDO, sekarang bertindak atas nama *F-kikan,* konon mengatakan kepada petani Karo: ”Bila Jepang datang, para kepala adat akan diusir, dan kalian dapat memiliki tanah apa saja yang kalian inginkan.[50] Satu sumber Jepang memperkirakan ada 2.000 anggota gerakan itu di 300 desa distrik Pancur Batu

Deli pada awal 1942;[51] sumber Jepang yang lain mengatakan seluruhnya ada 15.000 anggota.[52]

Meski tampaknya tidak menarik perhatian serius dari pihak Jepang sampai Juli 1942, gerakan ini mulai menyebabkan pertarungan antara petani dan pihak berwenang setempat, paling tidak pada akhir Mei. Kekerasan mungkin mulai dilaporkan ketika pihak berwenang desa dan wilayah merasa cukup yakin bahwa Jepang akan mencoba menerapkan kembali aturan hukum pra-perang.

Insiden yang pertama kali dilaporkan adalah insiden di tanah Karo sendiri, bukan insiden di Kesultanan Deli dan Kesultanan Langkat yang berpenduduk campuran berbagai suku. Anggota *aron* menggunakan kesempatan masuknya Jepang untuk menduduki tanah-tanah yang amat luas dan diairi milik *raja urung* (kepala desa turun temurun) yang tidak populer di Batu Karang dan Tiga Nderket. Ketika polisi dikerahkan ke Batu Karang dari Kebandjahe yang dekat dari situ pada 1 Juni, pertarungan terjadi, seorang polisi dan tiga anggota *aron* dilaporkan tewas.[53]

Kerusuhan meluas dengan cepat ke pusat utama ketegangan pra-perang mengenai sengketa tanah: *Dusun* Deli, dan khususnya distrik Sunggal. Gerakan *aron* terlibat konflik dengan hirarki lapisan lebih rendah Kesultanan Deli pada awal Juni 1942. Kepala desa (Indonesia: *penghulu;* Jepang, *soncho)* yang mencoba mencegah militan Karo mengambil alih tanah perkebunan yang lebih luas lagi dirampok atau ditakut-takuti. Dua terbunuh, pada 3 dan 14 Juni.[54] Polisi Kesultanan membalas dengan kejam pada 18 Juni, yakni menembak mati 14 anggota *aron* di wilayah Pancur Batu. Ini menimbulkan amarah petani Karo. Pos polisi dikepung oleh beratus-ratus orang selama dua hari, sampai dibubarkan pada 20 Juni.[55] Catatan Jepang tidak menunjukkan bahwa ada pejabat atau polisi Jepang yang terlibat pada tahap ini; amarah *aron* tampaknya ditujukan kepada Datuk Sunggal, agen-agennya di Pancur Batu, dan kepada para kepala desa yang mendukung mereka.

Kekerasan di sana sini terus terjadi di wilayah itu sampai Juli, dan polisi Kesultanan mendapat perlawanan yang semakin sengit dalam upaya mereka untuk meredamnya. Setelah gagal dalam upaya untuk menyelidiki sebuah insiden dekat Arnhemia (kota pekebun Eropa dekat Pancur Batu) pada 26 Juli, polisi menahan seorang Karo, tampaknya seorang pemimpin *aron*, di pos polisi Arnhemia. Anggota-anggota *aron* dengan cepat berkumpul dan berbaris dengan kekuatan sekitar 500 orang menuju pos polisi itu.[56] Tampaknya polisi

Kesultanan, barangkali didorong oleh Tengku Arifin Tobo—orang Indonesia kepala bagian intelijen politik di Medan—dengan sengaja memancing *aron* ke dalam perangkap dengan menciptakan kesan bahwa polisi di Arnhemia tidak bersenjata dan tidak mencurigai apa-apa, sementara dengan diam-diam memperkuat mereka.[57] Pada malam itu pertempuran memperebutkan pos polisi itu dengan cepat berubah menjadi pembantaian, yang menelan korban 21 dari petani Karo yang menyerang dan 57 luka-luka—menurut laporan Jepang, barangkali angka perkiraan rendah[58] —dan empat polisi luka-luka.

Pertempuran itu, yang berakhir dengan kedatangan *Kempeitai* setelah tengah malam, mewujudkan keterlibatan langsung Jepang dalam peristiwa itu. Pemerintah Kesultanan sekarang dapat melukiskan *aron* sebagai serangan subversif atas kekuasaan Jepang, dan banyak pemimpin *aron* tampaknya yang ditahan dan dihukum mati oleh *Kempeitai.* Menyimpulkan bahwa *aron* merupakan "kanker Sumatra utara",[59] *chokan* (gubernur) memerintahkan kepala polisinya, Kapten Inoue Tetsuro, mengadakan penyelidikan menyeluruh dan menghancurkannya. Orang Indonesia asisten utama Tetsuro pada waktu itu ialah Tengku Arifin Tobo—sebelumya bertugas di bagian intelijen politik Belanda di Medan dan juga anggota istana kerajaan Serdang. Ini merupakan peluang bagi Arifin untuk meletakkan tanggung jawab atas gerakan itu di pundak politisi militan anti-Kesultanan dari GERINDO, yang tampak sangat mengancam bagi elite Melayu ketika dirangkul dan dimasukkan ke dalam *F-kikan.*[60] Jacub Siregar dan delapan bekas GERINDO lainnya dan para pemimpin *F-kikan* ditangkap dan disiksa. Setelah memasukkan mereka ke dalam penjara selama beberapa bulan, Jepang memutuskan untuk tidak menghukum mati mereka, tetapi menggunakan mereka—pertama dalam kegiatan intelijen politik dan kemudian dalam kegiatan melatih kelompok-kelompok gerilya nasionalis. Namun, rasa permusuhan antara bekas kelompok GERINDO dengan Kesultanan sekarang menjadi terbuka lebar, dengan akibat-akibat yang menimbulkan trauma selama "revolusi sosial" 1946.

Gerakan *aron* makan waktu beberapa lama untuk sirna di wilayah Karo, yakni di Deli dan Langkat, meski Jepang telah berusaha untuk menghancurkannya dengan menggunakan kekuatan gabungan antara kekerasan dan konsesi menyangkut sengketa tanah. Pada 7 September and 3 Oktober ada kejadian-kejadian selanjutnya yakni pembunuhan kepala desa oleh anggota atau simpatisan *aron.*[61] Inoue bereaksi terhadap salah satu insiden ini, di Ujong Labuhan: ia menggelar hukuman pancung terbuka atas lima pemimpin gerakan desa.[62] Insiden yang terakhir dilaporkan adalah insiden di Bulilir, di dataran tinggi Langkat, pada 15 Oktober 1942. Upaya-upaya Kesultanan untuk melarang

penggarapan tanah ilegal berakhir dengan kerusuhan dengan akibat enam penduduk desa tewas dan empat luka parah karena tembakan polisi. Malam itu sekelompok penduduk desa menyerbu dan memasuki rumah *penghulu,* yang mereka anggap bertanggung jawab atas hal ini, menewaskan isterinya, dan seorang pembantu rumah tangga. Namun, ketertiban berangsur-angsur pulih, ini tercermin dalam keputusan Jepang untuk mengadili tujuh orang Karo yang bertanggung jawab atas serangan malam itu di pengadilan tinggi Medan.[63] Tidak ada terdengar hal-hal lebih lanjut mengenai gerakan *aron*, tetapi bukan kebetulan bahwa wilayah Sunggal di Deli, pusat konsentrasi kekerasan *aron*, kembali menjadi pusat ketegangan sejak Jepang menyerah pada Agustus 1945 sampai "revolusi sosial " menyapu bersih Sultan-sultan, Datuk-datuk, dan banyak kepala desa tujuh bulan kemudian.

Kesimpulan

Aceh dan Sumatra Timur adalah dua wilayah di bawah kekuasaan Belanda yang menciptakan polarisasi luar biasa yang sangat tegang antara penguasa Indonesia dan "anti-elite" radikal. Ledakan kekerasan pada 1942 tidak disebabkan oleh kebijakan Jepang tetapi oleh upaya kelompok-kelompok Indonesia yang saling bersaing untuk memanfaatkan pergantian penguasa untuk memperjuangkan kepentingan masing-masing dan klaim masing-masing sebagai pemimpin. Konflik dengan demikian menjadi terbuka dan menggunakan kekerasan, sehingga sangat memperpahit hubungan di antara pemimpin-pemimpin yang saling bersaing itu di masa depan. Kebijakan Jepang ialah menggunakan keduanya untuk maksud-maksud yang berbeda, tetapi berangsur-angsur mengaitkan mereka ke berbagai badan dan organisasi, terutama pada tahun terakhir perang itu. Namun, proses ini tidak berjalan cukup jauh pada 1945 sehingga tidak terhindari pecahnya kembali konflik setelah kekuasaan Jepang runtuh.

13

Menjadikan Sumatra Indonesia: Lahirnya Republik

Pembentukan pemerintah Republik Indonesia di Sumatra, antara Agustus dan Oktober 1945, adalah saat yang menentukan dalam sejarah pulau itu. Selama setengah abad, pemerintah kolonial sudah membangun lembaga dan infrastruktur yang menghubungkan seluruh pulau itu dengan Batavia/Jakarta, dan kemudian pada 1942-5 Jepang memutus sebagian besar hubungan itu. Ketika Jepang menyerah ada suatu periode kosong kekuasaan, sebuah peluang sempurna bagi revolusi. Mereka yang meraih peluang itu dengan paling efektif adalah sebuah generasi baru yang entusias mengenai ide persatuan dan kemerdekaan Indonesia. Tanpa banyak dorongan dari Jawa, serangkaian revolusi spontan meletus di seluruh Sumatra, pantulan proses di Jawa tetapi sangat berbeda dengan proses itu. Pemerintah pusat Republik boleh dikatakan tidak memiliki cara-cara langsung untuk mengendalikan Sumatra sampai April 1946, ketika sebuah rombongan di bawah pimpinan Menteri Pertahanan Amir Sjarifuddin mengadakan kunjungan keliling di pulau itu. Regu-regu propaganda *pemuda* yang dikirim dari Jakarta oleh Sjarifuddin pada September menjalin sebuah hubungan awal langsung, tetapi mereka baru tiba di Sumatra Barat pada akhir Oktober[1] dan di Sumatra Utara pada November. Keinginan *pemuda* di Sumatra untuk meniru apa yang mereka ketahui, yang tidak banyak, mengenai contoh dari Jawa sangat besar, tetapi keinginan itu bersifat spontan dan tidak terarah.

Sifat otonomi revolusi di Sumatra pada bulan-bulan pertama mengharuskan kita untuk membahas revolusi itu secara tersendiri. Karya-karya yang sangat baik mengenai revolusi awal di Jawa yang dihasilkan Kahin, Smail, Anderson, dan Frederick[2] merekam dengan jelas peristiwa di situ, tetapi pembahasan mengenai Sumatra sangat sedikit.[3] Perimbangan politik antara para pelaku sangat berbeda di Sumatra. Khususnya, kepemimpinan resmi

Republik di situ jauh lebih lemah dalam kaitan dengan, pertama, Sekutu dan, kedua, dengan aktivis *pemuda*.

Kebijakan Jepang

Dampak penting pendudukan Sumatra oleh Jepang adalah hancurnya semua kegiatan organisasi di situ. Di satu pihak, hubungan dengan Jawa diputus sama sekali untuk mengisolasi Sumatra, sejauh mungkin, dari iklim politik di Jawa yang lebih maju. Di pihak lain, seperti akan kita bahas di akhir bagian ini, hubungan antar-organisasi di atas karesidenan bahkan di dalam Sumatra sendiri sangat dipersulit sampai enam bulan terakhir pendudukan.

Pada awal pendudukan jelas terlihat ada perbedaan antara rencana Jepang bagi Jawa dan bagi Indonesia selebihnya. Jawa, yang berada di bawah wewenang Angkatan Darat ke-16, dinilai mampu mencapai kemajuan politik. Pulau-pulau berpenduduk jarang—Borneo, Sulawesi, dan Sunda Kecil—yang berada di bawah wewenang Angkatan Laut "tetap dikuasai di masa datang untuk manfaat Kekaisaran [Jepang]".[4] Malaya dan Sumatra, yang disatukan di bawah wewenang Angkatan Darat ke-25, dilukiskan sebagai "zona inti dalam rencana-rencana Kekaisaran Jepang mengenai Wilayah Tenggara",[5] karena peranan strategis keduanya dan juga karena nilai ekonominya sebagai sumber minyak, karet, dan timah. Menurut sebuah pernyataan mengenai kebijakan Jepang pada April 1942, Malaya dan Sumatra nantinya akan diserap sebagai bagian dari Jepang,[6] dan seorang pejabat tinggi Jepang pada Desember 1942 menyebut penduduk Penang "bangsa Jepang baru".[7] Karena itu Jepang tidak mengizinkan pembicaraan mengenai kemerdekaan di Sumatra, atau kegiatan politik lainnya, kecuali propaganda untuk kepentingan-kepentingan Jepang yang mendesak. Semua organisasi politik Indonesia di situ dibekukan beberapa pekan kemudian setelah pendudukan Jepang.

Baru pada April 1943, ketika Sumatra dipisahkan dari Malaya dari sisi administrasi, kebijakan ini dipertimbangkan kembali mengingat situasi perang yang semakin buruk. Tetapi Angkatan Darat ke-25, yang sekarang mengendalikan Sumatra seorang sendiri, menentang setiap konsesi yang mengarah ke kemerdekaan di situ dan mengambil langkah-langkah terbatas yang diperintahkan Tokyo atau karena tekanan dari rekan-rekan mereka yang menghadapi keadaan yang lebih parah di Jawa, dengan setengah hati. Seperti kata Jenderal Shimura, yang mengendalikan administrasi Sumatra sejak Januari 1944:

> Sedikit sekali upaya menuju ke arah ini [kemerdekaan] di Sumatra, sebelum Mei 1945, karena di Sumatra tuntutan kemerdekaan tidak sekuat tuntutan kemerdekaan di Jawa. Para perwira tinggi Angkatan Darat Jepang di Sumatra berpendapat bahwa rakyat di pulau itu belum cukup maju dari segi sosial dan budaya untuk memikul tanggung jawab mengurus diri sendiri. Mereka karena itu melaksanakan tugas itu dengan "setengah hati".[8]

Panglima Sumatra, Jenderal Tanabe, sejauh ia sudi memberikan perhatian kepada politik Indonesia, setuju dengan pendapat Shimura.

> Sebelum Jepang menyerah tidak ada soal gerakan Indonesia merdeka, dan paling pasti lagi tidak ada bantuan dari Pemerintah militer Jepang. . . . Terdiri dari apa kemerdekaan itu tidak jelas bagi saya, barangkali sesuatu yang berbeda dengan Manchukuo karena lembaga *Volksraad* tidak dikenal di situ. Perlu saya kemukakan di sini bahwa saya tidak pernah tertarik kepada politik, dan karena itu tidak banyak tahu tentang politik.[9]

Dalam Konferensi Kekaisaran pertama tentang masa depan Indonesia yang diselenggarakan pada Mei 1943, Angkatan Darat ke-25 menentang pemberian konsesi apapun yang berarti, sedangkan Angkatan Darat ke-16 di Jawa mendesak agar ada janji tentang kemerdekaan. Kompromi yang akhirnya disepakati ialah tidak ada bagian dari Indonesia yang diizinkan untuk merdeka, tetapi partisipasi politik dapat segera diberikan kepada Jawa dan wilayah-wilayah yang lain sesuai dengan kesiapan masing-masing.[10] Ini di Jawa berlanjut dengan pembentukan dewan penasihat dengan segera di setiap karesidenan, yang berada di bawah Dewan Penasihat Pusat untuk seluruh Jawa di bawah pimpinan Sukarno. Gerakan-gerakan di seluruh Jawa sudah dibentuk atau diizinkan pada awal 1943 sebagai kendaraan bagi politisi nasionalis (Putera, diikuti kemudian oleh Jawa *Hokokai*), dan bagi golongan Islam (MIAI, diikuti kemudian oleh Masjumi). Dengan demikian, kepemimpinan Indonesia untuk seluruh Jawa sebagian besar didorong oleh Angkatan Darat Ke-16, yang terdiri dari kelompok nasionalis, kelompok Islam dan kelompok *pamong praja* (birokrasi) dalam suatu perimbangan yang rapuh di semua tingkat di Jawa.

Di Sumatra, Jepang dengan setengah hati menyetujui pembentukan dewan penasihat daerah *(Shu Sangi Kai),* di masing-masing dari sepuluh karesidenan yang ada di situ pada November 1943. Dewan itu rapat hanya dua kali setahun untuk membahas persoalan-persoalan politik yang ringan-ringan yang diajukan oleh *ch kan* (residen) Jepang. Di karesidenan-karesidenan yang

dinilai berpotensi eksplosif, Jepang memastikan perimbangan antara kelompok *pergerakan* (politik dan agama) dengan kelompok *pamong praja* dan kelompok *kerajaan* (penguasa tradisional).[11] Pada waktu bersamaan, organisasi-organisasi propaganda mulai dibentuk di sejumlah karesidenan sebagai cara untuk mengendalikan mantan politisi dan pembaru Islam dari kelompok *pergerakan* dan menggunakan mereka sebagai penyeimbang kekuasaan administrasi kelompok *kerajaan*.[12] Di Palembang, Lampung, Sumatra Barat, Tapanuli, dan Aceh, organisasi-organisasi semacam ini dibubarkan dan dilebur menjadi organisasi yang lebih luas: *H k kai*, atau Badan Kebaktian Rakjat, pada awal 1945. Organisasi ini mencontoh Djawa *H k kai* yang dipimpin oleh Sukarno, dan juga memiliki dua tujuan, yakni memecah-mecah kelompok *pergerakan* dan membuka front yang lebih luas untuk menghadapi Sekutu yang sudah semakin dekat.[13] Namun, organisasi ini berbeda dengan organisasi di Jawa yang dicontohnya, yakni seperti halnya dengan semua organisasi yang lainnya di Indonesia, di Sumatra organisasi-organisasi semacam itu diizinkan dibentuk hanya sampai tingkat karesidenan.

Posisi militer Jepang yang semakin buruk pada 1944 menuntut perubahan kebijakan Mei 1943 untuk Indonesia, dengan akibat bahwa Premier Koiso menjanjikan di muka umum pada 7 September 1944 kemerdekaan India Timur pada suatu hari kelak. Meski garis batas wilayah negara yang akan dibentuk itu belum diputuskan karena Angkatan Laut dan Angkatan Darat ke-25 keberatan, diputuskan bahwa Sumatra dan Jawa segera diizinkan mengibarkan bendera nasional Indonesia dan memperdengarkan lagu kebangsaan yang sudah populer sejak sebelum perang.[14] Sebagian karena ini, pernyataan Koiso membawa dampak besar atas Sumatra, yang sangat berbeda dengan konsesi-konsesi Jepang sebelumnya.[15] Tetapi meski simbol-simbol "Indonesia" digunakan dengan luas untuk tujuan-tujuan propaganda, Angkatan Darat Ke-25 tetap bersikeras bahwa Sumatra harus mengikuti jalan sendiri yang terpisah dari Jawa. Pada waktu bersamaan Angkatan Darat Ke-25 menangguhkan selama mungkin pengalihan tanggung jawab ke dalam tangan orang Indonesia.

Rencana awal Angkatan Darat Ke-16 pada Januari 1945 untuk membentuk sebuah Badan Penjelidik Kemerdekaan Indonesia atau BPKI adalah bahwa badan itu terdiri dari "residen-residen berpengaruh di Jawa dan Sumatra".[16] Ini akan membuka kesempatan pertama bagi para pemimpin Sumatra untuk berbicara dengan rekan-rekan mereka yang lebih maju di Jawa. Namun, tidak ada utusan dari Sumatra yang masuk ketika susunan BPKI diumumkan pada 29 April, kemungkinan karena oposisi komando militer Sumatra. Sama

halnya, Jenderal Shimura berulang kali menolak mengizinkan Sukarno untuk berkunjung ke Sumatra karena takut "gerakan kemerdekaan tidak dapat dikendalikan dan tidak mengikuti jalur yang telah ditetapkan baginya oleh pihak berwenang Jepang".[17] Namun, sejak dari awal 1945, pihak berwenang lebih tinggi militer yakin bahwa Sumatra harus masuk ke dalam sebuah negara Indonesia yang berdaulat. Pada serangkaian pertemuan yang diadakan dengan tergesa-gesa di Tokyo dan di Singapura antara April dan Juli 1945 untuk menjelaskan kebijakan Jepang, keberatan-keberatan Angkatan Darat Ke-25 berulang kali dikesampingkan, dan instruksi dikeluarkan agar segera diadakan persiapan-persiapan untuk kemerdekaan Indonesia.[18] Tetapi Tokyo mengakui bahwa meski kemerdekaan seluruh bekas India Timur akan diumumkan pada suatu waktu, "Wilayah-wilayah yang belum menyelesaikan persiapan akan dimasukkan berangsur-angsur ke bawah yurisdiksi negara merdeka yang baru itu sesuai dengan kemajuan persiapan kemerdekaan."[19]

Paling tidak hingga Juni 1945, para pemimpin Sumatra tampak ragu-ragu, dan ini dapat dimengerti, mengenai slogan mana yang lebih tepat mencerminkan rencana Jepang untuk mereka, apakah slogan lama, *Sumatera Baru*, atau slogan baru, *Indonesia Merdeka*.[20]

Disamping menutup Sumatra sama sekali dari Jawa, Jepang juga sangat mempersulit hubungan antar-karesidenan di Sumatra sendiri. Sampai dua bulan terakhir pendudukan, kegiatan semua organisasi dukungan Jepang dibatasi dengan sangat ketat sampai hanya tingkat karesidenan, dan beberapa organisasi non-politik pra-perang seperti Mohammadiah dan Taman Siswa harus menerima kenyataan bahwa hubungan di atas tingkat karesidenan sama sekali tidak mungkin. Selain itu, kondisi zaman perang membuat komunikasi sangat sulit bagi orang Indonesia bahkan pada tataran pribadi atau perniagaan. Satu-satunya kesempatan bagi para pemimpin dari berbagai wilayah untuk bertukar pikiran adalah pertemuan *Syonan* (Singapore) Islamic Conference pada April 1943; perjalanan berbagai delegasi ke Jepang pada 1943; dan upacara besar di Bukittinggi pada Oktober 1944 "menyambut" janji Koiso.[21] Pertemuan-pertemuan ini tidak banyak membantu melahirkan kepemimpinan se-Sumatra karena kendali politik Jepang yang mencekik di pulau itu. Misalnya, tokoh Aceh Teuku Muhamad Hasan dari Glumpang Payong, yang diangkat menjadi pemimpin delegasi Sumatra ke Jepang pada paruh kedua 1943, ditangkap dan dihukum mati beberapa bulan setelah ia kembali.[22]

Meskipun ada perpecahan horisontal ini, perbedaan antara kebijakan pecah belah (*divide et impera*) Jepang dengan kebijakan pecah belah Belanda

lebih banyak memberikan pelajaran daripada persamaan-persamaan yang telah diidentifikasi dengan sangat meyakinkan oleh Anderson.[23] Dalam praktik, sistem kolonial Belanda bersifat sangat terpusat dan menempatkan elite Indonesia dalam pusaran tekanan-tekanan ekonomi, pendidikan, hukum, dan administrasi yang semuanya bersifat sentripetal. Strategi Belanda didasarkan pada perhitungan-perhitungan yang mencakup seluruh Indonesia, dalam arti kekuatan kaum cendekiawan perkotaan berorientasi nasional yang semakin besar harus diimbangi dengan upaya mendorong kesetiaan kedaerahan dan orientasi pada urusan daerah. Belanda, dalam kaitan dengan strategi ini, mendapat dukungan dari kalangan orang Indonesia yang tidak suka melihat laju pemusatan kekuasaan dan curiga pada suku-suku yang lebih besar atau lebih maju—yang mereka kenal melalui proses pemusatan ini. Di pihak lain, tata administrasi Jepang pada dasarnya terpecah-pecah. Jarang ada koordinasi antara angkatan darat dan angkatan laut, dan bahkan antara Angkatan Darat Ke-16 dan Angkatan Darat Ke-25. Di Sumatra kesulitan komunikasi dan kebijakan yang mengharuskan setiap karesidenan mandiri di bidang ekonomi, menyebabkan setiap *chokan* Jepang mencari jalan keluar sendiri-sendiri. Pembagian wilayah menjadi kenyataan objektif, dan sebagian besar kebijakan Jepang dirumuskan untuk tingkat karesidenan. Jepang tidak mencari keseimbangan antara kesetiaan kedaerahan satu sama lain, atau dengan Jawa; bilamana perlu Jepang memanfaatkan untuk kepentingannya perpecahan *di dalam* karesidenan, yang biasanya terjadi antara kelompok *pergerakan* dengan kelompok *kerajaan.* Kebijakan ini membawa konsekuensi besar berupa konflik dengan kekerasan pada masa setelah Jepang menyerah di antara kekuatan-kekuatan berimbang ini di sejumlah karesidenan, terutama di Aceh dan Sumatra Timur. Tetapi dari sudut pandang persatuan Indonesia, hasil-hasil dari kebijakan pemerintahan yang dijalankan Jepang selama tiga tahun pada dasarnya positif. Hampir semua kelompok sosial dan suku di Sumatra merasa kesal dengan isolasi ekstrim yang mereka alami pada periode pendudukan Jepang. Hanya mereka yang memiliki ingatan panjang yang masih sadar mengenai rasa kedaerahan dan kesukuan setelah perang usai. Antusiasme kaum muda pada persatuan di atas segalanya diperbesar oleh kenyataan bahwa mereka belum pernah mendapat kesempatan untuk mengalami persatuan.

Persiapan Kemerdekaan

Konsesi pertama ke arah mengizinkan perkembangan kepemimpinan politik di

tingkat yang lebih tinggi daripada karesidenan di Sumatra adalah pengumuman pada 24 Maret 1945 bahwa akan dibentuk sebuah Dewan Penasihat Pusat Sumatra (*Chu Sangi In*)–hampir dua tahun setelah pembentukan badan penasihat di Jawa. Lima belas orang anggota dipilih oleh sepuluh dewan penasihat daerah, dan pada 17 Mei penguasa Jepang di Bukittinggi mengangkat 25 anggota tambahan. Seperti biasa, perimbangan yang hati-hati dipertahankan antara wakil-wakil dari kelompok-kelompok yang saling bertentangan di karesidenan-karesidenan penting.[24] Pada akhir Mei, *Gunseikanbu* (administrasi) mengumumkan di Bukittinggi nama-nama orang yang diangkatnya. Mohammad Sjafei,[25] pendiri sekolah percobaan di Kaju Tanam, Sumatra Barat, diangkat sebagai ketua Dewan Penasihat Pusat yang akan segera dibentuk, dengan T. Njak Arif[26] dari Aceh dan Mr. Abdul Abbas[27] dari Lampung sebagai wakil ketua. Sebuah sekretariat tetap dan besar untuk Dewan itu dibentuk dan dikepalai oleh wartawan terkemuka dari Sumatra, Djamaluddin Adinegoro,[28] yang pindah dari Medan ke Bukittinggi dan mengundurkan diri dari kedudukannya sebagai anggota terpilih di Dewan itu. Keempat orang ini diusung tinggi oleh pers yang dikendalikan Jepang selama Juni dan Juli sebagai *Empat Serangkai* Sumatra, setara dengan empat serangkai Sukarno-Hatta-Ki Hadjar Dewantoro-K.H.Mas Mansur di Jawa.[29]

Jepang menyiapkan sebuah daftar pertanyaan untuk Dewan Penasihat Pusat mengenai bagaimana cara memperkokoh persatuan dan semangat rakyat Sumatra dalam Perang Asia Timur Raya.[30] Tetapi pertanyaan-pertanyaan dirumuskan secara umum untuk memungkinkan anggota-anggota yang lebih berani untuk menyuarakan tuntutan-tuntutan bagi peluang pendidikan yang lebih besar, harga-harga yang lebih murah, dan kemajuan lebih jauh menuju kemerdekaan.

Setelah rapat dari 27 Juni hingga 2 Juli, Dewan menyepakati serangkaian resolusi yang menyerukan pembentukan lebih lanjut lembaga-lembaga di seluruh Sumatra: (1) panitia persiapan kemerdekaan; (2) Sumatera *H k kai*, yang menghubungkan organisasi-organisasi propaganda karesidenan; (3) perguruan tinggi Islam; (4) kantor penghubung untuk menghubungkan Kantor Pembimbing Rakyat karesidenan satu sama lain; (5) sistem perbankan nasional; dan (6) *Lasjkar rakjat* yang kuat yang dibangun dari *Giy gun* (tentara sukarela) dan *Heih* (tentara pembantu) didikan Jepang. Dr. Gani mengusulkan kekuatan minimum 500.000 orang.[31] Laporan suratkabar mengenai pidato-pidato dan resolusi-resolusi menunjukkan terus adanya ketidakpastian dalam rapat antara Sumatera Baru dan Indonesia Merdeka. Di pihak lain Hamka berpendapat: "Di

situ semangat persatuan sangat kokoh. Di situ semangat untuk memisahkan Sumatra dari persatuan Indonesia jelas-jelas ditentang."[32]

Jepang tampaknya telah mengisyaratkan kesediaan mereka untuk melaksanakan semua resolusi Dewan.[33] Jepang memang mengumumkan pembentukan Panitia Penjelidik Persiapan Kemerdekaan tersendiri untuk Sumatra, yang terdiri dari banyak cendekiawan yang dimaksudkan untuk menjembatani jurang antara kelompok *pergerakan* dan kelompok *kerajaan*.[34] Jepang dengan hati-hati juga mulai mengambil langkah-langkah menuju pembentukan gerakan persatuan Islam dengan memperluas Madjelis Islam Tinggi Sumatra Barat ke karesidenan-karesidenan yang lain,[35] dan mengangkat Sjech Mohammad Djamil Djambek sebagai penasihat urusan Islam untuk seluruh Sumatra.[36] Tetapi semua langkah hati-hati itu dengan cepat ditinggalkan di belakang oleh serangkaian peristiwa pada Agustus.

Upaya-upaya pada detik-detik terakhir untuk menciptakan sebuah kepemimpinan Sumatra cukup banyak. Sjafei dan Adinegoro mengepalai sebuah cikal bakal birokrasi Sumatra dengan kontak di seluruh pulau itu, dan pers melambungkan nama-nama mereka sehingga mereka dikenal masyarakat di setiap karesidenan. Pada 25 Juli mereka juga diangkat, berturut-turut, sebagai ketua dan sekretaris Panitia Penyelidik Persiapan Kemerdekaan, dan pada hari berikutnya mereka memulai perjalanan berpidato di Sumatra.[37] Pada bulan-bulan terakhir pendudukan, Jepang tampaknya juga telah mengakui posisi Dr. A.K. Gani sebagai satu-satunya politisi tingkat nasional pra-perang di Sumatra,[38] meski ia pernah ditangkap dan disiksa pada waktu razia pada September 1943. Menurut Hamka, di Dewan Penasihat Pusat pertemuan-pertemuan tidak resmi para pemimpin dari berbagai daerah merupakan forum yang paling penting dalam pembentukan pendekatan persatuan pada persoalan kemerdekaan. Dalam pertemuan-pertemuan seperti itu, "M. Sjafei diakui, terlepas dari pengakuan Jepang, sebagai pemimpin yang patut ditonjolkan."[39] Juga menurut Hamka, Dr. A.K. Gani, T. Njak Arif, dan Dr. Ferdinand Lumbantobing juga telah mencapai posisi kepemimpinan yang diakui berkat paham nasionalisme yang kokoh yang mereka anut.

Tanpa dapat dijelaskan, Jepang meninggalkan para pemimpin yang telah mereka besarkan ketika menunjuk utusan-utusan Sumatra ke Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia [PPKI] pada awal Agustus. Salah satu dari utusan-utusan itu adalah Mr. Abdul Abbas, dua orang lainnya adalah cendekiawan Medan yang belum pernah menjadi anggota Dewan Penasihat Pusat—Dr. Mohammad Amir[40] dan Mr. T.M. Hasan.[41] Ada kemungkinan perencana Jepang di Singapura

atau Jakarta tidak percaya kepada pemimpin-pemimpin yang dibesarkan oleh Angkatan Darat Ke-25 yang keras kepala itu, mereka dinilai terlalu condong kepada Sumatra, atau didominasi oleh makhluk-makhluk cetakan *Gunseikan*.[42] Tetapi apakah didikan Angkatan Darat Ke-25 atau *Gunseikan*, pilihan yang paling masuk akal sebenarnya adalah Dr. Gani. Apapun sebabnya, akibat-akibat dari tindakan Jepang dalam kaitan dengan utusan-utusan Sumatra ke PPKI ini lebih parah daripada yang diperkirakan siapapun.

Ketiga utusan dari Sumatra itu tiba di Jakarta pada 14 Agustus, dengan pesawat pembom Jepang yang juga membawa Sukarno dan Hatta. Mereka tinggal di Jakarta untuk menyaksikan proklamasi kemerdekaan yang mendebarkan begitu Jepang menyerah dan memainkan peranan dalam penyusunan undang-undang dasar dan pemerintahan. Baik Amir maupun Hasan mengungkapkan kekhawatiran mereka mengenai sentralisme Jawa dalam perdebatan-perdebatan PPKI, Amir memohon "agar desentralisasi maksimum diizinkan untuk pulau-pulau di luar Jawa, agar pemerintah dibentuk di situ, dan agar rakyat Sumatra diberi hak untuk mengurus rumah tangga sendiri sejauh mungkin".[43]

Pada 19 Agustus PPKI memperdebatkan struktur pemerintah provinsi, dan memutuskan bahwa Sumatra terdiri dari satu provinsi di bawah satu gubernur, dan menolak argumen sejumlah anggota bahwa karena luas dan beragam Sumatra memerlukan tiga provinsi terpisah, seperti di Jawa, atau setidak-tidaknya tiga wakil gubernur di Medan, Bukittinggi, dan Palembang. Sebagai wakil Sumatra di sub-komite itu, yang telah bertemu malam sebelumnya untuk memecahkan persoalan-persoalan ini, Dr. Amir berhasil meloloskan Mr. TM. Hasan sebagai gubernur dan Medan sebagai ibukota. Pengalaman Hasan sebelum perang sebagai gubernur Sumatra adalah alasan utama yang dikemukakan untuk pengangkatan itu, meski pentingnya dukungan Aceh untuk Republik tidak dapat diabaikan.[44] Pertemuan ketiga dan terakhir PPKI pada 22 Agustus mendirikan Partij Nasional Indonesia (PNI) sebagai partai negara, Komitè Nasional Indonesia (KNI) di berbagai tingkat sebagai dewan perwakilan, dan Badan Keamanan Rakjat (BKR) sebagai angkatan bersenjata Republik.[45] Hari berikutnya ketiga utusan dari Sumatra itu terbang ke Palembang dengan penerbangan terakhir Jepang yang diizinkan Sekutu, dengan instruksi melaksanakan keputusan-keputusan ini di Sumatra bekerja sama dengan Sjafei dan Adinegoro. Dr. Gani secara khusus ditugaskan membentuk PNI dan Mr. Abbas membentuk KNI di Sumatra.[46] Hasan sebagai gubernur mengangkat residen-residen Republik yang akan mencoba mengambil alih pemerintahan dari Jepang.

Hambatan

Tugas ketiga utusan itu setelah kembali sungguh berat. Persiapan kemerdekaan oleh Jepang sangat sedikit dibandingkan dengan di Jawa, dan jika ada terpusat di Bukittinggi. Mr. Hasan khususnya tidak dikenal di luar Medan dan Aceh, dan ketika mendirikan kantor pusatnya di Medan ia harus mulai dari awal. Berbagai karesidenan tetap terisolasi satu sama lain, dan di banyak karesidenan perpecahan sosial yang ada semakin buruk sehingga menutup kemungkinan untuk bekerja sama.

Memanfaatkan kelemahan-kelemahan Republik ini, Belanda berusaha mewujudkan kehadirannya di Medan secepat mungkin dan dengan sekuat tenaga dibandingkan dengan di tempat-tempat lainnya di manapun di Jawa atau Sumatra. Sebuah Anglo-Dutch Country Section (ADCS) of Force 136 dibentuk di Colombo pada awal 1945 dan menerjunkan tiga unit kecil komando dengan payung ke Sumatra Utara pada akhir Juni. Mereka ini bertugas mengumpulkan informasi dan mengadakan kontak yang mungkin berguna untuk invasi Mountbatten ke Malaya yang direncanakan dilakukan pada 9 September. Sebuah unit keempat, dipimpin oleh Lt. Brondgeest dari angkatan laut, dan seperti unit-unit yang lain hampir seluruhnya terdiri dari orang Belanda, mendarat dekat Pangkalan Brandan pada 25 Agustus. Pada akhir Agustus semua unit mendapat instruksi untuk meninggalkan kemah mereka dan menghubungi komandan-komandan Jepang setempat di Kutaradja (kelak Banda Aceh), Rantau Prapat, Bagan Siapiapi, dan Medan, untuk memastikan keselamatan tawanan perang Sekutu dan tawanan biasa.[47] Pada 1 September Brondgeest membuka kantor di hotel utama Medan, dan dari situ melakukan kontak tidak saja dengan Jepang, tetapi juga dengan Sultan Langkat dan Sultan Deli dan pemuka-pemuka Indonesia yang lain yang, sambil menuntut sejumlah reformasi, berjanji akan bekerja sama dengan Belanda.

Brondgeest dengan cepat sampai pada kesimpulan bahwa tidak banyak yang dapat diharapkan dari Inggris maupun Jepang, tetapi dengan bertindak sendiri dengan dukungan orang Ambon dan orang Menado setempat, para perwira Belanda dapat mengendalikan Medan dan membendung gerakan besar-besaran Republik sampai pasukan Belanda dapat mendarat. Melalui atasannya perwira Belanda di ADCS, Laksamana Helfrich, ia mendapat izin untuk "membentuk angkatan kepolisian untuk mengalihkan kekuasaan ke dalam tangan kita atas seluas mungkin wilayah Sumatra Timur".[48] Pada 14 September satu lagi komando Belanda, di bawah pimpinan Lt. Westerling yang

sangat keras dan kemudian terkenal (dalam arti buruk), dan tiga sersan Belanda diterjunkan di Medan bersama 180 revolver untuk melatih dan mempersenjatai angkatan kepolisian ini. Pada awal Oktober Westerling tampaknya berhasil membangun pasukan dengan persenjataan cukup lengkap dan terlatih, yang terdiri dari hampir dua ratus orang, dengan beberapa ratus lagi eks-tawanan perang yang sudah tidak sabar menunggu untuk bergabung jika ada senjata. Pasukan ini menjaga instalasi-instalasi strategis seperti listrik dan air bersih, dan mengadakan patroli teratur di Medan dan di jalan ke Belawan dengan dua buah kendaraan lapis baja Jepang sitaan.[49] Belanda mengaku, dengan sangat berlebih-lebihan, mampu mengendalikan kota itu sampai pasukan Inggris tiba.[50]

Selama bulan pertama setelah Jepang menyerah, kontrol radio dan perbekalan dari udara oleh Sekutu jauh lebih baik di Sumatra daripada di Jawa. Mulai dari 21 Agustus selebaran mulai dijatuhkan di berbagai tempat di Sumatra atas nama NICA (Netherlands Indies Civil Administration).[51] Dalam beberapa pekan setelah Jepang menyerah administrasi sementara NICA untuk Sumatra, di bawah pengawasan militer Sekutu, dibentuk di bawah Dr. Beck dan Residen Bruggemans, keduanya dibawa dari kamp Belanda di Rantau Prapat. Pada 3 Oktober sekitar 60 pejabat kunci dari administrasi masa sebelum perang dibawa dari kamp ke Medan untuk mulai secara rahasia memulihkan *ancien régime* yang telah disesuaikan.[52] Di Sumatra Barat Residen Bosselaer bertindak lebih jauh lagi, yakni berupaya memulihkan tata administrasi NICA dan mencoba mengirimkan instruksi resmi kepada para *demang*.[53]

Pengumuman mengenai Jepang menyerah pada 22 Agustus umumnya diartikan bahwa majikan lama akan kembali, dan penyesuaian-penyesuaian internal harus dilakukan. Orang-orang Belanda tahanan di kamp-kamp mereka dibanjiri hadiah dan kunjungan dari orang Indonesia yang ingin mengucapkan selamat, baik ikhlas maupun karena ada kepentingan. Orang Tionghoa di mana-mana bersorak sorai gembira melihat apa yang mereka yakini sebagai kemenangan bagi tanah leluhur mereka. Kelompok *kerajaan*, yang kehilangan kekuasaan dan status di tangan Jepang, tidak merahasiakan harapan mereka bahwa mereka akan dapat memperoleh kekuasaan dan status kembali di bawah Belanda. Akhir bulan puasa pada 7 September menjelma menjadi kesempatan untuk menjalankan berbagai upaya untuk memulihkan hubungan dengan tokoh-tokoh pro-Belanda terkemuka. Pada 6 Oktober, menurut perkiraan ada sekitar 30.000 orang yang menghadiri penobatan Sultan Deli yang baru, yang sikap skeptisnya terhadap Republik sudah menjadi rahasia umum dan tercermin dalam tata cara resmi susunan tempat duduk para tamu.[54]

Mereka yang banyak dirugikan dengan kembalinya Belanda pada awalnya lebih cenderung kehilangan semangat daripada semakin militan. Seorang dokter Indonesia yang pernah mengepalai BOMPA cabang Simelungun bunuh diri di Pematang Siantar setelah diwawancarai oleh sebuah regu Palang Merah Swiss. Banyak orang yang melarikan diri ke wilayah-wilayah lain Sumatra atau ke Jawa, khawatir akan menjadi korban balas dendam dari musuh-musuh yang mereka ciptakan karena mereka bekerja sama dengan Jepang. Sjafei, pemimpin Sumatra yang sudah disiapkan sebelumnya, meninggalkan kantornya di Bukittinggi dan pergi Kayu Tanam untuk menunggu perkembangan lebih lanjut. Sebagian besar rakyat menunggu dengan harap-harap cemas bahwa menyerahnya Jepang berarti berakhirnya kekurangan pangan, pakaian, dan obat-obatan yang demikian luar biasa. Penderitaan buruh perkebunan demikian hebat sehingga mereka akan mendukung siapa saja yang dapat menyelamatkan mereka dari kelaparan.[55]

Perpecahan sosial dan suku yang sangat tajam di Sumatra Timur menyebabkan sangat sulit bagi Hasan dan Amir untuk membentuk sebuah pemerintah di situ. Kedua pemimpin ini, setelah menumpang kendaraan menuju utara dari Palembang dan membahas keputusan-keputusan PPKI dengan beberapa pemimpin di sepanjang perjalanan mereka, terguncang oleh laporan-laporan yang datang dari karesidenan mereka sendiri. Mendengar di Tarutung bahwa sultan-sultan berencana menangkap semua orang yang mereka anggap bekerja sama dengan Jepang, Dr Amir khawatir mengenai jiwanya. Laporan-laporan ini ternyata, tidak lama kemudian, hanya berdasarkan beberapa pertemuan antara para sultan, pemimpin-pemimpin terkenal, seperti Karim M.S. yang komunis dan Luat Siregar, dengan Jepang mengenai penjagaan ketertiban umum selama masa peralihan. Namun Amir diam-diam mundur ke Tanjung Pura pada September, padahal ia telah diangkat sebagai anggota kabinet pertama Sukarno. Kepada sejumlah teman ia mengatakan bahwa seluruh peristiwa proklamasi di Jakarta *sandiwara* belaka.[56]

Jauh daripada memimpin revolusi, Medan ketinggalan jauh di belakang dibandingkan dengan kota-kota yang lain. Meski ia kembali ke Medan pada 27 Agustus, Hasan baru berhasil mengadakan pertemuan dengan kelompok elite pada 3 September. Kemudian, lagi-lagi dua pekan kemudian, mereka bahkan menolak membentuk Komite Nasional karena para sultan keberatan. Kemajuan tidak ada sampai akhir September.[57]

Lambatnya Medan bergerak semakin mencuatkan masalah kepemimpinan se-Sumatra yang sudah terlihat oleh sejumlah anggota PPKI sebelumnya. Bukittinggi dan Palembang merasa punya hak seperti Medan untuk memimpin

revolusi Sumatra. Tuntutan Bukittinggi bertumpu pada kepemimpinannya pada bulan-bulan terakhir sebelum Jepang menyerah. Selama Agustus Adinegoro aktif mengirimkan berita dan saran dengan kawat kepada tokoh-tokoh kunci di seluruh pulau itu. Pada 29 Agustus Sjafei mengakui dan menerima proklamasi kemerdekaan "atas nama rakyat Indonesia di Sumatra", sedangkan *pemuda* Bukittinggi membentuk pimpinan pelaksana PRI (Pemuda Republik Indonesia) untuk Sumatra dan juga untuk Sumatra Barat.[58]

Tuntutan Dr. Gani di Palembang berpijak pada nasionalisme dan kepemimpinannya atas partai negara PNI. Meski Sukarno sudah membekukan partai ini pada 31 Agustus, Sumatra baru mengetahuinya jauh hari kemudian. Gani sementara itu mengangkat pemimpin-pemimpin politik melalui telegram kepada pimpinan pelaksana PNI Sumatra, termasuk tokoh-tokoh berbagai ragam seperti Karim M.S. yang komunis dan pemuka Aceh Teuku Njak Arif. Pada akhir November PNI masih tetap berbicara mengenai dirinya sebagai partai pemerintah di bawah pimpinan Sukarno, meski tidak banyak mendapat dukungan rakyat di luar Sumatra Selatan.[59] Gani juga merasa bahwa ia patut didahulukan karena ia telah memperlihatkan prakarsa politik yang lebih besar daripada pemimpin-pemimpinn dukungan Jepang lainnya. Ketika mendengar secara resmi pengangkatan Hasan sebagai Gubernur, Gani mengirim utusan pribadi kepada Sukarno untuk mengajukan protes bahwa "sejak awal revolusi tidak ada satupun laporan yang terdengar mengenai perebutan kekuasaan di utara".[60]

Pernah dikemukakan[61] bahwa salah satu sebab mengapa gerakan kemerdekaan di Sumatra pada awalnya berjalan lambat ialah sikap yang berbeda antara Angkatan Darat Ke-25 dengan Angkatan Darat Ke-16 setelah Jepang menyerah. Memang benar bahwa orang-orang Jepang di Sumatra secara pribadi sangat ragu mengenai kemungkinan *merdeka* dan barangkali menularkan sikap ini kepada kenalan-kenalan mereka orang Indonesia. Namun juga benar bahwa di Sumatra tidak ada seorang seperti Laksamana Admiral Maeda untuk bertindak sebagai bidan pelindung saat Republik lahir, meski ada orang-orang Jepang terkemuka yang berpihak kepada kelompok nasionalis. Tetapi yang jelas, orang Jepang di Sumatra sama enggannya seperti rekan-rekan mereka di Jawa untuk melaksanakan instruksi-instruksi Sekutu yang dapat mengakibatkan mereka harus berhadapan dengan rakyat Indonesia. Kebijakan non-intervensi Jenderal Tanabe diungkapkan dengan jelas sekali dalam sebuah telegram tiga butir kepada salah satu perwiranya pada 7 Oktober:

1. Angkatan darat Jepang harus bersikap netral terhadap gerakan kemerdekaan Indonesia.
2. Pergerakan pasukan militer Jepang harus ditujukan terutama untuk memelihara keamanan dan ketertiban.
3. Kita harus berusaha sekuat tenaga untuk menghindari konflik dengan orang Indonesia.[62]

Mr. Hasan dan Dr. Amir keduanya melihat sikap bersahabat Jepang di Bukittinggi. Jepang menyampaikan kepada mereka ketika mereka dalam perjalanan pulang dari Jakarta bahwa Jepang akan mengalihkan semua fungsi pemerintahan kepada orang Indonesia. Jenderal Tanabe, sesuai dengan ciri khas seorang militer, menambahkan, "Dalam revolusi ini, pastikan militer terlatih baik dan terpimpin baik, dan memiliki Semangat yang baik."[63] Pada kesempatan manapun orang Jepang di Sumatra tidak pernah menggunakan kekerasan untuk mencegah pernyataan kemerdekaan di Sumatra, kecuali jika ini mengakibatkan keamanan mereka terancam. Tindakan-tindakan kejam Jepang, Terutama di Tebing Tinggi dan Langsa pada Desember, terjadi setelah Sekutu mendarat, sebagai akibat dari instruksi-instruksi khusus dari Sekutu atau sebagai murni pembunuhan balas dendam.

Mendirikan Republik

Instruksi-instruksi PPKI diungkapkan pertama kali kepada elite terbatas yang terdiri dari politisi dan administrator terkemuka pada masa pendudukan Jepang dan dikelompokkan dalam berbagai *H k kai* atau badan-badan setara itu di setiap karesidenan. Pada akhir Agustus kelompok-kelompok hampir di setiap karesidenan mengetahui dari Amir dan Hasan atau melalui telegraf bahwa mereka diharapkan membentuk KNI, PNI, dan badan paramiliter. Di pihak lain, mereka tidak mendapat tuntunan dari atas mengenai siapa yang seharusnya mengambil prakarsa dalam tugas-tugas ini atau dalam menjalankan pemerintahan. Tetapi ada kepemimpinan nasionalis yang sudah jelas: kelompok *Hokokai* mengubah diri menjadi KNI (di Aceh menjelang akhir Agustus, di Sumatra Barat pada 30 Agustus, di Palembang pada 3 September, dan di Tapanuli menjelang akhir September). Pemerintah terus bekerja seperti ketika pada waktu sebelum Jepang menyerah, orang-orang Jepang yang menjadi kepala-kepala bagian tetap datang ke kantor dan mengibarkan bendera Jepang, meski mereka, tentu saja, tidak peduli pada keputusan-keputusan yang diambil.

Hanya di Palembang ada kebijakan matang yang dihasilkan oleh kelompok elite untuk mengambil alih kekuasaan dari Jepang. Dr. Gani adalah salah satu dari dua *fuku-ch kan* (wakil residen) yang menduduki jabatannya selama periode persiapan kemerdekaan Jepang, dan ia memiliki kelebihan tambahan berupa citra anti-Jepang yang meyakinkan. Ia bertindak penuh percaya diri untuk membentuk sebuah Pusat Pemerintahan Bangsa Indonesia pada 23 Agustus, yang mendapat pengakuan Jepang sebagai penguasa bawahan yang bertanggung jawab untuk menjaga jangan sampai terjadi bentrokan antara suku-suku Indonesia dengan penduduk Tionghoa yang sedang merayakan [kemenangan komunis di Cina]. Dari 6 September Gani mulai mendorong pejabat pemerintah untuk menghubungi dia secara langsung, dan pada 26 September, setelah meminta dan mendapat wewenang dari Jakarta, KNI mengumumkan Gani sebagai residen dan meminta pejabat pemerintah untuk tidak lagi mengakui orang Jepang yang menjadi atasan mereka. Dua pekan berikutnya menyaksikan kelompok nasionalis berangsur-angsur meyakinkan pegawai kantor, melalui bujukan dan intimidasi, untuk melawan atasan mereka dan memaksa mereka untuk tidak datang lagi ke kantor.[64]

Di Palembang *pemuda* militan yang mengintimidasi pejabat-pejabat tinggi untuk mendukung Republik selama tiga malam pertama bulan Oktober. Di karesidenan-karesidenan yang lain prakarsa berada dalam tangan *pemuda* sejak dari awal. Seperti diakui oleh satu penerbitan resmi, "bulan-bulan pertama revolusi adalah bulan-bulan *pemuda*".[65] Tanpa tekanan dari *pemuda*, tidak dapat dibayangkan adanya pemerintah Republik yang dapat berjalan di Sumatra sebelum Sekutu mendarat.

Benedict Anderson merumuskan dengan sangat baik identitas khusus *pemuda* pada akhir pendudukan Jepang dan dampak dari kebijakan-kebijakan Jepang atas mereka.[66] Dibandingkan dengan di Jawa, di Sumatra Jepang tidak banyak mengambil langkah-langkah untuk mengerahkan *pemuda* untuk upaya perang. Namun demikian ada sekelompok elite pemuda yang dapat dikenal dengan mudah, cukup umur untuk duduk di sekolah menengah pada masa pra- perang tetapi tidak memiliki kepentingan dengan pusat kekuasaan masa pra-perang, dan dilatih oleh Jepang untuk menduduki posisi-posisi dengan tanggung jawab khusus di Sumatera Baru. Unsur yang paling penting dari kelompok ini adalah mereka yang sudah menjalani pelatihan perwira sebagai *Giy gun*, *Heih* , *Tokubetsu Keisatsutai* (polisi cadangan penjaga pantai, jembatan, dsb.), *Tokubetsu Hik j Kinmutai* (polisi cadangan penjaga lapangan terbang), dan organisasi-organisasi semacam itu. Organisasi yang terpenting dari semua ini, *Giy gun* atau *lasjkar rakjat* (dinamakan

Peta di Jawa), didirikan di Sumatra pada November 1943 sebagai basis untuk angkatan bersenjata Indonesia yang berdiri sendiri dengan perwira-perwiranya sendiri hingga pangkat kapten. Prajurit dilatih dan diasramakan dekat karesidenan asal mereka masing-masing Kekuatan total *lasjkar rakjat* di Sumatra barangkali sekitar 30.000 orang pada waktu Jepang menyerah, meski dari sisi penyebaran di beberapa daerah jumlahya lebih besar, seperti Aceh (5.000-6.000), daripada di daerah-daerah lain seperti Sumatra Timur (1.400). Pada Agustus 1945 beberapa puluh perwira angkatan pertama yang menjalani pendidikan telah mencapai pangkat letnan satu, dan angkatan kedua letnan dua. Seperti di Jawa, kombinasi disiplin yang keras dan diskriminasi ras yang diterapkan Jepang melahirkan perwira-perwira *Giy gun* berjiwa sangat nasionalis. Banyak dari mereka yang bersepakat di antara mereka sendiri bahwa jika terjadi invasi oleh Sekutu mereka akan menyerang Jepang terlebih dahulu dan berurusan dengan Sekutu sesudah itu. Pada Juli 1945 *Giy gun* Lt. H. Sitompul melancarkan pemberontakan, yang sia-sia, di barak-barak Pematang Siantar.[67] Antara 19 dan 21 Agustus, sebelum berita mengenai menyerahnya Jepang diumumkan, senjata semua *Giyugun* dilucuti dan mereka dikirim kembali ke daerah asal masing-masing. Mereka demikian terpana sehingga tidak sempat mencoba mengadakan perlawanan.[68]

Sumber lain kepemimpinan *pemuda* adalah kelompok anak-anak muda terpelajar yang terlibat dalam kegiatan propaganda, berita, atau media komunikasi Jepang. Merekalah yang pertama-tama mendapat laporan mengenai perkembangan-perkembangan terakhir yang menggairahkan di Jawa dan menjadi pusat-pusat jaringan informasi yang banyak bermunculan. Dalam suasana penuh harapan bercampur ketidakpastian itu, *pemuda* militer, *pemuda* polisi, dan *pemuda* dari kantor-kantor Jepang berkumpul di tempat tertentu untuk bertukar berita mengenai apa saja yang menyangkut Republik di Jawa atau mengenai maksud-maksud Sekutu. Penginapan Fuzi Dori 6 (Jl. Jakarta) di Medan adalah sebuah contoh. Desas desus mengenai apa yang akan dilakukan Belanda untuk menghukum orang-orang yang bekerja sama dengan Jepang berangsur-angsur membangkitkan semangat perlawanan, yang semakin dikobarkan oleh perkelahian-perkelahian yang terjadi di jalan-jalan di berbagai kota dengan warga Tionghoa yang tidak tanggung-tanggung memperlihatkan kegembiraan mereka. Selama September pertemuan-pertemuan dan jaringan-jaringan informasi informal ini menjelma menjadi organisasi-organisasi beridentitas yang jelas. Menjelang akhir bulan selebaran pengumuman proklamasi mulai dicetak, dan *pemuda* mulai menunjukkan rasa tidak sabar melihat politisi generasi lebih tua tidak melakukan apa-apa.[69]

Medan adalah contoh ekstrim ibukota karesidenan yang tidak melahirkan pemimpin dari kalangan kelompok-kelompok yang saling bersaing selama pendudukan Jepang. Meski ada kontak-kontak terbatas dengan politisi sayap kiri dan guru-guru Taman Siswa, langkah *pemuda* Medan terhalang oleh kenyataan bahwa baru pada pertengahan September mereka tahu mengenai pengangkatan Mr. Hasan sebagai gubernur Republik. Mereka membentuk Barisan Pemuda Indonesia (BPI) pada 21 September, seluruhnya atas prakarsa mereka sendiri. Tekad mereka yang semakin besar untuk menangkal kembalinya Sekutu baru menjadi fokus perhatian setelah suratkabar pertama pasca-perang, *Pewarta Deli,* terbit pada 29 September. Koran itu menurunkan laporan dari radio Australia bahwa Sekutu telah menempatkan pengawalan polisi di rumah Sukarno. Dengan latar belakang situasi pada waktu itu, ini ditafsirkan sebagai penahanan atas Sukarno dan pembubaran Republik. *Pemuda* berlarian dari satu pemimpin ke pemimpin yang lain untuk mengetahui apa sebenarnya yang telah terjadi, sambil terus menekan Hasan dan kelompok generasi tua yang bersikap terlalu berhati-hati.

Dalam pertemuan terbuka BPI pada hari berikut di Sekolah Taman Siswa, pemimpin redaksi yang dituduh memperkeruh suasana, Mohammad Said, diminta untuk meminta maaf karena mencetak laporan yang provokatif, Hasan berbicara mengenai proklamasi kemerdekaan di Jakarta, dan *pemuda* dan pemimpin-pemimpin radikal memulai kampanye untuk kemerdekaan. *Pemuda* mendesak Hasan untuk memproklamirkan pemerintah Republik di situ juga. Ia dengan sangat berhati-hati meminta waktu dengan alasan yang agak dangkal bahwa sepulang dari Jakarta wewenang tertulis yang dikantunginya hanya sebagai *wakil mutlak* (plenipotentiary) Sukarno, bukan sebagai gubernur Republik (padahal pengangkatan gubernur sudah diumumkan di Jakarta pada Agustus). Hasan kemudian mengirim kawat ke Jakarta untuk minta penegasan mengenai ini dan mendapat balasan pada 2 Oktober. Sementara itu pernyataan Jenderal Christison pada 1 Oktober bahwa Sekutu tidak akan membubarkan pemerintah Republik pasti membuyarkan keragu-raguan yang masih dalam hati para pemimpin golongan tua. Hasan mendapat dukungan dari para politisi terkemuka pada sebuah pertemuan pada 2 Oktober dan mulai mengeluarkan peryataan-pernyataan resmi dan keputusan-keputusan pada hari berikut.[70] Satu dari instruksi pertama ini ialah pengangkatan residen-residen Republik, yang semuanya, kecuali untuk Sumatra Timur sendiri, adalah para pemimpin yang muncul ke permukaan dan menduduki tempat terkemuka pada saat-saat terakhir pendudukan Jepang.[71]

Begitu *pemuda* dan pemimpin-pemimpin golongan tua akhirnya dapat, walau agak terlambat, menyatukan langkah, Medan dapat paling tidak mulai dapat berfungsi sebagai sebuah ibukota Sumatra sesuai dengan keputusan yang telah diambil untuk itu. Keputusan-keputusan gubernur, yang diterbitkan oleh suratkabar resmi Republik, *Soeloeh Merdeka,* mulai 4 Oktober, merupakan pendorong untuk langkah-langkah yang lebih luas. Di karesidenan-karesidenan terpencil, telegram pengangkatan residen oleh gubernur merupakan langkah awal yang efektif bagi gerakan Republik. Dalam hal *pemuda* sudah dikerahkan, pengerahan ini menambah besar legitimasi yang diperlukan untuk meyakinkan para pemimpin golongan tua yang cenderung bersikap lebih berhati-hati. Pekan antara gubernur menduduki jabatan dan pendaratan Sekutu adalah pekan yang sangat kritis. Rapat-rapat umum diselenggarakan untuk menghormati *Merah-Putih,* dan bendera itu dikibarkan dari kantor ke kantor dan para pejabat Jepang yang mengepalai kantor bersangkutan diminta untuk tidak masuk kantor. Hubungan antara petinggi Indonesia dan petinggi Jepang di sebagian besar karesidenan masih baik, sehingga memungkinkan mereka dari sejak awal memastikan tidak akan ada kekerasan yang melampaui batas. Satu-satunya senjata yang dicoba digunakan orang Jepang adalah gertakan, dan bila ada perlawanan terhadap gertakan itu, paling tidak sejumlah perwira Jepang tampak benar-benar berbesar hati bahwa orang Indonesia menunjukkan keberanian.[72] Pada waktu Divisi India Ke-26 menduduki Medan, Padang, dan Palembang (10-14 Oktober), aparatus pemerintah di ketiga kota ini berada dalam tangan Republik, dan kendali Republik di wilayah-wilayah kunci selebihnya sudah mencapai tahap lanjut untuk ditegakkan (di Aceh pada 14 Oktober dan di Tapanuli pada 17 Oktober). Kekuatan Republik di beberapa daerah masih harus diuji dalam kaitan dengan kekuatan Sekutu dan kekuatan birokrasi *kerajaan* yang umumnya pro-Belanda itu. Tetapi suatu kemenangan besar bahwa birokrasi-birokrasi pusat yang sebelumnya berada di bawah kendali langsung Jepang sekarang bersedia mengikuti perintah para pemimpin Republik.

Pekan kritis ini juga menyaksikan rasionalisasi gerakan *pemuda* di sebagian besar daerah. Menjawab kebijakan Republik sebelumnya untuk membentuk BKR (sejak 5 Oktober dikenal sebagai TKR-Tentara Keamanan Rakjat) sebagai angkatan bersenjata yang terdiri terutama dari unit-unit didikan Jepang, kelompok-kelompok *pemuda* terpecah. Kelompok-kelompok yang mendapat latihan militer resmi membentuk divisi TKR di setiap karesidenan, dan biasanya sampai batas tertentu berada di bawah kendali pejabat Republik setempat. Orang-orang sipil lainnya dengan cepat menyatakan diri sebagai bagian dari gerakan

pemuda se-Indonesia dan menggunakan nama-nama yang sudah terkenal di Jawa. Angkatan Pemuda Indonesia (API) dari Jakarta ditiru di Lampung dan Jambi dan oleh beberapa *pemuda* di Palembang. Di seluruh Sumatra Barat dan Utara nama yang dapat diterima adalah Pemuda Republik Indonesia (PRI), sama dengan kelompok *pemuda* yang dominan pada waktu itu di Surabaya. Semua organisasi Sumatra ini dengan patuh menyatakan diri masing-masing sebagai cabang Pesindo (Pemuda Sosialis Indonesia) setelah penggabungan Java API dan PRI di Jawa menjadi kelompok baru itu di Kongres Pemuda di Jogjakarta pada 9 November. Dalam kenyataan, kelompok-kelompok *pemuda* Sumatra sedikit sekali persamaannya dengan unsur API/PRI/Pesindo di Jawa. Jaringan kontak-kontak anti-Jepang yang dibentuk oleh Sjahrir selama perang di antara pemuda terdidik tidak melebarkan sayap keluar Jawa. Kelompok pemuda yang bolah dikatakan tidak diwakili di Sumatra adalah *pemuda* anti-kolaborator yang sangat keras, yang, dengan inti khusus kelompok *pemuda* yang bernaung di bawah kepemimpinan Sjahrir-Sjarifuddin, merupakan elemen paling penting dalam politik Jawa pada enam bulan pertama kemerdekaan. Ciri utama API/ PRI/ Pesindo di Sumatra bukan kaitan dengan salah satu politisi yang saling bersaing di Jakarta, tetapi hasrat untuk merangkul semua *pemuda* dalam perjuangan bersama, untuk menolak pengelompokan menurut daerah dari masa lalu, dan untuk menekankan sekeras mungkin sebuah identitas *pemuda* baru se-Indonesia. Perubahan nama kelompok-kelompok ini biasanya diumumkan dengan bangga dengan kata-kata "berdasarkan instruksi dari Jawa". Hanya Palembang yang tidak mengikuti kecenderungan ini. Di situ pengaruh Dr. Gani mendominasi kelompok awal BPRI yang berhasil diubahnya kemudian menjadi Napindo, sayap *pemuda* yang kuat PNI Sumatra, tanpa bandingan di Jawa.[73]

Baik TKR maupun kelompok PRI/API dengan segera menyusun barisan sebagai satuan militer dan mencoba mengumpulkan senjata apa saja dari pihak Jepang. Hanya saja, dalam hal TKR, organisasi ini relatif lebih kokoh dan bersedia dikendalikan dari pusat, gerakan *pemuda* sipil lebih bersifat sebuah federasi yang longgar kelompok-kelompok pemuda yang suka berkelahi, yang sering bersaing untuk mengontrol suatu wilayah. Meski anggota-anggota elite politik golongan tua masing-masing sampai batas-batas tertentu memiliki pengaruh atas kelompok-kelompok *pemuda* sipil ini, tidak ada kepastian bahwa para pemimpin Republik akan mendapat dukungan dari anggota-anggota elite itu bila terjadi krisis dalam tubuh Republik.

Perimbangan kekuatan antara TKR dengan PRI/API sangat berbeda dari satu karesidenan ke karesidenan yang lain. Di Aceh, Tapanuli, dan Palembang

TKR, karena terdiri sebagian besar dari *Giyugun* dan sejak dari awal mendapat dukungan dari residen, relatif kuat, tetapi tidak dalam posisi untuk mendikte. Republik sangat beruntung, khususnya di Palembang, karena residen juga memiliki pengikut pribadi di kalangan *pemuda* sipil. Di kutub satu lagi, TKR Sumatra Timur hanya satu dari sekian banyak organisasi yang turut berjuang dan lebih lemah daripada PRI/Pesindo secara keseluruhan.

Tahap kekerasan revolusi Sumatra meletus begitu Sekutu mendarat pada Oktober, ketika *pemuda* bentrok dengan Belanda-Belanda bekas tawanan perang, orang Ambon, orang Jepang, dan akhirnya dengan tentara Sekutu sendiri. Tetapi pada awal Oktober sudah terlihat dengan jelas ciri-ciri utama revolusi di Sumatra. Dibandingkan dengan Jawa, fakta utama mengenai Sumatra adalah lemahnya kepemimpinan Republik. Kepemimpinan di situ boleh dikatakan tidak mampu menegakkan wewenang atas atau mencegah bentrokan antara kelompok-kelompok yang memiliki senjata dan menganggap diri, bukan tanpa alasan, sebagai pengawal revolusi. Meski ada perbedaan besar antara satu karesidenan dengan karesidenan yang lain, dengan Sumatra Selatan paling banyak mendekati keadaan di Jawa, dapat disimpulkan bahwa tingkat kekerasan intra-Indonesia di Sumatra jauh lebih tinggi pada awal revolusi.

Khususnya, revolusi sosial yang jauh lebih dalam mempengaruhi Sumatra daripada Jawa menjelang akhir 1945 dan awal 1946 berada diluar jangkauan pimpinan Republik untuk mencegah atau mengendalikannya (lihat bab berikut). Bahkan lebih-lebih lagi daripada di Jawa, revolusi dilancarkan dan iramanya ditentukan oleh kelompok *pemuda* yang agak memandang rendah pejabat-pejabat pemerintahan.

Persoalan Identitas Politik Sumatra

Hanya satu kali dalam sejarah pulau Sumatra memiliki identitas hukum dan politik yang bermakna. Suku-suku bangsanya yang penting-penting dan berimbang satu sama lain—Minangkabau, Batak, Aceh, dan Palembang—dapat dipersatukan hanya oleh wewenang yang lebih luas Batavia/Jakarta. Tetapi selama satu dekade, 1938-48, semua penguasa, berturut-turut dari Belanda, Jepang, hingga Republik memang memilih untuk memperlakukan pulau itu sebagai sebuah satuan administrasi. Salah sebab utama mengapa Belanda menempatkan seorang gubernur Sumatra di Medan adalah "kesadaran akan kesatuan Sumatra yang sudah bersemi dan untuk selanjutnya akan dikembangkan melalui pembentukan satu provinsi (Sumatra)".[74] Ini upaya

yang sangat dangkal dan sia-sia untuk menggiring gerakan populer Indonesia ke saluran-saluran kedaerahan. Peran penting pembentukan Sumatra sebagai satu unit adminisrasi ini ialah dapat menjadi contoh bagi kelompok Republik kelak dan lahan latihan bagi para pejabat seperti Mr. Hasan.

Pemisahan Sumatra sepenuhnya dan secara efektif dari Jawa pada masa pendudukan Jepang melahirkan situasi yang sama sekali baru. Selama tiga tahun, propaganda ditujukan terutama untuk pembangunan *Sumatera Baru.* Angkatan Darat Ke-25 Jepang tidak diragukan lagi memiliki kesempatan untuk memanfaatkan dan mendorong rasa kedaerahan Sumatra dengan membentuk kepemimpinan Sumatra tersendiri. Untung bagi persatuan Republik bahwa Jepang tidak berminat membangun kepemimpinan apapun, dan baru mengambil langkah-langkah untuk ini pada dua bulan terakhir mereka berkuasa, dan bahkan inipun sangat terbatas. Namun tidak mengherankan bahwa periode pendudukan Jepang memang mendorong sejumlah pemimpin untuk menimbang-nimbang dalam pikiran mereka bahwa Sumatra berotonomi merupakan suatu ideal yang dapat diwujudkan. Ini terutama berpengaruh pada kelompok elite kecil yang sudah cukup umur untuk menjadi anggota Jong Sumatra ketika mereka bersekolah pada tahun 1920-an dan sekarang menduduki jabatan-jabatan penting di bawah Jepang. Bagi para pemimpin berjiwa aristokrat dan konservatif pengaruh ini negatif sifatnya, dalam arti menolak Jawa sebagai sumber ekstremisme politik dan penyimpangan dari Islam. Namun, ada sejumlah pendukung Republik sejati yang melihat Sumatra dari sudut pandang positif. Mayoritas dari ini tampaknya orang Minangkabau, terutama orang Minangkabau yang tinggal di wilayah-wilayah lain Sumatra selain dari kampung halaman mereka sendiri. Contoh orang Minangkabau yang paling berterus terang ialah Dr. Amir, satu dari pembela paling gigih kesatuan budaya *Sumatera Baru* selama tahun-tahun peperangan.[75] Sebagai wakil gubernur Sumatra dari Desember 1945 ia tetap ingin membangun aparatus pemerintahan berotonomi penuh di Medan. Setelah pengucilannya dari Republik pada April berikut, ia menjadikan dominasi Jawa sebagai tema utama kritiknya.

> Sampai sekarang persoalan persatuan ini tidak pernah dibahas secara terbuka di depan umum. Kami bertiga, yang menghadiri rapat Komite Persiapan Kemerdekaan di Jakarta pada Agustus 1945, berharap bahwa Sumatra mendapat otonomi mengenai urusan luar negeri dan dalam negeri di luar Republik, tetapi kami diperingatkan untuk tidak membentuk negara sendiri dengan kementerian-kementerian sendiri, dan sebagainya.[76]

Amir dan anggota-anggota "kabinet" Hasan yang lain, meskipun berulang kali menyatakan solider dengan Jawa, mengambil keputusan sendiri mengenai banyak masalah tanpa berkonsultasi dengan Jakarta, paling tidak sampai kunjungan Amir Sjarifuddin. Seandainya mereka lebih kuat sebagai kelompok, kemungkinan besar mereka akan menentang erosi berangsur-angsur otonomi mereka setelah itu yang dilakukan oleh pemerintah pusat. Tetapi *pemuda*lah yang memungkinkan Republik hadir di Sumatra dan yang tetap memiliki kekuatan fisik. Bagi *pemuda,* persatuan dengan Jawa, inilah di atas segalanya yang paling utama. Jawa adalah contoh tekad yang bulat untuk perjuangan, yang menunjukkan jalan menuju kemerdekaan dari kekuasaan Belanda yang pasti pulih jika tidak dilawan.

Petunjuk yang paling jelas mengenai kuatnya hasrat yang diilhami *pemuda* dan populer untuk mengikuti jejak Jawa adalah pengalaman Aceh. Sebelum perang Aceh masih menyerupai sebuah negeri yang ditaklukkan daripada bagian dari wilayah kekuasaan India Belanda. Kepemimpinan kekuatan dominan yang populer, PUSA, tidak syak lagi melihat segala sesuatu dari sudut pandang Aceh dan Islam, bukan dari sudut pandang Indonesia. Namun bahkan PUSA sendiri pun membutuhkan semangat *pemuda* pendukung Republik *pemuda* untuk melepaskan diri dari pemulihan kekuasaan Belanda dan *ulèëbalang*. Pada tahun pertama revolusi, Aceh adalah teladan kesetiaan keluar kepada pemerintah pusat.

Belanda, dalam menjalankan strategi federalismenya setelah perang, mengandalkan diri pada rasa kesukuan dan kedaerahan generasi lebih tua yang sudah sangat mereka kenal. Struktur payung yang logis bagi *Negara* (negara bagian) yang kemudian mereka dukung di Sumatra adalah pengelompokan se-Sumatra, untuk mengimbangi Jawa dan Indonesia Timur. Tetapi selain tidak dapat diterima karena merupakan bagian dari strategi kolonial Belanda, gagasan pengelompokan se-Sumatra itu juga dirasakan tidak menarik bagi Sumatra Selatan dan sangat tidak menarik bagi orang Aceh dan orang Batak yang sangat berjiwa bebas itu.[77] Muktamar Sumatra yang didukung oleh kelompok federalis pada Maret-April 1949 seperti telah diperkirakan, gagal. Saat yang sangat singkat bagi persatuan Sumatra sudah berlalu, dan tekanan apapun dari Belanda kemungkinan besar tidak akan sanggup menghidupkannya kembali.

Lampiran 1

Anggota Dewan Penasihat Pusat Sumatra (Chūo Sangi In) [78]

Saya membuat kategori kasar menyangkut wakil-wakil sebagai berikut: gerakan Islam dengan (I), gerakan politik dengan (P), dan *kerajaan,* beberapa juga nasionalis moderat, dengan (K). Sebagian besar dari mereka yang tidak dapat dimasukkan ke dalam kategori apapun adalah pejabat yang diangkat Jepang tanpa pengikut. Di Tapanuli antagonisme antara Utara yang Kristen dan Selatan yang Islam dipakai sebagai patokan utama untuk penggolongan ke dalam kategori bersangkutan.

Aceh

Terpilih : T. Njak Arif (K), Ketua, Dewan Aceh

Diangkat: Tgk. Mohd. Daud Beureu'eh (I), Ketua PUSA
T. Tjut Hasan (K), Wakil-Ketua Dewan Aceh
T.T.P. Mohd. Ali (K), Panglima Sagi XXII Mukim
Tgk. Mohd. Hasbi (I), Wakil Ketua Maibkatra, dan pemimpin Muhammadiah

Sumatra Timur

Terpilih : Djamaluddin Adinegoro (P), Pemimpin redaksi *Kita-Sumatora-sinbun* dan Wakil Ketua Dewan Sumatra Timur (mundur setelah pemilihan) Tengku Damrah (K), keluarga istana Serdang

Diangkat: Tengku Othman (K), Pangeran Deli
Raja Kaliamsjah Sinaga (K), Raja Pematang Tanah Jawa
Dr. R. Pirngadi (P), pemimpin Parindra pra-perang
Hamka (I), Konsul Muhammadiah Sumatra Timur
Hsu Hua Chang (Tionghoa), Ketua Hohkiaw Medan

Tapanuli

Terpilih : Dr. Ferdinand Lumbantobing (North), Ketua Dewan Tapanuli

Firman Rangkuti gelar St. Soripada Mulia (Selatan)

Diangkat: Raja Saul Lumbantobing (Utara) Haji A. Aziz (Selatan)

Sumatra Barat

Terpilih : Mohd. Sjafei (P), Ketua Dewan Sumatra Barat
Chatib Suleiman (P), Wakil Ketua Dewan Sumatra Barat

Diangkat: Datuk Perpatih Baringek (K), pemimpin organisasi *adat*
A.R. Sutan Mansur (I), Konsul Muhammadiah Sumatra Barat
Dr. Mohd. Djamil, dokter medis non-politik

Riau*

Terpilih : Aminoedin (P), Ketua Dewan Riau

Diangkat : Orang Kaya Mohd. Djamil (K), keluarga Sultan Siak
Sjamsoeddin, *guncho* (perwira distrik)

Jambi

Terpilih : Abdoel Manan, Ketua Dewan Jambi

Diangkat : Abdoel Katab Makalam, Wakil Ketua Jambi

Palembang

Terpilih Dr. A. K. Gani (P), Ketua Dewan Palembang dan
dan pemimpin Gerindo sebelum perang
Abdoel Rozak (P)

Diangkat : Tjik Mat (P)
Kiai Hadji Tjik Wan (1)
Ir. Ibrahim (P), Wakil Ketua Dewan Palembang

Bengkulu

Terpilih : Abdoellah

Diangkat : Ir. Indra Tjahaja, Ketua Dewan Bengkulen
Mohd. Jasin

Lampung

Dipilih : Radja Pagar Alam (K)

Diangkat : Mr. Abdul Abbas (P), Ketua Dewan Lampung
(Koseikyokucho)

* Hanya daratan Sumatra; kepulauan itu digabung dengan Singapura.

Bangka-Belitung

Terpilih : M.A. Sjarif (P), Ketua Dewan Bangka-Belitung

Diangkat : Oen Lam Seng (Tionghoa), Wakil Ketua Dewan Bangka-Belitung

Lampiran 2

Anggota Panitia Penjelidik Persiapan Kemerdekaan (Sumatra)[79]

Ketua: Mohd. Sjafei Sekretaris: Djamaluddin Adinegoro

Anggota

Aceh:

	Tgk. Mohd. Daud Beureu'eh
Sumatra Timur :	Dr. Pirngadi
	Dr. Amir
	Mr. T Mohd. Hasan
	Hamka
	Tgk. Saibun Abdul Jalil Rahmat Sjah, Sultan Asahan
	Hsu Hua Chang
Tapanuli:	Dr. Ferdinand Lumbantobing
	Mr. Azairin
Sumatra Barat:	Dt. Perpatih Baringek
	A.R. Sutan Mansur
	Chatib Soeleiman
	Sjech Mohd. Djamil Djambek
Riau:	Aminoeddin
Jambi:	Dr. A. Sjagoff
Bengkulu:	It. Indra Tjahaja
Palembang:	Dr. A.K. Gani
	In Ibrahim
	K.H. Tjik Wan
Lampung:	Mr. Abdul Abbas
Bangka-Belitung:	M.A. Sjarif

Lampiran 3

Residen Pertama Republik di Sumatra

Karesidenan	Residen	Jabatan waktu pendudukan Jepang	Menjabat sampai
Aceh	Teuku Njak Arif	Ketua, Dewan Aceh dan nasihat chōkan	21 Januari 1946
Sumatra Timur	Mr. Mohd. Joesoef	Asisten walikota Jepang untuk Medan	29 Oktober 1945 (menjadi walikota Medan)
Tapanuli	Dr. Ferdinand Lumbantobing	Ketua, Dewan Tapanuli dan Hōkōkai, dan fuku-chōkan	September 1947
Sumatra Barat	Mohd. Sjafei	Ketua, Dewan Sumatra Barat dan Hōkōkai, dan Chūo Sangi In.	15 November 1945 (atas alasan "sakit")
Jambi	Dr. A. Sjagoff	Anggota PPPK (Sumatra)	Desember 1945 (ditangkap Jepang)
Riau	Aminoeddin	Ketua, Dewan Riau	Oktober 1945 (atas permintaan KNI)
Bengkulu	Ir. Indra Tjahaja	Ketua, Dewan Bengkulen	Mei 1946 (atas permintaan KNI)
Palembang	Dr. A.K. Gani	Ketua, Dewan Palembang dan Hōkōkai, dan fuku-chōkan	Mei 1946 (menjadi wakil gubernur)
Lampung	Mr. A. Abbas	Ketua, Dewan Lampung dan Hōkōkai	September 1946 (didaulat pemuda)
Bangka-Belitung	A. Sjarif	Ketua, Dewan Bangka-Belitung	Februari 1946 (Pendudukan Belanda)

14

Revolusi Sosial di Tiga Wilayah Sumatra

Rujukan "Revolusi" Indonesia sudah diragukan selama lebih dari seperempat abad, terutama pada periode akhir 1960-an dan awal 1970-an. Di Indonesia, para ahli strategi dari kelompok militer yang dominan pada waktu itu, berusaha menghindari istilah "revolusi" dan lebih suka menggunakan istilah "perang kemerdekaan", karena mereka ingin menekankan format non-revolusi dan stabil negeri itu sementara terus mengagung-agungkan peristiwa-peristiwa pada periode 1945-50 sebagai sumber legitimasi Angkatan Darat sendiri. Di tempat lain, terutama di Amerika Serikat dan Eropa, periode itu menyaksikan memuncaknya curahan perhatian kepada keberhasilan Vietnam dan Cina dalam mengerahkan dan memberi makan rakyat masing-masing, sehingga banyak aktivis, dan tidak sedikit pula ilmuwan, yang cenderung mengubah definisi "revolusi" sehingga hanya mencakup keberhasilan sebuah partai penganut Leninisme mengerahkan massa petani. Dari istilah "revolusi" kedua belah pihak menciptakan stereotipe politik, dan sepakat bahwa Indonesia tidak mengalaminya.

Konsep "revolusi" adalah salah satu konsep paling utama dalam perangkat analisis sejarah perbandingan. Digunakan untuk apapun istilah itu oleh para politisi, sejarawan mau tidak mau harus menggunakannya sebagai sebuah kategori, terlepas dari memuji atau menyalahkan. Sebuah revolusi adalah perombakan mendasar struktur system politik melalui kekerasan dalam waktu yang relatif singkat. Meski revolusi di dunia banyak sekali ragamnya, ada pola tertentu yang dapat dikenali dalam hampir semua revolusi, mulai dengan tindakan awal menghancurkan tata pemerintahan lama, dan berakhir dengan pembentukan pemerintahan tipe baru dan relatif stabil—biasanya jauh berbeda dari apa yang dibayangkan oleh pemuka-pemuka revolusi tahap pertama. Sejauh ini, revolusi Prancislah yang menghasilkan khazanah analisis sejarah yang terbesar, dan tipologi-tipologi revolusi biasanya memasukkannya ke dalam kategori revolusi utama atau "klasik", dengan Revolusi Rusia sebagai revolusi paling berpengaruh. Sejarawan berselisih pendapat mengenai seberapa luas atau

sempit akan ditarik garis batas bagi konsep “revolusi”, tetapi apapun definisi yang dihasilkan, definisi itu tidak akan memadai jika tidak mencakup paling tidak dua titik puncak yang penting.

Ada beberapa unsur yang sama pada kedua revolusi itu, dan pada revolusi-revolusi yang lain. Tahap pertama revolusi ialah pembentukan persekutuan idealistik berbagai kelompok politik, dari kelompok yang berhati-hati hingga kelompok yang radikal, untuk menumbangkan tata pemerintahan lama. Langkah ini, dan semangat yang ditimbulkannya, merangsang dan menggairahkan anak-anak muda—terutama anak-anak muda di kota tempat aksi-aksi terjadi. Seperti kata Wordsworth mengenai Revolusi Prancis: “Sungguh bahagia menjadi saksi fajar itu; tetapi masih muda itulah surga.” Perpecahan segera muncul di antara para anggota sekutu, dan revolusi bergerak ke kiri begitu tampak bahwa kekuatan fisik berada dalam tangan pihak yang memegang senjata atau anak-anak muda di jalan, bukan dalam tangan pemimpin-pemimpin lama. Akhirnya salah satu unsur dalam persekutuan yang menumbangkan pemerintahan lama berhasil memaksakan penyelesaian atas pihak-pihak yang lain—sering dibantu oleh sikap rakyat banyak yang muak terhadap anarki dan kekerasan yang merasuk ke dalam revolusi.

Inilah akhir dari proses revolusi, bahkan walaupun dampaknya baru dirasakan beberapa dekade atau bahkan beberapa abad kemudian. Penguasa baru, meski biasanya mewakili bagian yang lebih besar dari masyarakat daripada penguasa lama, tidak dapat mengandalkan diri kepada kepatuhan rakyat yang relatif pasif, seperti dilakukan oleh pemerintahan lama. Banyak pihak yang tidak puas karena tujuan-tujuan revolusi mereka tidak terpenuhi oleh penyelesaian yang dipaksakan tadi, dan karena itu mengecamnya sebagai “pengkhianatan revolusi” (“betrayal of the revolution”). Penguasa baru memiliki satu kelebihan, yakni mereka memiliki simbol-simbol pembangkit semangat yang kuat dan mitos-mitos revolusi (bendera, lagu perjuangan, slogan, pahlawan, peringatan tahunan, cita-cita kemerdekaan dan/atau persamaan dan persaudaraan). Semua ini menjadi landasan bagi persatuan pada derajat yang jauh lebih tinggi daripada sebelumnya, dan simbol-simbol ini dimanipulasi oleh penguasa baru dalam upaya mereka mencari legitimasi. Namun, masyarakat baru itu lebih sulit diatur daripada masyarakat lama, dan semangat berkobar-kobar yang dibangkitkan oleh revolusi makan waktu lama untuk mereda.[1]

Peristiwa-peristiwa yang terjadi menjelang akhir tahun 1970-an di Iran jelas termasuk revolusi tipe “klasik” ini. Demikian pula halnya dengan peristiwa-peristiwa yang terjadi di Indonesia mulai Agustus 1945. Revolusi Indonesia juga

bergerak dengan cepat ke kiri dari proklamasi sampai peristiwa 3 Juli [1946]; setelah itu revolusi cenderung pecah menjadi dua kekuatan utama dan konflik antara keduanya diselesaikan (untuk sementara) oleh peristiwa Madiun September 1948. Dari sisi revolusi yang murni dari dalam, peristiwa ini dan peralihan ke perang gerilya yang dengan segera mengikutinya menandakan kemenangan salah satu pihak dalam persekutuan revolusi—angkatan darat. Kemenangan ini diperumit oleh pertarungan dengan Belanda dan intervensi Perserikatan Bangsa-bangsa, sehingga dengan kata lain dapat dikatakan bahwa "settlement", penyelesaian, akhir revolusi itu baru terwujud jauh setelah itu, pada 1966.

Peranan penting yang dimainkan revolusi Indonesia dalam menentukan arah bagi Indonesia menjadi jelas jika kita bandingkan Indonesia pasca-revolusi dengan Malaysia—sebuah negara yang sampai batas tertentu memiliki latar belakang budaya dan sejarah yang sama [dengan Indonesia]. Beberapa dari perbedaan-perbedaan antara keduanya tak lain tak bukan adalah perbedaan-perbedaan yang juga kita temukan bila kita bandingkan Prancis pasca-revolusi dengan Inggris yang non-revolusi pada abad ke-19. Indonesia (seperti Prancis) memiliki simbol-simbol dan mitos-mitos revolusi yang menggugah jiwa, yang membantu menciptakan kebanggaan nasional, pemusatan politik dan keseragaman ideologi. Meski pun memiliki semua ini, kedua negeri pasca-revolusi ini mengalami insiden kekerasan dan kerusuhan politik yang relatif tinggi. Malaysia, seperti Inggris, mengikuti jalan pragmatis dan tanpa kekerasan, di situ perpecahan politik dilembagakan dan bukannya dihilangkan (Malaysia, meski jauh lebih homogen daripada Indonesia, tetap mempertahankan sistem federal dan sembilan raja, yang masing-masing bergiliran menduduki jabatan Kepala Negara, Yang Dipertuan Agung).

Dengan kata lain, dari sisi analisis sejarah, penggunaan istilah "revolusi" untuk peristiwa-peristiwa pada 1945-9 di Indonesia sudah benar dan banyak menolong. Konsep ini dalam kenyataan lebih tepat dan lebih membantu untuk menjelaskan Indonesia daripada untuk menjelaskan Vietnam, yang memiliki partai penguasa tunggal dari sejak proklamasi kemerdekaan (juga Agustus 1945) sampai hari ini, tanpa mengalami perubahan-perubahan intern yang sama dalam arus revolusi itu.

Kita berada di ruang yang lebih lapang ketika mencoba menentukan tipe revolusi yang dialami Indonesia. Istilah-istilah seperti "revolusi sosial" dan "revolusi borjuis" tidak jelas definisinya. Sama dengan peneliti-peneliti yang lain saya menggunakan istilah "Revolusi Nasional Indonesia", karena hasilnya yang paling mencolok, yaitu sebuah negara kesatuan. Tetapi seperti halnya dengan

semua revolusi, hasil yang dicapai baru terlihat jelas beberapa waktu setelah itu, dan sangat berbeda dari harapan dan cita-cita awal beberapa (barangkali semua) tokoh revolusi (Siapa, ketika menyerbu Bastille, yang bermimpi mengenai Napoleon, atau Robespierre?). Di puncak semangat revolusi pada awal 1946 slogan-slogan seperti *kedaulatan rakyat*, *100 persen Merdeka*, *milik rakyat*, *sama rasa sama rata*, dan bahkan *darah* atau *darah rakyat* mencerminkan beberapa dari harapan-harapan yang diilhami oleh revolusi itu—kebebasan individu, persaudaraan, kesetaraan ekonomi, dan peranserta penuh rakyat dalam proses pemerintahan.

Revolusi Sosial dalam Revolusi

Potensi revolusi Indonesia untuk mengungkapkan, atau bahkan mencapai, perubahan total dalam sikap dan hubungan sosial paling baik diteliti melalui apa yang dinamakan "revolusi sosial" yang berdampak kepada berbagai wilayah Sumatra dan Jawa antara Oktober 1945 dan Maret 1946. Istilah "revolusi sosial" pada awalnya digunakan oleh pendukung gerakan-gerakan ini untuk membedakan mereka dari revolusi politik untuk mengganti pemerintahan Belanda atau Jepang dengan Republik Indonesia. Unsur yang sama dari kedua kelompok ini ialah sebuah gerakan dari bawah untuk menggulingkan pejabat-pejabat Indonesia yang menduduki jabatan di bawah Jepang (dan, sering juga Belanda) dan telah dikokohkan dalam kekuasaan oleh pemerintah baru Republik. Karena itu, dalam setiap kasus, "revolusi sosial" menantang dan menentang kebijakan resmi Republik di wilayah mereka, meski mereka sendiri pada prinsipnya percaya sepenuh hati pada revolusi itu dan kepemimpinannya. Pemerintah Republik dan Partai Sosialis yang dominan di dalamnya menentang dengan sengit semua "revolusi sosial". Bahkan penganut Marxisme paling terkemuka sekalipun (kelak menyatakan diri komunis) dalam pemerintahan, seperti Amir Sjarifuddin dan Abdulmadjid, mengutuk kerusuhan-kerusuhan dengan kekerasan ini sebagai "infantile disease of leftism" (penyakit kekanak-kanakan paham kiri). Sebuah delegasi Republik termasuk kedua orang ini, dipimpin oleh Amir sebagai Menteri Pertahanan dan Marxis pemerintah yang paling kharismatis, diterbangkan ke Sumatra pada April 1946 dengan pesawat terbang khusus Inggris untuk membawa revolusi ke bawah kendali. Dengan kata lain, "revolusi sosial" adalah gerakan spontan dari bawah, yang bentuknya sama di sejumlah daerah yang sangat berbeda-beda satu sama lain, tetapi tanpa koordinasi atau arahan di antara daerah-daerah yang saling berbeda itu.

Gerakan-gerakan menentang penguasa setempat ini mulai di kabupaten-kabupaten di pesisir utara Jawa pada September dan Oktober 1945, dan mencapai puncaknya pada apa yang dinamakan "Peristiwa Tiga Daerah" di Tegal, Brebes dan Pemalang. Di sini keluarga-keluarga penguasa tradisional ditangkap, dihina, atau diusir; bupati, camat, dan lurah diganti dengan pejabat-pejabat "revolusi" [sering terdiri dari tokoh-tokoh Islam yang dipilih dalam rapat umum; dan kekuasaan nyata dijalankan oleh sebuah komite kecil yang mengkoordinasi berbagai kelompok *pemuda* pejuang *(badan perjuangan)*]. Pada Desember sebuah perang saudara kecil di kabupaten Pidië, Aceh, mengakibatkan punahnya seluruh kelas penguasa *ulèëbalang* yang berkuasa di situ; sementara pada bulan-bulan awal 1946 wilayah-wilayah lain di Sumatra Utara dan Tengah mengalami aksi-aksi anti-penguasa tradisional semacam itu, dan dari ini aksi yang paling serius adalah aksi di Sumatra Timur.

Mengingat ada unsur-unsur yang sama antara aksi-aksi yang sangat luas dan terpisah-pisah satu sama lain ini, sebab-sebabnya pasti juga sama: perpecahan yang relatif tajam antara *pergerakan* dengan kelompok aristokrat pemegang kekuasaan; pahit getir kekecewaan dengan pihak berwenang Indonesia dari sisi cara mereka memenuhi tuntutan-tuntutan Jepang yang kejam untuk penyediaan tenaga kerja dan beras; runtuhnya wewenang terpusat; sentimen Islam yang relatif kuat yang sering berperan sebagai pencetus dukungan massa dan aktivitas sejumlah sangat kecil kader revolusi semi-bawah tanah (sering komunis).

Seberapa jauh "revolusi sosial" ini mewakili gerakan massa yang murni memperjuangkan kebebasan dan menciptakan peluang yang baru dan dinamis untuk partisipasi rakyat dalam proses pemerintahan dan pembangunan? Seberapa jauh "revolusi sosial" mencerminkan apa hakekat revolusi itu secara keseluruhan sebenarnya ("might have been") seperti kata Benedict Anderson.[2] Apakah revolusi sosial mewakili potensi untuk pembaruan sosial yang mendasar, atau hanya kekerasan belaka tanpa tujuan yang jelas? Sumatra adalah tempat yang tepat, meski sangat sedikit diteliti, untuk menyelidiki pertanyaan-pertanyaan ini, karena kendali yang relatif longgar pemerintahan Republik di situ memungkinkan terjadinya tiga pemberontakan dari tipe yang berbeda—di Aceh, Sumatra Timur dan Sumatra Tengah.

Aceh

Revolusi sosial Aceh adalah konfrontasi langsung antara dua kekuatan sosial yang menyatakan berhak memegang tampuk kepemimpinan. Seperti

dijelaskan dalam Bab 12, Belanda untuk sebagian besar pemerintahannya sangat mengandalkan diri kepada aristokrat wilayah, yakni *ulèëbalang,* dan menindas semua oposisi terhadap aristokrat ini. Selama tiga tahun terakhir pemerintahannya, Belanda memperlonggar kebijakan ini secukupnya untuk memungkinkan munculnya kepemimpinan tandingan dalam bentuk Persatuan Ulama Seluruh Aceh (PUSA) di bawah pimpinan Daud Beureu'eh. Dengan kedatangan Jepang sebagai penguasa baru pada 1942 polarisasi antara kedua kekuatan ini semakin tajam, terutama di pusat kekuatan PUSA di Pidie, karena semua pihak mencoba menggunakan Jepang untuk menundukkan pihak yang lain. Persaingan ini berlanjut selama pemerintahan Jepang. *Ulèëbalang* terus duduk sebagai pejabat pemerintah, sementara kepemimpinan agama juga berhasil mencetak prestasi di bidang hukum dan propaganda. Dengan menyerahnya Jepang, konflik memperebutkan kontrol atas pemerintahan merdeka yang baru hampir pasti akan terjadi.

Pemerintah Republik awal di bawah Residen Teuku Nyak Arif mengukuhkan *ulèëbalang* pada posisi-posisi pemerintahan yang mereka duduki di bawah Jepang. Pergerakan pemuda PRI, yang mulai pada Oktober, didominasi dari segi komposisi oleh PUSA; sementara tentara pemerintah, TRI, pecah antara dua elemen. Konflik pecah pada Oktober dan November mengenai bendera nasional, mengenai upaya untuk membalikkan perubahan-perubahan yang telah terjadi di bawah Jepang, tetapi terutama mengenai siapa yang berkuasa atas senjata yang direbut dari Jepang. Persoalan terakhir ini berujung dengan pertempuran besar di Sigli pada 4 Desember, yang menelan jiwa beratus-ratus orang. Setelah itu kedua belah pihak menghimpun kembali kekuatan masing-masing untuk adu kekuatan militer dengan menggunakan mortir, senapan mesin, dan ribuan *mujahidin.* Dalam dua pekan yang pertama pada Januari 1946, semua pusat kekuatan *ulèëbalang* di Pidië porak poranda dan boleh dikatakan semua laki-laki di pihak *ulèëbalang*—termasuk semua kecuali dua dari 25 penguasa Pidië—tewas.[3]

Pikiran bahwa ini sebuah "revolusi sosial" baru timbul dalam benak mereka yang terlibat sebulan kemudian, ketika pengaruh komunisme Islam merasuki hampir semua sektor yang mengalami polarisasi dari sisi ekonomi di provinsi itu, yakni wilayah-wilayah perkebunan yang bertetangga dengan Sumatra Timur. Konsep revolusi sosial itu sendiri, dan tekad bulat Almujahid untuk "menghancurkan unsur-unsur feodal yang masih tersisa",[4] berasal dari Nathar Zainuddin, seorang veteran komunis Islam yang memiliki pengaruh yang sangat besar di balik layar atas aktivis-aktivis muda, terutama di wilayah

Aceh Timur.[5] Muridnya yang paling cerdas adalah mantan pemimpin pemuda PUSA yang suka mendebat orang, Hussein Almujahid, yang membantu Nathar melancarkan sebuah *coup* atas para pemimpin pemerintah Aceh di Langsa pada 12 Februari. Setelah menundukkan lawan-lawannya, Almujahid memulai apa yang dinamakannya "long march" dari Aceh Timur ke ibukota, dan menangkap semua *ulèëbalang* pejabat di sepanjang jalan. Intervensinya pada Februari-Maret tidak saja memperluas aksi menumbangkan *ulèëbalang* Pidië ke wilayah-wilayah Aceh yang lain, tetapi juga melukiskan *coup* itu sebagai sebuah revolusi sosial melawan unsur-unsur "feodal", dan juga sebagai perjuangan Islam dan nasional.

Namun, pemenang dalam proses ini bukan Almujahid dan Nathar, tetapi kelompok *ulama* dan aktivis Islam terpelajar yang lebih muda dengan fokus pada PUSA dan kemudian PRI. Terlepas dari retorika masa itu, ini benar-benar sebuah revolusi sosial, yang membawa ke tampuk kekuasaan sebuah kelas sosial baru dengan ideologi berbeda (populisme Islam), dan memungkinkan peran serta penuh semangat rakyat biasa Aceh dalam proses membangun sebuah masyarakat baru yang bebas. Bahkan mereka yang tidak bersimpati kepada PUSA dan kepemimpinan baru Islam di Aceh mengakui bahwa Aceh setelah revolusi ini menjadi model bagi kesatuan tujuan, persatuan pemerintah dengan rakyat, ketertiban dan kebersihan.[6] Jika kita bandingkan revolusi sosial di Aceh dengan revolusi sosial di Sumatra Timur, di bawah, tampak jelas beberapa sebab-sebabnya. Ada kesepakatan umum di Aceh tentang apa yang harus menjadi ideologi sebagai pedoman revolusi (Islam), dan siapa yang harus menjadi pemimpin-pemimpinnya (Daud Beureu'eh, dan para *ulama* terkemuka lainnya dan cendekiawan yang mendukung perjuangan PUSA/PRI). Masyarakat relatif homogen. Aksi revolusi dipimpin oleh *ulama* yang disegani dan mampu mewujudkan disiplin sampai tingkat tertentu atas berbagai kekuatan yang menang, bukan oleh kaum *pemuda* radikal. Khususnya, mereka menggunakan sebagian besar harta kekayaan (konon 100 juta rupiah) yang disita dari kelompok aristokrat yang ditumbangkan untuk membayar tentara dan pejabat sipil, bukan menghambur-hamburkannya untuk sengketa-sengketa yang menimbulkan perpecahan seperti di Sumatra Timur.[7] Akhirnya, ada partisipasi rakyat yang luas dalam aksi revolusi itu, termasuk ribuan petani biasa, didorong oleh, kadang-kadang, harapan kembalinya tanah mereka yang mereka percaya direnggutkan *ulèëbalang* dari tangan mereka, tetapi selalu oleh kesetiaan kepada *ulama* mereka, dan oleh ingatan yang tidak pernah pupus mengenai perjuangan tiada henti melawan si *kafir* Belanda, dengan revolusi dilihat sebagai kelanjutan dari perlawanan ini.

Sayangnya hasil-hasil sangat positif dari revolusi sosial di Aceh ini sebagian besar tidak kekal. Seberapa pun dekatnya mereka kepada rakyat mereka, para pemimpin Islam baru dan terpelajar Aceh itu sangat jauh berbeda dari sisi semangat dibandingkan dengan kelompok profesional perkotaan dan terpelajar yang memimpin pemerintahan Indonesia di tempat-tempat lain. Bersatupadunya Aceh dengan erat pada masa pasca-revolusi menyebabkan sulit untuk menyerapnya ke dalam Indonesia bersatu. Sebuah perang baru pecah pada 1953.

Sumatra Timur

Meski selalu lebih "revolusioner" daripada Aceh pada tahun-tahun pertama setelah Proklamasi, Sumatra Timur adalah suatu masyarakat yang bila terjadi revolusi jenis apapun di situ sangat sulit membawa dirinya untuk mewujudkan akhir yang stabil bagi revolusi bersangkutan. Masyarakat di situ sangat beragam dari sisi suku bangsa, dengan raja-raja yang mendapat dukungan cukup besar dari suku Melayu dan Simalungun tetapi sedikit sekali dari berbagai kelompok imigran (Jawa, Toba, Mandailing, Minangkabau, dan sebagainya). Seperti di Aceh, ada polarisasi yang tinggi pada periode akhir pemerintahan Belanda, antara *kerajaan (swapraja* atau *zelfbestuur*—raja-raja Melayu, Simalungun, dan Karo) di satu pihak dan *pergerakan* nasionalis di pihak lain. Juga sama halnya, pendudukan Jepang selalu memastikan bahwa konflik ini selalu hidup. Namun di Sumatra Timur, kelompok *kerajaan* dan kelompok *pergerakan* memiliki pemimpin-pemimpin yang tangguh.

Merekalah yang merintis Pemerintahan Republik di Medan pada Oktober 1945—Mr. T. Hasan sebagai Gubernur Sumatra, Dr. M. Amir sebagai Wakil Gubernur, dan Tengku Hafas sebagai Residen, yang tidak pernah dapat memainkan peran yang lebih besar daripada sekadar penengah di antara kedua kekuatan itu. Mereka menjalankan kebijakan yang mengakui bahwa Sultan-sultan dan raja-raja memiliki tempat dalam Republik Indonesia, dan mencoba meyakinkan mereka untuk, ke dalam, membangun demokrasi, sedangkan keluar, mendukung Pemerintah Republik.

Dalam praktik, setelah peristiwa Jalan Bali 13 Oktober 1945, dan lebih-lebih lagi setelah banyak senjata Jepang dirampas pada November, *badan perjuangan pemuda*-lah yang memiliki kekuatan fisik, terutama di kota-kota. Badan paling kuat di antara mereka adalah Pesindo yang radikal, di bawah pimpinan Sarwono S. Soetardjo; Napindo yang nasionalis, sebuah koalisi beberapa kelompok, termasuk beberapa unit tempur Karo dan Simalungun

yang semula dibentuk oleh perwira Jepang Letnan Inoue; TNI yang agak lebih berdisiplin; Sabilillah Islam; dan Laskar Merah PKI (Partai Komunis Indonesia)—barangkali dalam urutan-urutan ini, dari sisi derajat peranan masing-masing. Tekanan dari *badan perjuangan* menimbulkan rasa takut di pihak raja-raja hingga mereka mengadakan perundingan-perundingan serius dengan pejabat Republik pada 12 Januari dan 3 Februari, mengenai cara-cara menjadikan pemerintahan mereka masing-masing lebih demokratis. Ini muncul terlalu terlambat untuk menyelamatkan raja-raja itu; dalam kenyataan, hasil utama perundingan-perundingan itu mungkin adalah mempercepat rencana-rencana "revolutionaries", kaum revolusioner, untuk mengenyahkan mereka sebelum posisi mereka diperkuat oleh pengembangan demokrasi.

"Revolusi sosial" Sumatra Timur dilancarkan pada 3 Maret 1946, atas instruksi kelompok kecil pemimpin-pemimpin Pesindo, PNI, dan PKI, yang bekerja sama di bawah payung *Persatuan Perjuangan.* Tujuan pemimpin-pemimpin ini ada tiga: melenyapkan raja-raja sebagai potensi sekutu bagi Belanda; menyita harta kekayaan mereka yang berlimpah untuk digunakan dalam perjuangan nasional; dan akhirnya, memajukan revolusi sosial, dengan menghapus feodalisme. Ada semangat revolusi yang sangat besar pada masa-masa itu sebelum dan sesudah aksi-aksi melawan raja-raja, terutama di pihak kelompok-kelompok pemuda di kota-kota, sehingga kita dapat mengatakan periode dari pertengahan Februari hingga pertengahan April sebagai puncak revolusi di wilayah ini, dengan kekuasaan hampir seluruhnya dalam tangan para pembangkang di jalan-jalan. "Sejarah belum pernah mengalami sebuah revolusi yang demikian bergelora seperti revolusi Indonesia ini", demikian dinyatakan seorang pemimpin Pesindo.[8]

Tujuan-tujuan segera "revolusi sosial" dicapai dengan cepat oleh *badan perjuangan* pada malam 3 Maret atau tidak lama setelah itu. Dari sisi baiknya, aksi itu di Tanah Karo, di Serdang, dan di sejumlah *kerajaan* Simalungun menyingkirkan penguasa-penguasa itu dengan rapi dan tanpa pertumpahan darah, menahan mereka di bawah pengawalan militer dan menyita sebagian besar harta mereka. Di wilayah-wilayah lain, terutama distrik selatan yang tersebar (Asahan, Kualuh, Bila, Panai dan Kota Pinang), Langkat, dan Pane dan *kerajaan* Raya di Simalungun, ada penjarahan dan pembunuhan besar-besaran, atas orang-orang tidak berdosa dan orang-orang yang bersalah. Hanya di sedikit wilayah saja ada perlawanan balik dari para pendukung raja-raja, dan yang paling mencolok ialah di Sunggal (Deli), tempat sekitar 40 orang mungkin tewas dalam pertempuran itu.[9]

Kerja positif menciptakan lembaga-lembaga baru yang dapat menampung cita-cita revolusi, yakni persamaan dan persaudaraan, jauh lebih sulit. Namun dua ciri dari periode ini tampak mencuat. Pertama, sistem "demokrasi langsung" dalam arti rapat umum raksasa berhasil menuntut bahwa *kerajaan* segera dinyatakan hapus, dan dalam beberapa hal berhasil memilih atau mencapai kata sepakat mengenai pejabat-pejabat baru pada saat itu juga. Pemerintah Republik, dalam wujud pribadi Dr. Amir yang bertindak sebagai penjabat Gubernur yang belum ada, tidak memiliki pilihan lain selain daripada menandatangani semua keputusan tersebut. Untuk posisi-posisi yang lebih tinggi, yakni Residen Sumatra Timur dan "pacificateur" (penanggung jawab keamanan), Amir mengangkat dua tokoh komunis dengan harapan (ternyata keliru) bahwa mereka akan lebih mampu mengendalikan dan menuntun kekuatan-kekuatan revolusi.

Lebih menakjubkan lagi adalah Ekonomi Rakyat Republik Indonesia (ERRI), sebuah upaya untuk sertamerta mewujudkan pemilikan bersama (*collectivization*) di bidang ekonomi, di bawah pimpinan dua orang pengusaha kecil yang mengaku komunis tetapi tampaknya memiliki pengalaman sangat sedikit dalam bidang politik atau perniagaan. Karena politisi sayap kiri dalam pemerintahan di Jawa umumnya lebih suka mengambil kementerian-kementerian yang kuat (Pertahanan, Dalam Negeri) dan melepaskan bidang ekonomi kepada orang-orang moderat, upaya ini adalah eksperimen yang paling ambisius di manapun. ERRI didirikan pada 5 Februari 1946 dengan harapan dapat melakukan koordinasi atas semua kegiatan ekonomi di Sumatra, meski untuk sementara ERRI baru dapat mengerahkan kelompok-kelompok ekonomi seperti pedagang kecil, penjaja, pedagang kain, dan penjual obat ke dalam koperasi. Dengan "revolusi sosial", ERRI secara resmi diberi wewenang penuh untuk menyusun struktur ekonomi semua sektor di seluruh Sumatra.[10]

Selama lebih dari sebulan ERRI aktif luar biasa, mengambil alih perkebunan karet dan tembakau, fasilitas pengangkutan, pemasukan dari perdagangan luar negeri dan dari bea cukai, dan hampir segalanya yang dapat direbut dari pihak penanggung jawab yang sebelumnya. Tujuannya tampaknya dua: menggunakan senjata ekonomi sepenuhnya dalam perjuangan melawan penjajahan, misalnya dengan melaksanakan blokade yang sangat efektif atas Medan yang diduduki oleh Sekutu; dan meratakan distribusi bahan makanan, kain, dan bahan-bahan pokok lainnya melalui kebijakan berdasarkan asas *sama rasa sama rata*. Sayang, usianya terlalu singkat dan situasi terlalu kacau untuk mencoba badan yang sungguh menarik ini, tetapi bukti-bukti yang tidak banyak yang kita miliki mengenai hal itu umumnya memberikan kesan

negatif. Kebijakan ERRI berupa secara paksa menyita bahan-bahan kebutuhan pokok tampaknya menciptakan lebih banyak musuh daripada kawan, dan membuka dirinya pada tuduhan korupsi besar-besaran.[11] Mengingat demikian sangat cepatnya ERRI mengambil alih tanggung jawab yang sangat luas tidak mengherankan bahwa ERRI dinilai gagal dan dalam praktik menjadi satu dari hal-hal negatif yang digunakan untuk mengutuk ”revolusi sosial”.

Meski ada dukungan penuh semangat yang mengawali “revolusi sosial” di Sumatera Timur, sepuluh hari kemudian sudah muncul reaksi menentangnya. Pendapat umum mulai berbalik menentangnya dengan berita mengenai perbuatan-perbuatan melampaui batas di Asahan, tempat lebih dari 100 aristokrat dibunuh dalam beberapa hari, dan lebih banyak lagi di kesultanan yang lebih kaya, yakni Langkat, tempat tujuh aristokrat terkemuka dipancung (pertama dari rangkaian pemancungan yang terjadi lebih banyak lagi kemudian) dan dua dari putri Sultan diperkosa pada malam 11 Maret. Dua hari kemudian elite politik di Medan memecat dua pemuka komunis itu dari posisi kunci masing-masing di Sumatra Timur. Namun, baik perubahan politik di atas, maupun pengumuman mengenai pemerintahan militer dalam tangan TRI, tidak membawa pengaruh nyata pada iklim revolusi. Intervensi yang lebih efektif datang dari Amir Sjarifuddin (waktu itu Menteri Pertahanan) dan para Marxis yang lain dalam pemerintah pusat Republik, yang mengunjungi Sumatra Timur pada 9-12 April 1946 untuk mencoba membawa gelora revolusi kembali ke bawah kendali.

Pidato-pidato keras Amir memberi dorongan kepada beberapa unsur “moderat” dalam *badan perjuangan,* yang cukup kuat pada akhir April untuk menahan dua dari apa yang dinamakan ”supercommunists” (Joenoes Nasution, ”Residen revolusioner” dari 3-13 Maret, dikeluarkan dari PKI tidak lama setelah ia ditahan), dan untuk membubarkan ERRI.[12]

Namun, dari kerusuhan revolusi di Sumatra Timur ini, tidak ada pemenang yang muncul (di Aceh ada, yakni elite Islam). Reputasi semua pemimpin penting dirusak oleh kekacauan yang ditimbulkan ”revolusi sosial”, sehingga kekuasaan nyata semakin banyak yang jatuh ke tangan kelompok-kelompok pemuda bersenjata dan terpisah-pisah satu sama lain dan dipimpin oleh pemuda-pemuda berusia tidak lebih dari 20 ke atas. Sepanjang 1946 dan 1947 mereka seringkali bertempur satu sama lain memperebutkan wilayah, kendali atas perkebunan karet, dan harta yang telah disita dari istana-istana kesultanan. Dengan ”memburuknya keadaan di semua bidang”, seperti kata Muhammad Radjab,[13] Sumatra Timur, meski memiliki kekayaan yang berlimpah, adalah

satu dari iklan-iklan terburuk untuk Republik Indonesia. Karena itu, Sumatra Timur pada akhirnya meminta pengendalian dari pemerintah pusat—lagi-lagi kembali tidak seperti Aceh.

Dalam pola revolusi yang membingungkan di Sumatra Timur ini, Tanah Karo menonjol sebagai satu wilayah dengan "revolusi sosial" yang berjalan tertib dan populer. Tanah Karo tampaknya satu-satunya bagian dari Sumatra Timur yang memungkinkan kita dapat berbicara dengan percaya diri mengenai partisipasi dengan penuh semangat dalam perjuangan itu. Barangkali penyebab dari ini adalah homogenitas suku di Tanah Karo, atau kenyataan bahwa raja-raja merupakan ciptaan pemerintah Belanda, atau rasa haus akan pendidikan dan pembangunan yang tiba-tiba lepas dengan runtuhnya kekuasaan kolonial.[14]

Minangkabau

Wilayah Minangkabau di Sumatra Barat juga mengalami pasang naik revolusi sosial, meski kelompok revolusi di situ kurang berhasil merebut kendali aparatus pemerintah. Karena itu catatan revolusi sosial di Minangkabau di sini tidak terlalu lengkap. Khususnya, sumber-sumber yang ada pada kami mengenai "gerakan Baso" yang percaya kepada sebuah utopia itu, mengambil sikap sangat bermusuhan pada radikalisme gerakan itu.

Contoh revolusi sosial di Sumatra Timur sangat berpengaruh atas Sumatra Barat. Pada 13 Maret, sepuluh hari setelah *Persatuan Perjuangan* merebut kendali atas wilayah Medan, kelompok-kelompok revolusi gaya Tan Malaka membentuk kelompok serupa itu di Sumatra Barat. Kepala-kepala adat turun temurun yang di bawah Belanda menjalankan pemerintahan sehari-hari masyarakat adat *nagari* dinyatakan dibubarkan, dan pemilihan umum beberapa bulan kemudian berhasil memindahkan wewenang pemerintahan sebagian besar kepada *ulama* populer. Seperti di Sumatra Timur, *Persatuan Perjuangan* berusaha terutama mengendalikan perekonomian Sumatra Barat dengan cara mengambil alih wewenang pemerintah di bidang ini. Tetapi kedatangan rombongan Amir Sjarifuddin pada April membendung air pasang radikal ini di provinsi itu setelah belum sebulan.[15]

Sementara struktur pemerintahan dukungan Jepang bubar pada akhir 1945, wewenang di wilayah Baso di timur Bukittinggi direbut oleh dua adik kakak, keduanya *ulama* pedesaan dan pengikut Tan Malaka sejak pemberontakan Minangkabau pada 1927. Mereka sebelumnya telah mendirikan cabang bawah tanah dari gerakan PARI nasionalis-komunis Tan Malaka di Baso pada tahun

1930-an. Pada bulan-bulan awal 1946 mereka telah membentuk sebuah militia dengan persenjataan lengkap dari senjata Jepang, dan membunuh kepala distrik dan pejabat-pejabat terkemuka lainnya di wilayah itu. Menurut sebuah pamflet anti-Baso yang ditulis dari sudut pandang PKI "ortodoks" Abdulmadjid, mereka mencoba mewujudkan pemilikan bersama (*communalization*) radikal harta setiap desa. Anggota gerakan itu adalah pemilik bersama segala yang ada di desa—tanah, makanan, dan konon bahkan perempuan. Di setiap desa mereka mengontrol dan mendirikan *kebun syorga* seolah-olah hendak mewujudkan surga di atas bumi. Harta yang direbut dari orang kaya dimasukkan sebagai milik desa-bersama itu. "Pendeknya, harta yang banyak milik siapa saja harus dibagi-bagikan sama rata *[disamaratakan]."* [16]

Pada 13 April 1946, ketika rombongan Amir Sjarifuddin sedang dalam perjalanan keliling Sumatra untuk mencoba meredam tindakan-tindakan yang melampaui batas itu, tentara Sumatra Barat (TNI) melancarkan serangan besar-besaran atas gerakan Baso, yang dituduh melakukan peculikan, pembunuhan dan teror, dan membangun negara di dalam negara. Dalam waktu tiga hari para pemimpin gerakan itu dan lebih dari seratus orang pengikutnya tewas. Sepekan kemudian, setelah kelompok Amir berbicara dengan keras kepada petinggi militer dan sipil di Sumatra Barat, para pemimpin *Persatuan Perjuangan* Sumatra Barat dimasukkan ke dalam tahanan.[17]

Warisan Revolusi

Tidak dapat dibantah lagi bahwa revolusi Indonesia memiliki arti yang luar biasa penting. Revolusi itu puncak dari sejarah Indonesia dan sumbangan penting kepada keruntuhan penjajahan pada akhirnya di seluruh dunia. Revolusi itu membawa perubahan-perubahan besar dalam rasa percaya diri sendiri, sikap, dan keyakinan politik sebuah generasi. Revolusi itu juga mengubah struktur masyarakat Indonesia, tidak hanya dengan menghancurkan keberagaman tradisi aristokrat setempat yang sangat besar, tetapi juga dengan membangun sistem politik yang baru, dan yang akhirnya sangat terpusat. Selama berpuluh-puluh generasi yang akan datang, bangsa Indonesia akan tetap menoleh kembali kepada revolusi itu untuk menggali gagasan-gagasan mengenai hakekat masyarakat dan negara mereka. Mereka akan terus menggali cita-cita yang menggugah jiwa—kemerdekaan, persaudaraan, dan persamaan—serta contoh-contoh berisi suri tauladan mengenai berbagai bahaya yang ditimbulkan oleh semangat revolusi tanpa perencanaan, keseimbangan dan penghargaan atas kehidupan manusia.

15

Sejarah yang Bertentangan: Aceh dan Indonesia[1]

Meski berat untuk mengakuinya, sejarawan turut terlibat sepanjang menyangkut peperangan pada zaman modern. Sejarah sering memainkan peranan sebagai pemicu semangat nasionalisme. Menciptakan masa lalu nasional biasanya merupakan awal atau pendahuluan dari pernyataan mengenai perjalanan hidup nasional. Pandangan Aceh yang bertolak belakang dengan pandangan umum Indonesia mengenai masa lalu adalah sebuah contoh yang sangat mencolok mata mengenai gejala ini. Hasan Tiro, tokoh kemerdekaan Aceh, dapat dikatakan dihantui oleh sejarah. Bab terakhir ini mencoba menjelaskan bagaimana, setelah tahun 1940-an, ketika rasa senasib sepenanggungan dikumandangkan dengan lantang, seperti diuraikan dalam tiga bab terdahulu, ingatan Aceh dan ingatan Indonesia menjadi sangat bertentangan satu sama lain

Ingatan Indonesia mengenai Aceh pada Masa Lalu

Ketika nasionalisme Indonesia menetapkan pada periode 1926-49 perjuangan anti-Belanda sebagai motif utamanya, secara simbolik Indonesia menyatukan langkah dengan rakyat Aceh yang sudah mengalami pahit getir berjuang melawan Belanda. Hal ini melahirkan ketegangan antara mitos dengan kenyataan, karena Indonesia lebih banyak dibentuk oleh penyesuaian-penyesuaian pada pengaruh Belanda daripada oleh perlawanan terhadapnya. Sebaliknya, sejarah Aceh merupakan satu perjuangan panjang untuk menghindarkan diri dari penyerapan ke dalam koloni yang kemudian menjadi Indonesia. Perjuangan ini ironisnya menjadi contoh utama bagi kesadaran sejarah Indonesia yang dibangun pada masa Sukarno dan masa Suharto.

Buku pelajaran yang ditulis di bawah pengaruh Nugroho Notosusanto, sejarawan militer dan menteri pendidikan di bawah Suharto, secara eksplisit menggunakan perjuangan bersenjata melawan kekuasaan Belanda sebagai prinsip pemersatu sejarah Indonesia.[2] Para pejuang Aceh ditempatkan di barisan depan dalam deretan pahlawan nasional, dan jalan-jalan di setiap kota diberi nama pahlawan-pahlawan Aceh, seperti Teuku Umar dan Chik di Tiro. Sebuah film dibuat, yang sangat berhasil, mengenai kehidupan Cut Nyak Dien, pejuang perempuan anti-Belanda.

Pada periode revolusi 1945-9 Aceh kembali menjadi contoh, sebagai satu-satunya wilayah yang tidak dapat atau tidak berhasil dikuasai Belanda. Aceh menyumbangkan uang untuk pemerintah Republik yang sedang menghadapi musuh, termasuk uang untuk membeli dua pesawat terbang untuk menembus blokade Belanda. Mempersoalkan tempat Aceh di Indonesia dalam mitologi kepahlawanan ini dapat membahayakan mitos itu sendiri.

Ada hal yang lebih mendasar lagi yang menyebabkan Aceh memainkan peranan utama dalam penciptaan identitas Indonesia, tetapi tidak terlalu mengemuka dalam buku-buku pelajaran pada zaman Suharto. Aceh, dan pendahulunya, Pasai, adalah wilayah utama kebudayaan Islam yang diungkapkan dalam bahasa Melayu. Pada zaman pra-Islam, bahasa Melayu barangkali telah menjadi bahasa perdagangan yang penting di kerajaan besar Srivijaya, yang berpusat di wilayah Palembang dan Jambi zaman sekarang. Tetapi di Pasai-lah pada abad ke-14 dan abad ke-15 bahasa Melayu menjadi bahasa Islam Asia Tenggara, dan di Acehlah menjelang akhir abad ke-16 dan abad ke-17 bahasa Melayu mendapat bobot bahasa kesusasteraan. Penulis-penulis Sufi paling terkenal pada zaman itu, Hamzah Fansuri, Shamsuddin as-Samatrani, Nuruddin ar-Raniri, dan Abdurra'uf dari Singkel (Syiah Kuala—namanya digunakan untuk nama universitas Aceh), semua hidup dan menulis di ibukota Aceh, yang pada waktu itu merupakan pusat cerdik pandai Islam Kepulauan itu.[3]

Rakyat Aceh tampaknya sudah menulis dalam bahasa Melayu sebelum mereka menulis dalam bahasa Aceh. Semua teks Aceh pada masa lalu berbahasa Melayu atau berbahasa Arab. Baru menjelang akhir abad ke-17 mulai ada bukti-bukti mengenai tulisan dalam bahasa Aceh, yang untuk sebagian besar tetap berperan sebagai bahasa pidato dan syair. Ketika sekolah desa dukungan Belanda dibuka pada awal tahun 1900-an, meski ada kecurigaan di pihak Aceh pada awalnya, bahasa pengantar di situ juga bahasa Melayu, seperti halnya di sekolah-sekolah desa di sebagian besar bagian-bagian lain Kepulauan itu.

Baru pada 1932, ketika semakin khawatir bahwa rakyat Aceh memadu sikap anti-asing mereka dengan nasionalisme Indonesia maka pemerintah kolonial menukar bahasa pengantar di sekolah dasar desa dengan bahasa Aceh. Banyak elite terpelajar Aceh keberatan: mereka curiga ini siasat politik Belanda untuk mengisolasi Aceh, mereka khawatir tidak cukup banyak buku berbahasa Aceh untuk memelihara kebiasaan membaca, dan mereka bersikeras bahwa tradisi Aceh sejak zaman kesultanan adalah selalu menggunakan bahasa Melayu dalam pendidikan tertulis, walaupun bahasa Aceh digunakan untuk menjelaskan pelajaran secara lisan. Hanya satu generasi kecil orang Aceh terpelajar pada periode 1932-42, dan hanya satu generasi ini, yang merasa nyaman menulis dalam bahasa Aceh, menggunakan huruf romawi yang rumit yang diciptakan oleh para ahli bahasa.

Ciri Khusus Aceh

Dari sisi semua hal tersebut di atas dan dari sisi pola dasar bahasa dan sosial, Aceh termasuk masyarakat Sumatra dan Asia Tenggara. Namun ada cukup banyak ciri khusus dalam perkembangan sejarahnya sejak abad ke-16 yang menyebabkan ideologi separatisme yang dianutnya meyakinkan ketika muncul pada tahun 1970-an. Berbeda dengan tradisi sastra "Melayu klasik" yang menyaksikan peranan Aceh yang sangat besar di dalamnya, misalnya, Aceh sepenuhnya berdiri di pinggir sepanjang menyangkut pengembangan langgam bahasa dan kesusasteraan Melayu/Indonesia modern menjelang akhir abad ke-19. Kesusasteraan Melayu/Indonesia modern adalah budaya-atas "India" perkotaan di India Belanda, yang mengungkapkan diri dalam bahasa Melayu yang menggunakan huruf romawi (berbeda dengan huruf Arab dalam bahasa Melayu klasik), dan sebagian besar diciptakan pada awalnya oleh orang-orang Indo-Eropa dan Peranakan Tionghoa, meski pada akhirnya diserap sebagai bahasa pengantar oleh gerakan nasional.

Sampai penaklukan Aceh oleh Belanda pada akhir abad ke-19, hubungan ekonomi, politik dan budaya Aceh terjalin dengan Samudra India dan Semenanjung Malaya, tidak dengan dunia Laut Jawa, yang didominasi pada awalnya oleh Jawa dan kemudian oleh Belanda. Aceh merupakan bagian dari dunia Islam Samudra India sejak Pasai dikunjungi dan ditulis oleh Ibn Battuta (seorang Arab yang waktu itu menjabat sebagai utusan Delhi) pada abad ke-14. "Upeti" Aceh kepada Turki Ottoman, yang diuraikan dalam Bab 4, dapat dipahami dalam konteks ini, dan demikian pula halnya dengan hubungan

Aceh dengan Prancis, yang diuraikan dalam Bab 8. Setelah Perusahaan Belanda merebut wilayah pantai barat penghasil lada dari dominasi Aceh pada tahun 1660-an, pedagang Belanda tidak lagi datang ke Aceh, dan membiarkannya menjadi pelabuhan bebas paling penting di sisi timur Teluk Benggala.

Produksi lada Aceh, pertama pada abad ke-16 dan abad ke-17, dan kemudian pada periode 1800-70 ketika kesultanan itu menjadi pemasok sekitar separuh dari persediaan total dunia, membuka baginya hubungan dagang yang kuat dengan Turki, India, Inggris, Amerika Serikat, Prancis dan Italia, dan semua negeri ini pernah dimintanya pada suatu waktu untuk memberinya dukungan diplomasi. Dari sekitar 1850 perdagangan dijalankan melalui *entrepots* dengan jalur pelayaran kapal uap berjadwal, sehingga bagi Aceh Penang menjadi "gerbang ke dunia; ya, bahkan dunia itu sendiri", menurut Snouck Hurgronje. "Sepenuhnya berdasarkan pengalaman orang Aceh di Penang timbul keyakinan umum di Aceh bahwa kekuasaan Inggris jauh lebih disukai daripada kekuasaan kita."[5]

Jika logika ekonomi atau budaya yang jadi patokan, Aceh akan terseret ke dalam dunia pengaruh Inggris yang terpusat di *entrepots* Straits Settlements, dan barangkali menjadi semacam protektorat seperti Brunei atau Johor. Tetapi di Eropa, logika peta dominan, yang melihat Selat Malaka sebagai perbatasan alami, meskipun sudah berabad-abad lamanya Selat itu berperan sebagai persimpangan jalan. Pada 1824 Sumatra sebagai keseluruhan dinyatakan oleh kekuatan-kekuatan kolonial berada di bawah tanggung jawab Belanda; ini tidak mengubah sesuatu apapun di Aceh pada waktu itu, tetapi secara drastis mengubah jalan hidupnya. Ketika akhirnya Belanda menyerang Aceh pada 1873, mereka sama sekali tidak memiliki modal sejarah seperti yang mereka miliki hampir di seluruh Kepulauan sebagai hasil dari kontak dagang berabad-abad lamanya di situ. Mereka dengan terburu-buru melancarkan invasi yang sia-sia dalam konteks pengetahuan mereka yang nihil mengenai Aceh dan sikap bermusuhan para pedagang Penang, yang lebih banyak tahu mengenai Aceh, kepada mereka. Mereka kemudian memaksa diri untuk melanjutkan ini dengan tindakan-tindakan militer membabi buta untuk membalas dendam atas penghinaan yang mereka derita pada ekspedisi yang pertama. Orang Aceh, berbeda sama sekali daripada wilayah-wilayah yang lain dari Kepulauan itu, dengan meronta-ronta, diseret ke dalam tataran politik yang terpusat di Batavia.

Selain itu, kesultanan Aceh masa pra-kolonial, yang dikenang dalam bentuk pusara di dekat istana, garis keturunan para penguasa yang disayangi rakyat yang dilambangkan oleh sembilan lipat cap kerajaan *(cap sikureueng),*

dan khasanah kisah-kisah dan syair-syair kepahlawanan tertulis, adalah pusat yang unik dari identitas Aceh. Saya mengemukakan dalam Bab 3 di atas bahwa dalam sejarah Indonesia "kesultanan itu pada dasarnya adalah selalu kerajaan pantai dan didukung oleh sumber-sumber asing."

Sebagian besar identitas suku bangsa Indonesia, seperti Jawa, Sunda, Bali, Minangkabau dan Batak, dibentuk dan dipertahankan pada tingkat budaya yang tinggi oleh faktor-faktor yang tidak ada sangkut pautnya dengan negara dalam arti birokrasi dan tata hukum modern. Tetapi Aceh, seperti telah kita lihat di atas, dibentuk oleh penaklukan-penaklukan atas kesultanan abad ke-16 tersebut, dan bertahan dengan cara-cara yang digunakan oleh kesultanan ini untuk menangkal dominasi asing. Aceh satu-satunya identitas (dalam persaingan dengan Batavia/Jakarta) yang dibentuk oleh kerajaan pantai selama empat abad, yang ingatan mengenainya masih jelas berbekas pada abad ke-20. Berbeda dengan bagian-bagian Indonesia lainnya yang pada dasarnya menyerap konsep modern negara melalui India Belanda, bagi Aceh negeri Belanda/ Indonesialah yang tampak lebih asing dan dangkal, karena baru satu abad, melalui rangkaian pertarungan yang sengit, Belanda berhasil menguasainya.

Kebanggaan Aceh pada ciri khusus masa lalu ini terbentuk dalam perlawanan pahit terhadap Belanda pada 1873-1914, yang bagian akhirnya terpusat pada wilayah Gayo, yang berbeda, dari sisi suku bangsa, dengan Aceh, tetapi cukup ada kaitan dengan kesultanan untuk melakukan perlawanan penuh kepahlawanan atas nama kesultanan. Secara keseluruhan sekitar 100.000 orang tewas selama perang itu, ditambah dengan kekacauan yang ditimbulkannya di pihak Aceh, dibandingkan dengan sekitar 16.000 tewas di pihak Belanda.[6] Bahkan pada saat-saat paling aman dan damaipun, pada tahun1930-an, Gubernur Belanda masih merasa perlu untuk mengingatkan semua orang bahwa setiap orang Aceh memendam "kecintaan fanatik pada kemerdekaan, yang diperkokoh oleh ikatan kesukuan yang kuat, dengan akibat mereka tidak suka pada orang asing dan membenci orang kafir yang memasuki wilayah mereka", sehingga penggunaan kekuatan perang yang lebih unggul merupakan satu-satunya cara untuk menjamin keutuhan kekuasaan Belanda di situ.[7] Sebagai jawaban atas argumen perlunya kewaspadaan yang terus menerus, sekitar 4.000 serdadu yang disebarkan Belanda di seluruh Aceh menyebabkan Aceh selalu terasa sampai hampir saat-saat terakhir kekuasaan Belanda sebagai sebuah provinsi di bawah pendudukan.

Pelaksanaan sistem kerja paksa yang sangat dibenci yang mengharuskan penduduk bekerja selama 24 hari setahun membuat jalan-jalan raya untuk

Belanda mengingatkan orang Aceh selalu kepada kekalahan Aceh, dan menyebabkan banyak dari mereka melarikan diri ke Malaya. Serdadu dan para residen Belanda harus selalu waspada terhadap serangan-serangan bunuh diri yang dilakukan perorangan orang Aceh yang sudah mengambil keputusan untuk mempertaruhkan nyawanya ketika mencoba membunuh orang kafir. Setelah perang secara resmi berakhir, masih ada rata-rata 7,5 setahun pada tahun 1910-an percobaan serangan bunuh diri dari apa yang dinamakan Belanda "pembunuhan Aceh" *(Atjeh-moord)*, 5 setahun pada tahun 1920-an, dan 3,5 setahun pada tahun 1930-an.[8] Tidak diragukan lagi salah satu faktor adalah kemasyhuran syair kepahlawanan perang sabil *(Hikayat Perang Sabil)* yang ditulis dan disebarkan pada waktu perlawanan anti-Belanda, dan yang bahkan ketika dilarang keras beredar oleh Belanda tetap terus mengilhami kepahlawanan berani mati dengan bayangan imbalan menggiurkan akan masuk surga.[9]

Perlawanan merupakan tema utama Aceh, paling tidak dalam setiap dekade ketika berada di bawah kekuasaan Belanda. Aceh bagian paling selatan kembali ke situasi perang gerilya besar-besaran pada pertengahan 1920-an, yang menelan korban 21 serdadu Belanda dan 119 pejuang Aceh tewas, dalam pertempuran paling pahit pada 1926. Begitu invasi Jepang sudah di ambang pintu, pada awal 1942, perlawanan yang diuraikan dalam Bab 12 memaksa Belanda meninggalkan Aceh.

Meski orang Aceh yang melakukan perlawanan terhadap Belanda kemudian menyambut baik orang Jepang, pada 1944 kebanggaan Aceh bangkit kembali dalam sebuah pemberontakan yang lain di Bayu (Lhokseumawe), yang menelan korban tewas 18 serdadu Jepang dan lebih dari seratus pemberontak Islam. Meski mendapat perlawanan, beratus-ratus serdadu Jepang fanatik, yang menolak kenyataan menyerahnya Kaisar Jepang pada 1945, memilih Aceh untuk tempat bertahan, sebagai wilayah Asia Tenggara yang paling pasti akan menentang kembalinya kekuasaan Sekutu.[10] Setelah "revolusi sosial" seperti diuraikan dalam bab terdahulu menyingkirkan seluruh kelas aristokrasi/birokrasi dari kekuasaan, Aceh berada dalam keadaan cukup stabil di bawah kepemimpinan baru oleh *ulama* dan Belanda tidak berpeluang sedikitpun untuk menancapkan kaki kembali di situ, seperti dapat mereka lakukan di provinsi-provinsi yang lainnya pada waktu ofensif mereka pada 1947.

Teungku Daud Beureu'eh, pemimpin PUSA yang tampil sebagai pemegang kekuasaan melalui "revolusi sosial", dan menjadi gubernur militer Aceh pada 1948-50, memimpin pemberontakan melawan kendali Jakarta pada 1953-62 atas dasar dua alasan, yakni menentang diserapnya Aceh ke dalam Provinsi Sumatra

Gambar 16 Meriam Turki dan Portugis yang pernah menjaga benteng Aceh selama berabad-abad, sedang dibawa ke tepi sungai oleh orang hukuman yang menyertai ekspedisi kedua Belanda pada 1874, untuk dikapalkan sebagai lambang kemenangan ke Belanda.
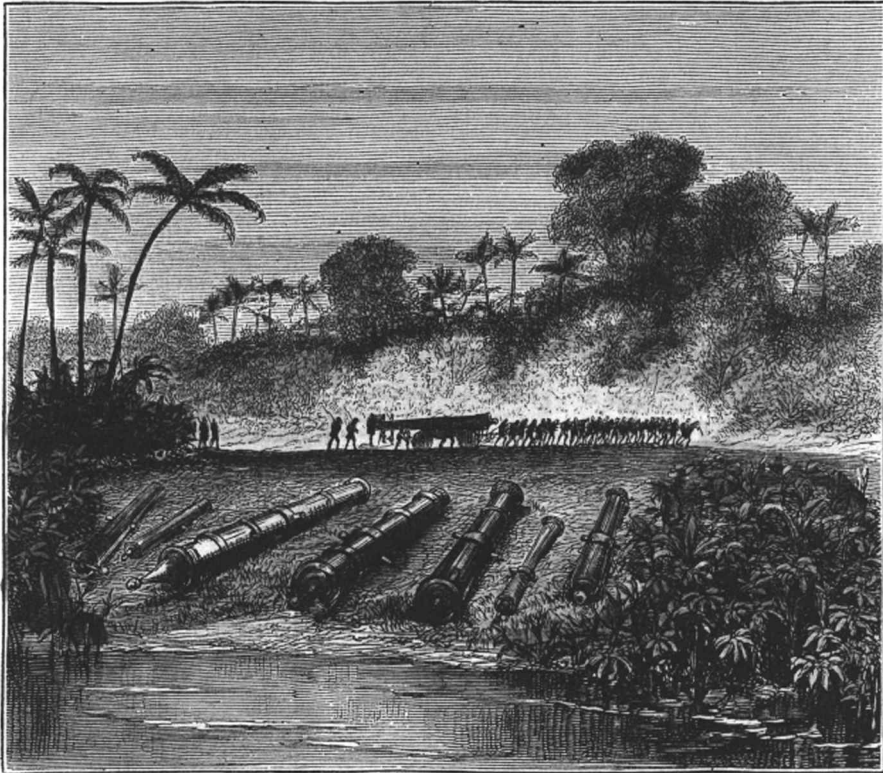
Utara, dan gagalnya Republik melaksanakan hukum Islam. Pemberontakan itu memberi ilham kepada Hasan Muhammad di Tiro, yang tidak banyak dikenal pada waktu itu, untuk mengumumkan pernyataan kemerdekaannya pada 1976. Dengan kata lain, pada abad ke-20, ketika Indonesia pada dasarnya diciptakan dari hamparan ribuan pulau dengan penduduk yang terdiri dari beragam suku, hanya ada waktu yang singkat-singkat saja ketika Aceh tidak digoncang oleh pemberontakan melawan Jakarta.

Gagasan spesifik mengenai negara Aceh tidak pernah jauh dari alam pikiran orang-orang Aceh yang menentang *status quo* Jakarta. Sampai detik terakhir penyerahan dirinya kepada Belanda pada 1903, "pengaku sultan",

Gambar 17 Penyerahan diri Sultan Muhammad Daud yang masih muda kepada Kolonel van Heutsz dan Kapten H. Colijn, Januari 1903, di "pendopo" Gubernur-gubernur Aceh.
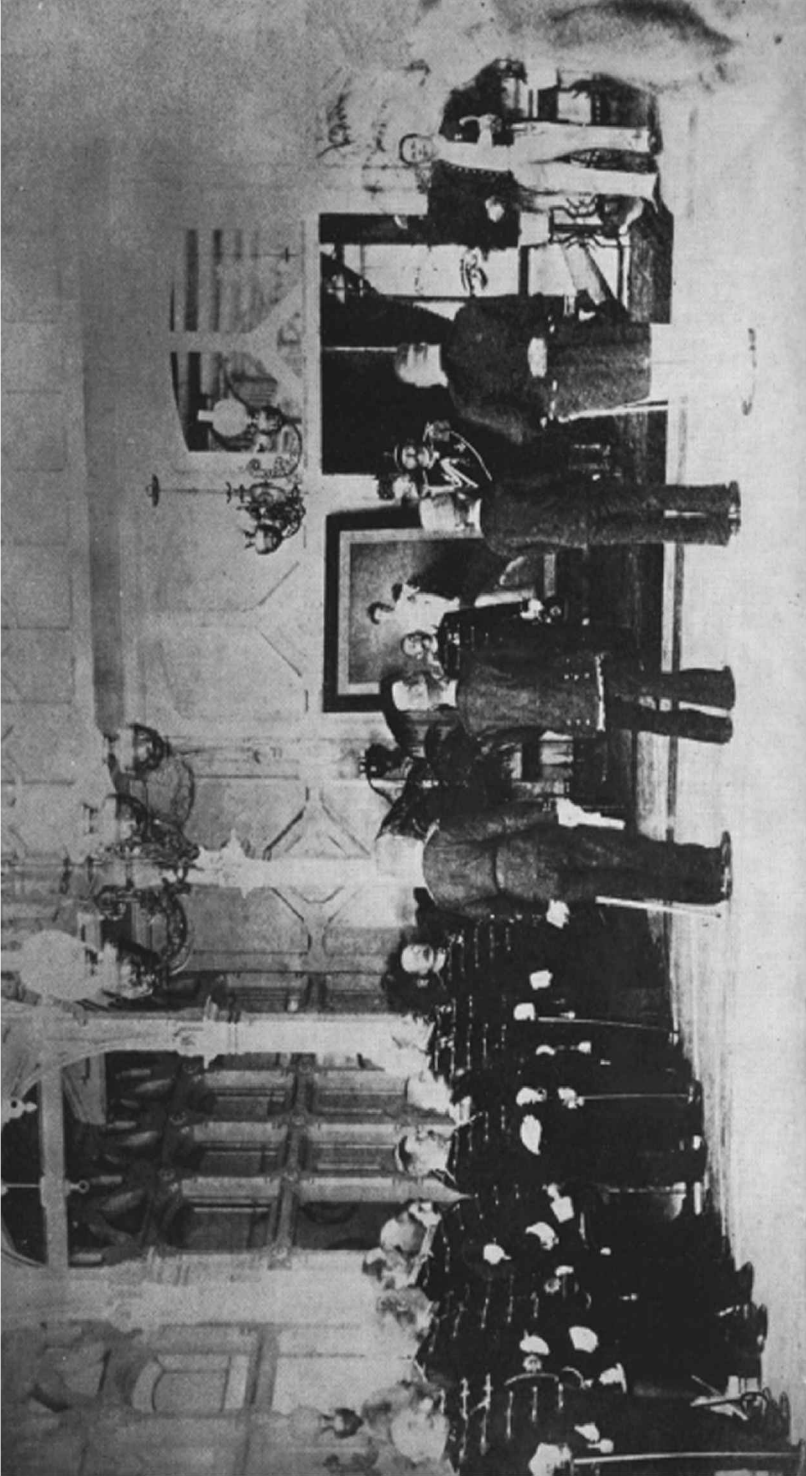
Sumber: Paul Van't Veer, *De Atjeh-oorlog* (Amsterdam: Abeiderspers, 1969).

Tuanku Muhammad Daud, sudah 40 tahun berperan sebagai jantung perlawanan terhadap Belanda. Pada 1938-40 kelompok-kelompok yang paling tidak puas dengan kekuasaan aristokrasi *ulèëbalang* di Aceh, yang mencakup terutama banyak *ulama* reformis, mendukung gagasan mengenai pemulihan kesultanan.[11] Selama pemberontakan anti-Belanda 1945-9 Aceh merupakan model perlawanan terhadap semua gagasan yang datang dari pihak Belanda, termasuk federalisme, meski dalam praktek di Aceh orang Acehlah yang memegang kendali sepenuhnya. Pada 1953 pemberontakan Daud Beureu'eh bertujuan untuk mendirikan Negara Islam, bukan untuk mencapai Aceh merdeka, karena ia percaya bahwa itulah yang diperjuangkan oleh orang Aceh sedemikian gigihnya selama revolusi. Namun dua tahun kemudian sebuah *Negara Bahagian Aceh* yang terpisah didirikan oleh pemberontak melalui Deklarasi Batee Kureng 23 September 1955, di bawah I *Wali Negara* (Daud Beureu'eh) yang kuat, seorang Perdana Menteri dan sebuah Kabinet.[12]

Pergeseran Persepsi Aceh

Selama empat abad orang Aceh memandang diri mereka sebagai warga kesatuan politik yang bebas yang bersaing dengan sejumlah negeri lain yang sebanding seperti Siam dan Johor, dan berusaha mendominasi negeri-negeri lain di Sumatra atau Semenanjung. Di sebuah dunia sebelum adanya dogma negeri-negeri berdaulatan setara abad ke-20, mereka menyadari bahwa ada kesatuan-kesatuan politik yang lebih kuat (semua dianggap *negeri*, seperti Aceh) yang mungkin dapat menjadi atasan mereka demi manfaat mereka. Seperti banyak negeri di Asia Tenggara pada abad ke-15, Pasai, negeri sebelum Aceh, sering mengirimkan "upeti" ke Cina, dan Aceh sendiri mengirimkan semacam "upeti" ke Turki pada 1560-an. Tetapi Aceh memang berbeda dari semua negeri di kepulauan Indonesia, dalam arti berada di luar ambisi Belanda di Batavia dan menjadi satu-satunya negeri yang berdaulat untuk mengatur diri sendiri.

Karena itu tidak ada kesulitan bagi Aceh pada abad ke-19 untuk menandatangani sebuah perjanjian pertahanan bersama dengan Inggris pada 1819, atau dalam memohon dukungan kepada Inggris kemudian setelah Belanda menyerangnya pada 1873 dalam sepucuk surat kepada Gubernur Straits Settlements

> karena sejak masa nenek moyang kami, kami belum pernah bersahabat dengan Pemerintah Belanda, dan selalu menjalin hubungan dengan Pemerintah Inggris,

> dan, juga, kami sama sekali tidak suka kepada Belanda. Jika teman kami yang memerintah kami, kami lebih suka itu sepuluh kali lipat, karena kami sudah biasa dengan itu, sejak dari masa lalu.[13]

Tidak lama sebelumnya pada 1868, tanpa sedikitpun merasa ada kontradiksi, sejumlah pemuka Aceh mengirimkan sebuah utusan ke Istanbul untuk memohon Sultan Ottoman "untuk memberitahu semua orang asing bahwa kami hamba dan berada di bawah perlindungan Porte yang Agung, sehingga untuk selannjutnya tidak ada lagi Pemerintah lain manapun akan diizinkan untuk campur tangan dalam urusan kami".[14] Juga tidak ada masalah bagi kesultanan itu untuk secara resmi mengusulkan perjanjian pertahanan bersama kepada Amerika Serikat pada 1873, begitu menjadi jelas bahwa Inggris tidak akan memenuhi kewajibannya yang disebutkan dalam perjanjian, yakni untuk mencegah Belanda.

Inti persoalan di sini ialah pada abad ke-19 Aceh melihat dirinya lebih seperti Burma, Vietnam, atau Siam melihat diri masing-masing, yakni sebagai negeri yang secara tradisional merupakan negeri merdeka yang memiliki banyak pilihan untuk menjalin persekutuan, daripada sama dengan para pangeran di sekitar Laut Jawa yang lebih kurang terikat pada Belanda.

Namun, sementara perang dengan Belanda berlangsung, kepemimpinan perlawanan semakin banyak jatuh ke tangan ulama yang paling bersikap bermusuhan; bagi mereka yang melihat ide mati syahid sebagai unsur utama yang diperlukan untuk membangkitkan keberanian dalam menghadapi kekuatan-kekuatan besar. Sementara orang Aceh masih melancarkan perang demi Aceh, bukan demi Indonesia atau Dar ul-Islam, motivasi untuk bertempur sekarang berasal terutama dari kepercayaan kepada Tuhan. Seperti ditulis Syech Saman di Tiro kepada orang-orang senegerinya yang tidak terlalu heroik pada 1885:

> Jangan biarkan dirimu menjadi ketakutan karena kekuatan orang kafir, barang-barang halus milik mereka, peralatan mereka, dan serdadu-serdadu mereka yang tegap. . . . karena tidak seorang pun kuat, tidak seorang pun kaya, dan tidak seorang pun memiliki pasukan yang tangguh kecuali Tuhan yang Maha Esa (Maha suci Allah), dan tidak seorang pun membagikan untung dan rugi kecuali Tuhan yang Esa (Maha suci Allah), dan tidak seorang pun memberi kemenangan atau kekalahan kecuali Tuhan (Maha suci Allah), Tuhan Semesta Alam.[15]

Menjawab pendekatan-pendekatan dari Gubernur Belanda mengenai sebuah

perjanjian, *ulama* paling keras itu juga memintanya untuk menjadi orang Islam, seperti telah dilakukan oleh puluhan orang Eropa anggota pasukannya, sebelum terlambat. "Begitu saudara memeluk agama Islam dengan cara mengucapkan dua kalimat suci, kita dapat kemudian mengadakan perjanjian." Kemudian gubernur tidak akan harus menghadapi penghinaan di medan perang dan azab abadi di Neraka, tetapi akan masuk sorga dengan "mendapat apa saja yang diinginkannya, apakah itu makan minum, buah-buahan atau gadis ayu. . . . Mengapa tidak saudara renungkan bahwa saudara akan dikalahkan di dunia ini dan di dunia berikut; bahwa azab Tuhan yang Maha Esa menunggu saudara di dunia ini dan di dunia berikut?"[15]

Tentu saja Tuhan tidak menganugerahkan kemenangan semacam yang diharapkan Teungku di Tiro ini, dan generasi berikut harus dengan kepala tertuduk menerima kenyataan kehadiran kekuasaan Belanda. Pada 1920-an dan 1930-an, peluang-peluang baru muncul untuk pemulihan kebanggaan Aceh. Medium penting yang pertama untuk orang Aceh (dan banyak lagi rakyat lain) untuk beralih dari identitas umum Aceh atau Islam ke identitas Indonesia adalah Sarekat Islam, yang tersebar dengan sangat cepat di seluruh Kepulauan pada 1919-22. Seperti kata seorang aktivis yang mengajar di sebuah kota kecil di pantai utara, "Dulu kami menjadi orang Islam yang mengangkat senjata, tetapi sekarang hal itu tidak perlu lagi dilakukan, sekarang persatuan *(sepakat)* sudah cukup. . . . Dari sini, sepanjang mengenai Jawa, persatuan telah tercapai di antara keturunan-keturunan orang Islam."[17]

Beberapa tahun kemudian Sarekat Islam memudar, tetapi benih telah ditanamkan, yang menyangkut kepercayaan baru kepada kemajuan yang akhirnya meyakinkan orang Aceh mengenai berbagai manfaat dari bersekolah. Pada 1935 ada 33.500 anak-anak Aceh yang duduk di bangku sekolah dasar negeri, tingkat partisipasi yang sedikit lebih tinggi daripada di Jawa atau Sumatra Timur,[18] dan juga tingkat partisipasi yang jauh lebih tinggi di sekolah-sekolah Islam tradisional. Gagasan baru yang terpusat pada Indonesia dan bukan pada Aceh itu mulai tersebar di kalangan generasi nasionalis lebih muda. Seorang wartawan memohon dalam sebuah suratkabar Aceh pada 1930 bahwa rakyat Aceh harus menyadari kebangsaan mereka di dunia ini, karena " *kebangsaan* juga akan menjadi sebuah faktor yang besar dalam kehidupan setelah mati. . . . Setelah kematian semangat Islam, semangat itu akan sehat dan subur kembali dengan bantuan semangat kebangsaan . . . . Tidak ada jalan lain untuk menaikkan derajat bangsa yang telah menjadi alat bagi orang lain, dan yang hampir tidak pernah lagi memandang diri mereka sebagai manusia."[19]

Titik puncak dari perkembangan menuju identitas nasional Indonesia ini sebagai kendaraaan yang tepat untuk perjuangan anti-Belanda rakyat Aceh bersejarah itu berakhir pada 1945. Pada titik itu sebuah generasi baru Aceh terpelajar, terutama lulusan dari sekolah-sekolah Islam reformasi, dan dipengaruhi oleh propaganda Jepang yang bernada putus asa pada akhir perang, berhasil meyakinkan guru-guru Islam reformasi mereka untuk merapatkan barisan di belakang Republik yang baru itu.[20] Dalam sebuah deklarasi tertanggal 15 Oktober 1945, empat pemimpin terkemuka organisasi-organisasi reformasi atas nama *ulama* seluruh Aceh", menyatakan bahwa:

> segenap lapisan rakyat telah bersatu padu dengan patuh berdiri di belakang maha pemimpin Ir. Soekarno untuk menunggu perintah dan kewajiban yang akan dijalankan. Menurut keyakinan kami bahwa perjuangan ini adalah perjuangan suci yang disebut 'Perang Sabil'. Maka percayalah wahai bangsaku bahwa perjuangan ini adalah sebagai sambungan perjuangan dahulu di Atjeh yang dipimpin oleh Almarhum Tgk. Chi' di Tiro dan pahlawan2 kebangsaan yang lain. [21]

Bahkan versi-versi yang lebih bergelora lagi menyangkut identifikasi masa lalu Aceh ini dengan masa lalu Indonesia muncul dari generasi baru reformasi terpelajar didikan Islam dan dari pemuda di bawah pengaruh Jepang. Syair-syair menggetarkan jiwa buah tangan Ali Hasjmy yang mengelu-elukan Sukarno adalah satu contoh dari versi-versi itu. Contoh yang lain adalah sebuah tulisan mengenai sejarah Aceh oleh seorang anak muda Aceh berusia 23 tahun:

> Sebagaimana halnja dahulu, Atjeh adalah satu bagian jang tidak terpisah dari Negara Republik Indonesia; maka demikian pulalah sedjarahnja pun merupakan satu bagian jang tak terpisah dari sedjarah Indonesia, dan sembojan kita "*satu bangsa, satu bahasa, dan satu tanah air.*"

Anak muda ini, yang tidak lain adalah Hasan Muhammad Tiro, yang kemudian menjadi tokoh kemerdekaan Aceh, menulis apa yang dinyatakannya sebagai sejarah pertama perang Aceh dalam "bahasa kita", bahasa Indonesia, sebagai sumbangan kepada pengembangan "satu sejarah untuk satu negara".[22] Satu dari para pemuda yang terbakar semangatnya oleh api nasionalisme, Tiro adalah pemuda yang paling tekun menjelajahi sejarah, barangkali karena (seperti akan diakunya kelak jauh di kemudian hari), ada seorang tua yang mengingatkannya ketika ia berusia 12 tahun dan masih bersekolah, "jangan sekali-kali lupa akan

harta pusaka kalian"—yakni keluarga Tiro, *ulama* yang luar biasa anti-Belanda.[23] Karyanya pada masa muda, yang ditulis di Jogja tempat ia melanjutkan sekolah setelah terjun dengan semangat berapi-api ke dalam tahap pertama revolusi di Aceh, menggali dari tulisan-tulisan Belanda mengenai Aceh pada 1930-an. Ditulis berdasarkan asumsi bahwa perang melawan Aceh telah dimenangkan, buku-buku populer karangan wartawan sayap kanan H.C. Zentgraaff dan kapten Polisi Militer H.J. Schmidt ini mulai mempercantik uraian mengenai konflik itu, dan mengakui kepahlawanan pihak Aceh maupun pihak Belanda.[24] Sebagian besar monograf [karangan Tiro] berisi kutipan-kutipan dari buku-buku ini, menyangkut tahap-tahap terakhir perang itu ketika perlawanan diilhami oleh keluarga Tiro, meski ia sendiri sudah lama sebelumnya merasa gembira melihat kenyataan bahwa Aceh, sebagai kerajaan merdeka pada abad ke-19, mengadakan tukar menukar duta besar dengan kekuatan-kekuatan dunia pada waktu itu.[25]

Nasionalisme Berbasis Sejarah Hasan Tiro

Ini tentu saja sejarah Aceh yang sudah dipercantik untuk kepentingan nasionalisme Indonesia. Bagaimana Hasan Tiro beranjak dari sini ke seruannya bagi perjuangan mencapai masa depan yang merdeka sebagai penyambung bagi masa lalu yang merdeka?

Setelah pindah dari Aceh ke pusat Republik Indonesia pada 1946, Hasan Tiro kembali ke Aceh pada 1948 sebagai salah satu staf Wakil Perdana Menteri Sjafruddin Prawiranegara, yang memimpin Pemerintah Darurat Indonesia dari Aceh pada paruh pertama 1949. Pada 1950 Tiro kembali ke bangku sekolah di Jogjakarta, dan dari situ mendapat beasiswa untuk belajar di Amerika Serikat.[26] Ia tinggal di New York, bekerja paruh waktu di kantor perwakilan Indonesia untuk PBB, kemungkinan atas rekomendasi Sjafruddin. Di situ ia semakin banyak mengecam kepemimpinan Jakarta, menaruh simpati kepada kekecewaan-kekecewaan Aceh, dan menjalin hubungan dengan politisi Amerika dan agen-agen CIA yang bertugas mempengaruhi pemimpin-pemimpin anti-komunis Indonesia. Ketika Daud Beureu'eh berseteru dengan Jakarta pada 1953 dan Pemerintah mengambil langkah-langkah represif yang keras, Tiro mengeluarkan sebuah "ultimatum" untuk Jakarta menuntut agar Jakarta menghentikan "genocide" [pembunuhan sistematis atas suatu kelompok bangsa, suku bangsa atau agama] atas pemberontak; jika tidak ia akan membuka sebuah kantor Republik Islam Indonesia di PBB. Ketika Indonesia mencabut

paspor diplomatiknya dan meminta Amerika Serikat untuk mengusirnya, Tiro berhasil tetap tinggal dan hidup berkecukupan di New York berkat bantuan teman-temannya orang Amerika.[27] Ada kemungkinan besar teman-teman Amerikanya pula yang membantunya menerbitkan satu-satunya dari buku-bukunya sebagaimana mestinya, dalam arti dicetak dengan baik dan diedarkan melalui jalur peredaran buku yang ada, berjudul *Demokrasi untuk Indonesia* (1958), sebuah polemik menuntut sebuah Indonesia yang tidak terlalu diatur secara terpusat.[28]

Hasan Tiro (seperti pemimpin pemberontak pujaan, Daud Beureu'eh, dengan kakak Tiro, Zainal Abidin, sebagai salah satu bawahan kepercayaannya) sudah berpisah jalan dengan Pemerintah Jakarta, tetapi belum berpisah jalan dengan gagasan Aceh sebagai bagian dari Indonesia yang sudah berubah. Namun bahkan ketika Daud Beureu'eh berdamai dengan Pemerintah pada 1961, dan ketika Pemerintah Sukarno sendiri ditumbangkan oleh militer anti-komunis pada 1965-6, Hasan Tiro tetap tergoda oleh syair-syair sejarahnya untuk bersikap menuntut kemerdekaan penuh bagi Aceh. Tentu saja ada faktor yang lain. Cadangan gas alam dalam jumlah sangat besar ditemukan di Aron, dekat Lhokseumawee, pada 1971, dan selama enam tahun berikutnya kilang gas alam terbesar di dunia dibangun oleh Mobil dekat lokasi itu.

Hasan Tiro sudah menjadi pengusaha internasional yang sukses, dan ia pasti sudah tahu tentang cadangan gas ini dan mungkin terpengaruh oleh harapan bahwa akan ada peluang bagi negerinya untuk menjadi kaya raya dan juga bagi dirinya sendiri. Tetapi kita harus mendengarkan dengan hati-hati apa pandangan para pemimpin itu sendiri mengenai kekayaan ini. Tulisan Hasan Tiro semuanya menyangkut sejarah dan kebanggaan dan ambisi yang meluap-luap, dan sedikit sekali mengenai gas.

Ceramah-ceramah atau tulisan-tulisan Tiro mengenai sejarah pada periode ini berangsur-angsur mendorongnya ke sikap mendukung Aceh yang sudah ditakdirkan sebagai negeri merdeka oleh sejarah.[29] Tiro jelas menjadi sangat bersemangat setelah melakukan penelitian atas *New York Times* 1873 di New York Public Library, dan, saya khawatir, setelah membaca buku saya terbitan 1969.[30] Ia kemudian menjelaskan dalam kuliah yang diberikannya pada saat ulang tahun kekalahan ekspedisi pertama Belanda pada April 1973:

> Selama beberapa generasi rakyat Aceh[31] telah lupa sama sekali pada hari yang gilang gemilang ini, seolah-olah sudah terhapus sama sekali dari ingatan mereka.

> Alangkah menyedihkan. Mereka bahkan tidak tahu sedikitpun juga mengenai hal ini dan baru mengetahuinya setelah saya merayakannya untuk pertama kali sejak selama demikian banyak generasi, di New York, pada 1973. Pidato saya . . . dimaksudkan sebagai seruan bagi rakyat Aceh untuk bangkit kembali untuk menghormati para pahlawan mereka yang telah tiada dan untuk mengambil tempat mereka kembali di antara rakyat-rakyat merdeka dan berdaulat di dunia.[32]

Dari detik ini Hasan Tiro sendiri mulai bergerak ke arah menggambarkan dirinya sendiri sebagai seorang pejuang negeri Aceh yang lahir kembali dan merdeka. Pada 1976 ia meluncurkan kampanye untuk kemerdekaan Aceh dengan semangat Nietzsche yang luar biasa. Bukunya *Unfinished Diary* dengan sangat menarik menguraikan bagaimana ia terbawa hanyut setelah membaca buku Nietzsche *Thus Spake Zarathustra* beberapa hari sebelum bertolak menuju Aceh. Ia mengutip panjang lebar bab "The Wanderer", mengenai kesunyian keagungan, dengan mantranya yang terus diulang-ulang, "Engkau sedang dalam perjalanan menuju keagungan." Paragraf yang dikutipnya berakhir dengan "Kau ku sarankan jangan bekerja tetapi berjuang. Kau ku sarankan jangan menuju damai, tetapi menuju kemenangan. Jadikan kerjamu perjuangan, jadikan damaimu kemenangan."[33]

Ketika tiba di Aceh secara diam-diam pada 30 Oktober 1976, Tiro segera melaksanakan tugas yang diberikannya kepada dirinya sendiri, yakni menyebarkan melalui ceramah pandangannya mengenai sejarah kepada pemuka-pemuka masyarakat berpengaruh. "Jalan menuju keselamatan nasional kita adalah menghidupkan kembali kesadaran sejarah rakyat Aceh. Sudah cukup banyak buku yang saya tulis mengenai hal ini. Hal yang harus saya lakukan ialah mendorong rakyat kita mempelajari buku-buku itu."

Ia mengaku mencetak ulang dalam hutan tulisan-tulisannya yang ditulisnya di New York dan bahwa pendekatan ini "berhasil bagai api kebakaran hutan". Tidak pernah jelas apakah tulisan-tulisan ini terjemahan dari bahasa Inggris ke dalam bahasa Aceh atau bahasa Indonesia; salinan-salinannya jika ada tidak pernah ditemukan. Pada 4 Desember ia menyelenggarakan acara membacakan "Pernyataan Kemerdekaan Aceh", sebuah pengulangan sangat berbunga-bunga dari gagasan-gagasan sejarahnya yang menjadi piagam resmi GAM.

> Tanah air kita, Aceh, Sumatra, sebuah negeri yang merdeka dan berdaulat sejak dunia terkembang. . . . Namun, ketika, setelah Perang Dunia II, India

> Timur Belanda yang seharusnya sudah dienyahkan . . . tanah air kita, Aceh, tidak dikembalikan kepada kita. Tanah air kita dikembalikan oleh Belanda ke orang Jawa—bekas serdadu sewaan mereka—melalui keputusan sewenang-wenang kekuatan-kekuatan kolonial. Orang Jawa adalah orang lain dan orang asing bagi kita orang Sumatra dari Aceh. . . . 'Indonesia' adalah sebuah tipuan: sebuah topeng untuk menyelubungi kolonialisme Jawa.[34]

Selain dari menekankan "bendera seribu tahun" Aceh, Tiro menerbitkan sebuah kalender baru. Jauh dari memulai sejarah dari awal baru seperti revolusi Prancis, kalender itu menunjukkan sepuluh hari libur setahun dengan tujuan untuk mengingatkan rakyat Aceh pada para pahlawan mereka—dari Sultan Iskandar Muda (w.1636) hingga pertempuran-pertempuran 1910-1.[35] Tiro terus mengumandangkan pesan ini, sehingga persoalan yang paling penting bukanlah soal senjata dan perbekalan bagi perjuangan itu, tetapi

> masalah krisis identitas nasional, masalah mendalami sejarah Aceh. . . Sejarah kita yang sebenarnya sudah disusupi. Ketika sebuah bangsa lupa sejarah mereka, itu sama halnya dengan seseorang yang kehilangan ingatan, ia tidak tahu lagi siapa dia dan siapa namanya. . . . Saya sudah tidak ingat sudah berapa ribu kali saya mengulangi gagasan-gagasan ini![36]

Karya yang luar biasa ungkapan hati sanubari Tiro yang dalam mengenai sejarah ini ialah *Drama of Achehnese History* yang ditulisnya di hutan. Seperti dijelaskan dalam sebuah prakata oleh "Menteri Pendidikan"-nya pada waktu itu, naskah sandiwara ini,

> Di tulis pada waktu senggang, di sela-sela pertempuran, dan ketika beristirahat di sela-sela kunjungan inspeksi ke berbagai sudut negeri ini. . . . Biasanya . . . satu-satunya suara yang kami dengar hanyalah ketukan mesin ketik Tengku yang tidak berhenti selama berjam-jam setelah matahari terbit dari pukul 7 pagi hingga pukul 6 petang. Kami dilarang menyalakan lampu di waktu malam.
>
> Sudah menjadi kebiasaan yang baku bagi para pengawal Tengku bahwa ketika mereka tiba di suatu tempat baru, hal pertama yang mereka lakukan adalah menebang pohon dan membuat lapangan di tengah hutan itu untuk meletakkan sebuah meja dan sebuah bangku untuk tempat Tengku duduk dan menulis.

Drama itu merupakan pengungkapan luar biasa getaran jiwa pribadi dan pengabdian Tiro pada masyarakat, berupa serangkaian adegan dari sejarah

Aceh menurut versi Tiro, setiap adegan ditingkah oleh musik klasik Eropa, karena, seperti kata salah seorang kenalannya, Tiro "menghapalkan karya-karya besar Bach, Vivaldi, Handel, Beethoven". Adegan pertama, invasi Belanda 1873, diiringi oleh salah satu Brandenberg Concerto, dan terakhir, pernyataan kemerdekaan Hasan Tiro, oleh Concerto in A Minor karya Vivaldi.[37]

Hasan Tiro tidak saja dari sisi seleranya yang luar biasa kebarat-baratan, tetapi juga dari sisi tulisannya yang berlebih-lebihan yang digunakannya untuk mengait-ngaitkan dirinya dengan para pemimpin perjuangan Tiro, dan menampilkan lukisan yang menyimpang mengenai peranan mereka, yakni sebagai semacam peranan sultan-sultan pada masa lalu, dengan maksud agar ia dapat mengaku bahwa ia mewakili kerajaan Aceh. Setelah periode singkatnya di hutan-hutan Aceh pada 1976-9, Tiro tidak kembali tetapi memimpin gerakan kemerdekaannya dari tempat yang aman di Swedia. Namun, gagasan sederhana yang telah ditanamkannya, bahwa pengalaman Indonesia memperkecil, bukannya memperteguh, peran sejarah Aceh, menjalar seperti api kebakaran hutan setelah 1998. Tampaknya, sangatlah besar kemungkinan bahwa gagasan ini tidak akan padam, apapun kondisi dunia luar.

Transformasi sejak 1998

Setelah Suharto turun pada Mei 1998, iklim kemerdekaan melahirkan dengan cepat sebuah situasi yang memungkinkan terjadinya perubahan yang radikal. Presiden yang baru, Habibie, mengakhiri status Aceh sebagai wilayah pemerintahan militer pada 7 Agustus 1998 dan sejumlah pasukan dengan sangat terang-terangan ditarik. Tetapi jauh lebih penting adalah langkah Habibie membebaskan pers, sehingga untuk pertama kali pers dapat melaporkan aksi-aksi militer pada masa sekarang dan pada masa lalu. Banyak organisasi swadaya masyarakat dibentuk di Aceh untuk menuntut ganti rugi atas kekejaman yang dilakukan oleh militer terhadap warga sipil selama operasi-operasi militer atas gerakan kemerdekaan itu. Berita-berita mengenai kekejaman-kekejaman ini mulai mengalir dari pers yang sudah semakin bebas.

Pergeseran pendapat elite Aceh mulai terlihat pada Februari 1999, ketika kampanye dimulai untuk mengadakan referendum mengenai kemerdekaan (Habibie sudah setuju untuk mengadakan referendum mengenai Timor Timur. Kampanye di bawah pimpinan mahasiswa mendapat dukungan dari *ulama* dan tokoh-tokoh politik untuk mengerahkan ribuan orang (dua juta konon kabarnya) pada rapat umum di Banda Aceh pada 8 November 1999.

Selama dua tahun berikutnya GAM, *Gerakan Aceh Merdeka,* tampak semakin lama semakin seperti sebuah pemerintah yang sedang menunggu [peresmian], pernyataan-pernyataannya muncul secara berkala dalam koran-koran setempat. Meski kekuatan gerilya GAM beroperasi hanya di separuh dari kabupaten-kabupaten Aceh (terutama di sepanjang pantai utara), perkebunan, toko-toko, dan kantor-kantor di wilayah yang jauh lebih besar membayar uang iuran untuk pendapatan GAM, bahkan juga sejumlah *kantor* pemerintah di ibukota provinsi.[38]

Selama pemerintahan Presiden Habibie dan Presiden Abdurrahman Wahid, pada periode 1998-2001, militer *secara resmi* dibatasi pada aksi mempertahankan diri, termasuk serangan sia-sia untuk menghukum desa-desa tempat GAM melancarkan serangan atas militer. Pada paruh pertama 2000 ada kenaikan serangan oleh GAM, termasuk atas kota kedua Aceh (dan kantor pusat gas alam) Lhokseumawe dan lapangan terbang Mobil/Exxon di situ. Unsur-unsur militer di Aceh yang paling tidak suka dengan prakarsa menuju perdamaian yang dirundingkan secara internasional, dan dengan usul membawa ke pengadilan mereka yang melanggar hak asasi manusia, hanya dapat menjawab dengan pembunuhan-pembunuhan yang dilakukan oleh orang tidak dikenal, dan korban paling terkemuka dari pembunuhan pada 16 September 2000 adalah Dr Safwan Idris, Rektor Universitas Islam dan calon populer setempat sebagai Gubernur Aceh yang akan datang.

Keterbukaan tidak ada duanya yang diusung Pemerintah Abdurrahman Wahid menciptakan kondisi ideal bagi Red Cross Centre for Humanitarian Dialogue (HDC) untuk mengambil prakarsa langkah perdamaian secara diam-diam sepanjang 2000 dan 2001. Meskipun Indonesia sangat sensitif terhadap segala bentuk internasionalisasi konflik-konfliknya, HDC berhasil menengahi serangkaian pertemuan dari Maret 2000 antara Pemerintah Indonesia dengan wakil-wakil GAM. Kedua pihak sepakat untuk mengadakan "Jeda Kemanusiaan" ("Humanitarian Pause") dalam pertempuran yang mulai efektif dari Juni 2000, dan ini berlanjut ke 2001, meski dengan sukses terbatas di lapangan.

Ketika Megawati Sukarnoputri mengambil alih kepresidenan pada Juli 2001, hubungannya yang lebih hangat dengan militer Indonesia tampaknya merupakan gejala berakhirnya perundingan-perundingan damai semacam itu. Dia memang mengizinkan militer nasional (TNI) mengambil langkah-langkah ofensif lebih banyak terhadap GAM di Aceh, tetapi ini pada gilirannya tampaknya juga memberi dia kekuatan yang lebih besar untuk memaksa militer menerima tekanan kuat internasional untuk mengadakan perundingan. Walau banyak

Gambar 18 Tertangkapnya pahlawan pejuang putri Cut Nyak Dien (1848-1908) pada 1905

kendala, dan meski ada perbedaan pendapat yang tajam antara ke dua belah pihak, Cessation of Hostilities Agreement (COHA) akhirnya di tandatangani di Jenewa pada 9 Desember 2002. Pada dasarnya GAM menyetujuinya karena Gambar 19 Sebuah poster di jantung kota Banda Aceh menyambut perdamaian 9 Desember 2002 antara Indonesia (RI) dan Gerakan Aceh Merdeka (GAM) ada janji akan diadakannya pemilihan yang bebas dan adil pada 2004, sedangkan Pemerintah Indonesia menyetujuinya karena perjanjian itu menerima sebagai titik tolak undang-undang otonomi yang relatif liberal yang diusulkan melalui Parlemen Indonesia, yang menyiratkan disingkirkannya tujuan kemerdekaan.

COHA membawa perdamaian kepada Aceh selama tiga bulan, dan kedua belah pihak bekerjasama dengan para perunding internasional dalam Joint Security Commission (JSC) yang dibentuknya. Kecurigaan dan perselisihan paham yang tajam selalu akan menyebabkan hampir tidak mungkin bagi perdamaian itu untuk berlangsung lama sementara batas waktu semakin

Gambar 19 Sebuah poster di jantung kota Banda Aceh menyambut perdamaian 9 Desember 2002 antara Indonesia (RI) dan Gerakan Aceh Merdeka (GAM)

Sumber: Anthony Reid (2003).

dekat, saat GAM harus melaksanakan perlucutan senjata, dan Indonesia harus melaksanakan pemilihan umum setempat yang jujur (dengan pengalaman yang masih segar dalam ingatan, yakni hilangnya Timor Timur). Namun demikian, unsur-unsur militer yang menentang keras COHA berhasil menimbulkan kekacauan sebelum berbagai krisis ini dapat diselesaikan. Pada Maret dan April 2003 milisi pro-Jakarta yang dikendalikan oleh TNI menyerang kantor-kantor JSC di berbagai tempat di Aceh. Karena tidak ada perlindungan dari tentara, JSC terpaksa menarik diri dan perdamaian itu dalam kenyataan mati.

Catatan

Prakata

1. Barbara Watson Andaya, *To Live as Brothers: Southeast Sumatra in the seventeenth and eighteenth centuries* (Honolulu: University of Hawaii Press, 1993); Mary Somers Heidhues, *Bangka Tin and Mentok Pepper: Chinese Settlement on an Indonesian Island* (Singapore: Institute of Southeast Asian Studies, 1992); Jane Drakard, *A Kingdom of Words: Language and Power in Sumatera* (Kuala Lumpur: Oxford University Press, 1999); J. S. Kahn, *Constituting the Minangkabau: Peasants, Culture and Modernity in Colonial Indonesia* (Providence: Berg, 1993); Daniel Perret, *La Formation d'un Paysage Ethnique: Batak et Malais de Sumatra Nord-Est* (Paris: EFEO, 1995); Rita Smith Kipp, *The Early Years of a Dutch Colonial Mission: The Karo Field* (Ann Arbor: University of Michigan Press, 1990) dan *Dissociated Identities: Ethnicity, Religion and Class in an Indonesian Society* (Ann Arbor: University of Michigan Press, 1993); John R. Bowen, *Sumatran Politics and Poetics: Gayo History, 1900-1989* (New Haven: Yale University Press, 1993); Lee Kam Hing, *The Sultanate of Aceh: Relations with the British 1760-1824* (Kuala Lumpur: OUP, 1995); Jorge Manuel dos Santos Alves, *O Dominio do norte de Samatra: A história dos sultanatos de Samudra-Pacém e de Achém, e das suas relações com os Portugueses (1500-1800)* (Lisbon: Sociedade Histórica da Indêpendência de Portugal, 1999); Timothy Barnard, *Multiple Centres of Authority: Society and Environment in Siak and Eastern Sumatra, 1674-1827* (Leiden: KITLV Press, 2003).

Bab 2

1. William Marsden, *The History of Sumatra* (London, 1783; Third revised ed. London, 1811; cetak ulang di Kuala Lumpur: OUP, 1966); A. Eschels-Kroon, *Beschreibung der Insel Sumatra* (Hamburg, 1781); J.C.M. Radermacher, "Beschrijving van het Eiland Sumatra in zo verre het zelve tot nog toe bekend is" (Batavia: *VBG* 3, 1781).
2. C. Lekkerkerker, *Land en Volk van Sumatra* (Leiden: Brill, 1916); O.J.A. Collet, *Terres et Peuples de Sumatra* (Amsterdam: Société d'édition "Elsevier", 1925); Edwin M. Loeb, *Sumatra. Its History and People* (Vienna: Institut für Völkerkunde der Universität Wien, 1935).
3. Cf. R. Roolvink, *Bahasa Jawi: De Taal van Sumatra* (Leiden: Universitaire Pers, 1975).

4. Anthony Reid & David Marr, ed., *Perceptions of the Past in Southeast Asia* (Singapore: Heinemann for Asian Studies Association of Australia, 1979), hlm. 171-85, 287.
5. Kupasan terkini dan terbaik mengenai semua hal ini terdapat dalam Jane Drakard, *A Kingdom of Words: Language and Power in Sumatera* (Kuala Lumpur: OUP, 1999), hlm. 16-24. Andalas dan Bukit Siguntang tercantum dalam "Sejarah Melayu" atau "Malay Annals". "A translation of Raffles MS 18", penterjemah C.C. Brown, *JMBRAS* 25, 2 & 3. Andalas disebut sebagai sebuah kerajaan di pedalaman dalam Tome Pires, *The Suma Oriental of Tomé Pires* (terjemahan A. Cortesao), 2 jilid. (London: Hakluyt Society, 1944), hlm. 136, 155, 159-60. Untuk Pulo Percha lihat A.H. Hill, "Hikayat Raja-Raja Pasai", *JMBRAS* 33, 2 (1961): 103, 170-1; Marsden, *The History of Sumatra* (1811), hlm. 339n.
6. John Crawfurd, *A Descriptive Dictionary of the Indian Islands and Adjacent Countries* (London: Bradbury & Evans, 1856), hlm. 413.
7. F.X.J.H. Brau de St. Pol Lias, *La cote du poivre* (Paris, 1891), hlm. 74-5.
8. N.J. Krom, "De naam Sumatra", *BKI* 100 (1941): 22-5.
9. Drakard, *A Kingdom of Words,* hlm. 122-5, 184-99; J. Kathirithamby Wells, "Ahmad Shah ibn Iskandar and the late seventeenth century `Holy War' in Indonesia", *JMBRAS* 43 (1970): 48-63; Marsden, *The History of Sumatra,* hlm. 337.
10. Leonard Y. Andaya, *The Kingdom of Johor 1641-1728* (Kuala Lumpur: OUP, 1975), hlm. 250-314; Drakard, *A Kingdom of Words,* hlm. 197-200.
11. Marsden, *The History of Sumatra,* hlm. 376-7.
12. Untuk pandangan ini saya berutang budi kepada Christine Dobbin.
13. Batara Sangti, *Sejarah Batak* (Medan, 1977), hlm. 24-6.
14. Masri Singarimbun, *Kinship, Descent and Alliance among the Karo Batak* (Berkeley: University of California Press, 1975), hlm. 6; juga Anthony Reid, *The Contest for North Sumatra: Atjeh, the Netherlands, and Britain, 1868 - 1898* (Kuala Lumpur: OUP, 1969), hlm. 153.
15. Dikutip dalam Reid, *The Contest for North Sumatra,* hlm. 269.
16. Lihat Bab 7.
17. Reid, *The Contest for North Sumatra,* hlm. 198-201.
18. JSB, *Gedenknummer Jong Sumatranen Bond 1917-1922* (Batavia, 1922), hlm. 19.
19. Lance Castles, "The Political Life of a Sumatran Residency: Tapanuli 1915-1940", Tesis PhD tidak diterbitkan (Yale University, 1972), hlm. 175.
20. *Overzicht van de Inlandsche en Maleisch-Chineesche Pers (,PO)* (Weltevreden: Bureau voor de Volkslectuur, 1921), hlm. 528-32, 568-71.
21. Ibid., 1922, II, hlm. 42-4; Taufik Abdullah, *School and Politics: The Kaum Muda movement in West Sumatra (1927-1933)* (Ithaca: Cornell Modern Indonesia Project, 1971), hlm. 31.

22. S. van der Harst, *Overzicht van de Bestuurshervorming in de Buitengewesten van Nederlandsch-Indie, in het bijzonder op Sumatra* (Utrecht: A. Oosthoek, 1945), hlm. 46-8.
23. Ibid., hlm.70-2.
24. Lihat Bab 13.
25. Ibid.
26. Amir, dikutip dalam Bab 13.
27. Weekly Intelligence Summary (WIS) No. 13, Public Record Office (London), W0172/9893, 1946.
28. Anthony Reid, *The Blood of the People: Revolution and the End of Traditional Rule in Northern Sumatra* (Kuala Lumpur: OUP, 1979), hlm. 244.
29. Michael Van Langenberg, "National Revolution in North Sumatra: Sumatra Timur and Tapanuli, 1942-1950", Tesis PhD tidak diterbitkan (Sydney University, 1976), hlm. 569, 667-8.
30. Republik Indonesia, *Propinsi Sumatera Utara* (Jakarta: Kementerian Penerangan, 1953), hlm. 183-4. Dipindahkannya ibukota Sumatra Utara ke Medan setelah Kemenangan Republik pada 1950 merupakan salah satu dari penyebab konflik yang pecah, yang diuraikan dalam Bab 14.
31. Idenberg, "Memorandum van directeur-generaal algemene zaken aan Lt. gouverneur-generaal (Van Mook), 27-ii-1947", dalam *Officiele Bescheiden Betreffende de Nederlands-Indonesische Betrekkingen 1945-19S0,* ed. S.L. van der Wal ('s-Gravenhage: Martinus Nijhoff, 1978), vol. 7, 27 Feb. 1947.
32. Ibid., hlm. 577.
33. Ibid., hlm. 582.
34. Ibid., hlm. 584.
35. Van Langenberg, "National Revolution in North Sumatra", hlm. 765-76.
36. Dikutip Republik Indonesia, *Propinsi Sumatera Utara,* hlm. 296.
37. Ibid., hlm. 322-4.
38. Van Langenberg, "National Revolution in North Sumatra", hlm. 500.
39. Lihat, misalnya, Koanda Sumatera, *Almanak Sumatera 1969* (Medan: Komando Antar Daerah, 1969) dan Dada Meuraxa, *Sejarah Kebudayaan Sumatera* (Medan: Hasmar, 1974).

Bab 3

1. Fernand Braudel, *The Mediterranean and the Mediterranean world in the age of Philip II,* terjemahan Sian Reynolds (NewYork: Harper and Row, 1972), I, hlm. 29.

2. Peter Bellwood, *Prehistory of the Indo-Malaysian archipelago* (Sydney: Academic Press, 1985), hlm. 102-15.
3. R.H. Barnes, *Kedang; A Study of the collective thought of an eastern Indonesian people* (Oxford: Clarendon Press, 1974), hlm. 28-37; E. Lebar, ed., *Ethnic groups of insular Southeast Asia. Vol. 1: Indonesia, Andaman Islands, and Madagascar* (New Haven: Human Relations Area Files, 1972), hlm. 126; Helen and Anthony Reid, *South Sulawesi* (Berkeley: Periplus, 1988), hlm. 84; Joost Coté, "The colonisation and schooling of the Pamona of Central Sulawesi, 1895-1925", tesis MA (Monash University, Melbourne).
4. Proses imigrasi terus berjalan. Menurut Sensus 1991 ada 139.403 warga Malaysia asal Indonesia, dan 425.175 warga non-Malaysia di Sabah—dari ini menurut perkiraan saya 70% berasal dari Indonesia, sedangkan selebihnya orang Filipina. Karena itu, seperempat dari penduduk Sabah adalah pendatang baru, yang merupakan mayoritas di wilayah dataran rendah timur. *General Report of the Population Census, 1991* (Kuala Lumpur: Department of Statistics, 1995).
5. Lebar, ed., *Ethnic groups of insular Southeast Asia,* hlm. 180-1; B. Sandin, *The Sea Dayaks of Borneo before White Rajah rule* (London: Macmillan, 1967), hlm. 1-2.
6. Lebar, ed., *Ethnic groups of insular Southeast Asia,* hlm. 159; VT King, *The peoples of Borneo* (Oxford: Blackwell, 1993), hlm. 47-8, 100-2, 116-7, 265.
7. Dikutip dalam Lebar, ed., *Ethnic groups of insular Southeast Asia,* hlm. 168-9.
8. B. Topin, "The origin of the Kadazan/Dusun; Popular theories and legendary tales", dalam *Pesta Kaamatan Peringkat Negeri* (Kota Kinabalu: Kadazandusun Cultural Centre, 1993), hlm. 42-4; LH.N. Evans, *The religion of the Tempasuk Desuns of North Borneo* (Cambridge: Cambridge University Press, 1953), hlm. 187-8.
9. C. Bock, *The headhunters of Borneo; A narrative of travel up the Mahakkam and down the Barito [...]* (London: Sampson Low, Marston, Searle and Rivington, 1881), hlm. 234; H.J. Schophuys, *Het stroomgebied van de Barito, Landbouwkundige kenschets en land-bouwvoorlichting*(Wageningen Veenman, tesis PhD, Landbouwuniversiteit Wageningen, 1936), hlm. 84-126.
10. L.M. Potter, "Banjarese in and beyond Hulu Sungai, South Kalimantan: A study of cultural independence, economic opportunity and mobility", dalam J.T Lindblad, ed., *New challenges in the modern economic history* of *Indonesia; Proceedings of the first conference on Indonesia's modern economic history* (Leiden, Programme of Indonesian Studies, 1993), hlm. 270-9.
11. D. Henley, "Population and environment in precolonial northern Sulawesi". Makalah disajikan dalam The 13th Biennial Conference of the Asian Studies Association of Australia (Perth, 13-16 July 1994), dan surat menyurat pribadi.

12. C. Pelras, "Célèbes-sud avant l'Islam, selon les premiers temoignages étrangers", *Archipel* 21 (1981): 153-84.
13. A. Reid, "The rise of Makassar", *Review of Indonesian and Malaysian Affairs* 17 (1983): 117-60; Ian Caldwell, "South Sulawesi A.D. 13001600; Ten Bugis Texts", Thesis PhD (Australian National University, Canberra, 1988).
14. H.G. Schulte Nordholt, *The political system of the Atoni of Timor* (The Hague: Nijhoff for KITLV, Verhandelingen 60, 1971); Lebar, ed., *Ethnic groups of insular Southeast Asia,* hlm. *103.*
15. F. de Haan, *Priangan; De Preanger-Regentschappen onder het Nederlandsch bestuur tot 1811, Vol. 1* (Bataviaasch Genootschap van Kunsten en Wetenschappen, 1910), hlm. 381-8.
16. Th.G.Th. Pigeaud, *Yava in the 14th century: A study in cultural history,* Vol. IV (The Hague: Nijhoff for KITLV, Translation Series 4, 4, 1962), hlm. 291.
17. F.Mendes Pinto, *The travels of Mendes Pinto,* terjemahan Rebecca Catz (Chicago: University of Chicago Press, 1989), hlm. 20-9.
18. R.W Hefner, *The political economy of mountain Java: An interpretive history* (Berkeley: University of California Press, 1990), hlm. 35.
19. A. Reid, "An 'age of commerce' in Southeast Asian history?" *Modern Asian Studies* 24, 1 (1990): 1-30; A. Reid, *Southeast Asia in the age of commerce, 1450-1680.* Vol. 2: *Expansion and crisis* (New Haven/London: Yale University Press, 1993).
20. Reid, *Southeast Asia in the Age of Commerce,* vol. 2, hlm. 270-303. 21. Rijklof van Goens, *De vijf gezantschapsreizen van Rijklof van goens naar het hof van Mataram, 1648-1654,* ed. H.J. de Graaf ('s-Gravenhage, Nijhoff: Werken Linschoten-Vereeniging 59, 1956), hlm. 225.
22. J. Hageman, "Geschied-en aardrijkskundig overzigt van Java op het einde der achttiende eeuw", TBG 9 (1860): 261-419; M.C. Ricklefs, "Some statistical evidence on Javanese social, economic, and demographic history in the later seventeenth and eighteenth centuries", *Modern Asian Studies* 20, 1 (1986): 1-32.
23. Hageman, "Geschied-en aardrijkskundig", hlm. 267.
24. P. Boomgaard, *Children of the colonial state: Population growth and economic development in Java, 1795-1880* (Amsterdam: Free University Press, CASA Monographs 1, 1989), hlm. 166.
25. P.J. Veth, *Atchin en zijne betrekkingen tot Nederland: Topographisch-historische beschrijving* (Leiden: Kolff, 1873), Map 1.
26. B. Maloney, "Grass pollen and the origins of rice agriculture in North Sumatra", *Modern Quarternary Research in Southeast Asia* 11 (1989): 135-61; P. Bellwood, *Prehistory of the Indo-Malaysian archipelago* (Sydney: Academic Press, 1985), hlm. 230-1.

27. Yoneo Ishii, *Thailand: A rice-growing society* (Honolulu: University of Hawaii Press, 1975), hlm. 164-91; S. Tanabe, *Ecology and practical technology: Peasant farming systems in Thailand* (Bangkok: White Lotus, 1994), hlm. 23-46; Sakurai Yumio, surat menyurat pribadi.
28. H.R. van Heekeren, *The bronze-iron age of Indonesia* ('s-Gravenhage: Nijhoff for KITLV, Verhandelingen 22, 1958), hlm. 20-1, 63-78.
29. B.W Andaya, *To live as brothers: Southeast Sumatra in the seventeenth and eighteenth centuries* (Honolulu: University of Hawaii Press, 1993), hlm. 18-9; A. Oki, "The river trade in Central and South Sumatra in the 19th century", dalam T Kato, M. Lufti and N. Maeda, ed., *Environment, agriculture and society in the Malay world* (Kyoto: Centre for Southeast Asian Studies, Kyoto University, 1986), hlm. 21, 24-35.
30. C. Dobbin, *Islamic revivalism in a changing peasant economy, Central Sumatra, 1784-1847* (London/Malö: Curzon, 1983), hlm. 42-3.
31. J. Kathirithamby-Wells, *The British West Sumatran Presidency, 1760-1785, Problems of early colonial enterprise* (Kuala Lumpur: University of Malaya Press, 1977), hlm. 116-20.
32. A. Reid, *Witnesses to Sumatra, A travellers' anthology* (Kuala Lumpur: Oxford University Press, 1995), hlm. 174, 180.
33. Andaya, *To live as brothers,* hlm. 230.
34. Sophia Raffles, ed., *Memoir of the life and public services of Sir Thomas StamfordRaffles [...]* Edisi Baru (London: Duncan, 2 jilid, 1835), 1: 347-8.
35. Dikutip dalam Hoven, 1927, hlm. 13; juga Andaya, *To live as brothers,* hlm. 229-31.
36. Kathirithamby-Wells, *The British West Sumatran Presidency,* hlm. 116.
37. *Statistisch jaaroverzicht* 1927: 36. Angka-angka jumlah total penduduk asli ini harus dibaca dengan sangat hati-hati karena hampir 2,8 juta orang penduduk (20%) di Outer Islands (pulau-pulau luar Jawa) dimasukkan ke dalam kategori penduduk yang "tidak diketahui" sukunya. Sensus 1930 lebih berhati-hati, dalam arti menggabungkan semua ini tetapi dengan akibat menghasilkan pengelompokan-pengelompokan yang lebih besar dan kabur. Penduduk kategori orang "Palembang" meloncat menjadi 733.000 dalam sensus itu (kemungkinan karena definisi orang "Palembang" diperluas), sementara itu ada 83.000 orang Besemah, 44.000 orang Semendo, 67.000 orang Serawai dan 89.000 orang Rejang-Lebong, tetapi orang Ogan dan Komering sama sekali tidak disebut-sebut *Volkstelling 1930* (Batavia: Departement van Economische Zaken/Landsdrukkerij, 8 vols., 1933-6), hlm. 91-2.
38. *Volkstelling 1930,* VIII, hlm. 91-2; Mochtar Naim, *Merantau, Pola migrasi suku Minangkabau* (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1984), hlm. 31.
39. Dobbin, *Islamic revivalism,* hlm. 16, 43.

40. E. Graves, "The ever-victorious buffalo, How the Minangkabau of Indonesia solved their `colonial question'", tesis PhD (University of Wisconsin, 1971), hlm. 24.
41. Graves, "The ever-victorious buffalo", hlm. 24-5.
42. Biro Pusat Statistik, *Penduduk Indonesia, Hasil sensus penduduk* (Jakarta: Biro Pusat Statistik, 1990), hlm. 22.
43. Naim, *Merantau,* hlm. 116.
44. Biro Pusat Statistik, *Penduduk Indonesia,* hlm. 67-9.
45. W Hoeta Galoeng, *Poestaha taringot toe tarombo ni halak Batak* (Laguboti: Zendingsdrukkerij, 1926); W K.H. Ypes, *Bijdrage tot de kennis van de stamverwantschap der inheemsche rechtsgemeenchappen en het grondrecht der Toba- en Dairibataks* (Leiden: Adatrechstichting, 1932).
46. J.C. Vergouwen, *The social organisation and customary law of the Toba Batak of northern Sumatra* (The Hague: Nijhoff for KITLV, Translation Series 7, 1964), hlm. 21.
47. L. Castles, "Sources for the population history of northern Sumatra" *(Masyarakat Indonesia* 2-2, 1975), hlm. 198-209.
48. C. Cunningham, *The postwar migration of the Toba Bataks to East Sumatra* (New Haven: Yale University Southeast Asia Studies, 1958), hlm. 11.
49. G. Sherman, *Rice, rupees and ritual. Economy and society among the Samosir Batak of Sumatra* (Stanford: Stanford University Press, 1990), hlm. 234.
50. G.L. Tichelman, "Bataksch arbeidsreservaat" *(Koloniaal Tijdschrift* 25, 1936) hlm. 399-403; Cunningham, *The postwar migration of the Toba Bataks,* hlm. 82.
51. Naim, *Merantau,* hlm. 49; Cunningham, *The postwar migration of the Toba Bataks,* hlm. 85-7.
52. Castles, "Population history of northern Sumatra", hlm. 196-8.
53. M. Joustra, *Batakspiegel* (Leiden: Van Doesburgh, 1910), hlm. 53, 66, 78.
54. Naim, 1977, hlm. 51. Tapal batas jelas berdampak pada penetapan peringkat ini. Orang Minangkabau dan orang Minahasa turun ke pelabuhan pantai setempat, pelabuhan itu masih berada dalam provinsi yang didominasi oleh kelompok suku mereka, sedangkan orang Batak Toba dan orang Batak Mandailing yang pindah ke Sumatra Timur dicatat (pada 1930, tetapi tidak lagi dihitung setelah itu) sebagai migran lintas provinsi.
55. Naim, *Merantau.* hlm. 49.
56. Cunningham, *The postwar migration of the Toba Bataks,* hlm. 59, 64.
57. Usman Pelly, *Urban migration and adaptation in Indonesia: A case- study of Minangkabau and Mandailing Batak migrants in Medan, North Sumatra,* tesis PhD (University of Illinois, 1983), hlm. 103.

58. Biro Pusat Statistik, *Indikator kesejahteraan rakyat 1993; Sumatera Utara* (Medan: Biro Pusat Statistik, 1994), hlm. 35.
59. Cunningham, *The postwar migration of the Toba Bataks,* hlm. 78.
60. G.J. Hugo, T.H. Hull, V.J. Hull and G.W Jones, *The demographic dimension in Indonesian development* (Singapore: OUP, 1987), hlm. 89; Biro Pusat Statistik, *Penduduk Indonesia.*
61. Dikutip oleh Tanabe, *Ecology and practical technology,* hlm. 14.
62. Michael Dove, *Swidden agriculture in Indonesia: The subsistence strategies of the Kalimantan Kantu'* (Berlin: Mouton, 1985), hlm. 131-56.
63. Sherman, *Rice, rupees and ritual,* hlm. 19.
64. P. Gourou, *The tropical world; Its social and economic condition and its future status,* terjemahan E.D. Laborde (London: Longmans, 1960), hlm. 6-8. [Edisi pertama 1953.]
65. P. H. van der Brug, *Malaria en malaise: De VOC in Batavia in de achttiende eeuw* (Amsterdam: De Bataafsche Leeuw, 1994), hlm. 82-3 [Tesis PhD, Rijksuniversiteit Leiden].
66. Brug, *Malaria en malaise,* hlm. 201-6.
67. Raffles, *Sir Thomas Stamford Raffles,* hlm. 350; Dobbin, *Islamic revivalism,* hlm. 42-3.
68. M.A. Jaspan, *From patriliny to matriliny; Structural change among the Redjang of Southwest Sumatra,* tesis PhD (Australian National University, Canberra, 1964), hlm. 17; Sherman, *Rice, rupees and ritual,* hlm. 22-3.
69. Braudel, *The Mediterranean,* hlm. 1-38.
70. Jane Drakard, A *kingdom of words; Minangkabau sovereignty in Sumatran history,* tesis PhD (Australian National University, Canberra, 1993); Castles, *Population history of northern Sumatra,* 1972.
71. Kulke 1986; Wisseman 1977; Schulte Nordholt 1993; Reid 1993a.
72. W. Collins, *Basemah concepts; A study of the culture of a people of South Sumatra,* tesis PhD (University of California, 1979), hlm. 90-2.
73. J.F. Warren, *The Sulu zone, 1768-1898; The dynamics of external trade, slavery, and ethnicity in the transformation of a Southeast Asian maritime state* (Singapore: Singapore University Press, 1981), hlm. 208.
74. Andaya, *To live as brothers,* hlm. 96.
75. Castles, "Population history of northern Sumatra", hlm. 199.
76. Rita Kipp, *Dissociated identities; Ethnicity, religion and class in an Indonesian society* (Ann Arbor: University of Michigan Press, 1993).

Bab 4

1. *Encyclopedia of Islam* III, hlm. 1174-5.
2. *The History of Sumatra,* 3rd ed. (London, 1811).
3. Ibid., hlm. 338-41.
4. Siti Hawa Saleh, *Hikayat Merong Mahawangsa,* Tesis MA tidak diterbitkan (University of Malaya, 1966). Abdullah b. Haji Musa Lubis, ed., *Kesah Raja Marong Maha Wangsa* (Kuala Lumpur: Pustaka Antara, 1965). R.O. Winstedt, "The Kedah Annals", *JMBRAS* 16, 11 (1938): 31-5. C. Hooykaas, *Over Maleise Literatuur,* edisi 22 (Leiden: E.J. Brill, 1947), hlm. 91-4.
5. H.M. Zainuddin, *Tarich Aceh dan Nusantara* (Medan: Pustaka Iskandar Muda, 1961), hlm. 197-8. Untuk rujukan yang lain mengenai asal usul orang Gayo lihat A.H. Hill, ed., "Hikayat Raja-Raja Pasai", *JMBRAS* 33, 2 (1960): 120.
6. Ia-lah yang meng'adahan segala isti'adat kerajaan Aceh Daru's-Salam dan menyuroh utusan kapada Sultan Rum, ka-negeri Istanbul, kerana menegohkan ugama Islam. Maka di-kirim Sultan Rum daripada jenis utus dan pandai yang tahu menuang bedil. Maka pada zaman itu-lah dituang orang meriam yang besar2. Dan ia-lah yang pertama2 berbuat kota di-negeri Aceh Daru's-Salam, dan ia-lah yang pertama2 ghazi dengan segala kafir, hingga sendiri-nya berangkat menyerang Melaka. T. Iskandar, ed., *Bustanu's-Salatin Bab II, Fasal 13* (Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka, 1966), hlm. 31-2.
7. Meriam itu digambarkan dalam K.C. Krucq, "Beschrijving der kanonnen afkomstig uit Atjeh, thans in het Koninklijk Militair Invalidenhuis Bronbeek", TBG 81 (1930): 545-6.
8. Ini diterbitkan hanya dalam bentuk sebuah prosa Melayu terjemahan T. Mohamad Sabil, berjudul "Hikajat Soeltan Atjeh Marhoem (Soeltan Iskandar Moeda)" (Batavia, 1932). H.K.J. Cowan percaya naskah asli berbahasa Aceh merupakan gubahan dari syair kepahlawanan Aceh yang lebih terkenal *Hikayat Malem Dagang,* dengan tambahan pada awalnya berupa insiden Turki ini. *De "Hikajat Malem Dagang",* The Hague (1937), hlm. 12-13.
9. Sabil, "Hikajat Soeltan Atjeh Marhoem", hlm. 3-11.
10. Snouck Hurgronje, *The Achehnese,* terjemahan A.W.S. O'Sullivan (Leiden: E.J. Brill, 1906), hlm. 208-9. Juga Mohammad Said, *Atjeh Sepandjang Abad* (Medan, 1961), hlm. 101. Tafsiran mengenai misi ini sebagai misi upeti, bukan misi persekutuan, dalam versi 1891, mungkin ada kaitannya dengan peristiwa-peristiwa 1873, ketika orang Aceh berusaha melukiskan negeri mereka sebagai berada di bawah kekuasaan Turki.
11. Saffet Bey, "Bir Osmanli Filosunun Sumatra Seferi", *Tarihi Osmani Encümeni Mecmuasi 11* (1912): 681-3. Lihat Lampiran untuk bahan ini.

12. Tampaknya yang dimaksud di sini Sultan Selim I (1512-20). Sultan Selim I menaklukkan Mesir pada 1517 dan mendapat sebagai akibatnya Hejaz sebagai daerah bawahan. Jika demikian, ini pasti menimbulkan keragu-raguan dalam diri Selim II (1566-78)–kontak itu terjadi di bawah pemerintahannya–dan Yaman ditaklukkan kembali (lihat bawah, hlm. 16-7). Sama halnya, sebuah suratkabar Turki tahun 1873 mengaitkan ini dengan Selim I; lihat R.H. Djajadiningrat, "Critisch Overzicht van de in Maleische Werken Vervatte Gegevens over de Geschiedenis van het Soeltanaat van Atjeh", *BKI* 65 (1911): 146. Agak mencengangkan, K.C. Krucq, *op. cit.,* hlm. 546, tampaknya juga melakukan kesalahan ini.
13. Rashid (Menteri Luar Negeri Turki) kepada Musurus (Duta Besar untuk Inggris dan Belanda), 11 Agustus 1873, dalam J. Woltring, ed., *Bescheiden Betreffende de Buitenlandse Politiek van Nederland, 2de Periode,* The Hague (1962), hlm. 1, 612.
14. T. Iskandar, ed., "De Hikajat Atjeh", VKI 26 (1958): 167 (hlm. 239 MS.
15. Ibid., hlm. 167 (hlm. 238 MS).
16. Ibid., hlm. 62-4 dan 157-69 (hlm. 215-42 MS). Juga Djajadiningrat, "Critisch Overzicht", hlm. 177-8.
17. *Hikajat Hang Toeah* (edisi 2, Balai Pustaka, Batavia, 1948), II, hlm. 237-87.
18. Charles Boxer, "A Note on Portuguese Reactions to the Revival of the Red Sea Spice Trade and the Rise of Atjeh, 1540-1600", *JSEAH 10,* 3 (1969): 415-28.
19. Sejak versi asli artikel ini, sumber-sumber dari Ottoman juga sudah dibahas dalam Anthony Reid, *Southeast Asia in the Age of Commerce,* II (1993), hlm. 146-7, dan Naimur Rahman Farooqi, "Mughal-Ottoman Relations: A study of political and diplomatic relations between h1ughal India and the Ottoman Empire, 1556-1748", PhD diss. (University of Wisconsin, 1986), hlm. 267-8.
20. Djajadiningrat, "Critisch Overzicht", hlm. 152.
21. Donald Lach, *Asia and the Making of Europe, 1, ii,* hlm. 107. R.B. Serjeant, *The Portuguese off the South Arabian Coast, Hadrami Chronicles* (Oxford: Clarendon Press, 1963), hlm. 14.
22. Boxer, "A Note on Portuguese Reactions", hlm. 416.
23. M.A.P. Meilink-Roelofsz, *Asian Trade and European Influence in the Indonesian Archipelago between 1500 and about 1630* (The Hague: Nijhoff, 1962), hlm. 145.
24. Iskandar, "De Hikajat Atjeh", hlm. 38.
25. Iskandar, loc. cit.; Djajadiningrat, "Critisch Overzicht", hlm. 152-3.
26. Tidak dapat diandalkannya Pinto telah terbukti dalam kasus penjelajahannya, konon, di Siam dan di tempat-tempat lain, tetapi tidak untuk Sumatra, yang lebih banyak sangkut pautnya dengan para informannya di Melaka. Tulisannya dikukuhkan secara umum oleh sejumlah rujukan Portugis yang lain (MacGregor, "Johore Lama in the Sixteenth Century", hlm. 82) dan diikuti secara konsisten oleh para sejarawan di wilayah itu.

27. F. Mendes Pinto, *The travels of Mendes Pinto,* terjemahan Rebecca Catz (Chicago: University of Chicago Press, 1989), hlm. 19-22.
28. Serjeant, *The Portuguese off the South Arabian Coast,* hlm. 76-7 dan 79-80. E. Denison Ross, "The Portuguese in India and Arabia 1517-1538", *JRAS* (1922): 15.
29. LA. MacGregor, "Johore Lama in the Sixteenth Century", *JMBRAS* 28, 2: 81.
30. Tulisan Hadhrami al-Sana al-Bahir, mengutip Serjeant, *The Portuguese off the South Arabian Coast,* hlm. 97.
31. M. Longworth Dames, "The Portuguese and Turks in the Indian Ocean in the Sixteenth Century", *JRAS* (1921).
32. *Travels of Mendez Pinto,* hlm. 47.
33. Ibid., hlm. 45-57.
34. MacGregor, "Johore Lama in the Sixteenth Century", hlm. 84-5, mengutip Simao de Mello, 1545, dan Luis Frois, S.J., 1555.
35. H.J. de Graaf, "De Regering van Panembahan Senapati Ingalaga", VKI 13 (1954): 33-4; PA. Tiele, "De Europeërs in den Maleischen Archipel", *BKI* 28 (1880): 321, Meilink-Roelofsz, *Asian Trade and European Influence,* hlm. 149. Sumber utama semua referensi ini adalah Diogo Do Couto, *Da Asia* (Lisbon, 1786; cetak ulang 1974), Decada 8; Cahlm. XXI, hlm. 130-2.
36. Ketika Ala'ad-din al-Kahar pada 1571, dan barangkali beberapa waktu sebelumnya, putranya, Raja Mughal, diangkat sebagai wakil raja di Pariaman. Berdasar pengalaman abad ke-18 dan ke-19, cara-cara orang Aceh bertanam lada di tanah perawan itu mulai menghasilkan kenaikan produksi yang semakin lama semakin menurun dalam waktu kurang dari satu abad sebagai akibat dari kelelahan tanah [lihat terutama J. Gould, "Sumatra - America's Pepperpot, 1784-1873", *Essex Institute, Historical Collections* 122 (1956): 207-39 and 297-319]. Pusat-pusat lama pertanian lada, Pidie dan Pasai, yang masih berada di puncak pada zaman Tome Pires, sudah tidak penting lagi pada akhir abad ke-15. Karena itu dapat disimpulkan bahwa ada pergeseran pusat pertanian lada pada sekitar pertengahan abad ke-16 karena pertumbuhan yang cepat perkebunan lada di pantai barat.
37. Von Hammer, dikutip dalam Denys Lombard, *Le Sultanat d'Acheh au temps d'Iskandar Muda* (Paris, 1967), hlm. 37n.
38. Tiele, "De Europeërs in den Maleischen Archipel", hlm. 424.
39. Boxer, "A Note on Portuguese Reactions", hlm. 418; Serjeant, *The Portuguese off the South Arabian Coast,* hlm. *110.*
40. Farooqi, "Mughal-Ottoman Relations", hlm. 267-8, 289. Sebelumnya petisi ini diketahui hanya karena dikutip dalam jawaban Turki—lihat Saffet Bey, "Bit Osmanli Filosunun Sumatra Seferi", *TOEM 10* (1912): 606-8 (untuk ini lihat lampiran bab ini; Reid, *Southeast Asia in the Age of Commerce,* hlm. 147. Farooqi yang pertama kali menyadari bahwa permohonan 1566 yang dicatat dalam arsip

Ottoman sebagai berasal dari "The Muslims of Hindistan" sebenarnya dari Sultan Aceh.

41. Saffet, "Bir Osmanli Filosunun Sumatra Seferi", hlm. 606-9.
42. Saffet, "Bir Osmanli Filosunun Sumatra Seferi", II, hlm. 680.
43. Ibid., *loc. cit.*
44. Couto, *Decada 8,* cap. 21, hlm. 131.
45. Couto, *Decada 8,* cap. 21 dan 22.
46. Menurut asumsi Tiele, "De Europeers in den Maleischen Archipel", hlm. 425; De Graaf, "De Regering van Panembahan Senapati Ingalaga", hlm. 69; Djajadiningrat, "Critisch Overzicht", hlm. 155; Meilink-Roelofsz, *Asian Trade and European Influence,* hlm. 149; dan Boxer, "A Note on Portuguese Reactions", hlm. 420.
47. Surat-surat L. Peres, Malacca, November dan 2 Desember 1566, dalam J. Wicki, ed., *Documenta Indica VII* (MHSI 89, Rome, 1962), hlm. 33-4 dan 89. Tiele, "De Europeërs in den Maleischen Archipel", hlm. 425-6, diragukan kebenaran kisah ini, tetapi sumbernya hanya satu, yakni sumber sekunder Jesuit.
48. Wicki, *Documenta Indica VII,* hlm. 88.
49. Surat C. da Costa, Malacca, 6 Desember 1868, Wicki, *Documenta Indica* VII, hlm. 529-30. Juga ibid., hlm. 514-5 dan 574-5.
50. Wicki, *Documenta Indica VIII* (MHSI 91, Rome, 1964), hlm. 489-9. F.C. Danvers, *The Portuguese in India* (London: WH. Allen, 1894), 1, hlm. 551-71.
51. *The voyage of John Huyghen van Linschoten to the East Indies* (London: Hakluyt, 1885) I, hlm. 110. Keheranan Linschoten mengenai ukuran meriam ini, "yang boleh dikatakan tidak ada di Kerajaan Kristen", berkumandang pula dalam tulisan-tulisan Eropa yang lain pada zaman itu mengenai artileri Turki. Untuk tulisan mengenai kesibukan Turki yang sudah bukan zamannya lagi dengan ukuran dan bukan denan efisiensi terkait dengan meriam mereka, lihat C.M. Cipolla, *Guns and Sails in the Early Phase* of *European Expansion* (London, 1965), hlm. 93-9.
52. De Graaf, "De Regering van Panembahan Senapati Ingalaga", hlm. 345 MacGregor, "Johore Lama in the Sixteenth Century", hlm. 86.
53. MacGregor, "Johore Lama in the Sixteenth Century", hlm. 86-8.
54. Hubungan semacam itu hanya terdapat di antara kerajaan-kerajaan kecil pra-Muslim yang bertetangga, terutama di Sulawesi Selatan pada abad ke-16. Lihat G.J. Resink, *Indonesia's History between the Myths* (The Hague: W van Hoeve, 1967), hlm. 201.
55. Contoh yang jelas mengenai persaingan ini adalah pedagang-pedagang Turki yang dijumpai Belanda di Bantam pada 1596, yang tidak dapat kembali ke Turki lewat Aceh karena Sultan menangkap semua pedagang yang datang dari Bantam. J. C. van Leur, *Indonesian Trade and Society* (The Hague: W van Hoeve, 1955), hlm. 3-4.

56. Surat De Ribera (Macau, Oct. 1568), dalam Wicki, *Documenta Indica VII,* hlm. 514.
57. W.E.D. Allen, *Problems of Turkish Power in the Sixteenth Century* (London, 1930), hlm. 30.
58. E.S. Creasy, *History of the Ottoman Turks* (London: R. Bentley, 1878), hlm. 224-5.
59. Allen, *Problems of Turkish Power in the Sixteenth Century,* hlm. 32-3. Longworth Dames, "The Portuguese and Turks in the Indian Ocean", hlm. 25-8. MacGregor, "Johore Lama in the Sixteenth Century", hlm. 88. Iskandar, *Bustanu's-Salatin Bab II,* hlm. 39.
60. MacGregor, "Johore Lama in the Sixteenth Century", hlm. 88. Iskandar, *Bustanu's-Salatin Bab II,* hlm. 39.
61. Boxer, "A Note on Portuguese Reactions", hlm. 427-8.
62. *The Voyages of Sir James Lancaster to Brazil and the East Indies 1591-1603* (London: Hakluyt, 1940), hlm. 94-5 dan 97-8. *The Voyages and Works of John Davis the Navigator* (London: Hakluyt, 1880), hlm. 142-3.
63. Augustin de Beaulieu, *Memoires d'un voyage aux Indes Orientales, 1619-1622,* ed. Denys Lombard (Paris: Maisonneuve et Larose, 1996), hlm. 199-200.
64. Ibid., hlm. 205.
65. Lihat terutama ibid., hlm. 199-213.
66. Djajadiningrat, "Critisch Overzicht", hlm. 160-1.
67. *Voyages of Sir James Lancaster,* hlm. 96 dan 109-11.
68. Artikel, "Atjeh", *Encyclopedia of Islam I,* hlm. 743.
69. "Bir Osmanli Filosunun Sumatra Seferi", 10, hlm. 604-14; 11, hlm. 678-83.
70. Tuanku Daud, yang mengundurkan diri dari Kesultanan karena menyerah kepada Belanda pada 1903, dan diasingkan dari Aceh tiga tahun kemudian.
71. Abdur'rauf dari Singkil (sekitar 1615-93), tokoh nasional Aceh. Ia dikenal sebagai Teungku Sheikh Kuala karena *keramat*—makamnya terletak di muara sungai Aceh. Pengaitan namanya dengan ekspedisi Turki tampaknya tidak ada dasarnya. Peter G. Riddel, *Islam and the Malay Indonesian World* (Honolulu: University of Hawaii Press, 2001), hlm. 125-32.
72. *Osmanli Tarihi* II (Ankara, 1949), hlm. 388-9.
73. I.H. Danismend, *Osnaanli Tarihi Kronolojisi II* (Istanbul, 1948), hlm. 380-1.

Bab 5

1. M.A.P. Meilink-Roelofsz, *Asian Trade and European Influence in the Indonesia Archipelago between 1500 and about 1630* (The Hague: Nijhoff, 1962), hlm. 8.

2. *The Travels of Marco Polo,* terjemahan R.E. Latham (London: Penguin, 1958*),* hlm. 225.
3. Nuru'd-din ar-Raniri, *Bustanu's-Salatin, Bab II, Fasal 13,* ed. T. Iskandar (Kuala Lumpur, 1966*),* hlm. 31.
4. *The Suma Oriental of Tome Pires,* terjemahan Armando Cortesao (London: Hakluyt, *1944),* vol. I, hlm. 143.
5. Lihat Bab 4.
6. Dikutip oleh Charles Boxer, "A Note on Portuguese Reactions to the Revival of the Red Sea Spice Trade and the Rise of Atjeh, 1540-1600*", JSEAH 10, 3* (1969): 420. Boxer berpendapat, hlm. 427-8, bahwa orang Gujarat memainkan peran terbesar dalam kegiatan pelayaran dari Aceh ini.
7. Teuku Iskandar, ed., *De Hikajat Atjeh.* Verhandelingen van het Koninklij Instituut (The Hague, 1958), vol. 26, hlm. 54 dan 96.
8. Ibid., hlm. 54 dan 98. *Bustanu's-Salatin* (Iskandar, ed., hlm. 33*),* juga mempertegas kekejaman raja ini: "Ia tidak mau makan jika tidak melihat darah".
9. Iskandar, ed., *De Hikajat Atjeh,* hlm. 54-5 dan 99.
10. Francois Martin, seperti diterjemahkan dalam Anthony Reid, ed., *Witnesses to Sumatra: A Travellers'Anthology* (Kuala Lumpur: OUP, 1995*),* hlm. 58.
11. *The Voyage of Best to the East Indies, 1612-1614,* ed. W Foster (London: Hakluyt, 1934), hlm. 56.
12. Augustin de Beaulieu, "Memoires du voyage aux Indes Orientales", hlm. 109, dalam Melchisedech Thevenot, *Relations de divers voyages curieux* (Paris: Cramoisy, 1664-6), yang mengatakan bahwa ia "diizinkan menemui salah seorang orang kaya". Ibid., hlm. 73 berisi kata-kata yang sama dalam sebuah surat dari Iskandar Muda.
13. Beaulieu, "Memoires du voyage aux Indes Orientales", hlm. 110-1. Kutipan ini dan kutipan-kutipan selanjutnya adalah terjemahan saya dari buku Thevenot. Buku ini dicetak ulang dalam edisi baru, Augustin de Beaulieu, *Mémoires d'un voyage aux Indes Orientales,* ed. Denys Lombard (Paris, 1996*).* Satu bagian (tidak termasuk paragraf di atas) juga diterjemahkan dalam Reid, ed., *Witnesses to Sumatra,* hlm. 64-81.
14. R.H. Djajadiningrat, "Critisch overzicht van de in Maleische Werken vervatte gegevens over de geschiedenis van het Soeltanaat van Atjeh", *BKI* 65 (1911): 161-4. *Encyclopedie van Nederlandsche-Indië* (The Hague, 1917), I, hlm. 74. *The Voyages and Works of John Davis the Navigator,* ed. A.H. Markham (London: Hakluyt, 1880), hlm. 148.
15. Beaulieu, "Mémoires du voyage aux Indes Orientales", hlm. 111. *The Voyages of Sir James Lancaster to Brazil and the East Indies,* ed. William Foster (London:

Hakluyt, 1940), hlm. 96-7. Iskandar, ed., *Bustanu's-Salatin,* hlm. 35. C.A.O. van Nieuwenhuijze, *Samsu'l-din van Pasai* (Leiden, 1945), hlm. 19-23 and 234.

16. Iskandar, ed., *De Hikajat Atjeh,* hlm. 55 dan 100.
17. Beaulieu, "Memoires du voyage aux Indes Orientales", hlm. 112.
18. Ibid., hlm. 112-3.
19. Lihat, terutama, tulisan Davis, dikutip dalam Lombard, hlm. 196n.
20. "Raja ini sangat beruntung dan tidak pernah mengalami kegagalan: semua rencananya berhasil; bahkan ia demikian beruntung . . . sehingga banyak orang yang menganggap tukang sihir yang hebat. Bagi saya, saya menganggap dia seorang yang memiliki kemampuan menilai yang tinggi, yang tidak pernah menganggap enteng suatu apa pun atau tidak perlu diperhatikan. . . . Semua rencananya dimulai dengan langkah-langkah yang tampaknya, bagi orang luar, sulit dipahami sampai langkah-langkah itu telah dilaksanakan . . . ia tidak meminta nasihat dari siapapun. . . ia juga tidak membahas apapun dengan siapapun." Beaulieu, "Memoires du voyage aux Indes Orientales", hlm. 114.
21. Beaulieu, "Memoires du voyage aux Indes Orientales", hlm. 44. J. Kathirithamb Wells, "Achehnese control over West Sumatra pepper up to the treaty of Painan 1663", *JSEAH* 10, 3 (1969): 460-1.
22. Beaulieu, "Mémoires du voyage aux Indes Orientales", hlm. 50-77.
23. Tugas pengawal istana ini diuraikan dalam *Adat Aceh,* yang teksnya sebagian besar terbit jauh di kemudian hari tetapi dikatakan tulisan Iskandar Muda. Isinya dilukiskan sebagai *bodoanda* dalam teks yang diterbitkan G.W J. Drewes dan P. Voorhoeve, *Adat Atjeh,* V.K.I. vol. 24 (The Hague, 1958), hlm. 15; dan sebagai *hamba raja* dalam teks K.F.H. van Langen, "De Inrichting van hat Atjehsche Staatsbestuur onder her Sultanaat", *BKI* 37 (1888): 437-8.
24. Beaulieu, "Mémoires du voyage aux Indes Orientales", hlm. 103.
25. Ibid., hlm. 106.
26. Ibid., hlm. 102.
27. Ibid., hlm. 63.
28. Ibid., hlm. 103.
29. *Adat Atjeh,* hlm. 17.
30. Beaulieu, "Mémoires du voyage aux Indes Orientales", hlm. 100-2.
31. Iskandar, ed., *Bustanu's-Salatin,* hlm. 37-8.
32. Beaulieu, "Mémoires du voyage aux Indes Orientales", hlm. 102. Lombard, hlm. 74-81.
33. Kathirithamby-Wells, "Achehnese control over West Sumatra pepper", hlm. 460. Terjemahan berbahasa Inggris buku Beaulieu, dalam *Navigantium, I,* 243, mengatakan mengenai orangkaya, "Karena selain mereka tidak mendapat gaji,

mereka juga wajib memberi raja hadiah yang mahal setiap tahun." Ini tampaknya merupakan tambahan, tidak ada kata-kata seperti ini dalam teks asli berbahasa Perancis, hlm. 68.

34. Kathirithamby-Wells, "Achehnese control over West Sumatra pepper", hlm. 462-3.
35. Beaulieu, "Memoires du voyage aux Indes Orientales", hlm. 109. Adanya wewenang penguasa Islam untuk menyita harta milik rakyatnya yang sudah meninggal juga dikatakan sebagai penghambat kemunculan pusat-pusat kekuatan ekonomi tandingan di India Mogul dan Kalifah Abbassid v. Barrington Moore, *Social Origins of Dictatorship and Democracy* (Boston: Beacon Press, 1966), hlm. 322-3; Karl Wittfogel, *Oriental Despotism. A comparative study of total power* (New Haven: Yale Paperback, 1963), hlm. 77.
36. Beaulieu, "Memoires du voyage aux Indes Orientales", hlm. 114.
37. Thomas Bowrey, *The Countries round the Bay of Bengal,* ed. R.C. Temple (London: Hakluyt, 1903), hlm. 296.
38. Beaulieu, "Memoires du voyage aux Indes Orientales", hlm. 62.
39. Iskandar, ed., *Bustanu's-Salatin,* hlm. 44-7, 59. Bowrey, *The Countries round the Bay of Bengal,* hlm. 293-310. *The Travels of Peter Mundy in Europe and Asia,* 1608-1667, ed. R.C.Temple (London: Hakluvt, 1919), 11, hlm. 335-6.
40. Bowrey, *The Countries round the Bay of Bengal,* hlm. 298-9, di Aceh sekitar 1675, menguraikan mengenai adanya semacam kesepakatan yang digunakan *orangkaya* sebagai alat untuk mencoba mencegah kekuasaan Ratu kembali ke kekuasaan tirani tetapi ini paling mudah dijelaskan dari sisi suasana politik pada akhir kekuasaan Taj al-Alam's dan penobatan ratu yang kedua. Diperlukan penelitian mengenai makna kekuasaan raja perempuan di Patani pada abad ke-17 dan di Japara pada abad ke-16, kedua-duanya waktu itu sedang berada di puncak dalam bidang perdagangan.
41. *Reisen van Nicolaus de Graaff gedaan naar alle gewesten des werelds, beginnende 1639 tot 1687 incluis* (The Hague, Linschoten vereeniging 33, 1930), hlm. 13. De Graaff berada di Aceh ketika krisis ini terjadi. Lihat juga Djajadiningrat, "Critisch overzicht", hlm. 187-8.
42. Iskandar, ed., *Bustanu's-Salatin,* hlm. 59.
43. Empat menteri utama Taj al-Alam adalah Kadi, Maharaja Sri Maharaja, Laksamana, dan Maharaja. Persaingan antara mereka mencapai puncak pada 1651 ketika sebuah gerakan di bawah pimpinan Laksamana berhasil menjatuhkan Maharaja Sri Maharaja yang sangat berkuasa tetapi "pro-Belanda". W. Ph. Coolhaas, ed., *Generale Missiven van Gouverneurs-Generaal en Raden aan Heren XVII der V.O.C. Vol. II* (The Hague: Martinus Nijhoff, 1964), hlm. 4612, 519-22, 569.
44. Bowrey, *The Countries round the Bay of Bengal,* hlm. 285-6.

45. "Translation of the Annals of Acheen", *Journal of the Indian Archipelago and Eastern Asia* 2 (1850): 599.
46. C. Snouck Hurgronje, *The Achehnese,* terjemahan A.W.S. O'Sullivan (Leiden/ London, 1960), I, hlm. 88-90. Juga Djajadiningrat, "Critisch overzicht", hlm. 189; *Encyclopedia van Nederlandsche-Indië I,* hlm. 76.
47. Van Langen, "De Inrichting van hat Atjehsche Staatsbestuur", hlm. 390-2. Bandingkan *mukim*, wilayah dengan warga paling sedikit 40 laki-laki untuk sembahyang Jumat di bawah hukum Shafi, dengan *jami* di wilayah-wilayah Hanafi di Asia Barat; Ira Lapidus, ed., *Middle Eastern Cities* (Berkeley: University of California, 1969), hlm. 69-79.
48. T.J. Veltman, "Nota over de Geschiedenis van hat Landschap Pidie", TBG 58 (1919): 68-70.
49. Bowrey, *The Countries round the Bay of Bengal,* hlm. 313.
50. *The voyages of Sir James Lancaster,* hlm. 136. Lihat juga Beaulieu, "Mêmoires du voyage aux Indes Orientales", hlm. 98. Bowrey, *The Countries round the Bay of Bengal,* hlm. 294. Lombard, hlm. 61, berpendapat masalah beras yang tidak terpecahkan merupakan salah satu penyebab kemunduran Aceh.
51. William Dampier, *Voyages and Discoveries,* ed. C. Wilkinson (London: Argonaut Press, 1931), hlm. 91.
52. "Ada banyak orang India di pantai Coromandel. . . . Budak-budak orang-orang besar dan pedagang-pedagang. . . . Orang Aceh berutang budi kepada orang-orang India ini karena merekalah yang merawat tanaman-tanaman orang Aceh seperti padi, atau beras, yang hampir tidak dikenal di bagian pulau ini, sampai orang-orang India ini berbondong-bondong ke sini untuk menghindari kelaparan di Fort St. David, dan di tempat-tempat lain di Pantai Coromandel." Charles Lockyer, *An Account of the Trade in India* (London, 1711), hlm. 54.
53. Snouck Hurgronje, *The Achehnese, hlm.* 19.
54. Dampier, *Voyages and Discoveries,* hlm. 98 and 100. Lockyer, *An Account of the Trade in India,* hlm. 57, juga berbicara mengenai "dua belas Tuan-tuan ini, yang semuanya memiliki kekuasaan mutlak di wilayah masing-masing". Penyebaran kekuasaan di antara *ulèëbalang* diuraikan lebih lanjut dalam Bab 6.
55. Tulisan tata hukum Van Langen, "De Inrichting van hat Atjehsche Staatsbestuur", hlm. 436-7, yang sudah pasti berdasarkan bahan-bahan dari abad ke-19 dan ke-19, meskipun ia mengatakan bersumber pada Iskandar Muda, menyuguhkan contoh-contoh mengenai status otonomi *ulèëbalang* Aceh Besar, terutama menyangkut tiga Panglima Sagi. Panglima Sagi tidak harus memperoleh persetujuan dari Sultan, karena kedudukan mereka sepenuhnya turun temurun, berbeda dengan kedudukan para pejabat dan petinggi lainnya; Panglima Sagi berhak mendapat penghormatan berupa tembakan meriam 21 kali.

Bab 6

1. Ini adalah versi revisi sebuah makalah yang pernah disajikan dalam sebuah seminar yang diadakan dalam kaitan dengan Festival Budaya Ketiga Aceh pada Agustus 1988. Terima kasih saya ucapkan kepada panitia Festival atas dukungannya sehingga memungkinkan seminar itu dapat terselenggara. Makalah ini juga banyak berutang budi kepada penelitian perintisan oleh Dr Takeshi Ito mengenai sumber-sumber Belanda yang belum diterbitkan mengenai sejarah Aceh, yang banyak daripadanya yang dipinjamkannya kepada saya.
2. Clifford Geertz, *Negara: The Theatre State in Nineteenth-Century Bali* (Princeton: Princeton University Press, 1980), terutama hlm. 102-4.
3. Guy Tachard, *A Relation of the Voyage to Siam Performed by Six Jesuits,* terjemahan A. Churchill (1688, dicetak ulang di Bangkok: White Orchid Press, 1981), hlm. 215.
4. R.B. Pemberton, "Journey from Munipoor to Ava, and from Thence across the Yooma Mountain to Arracan", 1830, ed. D.G.E. Hall, dalam *Journal of the Burma Research Society* 63, 2: 43-4.
5. Willem Lodewycksz, "D'eerste Boeck", 1598, dalam *De eerste schipvaart der Nederlanders naar Oost-Indie oizder Cornelis de Houtman 1595-1597,* ed. G.P Rouffaer & J.W Ijzerman, Vol. I (The Hague, 1915), hlm. 30.
6. *Peter Floris, his Voyage to the East Indies in the "Globe", 1611-1615,* ed. W. H. Moreland (London: Hakluyt, 1934), hlm. 87, juga hlm. 62-3.
7. Sebagai sebuah gejala umum di Asia Tenggara, upacara-upacara kerajaan, perayaan-perayaan, dan perlombaan-perlombaan ini diuraikan dalam Anthony Reid, *Southeast Asia in the Age of Commerce: The Lands below the Winds* (New Haven: Yale University Press, 1988), hlm. 173-91.
8. C.C. Brown, ed., "Sejarah Melayu or `Malay Annals'", terjemahan Raffles MS 18, *JMBRAS* 25 (1953): 56.
9. *Peter Floris, his Voyage to the East Indies,* hlm. 33-4.
10. *De tweede schipvaart der Nederlanders naar Oost-Indie onder Yacob Cornelisz van Neck en Wybrant Warwijck, 1598-1600,* ed. J. Keuning, Vol. III (The Hague, 1942), hlm. 42.
11. Nuru'd-din ar-Raniri, *Bustarzu's-Salatin, Bab II, Fasal 13,* disusun oleh T. Iskandar (Kuala Lumpur, 1966), hlm. 54-6.
12. Takeshi Ito, "The World of the Adat Aceh. A Historical Study of the Sultanate of Aceh", tesis PhD (Australian National University, Canberra, 1984), hlm. 368-70.
13. "raja yang gajah-gajahnya berbelalai emas, perak menutupi keningnya, lonceng dan rantai suasa; raja yang gajah-gajahnya bertempat duduk di punggung (*howdah*) dari suasa"—Surat Sultan Perkasa Alam kepada Raja Yakob [King James] 1024

[1612 Masehi], dalam W G. Shellabear, "An Account of Some of the Oldest Malay MSS now extant", *JSBRAS* 31 (1898): 127.

14. Sultan Aceh kepada Gubernur-Jenderal India Belanda, terjemahan saya dari teks Belanda dalam *Dagh-Register gehouden int Casteel Batavia, 1640-41* (Batavia, 1887), hlm. 6-7.
15. *De Hikajat Atjeh,* ed. Teuku Iskandar ('s-Gravenhage, 1958), hlm. 165.
16. Ibid., hlm. 166.
17. Raja Ali Haji ibn Ahmad, *The Precious Gift (Tuhfat aJ-Nafis),* terjemahan Virginia Matheson dan Barbara Andaya (Kuala Lumpur, 1982), hlm. 143.
18. *Adat Raja-Raja Melayu,* ed. Panuti Sudjiman (Jakarta, 1983) hlm. 67-81, 227-43; Reid, *Age of Commerce 1,* hlm. 180-1.
19. *De Hikajat Atjeh,* hlm. 55-6, 101-1.
20. Nuru'd-din ar-Raniri, *Bustanu's-Salatin,* hlm. 37-8. 21. Ibid., hlm. 39.
22. Ibid., hlm. 40. 23. Ibid., hlm. 41-2. 24. *Reisen van Nicolaus de Graaff, gedaan naar alle gewesten des werelds,* ed. J.C.M. Warnsinck ('s-Gravenhage, 1930), hlm. 13-4.
25. Mengenai pudarnya kebiasaan kerajaan Ottoman menyelenggarakan upacara-upacara kerajaan di mesjid pada abad ke-17, saya berutang berutang budi kepada Prof. Cornell Fleischer.
26. Brown, ed., "Sejarah Melayu", hlm. 58-9. Teks berbahasa Melayu dalam *JMBRAS* 26, 3 (Dec. 1938): 87-8. Kenyataan bahwa perayaan-perayaan Islam ini tidak disebutkan sebagai perayaan kerajaan dalam versi (Shellabear) yang lain teks ini, dan juga tidak dalam *Adat Raja-Raja Melayoe,* ed. Panuti Sudjiman (Jakarta, 1983), yang ditulis pada 1779, menunjukkan bahwa ini mungkin sebuah sisipan dari abad ke-17 ke dalam teks Raffles menurut kebiasaan Aceh pada waktu itu.
27. *Adat Aceh dari satu Manuscript India Office Library,* disalin olehTeungku Anzib Lamnyong (Banda Aceh, PLPIS, 1976), hlm. 25-46. Daftar upacara kerajaan disarikan dalam Denys Lombard, *Le Sultanat d'Atjeh au temps d'Iskandar Muda 1607-1636* (Paris, 1967), hlm. 144-6.
28. C. Snouck Hurgronje, *The Achehnese,* terjemahan A.W.S. O'Sullivan (Leiden, 1906), I: 208-13. Keraguan-raguan mengenai tradisi ini diperkuat selanjutnya oleh kenyataan bahwa kontak politik dengan Turki paling kuat pada tahun 1560-an, sedangkan di Turki sendiri perayaan Maulud baru mulai dikenal pada 1588. *Shorter Encyclopaedia of Islam* (Leiden/London 1961), hlm. 366.
29. Sebaliknya, pada abad ke-19, perayaan ini tidak terlalu populer di Aceh dibandingkan dengan perayaan Maulud atau Idulfitri-Hurgronje, *Die Aclaehnese, I,* hlm. 243.
30. *Adat Aceh,* hlm. 34-46; Ito, "The World of the Adat Aceh", hlm. 231-8.
31. *Adat Aceh,* hlm. 45.

32. Ito, "The World of the Adat Aceh", hlm. 243.
33. *The Travels of Peter Mundy in Europe and Asia, 1608-1667,* ed. Sir Richard Temple, Vol. III, Part I (London, 1919), hlm. 121-3. Di sini dan dalam kutipan-kutipan berbahasa Inggris, saya menggunakan ejaan bahasa Inggris moderen.
34. Ito, "The World of the Adat Aceh", hlm. 217-23. 35. Dikutip dalam ibid., hlm. 220.
36. Daghregister of HLM. Willemsz, Aceh, 1642, seperti terjemahan dalam Ito, "The World of the Adat Aceh", hlm. 221.
37. *Adat Aceh,* hlm. 25-6. Also Ito, "The World of the Adat Aceh", hlm. 218-20.
38. *Adat Aceh,* hlm. 28-31. Juga Ito, "The World of the Adat Aceh", hlm. 224-6.
39. Uraian S. de Weert, 1603, terjemahan dalam Ito, "The World of the Adat Aceh", hlm. 227.
40. *Adat Aceh,* hlm. 46-8. Juga Ito, "The World of the Adat Aceh", hlm. 209-11.
41. Journal of Ralph Croft, dalam *The Voyage of Thomas Best to the East Indies 1612-14,* ed. Sir William Foster (London: Hakluyt Society, 1934), hlm. 171-2. C.F. hlm. 168-9. untuk perayaan kerajaan 26 Juni.
42. Perhatikan bahwa di Siam pola yang sama diikuti dengan perahu-perahu yang dihiasi warna warni dengan indahnya di sungai dan bukan menggunakan gajah, surat kerajaan dibawa dengan perahu yang terindah.
43. *The Voyages of Sir James Lancaster to Brazil and the East Indies, 1591-1603,* ed. Sir William Foster (London: Hakluyt Society, 1940), hlm. 91-2. Untuk prosedur serupa sesudah itu lihat "Narrative of Copland, 1613", dalam *The Voyage of Thomas Best,* hlm. 52; Wybrant van Warwijck, "Historische Verhael vande Reyse gedaen inde Oost-Indien" (1604), hlm. 30, dalam *Begin ende Voortgangh van de Vereenighde Neederlandtsche Geoctroyeerde Oost-Indische Compagnie,* ed. Isaac Commelin (Amsterdam, 1646; dicetak ulang di Amsterdam, 1974); Daghregister Pieter Sourij, 1642, Algemene Rijksarchief [selanjutnya ARA] KA 1051 bis, f.554.
44. Brown, ed., "Sejarah Melayu", hlm. 55; *Peter Floris, his Voyage to the East Indies in the "Globe", 1611-1615,* ed. W.H. Moreland (London: Hakluyt Society, 1934), hlm. 33-4.
45. *The Voyage of Thomas Best,* hlm. 52; *The Voyages of Sir James Lancaster,* hlm. 93.
46. *The Voyages of Sir James Lancaster,* hlm. 99.
47. Gejala ini dibahas lebih jauh dalam Reid, *Age of Commerce* 1, hlm. 183-91.
48. Nuru'd-din ar-Raniri, *Bustanu's-Salatin,* hlm. 33.
49. *Hikayat Atjeh,* hlm. 97.
50. "Pantjagah (Iskandar Mudah) menunggang seekor gajah liar, berdiri tegak ketika gajah itu berlari dengan patuh; dan menunggang kuda sambil berjongkok, dan menyilangkan kaki dari sisi kuda itu ke sisi kiri, dan melambai-lambaikan pedang ke kanan dan ke kiri, dan mengikatkan destar sementara kudanya berlari cepat

lurus ke muka. Sudah menjadi adat kebiasaan bahwa Pantjagah mengadakan latihan seperti ini pada hari Kamis dan Senin"—*Hikayat Atjeh,* hlm. 158.

51. Thomas Stamford Raffles, *History of Java* (London, 1817) 1, hlm. 347.
52. *The Voyage of Thomas Best,* hlm. 210-11.
53. De Reis van de vloot van Pieter Willemsz Verhoeff naar Aze 1607 -1612, ed. M.E. van Opstall (The Hague, 1972), 1, hlm. 240.
54. *The Voyage of Thomas Best,* hlm. 52, juga hlm. 158.
55. *The Travels of Peter Mundy III,* i*:* 126-30. Lihat juga Jan van der Meulen (Aceh) kepada Gubernur-Jenderal 13 Feb. 1638, ARA VOC 1131, f.1198.
56. Daghregister Pieter Sourij, 1642, ARA KA 1051 bis, f.555; Daghregister of Vlamingh van, Oudtshoorn, 1644, ARA VOC 1157, f.578.
57. Godinho de Eredia, *Eredia's Description of Malaca, Meridional India and Cathay,* terjemahan J.V Mills (Singapore: MBRAS, 1930; cetak ulang di Kuala Lumpur, 1997), hlm. 242-5.
58. *De oudste reizen van de Zeeuwen naar Oost-Indie', 1598-1604,* ed. W.S. Unger ('s-Gravenhage, 1948), hlm. 71-2. Uraian Davis ada di halaman 55 jilid ini.
59. Ibid., hlm. 81.
60. *The Voyage of Thomas Best,* hlm. 55.
61. Ibid., hlm. 210.
62. Standish narrative, dalam ibid., hlm. 159.
63. Ibid., hlm. 55 dan 210.
64. Daghregister Pieter Sourij, 1642, ARA KA 1051bis. f.567.
65. Ibid.
66. Ibid., f.568.
67. Daghregister P. Willemsz, 1642, ARA KA 1O51bis, ff. 512 dan 524.
68. Francois Martin de Vitre, *Description du premier voyage faict aux Indes Orientales par les francois en l'an 1603* (Paris, 1604), hlm. 44-5. Seorang pelancong Persia pada tahun 1680-an mengatakan bahwa Aceh memiliki "mata air ajaib. Jika seseorang menderita penyakit tertentu ... air ajaib itu dapat dengan segera menyembuhkan orang itu"—*The Ship of Sulaiman,* terjemahan John O'Kane (London, 1972), hlm. 179. Juga William Dampier, *Voyages and Discoveries* (1699, dicetak ulang di London, 1931), hlm. 95-6.
69. *Hikajat Atjeh,* hlm. 165.
70. Ibid., hlm. 165.
71. *The Voyage of Thomas Best,* hlm. 213. Lombard, *Le Sultanat d'Atjeh au temps d'Iskandar Muda,* hlm. 130.
72. Nuru'd-din ar-Raniri, *Bustanu's-Salatin,* hlm. 49-52. Lihat juga L.F. Brakel, "State and Statecraft in Seventeenth Century Aceh", dalam *Pre-colonial State Systems in*

Southeast Asia, ed. Anthony Reid and Lance Castles (Kuala Lumpur: MBRAS, 1975), hlm. 59-63, dan Robert Wessing, "The Gunungan in Banda Aceh, Indonesia: Agni's Fire in Allah's Paradise?", *Archipel* 35 (1988): 157-94, keduanya melihat Taman Ghairah pada dasarnya sebagai sebuah konsep dari India dengan Gunung Meru (Gunungon) sebagai pusatnya.

73. Lombard, *Le Sultanat d Atyeh au temps d'Iskandar Muda,* hlm. 132; L.F. Brakel, "State and Statecraft", hlm. 61; Wessing, "The Gunungan in Banda Aceh", hlm. 171-8.
74. *Adat Aceh,* hlm. 49.

Bab 7

1. Akin Rabibhadana, *The Organization of Thai Society in the Early Bangkok Period, 1782-1873* (Ithaca, NY: Southeast Asia Program, Cornell University, 1969); Arthur Phayre, *History of Burma* (London: Trubner, 1883), hlm. 136-41; M.C. Ricklefs, *Jogjakarta under Sultan Mangkubumi* (London; NewYork: Oxford University Press, 1974), hlm. 18-21. Di pihak lain, menggembirakan bahwa hal-hal yang sama yang kami tekankan di sini juga ditemui oleh Victor Lieberman, *Burmese Administrative Cycles: Anarchy and Conquest c.1580-1760* (Princeton, NJ: Princeton University Press, 1984), hlm. 271-92.
2. Rabibhadana, *The Organization of Thai Society,* hlm. 29-37.
3. Argumen ini dikemukakan dengan lebih dalam dan lebih terpilah dalam Anthony Reid, *Southeast Asia in the Age of Commerce, c.1450-1680, Vol. II: Expansion and Crisis* (New Haven: Yale University Press, 1993), terutama bab 4 dan 5. Pendapat lain yang menentangnya dalam kaitan dengan kerajaan-kerajaan di Daratan terdapat dalam Victor Lieberman, *Strange Parallels: Southeast Asia in Global Context, c. 800 -1830* (Cambridge: Cambridge University Press, 2003), notably hlm. 15-21.
4. J.M. Gullick, *Indigenous Political Systems of Western Malaya* (London: University of London, Athlone Press, 1958); D.E. Brown, *Brunei: The structure and history of a Bornean Malay Sultanate* (Brunei, 1971); C. Snouck Hurgronje, *The Achehnese* (Leiden: E.J. Brill, 1906), 2 jilid.; John Crawfurd, *Journal of an Embassy from the Governor-General of India to the Courts of Siam and Cochin China* (London, 1928; cetak ulang 1967), H.J. Friedericy, *De Standen bij de Boegineezen en Makassaren* ('s-Gravenhage, 1933).
5. Augustin de Beaulieu, "Memoires du Voyage aux Indes Orientales du General Beaulieu, dresses par luy-mesme", dalam *Relations de divers voyages curieux,* ed. Melch. Thevenot (Paris, 1666), 11, hlm. 102-3.
6. Snouck Hurgronje, *The Achehnese*, I, hlm. 88.

7. Ibid., hlm. 144.
8. F.C. Danvers, *The Portuguese in India,* 2 jilid. (London: WH. Allen, 1894), jilid 1, hlm. 480-1, berdasarkan Faria y Sousa, *Asia Portuguesa;* Sebastiao Rodolfo Dalgado, *Glossario Luso Asiatico,* 2 jilid (Coimbra: Imprensa da Universidade, 1919-21), jilid 2, s.v. ORABALAO.
9. Hoesein Djajadiningrat, *Atjehsch-Nederlandsch Woordenboek* (Batavia, 1934), II, hlm. 196.
10. T. Iskandar, ed., *De Hikajat Atjeh* ('s-Gravenhage, 1958), hlm. 96-9; T Iskandar, ed., *Bustanu's-Salatin* (Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka, 1966), hlm. 33.
11. *The Suma Oriental of Tomé Pires,* terjemahan A. Cortesão (London, 1944), 1, hlm. 138-45; *The Book of Duarte Barbosa,* terjemahan M.L. Dames (London, 1921), II, hlm. 182-5.
12. Iskandar, ed., *De Hikajat Atjeh,* hlm. 53-4, 64-5, 90-5, 169-83; Iskandar, ed., *Bustanu's-Salatin,* hlm. 32; Hoesein Djajadiningrat, "Critisch Overzicht van de in Maleische Werken vervatte gegevens over de Geschiedenis van bet Soeltanaat van Atjeh", *BKI* 65 (1911): 154-8, 173-4; *The Voyages and Works of John Davis,* hlm. 153.
13. Iskandar, ed.; *De Hikajat Atjeh,* hlm. 96. 14. Beaulieu, "Memoires", hlm. 63.
14. Iskandar, ed., *De Hikajat Atjeh*, hlm. 96.
15. Lihat Bab 5. Beaulieu, "Memoires", hlm. 58-63; *Pieter van den Broecke in Azie,* ed. W Ph. Coolhaas ('s-Gravenhage, 1962), I, hlm. 175-6; *The Voyage of Thomas Best to the East Indies,* 1612-1614, ed. W. Foster (London, 1934), hlm. 172.
16. G. Tichelman, "Een Atjehsche Sarakata (Afschrift van een besluit van Iskandar Muda)", *TBG* 73 (1933): 368-73,Tichelman, "Samalangasche Sarakata", *TBG* 78 (1938): 351-8.
17. Koloniaal Archief, The Hague (selanjutnya K.A.) 1051bis, "Daghregister" P. Soury (1642), ff.568v.-9r., 581v.-2r.; ibid., "Copie daghregister" P. Willemsz (1642-3), f. 506v., 517v.; K.A. 1059bis, "Copie daghregister" A. van Oudstschoorn (1644), f. 574r., 579v.; K.A. 1100, "Originele missive" D. Schouten, 16 Sept. 1655, f. 277v.; *Daghregister Batavia,* 1663, hlm. 633-4; ibid., 1664, hlm. 110, 120.
18. K.F.H. van Langen, "De Inrichting van het Atjehsche Staatsbestuur onder het Sultanaat", *BKI* 34 (1888): 390-1.
19. Iskandar, ed., *Bustanu's-Salatin,* hlm. 36; Van Langen, "Inrichting", hlm. 390-2; *Voyage of Thomas Best,* hlm. 171, 175n3; "Oost-Indische Reyse onder den Admirael Wijbrandt van Waerwijck", hlm. 12, 14, dalam *Begin ende Voortgangh van de Vereenighde Nederlantsch Geoctroyeerde Oost-Indische Compagnie* (Amsterdam, 1646), 4 vols.
20. Drewes and Voorhoeve, ed., *Adat Atjeh, VKI* 24 (1958): 114b- 5b.
21. Snouck Hurgronje, *The Achehnese*, I, hlm. 85.

22. K.A. 1051 bis, "Copie daghregister": P. Willemsz. (1642-3), f.503r. 23. *Adat Atjeh,* hlm. 110a-1b.
24. K.A. 1127, "Verbael" dari B. Bort (1660), f. 340v.
25. *Reisen van Nicolaus de Graaff naar alle gewestern des werelds, beginnende 1639 tot 1687 incluis ('s* Gravenhage, 1930), hlm. 13.
26. Thomas Bowrey, *The Countries round the Bay of Bengal,* ed. R.C. Temple (London, 1903), hlm. 296; Iskandar, ed., *Bustanu's-Salatin,* hlm. 59.
27. Bowrey, *The Countries,* hlm. 296.
28. *Daghregister,* Batavia, 1641-2, hlm. 96, 123; K.A. 1051 bis, "Copie memorie" J. Compostel, 10 Aug. 1642, f.594r.-v.; ibid., "Copie daghregister" P. Willemsz., f.508r.; Iskandar, ed., *Bustanu's-Salatin,* hlm. 60, 62-3.
29. K.A. 1060, "Verbael van Attchin" (1644-5), f.167v.; K.A. 1123, "Raport" B. Bert, 29 Jan. 1660, f.515r; K.A.1127, "Verbael" B. Bort, ff.364r.5r.; *Daghregister,* Batavia, 1663, hlm. 201-3, 633-4; ibid., 1664, hlm. 480. K.A.1051bis, "Copie memorie" J. Compostel, f.593r.
30. K.A.1051bis, "Copie memorie" J. Compostel, f.593r.
31. *Bouwstoffen voor de geschiedenis der Nederlanders in den Maleisch Archipel,* ed. J.E. Heeres ('s-Gravenhage, 1895), vol. 3, hlm. 345-6; S. Arasaratnam, "Some Notes on the Dutch in Malacca and Indo-Malayan Trade, 1641-1650", *JSEAH* 10, 3 (1969): 486.
32. K.A.1051 bis, "Copie daghregister" P. Willemsz., f.527r.
33. Ibid.
34. G.WJ. Drewes, ed., *Hikajat Potjut Muhamat: An Acehnese Epic* (The Hague: KITLV 1979), hlm. 98-107.
35. Beaulieu, "Memoires", hlm. 103.
36. Ibid., hlm. 41, 44, 97.
37. Tiele, P.A., "De Europeers in den Maleischen Archipel", *BKI* 36 (1887): 244-5, 247 n.2; Kathirithamby-Wells, "Achehnese Control over West Sumatra up to the treaty of Painan, 1663", *JSEAH* 10, 3 (1969): 458-9.
38. K.A.1127, "Verbael" B. Bort, ff.320r.-45r., 374r.-84r.; Kathirithamby Wells, "Achehnese Control", hlm. 467-77.
39. Thomas Best, *The Voyage of Thomas Best to the East Indies, 1612-1614,* ed. W. Foster (London, 1934), hlm. 65, 67-8, 179-80; *Letters received by the East India Company from its servants in the East,* ed. F. C. Danvers and W Foster, 6 jilid. (London, 1896-1902), vol. 2, hlm. 287-8; vol. 3, hlm. 129, 188, 191, 220, 222, 226, 235; vol. 4, hlm. 22, 125-7, 166-7; vol. 5, hlm. 30-1, 171-2; *Jan Pietersz. Coen. Bescheiden omtrent zijn bedrilf in Indie,* vol. 7, pt. 1, ed. W. Ph. Coolhaas ('s-Gravenhage, 1953), hlm. 396; K.A. 1127, "Verbaell" B. Bort.

40. B.W Andaya, *Perak, the Abode of Grace: A Study of an Eighteenth-Century Malay State* (Kuala Lumpur, 1979), hlm. 42-9; K.A. 1040, "Copie Missive", J. Harmansz., 3 April 1639, f.1234.
41. K.A. 1127, "Verbaell" B. Bort, f.320r.-v., 324r.-6r., 335r.-6v., 340v.*It.; Bouwstoffen,* vol. 3, hlm. 498-9, 501-3; *Corpus Diplomaticum Nederland-Indicum,* ed. J.E. Heeres ('s-Gravenhage, 1907-31), vol. 1, hlm. 345-7, 528-32; vol. 2, hlm. 165-8; Kathirithamby-Wells, "Achehnese Control", hlm. 479.
42. K.A. 1068, "Copie daghregister" J. Truijtman (1649), f.222r.-v.
43. Snouck Hurgronje, *The Achehnese,* hlm. 87. *De "Hikajat Malem Dagang". Atjehsch Heldendicht, ed. H.K.J. Cowan* (Leiden: KITLV, 1937).
44. Drewes, ed., *Hikajat Potjut Muhamat,* hlm. 45-7.
45. Lihat Bab 4; William Dampier, *Voyages and Discoveries* (London: The Argonaut Press, 1931), hlm. 91.
46. J.B. Morelli, dikutip dalam A. Meersman, *The Franciscans in the Indonesian Archipelago* (Louvain, 1967), hlm. 123n.
47. De Premare kepada de La Chaise, 17 February 1699, dalam *Lettres édifiantes et curieuses, écrites des missions étrangéres (de la Compagnie de Jesus),* edisi baru oleh Y.M.H. de Querbeuf (Paris, 1780-3), vol. 16, hlm. 348.
48. Reid, "Trade", hlm. 53-5.
49. Drewes, ed., *Hikajat Potjut Muhamat,* hlm. 163.
50. William Marsden, *The History of Sumatra,* 3rd ed. (London, 1811), hlm. 457. Van Langen, "De Inrichting", hlm. 404. Reid, "Trade", hlm. 54.
51. Kata-kata Melayu yang banyak diserap ke dalam Bahasa Aceh zaman kini merupakan ciri khas bahasa kelas penguasa *ulèëbalang*–lagi sebuah petunjuk mengenai asal usul kelas ini di ibukota kosmopolitan dan berbudaya itu (bahan dari Mark Durie.)
52. Anthony Reid, *Slavery, Bondage and Dependency in Southeast Asia* (New York: St. Martin's Press, 1983), hlm. 13-4, 170-2. Dampier, *Voyages,* hlm. 98-9.
53. Misalnya Marc Bloch, *Feudal Society,* terjemahan L.A. Manyon (London, 1961), hlm. 446; Perry Anderson, *Lineages of the Absolutist State* (London: N.L.B., 1974), hlm. 407.

Bab 8

1. E.S. de Klerck, *De Atjeh-oorlog* (The Hague, 1912), hlm. 209n dan 435-6.
2. Ch. Schefer, ed., *Le Discours de la Navigation de Jean et Raoul Parmentier de Dieppe* (Paris, 1883). Untuk tinjauan terkini mengenai . . . tulisan-tulisan perjalanan Perancis mengenai Indonesia, lihat Denys Lombard, "Voyageurs Français dans l'Archipel Insulindien XVIIème, XVIIIeme et XIXème s.", *Archipel* 1 (1971): 141-68.

3. François Martin, *Description du premier voyage fais aux Indes Orientales par les francois en Pan 1603* (Paris, 1604). Salah satu bagian dari buku langka ini telah diterjemahkan dalam *Witnesses to Sumatra,* ed. Anthony Reid, hlm. 55-63.
4. J.E. Heeres, "Franschen in de Maleischen Archipel", *Encyclopaedie van Nederlandsch-Indië* (The Hague, 1899-1905), 1, hlm. 246.
5. Iskandar Muda kepada Louis XIII, Radjab 1030H (Juni, 1621), dikutip dalam Denys Lombard, *Le Sultanat d'Atjeh au temps d'Iskandar Muda 1607-1636* (Paris, 1967), hlm. 246.
6. Alexander Hamilton, A *New Account of the East Indies* (London: Argonaut Press, 1930), 11, hlm. 83.
7. Sultan Abdul Jalil Shah kepada Louis XV n.d., Bibliotheque Nationale, Manuscrits Malayo-Polynesiens, No. 223.
8. H.H. Dodwell, *Dupleix and Clive: The beginning of empire* (London, 1920), hlm. 16-7.
9. Thomas Forrest, A *Voyage from Calcutta to the Mergui Archipelago, lying on the East Side of the Bay of Bengal* (London, 1792), hlm. 51-2.
10. Henri Moris, ed., *Journal de Bord du Bailli de Suffren dans l'Inde, 1781-1784* (Paris, 1888), hlm. 194.
11. Ibid., hlm. 200.
12. John Bastin, *The British in West Sumatra (1685-1825)* (Kuala Lumpur: University of Malaya Press, 1965), hlm. 71n dan 113n.
13. Auguste Toussaint, *Deux Siecles d'Histoire (1735-1935)* (Port Louis, 1936), hlm. 173-83.
14. E. Netscher, *Padang in het laatst der XVIIIe eeuw, VBG* XLI (2) (Batavia/The Hague: 1880), hlm. 56-73.
15. Toussaint, *Deux Siècles d'Histoire,* hlm. 172-3.
16. Bastin, *The British in West Sumatra,* hlm. 117n.
17. C.N. Parkinson, *War in the Eastern Seas, 1793-1815* (London: Allen & Unwin, 1954), hlm. 210-1.
18. Ibid., hlm. 365. William Marsden, *The History of Sumatra* (Cetak ulang, Kuala Lumpur: Oxford University Press, 1966), hlm. 368-9.
19. Seorang Perancis yang menggunakan nama umum orang Islam, Abdullah, memainkan perangan menonjol dalam sebuah serangan atas sebuah kapal layar Perancis oleh perompak Aceh pada 1793. H.R.C. Wright, *East-Indian Economic Problems of the Age of Cornwallis and Raffles* (London: Luzac, 1961), hlm. 260-1. Desertir dari kapal-kapal niaga yang mendapat izin untuk turut berperang juga terlihat di Aceh pada 1810. Campbell kepada Edmonstone, 24 Juli 1810, FCCP 18 Juli 1811 dalam Straits Settlements Factory Records [selanjutnya SSFR], vol. 31.

20. Eroplong (Padang) kepada Paris, 23 Aug. 1858, mengutip *Le Moniteur* 104 (14 April 1858); Ministére des Affairs Etrangères [selanjutnya M.A.E.], Pays-Bas, Correspondence Politique des Consuls, no. 5. Pengetahuan resmi mengenai tanah Batak pada periode ini jauh dari cukup untuk dasar mengemukakan sangkalan yang tegas seperti itu. Sebuah hal kecil yang menarik yang mungkin atau mungkin tidak ada kaitan dengan cerita de Molac ialah bahwa unsur-unsur Katolik Roma yang sangat menonjol pada sekte pormalim Batak, yang baru diketahui orang Eropa pada sekitar 1900. Unsur-unsur ini biasanya dikaitkan semata-mata kepada kelana Italia Modigliani, yang berkunjung ke Tanah Batak pada 1891. Elio Modigliani, *Fra I Batacchi Indipendenti* (Roma, 1892), bagian-bagian yang relevan diterjemahkan dalam Reid, ed., *Witnesses to Sumatra,* hlm. 199-209. Juga Gentilis Aster, *Een Volk Ontdekt Christus. De Katholieke Missie onder de Bataks op Sumatra* (Voorhout, 1959), hlm. 104-112.
21. Campbell kepada Edmonstone, 24 Juli 1810, FCCP 18 Juli 1811 dalam SSFR 31.
22. Ibid. Lee Kam Hing, *The Sultanate of Aceh: Relations with the British,* 1760-1819 (Kuala Lumpur: OUP, 1995), hlm. 123, 126.
23. ENI III, hlm. 531.
24. Madeleine Ly-Tio-Fane, "Pierre Poivre et L'Expansion Francaise dans l'Indo-Pacifique", *BEFEO* 53 (1967): 453-510. B.E. Kennedy, "AngloFrench Rivalry in India and the Eastern Seas, 1763-1793", tesis PhD tidak diterbitkan (Australian National University, 1969), hlm. 254-60. John F. Cady, *The Roots of French Imperialism in Eastern Asia* (Ithaca: Cornell University Press, 1954), hlm. 11-2.
25. D.G.E. Hall, *A History of South-East Asia* (London: Macmillan, 1960), hlm. 422-4.
26. Ibid., hlm. 364-70. Kennedy, "Anglo-French Rivalry in India and the Eastern Seas", hlm. 266-76. Cady, *The Roots of French Imperialism,* hlm. 11-2.
27. Lee, *Sultanate of Aceh,* hlm. 63-7. D.K. Bassett, *British Trade and Policy Indonesia and Malaysia in the late eighteenth century* (Hull Monographs on Southeast Asia, No. 3, 1971), hlm. 63-71.
28. Daendels kepada Menteri Urusan Tanah Jajahan, 23 Agus. 1809, dalam J.K.J. de Jonge, *De Opkozrast van her Nederlandsch Gezag in Oost-Indië,* vol. 13 (The Hague, 1888), hlm. 414.
29. Macalister kepada Sultan Aceh n.d. (Juli 1809), dan surat-surat yang lain dalam A.C. Baker, "Some Account of the Anglo-Dutch Relations in the East at the Beginning of the 19th Century, Based on the Records preserved in the Colonial Seretary's Office in Singapore, and in the Resident's Office, Malacca", *JSBRAS* 64 (Juni 1913): 2-6. 30. Lee, *Sultanate of Aceh,* hlm. 132-40.
31. D.C. Boulger, *The Life of Sir Stamford Raffles* (London: H. Marshall, 1897), hlm. 91.

32. Memorandum kepada Lord Minto (Maret 1810), dikutip C.E. Wurtzburg, *Raffles of the Eastern Isles* (London: Hodder & Stoughton, 1954), hlm. 101.
33. *Biographic Generale* (Paris, 1855-66), 29, cols. 422-4 (Langlès). L.C. Damais, "The Contribution of French Scholars to the Knowledge of Indonesian History", *Madjallah Ilmu-Ilmu Sastra Indonesia* 4, No. 3: 140.
34. Coudé kepada Descourvières, 26 April 1782, dalam Adrien Launay, *Histoire de la Mission de Siam 1662-1811. Documents Historiques* (Paris, 1920), 11, hlm. 311.
35. Archive of the Société des Missions Etrangères [selanjutnya S.M.E.], vol. 887, ff. 81-3 dan 103-8. Juga Launay, *Mémorial de la Société des Missions Etrangères,* hlm. 172-3. Terima kasih saya ucapkan kepada Fr. Guennou dan S.M.E. atas izin menggunakan arsip ini.
36. *General College Third Centenary* (Penang, 1965), hlm. 19.
37. Florens kepada Directors, 16 Juli 1826 dan 20 Juni 1829, S.M.E. 888, ff. 11 dan 172. Meski sebuah misi Fransiscan Portugis merawat beberapa dari pedagang-pedagang asing di Aceh itu antara 1671 dan sekitar 1703, sulit membayangkan bidang yang demikian tidak menjanjikan. C. Wessels, "Uit de missiegeschiedenis van Sumatra. Atjeh in the 16e en 17e Eeuw", *Historisch Tijdschrifi XVIII* (1939): 14-6.
38. Boucho kepada Directors, 24 Mei 1829, S.M.E. 888, ff. 154-5.
39. Ibid. ff. 154-6. Informasi dari Boucho sangat sedikit tetapi akurat. Nias Utara dan Selatan mengenal Lowalangi (atau Lubulangi) sebagai dewa langit sumber kehidupan manusia. Dewa dunia bawah adalah Latura, dan tampaknya Cekhou dari Boucho salah satu dari sekian banyak dewa jahat lokal yang penting. "Sebuah ciri khas hukum Nias ialah hukuman berat yang ditimpakan atas orang yang memperlakukan perempuan secara tidak semena-mena. . . . . Moralitas seksual berkurang begitu mereka menjadi pemeluk agama Kristen." E.M. Loeb, *Sumatra - Its History and People* (Vienna, 1935), hlm. 141-57. Juga *Esacyclopedie van Nederlandsch-Indië* III, 23.
40. Boucho kepada Dubois, 16 Desember 1831, S.M.E. 888, ff. 239-41. Surat Bruquiere, 22 Agustus 1831, S.M.E. 892, ff.735-6.
41. Vallon kepada Boucho, 1-21 Janari 1832, S.M.E. 888, ff. 267-72.
42. Berard kepada de Copse, 29 Februari 1832; Vallon kepada Boucho, 1 Maret 1832; S.M.E. 888, ff. 281-7. Tetapi surat Bérard dari Padang tidak ada menyebut-nyebut koloni Nias.
43. Berard kepada Embrecht, 15 Juni 1832, S.M.E. 888, ff.313-4.
44. Embrecht kepada Supries, 2 Januari 1833, S.M.E. 888, f.415. Huruf miring dalam naskah asli.
45. Adrien Launay, *Mémorial de la Société des Missions Etrangères* (Paris, 1911-6), 11, hlm. 36-7 dan 613.

46. Bérard memohon dengan sangat agar dikirimi kain dari Penang, karena ia takut "keadaan mereka yang telanjang bulat menyebabkan mereka tidak dapat didekati". Berard kepada de Copse, 29 Februari 1832, S.M.E. 888, f. 284.
47. Vallon dalam kenyataan berangkat ke Nias dengan sebuah kapal Cina dari Natal, dan tidak pernah singgah di Padang. Ini mungkin bercampur aduk dengan pelayaran Berard yang sangat sulit dari Padang ke Natal.
48. *The Martyr of Sumatra: A Memoir of Henry Lyman* (New York, 1856), hlm. 389-90.
49. Surat-surat Berard tertanggal 29 Febrauri, 5 dan 18 Maret, 12 April dan 15 Juni 1832, S.M.E. 888, ff.281-4, 289-93, 297-8, dan 313-4.
50. Candalph kepada para Direktur, 29 November1834, S.M.E. 888, f.591.
51. *Idem,* ff. 591-3. Lyman, *The Martyr of Sumatra,* hlm. 390-1. J.H. van_der Velden, *De Roomsch-Katholieke Missie in Nederlandsch Oost-Indie'* 1808-1908 (Nijmegen, 1908), hlm. 60-40. A.I. van Aernsbergen, *Chronologisch Overzicht van de werkzaamheid der Jezuiten in de Missie van N.O.-I.* 1859-1934 (Bandung, 1934), hlm. 46-52.
52. Th. Muller Kruger, *Sedjarah Geredja di Indonesia* (cet. 2, Djakarta, 1966), hlm. 235-6. Seoang pastor Katolik yang lain, Caspar de Heselle berkebangsaan Belanda, meninggal di Nias pada 1854. Ia sudah sekarat karena menderita demam ketika tiba, dan tidak dapat menjalankan tugas. Van der Velden, hlm. 154.
53. C.D. Cowan, "Early Penang and the Rise of Singapore 1805-1832", *JMBRAS* 23,11 (1950): 153. Untuk perdagangan lada orang Amerika lihat James W Gould, "Sumatra -America's Pepperpot 1784-1873", *Essex Institute, Historical Collections* 92 (1956): 83-152, 203-51, 295-348; dan J.D. Phillips, *Pepper and Pirates, Adventures in the Sumatra Pepper Trade of Salem* (Boston, 1949).
54. Laporan-laporan Kapten Larocque de Chanfray n.d. (1840), dan Kapten Le Comte, 21 June 1843, dalam M.A.E. Mémoires et Documents, Asie 23, ff. 32 dan 135. Selain lada, beberapa kapal Perancis juga membeli budak-budak Nias untuk dipekerjakan di perkebunan-perkebunan Bourbon pada tahun 1830-an. Lyman, *The Martyr of Sumatra,* hlm. 377. Melchior Yvan, Six *Months Among the Malays, and A Year in China* (London: J. Blackwood, 1855), hlm. 2.
55. Martin dianugerahi bintang penghargaan oleh Pemerintah Perancis pada 1843 atas jasanya menjunjung tinggi nama Perancis dalam hubungannya yang lama dengan pantai lada Aceh. Laporan Le Comte, *loc.cit.,* ff.135-6. Melchior Yvan, hlm. 151-9, memberikan gambaran beragam corak mengenaio Martin, yang dikenalnya di Penang pada 1843.
56. Martin kepada Commissaire de Marine, Marseilles, 16 November 1839, M.A.E. Memoires et Documents, Asie 22, ff.243-6.
57. *Idem,* f.245.
58. *Idem,* f.246.

59. Marine kepada Etrangères, 30 April 1841, mengutip surat Pemerintah Bourbon Juli 1840, M.A.E. Memoires et Documents, Asie 23, ff.20-2.
60. Cady, *The Roots of French Imperialism,* hlm. 17, 25 dan 29.
61. Laporan Kapten le Comte, 21 Juni 1843, M.A.E. Memoires et Documents, Asie 23, f.135.
62. Jean-Paul Faivre, *L'Expansion Française dans le Pacifique, 1800-1842* (Paris, 1953), hlm. 367-82.
63. Marine et Colonies kepada Affaires Etrangères, 30 April 1841, dan jawaban 8 Juni 1841, M.A.E. Memoires et Documents, Asie 23, ff. 20-1 dan 48-9.
64. Affaires Etrangères kepada Instruction Publique, 8 Oktober 1843, M.A.E. Memoires et Documents, Asie 23, ff. 97-8.
65. Damais, "The Contribution of French Scholars", hlm. 140-1.
66. Laporan Laroque de Chanfray, komandan kapal layar *Le Lancier, n.d.,* M.A.E. Memoires et Documents, Asie 23, ff.24-31.
67. Le Comte, komandan korvet *La Fortune,* mendapatkan di Meulaboh pada 1843 bahwa orang Aceh yang memandu *Le Lancier* ke Seunagan pada 1840 takut singgah di Banda Aceh karena takut Sultan marah. Mémoires et Documents, Asie 23, ff.134-5.
68. Laporan Roy, komandan fregat *La Magicienne,* 5 Oktober 1840, M.A.E. Memoires et Documents, Asie 23, ff.250-3.
69. Kakeknya Sultan Ala'ad-din Muhammad Shah (1781-95), yang pernah berkunjung ke Ile de France ketika masih muda dan menyambut armada de Suffren pada 1782.
70. Sultan Mansur Shah kepada King Louis-Philippe 15 Jumadi II, 1256H (14 Agustus 1840). Terjemahan berbahasa Perancis oleh Dulaurier tertanggal 24 April.1841; ringkasan ini diambil dari sini, dalam M.A.E. Mémoires et Documents, Hollande 152, ff.159-60. Saya tidak berhasil menemukan naskah asli berbahasa Melayu.
71. Laporan Le Comte, 21 Juni 1843, M.A.E. Memoires et Documents, Asie 23, ff. 130-1.
72. *Idem,* f.137.
73. *Idem,* f.138.
74. King Louis-Philippe kepada Sultan Aceh, 2 Januari 1843, diterbitkan ulang dalam E.S. de Klerck, *De Atjèh-oorlog* (The Hague, 1912), hlm. 435.
75. Berchou kepada Guizot, 12 Agustus 1845, M.A.E. Mémoires et Documents, Asie 23, ff.273-4.
76. Affaires Etrangères kepada Berchou, 6 September 1845, M.A.E. Memoires et Documents, Asie 23, f. 276. Président du Tribunal de Commerce, Rouen, kepaa Ministre de l'Agriculture et du Commerce 6 Desember 1846, M.A.E. Mémoires et Documents, Asie 24, ff. 13-14.

77. Sultan Ibrahim kepada Presiden Perancis 15 Rabi I, 1265H (8 Februari 1849), M.A.E. Memoires et Documents, Hollande 152, f.161. Ini terjemahan saya dari naskah berbahasa Melayu, versi bertulisan huruf latin disajikan dalam Lampiran.
78. Anthony Reid, *The Contest for North Sumatra* (Kuala Lumpur: University of Malaya Press, 1969), hlm. 84. J. Woltring, ed., *Bescheiden Betreffende de Buitenlandse Politiek van Nederland.- Tweede Periode, 1871-98, I* (The Hague, 1962), hlm. 612-3.
79. Mohammad Ghauth kepada Louis Napoleon 21 Jumadi 1, 1268H (12 Maret 1852), terjemahan berbahasa Perancis dalam W.A.E. Mémoires et Documents, Hollande 132, f.167.
80. Alix Desgranges, Profesor Bahasa Turki di Collège de France, diterjemahkan dari surat Ibrahim yang berbahasa Arab, dengan anggapan surat itu sama persis dengan teks Melayu. Jika demikian, terjemahan dia terlalu bebas. M.A.E. Mémoires et Documents, Hollande 152, ff. 161-5.
81. Affaires Etrangères kepada Lemoyne, 20 April 1852, M.A.E., Egypte, Depeches Politiques des Consuls, Alexandria, 24, f.69.
82. Duta Besar Belanda, Paris, kepada Buitenlandse Zaken, 1 dan 2 November 1852, Archive of Buitenlandse Zaken dossier 3076. Juga De Klerck, hlm. 208-9.
83. Berchou kepada Affaires Etrangères n.d. [1853], M.A.E. Memoires et Documents Asie 24, ff.l 1-12.
84. Surat menyurat para konsul ini terdapat dalam M.A.E. Pays-Bas, Correspondence Politique des Consuls, No. 5 (1857-69).
85. A. de PWa, *Deux Ans dans le Pays des Epices* (Paris, 1880), hlm. 200.
86. Ibid., hlm. 315.
87. Reid, *The Contest,* hlm. 85. Kemudian, di Amerika, Moreno menyebutkan kedua surat itu dan pedang dari Prancis; dia diminta Sultan Ibrahim untuk menterjemahkan dan menerangkannya.
88. Alexander, "Korte Levensschets van de Arabier Habib Abdoe'r Rahman Alzahir", *De hadische Gids* 2, II (1880): 1010 dan 1016. Lihat juga terjemahan saya atas memoar ini dalam *Indonesia* 13 (1972): 45 dan 54-5. Sebuah kunjungan pada 1873 ke Perancis jelas buah mimpi belaka, dan tampaknya mungkin sekali bahwa kunjungan sebelumnya juga didasarkan kepada pengalaman Sidi Muhammad bukan kepada pengalaman Habib sendiri.
89. Anthony Reid, "Indonesian Diplomacy: A Documentary study of Acehnese Foreign Policy in the Reign of Sultan Mahmud, 1870-4", *JMBRAS* 62, 2 (1969b): 79-82; lihat Bab 11.
90. Affaires Etrangères kepada Gabriac (The Hague), 19 April 1873, M.A.E. Pays-Bas, Depêches Politiques 672, f.102.

91. Thiers kepada Gabriac, 27 April 1873, *loc. cit.,* f.119. 92. Reid, "Indonesian Diplomacy", hlm. 90-1.
93. Affaires Etrangères kepada Bresson (The Hague), 9 Agustus 1873, M.A.E. Pays Bas, Depeches Politiques 672, ff.242-3.
94. Marine et Colonies kepada Affaires Etrangères, 6 Mei 1873, *loc. cit.,* ff.150-1.
95. Affaires Etrangères kepada Duchesne de Bellecourt (Batavia), 8 Oktober 1873, M.A.E. Pays-Bas, Depeches Politiques des Consuls 8, ff.292-3.
96. D.V McKay, "Colonialism in the French Geographical Movement 1871-1881", *Geographical Review* 33 (1943): 218.
97. Ibid., hlm. 216-7.
98. Francois-Xavier-Joseph-Honore Brau de Saint-Pol Lias (1840-1914), pengacara di Paris, dan bekerja selama lima tahun (1868-73) di Banque de France. Setelah itu ia berkecimpung sepenuhya dalam penerbitan gerakaan-gerakan geografi dan kolonial. Anggota terpandang Paris Societe de Geographie, ia juga pendiri Societe des Études coloniales et maritimes (1873), dan Société de Géographie Commerciale. Penyelenggaraan sebuah *Congrès Internationale de géographie commerciale* pada 1878 oleh masyarakat tersebut sebagian besar atas prakarsa dia. Ia pendiri berbagai perusahaan Perancis yang beroperasi di Sumatra, Malaya dan Indo-Cina, dan mengunjungi Jawa dan Sumatra (1876-7); Sumatra dan Malaya (1880-1); dan Burma, Indo-Cina dan Malaya (1884). Tulisan-tulisannya, yang banyak, berbicara dengan penuh semangat mengenai berbagai peluang yang terbuka di negeri-negeri ini.
99. Brau de St.-Pol Lias, "Deli et les Colons-explorateurs Français", *Bulletin de la Société de Géographie* 14 (1877): 326-7.
100. Brau de St.-Pol Lias, *Chez les Atchés. Lohong* (Paris: Librairie Plon, 1884), hlm. xi.
101. Brau de St.-Pol Lias, *Pérak et les Orang-Sakèys* (Paris, 1883), hlm. 21.
102. Brau, *Chez les Atchés,* hlm. xii-xxii.
103. Ibid., hlm. x. Juga Brau de St.-Pol Lias, *De France* à *Sumatra* (Paris: H. Oudin, 1884), hlm. 79-80.
104. Brau, "Deli", hlm. 298-327; *De France* à *Sumatra,* hlm. 48-54; *Pérak,* hlm. 6-9. W.H.M. Schadee, *Geschiedenis van Sumatra's Oostkust* (Amsterdam, 1918-9) 11, hlm. 103-4, patut dicatat bahwa wilayah Bedagai baru dibuka untuk perkebunan pada 1882.
105. K.F.H. van Langen, "Atjeh's Westkust", *Tijdschrifz van het Aardrijkskundig Genootschap* [selanjutnya *T.A. G.],* 2e série, 5 (1888), 11: 230-1. Th. J. Veltman, "Goud-exploitatie in Atjeh", *T.A.G.* 2e serie, 23 (1906) 11: 935-8.
106. Brosur, *Eerzige Beschoutvingen over goud en de aanzvezagheid daarvan ter Sumatra's Westkust* oleh Reinier D. Verbeek, diuraikan dalam *T.A.G.* 2 (1877): 377-8.

107. Lavino kepada Gubernur-Jenderal, 13 Maret 1877, A.R.A. Consulaatsarchief, Penang 102.
108. Van Langen, "Atjeh's Westkust", hlm. 231. Brau, *Côte du Poivre* (Paris: FXJH, 1981), hlm. 9-10.
109. Brau, *Côte du Poivre*, hlm. 10.
110. K.F.H. van Langen, "Steenkolenbergen in her voormalige rijk van Meulaboh", *De Indische Gids* 2, II (1880): 671.
111. Van Langen "Atjeh's Westkust", hlm. 231. Rinn (Singapura) kepada Affaires Etrangères, 13 Desember 1877, M.A.E. Correspondence Politique des Consuls, Angleterre 55, ff. 35-9.
112. Brau, *De France àSumatra,* hlm. 42-3, 50-6 dan 307-8; *Perak,* hlm. 9-12.
113. Schadee, *Geschiedenis van Sumatra's Oostkus,* II, hlm. 196.
114. Brau, *De France* à *Sumatra,* hlm. 56-9.
115. Ibid., hlm. 59-61.
116. Ibid., hlm. 44.
117. Reid, *The Contest,* hlm. 201-7.
118. Brau, *Cöte du Poivre,* hlm. 17-9; *De France à Sumatra,* hlm. 182-3.
119. Guntingan koran India Belanda tentang peristiwa Wallon, diterjemahkan dalam Rinn (Batavia) kepada Affaires Etrangères, 15 April 1880, M.A.E. Depeches Politiques des Consuls, Pays-Bas 9, ff.64-5.
120. Rinn kepada Affaires Etrangères, 15 April dan 9 Mei 1880, M.A.E. Depeches Politiques des Consuls, Pays-Bas 9, ff. 59-65 dan 98-100.
121. Paul Fauque, *Rapport sur un voyage à Sumatra (province des Siaks et province d' Atchin)* (Paris, 1886), hlm. 19. Juga Brau, *Cote du Poivre,* hlm. 12-17. Rinn kepada Affaires Etrangères 15 April, 7 dan 9 Mei 1880, M.A.E. Depeches Politiques des Consuls, Pays-Bas 9, ff. 59-100.
122. K.F.H. van Langen, "De `Nisero-kwestie'", *De Indische Gids* 6, II (1884): 461. A. Pruys van der Hoeven, *Mijne Ervaring van Atjeh* (The Hague, 1886), hlm. 26-7.
123. Brau, *Côte du Poivre,* passim.
124. Brau, *Pérak,* passim. M.J. Errington de la Croix, *Les Mines d'Etain de Pérak* (Paris, 1882). J. Sig. D. Rawlins, "French Enterprise in Malaya", *JMBRAS* 49, 11 (1966): 52-3.
125. Brau, *Chez les Atches,* passim; *Perak,* hlm. 192-3 dan 294-5.
126. Brau, *Cite du Poivre,* hlm. 236.
127. Rinn kepada Affaires Etrangères, 8 Januari 1881, M.A.E. Depeches Politiques des Consuls, Pays-Bas, ff. 140-1.
128. Paul Fauque, *Rapport sur un voyage à Sumatra,* hlm. 4-9 dan *De France* a *Sumatra (Journal de Bord),* hlm. 1-13. Kedua laporan resmi kepada Ministre de 1'Instruction Publique ini kemudian dijilid menjadi satu tetapi diberi halaman sendiri-sendiri.

129. Fauque, *Rapport sur un voyage à Sumatra,* hlm. 14-24.
130. Portales-Gargier (Batavia) kepada Affaires Etrangères, M.A.E. Depeches Politiques des Consuls, Pays-Bas 9, f. 240.
131. Sari dari buku harian Kapten Roura, November 1883, dalam Parliamentary Papers, House of Commons, 1884, 87, hlm. 305-6. Reid, *The Contest,* hlm. 222-3.
132. Weld kepada Derby 20 April 1885, salinan C.O. kepada F.O. 27 April 1885, F.O. 37/699.
133. Reid, *The Contest,* hlm. 260-2. Weld kepada Granville, 8 Juli 1886, C.O. 273/140.
134. Veltman, "Goud-exploitatie", hlm. 934-5.
135. *Penjedar* (Medan), 1 Januari 1940, hlm. 11. J. Jongejans, *Land en Volk van AcehVroeger en Nu* (Baarn, 1939), hlm. 203-4.
136. Auguste-Jean-Baptiste-Marie-Charles David lahir di Toulon pada 1842, masuk tentara pada 1859. Ia menjadi Spahi Cochinchinois di Indo-Cina (1863-8), dan dianugerahi bintang penghargaan Croix de la Légion d'honneur sebagai Kapten dalam Perang Perancis-Rusia (1870-1), luka-luka tiga kali. Setelah itu ia bekerja sebagai bankir di Paris sampai 1883, ketika ia melarikan diri setelah ditetapkan telah melakukan penipuan. Setelah satu tahun di Jawa dan tiga bulan kembali di Paris, ia berangkat pada Desember 1884 ke Vietnam tempat ia melakukan penjelajahan-penjelajahan yang mengagumkan di situ. Sejak itu ia menamakan diri le Baron David de Mayréna, nama terakhir adalah nama yang digunakan ayahnya, seorang perwira angkatan laut, untuk membedakan dirinya dari anggota-anggota keluarganya yang lain. Pada 1890 ia menggunakan sebuah gelar yang lain lagi, Comte de Maas, disamping gelar kerajaannya, Marie I, roi des Sedangs. Biografi: Jean Marquet, "Un aventurier du XIXe siècle: Marie let, roi des Sedangs (1888-1890)", *Bulletin des Amis du Vieux Hué* 14, nos. 1 & 2 (1927); Gerald Hickey, *Kingdom in the Morning Mist: Mayrena in the Highlands of Vietnam* (Philadelphia, 1988).
137. Bernard Bourotte, "Essai d'histoire des populations montagnards du sud indochinois jusqa'à 1945", *Bulletin de la Société des Études Indochinoises 30,* 1 (1955): 61.
138. Marquet, "Un aventurier du XIXe siècle", hlm. 11-4.
139. Ibid., hlm. 14. Engagement between Sellière and Mayrena 16 Maret 1885, salinan dalam Buitenlandse Zaken kepada Kolonien, 7 September 1883, A.R.A. Kol. Kab. E10, dossier 6162.
140. Marquet, "Un aventurier du XIXe siècle", hlm. 17.
141. Ibid., hlm. 16-62. Bourotte, "Essai d'histoire des populations", hlm. 61-2.
142. Marquet, "Un aventurier du XIXe siecle", hlm. 86-93.
143. Ibid., hlm. 93-105. Lavino (Singapura) kepada Pijnacker Hordijk 21 Februari, 11 dan 31 Maret, 29 April, 1890, salinan-salinan G.G. kepada Koloniën 5 Mei 1890,

Kol. Kab. B8 dossier 6196. Hugh Clifford, seorang pejabat pemerintah di Penang pada waktu kematian Mayrena, memberikan gambaran yang menarik mengenai dia dalam *Heroes in Exile* (edisi kedua., London: J. Murray, 1928), hlm. 61-87.

144. Naskah asli berhuruf Arab dalam M.A.E. Mémoires et Documents, Hollande 152, f.161.

Bab 9

1. Sensus 1930 adalah sensus terakhir yang mencatat suku sampai sensus Indonesia 2000. Namun, ini hanya menyajikan data mengenai delapan suku terbesar di setiap provinsi, dan keturunan Cina belum mencapai angka 387.000, angka yang diperlukan untuk dikelompokkan ke dalam kelompok tersendiri di Provinsi Sumatra Utara yang sangat terpecah-pecah menurut suku itu. Orang Cina Sumatra Timur jelas tumbuh lambat setelah 1930, dan terkonsentrasi di kota Medan, dan menurun tajam dari sisi proporsi penduduk. Dari 325.000 yang tercatat sebagai penganut agama Buddha pada sensus 2000 untuk Sumatra Utara, diperkirakan jumlah orang yang mengaku orang Cina adalah sekitar 370.000. Ini berarti 3,2% dari penduduk Provinsi itu, atau 4,2% dari penduduk bekas Karesidenan Pantai Timur.
2. Antara 1882 dan 1932 arus pendatang baru turun menjadi 100.000 pada 1918-19.
3. W.H.M. Schadee, *Geschiedenis van* Oostkust van *De Chineesche*
4. R.N. Jackson, *Pickering, Protector of Chinese* (Kuala Lumpur: Oxford University Press, 1965), hlm. 70-2. Ng Siew Yoong, "The Chinese Protectorate in Singapore 1877-1900", *YSEAH* 2, 1 (1961): 99.
5. Ma Huan, *Ying yai Sheng-Zan; The Overall Survey of the Ocean's Shores* [1433], terjemahan J.V.G. Mills (London: Hakluyt Society, 1970, cetak ulang Bangkok: White Lotus, 1997), hlm. 98-100. Barbara Andaya, *To Live as Brothers: Southeast Sumatra in the Seventeenth and Eighteenth Centuries* (Honolulu: University of Hawaii Press, 1993), hlm. 41. *Sumatra's Oostkust* (Amsterdam: Sumatra-Instituut, 1918-19), II, hlm. 34-5. H.J. Booi, *immigrazie naar Deli* (Utrecht, 1904), hlm. 1-2.
6. Anthony Reid, *Southeast Asia in the Age of Commerce,* Vol. II*: Expansion and Crisis* (New Haven: Yale University Press, 1993), hlm. 18-9.
7. Andaya, *To Live as Brothers,* hlm. 55-6.
8. John Anderson, *An Exposition of the Political and Commercial Relations of the Government of Prince of Wales' Island with the States on the East Coast of Sumatra from Diamond Point to Siak* (Penang, 1824), hlm. 22, 37, 39. William Milburn, *Oriental Commerce,* revised ed. (London, 1825), hlm. 375. J.H. Moor, *Notices of the Indian Archipelago, and Adjacent Countries* (Singapore, 1837), hlm. 101-2. John Anderson, *Mission to the East Coast of Sumatra in 1823* (Edinburgh/

London: W Blackwood, 1826), hlm. 172, 352-3, 394-6. Untuk pengelompokan kegiatan pelayaran di Malaka menurut suku pada abad ke-18 di Sumatra timur, Lihat Anthony Reid dan Radin Fernando, "Shipping on Melaka and Singapore as an index of growth, 1760-1840", *South Asia* 19 (Special Issue, 1996): 64-75. Catatan-catatan ini menunjukkan bahwa Batubara dan Siak memiliki penduduk pedagang Cina pada tahun 1760-an dan 1770-an, meski mereka ini sudah pindah ke Singapura atau Penang ketika Anderson tiba di Batubara dan Siak untuk berkunjung.

9. Anderson, *Mission,* hlm. 296.
10. C.A. Kroesen, "Geschiedenis van Asahan", *TBG XXXI* (1886): 105 dan 111.
11. M. Hamerster, *Bijdrage tot de Kennis van de Afdeeling Asahan* (Amsterdam, 1926), hlm. 50, Schadee, *Geschiedenis* I, hlm. 141-2.
12. *Kolaniaal Verslag,* 1876, hlm. 18.
13. *Verzameling van Consulairte en Andere Verslagen en Berigten (Consulaire Verslagen)* (The Hague), 1876-86: Laporan-laporan Konsuler, Penang dan Singapura. Belanda menghancurkan kapal-kapal Aceh setelah menyatakan perang kepada Aceh pada 1873, sehingga bidang ini, hampir dalam proporsi yang sama, juga berada dalam tangan pedagang Cina. Namun, perang itu mencegah pertumbuhan kegiatan perdagangan Cina setempat, sementara memberikan peranan yang lebih besar kepada perusahaan Eropa yang bertindak sebagai penyedia perbekalan bagi pasukan Belanda.
14. *Koloniaal Verslag,* 1875, hlm. 18.
15. J.A.M. Cats baron de Raet, "Vergelijking van de vroegeren toestand van Deli, Serdang en Langkat met den tegenwoordige", *TBG XXXIII* (1876): 30.
16. Schadee, *Geschiedenis* I, hlm. 171-7.
17. De Raet, "Vergelijking van de vroegeren toestand van Deli", hlm. 31.
18. Schadee, *Geschiedenis* I, hlm. 181.
19. De Raet, "Vergelijking van de vroegeren toestand van Deli", hlm. 33.
20. Schadee, *Geschiedenis* I, hlm. 186. Angka-angka yang lebih akurat adalah angka-angka mengenai jumlah orang Cina yang bekerja di perkebunan Barat—sebanyak 4.476 pada akhir 1874. *Koloniaal Verslag,* 1875, hlm. 196.
21. Komite Pekebun kepada Read, 31 Mei 1882, *The Deli Coolie Question* (Singapore, 1882), hlm. 10-1.
22. Selain itu, para pelindung orang Cina pada awalnya bukan orang-orang yang memiliki kemampuan menonjol atau daya pikir yang luas. Patut diperhatikan, mereka tidak ambil bagian dalam berbagai upaya menjelang akhir abad ke-19 untuk mengadakan perubahan pada sistem imigrasi. Lihat, misalnya, upaya dipaksakan yang dilakukan Powell untuk mempertahankan status quo, dalam

Straits Settlements Labour Commission Report [selanjutnya *SSLCR]* (Singapore, 1890), hlm. 69-72.

23. Ini kesan yang ditimbulkan oleh *SSLCR,* 1890, hlm. 8-11, meski sumber-sumber sebelumnya lebih cenderung untuk menerima bagitu saja kategori "penumpang membayar". Lihat terutama Report of Protector of Chinese 1883, Annual Reports of the Protector of Chinese, Straits Settlements, *Straits Settlements Government Gazette* [selanjutnya *SSGG],* 1884, hlm. 453-4.
24. Reports of Protector of Chinese untuk 1878 dan 1883, *SSGG,* 1879, hlm. 113 dan 1884, hlm. 453-4.
25. "Report of the Committee appointed to consider and take evidence upon the Condition of Chinese Labourers in the Colony", 3 November 1876, *Straits Settlements Legislative Council Proceedings* [selanjutnya *SSLCP],* Lampiran 22, hlm. ccxlii-iv.
26. Pelindung Cina terus menggunakan sebagai dasar bagi pengelompokan yang dilakukannya jawaban yang diberikan *sinkheh* pada pertanyaan, "Apakah saudara membayar sendiri biaya perjalanan?" sehingga sebagai akibatnya perubahan pada penyelenggaraan arus imigran baru dicatat secara resmi pada Juni 1890. Pengadilan Banding kemudian kembali menggunakan definisi awal ketika memeriksa dan memutuskan kasus penahanan secara paksa. Karena tidak ada lagi *sinkheh* yang terikat utang kepada kapal setiba mereka di tempat tujuan, dampak dari putusan ini menyebabkan lenyapnya kekuasaan hukum pemilik depot untuk melakukan penahanan atas imigran. *Status quo ante* dipulihkan kembali dengan Ordinance I tahun 1891. *SSLCR* 1890, hlm. 8-12. Report of Protector of Chinese for 1990, SSGG, 1891, hlm. 1084-5.
27. *SSLCR,* 1890, hlm. 62 bukti. Mengenai masalah ini, seperti halnya dengan masalah-masalah yang lain, Pelindung Cina di Singapura dan Penang, sangat mengherankan, tidak jelas sikapnya. Di pihak lain, W. Cowan, Pejabat Sekretaris untuk Urusan Cina di Perak, melaporkan kepada Komisi 1890: "Imigran yang tiba dan di atas kertas berstatus penumpang gratis sebenarnya berutang kepada perantara." *Ibid.,* hlm. 128.
28. E. Thio, "The Singapore Chinese Protectorate: Events and Conditions leading to its establishment, 1823-1877", *Journal of the South Seas Society* xvi (1960): 64.
29. *SSLCP,* 1873, Appendix 33.
30. *SSLCP,* 1873, hlm. 139-49. Thio, "The Singapore Chinese Protectorate", hlm. 64-5. Jackson, *Pickering, Protector of Chinese,* hlm. 49-64. Pihak berkepentingan yang lain lagi dan jelas lebih mementingkan diri sendiri dan menentang "penculikan" untuk Sumatra adalah pekebun gula di Provinsi Wellesley. Petisi 25 Oktober 1876, *SSLCP* 1876, Lampiran 23.

31. *SSLCP,* 1876, Lampiran 22, hlm. cclxxxi. Lihat juga bukti-bukti dari Kapten Ellis, *ibid.,* hlm. cclxvii, dan berbagai pendapat yang dikemukakan dalam Rapat Dewan Legislatif 9 September 1873, *SSLCP,* 1873, hlm. 140 dan 149.
32. 1876 Report on Chinese Labourers, *SSLCP,* 1876, Lampiran 22, hlm. ccxliii-iv.
33. Ibid., hlm. ccixxx. Meski jumlah mereka lebih kecil daripada kelompok Ghee Hin di Penang, kelompok Toh Peh Kong terdiri dari pedagang-pedagang kaya, sebagian besar Hokkien. C.D. Cowan, *Nineteenth-Century Malaya* (London: Oxford University Press, 1961), hlm. 48.
34. Lavino kepada Wiggers van Kerchem, 5 Oktober 1876. Consulaat Penang 102, Algemeene Rijksarchief, The Hague. 1876 Report on Chinese Labourers, *SSLCP,* 1876, Lampiran 22, hlm. ccxlvi-vii, cclxvii-viii dan cclxxx.
35. Walter Knaggs kepada Lavino, 23 Agustus 1875, salinan dalam Bylandt kepada Willebois, 28 September 1875, Buitenlandse Zaken Dossier Atjeh, Algemeene Rijksarchief.
36. Pernyataan Sekretaris Kolonial dalam rapat Dewan Legislatif 9 September 1873, *SSLCP,* 1873, hlm. 141. Terima kasih saya ucapkan kepada Dr Eunice Thio untuk rujukan ini, dan untuk bantuan lainnya yang demikian banyak.
37. Laporan Singapura dalam *Vezlameling van Consulaire en andere Verslagen en Beragten,* 1876, hlm. 113. Schadee, *Geschiedenis van Sumatra's Oostkust,* II, hlm. 14-5. Menurut Schadee, para pembangkang dalam satu dari pemberontakan-pemberontakan awak kapal itu adalah bagian dari sebuah kelompok yang sudah melepaskan diri dari status sebagai kuli kontrak di Deli agar dapat memperoleh uang muka kedua di Penang, dan karena itu mengulangi perbuatan melanggar hukum itu.
38. *SSLCP,* 1876, Lampiran 22, hlm. cclix.
39. Ibid., hlm. cclxvi (Tan Hong Moh): "Mereka tidak suka pergi ke Deli karena hawa di situ sangat panas, dan mereka tidak dapat keluar dari situ dan jika mereka jatuh sakit mereka tidak mendapat perawatan yang semestinya." Ibid., hlm. cclxvii (Lim Kah Kway): "Mereka tidak suka pergi ke Deli karena air di situ buruk dan menyebabkan badan mereka bengkak-bengkak."
40. Walter Knaggs kepada Lavino, 23 Augustus 1875, *loc. cit.* Lavino kepada Wiggers van Kerchem, 5 Oktober 1876, *loc. cit. Koloniaal Verslag,* 1875, hlm. 196. Ibid., 1876, hlm. 198.
41. Annual Report on Revenue and Expenditure of Perak for 1882, *SSGG,* 1883, hlm. 1105-6. Lihat juga Wong Lin Ken, *The Malayan Tin Industry to 1914* (Tucson: University of Arizona Press, 1965), hlm. 74.
42. Schadee, *Geschiedenis van Sumatra's Oostkust,* II, hlm. 10-8 dan 32-4. *Koloniaal Verslag,* 1878, hlm. 22. Lavino kepada Van Lansberge, 4 Februari 1877, Consulaat Penang 102, Algemeene Rijksarchief.

43. Schadee, *Geschiedenis van Sumatra's Oostkust, II, hlm.* 33-9. A. Vandenbosch, *The Dutch East Indies: Its Government, Problems, and Politics* (Los Angeles: University of California Press, 1944), hlm. 285-7. J.H. Boeke, *The Structure of the Netherlands Indian Economy* (NewYork, 1942), hlm. 142. Hukuman yang berat dan sangat banyak menimbulkan perselisihan pendapat dalam masyarakat melahirkan banyak sekali tulisan mengenai hal itu, beberapa di antaranya dibahas dalam A.D.A. de Kat Angelino, *Colonial Policy* (The Hague: M. Nijhoff, 1931), II, hlm. 497-531.
44. Baru setelah 1889 negeri-negeri Melayu yang dilindungi Inggris menerbitkan sejumlah peraturan untuk melindungi pekerja tani, yang "lebih banyak dilanggar daripada ditegakkan". Di Malaya pemerintah tidak banyak berhubungan dengan majikan dibandingkan dengan di Sumatra, dan enggan campur tangan dalam bidang yang tidak banyak diketahuinya itu. Wong, *The Malayan Tin Industry to 1914,* hlm. 73-4. Pekerja tani Straits Settlements dinaikkan standarnya hingga ke standar Sumatra melalui peraturan November 1891, *SSGG*, 1891, hlm. 25-82.
45. *SSLCP*, 1876; Lampiran 22, hlm. ccxlvi.
46. P. Endt, *Wanderarbeiterverhaeltnisse,* 1919, dikutip dalam Bruno Lasker, *Human Bondage in South-east Asia* (Chapel Hill: University of North Carolina Press, 1950), hlm. 221.
47. Serangan-serangan atas pegawai perkebunan, yang mencapai 80 kali serangan pada 1929, disajikan dalam bentuk daftar dalam *Kroniek,* jurnal tahunan yang diterbitkan Oostkust van Sumatra Instituut. Untuk gambaran mengenai kondisi di Deli pada dekade-dekade awal abad ini, lihat Lasker; W F. Wertheim, *Indonesian Society in Transition: A study of social change* (The Hague: W Van Hoeve, 1956), hlm. 250-3; Ladislao Szekely, *Tropic Fever. The Adventures of a Planter in Sumatra,* terjemahan Marion Saunders (London: W Hamilton Limited, 1936). Pendapat yang juga sama kerasnya pada 1888 dikutip dalam A.G. de Bruin, *De Chineezen ter Oostkust van Sumatra* (Leiden, 1918), hlm. 81. Namun, sebaliknya dari ini adalah entusiasme sebuah laporan resmi Inggris pada 1900. *Parliamentary Papers, House of Commons,* 1900, LYXXVII, hlm. 103. Ada kemungkinan dominasi pekerja Jawa pada abad ke-20 di Deli menyuburkan pertumbuhan sikap sangat patuh dalam hubungan perburuhan, dibandingkan dengan pola hubungan lebih awal yang dipinjam dari Straits Settlements.
48. Industri tembakau Sabah juga menghadapi kesulitan-kesulitan serupa yang pernah dialami Deli sebelumnya, ketika mencoba mengukuhkan diri pada 1888-90, termasuk lokasi yang terpencil; Tongkah (Siam) juga menghadapi kesulitan-kesulitan serupa pada 1876. *SSLCP*, 1876, Lampiran 22, hlm. cclxiv.
49. Ibid., hlm. cclix-x. SSGG, 1883, hlm. 1105. *The Deli Coolie Question,* hlm. 19-20. Wong, *The Malayan Tin Industry to 1914,* hlm. 71-6. *SSLCR,* 1890, hlm. 24 bukti.

50. *Straits Times and Singapore Journal of Commerce,* 24 April 1869.
51. *Koloniaal Verslag,* 1874, hlm. 211.
52. *The Deli Coolie Question,* hlm. 5-6.
53. *SSLCR,* 1890, hlm. 8, 13-4, 16-7, 24, 108 bukti. Juga Wong, *The Malayan Tin Industry to 1914 ,* hlm. 67.
54. *The Deli Coolie Question,* hlm. 9-10.
55. *SSLCR,* 1890, hlm. 16. Sebagian besar pengamat menekankan keserakahan *tindal* Cina karena selalu berusaha keras agar kuli yang malang itu tetap terbenam dalam hutang; misalnya, Imperial Chinese Commission of 1886, *SSGG,* 1887, hlm. 243-4; dan John Parker (1888), dikutip dalam De Bruin, *De Chineezen ter Oostkust van Sumatra,* hlm. 82. Dan untuk kesan-kesan kemudian, lihat Szekely, *Tropic Fever,* hlm. 176-7. 56. Lavino kepada Wiggers van Kerchern, 5 Oktober 1876, Consulaat Penang, 102, Algemeene Rijksarchief. Perantara juga mengutip $50 dari *sinkheh* yang dibayar untuk bekerja untuk pasukan pendudukan Belanda di Aceh sebelum 1877. Seperti halnya dengan Deli, $25 dari $50 ini dicatat sebagai uang panjar untuk *sinkheh* bersangkutan yang harus dibayarnya kembali, tetapi uang sebanyak $25 ini hampir seluruhnya digunakan untuk menutup pengeluaran-pengeluaran *khehtau. Consulaire Verslagen* 1878, hlm. 758. Perbedaan angka ini dipertahankan sepanjang tahun 1880-an. Pada 1890 perantara mengutip $35-38 dari *sinkheh* Teochiu jika untuk Provinsi Wellesley, dan $80-90 jika untuk Sumatra atau Sabah. Labour Commission 1890, keuntungan perantara sekitar dua kali lipat dalam hal Sumatra dan Sabah, tetapi sebagian besar dari keuntungan ini digunakan untuk menutup biaya-biaya tambahan di Cina. *SSLCR,* 1890, hlm. 17.
57. Lihat bawah, hlm. 314 dan 318.
58. Wong, *The Malayan Tin Industry to 1914,* hlm. 69-71. Jackson, *Pickering, Protector of Chinese,* hlm. 66-70.
59. Dirangkum dari Annual Reports of the Chinese Protectorate dalam *SSGG,* dan Annual Reports of the Netherlands Consulate in Penang dalam *Consulaire Verslagen.*
60. *SSGG,* 1881, hlm. 354-5.
61. Komite Pekebun Deli sudah hampir benar, ketika mereka menyesali bahwa mereka tidak berhasil memperoleh pekerja dalam jumlah besar di Singapura, "karena tampaknya hubungan antara kuli Hong di Penang dan kuli Hong di Hong Kong demikian erat sehingga mendorong arus emigrasi via pelabuhan utara". *The Deli Coolie Question,* hlm. 6-7.
62. Catatan rapat oleh Pickering, 13 Juni 1882, ibid., hlm. 13-4.
63. Para pekebun Provinsi Wellesley menentang apa yang mereka namakan "crimping", yang berarti membujuk pekerja dengan segala cara untuk keluar dari perkebunan-perkebunan mereka dan masuk ke Deli sebelum kontrak mereka habis sehingga

dengan demikian mereka mendapat pekerja dengan biaya dipikul oleh calo pekerja Provinsi Wellesley. Lihat petisi dari sebelas pekebun gula Provinsi Wellesley kepada Dewan Legislatif, 25 Oktober 1876, *SSLCP*, 1876, Lampiran 23. Keanggotaan Khaw Boo Aun dalam delegasi ini mungkin berarti bahwa ia, seperti pemimpin Teochiu dan Ghee Hin, tidak dapat mengandalkan diri kepada sumber-sumber yang dikendalikan oleh Toh Peh Kong. Untuk Khaw lihat C.S. Wong, A *Gallery of Chinese Kapitans* (Singapore: Ministry of Culture, 1963), hlm. 81-3.

64. *The Deli Coolie Question,* hlm. 14-5.
65. *SSLCR,* 1890, hlm. 130 bukti.
66. Bool, *De Chineesche immigratie naar Deli,* hlm. 6. *The Deli Coolie Question,* hlm. 6-7, 14, 17-8. Penyebab yang lain dari perselisihan ini adalah kecenderungan para pekebun Sumatra untuk mengirim kembali ke Straits Settlements pekerja-pekerja yang mereka nilai tidak sehat. Untuk alasan bagi pemutusan kontrak secara sepihak yang mereka lakukan, para pekebun mengklaim bahwa sering terjadi penggantian pekerja setelah kontrak ditandatangani. Setelah sebuah ultimatum dari Pickering pada 1881, dikembangkan sebuah sistem pemeriksaan kesehatan untuk semua pekerja. Kapitan Cina Labuan (Deli) diberi tugas memeriksa pekerja pengganti setiba mereka di situ. Sanak keluarga yang sudah tua atau sakit dari pekerja pengganti boleh dating tanpa surat keterangan kesehatan hanya jika jumlah mereka tidak lebih daripada 15% dari jumlah total pekerja kontrak. Akhirnya pada 1886 Pelindung Cina setuju untuk menyediakan foto semua pekerja yang menandatangani kontrak. Bool, *De Chineesche immigratie naar Deli,* hlm. 2-3. P.W. Modderman, *Gedenkboek uitgegeven ter gelegenheid van het Vifzig Jarig Bestaan van de Deli Planters Vereeniging* (Batavia, 1929), hlm. 33-4, *SSGG,* 1887, hlm. 244.
67. Ibid.
68. Schadee, *Geschiedenis van Sumatra's Oostkust, II,* hlm. 20 dan 181.
69. Annual Reports of Protectorate of Chinese, dalam *SSGG.*
70. Schadee, *Geschiedenis van Sumatra's Oostkust, II,* hlm. 20 dan 181.
71. Wong, *The Malayan Tin Industry to 1914,* Lampiran A, tabel `c' dan `e'.
72. Struktur bidang pekerjaan berbagai kelompok dialek di Sumatra utara itu berbeda-beda sangat tajam satu sama lain. Meski Teochiu, diikuti oleh Hakka, mendominasi perkebunan-perkebunan, selalu ada sejumlah besar suku Hokkien yang bergerak di bidang perdagangan. Akibat integrasi Deli secara berangsur-angsur ke dalam perekonomian India Belanda, suku Hokkien merupakan kelompok yang terbesar dan paling lama berdiri, jumlahnya mencapai 2,3% dari total penduduk Cina di *cultuurgebied* pada 1930. Suku Canton tiba di daerah itu sebagian besar sebagai tukang, dan pada 1930 berjumlah 21,1% dari jumlah total penduduk Cina, dibandingkan dengan 21,8% untuk suku Teochius. Suku Hakka aktif di bidang perdagangan kecil dan sebagai pekerja perkebunan. Meski hanya 8,7% dari

penduduk Cina berada di *cultuurgebied* pada 1930, mereka sudah lama memegang monopoli atas jabatan-jabatan resmi di seluruh Sumatra utara—sebagai *kapitan cina.* Tradisi ini mulai barangkali dengan menonjol pengaruh Chang Chen-hsun (alias Thio Tiau Siat), seorang Hakka Batavia yang peri ke Aceh sebagai kontraktor untuk pasukan Belanda, dan pada 1877 membagi-bagikan sebagian besar monopoli-monopoli pemerintah di pantai timur. Kelompok-kelompok masyarakat Cina di distrik Bengkalis (Kampar, Siak, dan Rokan), yang bekerja di bidang perikanan, penebangan kayu, dan perdagangan sebagian besar terdiri dari suku Hokkien (82% pada 1930). Di pihak lain, kelompok lebih kecil Cina di Aceh (21,795) sebagian besar terdiri dari suku Hakka (40,8%) dan suku Canton (27,7%) pada 1930. Meski perhimpunan-perhimpunan rahasia Cina terlarang di India Belanda, cabang-cabang perhimpunan semacam itu di Penang terdapat di antara para pekerja perkebunan di *cultuurgebied.* Dalam periode 1881- 4, ada serangkaian insiden dengan kekerasan antara kelompok Ghee Hin, yang di Sumatra diwakili terutama oleh suku Teochiu, suku Hakka, dan suku Hailam, dan kelompok Ho-seng, yang mewakili suku Hokkien dan suku Hakka dari Fiu-chew. Langkah-langkah yang lebih keras diambil pada 1884 untuk membasmi perhimpunan-perhimpunan ini. De Bruin, *De Chineezen ter Oostkust van Sumatra,* hlm. 38-52. Bool, *De Chineesche immigratie naar Del,* hlm. 27-82. Schadee, *Geschiedenis van Sumatra's Oostkust,* II, hlm. 45-6. Lavino kepada Governor-General, 17 Februari 1877 dan 22 April 1884. Consulaat Penang 102, 13, Algemeene Rijksarchief. Wen Chung-chi, *The Nineteenth Century Imperial Chinese Consulate in the Straits Settlements: Origins and Development,* tesis tidak diterbitkan (University of Singapore, 1964), hlm. 235-8.

73. *SSGG,* 1879, hlm. 113-4. Ibid., 1880, hlm. 225 dan 751.
74. Konsul yang pertama, dan salah satu dari wakil-wakil Cina di negeri asing, adalah Hoo Ah Kay ("Whampoa"), pedagang Singapura yang sangat dihormati, yang diberi gelar C.M.G. dan diangkat menjadi anggota Dewan Legislatif dan Dewan Eksekutif oleh Inggris. Selama masa kekuasaannya dari 1877 hingga ia meninggal pada 1880 ia tidak melakukan suatu apapun untuk mengganggu kekuasaan Inggris. Sebaliknya, Tso adalah seorang pejabat muda dan cendekiawan Cina, meski berpengetahuan sangat dalam mengenai urusan-urusan Barat. Wen, *The Nineteenth-Century Imperial Chinese Consulate,* hlm. 86-9.
75. Ibid., hlm. 121-3. *SSGG,* 1886, hlm. 133.
76. Bool, *De Chineesche immigratie naar Deli,* hlm. 4. Modderman, *Gedenkboek uitgegeven ter gelegenheid,* hlm. 45. Sikap bermusuhan yang semakin besar terhadap Deli sekitar waktu ini juga mungkin disebabkan oleh perjalanan keliling dua orang Cina Komisioner Pemerintah, yang berkunjung ke Deli dan ke tempat-tempat lain pada 1886. Ada perbedaan yang besar antara kesan-kesan yang baik

yang mereka peroleh mengenai Deli dan mereka sampaikan kepada Pickering (*SSGG*, 1887, hlm. 243-4) dan kesan-kesan bernada sangat mengecam yang dikutip Wen Chung-chi (hlm. 132) dari sebuah sumber tertulis Cina pada 1928.

77. *SSGG*, 1887, hlm. 244. 78. Ibid., 1889, hlm. 221.

79. Pickering, dalam *SSGG*, 1889, hlm. 222-3. *SSLCR,* 1890, hlm. 17 dan 19, dan hlm. 14-5 dalam bagian bukti-bukti.

80. Laporan Pickering tahun 1883 (*SSGG*, 1884, hlm. 453-4) sangat mengharapkan penghapusan sistem kuli kontrak, yang menjadi sasaran demikian banyak perlakuan pemerasan. Namun, setelah itu dia sendiri maupun mereka yang menggantikannya tidak pernah lagi menyebut-nyebut hal itu, bahkan ketika jumlah "penumpang tidak membayar" menjadi bagian yang sangat kecil yang tidak penting daripada jumlah total imigran yang datang pada tahun 1890-an. Sebaliknya, Pemerintah Inggris menolak saran Komisi Perburuhan 1890 bagi suatu peraturan kerjasama Inggris-Cina mengenai lalulintas migran, karena pertimbangan bahwa sistem tiket-kredit tidak akan pernah mendapat pengakuan resmi dari pejabat Cina. Wong, *The Malayan Tin Industry to 1914,* hlm. 69. Laporan-laporan Pelindung Cina menunjukkan bahwa kemauan yang tulus untuk membantu imigran Cina pada tahun-tahun paling awal perlahan-lahan berubah menjadi upaya mempertahankan kepentingan dirinya sendiri, yang mencakup balas jasa (25 sen atas kontrak untuk Malaya Inggris, $1 untuk kontrak untuk tempat-tempat lain) yang berhak diterimanya akibat dari sistem kuli kontrak tersebut.

81. Bool, *De Chineesche immigratie naar Deli,* hlm. 4. *Consulaire Verslagen,* 1887, hlm. 435; 1888, hlm. 790 and 1073.

82. Dari laporan tahunan Pelindung Cina dalam *SSGG.*

83. Angka-angka ini lebih besar daripada angka-angka dalam lajur terakhir Tabel 4 karena mencakup (a) 3.000-5.000 orang Indonesia setiap tahun, (b) sejumlah *taukheh* yang sudah bekerja beberapa lama di Nanyang. Satu-satunya wilayah yang menyerap kuli kontrak dalam jumlah yang semakin besar dalam periode ini ialah Sabah, tempat perkebunan tembakau sedang dibangun. Sabah menyerap tidak lebih dari 500 orang sebelum 1888, 3.028 pada tahun itu, 6.321 pada 1889 dan 7.223 pada 1890. *SSGG,* 1891, hlm. 1087. Wong, *The Malayan Tin Industry to 1914,* hlm. 67.

84. Lihat bawah, hlm. 219-21.

85. Bool, *De Chineesche immigratie naar Deli,* hlm. 5-6. Schadee, *Geschiedenis van Sumatra's Oostkust, II,* hlm. 35 dan 44.

86. Deli Mij., Deli Batavia Mij., Tabaksmaatschappij Arendsburg, Amsterdam Deli Compagnie dan Messrs Naeher & Grob.

87. Dari sisi perdagangan, Jerman merupakan negeri yang paling berminat untuk mematahkan dominasi Inggris dalam bidang perdagangan Asia. Orang Jerman

juga pemilik saham tembakau Deli yang besar. Di antara 688 warga Eropa yang tinggal di Pantai Sumatra Timur pada 1883, 390 adalah orang Belanda, 123 orang Jerman, dan 88 orang Inggris. Schadee, *Geschiedenis van Sumatra's Oostkust, II,* hlm. 41.

88. Bool, *De Chineesche immigratie naar Deli,* hlm. 6-10. Schadee, *Geschiedenis van Sumatra's Oostkust,* II*, hlm.* 219-20.
89. Bool, *De Chineesche immigratie naar Deli,* hlm. 11.
90. Bool, *De Chineesche immigratie naar Deli,* hlm. 28 dan 40. Modderman, *Gedenkboek uitgegeven ter gelegenheid,* hlm. 50-4. *Consulaire Verstagen,* 1889, II, hlm. 35-6; 1890, II, hlm. 37-8. Para pekebun membedakan antara apa yang dinamakan "kuli kelas satu" yang dicari dan disewa di Swatow, dan terdiri sebagai besar dari suku Teochiu, dan "kuli kelas dua", yang dicari dan disewa di tempat bersangkutan, yang biasanya terdiri dari suku Hakka atau suku Hokkien, dan sering *laukheh,* bukan *sinkheh.*
91. Bool, *De Chineesche immigratie naar Deli,* hlm. 26. Jebson & Co. (Hong Kong) mengambil alih kontrak ini pada 1904, dan K.P.M. pada 1914.
92. Bool, *De Chineesche immigratie naar Deli,* hlm. 11-2.
93. Dalam pernyataan pada Mei 1890, pihak berwenang Provinsi Kwangtung mendukung ini dengan menyatakan bahwa kerusuhan di atas kapal *China* semata-mata ulah para perantara Straits. Bool, *De Chineesche immigratie naar Deli,* hlm. 17.
94. *Consulaire Verslagen,* 1890, II, hlm. 37. *SSGG,* 1890, hlm. 847. Bool, *De Chineesche imnaigratie naar Deli,* hlm. 13.
95. Bool, *De Chineesche immigratie naar Deli,* hlm. 17.
96. Ibid., hlm. 19-21.
97. Ibid., hlm. 22.
98. Schadee, *Geschiedenis van Sumatra's Oostkust,* II, hlm. 223-4. *Consulaire Verslagen,* 1888, hlm. 790.
99. *Koloniaal Verslag,* 1880, hlm. 192. Schadee, *Geschiedenis van Sumatra's Oostkust,* II*, hlm.* 44.
100. *Consulaire Verslagen,* 1888, hlm. 1076. Juga Schadee, *Geschiedenis van Sumatra's Oostkust,* II, hlm. 223; *SSGG,* 1891, hlm. 1087.
101. Dari *Kolonial Verslagen,* berbagai tahun yang relevan.
102. Sebagian besar dari ini dibawa langsung dari Swatow. Setelah 1899 Biro Imigran tidak lagi mencari dan menyewa pekerja dari Straits Settlements, meski para pekebun yang bukan anggota D.P.V tetap melakukannya tetapi untuk jumlah kecil.
103. Bool, *De Chineesche immigratie naar Deli,* hlm. 24; Boeke, *The Structure of the Netherlands Indian Economy,* hlm. 74-5.

Bab 10

1. H.J. Benda, *The Crescent and the Rising Sun. Indonesian Islam under the Japanese Occupation, 1942-1945* (The Hague: W. van Hoeve, 1958), hlm. 131; W F. Wertheim, *Indonesian Society in Transition: A Study* of *Social Change* (The Hague: W. van Hoeve, 1959), hlm. 318. Versi yang menjadi dasar untuk bab ini, yakni artikel ilmiah pertama Wertheim pada 1967, dipengaruhi oleh cara berpikir yang sama.
2. Michael Francis Laffan, *Islamic Nationhood and Colonial Indonesia: the umma below the winds* (London/New York: Routledge Curzon, 2003).
3. C. C. Berg, "Indonesia", dalam *Whither Islam?,* ed. H.A.R. Gibb (London: V. Gollanck, 1932), hlm. 262.
4. Peranan Indonesia dalam persoalan-persoalan ini dibahas panjang lebar dalam Laffan, *Islamic Nationhood,* hlm. 202-14.
5. Gottfried Simon, *The Progress and Arrest of Islam in Sumatra* (London: Marshall Brothers, 1912), hlm. 38-9.
6. Perdebatan mengenai bagaimana membaca Islam varian Jawa semakin hidup dalam Clifford Geertz, *The Religion of Java* (Glencoe: Free Press, 1960), dan dilanjutkan dalam M.C. Ricklefs, "Six Centuries of Islamization in Java", dalam *Conversion to Islam,* ed. Nehemia Levtzion (NewYork: Holmes & Meier, 1979), hlm. 100-29; Mark Woodward, *Islam in Java: Normative piety and mysticism in the Sultanate of Yogyakarta* (Tucson: University of Arizona Press, 1989); Robert Hefner dan Patricia Horvatich (ed.), *Islam in an Era of Nation-States* (Honolulu: University of Hawaii Press, 1997).
7. J. Vredenbregt, "The Haddj, Some of Its Features and Functions in Indonesia", *BKI 118* (1962): 140-52.
8. Lavino kepada Read, 21 Juli 1873, Algemeen Rijksarchief, Consulaat Penang 100.
9. C. Snouck Hurgronje, *Mekka in the Latter Part of the Nineteenth Century,* terjemahan J.H. Monahan (London: Luzac & Co., 1931), hlm. 220-30.
10. Menurut perkiraan ada 10.000 penduduk semacam itu pada tahun 1920-an, meski menurut hitungan resmi pada 1937 ini hanya 3.113, dari ini 1.400 mahasiswa; G.-H. Bousquet, *La politique musulmane et coloniale des Pays-Bas* (Paris, 1938), hlm. 38-9.
11. Snouck Hurgronje, *Mekka,* hlm. 259-61. Lihat juga Laffan, *Islamic Nationhood,* hlm. 62-76.
12. L.W C. van den Berg, *Le Hadhramaut et les colonies arabes dans l'archipel Iradien* (Batavia, 1886), hlm. 105-20. J.A. Morley, "The Arabs and the Eastern Trade", *JMBRAS* 22, 1 (1949): 156. C. Snouck Hurgronie, "L'Arabie et les Indes Neerlandaises", *Revue de I'Histoire des Religions* 57 (1908): 74-5. *Encyclopedia van Nederlandsch-Indie* (The Hague, 1917), II, hlm. 3.

13. Vredenbregt, "The Haddj", hlm. 98-103.
14. C. Snouck Hurgronje, *Nederland en de Islam,* 2nd ed. (Leiden: E.J. Brill, 1915), hlm. 73. Motivasi berbeda bagi antagonisme terhadap Belanda di kalangan sebuah kelompok kecil orang Turki berpendidikan Barat terungkap dalam suratkabar *semi-official* Constantinople *La Turquie,* pada Mei-Juli 1873. Ini lebih banyak berbicara tentang keburukan-keburukan sistem tanam paksa, dalam bahasa yang serupa dengan bahasa kaum liberal Eropa, daripada tentang pertentangan agama.
15. Van de Putte kepada Cremers, 1 November 1864, Algemeen Rijksarchief, Ko1.Kab. F 11, Dossier 5971.
16. Untuk pembahasan mengenai kelompok masyarakat ini lihat W.R. Roff, "The Malayo-Muslim world of Singapore at the Close of the Nineteenth Century", *JAS XXIV,* 1 (1964): 75-90.
17. Van de Putte kepada Cremers, 4 Januari 1866; juga Read kepada Cremers, 31 Juli 1865; A.R.A., Buitenlandse Zaken Dossier 3076.
18. Read kepada Loudon, 23 Juni 1873, salinan Kolonien kepada B.Z., 6 September 1873, Buitenlandse Zaken Dossier Atjeh.
19. Kementerian Luar Negeri kepada Kementerian Kolonial, 13 April dan 20 Juli 1885, C.O. 273/137.
20. Demikian orang Eropa menyebutnya, barangkali karena pertama kali mereka mendengar mengenai kelompok Islam ini berupa analogi dengan pendeta-pendeta Portugis. Orang Melayu pada waktu itu menyebut mereka *orang puteh,* karena jubah putih yang mereka kenakan dan yang umumnya dikaitkan dengan semangat Islam. Sebuah tulisan Indonesia menyebut kaum "Padri" *kaum muda Islam,* dan dengan demikian mengaitkan mereka dengan modernisme; Dawis Datoek Madjolelo dan Ahmad Marzoeki, *Tuanku Imam Bondjol* (Djakarta/Amsterdam, 1950), hlm. 61-2 dan *passim.* Pembahasan terbaik mengenai Padri saat ini terdapat dalam Christine Dobbin, *Islamic Revivalism in a Changing Peasant Economy: Central Sumatra* 1784-1847 (London: Curzon Press, 1983).
21. A.H. Johns, "Muslim Mystics and Historical Writing", *Historians of South East Asia,* ed. D.G.E. Hall (London: Oxford University Press, 1961), hlm. 42.
22. Madjolelo dan Marzoeki, *Tuanku Imam Bondjol,* hlm. 46-7. R.A. Kern, "Padri", *The Encyclopedia of Islam, III* (Leiden/London, 1936), hlm. 1018. B. Schrieke, "Bijdragen tot de Bibliografie van de huidige godsdienstige beweging ter Sumatra's Westkust", *TBG* 59 (1919-21): 249-57. Pandangan keras Schrieke bahwa kaum "Padri" bukan kaum Wahhabi tidak diragukan lagi jelas benar, karena komunikasi dengan tanah Arab sangat sedikit dan karena sangat berbedanya keadaan yang dihadapi para pejuang reformasi itu di Minangkabau. Namun, argumen Schrieke tampaknya tidak menghancurkan pandangan ortodoks bahwa ke tiga haji Minangkabau itu sampai batas tertentu diilhami oleh kaum Wahhabi, yang pada waktu itu mengancam Mekkah dan Madinah dari markas mereka di Nejd.

23. Selain Dobbin, *Islamic Revivalism,* aspek militer perang itu dibahas panjang lebar dalam H.M. Lange, *Het Nederlandsch Oost-Indisch Leger ter Westkust van Sumatra* (1819-1845), 2 jilid. ('s Hertogenbosch, 1852); H.J.J.L. de Stuers, *De Vestiging en uitbreiding der Nederlanders terWestkust van Sumatra,* 2 vols. (Amsterdam, 1849-50); dan serangkaian tulisan yang lebih berimbang oleh E.B. Kielstra dalam *BKI* 36 (1887): 7-163; *BKI 37* (1888): 21b-380; BKI 38 (1889): 161-249, *31379*, 467-514; *BKI 39* (1890): 127-221, 263-348; *BKI 40* (1891): 254-330, 622-706.
24. E. S. de Klerck, *De Atjeh-oorlog* (The Hague, 1912), hlm. 145-51, 163-6.
25. Persoalan semacam ini yang mendapat perhatian pemerintah tampak jauh lebih jelas lagi dalam kasus misi NZV kemudian ke Batak-Karo yang bertetangga dengan lingkar perkebunan Sumatra Timur—Rita Smith Kipp, *The Early Years of a Dutch Colonial Mission: The Karo Field* (Ann Arbor, 1990).
26. Schrieke, "Bijdragen", hlm. 262-6. Peranan penting Naqshibandiyahtariqah dalam mendorong sikap yang lebih eksklusif pada paruh kedua abad ke-19 akhirnya telah diteliti secara sistematis oleh Martin van Bruinessen, *Tarekat Naqsyabandiyah di Indonesia* (Jakarta: Mizan, 1992). Pertumbuhanya di Bantam pada tahun 1880-an dan hubunganya dengan gerakan-gerakan anti-Belanda di situ mendapat perhatian khusus dari Konsul Jenderal Belanda di Singapura, yang mengatakan himpunan itu memiliki sekitar 500 anggota di situ pada tahun 1888. *Verzameling van Consulaire en andere Verslagen en Berigten,* 1889, hlm. 56-7.
27. E.S. de Klerck, *History of the Netherlands East Indies* (Rotterdam: Brusse, 1938), hlm. 11, 279-84. Kembali hubungan internasional tidak dapat dibuktikan dengan jelas. Namun, Belanda memang mengambil tindakan pada 1857 menangkis desas desus yang dibawa haji-haji yang sudah kembali dan beredar di Sumatra, bahwa beberapa *ulama* di Mekkah mendapat wahyu bahwa Nabi menangis melihat meluasnya Kekuasaan Kristen di Asia. Orfeur Cavenagh, *Reminiscences of an Indian Official* (London: W H. Allen, 1884), hlm. 355-6.
28. Catatan oleh Biro A: "Turksche bemoeijing in den N.I. Archipel", n.d. (1864), A.R.A., Ko1.Kab.H 10, Dossier 5970. Rochussen kepada Van Goltstein, 4 September 1858; Van Zuylen van Nyeveldt kepada Goltstein, 30 September 1858; A.R.A., B.Z. Dossier 3076. J.Tideman, *Djambi* (Amsterdam: Koninklijke Vereeniging, 1938), hlm. 31-3.
29. *Encyclopedie van Nederlansch-Indie* I, hlm. 135-6 dan 274. WA. van Rees, *De Bandjermasinsche Krijg van 1859-1863* (Arnhem, 1865), hlm. 31-51, 165-6, 180-3, 284-6.
30. Hasselman kepada Van Zuylen van Nyeveldt, 6 September 1867, A.R.A. Ko1.Kab. x9, Dossier 5994. *DeAtjeh-oorlog,* hlm. 294-5. C.A. Kroesen, "Geschiedenis van Asahan", TBG 31 (1886): 107n.
31. Heldewier kepada Gericke, 19 dan 26 Juni 1873, Buitenlandse Zaken Dossier Atjeh.

32. De Klerck, *De Atjeh-oorlog,* hlm. 216-7.
33. Ibid., hlm. 461-2. Alexander, "Korte levensschets van de Arabier Habib Abdoe'rRahman Alzahir", *De Indische Gids* 2, II (1880): 1008-20, terjemahan dalam Anthony Reid, "Habib Abdur-rahman az-Zahir (1833-1890)", *Indonesia* 13 (April 1972): 37-60. Peran Habib Abdur-Rahman dalam diplomasi Aceh dibahas dalam Anthony Reid, *The Contest for North Sumatra* (Kuala Lumpur: OUP, 1969).
34. Keun kepada Roest van Limburg, 2 Desember 1868 dan 3 Februari. 1869, A.R.A., B.Z. Dossier 3076.
35. J. Woltring, *Bescheiden Betraffende de Buitenlandse Politick van Nederland,* Vol. I (1871-4) (The Hague: R.G.P., 1962), hlm. 420.
36. Ibid., hlm. 541. R.H. Davison, *Reform in the Ottoman Empire 1856-76* (Princeton: Princeton University Press, 1963), hlm. 276. Guntingan koran Constantinople tanggal Mei-Juli 1873 dalam Buitenlandse Zaken, Dossier Aceh.
37. Elliot kepada Granville, 8 Mei 1873, F.O. 78/2267
38. Woltring, *Bescheiden Betreffende,* hlm. 612-4. Heldewier kepada Gericke, 7 dan 23 Juli 1873, Buitenlandse Zaken, Dossier Atjeh.
39. Heldewier kepada Gericke, 1, 6, 15 Desember 1873, Buitenlandse Zaken, Dossier Atjeh.
40. Maier kepada Loudon, 22 November dan 14 Desember 1874, salinan kepada Lavino, Algemeen Rijksarchief, Consulaat Penang 99.
41. Davison, *Reform in the Ottoman Empire,* hlm. 276. Heldewier kepada Gericke, 11 Juli 1873, Buitenlandse Zaken, Dossier Atjeh.
42. Lavino kepada Read, 5 September 1873, A.R.A., Consulaat Penang 100.
43. Lampiran dalam Governor-General kepada Koloniën, 27 September, 7 dan 15 Oktober 1873, A.R.A., Kol.Kab. D38, Dossier 6042. Sejumlah surat, Juli-September 1873, dalam A.R.A., Consulaat Singapore 100.
44. Tramp kepada Loudon, 26 November 1873, salinan Gubernur Jenderal kepada Kolonien, 19 Desember 1873, A.R.A., Ko1.Kab. A9, Dossier 6047.
45. Laporan Rahasia K.H. Hall, Juli 30, 1873, salinan Gubernur Jenderal kepada Kolonien, 16 Agustus 1873, A.R.A., Kol.Kab. Q30, Dossier 6040.
46. Read kepada Loudon, 17 Desember 1873, salinan Gubernur Jenderal kepada Kolonien, 16 Agustus 1873, A.R.A., Kol.Kab.Q30, Dossier 6040.
47. Harris kepada Granville, 22 Juli 1873, F.O. 37/534.
48. Woltring, hlm. 586.
49. Surat Edaran kepada Konsul di negara-negara Islam, 22 Agustus 1873, F.O. 83/414.
50. Pemerintah India kepada Argyll, 2 Oktober 1873, salinan Kantor urusan India kepada Kementerian Luar Negeri, 3 November 1873, F.O. 37/519.

51. Lavino kepada Van Lansberge, 25 Nov. 1875; Maier to Van Lansberge, 16 Nov. 1875; A.R.A., Consulaat Penang 102 dan 99. Satu-satunya gejala di Semenanjung yang hampir sama dengan gerakan Islam yang diuraikan dalam tulisan ini ialah pemberontakan yang dipimpin Orang Kaya Bahman di Pahang (1891-5). Mulai, seperti sering terjadi, dengan ketidakpuasan pribadi seorang pemimpin masyarakat, gerakan itu mendapat dukungan yang cukup besar dari rakyat, bahkan di wilayah tetangga Trengganu dan Kelantan sebagai akibat dari seruan agama untuk menentang Inggris. Seruan ini banyak berlandas pada inspirasi seorang pemimpin agama terkenal di Trengganu, Ungku Sayyid, dan sejumlah haji Pahang, tetapi di pihak lain Pantai Timur Malaya terisolasi dari arus utama kebangkitan Islam abad ke-19. Di tingkat rakyat banyak, kisah-kisah ajaib dan mistis tampaknya lebih penting daripada solidaritas Islam. Lihat W Linehan, "A History of Pahang", *JMBRAS 14,* pt. 2 (1936): 139-68; dan untuk beberapa kisah pendek yang menarik, Hugh Clifford, *Bush-whacking* (Edinburgh/London: W Blackwood, 1901), hlm. 64-8.
52. Maier kepada Willebois, 18 September 1875, Buitenlandse Zaken Dossier Aceh. Read kepada Van Lansberge, 16 Maret dan 1 April 1876, salinan kepada Lavino, A.R.A., Consulaat Penang 99.
53. Maier kepada Read, 8 Mei 1875 (pribadi), ringkasan dalam Bylandt kepada Willebois, 12 Juni 1875, Buitenlandse Zaken Dossier Aceh.
54. Maier kepada Van Lansberge, 24 Juli 1875, salinan kepada Lavino, A.R.A., Consulaat Penang 99. Desas desus ini tampaknya berasal dari pernyataan Turki mengenai rencananya untuk mengangkat duta besar untuk Peking untuk melindungi umat Islam Cina.
55. Sultan Daud kepada Alsagoff, r8 Ragab 1307H (10 Mar. 1890), terjemahan. Gubernur Jenderal kepada Kolonien, 12 September 1890; Van Assen kepada Van Teijn, 13 September 1890, salinan G-G. kepada Kolonien, 26 September 1890; A.R.A., Kol. Kab. H16, Dossier 6198.
56. Deijkerhoff kepada Pijnacker Hordijk, 17 Maret 1893, salinan G-G. kepada Kolonien, 30 Maret 1893, A.R.A., Kol.Kab. N8, Dossier 6219. Lampiran dalam Smith kepada Meade, 30 Mei 1892 (pribadi), dan Smith kepada Ripon, 19 Oktober 1892, C.O. 273/183. dan 273/183.
57. *Ambtelijke Adviezen van C. Snouck Hurgronie,* ed. E. Gobee dan C. Adriaanse (The Hague, 1957-9), I, hlm. 153-7.
58. T.W Arnold, *The Caliphate* (Oxford, 1924), hlm. 173-7. C. Snouck Hurgronje, *The Holy War "Made in Germany",* terjemahan J.E. Gillet (New York, 1915), hlm. 23-7.
59. Weld kepada Kimberley, 18 dan 28 Mei 1881, C.O. 273/108.
60. Weld kepada Kimberley, 27 Agustus 1881, C.O. 273/109.
61. Konsul-Jenderal Belanda di Singapura, W H. Read, yang selalu curiga kepada Alsagoff, mendapat kesan serupa. Ia menyebutkan dengan nada menuduh sikap

santun yang ditunjukkan Sayyid kepada beberapa pembangkang Palembang dan kepada para pemimpin anti-Belanda di Jambi, dan menuduh bahwa Sayyid telah berjanji akan mendukung para pemimpin anti-Belanda di Jambi itu. Weld kepada 's-Jacob, 4 Oktober 1881 (sangat rahasia), private Singapore letterbook III, Singapore Museum.

62. Banten, seperti Aceh, mewarisi peninggalan dari kerajaan pedagang dan pusat Islam abad ke-17 yang berkembang pesat. Ditaklukkan semata-mata dengan kekerasan pada 1682 dan kembali ditaklukkan setelah sebuah pemberontakan pada 1751, penduduk di dataran pantai utara terutama, paling sering mengungkapkan rasa tidak puas mereka mengenai kondisi ekonomi dengan cara mengadakan pemberontakan di bawah pimpinan pemuka agama. Pemberontakan kecil pada 1881 adalah salah satu dari pemberontakan-pemberontakan yang telah terjadi, yang menandai ketegangan yang semakin meningkat akibat ceramah-ceramah agama Haji Abdul Karim pada 1872, dan kegiatan Naqshibandiyah-tariqah, hingga puncak kekerasan Juli 1888, ketika semua orang laki-laki Eropa di Cilegon, termasuk Asisten-Residen serang, dibunuh. Sebagian besar pemimpin pemberontakan itu haji, salah satu dari mereka ialah putra Haji Wachia. Dampak dari peristiwa Cilegon itu pada pendapat umum Belanda pada masa itu sangat besar; peristiwa itu "tidak saja merenggut nyawa beberapa orang Eropa yang tinggal di sini, tetapi lebih penting lagi juga mempengaruhi kegiatan intelijen sejumlah orang Eropa di India Belanda.". C. Snouck Hurgronje, "Vergeten Jubilés" (1923), *Verspreide Geschriften* (Bonn/Leipzig, 1924-6), N, ii: 429. Also *Encyclopedie van Nederlandsch Oost Indië* (The Hague, 1918-38), I, hlm. 166. Snouck Hurgronje, *Verspreide Geschrifien* IV, i: 249-56. Peristiwa serupa juga terjadi di bagian wilayah Jambi yang konon sudah "ditertibkan"" pada Mei 1885, ketika tiga orang Eropa dibunuh oleh dua orang *haji.*
63. Lavino kepada Rochussen, 22 Agustus 1881, Buitenlandse Zaken Dossier Atjeh.
64. *Ambtelijke Adviezen,* II, 1617, 1619-20, 1737-8.
65. Ibid., hlm. 1662.
66. Ibid., hlm. 1740-1. *Bescheiden betreffende de buitenlandse politiek van Nederland,* Period 3, ed. C. Smit (The Hague, 1957), I, hlm. 166-7, dan II, 250-11, 280-1. Mitchell kepada Chamberlain, 6 Januari 1899, GD/C 7, Singapore Museum. Lampiran-lampiran dalam C.O. kepada Singapura, 14 dan 19 Juli 1904, COD/C 41, Singapore Museum. Setelah kematian Haji Abdoullah pada 1903 dan kemudian veto Inggris atas Kiamil, konsul-konsul Jerman bertindak sebagai konsul Jenderal Turki di Singapura.
67. Terjemahan dalam C.O. kepada Singapura, 30 Maret 1899, COD/C 3r, Singapore Museum.
68. *Ambtelijke Adviezen,* II, hlm. 1620-42.

69. Ibid., hlm. 1647-52. Lampiran-lampiran dalam B.Z. kepada Koloniën, 11 Maret 1899, A.R.A., Kol.Kab.P 4, Dossier 6260.
70. Swettenham kepada Chamberlain, 6 Juli 1900, GD/C 8, Singapore Museum. 71. *Ambtelijke Adviezen,* II, hlm. 1640.
72. *Koloniaal Verslag,* 1905, hlm. 43. *Encyclopedie van Nederlandsch-Indië,* 1, hlm. 612. Pada periode yang menurut laporan ada empat intruktur Turki yang membantu pertahanan Boni (Celebes) *Ambtelijke Adviezen,* II, hlm. 1743.
73. Ibid., hlm. 1741-4. Musurus Pasha kepada Lansdowne, 29 Juni 1904, salinan C.O. kepada Singapura, 6 Juli 1904, COD/C 41, Singapore Museum.
74. *Ambtelijke Adviezen*, II, 1662.
75. Smit, II, hlm. 271-4, 328-9, 364-6, 443-5.
76. Kita masih butuh penelitian yang menyeluruh atas karya Snouck Hurgronje agar ada pengetahuan yang lebih baik sebagai dasar bagi kebijakan etis. Tulisan Benda yang bagus sekali dalam *The Crescent and the Rising Sun,* hlm. 19-31 tampak agak melebih-lebihkan kekaburan pemikiran para pejabat Belanda perumus kebijakan sebelum Snouck Hurgronje.
77. Snouck Hurgronje, *The Holy War "Made in Germany".* X, hlm. 27.
78. Snouck Hurgronje, *Nederland en de Islam,* hlm. 99 dan *passim.* Juga "Over Panislamisme", 1910, *Verspreide Geschriften,* ed. A.J. Wensinck (Leiden, 1922), I, 378 dan *passim.*
79. Antara lain, Benda, *The Crescent and the Rising Sun;* Deliar Noer, *The .Modernist Muslim Movement in Indonesia 1900-1942* (Kuala Lumpur, 1973); C. van Dijk, *Rebellion under the Banner of Islam* (The Hague: Martinus Nihhoff, 1981); Takashi Shiraishi, *An Age in Motion: Popular Radicalism in Yava, 1912-1926* (Ithaca: Cornell University Press, 1990). 80. Benda, *The Crescent and the Rising Sun,* hlm. 31.

Bab 11

1. Charles Burton Buckley, *An Anecdotal History of Old Times in Singapore* (1902, cetak ulang di Kuala Lumpur: University of Malaya Press, 1965), hlm. 76 dan 367.
2. W.H. Read, *Play and Politics. Recollections of Malaya, by an Old Resident* (London: W. Gardner, 1901), hlm. 4-6; Buckley, *An Anecdotal History of Old Times in Singapore,* hlm. 367-8.
3. Raja Ali Haji, *Tuhfat al Nafis (The Precious Gift),* ed. Virginia Matheson dan Barbara Andaya (Kuala Lumpur; NewYork: Oxford University Press, 1982), hlm. 287 and 405.
4. Buckley, *Anecdotal History,* hlm. 623.

5. Ibid., hlm. 367-8; *Who Was Who 1987-1915* (London, 1935), hlm. 589.
6. *Straits Times,* 11 Oktober 1873.
7. *Straits Times,* 1873; C.N. Parkinson, *British Intervention in Malaya. 1867-1877* (Kuala Lumpur, 1964), hlm. 31, 66, dan 119.
8. Read, 1901, hlm. 56-77.
9. Song Ong Siang, *One Hundred Years of the Chinese in Singapore* (1923, cetak ulang di Singapura: University of Malaya Press, 1967), hlm. 87-8, 124-5.
10. Ibid., hlm. 13-6.
11. C.H.H. Wake, "Nineteenth Century Johore: Ruler and Realm in Transition", disertasi Ph.D (Australian National University, 1966), hlm. 297-8.
12. Khoo Kay Kim, *The Western Malay States 1850-1873* (Kuala Lumpur: OUP, 1972), hlm. 103-4; Read, *Play and Politics,* hlm. 24-7; WD. McIntyre, *The Imperial Frontier in the Tropics, 1865-75* (London: Macmillan 1967), hlm. 144-9, 203; C.N. Parkinson 1964, hlm. 119-23; Col. R.H. Vetch, *Life of Lieut. General the Hon. Sir Andrew Clarke* (London 1905), hlm. 149, 172-3. Peranan Read dalam gerak maju Inggris ini dibahas lebih rinci dalam versi awal bab ini, diterbitkan dalam *Empires, Imperialism and Southeast Asia: Essays in Honour of Nicholas Tarling,* ed. Brook Barrington (Clayton: Monash Asia Institute, 1997), hlm. 34-59.
13. Read, *Play and Politics,* hlm. 85-90; Who Was Who, hlm. 589.
14. Read, *Play and Politics,* hlm. 38-48; A.L. Moffat, *Mongkut, the King of Siam* (Ithaca, NY: Cornell University Press, 1961), hlm. 119, 121 dan 123.
15. Consideratien en advies van het B.Z., 5 Desember 1856, termasuk dan surat-menyurat di situ; Departement van Kolonien [selanjutnya Kol.] kepada Department van Buitenlandse Zaken [selanjutnya B.Z.] 6 Mei 1857; keduanya dalam B.Z 3050, Algemene Riksarchief, The Hague [selanjutnya ARAI].
16. Read kepada B.Z., 8 Oktober 1857; NHM kepada B.Z.,13 Oktober 1857; keduanya dalam B.Z. 3050, ARA.
17. Read kepada B.Z., 5 Februari 1863 dan dokumen-dokumen terlampir; NHM kepada B.Z., 24 November 1863; keduanya dalam B.Z. 3050, ARA.
18. B.Z. kepada Kol., 10 Februari 1860; Kol kepada B.Z. 21 September 1860; keduanya dalam B.Z. 3050, ARA.
19. Anthony Reid, *The Contest for North Sumatra: Atjeh, the Netherlands and Britain, 1858-1898* (Kuala Lumpur: University of Malaya Press, 1969), hlm. 30-41.
20. Kol. kepada B.Z., 22 Aug. 1863; juga Kol. kepada Gubernur-Jenderal India Belanda [selanjutya GGvNI], 22 Agustus 1863; keduanya dalam B.Z. 3050, ARA.
21. B.Z. kepada Paddy 25 September 1863, B.Z. 3050, ARA.
22. Netscher kepada GGvNI, 27 November 1863, 3050, ARA.
23. H.J.D. Padday kepada B.Z., 4 Februari 1864, 10 Maret 1864; B.Z. kepada Raja

Belanda, 21 April 1864; W C.S. Padday kepada B.Z., 26 September 1865; semua dalam B.Z. 3050, ARA.

24. B.Z: kepada Kol., 26 November 1863; Kol. kepada B.Z., 15 Desember 1863; keduanya dalam BZ. 25. Reid, *The Contest,* hlm. 53.
26. B.Z. kepada Read, 21 April 1869, dan surat-surat terlampir, dalam B.Z. 3050, ARA.
27. Read kepada B.Z., 16 Juni 1869; B.Z. kepada Read, 6 Agustus 1869; Read kepada B.Z., 8 Oktober 1869; semua dalam B.Z. 3050, ARA.
28. B.Z. kepada Read, 2 Desember 1869 dan 3 Mei 1869; Read kepada B.Z., 14 Maret 1870 dan 20 Oktober 1870; semua dalam B.Z. 3050, ARA.
29. GGvNI kepada Kol., 24 Desember 1870, B.Z. 669, ARA kepada C.O. 17 Mei 1871, C.O. 273i53. Public Record Office, London [selanjutnya PRO].
30. Kruyt [Konsul Jidda] kepada B.Z., 30 September 1880, B.Z. 669, ARA.
31. R.B. Read (Pejabat Konsul-Jenderal) kepada B.Z., 28 Maret 1881, B.Z. 669, ARA. Pada 1881 $8.694 berasal dari biaya visa jemaah haji yang menghasilkan pendapatan bagi konsulat sejumlah seluruhnya $11.868. Pemasukan-pemasukan besar yang lain hanyalah $1.364 untuk komisi yang diperoleh konsulat untuk jasa mengurus perbaikan kapal-kapal perang Belanda, dan $823 yang dipungut dari kapal-kapal Belanda yang singgah di Singapura sebagai bea per ton.
32. E.S. de Klerck, *De Atjeh-oorlog* (The Hague, 1912), hlm. 350; Reid, *The Contest,* hlm. 79-96; Reid, “Indonesian Diplomacy”, hlm. 74-114; Paul Van’t Veer, *De Atjeh-oorlog* (Amsterdam, 1969), hlm. 43-8.
33. Klerck, *De Atjeh-oorlog,* hlm. 359-95; Reid, *The Contest,* hlm. 79-96; Anthony Reid, “Indonesian Diplomacy. A Documentary Study of Atjehnese Foreign Policy in the Reign of Sultan Mahmud, 1870-74”, *JMBRAS* (1969a): 74-114; Van’t Veer, *De Atjeh-oorlog,* hlm. 43-8.
34. Read kepada GGvNl, 6 Maret 873, B.Z. Atjeh I, ARA. Ulasan Read atas surat Ord, 19 Maret 1873, Konsulat Singapura 100.
35. Studer kepada Hale (Washington), 18 Maret 1873, U.S. Consular Despatches, Singapura.
36. Ord kepada Kimberley, 24 Maret 1873, CO 273/65, PR.O.
37. Anthony Reid, ”Tengku Mohamed Arifin, Envoy Extraordinary”, *Peninjau Sejarah* (Kuala Lumpur, 1968), hlm. 31-4.
38. Studer kepada Hale (Washington), 18 Maret 1873, U.S. Consular Despatches, Singapore.
39. Ibid.
40. Read kepada N.I. General Secretary, 20 Februari 1873, Consulaat Singapore 8.
41. Read kepada GGvNI, 7 Juli 1873, B.Z. Atjeh, ARA.
42. Reid, “Tengku Mohamed Arifin”, hlm. 35-9.

43. Army Commander kepada GGvNI, 2 Agustus 1873, Ko1.Kab. Q30 1873, Dossier 6040, ARA.
44. Read kepada GGvNI, 8 September 1873, Ko1.Kab. Q30 1873, Dossier 6040, ARA. Berbagai catatan dalam berkas Arifin 1873-76 di Konsulat Singapura 100.
45. Read kepada GGvNI, 11 Maret 1873, B.Z. Atjeh, ARA.
46. Read kepada GGvNI, 3 Juni 1873, B.Z. Blokkade Atjeh, ARA.
47. Read kepada GGvNI, 14 Oktober 1873 dan 10 Februari 1874, B.Z. Blokkade Atjeh, ARA.
48. Vetch, 1905, hlm. 129; Reid, *The Contest,* hlm. *160-1.*
49. Van't Veer, *De Atjeh-oorlog,* hlm. 23.
50. Lavino kepada B.Z., 28 Januari 1882, Consulaat Penang 11.
51. Stortenbecker kepada Read, 1 Mei 1873, Consulaat Singapore 100.
52. Stortenbecker kepada Read, 30 April 1873, Consulaat Singapore 100.
53. Stortenbecker kepada Read, 2 Agustus 1873, Consulaat Singapore 100. Besluit GGvNI 2 Juni 1874, dalam GGvNI kepada Kol., 2 Juni 1874, Kol. Kab. 25 Agustus 1874, ARA 1052.
54. Army Commander kepada Lavino, 30 Juni 1873; 30 Agustus 1873; 19 Desember 1873; Consulaat Penang 99. Lavino kepada Army Commander, 5 Agustus 1873; 2 Oktober 1873; dan 11 November 1873, Consulaat Penang 100.
55. Lavino kepada Army Commander, 18 September 1873 dan 2 Oktober 1873, Consulaat Penang 100.
56. Reid, *The Contest,* hlm. 93n dan 97n; Lavino kepada Chef van het bureau voor de Krijgstoerustingen op Sumatra, 8 Agustus 1873; 12 Agustus 1873; 23 Agustus 1873; 3 Oktober 1873, dalam Consulaat Penang 100. Lavino kepada Read, 8 Juli 1873; 19 September 1873, dalam Consulaat Penang 100. Army Commander kepada Read, 13 Juli 1873, Consulaat Singapore 100.
57. Lavino kepada Army Commander, 29 Aug. 1873; 2 September 1873 (dua kali); 15 September 1873, dalam Consulaat Penang 100.
58. Lavino kepada Read, 19 September 1873, Consulaat Penang 100.
59. Read kepada GGvNI, 19 Februari 1874, Consulaat Singapore 9.
60. Besluit of the GGvNI, 16 Juli 1874, dan dokumen-dokumen lampiran, Consulaat Penang 46.
61. Government Secretary of N.I. kepada Lavino, 26 Juli 1874, Consulaat Penang.
62. Besluit of the GGvNI, 12 April 1874, Consulaat Penang 14.
63. Lavino kepada Secretary-General of N.I, 27 Juni 1874; Lavino kepada Padday, 27 Juni 1874, keduanya di Consulaat Penang 100. Read kepada B.Z., 17 Februari 1876, ARA, B.Z. Atjeh.
64. Lavino kepada B.Z., 11 April 1881, Consulaat Penang 11.

65. Read kepada Secretary-General of N.I, 18 Maret 1874, Consulaat Singapore 9.
66. Laporan tiga bulanan mengenai "pengeluaran rahasia" yang diserahkan kepada N.I. Bagian Keuangan ConsulaatPenang 12, 13, 14 dan 20.
67. E. Gobee dan C. Adriaanse (eds.), *Ambtelijke Adviesen van C. Snouck Hurgronje* (The Hague 1957-59), hlm. 1603.
68. J.A. de Vicq kepada GGvNI, 4 Februari 1896, Kol. A14/no.45, Dossier 6239, ARA.
69. Lavino kepada B.Z., 7 Maret 1893, B.Z. 669, ARA.
70. Lavino kepada B.Z., 19 April 1888, B.Z. 669, ARA.
71. Dikupas dalam dalam Bab 9 di atas.
72. Fleury kepada Governor Atjeh, 13 Februari 1883; Fleury kepada Read, 20 Februari 1883; 6 Maret 1883; semua di Consulaat Penang 12.
73. Kruyt kepada B.Z., 30 September 1880; 20 November 1881, keduanya dalam B.Z. 669, ARA.
74. GGvNI kepada Kol., 29 Desember 1881. B.Z. 669, ARA.
75. Read kepada B.Z., 9 Maret 1880, B.Z. 669, ARA.
76. Read kepada B.Z., 7 Oktober 1881, B.Z. 669, ARA.
77. Rochussen (B.Z.) kepada van Bylandt (London), 28 September 1882; 28 Oktober 1882; Bylandt kepada Rochussen, 9 Oktober 1882; 31 Oktober 1882; 8 November 1882, semua dalam B.Z. 669, ARA.
7$. B.Z. kepada Kol., 3 Januari 1883; De Braun kepada Rochussen (pribadi), 5 Januari 1883; GGvNI kepada Kol., 7 Maret 1883; B.Z. kepada Kol., 16 dan 19 April 1883; semua dalam B.Z. 669, ARA.
79. Dibacakan kepada B.Z., 24 Agustus 1883, B.Z. 669, ARA.
80. Koninklijk Besluit, 14 Desember 1884, B.Z. 669, ARA.
81. Lavino kepada B.Z., 29 Januari 1887, B.Z. 669, ARA

Bab 12

1. Penulis sangat berhutang budi kepada beberapa rekan Jepang yang telah memungkinkan, selama kunjungan singkat ke Jepang pada Agustus 1973, dia menemukan tempat dan menggunakan sumber-sumber Jepang yang penting mengenai pendudukan Sumatra Utara dan mewawancarai orang-orang Jepang yang berkaitan dengan peristiwa-peristiwa ini. Terima kasih khusus kepada Shiraishi Saya, yang menuntun, menterjemahkan, dan memberi saran; sebagian besar dari terjemahan dari sumber-sumber Jepang adalah jerih payah dia. Saya juga ingin mengucapkan teroma kasih kepada almarhum Profesor Itagaki Yoichi dan Profesor Nagazumi Akira, almarhum Fujiwara Iwaichi, Azuma Toru, Ichikura Tokusaburo, Profesor Masuda Ato, dan Dr. Nishihara Masashi. Orang-

orang Indonesia yang telah memberikan bantuan kepada saya berupa informasi dan tuntunan banyak sekali, dan tidak semua ingin namanya disebut. Namun demikian saya ingin mengucapkan terima kasih khusus kepada almarhum Said Abu Bakar, yang kisah-kisah-kisahnya yang sungguh menarik menyebabkan saya terdorong untuk menelusuri banyak jalan yang baru.

2. Willard H. Elsbree, *Japan's Role in Southeast Asian Nationalist Movements* (Cambridge: Harvard University Press, 1953), hlm. 12.
3. Ibid., hlm. 120-32, 141-5, 163.
4. Selain Piekaar dan Benda, yang dibahas di bawah, lihat Benedict Anderson, *Some Aspects of Indonesian Politics under the Japanese Occupation,* 1942-1945 (Ithaca: Cornell Modern Indonesia Project, 1961), hlm. 223; J.D. Legge, *Indonesia* (Englewood Cliffs: Prentice-Hall, 1964), hlm. 132; dan, sampai batas tertentu, G. McT. Kahin, *Nationalism and Revolution in Indonesia* (Ithaca: Cornell University Press, 1952), hlm. 110-4.
5. A.J. Piekaar, *Atjeh en de oorlog met Japan* (The Hague: Van Hoeve, 1949).
6. Mengenai pertarungan ini, "perang Cumbok" Desember 1945/Januari 1946, lihat Abdullah Arif, "The affair of the Tjumbok traitors", Anthony Reid, penterjemah dan editor. *Review of Indonesian and Malayan Affairs 4/5 (1970/1): 29-65;* Anthony Reid, *The Blood of the People: Revolution and the End of Traditional Rule in Northern Sumatra* (Kuala Lumpur: Oxford University Press, *1979),* hlm. 195-204.
7. Benda, *The Crescent and the Rising Sun,* terutama hlm. 186-9 dan 199-204. Juga *Continuity and Change in Southeast Asia: collected journal articles of Harry Benda* (New Haven: Yale Southeast Asia Studies, 1972*),* hlm. 44-5, 77 dan 151-2.
8. Benda, *The Crescent and the Rising Sun,* hlm. 199*;* juga Benda, *Continuity and Change,* hlm. 173.
9. H.J. Benda, J.K. Irikura dan K. Kishi, ed., *Japanese Military Administration in Indonesia: Selected Documents* (New Haven: Yale Southeast Asia Studies, 1965*).*
10. "Principles governing the administration of occupied southern areas, 20 November 1941*",* dalam ibid., hlm. 1.
11. Ada perbedaan besar seperti ini pula antara persatuan yang dikemukakan oleh AFPFL di Burma dan Vietminh di Vietnam pada 1945*,* dengan perpecahan-perpecahan yang tampaknya tidak dapat diperbaiki dalam gerakan nasional pra-perang di kedua negeri ini. Namun, karakter khas anti-Jepang kedua gerakan ini pada 1945*,* menyebabkan sulit untuk membandingkannya dengan Indonesia.
12. Kelompok nasionalis sendiri sering mengeluhkan hal ini: "Reputasi para pemimpin hancur dalam mata rakyat", kata Ki Hadjar Dewantoro pada Juni 1945*,* dikutip dalam Bernhard Dahm, *Sukarno and the Struggle for Indonesian Independence* (Ithaca: Cornell University Press, 1969), hlm. 304. "Apa yang dikatakan rakyat

banyak . . . seringkali tidak enak. Ada yang mengatakan, `Para pemimpin kita sekarang hidup makmur tetapi kita tetap saja miskin seperti dahulu,'" Mohammad Hatta, Agustus 1943, terjemahan William Frederick dalam *The Putera Reports. Problems in Indonesian Japanese wartime cooperation* (Ithaca: Cornell Modern Indonesia Project, 1971), hlm. 61.

13. Tentang peristiwa-peristiwa "revolusi sosial" 1945-6, lihat Benedict Anderson, *Java, in a time of revolution, occupation and resistance,* 19441946 (Ithaca: Cornell University Press, 1972), hlm. 16-189 dan 332-69; John Smail, *Bandung in the Early Revolution 1945-1946. A study in the social history of the Indonesian revolution* (Ithaca: Cornell Southeast Asia Program, 1964), hlm. 99-146; Reid, *The Blood of the People,* hlm. 185-251; Anthony Reid, *The Indonesian National Revolution,* 1945-1950 (Melbourne: Longman, 1974), hlm. 14-7 dan 59-76.
14. Dahm, *Sukarno,* hlm. 261-6; dan *History of Indonesia in the Twentieth Century* (NewYork: Praeger, 1970), hlm. 93. Lihat juga George S. Kanahele, "The Japanese Occupation of Indonesia: Prelude to Independence", tesis PhD (Cornell University, 1967), hlm. 241-2. Harry Benda himself *(Continuity and Change in Southeast Asia,* hlm. 72), menggambarkan sebuah situasi di Jawa sangat sama dengan situasi yang digambarkan di bawah mengenai Sumatra, meski kesimpulan yang ditariknya berbeda.
15. Piekaar, *Atjeh en de oorlog met Japan,* hlm. 332. Meski saya berbeda di sini, kita harus mengagumi pandangan tidak berat sebelah yang ditunjukkan Piekaar mengenai pemerintahan Jepang, jika diingat keadaan yang ada pada waktu ia menulis.
16. Siaran-siaran ini, selama satu jam setiap malam, dipimpin oleh veteran nasionalis Sumatra Mohammad Samin (bin Taib), yang dikenang masyarakat luas di Sumatra Timur dan Aceh karena ketokohannya sebagai pemimpin Sarekat Islam di Medan, kepala redaksi penerbitan radikal *Benih Merdeka,* dan pengacara, sampai dikekang oleh pembatasan-pembatasan oleh pemerintah pada 1921. Ia pindah ke Penang menjelang akhir 1930, dan di situ ia menulis untuk suratkabar seperti *Sahabat* dan *Suara Malaysia.* Pada waktu pendudukan Jepang ia muncul sebagai pemimpin *Persatuan Indonesia Merdeka* bersama seorang dari Minangkabau yang lain, Haji Thamin. Wawancara dengan Nip Xarim dan Ghazali Yunus.
17. Piekaar, *Atjeh en de oorlog met Japan, hlm.* 183. 18. Lihat Bab 10.
19. Piekaar, *Atjeh en de oorlog met Yapan, hlm.* 14-24. Reid, *The Blood of the People,* hlm. 7-37; James T Siegel, *The Rope of God* (Berkeley: University of California, 1969), hlm. 83-133. H. Ismuha, "Lahirnja Persatuan Ulama Seluruh Atjeh' 30 Tahun Jang Lalu", *Sinar Darussalam* 14 (Juni 1969): 43-7, dan 15 (Juli 1969): 33-9.
20. Politiek Verslag S.O.K., Juni 1938, hlm. 3-7, mailr. 766 geh/38, dalam arsip kolonial Ministerie van Binnenlandse Zaken, The Hague; Reid, *The Blood of the People,* hlm. 70-3.

21. Joyce C. Lebra, *Jungle Alliance. Japan and the Indian National Army* (Singapore: Asia Pacific Press, 1971), *passim.* Fujiwara Iwaichi, *F-kikan* (Tokyo: Hara Shoba, 1966), *passim.*
22. Fujiwara, *F-kikan,* hlm. 149. Wawancara Fujiwara, 23 Agustus 1973.
23. Wawancara Said Abu Bakar.
24. Abdullah Hussain, *Terjebak (Kuala* Lumpur: Pustaka Antara, 1965), hlm. 27-41. Juga Fujiwara, *F-kikan,* hlm. 149-51; Nakamiya Goro, "Sumatora muketsu senryo no kageni" [Di balik pendudukan tidak berdarah Sumatra] dalam Shukan Yomiuri, *Nihon no himitsu sen* (Tokyo: 1956), hlm. 93-6. Saya tidak percaya kata-kata Fujiwara bahwa ia pertama kali berjumpa dengan Abu Bakar di Taiping karena ini tidak didukung oleh sumber-sumber lain.
25. Piekaar, *Atjeh en de oorlog met Japan,* hlm. 179.
26. Fujiwara, *F-kikan,* hlm. 200-1.
27. Ibid., hlm. 201-2. Hussain, *Terjebak,* hlm. 44-6, merekam sebuah pidato yang lain oleh Fujiwara, di sini terlihat secara lebih eksplisit peran sebagai bawahan yang dimainkan *F-kikan.* Kepada kelompok itu dikatakan dengan terus terang bahwa mereka adalah kolom kelima, dengan peran mengupayakan "sebuah negeri dapat ditaklukkan dengan mudah, tanpa menimbulkan korban yang banyak di antara rakyatnya".
28. Wawancara Fujiwara, 23 Agustus 1973.
29. Dikutip dalam Piekaar, *Atjeh en de oorlog met Japan,* hlm. 145.
30. Hussain, *Terjebak,* hlm. 47-85. Fujiwara, *F-kikan,* hlm. 275-6. "Verslag van Atjeh... tot 15 January 1946", dalam Spits kepada Van Mock, 26 Februari 1946, Archive Ministerie van Zaken Overzee, 21/l. Wawancara. Sumber-sumber Belanda—termasuk Piekaar, *Atjeh en de oorlog met Japan,* hlm. 61—mencakup ulama Seulimeum yang terkenal, Sjech Ibrahim, dalam kelompok anggota-anggota *F-kikan* yang datang dari Malaya dengan menyamar sebagai pengungsi. Namun, Said Abu Bakar dan Fujiwara tidak memberinya tempat dalam *F-kikan,* karena ia kembali ke Aceh sebelum pendudukan Singapura oleh Jepang.
31. Piekaar, *Atjeh en de oorlog met Japan,* hlm. 63-7 T.M.A. Panglima Polim, *Memoir (Tjatatan)* (Kutaraja: stensil, 1972), hlm. 3-5.
32. Panglima Polim (atau Polem) adalah gelar kepala *ulèëbalang sagi* XXII *mukim,* terbesar dari tiga *sagi* yang membentuk Aceh Besar. Sejak didirikan pada abad ke-17, dinasti itu selalu merupakan dinasti yang terkuat di Aceh. Ayah Muhammad Ali (wafat 1941) memimpin perlawanan terhadap Belanda pada periode 1898-1903, tetapi kemudian menjadi bagian yang sangat dihormati dari pemerintahan Belanda.
33. Piekaar, *Atjeh en de oorlog met Japan,* hlm. 77-9 dan 84-5.

34. Ibid., hlm. 142. Fujiwara, *F-kikan,* hlm. 273. Wawancara.
35. *Asia Raya* (Jakarta), 19 Oktober 2602 [1942] menerbitkan kisah yang dibuat-buat mengenai 50 utusan dari from *ulèëbalang* di Aceh. Namun, seorang tokoh dalam kisah ini, T. Muhammad dari Jeuniëb (Samalanga, Aceh Utara), mungkin benar-benar dikirim ke Penang oleh penguasa Jeuniëb; dia, menurut Piekaar, (hlm. 132-3), tiba-tiba bergabung dengan PUSA pada Februari 1942, kemungkinan besar untuk menyelamatkan diri dari Jepang. T. Njak Arif juga kadang-kadang dikatakan pernah mengirim utusan ke Penang, tetapi saya tidak menemukan bukti yang kuat.
36. Fujiwara, *F-kikan,* hlm. 273-4. Piekaar, *Azjeh en de oorlog met Yapan,* hlm. 145 dan 178. Nakamiya Gor , "Sumatora", hlm. 96.
37. Kejadian-kejadian ini dicatat dengan hati-hati dari sisi Belanda oleh Piekaar, *Atjeh en de oorlog met Japan,* hlm. 85-106 and 120-88.
38. Pandangan PUSA tampaknya dikemukakan pertama kali dalam sebuah tulisan dalam *Pewarta Deli* (Medan), 7 Mei 2602 [1942], dikutip dalam Piekaar, *Atjeh en de oorlog met Japan,* hlm. 170-6. Sebuah pandangan ekstrim *ulèëbalang,* yang tampaknya disampaikan kepada Parada Harahap, muncul dalam *Asia Raya* (Jakarta), 19 Oktober 2602. Umumnya, sumber-sumber Jepang yang diterbitkan memberikan pandangan yang berlebih-lebihan mengenai peranan PUSA, barangkali karena sumber bersama dari kisah-kisah ini, yakni sebuah tulisan yang disiapkan oleh Said Abu Bakar.
39. Piekaar, *Atjeh en de oorlog met Japan,* hlm. 177, mengutip artikel *Pewarta Deli* (21 Desember); Fujiwara, *F-kikaia,* hlm. 274-5 (pertengahan Desember); dan Nakamiya Gor , hlm. 97 (6 Maret).
40. Dalam wawancara pada 1969, Daud Beureu'eh dengan tegas menolak tuduhan bahwa PUSA yang melakukan pemberontakan 1942. Ia menjelaskan bahwa utusan-utusan PUSA ke Malaya adalah untuk berjaga-jaga terhadap kepastian bahwa Jepang akan bekerja melalui *ulèëbalang* kecuali jika PUSA memiliki hubungan yang baik dengan mereka. Ismuha, dalam *Sinar Darussalam,* 15 Juli 1969, hlm. 36, mencatat sejarah PUSA tanpa mengaku berjasa untuk pemberontakan itu, selain dari partisipasi spontan anggota-anggota kelompok pemudanya, *Pemuda* PUSA.
41. Piekaar, *Atjeh era de oorlog met Japan,* hlm. 190.
42. Ibid., hlm. 158-61.
43. Dalam satu kasus yang dicatat Piekaar, *Atjeh en de oorlog met Japan,* hlm. 138-9, aktivis PUSA yang menjadi orang kuat di distrik Lhokseumawe tampaknya dipecat karena ada laporan tidak baik dari pejabat Belanda setempat!
44. Ismuha, *Sinar Darussalam,* hlm. 37, jelas menyiratkan bahwa penangkapan Daud Beureu'eh dan lain-lain ini terjadi kaena laporan-laporan bernada bermusuhan dari orang-orang Aceh yang lain.

45. Wawancara dengan Sugondo Kartodiprodjo, 29 Juli 1972 dan Selamat Ginting, 22 Agustus 1971. Hussain, *Terjebak,* hlm. 89. Catatan-catatan Dr. Amir 14 Juni 1946, LC. 005966 di Rijksinstituut voor Oorlogsdocumentatie–yang digunakan oleh Kanahele, "The Japanese Occupation of Indonesia" (hlm. 28-9 dan 259), antara lain–mengatakan bahwa *Comite Indonesia* ini mendesak Jepang untuk menghapuskan Kesultanan. Ini disangkal dengan keras oleh Sugondo, dan tampaknya akibat dari kekacauan dengan *F-kikan* di pihak Amir.
46. Willem Brandt, *De Gele Terreur* (The Hague: Van Hoeve, 1946), hlm. 224; Tengku Luckman Sinar, "The East Coast of Sumatra under the Japanese heel", *Sumatra Research Bulletin l,* 2 (1972): 29; Inoue Tetsuro, *Bapa Djanggut* (Tokyo: Kodansha, 1953), hlm. 77.
47. Hussain, *Terjebak,* hlm. 91-4. Wawancara Abdullah Jusuf, 17 Agustus 1972. *Asia Raya,* 10 Juni 2602 [1942] melaporkan bahwa partai-partai politik Indonesia di Medan membubarkan diri sendiri pada 7 Juni, setelah ucapan terima kasih disampaikan kepada mereka atas bantuan mereka mengalahkan militer Belanda.
48. Haji Abdul Malik Karim Amrullah [Hamka], *Kenang-kenangan Hidup* (Kuala Lumpur: Pustaka Antara, 1966), hlm. 197-8.
49. Sumatora Gunseikanbu, Keimubu, "Sumatora ni okeru chian-jo no ichi-kosatsu", 27 November 2602 [1942], (dokumen distensil dalam surat-surat Tokugawa, Badan Pertahanan Jepang), hlm. 40-48. Laporan Jepang ini diterjemahkan oleh Saya Shiraishi, dan diterbitkan dalam "Rural Unrest in Sumatra, 1942: A Japanese Report", ed. Anthony Reid dan Shiraishi Saya, *Indonesia* 21 (April 1976): 115-33. Lihat juga Inoue, *Bapa Djanggut,* hlm. 54-5.
50. Inoue, *Bapa Djanggut,* hlm. 54.
51. Keimubu, "Sumatora ni okeru", hlm. 47.
52. Inoue, *Bapa Djanggut,* hlm. 55.
53. Tabel dalam Keimubu, "Sumatora ni okeru". Wawancara. Satu sumber penting dari sengketa tanah di bagian-bagian Tanah Karo yang terlibat adalah pembagian ulang tanah yang mengikuti bangunan-bangunan irigasi pada tahun 1930-an.
54. Inoue, *Bapa Djanggut,* hlm. 55.
55. Tabel dalam Keimubu, "Sumatora ni okeru".
56. Keimubu, "Sumatora ni okeru", hlm. 36-8.
57. Tengku Luckman Sinar, "The East Coast of Sumatra", hlm. 34.
58. Keimubu, "Sumatora ni okeru, hlm. 39.
59. Inoue, *Bapa Djaraggut,* hlm. 52-3.
60. Baik Inoue, *Bapa Djanggut,* hlm. 55 maupun Tengku Arifin (dikutip dalam Tengku Luckman Sinar, "The East Coast of Sumatra", hlm. 34-5) mengatakan Arifin sebagai pihak yang mengaitkan pimpinan GERINDO dengan kerusuhan-kerusuhan *aron.*

Saya telah mewawancarai sejumlah pemimpin GERINDO mengenai soal itu, namun tampaknya tidak mungkin untuk menguji benar tidaknya tuduhan ini, selain dari dorongan yang tidak diragukan lagi memang diberikan oleh GERINDO pada tahap-tahap awal gerakan Karo stimulus GERINDO pada 1938-9.

61. Tabel dalam Keimubu, "Sumatora ni okeru".
62. Inoue, *Bapa Djanggu,* hlm. 70-2.
63. *Sumatora Shinbun* (Medan), 11 Mar. 2603 [1943]. Tabel dalam Keimubu, "Sumatora ni okeru".

Bab 13

1. Penglima Sumatra, Jenderal Tanabe, menyatakan para pemuda ini mendarat di Sumatra Selatan pada awal September. Rijksinstituut voor Oorlogsdocumentatie, Indisch Collectie [selanjutnya LC.], 059351. Namun, mereka tampaknya baru muncul untuk pertama kalinya di Palembang pada 1 Oktober, di Sumatra Barat pada 30 Oktober, dan di Aceh sekitar 25 November. Kementerian Penerangan, *Republik Indonesia Propinsi Sumatera Selatan* (Jakarta: n.hlm., 1954), hlm. 41. Kementerian Penerangan, *Republik Indonesia Propinsi Sumatera Tengah* (Jakarta: n.hlm., n.d.), hlm. 94-5. *Semangat Merdeka* (Kutaradja), 27 November 1945.
2. G. McT.Kahin, *Nationalism and Revolution in Indonesia* (Ithaca: Cornell University Press, 1952); John R.W Smail, *Bandung in the Early Revolution 1945-1946: A study in the Social History of the Indonesian Revolution* (Ithaca: Cornell Modern Indonesia Project, 1964); Benedict R.O'G. Anderson, *Java in a Time of Revolution, Occupation and Resistance, 1944-1946* (Ithaca: Cornell University Press, 1972). William Frederick, *Visions and Heat* (Athens: Ohio University Press, 1989).
3. Beberapa tulisan yang bagus menyangkut wilayah-wilayah tertentu: Anthony Reid, *The Blood of the People: Revolution and the End of Traditional Rule in Northern Sumatra* (Kuala Lumpur: OUP, 1979); Audrey Kahin, *Rebellion to Integration: West Sumatra and the Indonesian Polity* (Amsterdam: Amsterdam University Press, 2000), tiga bab (Aceh, East Sumatra dan West Sumatra) dalam *Regional Dynamics of the Indonesian Revolution: Unity from Diversity,* ed. Audrey Kahin (Honolulu: University of Hawaii Press, 1985); dan sejumlah tesis tidak diterbitkan, terutama Michael van Langenberg, "National Revolution in North Sumatra: Sumatera Timur and Tapanuli, 1942-1950" (Sydney University, 1976).
4. Kesepakatan Angkatan Darat – Angkatan Laut, 26 November 1941, dalam Benda, Irikura, dan Kishi, ed., *Japanese Military Administration in Indonesia: Selected Documents* (New Haven: Yale University Southeast Asia Studies, 1965), hlm. 7. Juga ibid., hlm. 29.

5. Instruksi tentang administrasi Malaya dan Sumatra, April 1942, dalam ibid., hlm. 169.
6. Ibid., hlm. 169.
7. *Penang Shimbun,* 19 Desember 1942.
8. Interogasi Jenderal Shimura, LC.009403. Juga I.J. Brugmans, H.J. de Graaf, A.H. Joustra, dan A.G. Vromans, ed., *Nederlandsch-Indië onder Japanse Bezetting: Gegevens en documenten over de jaren 1942-1945* (Francker: Wever, 1960), hlm. 584.
9. Interogasi Jenderal Tanabe, LC.059351.
10. Waseda Daigaku, Tokyo, Okuma Memorial Social Sciences Research Center (kelompok pimpinan Nishijima), *Japanese Military Administration in Indonesia* (Washington: U.S. Dept. of Commerce, Clearing House for Federal Scientific and Technical Information, Joint Publications. Research Service, 1963) [selanjutnya Nishijima 1963], hlm. 122-4 dan 372. Benda, Irikura, dan Kishi, ed., *Japanese,* hlm. 237-40.
11. Nishijima, *Japanese Military Administration,* hlm. 171-2. *Kita-Sunnatorasinbmz* (Medan), 11 November 1943. Keseimbangan ini diperlukan terutama di Aceh, Sumatra Timur, dan Sumatra Barat, karena semua karesidenan itu mengalami ketegangan antara kedua kelompok itu pada waktu invasi Jepang.
12. Badan Sumatra Timur, dibentuk pada 28 November 1943, dikenal dengan nama BOMPA (Badan Oentoek Membantu Pertahanan Asia). Di Aceh Maibkatra (Madjelis agama Islam untuk bantuan kemakmuran Asia Timur Raja di Atjeh) dibentuk untuk para pemimpin Islam pada Maret 1943. Tapanuli memiliki Bapen (Badan Pertahanan Negeri) dan Sumatra Barat *Giyugun Koen-Kai.* Kecurigaan yang timbul di pihak semua politisi di Palembang setelah terjadi penangkapan besar-besaran pada September 1943 tampaknya mencegah pembentukan badan semacam ini di situ.
13. *Kita-Sumatora-sinbun,* 26 November 2063 [1943]. Kementerian Penerangan, *Republik Indonesia Propinsi Sumatera Utara* (Jakarta: n.hlm., 1953), hlm. 21. *Propinsi Sumatera Tengah,* hlm. 79-80. *Propinsi Sumatera Selatan,* hlm. 334. A.J. Piekaar, *Atjeh eh de oorlog met Japan* (The Hague and Bandung: W. van Hoeve, 1949), hlm. 205-6 dan 240-1.
14. Nishijima, *Japanese Military Administration,* hlm. 373-80, 642-4; Benda, Irikura, dan Kishi, ed., *Japanese,* hlm. 240-62.
15. Hadji Abdul Malik Karim Amrullah [Hamka], *Kenang-kenangan Hidup* (2nd ed., Kuala Lumpur: Pustaka Antara, 1966) hlm. 239-44. Catatan Dr. Amir, 14 Juni 1946, LC.005964.
16. Benda, Irikura, dan Kishi, ed., *Japanese,* hlm. 263.
17. Interogasi Jenderal Shimura, LC.009405.

18. Interogasi Jenderal Tanabe, LC.OS9351, dan Jenderal Hamada, LC.0593S3. Benda, Irikura, dan Kishi, ed., *Japanese,* hlm. 265-74.
19. Putusan Dewan Tertinggi Pengendalian Perang, 17 Juli 1945, dalam Benda, Irikura, dan Kishi, ed., *Japanese,* hlm. 274.
20. Lihat misalnya pidato-pidato berapi-api *Chu Sangi In* Sumatra, dalam *Kita-Sumatora-sinbun,* 27 Juni 2605 [1945].
21. *Atjeh Sinbun* (Kutaradja), 7-14 November 2604 [1944].
22. Piekaar, *Atjèh en de oorlog met Japan,* hlm. 214, dan 231-2.
23. Benedict R.O'G. Anderson, "Japan: `The Light of Asia'", dalam Josef Silverstein, ed., *Southeast Asia in World War II: Four Essays* (New Haven: Yale University Southeast Asian Studies, 1966), hlm. 17.
24. Lihat lampiran untuk susunan *Ch Sangi In.*
25. Engku Mohammad Sjafei (1901-69), anak angkat guru dan penulis Minangkabau terkemuka, Marah Soetan, bersekolah di sekolah guru Bukittinggi. Kemudian di Batavia, dan di Eropa (1922-4), ia terutama tertarik pada seni lukis dan teori pendidikan. Pada 1926 ia mendirikan Indische Nationale School (LN.S.) untuk guru-guru di Kayu Tanam, Sumatra Barat, dengan susunan mata pelajaran yang menekankan pengungkapan diri dan bidang seni dan mencoba mewakili nilai-nilai spesifik Indonesia. Dari sisi politik, Sjafei ada hubungan dengan Indische Partij/Insulinde sebelum berkunjung ke Eropa dan masuk PNI-baru Hatta setelah itu. Ia ketua *Shu Sangi Kai* Sumatra Barat (1943-5) dan *H k kai* (1945), residen pertama Republik di Sumatra Barat (1945), dan kemudian diangkat menjadi Menteri Pendidikan (Juni-Oktober 1946).
26. Teuku NjakArif (1900-46), lulusan Sekolah Guru Bukittinggi dan OSV1A di Serang, adalah Panglima Sagi XXVI Mukim di Aceh Besar. Ia berkembang menjadi tokoh nasional Aceh yang terkemuka selama periode ia duduk di Volksraad (1927-31). Meski ia menentang tanpa kompromi beberapa aspek dari pemerintahan Jepang, ia diakui pada 1943 sebagai juru bicara utama Aceh. Ia residen Republik di Aceh sampai ia diturunkan pada waktu aksi anti- *ulèëbalang* pada Desember 1945.
27. Mr. Abdul Abbas, berasal dari Mandailing, memperoleh gelar sarjana hukum di Belanda. Ia pemimpin Parindra sebelum perang di Lampung dan menjadi Ketua *Sh Sangi Kai* Lampung dan residen Republik pertama di Lampung sampai ia didaulat oleh *pemuda* pada September 1946.
28. Djamaluddin Adinegoro (1903-?) diberi nama waktu lahir nama yang pertama, tetapi menggunakan nama yang kedua. Lahir di Sawahlunto, putra seorang Kepala Distrik, ia ada hubungan keluarga dekat dengan Dr. Amir dan Muhammad Yamin. Ia sekolah kedokteran di Batavia (STOVIA) dan jurnalisme Munich (1925-9). Dari 1931 ia editor suratkabar terkemuka Indonesia di Sumatra, *Pewarta Deli,* dan selama beberapa tahun anggota *genzeenteraad* (dewan kota) Medan. Ia satu-

satunya orang Sumatra yang berpotensi duduk dalam Kabinet Indonesia yang diajukan kepada Jepang pada Maret 1942 oleh partai-partai nasionalis terdepan. Jepang mengangkatnya sebagai editor *Sumatera-sinbun* (kemudian *Kita-Sumatera -sinbun)* dan wakil ketua *Shu Sangi Kai* Sumatra Timur. *Atjeh Sinbun,* 29 Mei 2605 [1945]; Nishijima, *Japanese Military Administration,* hlm. 342.

29. Ali Hasjmy, dalam *Atjeh Sinbun,* 24 Juli 2605 [1945].
30. *Atjeh Sinbun,* 28 Juni 2605 [1945].
31. Ibid., 29 Juni, 3 Juli, dan 31 Juli 2605 [1945]; *Penang Shinbun,* 11 Juli 1945.
32. Hamka, *Kenang-kenangan Hidup,* hlm. 263.
33. *Penang Shinbun,* 11 Juli 1945.
34. *Atjeh Sinbun,* 28 Juli 2605 [1945]. Untuk keanggotaan badan ini, yang tidak pernah rapat, lihat Lampiran.
35. Misalnya ke Riau pada Mei 1945; *Atjeh Sinbun,* 31 Mei 2605 [1945]. Madjelis Islam Tinggi di Bukittinggi terus memainkan peran ini setelah proklamasi, dan berhasil menyelenggarakan konperensi Islam se-Sumatra pada Desember 1945.
36. *Atjeh Sinbun,* 29 May 2605 [1945].
37. Ibid., 19 Juli 1945; *Propinsi Sumatera Selatan,* hlm. 35. Rencananya adalah perjalanan keliling Sumatra selama dua bulan dari Selatan ke Utara, tetapi satu-satunya kota penting yang mereka capai sebelum Jepang menyerah ialah Palembang pada 1-4 Agustus, di situ kunjungan mereka menghasilkan pembentukan sebuah komite setempat penyelidikan kemerdekaan.
38. Jenderal Shimura mengatakan bahwa Sjafei, Adinegoro, dan Gani "adalah pemimpin-pemimpin Sumatra dalam semua perundingan dengan Jepang", LC.009402. Dr. Adnan Kapau Gani (1909-68), orang Minangkabau, sekolah kedokteran di Jakarta. Ia pendiri dan ketua Gerindo, partai sosialis utama (1937-41), dan sekretaris federasi politik GAPI (1941). Ia pindah dari Jakarta ke Palembang pada 1940. Jepang pada awalnya tidak percaya kepadanya, barangkali karena hubungannya dengan Amir Sjarifuddin, dan memasukkannya ke dalam penjara selama beberapa bulan pada 1943. Ia dengan cepat muncul sebagai pemimpin terkemuka setelah pernyataan Koiso, sebagai ketua *Sh Sangi Kai* Palembang, wakil *ch kan* Jepang, dan kemudian sebagai residen pertama Republik di Palembang. Ia masuk Kabinet Republik sebagai menteri ekonomi pada Oktober, 1946, dan wakil perdana menteri pada 1947.
39. Hamka, *Kenang-kenangan Hidup,* hlm. 262.
40. Dr. Mohammad Amir (1900-49), juga orang Minangkabau, bersekolah kedokteran di Batavia (STOVIA, 1918-23) dan Utrecht (1924-8), dengan spesialisasi bidang psikiatri. Sejak dari zaman mahasiswa ia seorang penulis esai yang terkemuka dan editor *Jong Sumatra* (1917-22) dan kemudian *Penindjauan.* Ia tampaknya bukan orang partai setelah kegagalan Partai Rakjat Indonesia yang moderat pada

1930, meski ia bersimpati pada Parindra. Seperti banyak cendekiawan Indonesia ia tertarik pada gerakan teosofi pada tahun 1920-an, tetapi terlibat lebih dalam di dalamnya daripada yang lain-lain, dan menikah dengan putri Ir. Fournier, teosofis terkemuka Belanda di Jawa. Ia tinggal di Medan dari 1934 dan dari 1937 menjadi dokter pribadi Sultan Langkat. Ia tampaknya dianggap bernilai oleh Jepang bagi kepentingannya karena hubungannya dengan *pergerakan* dan *kerajaan* dan karena isterinya yang Belanda menyebabkan kedudukannya rawan. Ia diangkat menjadi menteri tanpa portofolio dalam kabinet pertama Sukarno, dan wakil gubernur Sumatra dari Desember 1945 sampai ia meninggalkan Republik pada April.

41. Teuku Mohammad Hasan (born 1906), putra tertua *ulèëbalang* Pineuëng, di distrik Pidië Aceh, memperoleh gelar sarjana hukum dari Leiden (1933). Dari 1936 ia ditempatkan pada komisi yang menyelidiki desentralisasi administrasi di pulau-pulau luar, dan pada 1938 dipindahkan ke kantor baru gubernur Sumatra di Medan. Tekun belajar dan taat beragama, hubungannya dengan *ulama* Medan baik, meski ia tidak sepenuhnya dipercayai oleh PUSA Aceh. Selama pendudukan Jepang ia lebih memusatkan perhatian kepada produksi dan distribusi beras, tetapi menjadi orang kepercayaan *ch kan* Sumatra Timur pada 1944-5 dan kemudian diangkat menjadi *K seikyokuch* (kepala biro urusan petisi).

42. Dr. Amir mengatakan bahwa Yamaguchi, kepala urusan politik di Sumatra, merasa jengkel karena penunjukan anggota delegasi dilakukan di Singapura atau Jakarta tanpa meminta pendapat Angkatan Darat Ke-25: LC.005966. Di pihak lain *Propinsi Sumatera Tengah,* hlm. 83, mengatakan Angkatan Darat Ke-25 menghalang-halangi keberangkatan Sjafei untuk menghadiri PPKI.

43. Muhammad Yamin, ed., *Naskah persiapan Undang-Undang Dasar 1945* (Jakarta: Jajasan Prapantja, 1959), I, hlm. 410 dan 419. Saya di sini menterjemahkan dari teks yang tampaknya lebih teratur dalam Iwa Kusuma Sumantri, *Sedjarah Revolusi Indonesia* (Jakarta: n.hlm., 1963), hlm. 132. Peran penting Dr. Amir dalam mendorong perlunya proklamasi kemerdekaan dilakukan secepatnya dipertegas oleh Mohammad Hatta, *Sekitar Proklamasi 17 Agustus 1945* (Jakarta: Tintamas, 1969), hlm. 21-22.

44. Yamin, *Naskah persiapan, I,* hlm. 439-40, 450-3; Hatta, *Sekitar Proklamasi,* hlm. 61-2. Wawancara.

45. Koesnodiprodjo, ed., *Himpunan undang2, peraturan2, penetapan2, pemerintah Republik Indonesia, 1945* (Jakarta: Seno, 1951), hlm. 117-20.

46. Catatan Dr. Amir, 14 Juni 1946, LC.005966; *Propinsi Sumatra Selatan,* hlm. 37; Hamka, *Kenang- kenangan Hidup,* hlm. 279.

47. Tweede Kamer, Staten-Generaal, Netherlands, *Enquéte-commissie regeringsbeleid 1940-1945, militair beleid: terugkeer naar Nederlandsch- Indie* (The Hague: Staatsdrukkerij en Uitgeverijbedrijf, 1956), 8A dan B, hlm. 585, 590, 593, dan

Lampiran hlm. 126; Conrad E.L. Helfrich, *Memoires* (Amsterdam: Elsevier, 1950), II, hlm. 237-8. Baik laporan Helfrich maupun laporan *Enquête-commissie* mengatakan bahwa unit Brondgeest diterjunkan pada 15 Agustus., tetapi saya sudah mendalami laporan tertulis Brondgeest kepada Enquête-commissie mengenai hal ini.

48. Brondgeest dalam *Enquête-commissie,* hlm. 588.
49. Ibid., hlm. 588-94; Helfrich, *Memoires,* II, hlm. 237-8; Raymond Westerling, *Challenge to Terror* (London: W Kimber, 1952), hlm. 38-50. Sementara Helfrich mengatakan dan Westerling mengatakan secara tersirat bahwa kekuatan polisi dibawah 200, Brondgeest mengatakan bahwa serdadu dari Divisi India Ke-26 sejumlah 600 orang yang mendarat pada 12 Oktober "lebih sedikit daripada jumlah yang berada di bawah komando saya sekarang".
50. Helfrich, *Memoires,* II, hlm. 269, dengan tujuan merangsang perdebatan, mengatakan bahwa pasukan "sepenuhnya mengendalikan Medan dan wilayah-wilayah sekitarnya. Keadaan aman dan damai." Seorang komando Belanda yang lain, yang singgah selama empat hari di Medan pada awal Oktober dalam perjalanan menuju perwakilan Sekutu di Aceh (5 Oktober-15 November), mengetakan mengenai hal itu, "Situasi sangat tegang, tetapi dapat dikendalikan oleh kepala polisi yang sangat cekatan–Raymond Westerling." "Contact met Atjeh", *Vrij Nederland,* 19 Januari 1946.
51. Seksi Penerangan, Dokumentasi Komite Musjawarah Angkatan 45, Daerah Istimewa Atjeh, *Modal Revolusi* 45 (Kutaradja, 1960), hlm. 28; *Propinsi Sun¢atera Utara,* hlm. 39.
52. *Enquête-commissie*, hlm. 585-6; Willem Brandt, *De Gele Terreur* (The Hague: W van Hoeve, 1946), hlm. 215-9; Oostkust van Sumatra Instituut, *Kroniek,* 1941-1946 (Amsterdam, 1948), hlm. 45-6 and 52.
53. *Enquête-commissie*, hlm. 598. Mohammad Said, *Empat Belas Boelan Pendoedoekan Inggeris di Indonesia* (Medan: Kantor Berita Antara, 1946), hlm. 32.
54. *Pewarta Deli,* 6 Okt. 1945 dan wawancara. Wakil-wakil Sekutu (Inggris dan Belanda) dan Jepang diberi tempat kehormatan, sedangkan gubernur baru Republik hanya diberi tempat duduk di baris depan tempat duduk untuk umum.
55. Piekaar, *Atjèh en de oorlog met Japan,* hlm. 246-7; Brandt, *De Gele Terreur,* hlm. 208-9; Insider [S.M. Amin], *Atjeh Sepintas Lalu* (Jakarta: Archapada, 1950), hlm. 5-7; *Propinsi Sumatera Utara,* hlm. 22; Hamka, *Kenang-kenangan Hidup,* hlm. 270-7; *Propinsi Sumatera Tengah,* hlm. 255; Abdullah Hussain, *Peristiwa* (Kuala Lumpur: Pustaka Antara, 1965), hlm. 33-4.
56. Catatan Dr. Amir, 14 Juni 1946, LC.005967. Wawancara.
57. "Pamandangan Mr. Teuku M. Hasan", dalam *Amanat Satoe Tahoen Merdeka* (Padang Panjang: Penaboer, 1946), hlm. 60; *Propinsi Sumatera Utara,* hlm. 27.

58. *Propinsi Sumatera Tengah,* hlm. 84-5, 500 dan 544.
59. *Propinsi Sumatera Selatan,* hlm. 50-1, dan 189; *Semangat Merdeka,* 17, 20, dan 29 November 1945.
60. *Propinsi Sumatera Selatan,* hlm. 40.
61. *Aneta I. D. D.,* 31 Mei 1946, hlm. 21-2.
62. Interogasi Jenderal Tanabe, LC.059351.
63. Wawancara.
64. *Propinsi Sumatera Selatan,* hlm. 37-41.
65. *Propinsi Sumatera Tengah,* hlm. 87.
66. Anderson, *Java in a Time of Revolution, Occupation and Resistance,* hlm. 1-35.
67. *Kita-Sumatora-sinbun,* 18 and 25 Nov. 2603 [1943]; Piekaar, *Atjèh en de oorlog met Japan,* hlm. 219 dan 238; *Propinsi Sumatera Tengah,* hlm. 79-80. Wawancara. Aceh dan Sumatra Barat adalah karesidenan-karesidenan pertama yang membentuk *Giyugun,* karesidenan-karesidenan lain menyusul pada awal 1944.
68. *Modal Revolusi* 45, hlm. 64-5.
69. *Propinsi Sumatera Tengah,* hlm. 87-9 dan 542-9; *Propinsi Sumatera Utara,* hlm. 29; *Modal Revolusi* 45, hlm. 41-2, 54-6, 65-6, 72-3. Wawancara.
70. *Propinsi Sumatera Utara,* hlm. 29-30; *Mengenangkan Hari Proklamasi* (Medan,1956); hlm. 84-5; M.K. Djusni dan Aminuddin Nasir, "Kenang-kenangan Repolusi dikota Medan", (ketikan); Mohammad Said dalam *Dobrak* (Medan), 25 Agustus 1970. Wawancara. Terima kasih saya ucapkan pada Michael van Langenberg atas sumber tulisan ketikan.
71. Untuk rincian mengenai residen-residen pertama, lihat Lampiran.
72. Lihat terutama Hussain, *Peristiwa,* hlm. 71.
73. *Republik. Indonesia Propinsi Sunzatera Tengah,* hlm. 542-9; *Republik Indonesia Propinsi Sumatera Selatan,* hlm. 49-50.
74. S. van der Harst, *Overzicht van de bestuurshervorming in de Buitengewesten van Nederlandsch-Indie', in het bijzonder op Sumatra* (Utrecht: A. Oosthoek, 1945), hlm. 46.
75. Misalnya *Kita-Sumatora-sinbun,* 27 Juni 2605 [1945].
76. Dr. Amir, "Nieuw Sumatra", *De Opdracht,* Oktober 1946, hlm. 9. Setelah penyerahan kedaulatan Mohammad Sjafei juga menjadi salah satu dari pengeritik keras sentralisme Jawa. G.S. Maryanov, *Decentralization in Indonesia as a Political Problem* (Ithaca: Cornell Modern Indonesia Project, 1958), hlm. 41.
77. Directeur-Generaal voor Algemene Zaken kepada Lt. Gouverneur-Generaal, 27 Februari 1947 (Bundel 22/6 di arsip tentang Indonesia pasca-perang di Den Haag).
78. Sumber: *Kita-Sumatora-sinbun,* 27 June 1945; *Atjeh Sinbun,* 19 Mei 1945.
79. *Atjeh Sinbun,* 28 July 1945.

Bab 14

1. Untuk analisis yang panjang lebar mengenai ini, lihat karya klasik Crane Brinton, *The Anatomy of Revolution* (London: G. Allen & Unwin, 1953).
2. Benedict R.O'G. Anderson, *Java, in a Time of Revolution, Occupation, and Resistance,* 1944-1946 (Ithaca: Cornell University Press, 1972), hlm. 409.
3. Reid, *The Blood of the People,* hlm. 185-211. Abdullah Arif, "The Affair of the Tjumbok Traitors" (terjemahan diedit Anthony Reid), *Review of Indonesian and Malayan Affairs* 4/5 (1972): 29-65.
4. Orang dalam [nama samaran S.M. Amin], *Atjeh Sepintas Lalu* (Jakarta: Archapada, 1950), hlm. 22.
5. Untuk Nathar, dan iparnya Karim MS, komunis Sumatra paling terkemuka, lihat Reid, *The Blood of the People, hlm.* 79-80, 154-5, 173-4, 208-9.
6. *Atjeh Sepintas Lalu,* 1950, hlm. 23; Muhammad Radjab, *Tjatatan di Sumatera* (Jakarta, 1949), hlm. 47-50. Laporan-laporan intelijen Belanda 1947-7 mengakui ketertiban serupa, dan menjadi dasar bagi keputusan Belanda untuk tidak mengusik Aceh pada 1947.
7. Nazaruddin Sjamsuddin, "The Course of the National Revolution in Atjeh, 1945-1949", tesis MA (Monash University, 1974), hlm. 175.
8. *Soeloeh Merdeka,* 17 Februari 1946.
9. Reid, *The Blood of the People,* hlm. 218-33.
10. *Soeloeh Merdeka,* 7 Maret 1946.
11. Misalnya, *Merdeka,* 1 Juni 1946; *Soeloeh Merdeka,* 20 dan 30 April 1946.
12. Reid, *The Blood of the People,* hlm. 233-45.
13. Radjab, *Tjatatan di Sumatera,* hlm. 30.
14. Ibid., hlm. 24. Reid, *The Blood of the People,* hlm. 255-6.
15. Audrey Kahin, "Struggle for Independence: West Sumatra in the Indonesian National Revolution, 1945-1950", disertasi PhD (Cornell University, 1979), hlm. 136-8, 178-89; Audrey Kahin, "West Sumatra: Outpost of the Republic", dalam *Regional Dynamics of the Indonesian Revolution: Unity from Diversity,* ed. Audrey Kahin (Honolulu: University of Hawaii Press, 1985), hlm. 156-7.
16. Soeara Proletar (nama samaran), *Pembongkaran Tiga Rahasia Penting I* (Silungkang, 1946), hlm. 14-20.
17. Kahin, "West Sumatra", hlm. 157; Anthony Reid, "The Revolution in Regional Perspective", dalam *The Indonesian Revolution: Papers of the Conference held in Utrecht, 17-20 June 1986,* ed. J. van Goor (Utrecht: Instituut voor Geschiedenis der Riksuniversiteit te Utrecht, 1986), hlm. 191-3.

Bab 15

1. Versi terdahulu bab ini disajikan dalam sebuah kuliah umum di Australian Defence Force Academy, UNSW, Canberra, pada 21 November 2002.
2. Katherine McGregor, "Claiming History: Military Representations of the Indonesian Past in Museums, Monuments and other Sources of Official History from Late Guided Democracy to the New Order", disertasi PhD tidak diterbitkan (Melbourne University, 2002).
3. Survai singkat terbaik sekarang mengenai tulisan ini terdapat dalam Peter G. Riddell, *Islam and the Malay-Indonesian World: Transmission and Response* (Honolulu: University of Hawaii Press, 2001), hlm. 101-38.
4. "Atjeher" [nama samaran H.M. Zainuddin], "Soal Bahasa dalam sekolah desa di Atjeh", *Penjedar III,* 3 (18 Jan. 1940): 47-8; Memorie van Overgave [selanjutnya Mv0] A. Ph. Van Aken, Gouverneur Atjeh, Mar. 1936, hlm. 137-8, dalam Mailr. 504x/36.
5. *Atjeh Verslag* C. Snouck Hurgronje, 1893, seperti diterjemahkan dalam Reid, *The Contest,* hlm. 269.
6. Reid, *The Contest,* hlm. 296.
7. Mv0 Van Aken, 1936, hlm. 1.
8. Reid, *The Blood of the People,* hlm. 9-11.
9. Penelitian terbaik mengenai gejala ini adalah Ibrahim Alfian, *Perang di Jalan Allah: Perang Aceh* 1873-1912 (Jakarta: Sinar Harapan, 1987), hlm. 105-136. Lihat juga A. Hasjmy, *Hikayat Perang Sabi Mendjiwai Perang Atjeh lawan Belanda*(Banda Atjeh: Pustaka Faraby, 1971); James Siegel, *The Rope of God* (Berkeley: University of California Press, 1969), hlm. 75-7.
10. Reid, *The Blood of the People,* hlm. 185-6.
11. A.J. Piekaar, *Atjeh en de oorlog met Japan,* hlm. 14-6; Reid, *The Blood of the People,* hlm. 28-9.
12. Piagam Batee Kureng dimuat kembali dalam S.M. Amin, *Sekitar Peristiwa Berdarah di Atjeh* (Jakarta: Soeroengan, 1956), hlm. 293-5.
13. Sultan Mahmud dari Aceh kepada Gubernur Straits Settlements, 4 Safar 1290H (3 April 1873)—terjemahan resmi dalam Anthony Reid, "Indonesian Diplomacy. A Documentary Study of Atjehnese Foreign Policy in the Reign of Sultan Mahmud, 1870-1874", *JMBRAS* 42, 2 (1969): 74-114.
14. Petisi kepada Turki dari kaum Bangsawan Aceh, n.d. [1868].
15. Surat dari Teungku Syech Saman di Tiro kepada *ulëëbalang* di zona pendudukan Belanda, September 1885, dalam H.C. Zentgraaff, *Atjeh* (Batavia, n.d. [1938]), hlm. 17 (terjemahan saya).

16. Surat dari Teungku Syech Saman di Tiro kepada Residen K. F.H. van Langen, September 1885, dalam Zentgraaff, hlm. 18-9 (terjemahan saya).
17. Kesaksian Nja' Gam, 23 April: 1921, dalam Mailrapport 1259 x/21; ARA.
18. Mv0 van Aken, 1936, hlm. 135; *Atlas van Tropisch Nederland* (1938), hlm. 9.
19. Anon., "Islam dan Nationalisme", dalam *Soeara Atjeh,* 1 April 1930.
20. Ini jelas menjadi lebih mudah berkat pilihan hati-hati Hatta atas seorang Aceh sebagai gubernur Sumatra pertama Republik.
21. "Maklumat ulama seluruh Atjeh", 15 Oktober 1945, dalam *Modal Revolusi '45,* hlm. 61.
22. Hasan Muhammad Tiro, *Perang Atjeh, 1873-1927M,* stensil, Jogjakarta, April 1948.
23. Hasan di Tiro, *The Price of Freedom,* hlm. 2.
24. H.C. Zentgraaff, *Atjeh* (Batavia: De Unie, n.d. [1938]); H.C. Zentgraaff dan WA. van Goudoever, *Sumatraantjes* (Batavia: Java-Bode, n.d. [1936?]); Col. M.H. du Croo, *Marechaussee in Atjeh: Herinneringen en ervarngen van den eersten Luitenant en Kapitein van het Korps Marechaussee van Atjeh en onderhoorigheden, H.Y. Schmidt, van 1902 tot 1918* (Maastricht: Oost en West, 1943).
25. Hasan Muhammad Tiro, *Perang Atjeh.* Monograf stensilan ini juga berisi iklan mengenai tulisan oleh Hasan Tiro pada waktu masih remaja pada 1948, sebuah terjemahan buku teks berbahasa Arab mengenai hukum Islam (fikh), karangan professor Abd al-Wahhab Khallaf dari Cairo, dengan judul dalam bahasa Indonesia berbunyi *Dasar-Dasar Negara Islam.*
26. M. Isa Sulaiman, *Sejarah Aceh: Sebuah Gugatan Terhadap Tradisi* (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1997), hlm. 328n.
27. Ibid., hlm. 328-9.
28. Hasan Muhammad Tiro, *Demokrasi untuk Indonesia* (n.hlm., Penerbit Seulawah Aceh, 1958).
29. Meski tidak mudah mencari ini di perpustakaan, tulisan-tulisannya di New York yang dikutip dalam Tengku Hasan di Tiro, *The Price of Freedom: the unfinished diary of Tengku Hasan di Tiro (*n.hlm., State of Acheh Sumatra, 1982), hlm. 11, mencakup *The Political Future of the Malay Archipelago* (1965), *Acheh in World History* (1968) dan *One Hundred Years Anniversary of the Battle of Bandar Acheh* (Apr. 1973), tentang ulang tahun mundurnya Belanda dari Aceh setelah mengalami kekalahan yang pertama.
30. Disertasi saya dengan fokus sejarah diplomasi Perang Aceh-Belanda terbit pada 1969 dengan judul *The Contest for North Sumatra: Atjeh, the Netherlands, and Britain 1858-1898* (Kuala Lumpur: OUP, 1969).
31. Sebagai reaksinya menentang bahasa Indonesia dan tata ejaannya, Hasan Tiro lebih suka menggunakan ejaan bahasa Inggris "ch".

32. Hasan di Tiro, *The Price of Freedom,* hlm. 62. Sumber-sumber yang dekat dengan Hasan Tiro menyatakan ia juga bertemu dengan Daud Beureu'eh pada 1973 untuk membicarakan bagaimana menghidupkan kembali gagasan kemerdekaan untuk Aceh.
33. Ibid., hlm. 3-4.
34. The Declaration dalam ibid., hlm. 15-7.
35. Ibid., hlm. 53.
36. Ibid., hlm. 50-1.
37. Tengku Hasan M. di Tiro, *The Drama of Achehnese History; 1873-1978. A Play in VIII Acts.* Kementerian Pendidikan, Negara Acheh, 1979 [stensil]
38. Informasi ini berdasarkan wawancara pada waktu kunjungan saya ke Banda Aceh pada Januari 2000.

Kosakata

[Kata-kata Melayu/Indonesia kecuali jika diberi keterangan sebagai kata bahasa Aceh (Ac); bahasa Cina (Ch); bahasa Belanda (B)]

aron (Karo)	koperasi pertanian; gerakan radikal pendudukan tanah
badan perjuangan	kekuatan bersenjata yang dijadikan alat politik dalam revolusi
biduanda	penyanyi istana
cultuurgebied (B)	distrik perkebunan (Sumatra Timur)
dalam	istana, benteng kerajaan
Darul Islam	Rumah Islam; gerakan perlawanan bagi negara Islam
daulat	kedaulatan; sebagai kata kerja revolusioner, menerapkan kedaulatan rakyat pada seorang pejabat
hamba raja	budak istana atau abdi, sering juga pengawal
hikayat	syair kepahlawan Aceh
hulubalang	panglima perang - lihat *ulèëbalang*
imam	pemimpin sembahyang Jumat, di Aceh kepala *mukim*
kadi	pejabat atau hakim agama
kerkun	penulis
khehtau (Ch)	mandor, kepala pekerja
kongsi (Ch)	rekanan, [Cina] perusahaan
Laksamana	di Ndjong (Aceh) gelar *ulèëbalang*
laukheh (Ch)	pekerja berpengalama, disewa untuk kontrak kedua kalinya
Maharaja	raja; di Lhokseumawe (Aceh) gelar *ulèëbalang*
mandi Safar	upacara mandi agama pada bulan Safar
Mantroë (Ac)	menteri; cf Melayu Mantri
mujahidin	prajurit Islam
mukim	unit masyarakat; di Aceh unit wilayah terdiri dari beberapa desa
nagari	wilayah Minangkabau di bawah Belanda

orangkaya	pedagang-bangsawan
Persatuan Perjuangan	front perjuangan (koalisi radikal pendukung Tan Malaka)
sagi	distrik Aceh Besar
sama rasa sama rata	persamaan dan persaudaraan
senenan (Jawa)	pertandingan gulat mingguan setiap Senin
sinkheh (Ch)	pendatang baru
suasa	emas campur perunggu
syahbandar	pejabat pelabuhan
tindal	mandor
ulama (pl. Ar. '*alim*)	cendekiawan Islam, guru agama
ulèëbalang (Ac)	panglima perang (Melayu *Hulubalang*); kepala wilayah Aceh

Indeks